

Pengantar:
Prof. Dr. Iswandi Syahputra, S.Ag., M.Si
Dr. Mochamad Sodik, S.Sos., M.Si

Editor:
Dr. Muryanti, M.A

dinamika masyarakat
di era pandemi



DINAMIKA MASYARAKAT DI ERA PANDEMI

Editor: Dr. Muryanti, M.A

Penata Sampul: Nur Hadi Prabowo

Penata Isi: Lisa Aditia Putra

Manggar Media

Munggur RT 06, No. 16, Srimartani Piyungan Bantul,
Yogyakarta 55792

WA: +6285694837418

E-mail: mediamanggar@gmail.com

Website: www.manggarmedia.com

Laboratorium Sosiologi,

Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora,

UIN Sunan Kalijaga

Jl. Marsda Adisucipto, Papringan, Caturtunggal,

Kec. Depok, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa

Yogyakarta 55281

Email: isoshum@uin-suka.ac.id

Instagram: [@labsos_uinsuka](https://www.instagram.com/labsos_uinsuka)

Yogyakarta: Manggar Media, 2020

x+355 hlm, 15,5 x 23 cm

ISBN: 978-623-94594-0-6

Cetakan Pertama: Oktober 2020

Pengantar Editor

Alhamdulillah kumpulan tulisan tentang masyarakat di era pandemi ini dapat selesai dan diterbitkan menjadi sebuah buku yang bisa dinikmati oleh pembaca. Proses panjang dalam penulisan diawali dari mulai munculnya pandemi. Tidak mudah untuk menyajikan kumpulan tulisan ini, mengingat penulis menjadi aktor yang terlibat didalamnya. Para penulis berusaha merefleksikannya dalam sebuah tulisan yang bisa dikaji secara ilmiah.

Datangnya pandemi yang tidak terduga sebelumnya, tentu mengejutkan semua orang dan menyebabkan terjadinya perubahan revolusioner. Perubahan ini melanda semua sektor kehidupan, baik sosial, ekonomi, pendidikan, dan politik. Sampai detik buku ini ditulis, semua aktor (negara, masyarakat dan semua warga di posisi apa pun dan bagaimana pun) masih berjuang untuk menyesuaikan dengan perubahan yang disebabkan oleh virus Covid-19 ini.

Terkait dengan terbitnya buku ini, kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada penulis artikel dalam buku ini, yang berjuang untuk menyelesaikan tulisannya pada situasi dirinya menyesuaikan segala perubahan yang disebabkan oleh pandemi ini. Tulisan Bapak/ibu dan mahasiswa semua merupakan bagian penting sebagai sebuah refleksi dari arus perubahan yang terjadi. Tulisan-tulisan yang tertulis dalam buku ini merupakan catatan refleksi yang benar-benar dialami oleh penulis sebagai bagian dari siapa pun yang terdampak pandemi.

Harapan terbesar kami, apa yang kami tulis dalam buku ini bisa menjadi rangkaian *puzzle* besar tentang situasi pandemi yang bisa kita rangkai dengan fenomena lain yang berserakan. Kemudian dapat kita refleksikan bahwa pandemi ini sebenarnya merupakan perjalanan sejarah manusia yang mereka rangkai sendiri, oleh tindakan atau perilaku kita. Pandemi bukanlah sebuah

fenomena tunggal yang berdiri sendiri. Sebaliknya pandemi ini merupakan siklus perjalanan hidup *homo sapiens* sebagai sesuatu hal yang harus diadaptasi. Tidak ada gading yang tidak retak, buku ini banyak sekali kekurangan yang belum dituliskan. Mengingat riset yang dilakukan sebagian merupakan mini riset. Harapan kami, buku yang masih banyak kekurangan ini bisa diterima oleh pembaca menjadi sebuah catatan kecil perubahan sosial yang bersifat keniscayaan.

Yogyakarta, 12 Oktober 2020

Editor

Dr. Muryanti, MA

Pengantar Wakil Rektor Bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga UIN Sunan Kalijaga

Prof. Dr. Iswandi Syahputra, S.Ag., M.Si.

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

A*lhamdulillahirobbil'alamin.* Puji syukur kehadiran Allah SWT, telah terbit salah satu karya dari Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora (FISHUM) UIN Sunan Kalijaga dengan judul **“Dinamika Masyarakat di Era Pandemi”**. Pertama, saya mengucapkan selamat kepada FISHUM dalam hal ini Dr. Mochamad Sodik, S.Sos., M.Si. selaku Dekan FISHUM yang terus semangat mendukung civitas akademika FISHUM terus berkarya. FISHUM Muda, FISHUM Terkemuka tidak hanya tagline yang diucapkan tapi juga diimplementasikan. Karya ini menjadi bukti bahwa FISHUM mampu berkarya secara kolaboratif yakni antara dosen dengan mahasiswa.

Karya ini merupakan salah satu potret perubahan sosial yang terjadi. Pandemi Covid-19 benar-benar membawa kita semua kepada kenormalan-kenormalan yang baru. Secara sosiologis, dinamika masyarakat yang sangat kompleks dan perubahan yang terjadi misalnya dalam dunia pendidikan serta perubahan terhadap ritual keagamaan terdokumentasi dalam karya ini. Selain dua hal tersebut, soal pola komunikasi dan penyampaian informasi juga menjadi hal yang menarik di era pandemi ini. Keterbukaan informasi, penggunaan media sosial, *citizen journalism*, serta bagaimana literasi media menjadi hal yang hari ini disoroti.

Keterbukaan dan kebebasan menyampaikan informasi memang menjadi keunggulan tersendiri di era pandemi ini. Bagaimana tidak? Kegiatan masyarakat yang semula dilakukan secara tatap muka (*offline*) tiba-tiba berubah menjadi online atau dilakukan secara daring. Dunia maya seperti

internet dengan berbagai platform media sosial yang ditawarkan menjadi pusat interaksi manusia saat ini. Tidak melihat latar belakang, pendidikan, suku, bangsa, atau tujuan politik apapun. Namun akibatnya, keunggulan ini melahirkan fenomena banjir informasi. Banyak informasi *hoax* (informasi yang menyimpang) yang terjadi dikalangan masyarakat dan lain sebagainya. Tentu beberapa contoh kasus soal ini juga dibahas dalam buku ini.

Akhirnya sekali lagi saya mengucapkan selamat atas terbitnya buku ini. Tentu saya berharap akan lahir lebih banyak lagi karya-karya yang kontekstual. Saya juga berharap, karya ini mampu menginspirasi bagi prodi dan jurusan lain di semua Fakultas di UIN Sunan Kalijaga. Terima Kasih.

Wassalamu'alaikum. Wr. Wb.

Pengantar Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora UIN Sunan Kalijaga

Dr. Mochamad Sodik, S.Sos., M.Si

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

*A*lhamdulillah. Puji syukur kehadirat Allah SWT, atas berkat rahmatnya satu karya Bunga Rampai dengan judul **“Dinamika Masyarakat di Era Pandemi”** telah terbit. Satu lagi karya civitas akademika Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora (FISHUM) yang sangat luar biasa. Saya ucapkan selamat khususnya untuk Prodi Sosiologi dan Dr. Muryanti, M.A. selaku Editor sekaligus saat buku ini terbit beliau juga sebagai Ketua Prodi Sosiologi FISHUM UIN Sunan Kalijaga. Di era pandemi, dengan segala keterbatasan akses, Prodi Sosiologi yang tergabung dalam tim tetap bisa menghasilkan karya yang kontekstual, yakni topik soal pandemi dan bagaimana masyarakat menghadapinya.

Pandemi Covid-19 memang menguji kita semua. Tidak hanya dunia kesehatan, adanya pandemi Covid-19 juga menguji dunia pendidikan, ekonomi, bahkan sosial. Saya melihat ada beberapa tulisan yang cukup menarik dari buku ini, misalnya soal penerapan protokol kesehatan dan perturan baru yang harus ditaati dan diimplementasikan oleh masyarakat. Fenomena ini kemudian kita sebut sebagai Era New Normal. Terjadi dinamika yang luar biasa di tengah-tengah masyarakat kita pasca adanya pandemi Covid-19.

Ada beberapa poin kunci yang bisa kita lihat, *pertama* soal penerapan protokol kesehatan sebagai bagian dari New Normal. *Kedua*, soal informasi baik informasi dari pemerintah kepada masyarakat, media televisi maupun dari masyarakat kepada masyarakat melalui media sosial. Keterbukaan informasi menjadi tantangan tersendiri bagi kita semua, karena era new

normal mengharuskan kegiatan-kegiatan yang semula offline menjadi online (daring). Adanya informasi yang menyimpang hingga soal kebocoran data juga terjadi.

Ketiga, yang tidak kalah penting dibahas dalam buku ini ialah soal bagaimana relasi masyarakat secara kolektif dan diri sebagai individu dalam beragama. Tentunya berkerumun dan melaksanakan ritual keagamaan secara kelompok sudah menjadi habit (kebiasaan) masyarakat kita. Tantangan ekspresi keagamaan masyarakat dalam hal ini benar-benar di uji. *Keempat*, bagaimana tulisan dan mini riset dalam tulisan ini menjadi hasil karya akademik yang reflektif yang mampu membawa kita semua membaca fenomena sosial pasca adanya Covid-19. Dinamika-dinamika ini yang kemudian bisa kita petakan, apa yang menjadi tantangan kita saat ini? Adaptasi dengan cepat dan tepat menjadi kunci kita bangkit dan melawan pandemi Covid-19.

Sekali lagi, saya mengucapkan selamat atas terbitnya buku bunga rampai ini. Selamat kepada semua penulis, semoga, civitas akademika FISHUM terus produktif berkarya. FISHUM Muda, FISHUM Terkemuka. Kita suka UIN Suka, UIN Suka untuk Bangsa, UIN Suka Mendunia. Terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Daftar Isi

Kata Pengantar | iii

Daftar Isi | ix

Masyarakat Resiko di Pedesaan: antara Ketidaktaatan Pada Protokol Kesehatan dan Solidaritas yang Terbangun | 1

Muryanti

Dinamika Daring *Learning* di Masa Pandemi Covid-19 Dalam Perspektif Pemerintah, Pendidik, Peserta Didik, dan Orang Tua | 23

Sabarudin

Merawat Mentalitas Pembangunan di Masa Pandemi | 49

Agus Saputro

Perilaku Tatanan Kesehatan, Moralitas, Kerja dan Keberagaman di Era Pandemi Covid-19 | 63

Masdjuri

Muslim Jawa Berdamai Dengan Corona:

Memahami Beragam Ekspresi Keagamaan Masyarakat Pinggiran

Merespon Pandemi | 71

Achmad Zainal Arifin

***Mbuh Piye Carane*: Inovasi Ugahari Oleh Desa dalam Merespon Pandemi Covid-19 | 93**

Ambar Sari Dewi

Pengamalan Agama di Tengah Pandemi Covid-19: Telaah Kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar/PSBB Perspektif *Ahlussunnah*

***Wal-Jama'ah An-Nahdliyyah*) | 115**

Badrin

Facebook Sarang *Hoax* Selama Pandemi Covid-19 | 133

Nur Hadi Prabawa

Meningkatnya Kejahatan Pencurian Kabupaten Klaten di Masa Pandemi Covid-19 | 155

Nurul Fitriana

Munculnya Stigma Masyarakat Kabupaten Semarang Jawa Tengah Sebagai Akibat *Priming* Pemberitaan Covid-19 di Facebook | 173

Misfalah

Pengaruh Pandemi Covid-19 Terhadap Komunikasi dan Interaksi Sosial Pendidikan di MAN 2 Yogyakarta | 199

Alfina Hawawi

Kebijakan Larangan Mudik di Tengah Pandemi Covid-19 Sebagai Alat Untuk Menertibkan Masyarakat | 227

Nurhanny Agusti

Fenomena Covid-19 Sebagai Pendorong Terjadinya Perubahan Sosial Pendidikan | 243

Nur Kholisoh

Perlunya *Social Media Distancing* Dalam Menghadapi Covid-19 | 265

Regina Cahyanti

Peran MCCC Sebagai Lembaga Sosial di Era Pandemi Covid-19 | 295

Ramadhan Widiatoro

Peningkatan Penggunaan Media Sosial Pada Aktivitas Mahasiswa dan Pelajar di Yogyakarta | 327

Nurma Rafiki

Penanganan Covid-19 Oleh Pemerintah dan Masyarakat | 345

Laisa Matania Firizki

**Masyarakat Resiko di Pedesaan: antara
Ketidaktaatan pada Protokol Kesehatan
dan Solidaritas yang Terbangun**

Muryanti

*Prodi Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan
Humaniora UIN Sunan Kalijaga
Email: newsyant1@gmail.com*

Pendahuluan

Dusun R merupakan salah satu dusun di Kecamatan Prambanan, Yogyakarta yang berbatasan dengan Kabupaten Klaten. Dibandingkan dengan dusun lain di desa yang sama, dusun ini termasuk kategori luas, yang terbagi menjadi 7 RT dengan rata-rata jumlah penduduk per RT kurang lebih 150 jiwa yang terbagi menjadi semua umur. Mengingat lokasinya yang terletak paling timur yang berbatasan dengan bukit-bukit kapur menjadikan wilayah ini tidak menjadi lalulintas yang ramai sebagai penghubung antar dusun. Warga masyarakat tidak banyak berinteraksi dengan masyarakat lain secara luas. Interaksi sosial hanya seputar dengan tetangga dusun saja, mengingat untuk melakukan interaksi dengan warga masyarakat dalam satu kecamatan diperlukan berbagai macam aktivitas yang bersifat regional dengan jangkauan yang cukup luas.

Layaknya suasana pedesaan, Dusun R dilingkupi oleh area persawahan yang asri. Mengingat letaknya yang berada dibawah bukit kapur yang subur dan sumur-sumur sebagai sumber air banyak menyimpan air, yang dimanfaatkan untuk keperluan sehari-hari warga masyarakat. Air sumur dimanfaatkan untuk mengairi sawah pada musim kemarau karena irigasi teknis tidak mampu mengairi sawah petani di musim kemarau yang kering. Pada musim kemarau yang panjang konflik antara petani dan warga dalam penggunaan air pun sering tidak terhindarkan. Mengingat adanya intensitas penggunaan air yang tinggi di sawah menyebabkan sumur-sumur rumah-rumah warga menjadi kering karena tersedot ke sawah.

Lingkungan geografis dusun yang dikelilingi sawah dan perbukitan memberikan gambaran bahwa masyarakat Dusun R mayoritas bekerja sebagai petani (memiliki lahan) atau pun buruh tani (tidak memiliki lahan, yang dimiliki hanya tenaga kerja saja) (Muryanti, 2018). Mereka ada yang memiliki sawah sendiri, akan tetapi tidak sedikit warga yang menggarap sawah milik orang lain atau biasa dikenal sebagai petani penggarap atau buruh tani. Baik

petani pemilik sawah atau pun petani penggarap tidak memiliki garapan sawah yang luas, rata-rata hanya 200 m², 300 m² sampai 500 m². Hanya beberapa petani saja yang memiliki atau menggarap sawah lebih dari 500 m². Kondisi pertanian di Dusun R tidak jauh berbeda dengan pertanian desa lain di Jawa, yaitu pertanian subsisten. Pertanian yang dimaksud yaitu pertanian yang hanya mampu untuk mencukupi kebutuhan makan atau pokok saja, tidak untuk kebutuhan yang lain. Pada suatu waktu terkadang untuk mencukupi kebutuhan pokok saja masih kurang, mereka harus menutupinya dengan bekerja serabutan (Scott 1976).

Marx mengatakan bahwa basis struktur masyarakat menentukan supra struktur yang berada di masyarakat tersebut. Mata pencaharian masyarakat yang sebagian besar petani akan menentukan bagaimana bentuk dan pola-pola interaksi sosial dan politik yang berkembang pada masyarakat tersebut. Menurut Durkheim, masyarakat desa yang mayoritas warganya bekerja sebagai petani memiliki solidaritas mekanik, yaitu sebuah solidaritas yang berisi kepatuhan kepada kekuatan tunggal yang bersifat otoritatif (Johnson 1986). Hal tersebut disebabkan mayoritas pekerjaan masyarakat yang hampir sama yaitu petani atau buruh tani yang memiliki pola tanam di sawah dan pola interaksi di rumah yang hampir sama sehingga solidaritas yang otoritatif menuju keseragaman lebih mendominasi dalam masyarakat dibandingkan dengan solidaritas yang berbasiskan pembagian kerja dalam masyarakat (solidaritas organik).

Kehidupan sosial dan politik di Dusun R nampaknya tidak jauh berbeda dengan analisis Marx dan Durkheim tersebut. Pola kepemimpinan yang diterapkan sangat bersifat mekanik. Ditandai dengan bentuk komunikasi yang diterapkan oleh Pak Dukuh selaku pemimpin di Dusun R yang lebih bersifat satu arah atau kurang menerima masukan yang diberikan oleh warga masyarakat dalam memutuskan setiap persoalan yang muncul, baik pada permasalahan agama, sosial atau pun kesejahteraan warga. Segala permasalahan di dusun diputuskan oleh Pak Dukuh dan beberapa warga yang menjadi kepercayaannya, tanpa memberikan kesempatan sedikit pun kepada warga masyarakat yang lain untuk memberikan suara. Terlebih warga yang kurang disukainya karena mereka tidak setuju dengan kebijakan Pak Dukuh. Peristiwa yang begitu melekat di benak warga, terkait dengan seringnya Pak Dukuh meminta bantuan warga untuk kegiatan keagamaan berupa nasi bungkus, minuman atau snack yang frekuensinya dalam waktu 1 bulan lebih dari sekali dengan alasan untuk kegiatan keagamaan yang bersifat ibadah. Sisi yang lain, jika ada infak dan shodaqoh yang terkumpul di masjid,

dalam penggunaannya tidak diinformasikan secara transparan kepada warga, sampai-sampai warga masyarakat mengatakan bahwa masjid Al Falah di Dusun R merupakan masjid milik Pak Dukuh karena segalanya dikendalikan oleh Pak Dukuh. Hal lain, dalam pemberian bantuan, Pak Dukuh sangat tidak transparan terhadap warga yang diberi bantuan. Biasanya warga yang disukai dan mendukungnya diutamakan. Walaupun kondisi ekonominya miskin, jika tidak disukai oleh Pak Dukuh pasti kurang diperhatikan dan jangan harap mendapatkan bantuan, jeritan warga masyarakat di Dusun R.

Sisi yang lain, dalam perkembangannya banyak warga Dusun R yang mulai tidak bekerja sebagai petani. Banyak yang bekerja di luar sektor pertanian di Kota Yogyakarta dengan berbagai macam pekerjaan, diantaranya: penjaga toko, *cleaning servis*, usaha bengkel motor, polisi, buka warung makan di sekolah, buruh bangunan, penjaga sekolah, tukang kebun, sopir travel/ ojek online, aneka macam pabrik (wig, sarung tangan, perakitan motor), pekerja rumah tangga, guru SD/PAUD, pekerja di POM Bensin atau pekerjaan serabutan. Secara umum, warga yang bekerja di luar Dusun R merupakan warga usia muda dan selalu mendapatkan pandangan dari orang tuanya yang bekerja sebagai petani untuk tidak menjadi petani, akan tetapi sebaiknya menjadi pegawai, sehingga anak muda enggan untuk bertani. Mereka memilih bekerja di luar Dusun R yang disertai dengan membawa nilai-nilai baru ke Dusun R yang berada di lereng bukit. Nilai-nilai baru tersebut berbeda dengan nilai lama yang masih diikuti dan dipertahankan oleh masyarakat generasi tua di Dusun R. Terkait dengan keterbukaan informasi, pembagian kerja dalam masyarakat (menerima perbedaan pendapat dan pekerjaan orang lain serta mampu menjadikan orang lain sebagai tim kerja). Implikasinya terdapat dua pandangan yang berbeda di Dusun R ini, antara nilai lama yang tetap dipertahankan dengan nilai-nilai baru yang tidak bisa di bendung. Warga lebih memilih dengan nilai yang mereka yakini sendiri dibandingkan dengan mengikuti arus utama (kepemimpinan Pak Dukuh) yang ada di dusun. Toh nilai utama hanya sebuah formalitas yang dipertahankan untuk kepentingan pihak-pihak tertentu yang diuntungkan. Semuanya berjalan sendiri-sendiri dan saling beriringan, walaupun rentan konflik kepentingan. Mengingat warga sudah bosan dengan gaya kepemimpinan Pak Dukuh, ketika warga diperintahkan untuk kerja bakti atau pun gotong royong, banyak warga yang tidak mau mengikutinya.

Pada situasi pandemi ini, sistem sosial politik yang sudah terbangun di Dusun R mempunyai pengaruh terhadap bagaimana respon masyarakat pada situasi krisis tersebut. Pak Dukuh yang cenderung bersifat otoriter memiliki

pandangan yang berbeda dengan anak-anak muda pedesaan yang merantau di kota. Asumsi bahwa Dusun R merupakan dusun yang berada di lereng bukit, paling pojok sendiri serta tidak banyak berinteraksi dengan warga dari luar masih melekat menjadi satu fenomena sendiri yang memunculkan pandangan bahwa Dusun R memiliki tingkat resiko kecil untuk bisa tertular virus Corona. Pandangan kecilnya resiko tertular virus Covid-19 ini sama dengan hasil survei yang dilakukan oleh Social Resilience Lab, Nanyang Technological University (NTU) dan laporan Covid-1919.org yang dilakukan sejak 29 Mei-20 Juni 2020 dengan responden sebanyak 206.550 di Jakarta. Salah satu temuannya yaitu 77% responden beranggapan bahwa mereka (dirinya, teman dan lingkungan dekat di sekitarnya) tidak mungkin tertular Covid-19. Dibandingkan dengan pilihan tertular oleh Covid19, masyarakat lebih berat dengan permasalahan ekonomi karena susah mencari pekerjaan dan minimnya bantuan sosial. Kondisi ekonomi mereka terdampak berkisar 17%, 26% hingga 33% (Arif 2020).

Faktanya, dengan kemajuan teknologi transportasi dan jalan yang semuanya datar bebas hambatan sangat memudahkan lalulintas masyarakat dusun untuk bermigrasi. Terutama anak muda dan penduduk usia kerja, mayoritas mereka bersekolah dan bekerja di luar dusun atau di kota Yogyakarta. Mereka disebut komuter yaitu masyarakat yang berpindah harian, yaitu gerak berulang hampir setiap hari antara tempat tinggal dan tempat tujuan secara berulang dan rutin, tanpa tujuan menginap (Rusli 2012). Hilir mudik antara warga yang datang ke Dusun ditambah dengan komuter dari masyarakat Dusun R sendiri tidak bisa dihindarkan pada situasi saat ini. Fakta ini memunculkan pandangan baru yang berbeda dengan pandangan Pak Dukuh, bahwa Dusun R memiliki tingkat resiko yang tinggi terhadap penularan Covid-19.

Perbedaan pandangan terhadap tingkat resiko dampak pandemi Covid-19 di dusun menjadi hal menarik untuk dikaji karena perbedaan pandangan tersebut sebenarnya tidak muncul begitu saja, akan tetapi dipengaruhi oleh berbagai macam faktor atau latar belakang sistem sosial yang sudah mapan di masyarakat. Menurut J. Richard Eiser, persepsi resiko terhadap sesuatu dibentuk oleh tekanan lingkungan, pengetahuan, perasaan dan nilai, kepercayaan budaya, dinamika interpersonal atau masyarakat. Pengetahuan bisa dibentuk dari pengalaman pribadi atau pun informasi dari pihak luar (Eiser dkk. 2012).

Perspektif tersebut kemudian mempengaruhi pandangan masyarakat saat ini terhadap sesuatu hal yang berpengaruh dalam kehidupan. Dalam konteks ini yaitu pandemi Covid-19 yang melanda secara global, akan

tetapi dampaknya bisa juga terjadi pada masyarakat yang menurut asumsi mereka yang tinggal di wilayah yang pinggir, pojok, lereng gunung yang menurut perkiraan tidak mudah terpengaruh oleh dunia luar. Tulisan ini hendak memaparkan bagaimana masyarakat desa mempercayai dan mempertahankan pandangannya tentang perubahan yang terjadi dalam waktu cepat yang berupa pandemi. Dengan cara apa dan bagaimana pandangan masyarakat tersebut berubah terhadap pandangan hidup yang baru serta sampai sejauh mana perubahan pandangan tersebut terjadi pada masyarakat desa, khususnya di Dusun R.

Tulisan ini disusun dengan menggunakan metode penelitian kualitatif, yaitu sebuah penelitian yang berusaha mengkonstruksi realitas dan memahami maknanya dengan memperhatikan proses, peristiwa dan autensitas (K Denzin dan S. Lincoln 2011, xviii). Dengan menggunakan paradigma konstruktivisme dimana secara ontologis mengutamakan relativisme dimana realitas yang dikonstruksi dan dikonstruksi bersama secara lokal dan spesifik (K Denzin dan S. Lincoln 2011, 207). Proses penggalan data pada metode kualitatif dengan perspektif konstruktivisme dilakukan dengan cara melakukan wawancara mendalam dengan masyarakat desa yang tinggal di Dusun R, yang terdiri dari masyarakat yang memiliki pandangan konservatif yang diwakili oleh masyarakat generasi tua dan masyarakat berpandangan kekinian yang diwakili oleh generasi muda pedesaan. Selain melalui wawancara mendalam penggalan data primer juga dilakukan dengan observasi lapangan. Observasi dilakukan dengan cara tinggal di Dusun R, kemudian melakukan pengamatan terhadap aktivitas yang dilakukan oleh masyarakat di Dusun ini selama pandemi Covid berlangsung. Pengamatan juga dilakukan di beberapa aktivitas publik, diantaranya: pasar dusun sebagai pusat terjadinya pergerakan masyarakat dari satu tempat ke tempat lain dan masjid sebagai pusat ibadah warga masyarakat Dusun R baik dalam bentuk sholat berjamaah atau pun pengajian. Selain menggunakan data primer, tulisan ini juga menggunakan data sekunder, yang berupa profil Dusun R, data dari sumber online terkait jumlah penderita Covid-19 dan beberapa artikel terdahulu serta teori sosiologis yang berhubungan dengan Covid-19.

Kepatuhan dan Keterpaksaan

Kemunculan virus Covid-19 ini untuk pertama kali pada akhir Desember 2019 di Wuhan, China. Di wilayah tersebut memiliki puncak kasus pada bulan Februari 2020 dengan 10 ribu orang dari 38.020 yang terinfeksi dalam kondisi kritis (Sagita 2020), yang dalam beberapa waktu yang cepat menyebar ke negara yang lain (Korea Selatan, Jepang, Taiwan). Kemudian diikuti penyebaran yang

lebih luas ke Amerika Serikat dan Eropa. Kasus Covid-19 pertama di Indonesia pada 1 Maret 2020 di Depok, Jawa Barat seorang ibu (64 thn) dan putrinya (31 thn) yang tertular virus dari seorang warga Jepang yang datang ke Indonesia (Ihsanuddin 2020).

Virus Corona merupakan pandemi yang mudah menyebar secara *contagious* (penularan). Karena itu, banyak pemimpin di berbagai negara yang menghimbau warganya untuk melakukan *social distancing* dan isolasi untuk mencegah penularan virus penyakit ini. Dalam jaringan sosial, banyak hal dapat menyebar secara menular, termasuk virus. Dan cara untuk mencegah penyebaran makin luas adalah dengan menjalani peran sebagai *isolate* dalam jaringan sosial (Mona 2020). Pemerintah dikatakan terlambat dalam menyikapi penyebaran wabah ini. Pada awal kemunculan Covid-19, pemerintah Indonesia masih bersifat anti ilmu pengetahuan selama kurang lebih dua bulan. Hal ini terlihat dari sikap pemerintah yang cenderung mengabaikan adanya virus ini dan mengeluarkan pernyataan tidak biasa (Savirani dan Prasongko 2020). Beberapa pernyataan yang sempat viral bahkan menganggap virus tersebut tidak akan masuk ke Indonesia karena masyarakat Indonesia banyak berdoa dan beriklim tropis sehingga tidak akan mungkin bisa berkembang di Indonesia. Asumsi tersebut terus bergulir dan menjadi wacana mainstream, yang tidak segera diberikan instruksi pemerintah kepada masyarakat untuk melakukan tindakan apa di situasi yang sedemikian. Warga pun menjadi kebingungan terhadap situasi ini. Sisi lain muncul berbagai macam berita hoaks di media sosial yang semakin membuat kepanikan. Situasi ini semakin bergulir yang diiringi dengan penambahan jumlah penderita dan yang meninggal cukup signifikan. Sampai bulan Maret 2020, jumlah kasus positif Corona di Indonesia mencapai 1.414 pasien, yang menjalani perawatan mencapai 1.217 pasien dan total kematian sejumlah 122 orang (Idhom 2020).

Pada akhirnya semua pihak menyadari bahwa penyebaran virus ini berjalan dengan cepat dalam waktu yang singkat. Pertambahan jumlah pasien tersebut menjadikan pemerintah mengambil beberapa kebijakan untuk mengurangi penyebarannya. Beberapa kebijakan yang diambil oleh pemerintah terkait dengan Covid-19 ini, diantaranya: pada masa awal merebaknya virus di Wuhan, pemerintah memperhatikan dan melakukan evakuasi WNI yang ada di Wuhan; menyiagakan 100 rumah sakit; melakukan pengawasan ketat terhadap 19 area yang berhubungan langsung dengan China (yaitu Bandung, Jakarta, Padang, Surabaya, Batam, Palembang, Jambi, Denpasar dan Manado); menutup penerbangan dari dan ke China; pembentukan Gugus

Tugas yang melakukan percepatan penanganan Covid 19; bekerja di rumah, belajar di rumah dan beribadah di rumah; mengkampanyekan pembatasan sosial; melakukan karantina wilayah atau yang dikenal dengan istilah *lockdown*; Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dengan menggunakan PP Nomor 21 Tahun 2020 dengan wilayah pertama kali yaitu DKI Jakarta yang kemudian diikuti oleh daerah-daerah lain; adanya Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Covid-19; Larangan Mudik yang diatur dalam SE Menteri PANRB Nomor 46 Tahun 2020 tentang Pembatasan Kegiatan Berpakaian Keluar Daerah bagi ASN; Tatanan Normal Baru yang disertai dengan pedoman Keputusan Menteri Kesehatan Nomor Hk.01.07/Menkes/382/2020 tentang Protokol Kesehatan bagi Masyarakat di Tempat dan Fasilitas Umum dalam Rangka Pencegahan dan Pengendalian Covid-19 (Gitiyarko 2020) dan pemberian Bansos (Bantuan Sosial) bagi warga yang terkena dampak pandemi yang diberikan sejak bulan April 2020.

Beberapa pihak menilai kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah sejatinya sudah menyebut beberapa kelompok rentan, baik yang berada di dalam negeri maupun di luar negeri. Selain itu kebijakan yang dibuat juga mengatur tentang bantuan sosial dan panduan penanganan untuk kelompok rentan. Akan tetapi kebijakan-kebijakan tersebut dinilai belum bersifat inklusif karena hanya gambaran secara umum saja tanpa memberikan detail kerentanan seperti apa yang dialami sebuah kelompok. Selain itu kebijakan juga cenderung mementingkan keseimbangan ekonomi dan kurang peka terhadap kerentanan akibat pandemi. Kebijakan tersebut mungkin bernilai positif bagi orang-orang yang memiliki perlindungan individual seperti tabungan yang cukup, upah yang stabil, pekerjaan tetap dan memiliki akses untuk melakukan pekerjaan di rumah, namun tidak dengan mereka yang rentan dan termarjinalkan (Eddyono, Rahmawati, dan Ginting, t.t.). PSBB pun dinilai kurang efektif karena banyak masyarakat yang belum mendapatkan perlindungan hukum dari kebijakan tersebut (Ristyawati 2020).

Namun demikian, peraturan tersebut tetap berjalan. Berbagai macam peraturan tersebut ada yang diberlakukan di perkotaan, terutama wilayah yang memiliki tingkat penyebaran tinggi dibandingkan dengan daerah yang lain. Akan tetapi ada juga peraturan yang diterapkan di seluruh wilayah Indonesia. Terutama dalam hal menjaga jarak (*social distancing* yang berkembang lebih spesifik menjadi *physical distancing*), menggunakan masker serta rajin mencuci tangan. Menjadi petuah yang harus dihafal dan dijalankan oleh semua warga masyarakat. Harapannya dapat memperkecil jumlah penderita yang terkena Covid-19.

Penanganan bencana Covid-19 yang ditangani secara nasional, menjadikan peraturan yang diberlakukan pun tidak hanya berlaku di Jakarta sebagai ibu kota negara atau propinsi tertentu. Akan tetapi peraturan tersebut berlaku untuk semua wilayah di Indonesia, bukan hanya wilayah tertentu dengan alasan tertentu. Hal ini disebabkan penyebaran virus bisa terjadi di seluruh Indonesia karena pergerakan penduduk yang tidak bisa terbendung. Hal yang sama juga terjadi di Dusun R, walaupun berada di wilayah yang dianggap paling pojok dan pinggir berada dibawah bukit, adanya resiko terkena wabah virus Corona pun juga tinggi. Hal ini disebabkan pergerakan warga masyarakat yang tidak bisa dihentikan karena kepentingan ekonomi, sosial dan politik.

Terkait dengan kebijakan pada masa pandemi, terdapat 2 hal yang dilakukan oleh masyarakat Yogyakarta sebagai respon terhadap pandemik yang sedang berlangsung hingga saat ini. *Pertama*, penguatan literasi digital pada masyarakat sebagai bentuk resiliensi terhadap Covid-19. Resiliensi dengan literasi digital menjadi sebuah transformasi komunikasi yang efektif dan sebagai sarana untuk melakukan edukasi publik yang semula dilakukan dengan cara tradisional. Informasi yang tersebar melalui berbagai media telah melalui verifikasi dan dipadukan dengan pengalaman-pengalaman masyarakat yang kemudian memunculkan pengetahuan baru sebagai proses resiliensi terhadap Covid-19. *Kedua*, penguatan modal sosial yang dilakukan melalui berbagai aksi solidaritas bersama. Pada saat pandemi berlangsung, masyarakat melakukan resiliensi secara bersama-sama dengan jejaring sosial yang dimiliki untuk menghadapi krisis. Jejaring sosial akan semakin luas seiring berjalannya waktu dengan bantuan teknologi informasi, sehingga solidaritas tidak hanya terbentuk dalam lingkup yang kecil (Kustiningsih dan Nurhadi 2020).

Respon di beberapa desa dan dusun di Yogyakarta dengan adanya instruksi untuk melakukan pembatasan sosial (*social distancing*) dilakukan dengan cara melakukan pembatasan pergerakan warga masyarakat yang keluar masuk dusun atau desa tertentu. Warga menyebutkan dengan sebutan *lockdown lokal*, walaupun dalam bahasa formalnya digunakan istilah karantina wilayah. Jika artinya *lockdown* adalah situasi yang melarang warga masuk ke wilayah karena kondisi darurat dimana negara menutup perbatasannya agar tidak ada orang yang masuk atau keluar dari negaranya (Garjito dan Bhayangkara 2020), warga masyarakat di Yogyakarta mengartikan *lockdown* dengan mengurangi lalulintas orang yang keluar masuk desa atau dusun tertentu. Di setiap pintu masuk diberi plang perlintasan baik dari kayu atau besi dan diberi tulisan *lockdown* yang disertai dengan berbagai macam tulisan terkait

dengan bencana Covid-19 ini. Diantaranya: “Hati-Hati Corona, Corona akan membunuhmu, Corona segera lah berlalu atau Awas Corona”. Disamping tulisan, pembatasan pergerakan warga disertai dengan penjagaan secara ketat oleh warga secara bergiliran. Beberapa dusun/desa membangun tenda semi permanen di samping jalan masuk, kemudian dijaga oleh anak-anak muda. Ada juga beberapa dusun atau desa yang melakukan penyemprotan terhadap orang asing, motor, mobil atau jenis kendaraan lain yang masuk ke dusun/desa. Apa yang dilakukan oleh warga masyarakat terkait dengan *lockdown*, berbeda dengan arti *lockdown* yang digulirkan oleh WHO. Masyarakat memaknai *lockdown* dengan cara yang berbeda.

Gambar 1: Lockdown Di Bantul, DI.Yogyakarta



Sumber : HarianJogja, 2020

Keaktifan yang terjadi di beberapa dusun dan desa dalam menyikapi tentang bencana Covid-19 ini tidak begitu saja diikuti oleh dusun atau desa lainnya. Secara umum, ada beberapa faktor yang menyebabkan sebuah desa atau dusun melakukan kebijakan tertentu, dalam hal ini melakukan *lockdown* dengan perspektif yang berbeda. Dusun R tidak mengikuti kebijakan dusun atau desa lain tersebut. Pak Dukuh masih mempertahankan perspektifnya bahwa Dusun R kemungkinan kecil untuk bisa terjangkit virus Corona ini, sehingga melakukan *lockdown* sebagaimana yang dilakukan di dusun-dusun tetangga tidak dilakukan. Masyarakat masih bersikap biasa bahwa seolah-olah tidak terjadi bencana. Kekhawatiran terjadi pada generasi muda yang terbiasa pergi ke luar dusun untuk bekerja, menjadi khawatir dengan kelonggaran yang terjadi di dusunnya.

Seiring berjalannya waktu, terutama menjelang bulan puasa Maret-April 2020 terdapat rentetan peristiwa sebagai efek domino dari berkembangnya Covid-19 di masyarakat. Warga masyarakat Dusun R pun terkena dampaknya juga. Dengan merebaknya wabah ini, untuk mengantisi penularan lebih banyak, beberapa sektor pekerjaan ada yang mengurangi pekerjaannya alias mem-PHK, merumahkan sementara atau membuat shift untuk pekerja. Diantaranya: bekerja di pabrik rokok, sarung tangan, pertokoan, guru paud atau pun outlet barang di mall. Beberapa sektor industri yang terdampak oleh pandemi ini diantaranya: industri pengolahan, sektor perdagangan, hotel dan restoran dan sektor-sektor jasa (Ulya 2020). Bahkan ada beberapa sektor usaha yang menutup usahanya atau gulung tikar, terutama UMKM.

Tindakan yang dilakukan oleh pelaku usaha tersebut menyebabkan jumlah pengangguran yang meningkat secara tajam di awal pandemi. Jumlah pengangguran di masa pandemi ini mencapai 2,92 juta-5,23 juta orang (Karunia 2020). Jumlahnya meningkat yang berdampak meningkatnya jumlah tindak kejahatan sebagai akibat dari meningkatnya jumlah masyarakat yang kehilangan pekerjaan. Berbagai macam tindak kejahatan ini juga dialami oleh masyarakat Dusun R. Beberapa warga masyarakat mulai banyak mendengar informasi tentang pencurian sepeda motor, hewan ternak atau hasil panen padi yang dilakukan baik siang hari atau pun malam hari. Kehilangan harta benda inilah yang menjadikan warga masyarakat Dusun R merasa ketakutan jika sewaktu-waktu terjadi berbagai macam tindak kejahatan juga menyimpannya. Ketakutan dan kekhawatiran tersebut menjadikan tumbuhnya kesadaran baru bagi Pak Dukuh dan Ketua RT/RW untuk melakukan *lockdown* yang sebelumnya tidak dilakukan.

Dusun R pada akhirnya melakukan *lockdown*, yang maknanya sedikit berbeda dengan dusun atau desa lain yang melakukan sebelumnya. Jika *lockdown* yang dilakukan di dusun atau desa lain lebih disebabkan untuk menghindari persebaran virus yang terjadi secara cepat, maka *lockdown* di Dusun R lebih dimaknai sebagai upaya untuk mencegah terjadinya berbagai macam tindakan kejahatan sebagai akibat pandemi di Dusun. Mengingat banyak warga Dusun R yang terdampak juga oleh pandemi ini, dalam bentuk kehilangan pekerjaan ataupun jumlah pendapatan yang berkurang sebagai akibat dikurangnya jam kerja. Dengan demikian, pada titik ini (dengan jumlah penderita yang selalu bertambah setiap harinya) belum bisa menyadarkan masyarakat untuk lebih waspada, kecuali lebih takut terhadap kehilangan harta benda miliknya.

Langkah awal *lockdown* di Dusun R dilakukan dengan cara menutup tiga

pintu masuk dusun dengan menggunakan batang bambu yang dipetik dari salah satu kebun milik warga. Pemasangan plang juga disertai dengan tulisan-tulisan yang bernada sindiran, misalnya: “*Hobi Kok Malingan* atau *Area Bebas Maling*”. Warga masyarakat, baik tua atau muda secara bergantian menjaga portal dan mengamati pergerakan orang yang lewat menuju Dusun R, terutama di malam hari. Penjagaan ini dilakukan dalam bentuk ronda setiap malam yang dilakukan secara bergilir 5 orang warga di pos kamling yang sebelumnya ada, tetapi tidak berfungsi untuk pos ronda. Ronda tidak dilakukan pada pagi sampai sore karena mayoritas warga bekerja, belum adanya kasus pencurian di Dusun R dan pada siang hari peluang tindak kejahatan minim. Hal ini menyebabkan penjagaan dalam bentuk ronda dilakukan pada malam hari. Toh tujuan utamanya penjagaan lebih disebabkan karena alasan penjagaan harta benda dari pencurian, bukan sebagai upaya pencegahan untuk memutus rantai penularan Covid-19.

Adanya pemikiran bahwa kemungkinan besar *lockdown* akan diperpanjang waktunya karena situasi yang tidak menentu, menjadikan warga masyarakat Dusun R memiliki inisiatif untuk merubah plang pintu yang sebelumnya dari bambu dirubah menjadi besi yang bersifat lebih permanen. Biaya pembuatannya dibebankan pada kas RT dan sumbangan dari warga masyarakat, berupa semen, besi atau pun baja sisa pembangunan rumah yang dicor untuk menambah tempat duduk pada saat ronda. Termasuk tenaga kerja yang mengerjakan pembangunan portal tersebut juga mengandalkan sumbangan tenaga masyarakat dengan konsep gotong royong atau kerja bakti.

Pemaknaan *lockdown* yang diartikan sebagai bentuk pencegahan terhadap pencurian menandakan bahwa kepedulian terhadap pencegahan atau pemutus rantai jumlah penderita Covid-19 pun belum juga muncul di Dusun R. Masyarakat masih beraktivitas seperti biasa tanpa terpengaruh oleh situasi bahwa saat ini terjadi pandemi di Indonesia yang bisa saja terjadi di Dusun R mengingat adanya arus pulang pergi warga. Kekurangpedulian tersebut nampak dari warga Dusun R tidak menaati protokol kesehatan sesuai dengan anjuran pemerintah (menggunakan masker, menjaga jarak dan rajin mencuci tangan, baik petani yang pergi ke sawah atau pun pedagang di pasar tradisional) masih belum menerapkannya. Apalagi adanya anjuran untuk *stay home* tentu sulit dilakukan bagi pekerja di pedesaan, khususnya bagi masyarakat Dusun R, dengan berbagai macam jenis pekerjaan. “Kalau di rumah terus, mau makan apa”, celetukan yang muncul di kalangan warga ketika ngobrol di pasar atau sawah. Para petani masih ke sawah seperti biasa dan kurang memperhatikan protokol kesehatan. Para pedagang di Pasar R

juga masih berjualan belum menggunakan masker dan fasilitas tempat cuci tangan belum disediakan oleh pengelola pasar.

Demikian halnya dengan kegiatan keagamaan, sedikit pun kurang terpengaruh oleh situasi pandemi. Anak-anak yang belajar mengaji di sore hari, masih belajar ngaji setiap sore, padahal diketahui bahwa interaksi mereka tidak hanya berasal dari satu dusun saja, akan tetapi dari beberapa dusun dalam satu desa. Aktivitas mereka bukan hanya mengaji, akan tetapi juga sholat berjamaah, sehingga berkerumun dan bergerombol lebih dari 4 orang tidak bisa terhindarkan. Kegiatan di Masjid Al-Husna pun sedemikian rupa. Sebagai seorang Takmir masjid pun Pak Dukuh masih menjalankan aktivitas di masjid seperti biasa. Masjid-masjid di sekitar dusun *dilockdown* tidak berlaku bagi Pak Dukuh selaku takmir masjid dan penguasa masjid. Menurut celetukan masyarakat, selama Pak Dukuh berkuasa, masjid tersebut merupakan representasi kepemimpinannya. Masjid Al Falah adalah masjidnya Pak Dukuh R. Sholat berjamaah masih dilakukan setiap hari untuk subuh, dhuhur, asar, magrib dan isya. Walaupun jamaahnya tidak banyak, akan tetapi warga yang loyal dengan kepemimpinannya pasti datang sholat berjamaah dengan jumlah kurang lebih 10 orang, bahkan lebih dari 10 orang pada waktu sholat jumat.

Kegiatan keagamaan yang berlangsung tanpa adanya perubahan tersebut berlangsung sampai bulan Ramadhan 1441 H, atau akhir bulan April 2020. Pandemi masih jauh dari pemaknaan masyarakat untuk mencegah atau masyarakat Dusun R menganggapnya tidak akan pernah terjangkau. Pelaksanaan ibadah bulan Ramadhan di masjid dilaksanakan tanpa mengenal protokol kesehatan yang dicanangkan oleh pemerintah. Sholat tarawih dilakukan secara berjamaah tanpa melakukan *social distancing* atau pun menggunakan masker. Demikian halnya kegiatan mengaji anak-anak di sore hari semakin giat dilakukan yang ditambah dengan kegiatan buka bersama, sholat magrib dan sholat tarawih secara berjamaah. Hanya sedikit perubahan yang terjadi di Dusun R, yaitu tidak adanya acara buka bersama menjelang magrib untuk bapak-bapak dan ibu-ibu di serambi masjid seperti tahun-tahun sebelum pandemi. Di tahun sebelumnya, setiap jelang buka puasa ada pengajian dengan pembicara Pak Dukuh yang dihadiri oleh jamaah masjid Al Falah. Pada saat waktu berbuka sudah datang, ada snack, makanan dan minuman yang disediakan oleh panitia untuk seluruh jamaah pengajian sekitar 150-200 bungkus. Aneka makanan tersebut diperoleh dari iuran seluruh warga masyarakat Dusun R yang dibagi-bagi menjadi beberapa kelompok yang terdiri dari 4 keluarga. Keempat keluarga tersebut menyediakan snack,

makanan berat dan minuman yang dibagi rata jumlahnya sesuai dengan kesepakatan bersama. Atas nama shodaqoh dan adanya perintah Pak Dukuh menjadikan warga masyarakat mengikuti perintah untuk menyediakan sedekah berupa aneka makanan tersebut. Apa yang dilakukan oleh pak Dukuh dan jamaah Masjid Al Falah ini sesuai dengan pemikiran Clifford Geertz tentang kemiskinan bersama, yaitu terjadinya pertukaran ekonomi dimana kondisi ekonomi yang tidak naik dan tidak turun, yang terpenting bisa bertahan dengan cara berbagi ekonomi (Muryanti 2018). Padahal sebenarnya jamaah yang datang tersebut makan dari snack yang mereka bawa sendiri, akan tetapi seolah-olahnya mendapatkan snack gratis dari Pak Dukuh.

Kegiatan keagamaan berjalan seperti biasa sampai pada pertengahan Ramadhan. Masyarakat Dusun R tidak menjalankan protokol kesehatan dalam menjalankan ibadahnya. Semuanya berjalan seolah-olah tidak terjadi peristiwa apa pun. Sampai pada pertengahan Ramadhan terjadi kejadian menarik yang membuat masyarakat Dusun R menyadari bahwa ooh memang saat ini terjadi pandemi dan Dusun R pun bisa mengalami dampak dari pandemi tersebut. Tiba-tiba ada berita mengejutkan yaitu Bapak YY yang biasa sholat dan melakukan berbagai macam kegiatan keagamaan di masjid dikabarkan menjadi ODP (Orang Dalam Pengawasan)¹ karena pernah mengikuti kegiatan dengan banyak orang yang berasal dari berbagai macam daerah dan negara (India khususnya) di Sleman. Kegiatan tersebut yaitu kegiatan Jamaah Tabligh karena kebetulan Pak YY merupakan salah satu pegiat dari Jamaah Tabligh di Sleman. Pemberitaan yang muncul bahwa ada 4 orang peserta kegiatan tersebut positif Corona, sehingga menjadi kluster Jamaah Tabligh (Hapsari 2020).

Berita tersebut tersiar kemana-mana di seluruh Yogyakarta. Implikasinya masyarakat menjadi sedikit kaget, heboh, saling menyalahkan dan menyadari bahwa Corona itu ada dan sangat bisa terjadi di Dusun R, walaupun secara geografis termasuk dusun yang terpencil dan berbatasan dengan perbukitan. Hal tersebut sangat bisa mungkin terjadi karena pergerakan masyarakat Dusun R bukan hanya terbatas di dusun saja, akan tetapi bergerak ke wilayah-wilayah lain serta berkontak fisik dengan orang lain. Informasi tentang Pak YY yang dikarantina terkait dengan statusnya sebagai ODP karena mengikuti kegiatan Jamaah Tabligh di Sleman menjadikan warga Dusun R menjadi sangat panik, kemudian sedikit menyalahkan Pak YY sebagai penyebab terjadinya bencana

¹ Pasien Covid dapat dikategorikan : (1) pasien positif covid-19, yang dipastikan terinfeksi virus dan segera memerlukan perawatan; (2) PDP (Pasien dalam Pengawasan) yaitu positif terinfeksi akan tetapi tidak menunjukkan gejala-gejala dan (3) ODP (Orang dalam Pengawasan) yaitu orang yang menjalin kontak dengan pasien atau pun PDP

Corona di Dusun R. Dengan adanya kejadian adanya ODP di Dusun R menjadikan protokol kesehatan laku dan laris untuk dijalankan. Masyarakat berbondong-bondong menjalankan protokol kesehatan karena bencana Corona bisa saja mereka alami di Dusun R.

Beberapa perubahan yang nampak dengan adanya tamparan ODP di Dusun R ini, pasar Dusun R yang biasanya ramai dengan pembeli berubah drastis menjadi sangat sepi, baik di kalangan penjual atau pembeli. Pedagang yang berjualan bisa dihitung dengan jari jumlahnya, kurang dari 10 orang. Padahal jika hari normal, penjual bisa 30 an orang dengan luas kios yang berbeda-beda, ada yang kecil dan ada yang besar. Pembeli pun juga tidak terlalu banyak. Pada saat penulis datang pada ke pasar, yang terlihat hanya kurang lebih 10 orang pembeli di pasar. Pasar benar-benar menjadi pasar yang hidup segan, mati tidak mau. Selain pasar Dusun R menjadi sepi, perubahan lain yang nampak yaitu terjadinya peeningkatan jumlah warga yang tidak bekerja. Beberapa warga Dusun R yang bekerja di pabrik (pabrik rokok, pabrik sarung tangan atau pun pabrik wig) dikurangi shift pekerjaannya, jika biasanya mereka bekerja selama 7 hari dalam seminggu berkurang menjadi 4-5 hari dalam seminggu. Jika mereka selama ini ada waktu lembur, berkurang menjadi tidak ada waktu lembur. Beberapa warga yang bekerja sebagai *cleaning service* pun juga banyak yang di rumahkan karena rasionalisasi pekerja. Para warga yang bekerja ini harus berjuang keras untuk meyakinkan bosnya dengan berbagai macam asumsi bahwa dirinya tidak mungkin terkena penyakit tersebut. Kalaupun warga masih tetap bekerja, berbagai macam pertanyaan terkait dengan Dusun R yang menjadi zona merah karena ada satu orang yang terkena Corona menjadi pertanyaan yang sedikit memojokan dan seolah-olah dirinya juga terkena virus tersebut.

Kegiatan keagamaan juga berhenti atau pun berkurang keaktifannya tidak seperti sebelumnya. Kegiatan yang berhenti total yaitu latihan mengaji untuk anak-anak. Orang tua yang berasal dari luar Dusun R tentunya sangat ketakutan jika menyuruh anaknya belajar di Dusun R, sehingga pada saat ada berita virus Corona di Dusun R, mereka menghentikan anaknya belajar. Termasuk warga anak-anak warga Dusun R juga berhenti belajar mengaji karena ketakutan berkumpul dengan banyak orang. Sedangkan, aktivitas kegiatan keagamaan di masjid juga tidak seaktif sebelumnya. Pak Dukuh berhenti mengimami sholat baik sholat wajib atau pun sholat tarawih yang dilakukan di malam hari. Pak Dukuh menghentikan aktivitasnya di masjid karena sebelum kejadian PK YY dinyatakan sebagai ODP, Pak Dukuh banyak menjalin kontak dengan Pak YY, ngobrol dan pijat-pijatan yang menjadikan

Pak Dukuh juga ketakutan bahwa dirinya juga akan menjadi ODP pula. Akan tetapi, pengikut beliau yang tidak menjalin kontak dengan Pak YY juga tidak merasakan apa-apa, sehingga mereka menggantikan Pak Dukuh sebagai pemimpin sholat. Walaupun jamaahnya sangat sedikit karena warga Dusun R dicekam rasa ketakutan.

Solidaritas Yang Terbentuk

Pada waktu ada pemberitaan yang menyatakan bahwa Dusun R merupakan zona merah, sontak seketika semua warga menjadi terkejut seperti tersengat listrik. Baik warga yang memiliki karakteristik tradisional (termasuk golongan ini Pak Dukuh dan pendukungnya), bapak dan ibu muda yang terbiasa menggunakan HP atau pun anak muda yang sangat dekat dengan gadget. Semuanya panik dan ketakutan untuk ke luar rumah. Masyarakat benar-benar menaati protokol kesehatan untuk *stay at home*. Jalanan menjadi sepi, toko-toko di tepi jalan yang biasanya tutup sampai malam pun tidak buka, semua group WA (bagi masyarakat yang sangat familiar menggunakan HP) banyak bersliweran update informasi di Dusun R. Bagi masyarakat yang tidak familiar dalam menggunakan HP, dalam setiap interaksi dengan warga masyarakat lain selalu membahas kehidupan pribadi dan update terbaru atas yang dialami oleh Pak YY, apakah sebagai ODP= Orang Dalam Pengawasan berubah menjadi PDP= Pasien Dalam Pengawasan) atau kah sudah positif dan seterusnya.

Pada situasi panik seperti ini, pihak yang paling tertuduh dan dipersalahkan tentunya Pak YY yang diberitakan seolah-olah sudah positif virus Corona, padahal informasi tersebut masih sangat umum dan belum ada pernyataan dari RT atau pun keluarga Pak YY yang menyatakan positif. Keikutsertaannya dalam Jamaah Tabligh (JT) yang paling disalahkan oleh semua warga. Mereka beranggapan bahwa JT merupakan sebuah aliran keagamaan yang menyimpang, tidak seperti yang dianut oleh warga masyarakat Dusun R, yaitu *Ahlusunnah wal Jamaah*, yang diwakili oleh 2 organisasi besar di Indonesia, yaitu NU dan Muhammadiyah. Hal yang nampak nyata terkait dengan ajaran yang dipegang teguh oleh seorang anggota JT bahwa seseorang harus melakukan hijrah dan bepergian sebagaimana layaknya yang dijalankan oleh Rasulullah.

Masyarakat semakin mencibir bahwa Pak YY yang memang sebagai pendatang, (istrinya yang orang Dusun R) yang seharusnya tidak menjadikan dusun ini menjadi terpukul, sebaliknya seharusnya ikut mengharumkan nama dusun, bukan malah membuat warga justru semakin kehilangan pekerjaan. Cibiran tersebut semakin parah, karena secara ekonomi Pak YY

tergolong keluarga yang kurang mampu dibandingkan dengan warga yang lain. Sehari-harinya dia dan istrinya berjualan cilok dan makanan ringan untuk anak-anak kecil yang bermain atau mengaji di rumah atau masjid pada saat anak-anak mengaji. Sering keduanya mendapatkan santunan dari JT berupa bahan kebutuhan pokok sehari-hari yang dikirimkan oleh anggota JT yang lain, baik pada saat Pak YY atau pun tidak pergi ke tempat lain. Selain itu, keluarga Pak YY juga mendapatkan bantuan dalam membangun rumah saat membangun kamar mandi atau membetulkan bagian rumahnya yang mengalami kerusakan.

Kedua situasi tersebut, fakta bahwa Pak YY sebagai anggota JT yang merupakan minoritas di Dusun R (hanya 2 orang keluarga yang mengikuti, Keluarga Bapak YY yang tinggal di Dusun R dan Bapak S yang tidak tinggal di Dusun R karena keluarganya tinggal di luar dusun) dan secara ekonomi merupakan kategori keluarga miskin, menjadikan posisi Pak YY menjadi bualan dan cibiran masyarakat. Bahkan ada warga yang secara terang-terangan mengatakan bahwa sebaiknya Pak YY pergi dari Dusun R karena membuat warga menjadi tidak nyaman di tempat kerja. Namun demikian, walaupun sebagian warga masyarakat mengucilkannya, mayoritas warga yang lain tidak membiarkan Pak YY dan keluarganya berada dalam kesulitan. Sebagaimana pendapat Durkheim bahwa masyarakat desa memiliki solidaritas mekanis, maka masyarakat Dusun R pun juga tumbuh solidaritas. Dengan munculnya solidaritas mekanik pada situasi sulit tersebut menunjukkan bahwa Dusun R dengan benturan antara nilai tradisional yang dipertahankan oleh generasi tua dan modernitas yang diwakili anak-anak muda, Dusun R masih menunjukkan karakter kuatnya sebagai masyarakat pedesaan.

Disamping karakter masyarakat pedesaan, berdasarkan survei yang dilakukan oleh Kompas, pada masa pandemi ini melahirkan karakter masyarakat baru yang penuh dengan welas asih, empati dan memiliki solidaritas yang tinggi terhadap sesama. Beberapa bentuk aktivitas yang dilakukan yaitu dengan memberikan donasi atau bantuan ekonomi yang diberikan kepada warga yang kurang mampu karena terdampak secara langsung atau tidak langsung akibat pembatasan sosial. Dengan cara memberikan bantuan secara langsung, berupa bahan kebutuhan pokok atau makan siap santap; bantuan uang melalui media cetak/elektronik, situs online yang melakukan penggalangan dana, semisal Kitabisa.com atau Rumah Solidaritas Kemanusiaan dan memberikan bantuan kepada paramedis. Beberapa alasan yang mengemuka mengapa masyarakat memberikan donasi tersebut dikarenakan: (1) memberikan bantuan

kepada sesama yang mengalami kesusahan merupakan sebuah kewajiban bagi manusia; (2) ikut merasakan penderitaan (empati) yang dirasakan oleh masyarakat, baik yang terdampak bencana secara langsung atau pun tidak langsung sehingga ingin membantu meringankan beban; (3) merasa prihatin dan kasihan melihat sesama yang mengalami kesusahan di masa pandemi dan (4) hanya ikut-ikutan (Purwanti 2020).

Pada konteks yang sempit yaitu Dusun R, juga mengalami hal yang serupa seperti daerah lain, yaitu peningkatan rasa empati terhadap sesama karena pandemi. Walaupun tidak disukai, apa yang dialami dan menjadi penderitaan keluarga Pak YY, tidak mengurangi terbentuknya solidaritas yang terbentuk di kalangan warga masyarakat. Bentuk bantuan secara langsung yang diberikan oleh masyarakat Dusun R kepada keluarga Pak YY berupa: Penggalangan dana yang dibelikan sembako dan diberikan kepada keluarga Pak YY. Bantuan tidak diberikan dalam bentuk uang tunai, mengingat keluarga Pak YY masih pada kondisi harus menjalani karantina 14 hari, yang tidak boleh keluar rumah. Bantuan dalam bentuk sembako tersebut secara otomatis mengalir dengan sendirinya baik di kalangan ibu-ibu, bapak-bapak atau remaja pada level RT, RW dan Dusun R sendiri. Solidaritas itu mengalir dengan sangat cair, serempak dan suka rela tanpa adanya instruksi dari Pak Dukuh R seperti biasanya dalam menggalang bantuan dari warga masyarakat untuk berbagai macam acara yang diselenggarakan di Dusun R, khususnya berbagai macam kegiatan keagamaan. Semuanya bergerak dengan sangat cair dengan tujuan untuk meringankan penderitaan keluarga Pak YY.

Dalam konteks Dusun R, situasi pandemi ini juga membangunkan solidaritas lama yang bersemi lagi, yaitu ronda yang dilakukan secara bergilir. Jika aktivitas ronda sebelum pandemi tidak dilakukan karena berbagai macam benturan kepentingan antara generasi tua dan anak muda serta terbentur aktivitas ekonomi, maka situasi pandemi ini menyemikan kembali aktivitas ronda malam yang bertujuan untuk menjaga keamanan Dusun R. Bahkan tidak tanggung-tanggung ronda malam dilakukan di tiga titik pintu masuk Dusun R yang dilakukan secara bergiliran dengan membawa aneka makanan dan minuman. Bentuk kegiatan ronda malam ini benar-benar menjadi sebuah kekuatan baru bagi masyarakat Dusun R dibandingkan dengan bentuk *lockdown* seperti yang dilakukan di dusun yang lain. Masyarakat Dusun R kembali bersatu padu dalam situasi yang sungguh sangat sulit ini, minimal keamanan pada malam hari menjadi terjaga dan tidak was-was dengan adanya pencurian berbagai macam bentuk barang berharga.

Pada akhirnya di tengah ketidakpedulian antar sesama warga, dengan adanya pandemi ini memunculkan kualitas hubungan yang baru. Ketidakpedulian sebagai akibat dari perbedaan kepentingan yang berseberangan antara warga masyarakat yang sudah terpapar modernitas dengan warga masyarakat yang masih mempertahankan nilai-nilai tradisional yang dipertahankan oleh para orang tua di Dusun R selama ini terpelihara dengan baik. Pada situasi pandemi ini dari lubuk hati warga yang paling dalam, mereka masih memiliki empati yang tinggi dalam berbagi dengan sesama yang tidak tergerus oleh zaman yang selalu berubah.

Penutup

Dari beberapa praktik bagaimana masyarakat merespon resiko terjadinya pandemi ini, masyarakat dapat dikategorikan menjadi: (1) Masyarakat yang memiliki kesadaran yang tinggi bahwa hari ini terjadi pandemi sehingga melakukan berbagai macam upaya untuk melakukan pencegahan supaya tidak tertular oleh penyakit tersebut; (2) Masyarakat yang memiliki kesadaran separuhnya, menyadari bahwa terjadi pandemi dan melakukan pencegahan, akan tetapi karena adanya tuntutan ekonomi sehingga menyebabkan mereka tidak mengikuti protokol kesehatan; (3) Masyarakat yang baru sadar bahwa terjadi pandemi setelah ada kejadian di depannya dan (4) Masyarakat yang tidak peduli dengan pandemi ini (serta menyerahkan semua kejadian ini kepada Allah SWT).

Masyarakat Dusun R berdasarkan pengalamannya berada pada situasi pandemi termasuk kategori masyarakat yang hadap masalah, mereka menyadari sebuah peristiwa, jika sudah mengalaminya. Kalau mereka belum mengalaminya pasti tidak akan percaya bahwa pada situasi pandemi ini, virus Corona benar-benar ada dengan berbagai macam sebab, diantaranya: ekonomi, pengetahuan, kepercayaan dan pengaruh ketokohan. Pada saat ada resiko ancaman bahwa ada sebagian masyarakat Dusun R yang terkena, mereka menyadari bahwa resikonya sangat tinggi. Sebaliknya, pada saat tidak ada peristiwa atau kejadian virus Corona di masyarakat, sebagian besar lalai, malas dan seolah-olah tidak terjadi apa-apa dengan mengabaikan protokol kesehatan yang dicanangkan oleh pemerintah atau pun seruan Internasional. Masyarakat masih berbudaya hadap masalah atau melakukan pengobatan. Secara umum belum memiliki kesadaran untuk melakukan pencegahan dan menyadari bahwa sampai detik ini, bulan Agustus 2020 vaksin untuk Covid-19 belum ditemukan.

Daftar Pustaka

Buku :

- Eddyono, Suzanna, Ayu Diasti Rahmawati, dan Tantri Fricilla Ginting. t.t. “Pandemi dan Yang Tersingkir: Menaksir Urgensi Kebijakan Inklusif Penanganan Covid-19 Suzanna Eddyono, Ayu Diasti Rahmawati, dan Tantri Fricilla Ginting.” Dalam *Tata Kelola Penanganan Covid-19 di Indonesia : Kajian Awal*, 214–37. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Johnson, Doyle Paul. 1986. *Teori Sosiologi Klasik dan Modern*. Jakarta: Gramedia.
- K Denzin, Norman, dan Yvonna S. Lincoln. 2011. *The Sage Handbook of Qualitative Research 1*. 3. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Kustiningsih, Wahyu, dan Nurhadi. 2020. “Penguatan Modal Sosial dalam Mitigasi Covid-19.” Dalam *Tata Kelola Penanganan Covid-19 di Indonesia : Kajian Awal*, 1:179–93. 10. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Muryanti. 2018. *Pedesaan dalam Putaran Zaman: Kajian Sosiologis Pedesaan, Petani dan Pertanian*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Rusli, Said. 2012. *Pengantar Ilmu Kependudukan*. Jakarta: LP3ES.
- Savirani, Amalinda, dan Dias Prasongko. 2020. “Kekuasaan, Ilmu Pengetahuan dan Tata Kelola Penanggulangan Pandemi Covid-19 Amalinda Savirani dan Dias Prasongko.” Dalam *Tata Kelola Penanganan Covid-19 di Indonesia : Kajian Awal*, 255–73. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Scott, James C. 1976. *Moral Ekonomi Petani: Pergolakan dan Subsistensi di Asia Tenggara*. Jakarta: LP3ES.

Jurnal :

- Eiser, J.Ricahrd, Ann Bostrom, Ian Burton, David M. Johnson, dan John McClure. 2012. “Risk Interpretation and Action: A Conceptual

Framework for Response to Natural Hazard.” *International Journal of Disaster Risk Reduction* 1: 1–12.

Mona, Nailul. 2020. “Konsep Isolasi Dalam Jaringan Sosial Untuk Meminimalkan Efek Contagious (Kasus Penyebaran Virus Corona Di Indonesia).” *Jurnal Sosial Humaniora Terapan* 2 (2). <https://doi.org/10.7454/jsht.v2i2.86>.

Artikel dalam Internet :

Garjito, Dany, dan Chyntia Sami Bhayangkara. 2020. “Arti *Lockdown*, Social Distancing dan istilah Corona lainnya.” *suara.com*, 18 Maret 2020.

Hapsari, Amelia. 2020. “4 Orang Klaster Jamaah Tabligh di Sleman Positif Corona.” *SuaraMerdeka.com*, 29 April 2020.

Idhom, Addi M. 2020. “Update Corona 30 maret 2020: Data di Indonesia, 31 Provinsi dan Dunia.” *Tirto.id*, 30 Maret 2020.

Sagita, Nafilah Sri. 2020. “Wuhan, Kota Pertama Kali Virus Mewabah Kini diklaim Bebas Corona.” *www.detik.com*, 27 April 2020.

Artikel dalam Surat Kabar :

Arif, Ahmad. 2020. “Rela Tertular Covid-19.” *Kompas*, 8 Juli 2020, bag. Sains, Lingkungan dan Kesehatan.

Gitiyarko, Vincentius. 2020. “Upaya dan Kebijakan pemerintah Indonesia Menangkan Pandemi Covid-19.” *Kompaspedia.com*, 22 Juni 2020.

Hasanuddin. 2020. “Fakta Lengkap Kasus Pertama Virus Corona di Indonesia.” *Kompas.com*, 3 Maret 2020. <https://nasional.kompas.com/read/2020/03/03/06314981/fakta-lengkap-kasus-pertama-virus-Corona-di-Indonesia?page=all>.

Karunia, Ade Miranti. 2020. “Tiga Jurus Menaker Tekan angka Pengangguran Akibat Pandemi.” *Kompas.com*, 1 Juli 2020.

Purwanti, Agustina. 2020. “Solidaritas Menguat pada Masa Pandemi.” *Kompas*, 14 Juni 2020, bag. Survei Warga.

Ulya, Fika Nurul. 2020. “Dunia Usaha Terdampak Covid-19, Sektor-Sektor ini yang jatuh paling dalam.” *Kompas.com*, 13 Juli 2020.

**Dinamika Daring *Learning* di Masa
Pandemi Covid-19 dalam Perspektif
Pemerintah, Pendidik, Peserta Didik, dan
Orang Tua**

Sabarudin

*Prodi Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan
Humaniora UIN Sunan Kalijaga*

Email: sabarudin@uin-suka.ac.id

Pendahuluan

Hadirnya Revolusi Industri 4.0 membawa akibat pada semakin eratnya batas antara manusia, mesin industri, teknologi informasi dan komunikasi. Kesemua itu akhirnya berdampak pada seluruh aspek kehidupan (Fomunyam, 2019). Pola kehidupan masyarakat berubah seiring dengan perkembangan teknologi di era tersebut. Agar kehidupannya menjadi lebih mudah, maka setiap individu harus mengikuti perkembangan teknologi dan mengetahui bagaimana memanfaatkannya (Mustofa, 2019).

Pendidikan merupakan bidang yang terkena imbas dari perkembangan teknologi, sebab mau atau tidak harus meresponnya secara positif dan adaptif apabila ingin menjawab kompleksitas tantangan abad 21 (Anealka, 2018). Pemanfaatan teknologi bahkan menjadi isu urgen dan sering dibicarakan dalam berbagai kegiatan, karena keberadaannya merupakan sarana yang bisa digunakan sebagai media pembelajaran. Di era globalisasi, dimana proses belajar tidak lagi hanya dibatasi oleh ruang kelas, maka pemanfaatan teknologi telah memungkinkan munculnya pembelajaran jarak jauh dan mendorong munculnya metode pengajaran di luar kelas.

Studi terhadap pemanfaatan *e-learning* yang dilakukan oleh Much. Fuad Saifuddin (2017), menginformasikan adanya persepsi yang positif dari para mahasiswa. *E-learning* dianggap bermanfaat, dapat meningkatkan motivasi, mempermudah pemahaman materi, hingga membantu kesiapan dalam perkuliahan.

Demikian pula kajian dari Mokhammad Ikilil Mustofa, Muhammad Chodzirin, Lina Sayekti (Mustofa, 2019), menunjukkan bahwa sistem kuliah *online* memiliki kontribusi positif untuk mendorong disparitas kualitas perguruan tinggi di Indonesia, dengan indikasi seperti: dapat meminimalkan keterbatasan akses ke pendidikan tinggi yang memiliki kualitas tertentu; memotong keterbatasan fasilitas yang telah dipertimbangkan sebagai salah

satu kendala dari rendahnya kualitas pendidikan tinggi; menghilangkan batasan pengertian pada materi tertentu; dan memberikan akses luas ke sumber daya pendidikan.

Pada tanggal 30 Januari 2020 WHO telah menetapkan *Coronavirus Diseases 2019* (Covid-19) sebagai darurat kesehatan, karena memang sangat meresahkan dunia. Covid-19 ini memang merupakan penyakit jenis baru yang belum pernah diidentifikasi sebelumnya pada manusia. Akibat dari Pandemi Covid-19 dunia menghadapi persoalan multidimensi, yang dampaknya terasa juga dalam sektor Pendidikan. Semua orang, tanpa kecuali, baik pendidik, peserta didik dan orang tua/wali, dipaksa melakukan adaptasi pasca munculnya virus tersebut. Namun demikian aktivitas belajar mengajar harus tetap berlanjut meski fisik sekolah tutup. Agar proses pembelajaran tetap berlangsung, di masa darurat pandemi mengharuskan diterapkannya pembelajaran daring sebagai pengganti pembelajaran *offline*. Pola pembelajaran demikian menuntut pendidik dan pengembang pendidikan untuk menyiapkan bahan pembelajaran secara langsung melalui alat digital jarak jauh (United Nations, 2020). Tidak sedikit para tenaga pendidik yang berusaha menyiasatinya melalui *WhatsApp Group*, *Google Class*, *Zoom*, *Skype*, serta aplikasi-aplikasi lain.

Yani Fitriyani, Irfan Fauzi, dan Mia Zultrianti Sari, tidak menyia-nyaiakan momen penting pandemi Covid-19. Mereka melakukan kajian kasuistik terkait dengan motivasi belajar mahasiswa pada pembelajaran daring selama pandemi Covid-19. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa motivasi belajar mahasiswa semester 6 program studi pendidikan guru sekolah dasar di Universitas Kuningan sangat baik, hal itu didapatkan dari skor presentase motivasi tersebut yang berjumlah 80,27 %. (Yani Fitriyani, 2020).

Pembelajaran secara daring meski terkesan mudah, dalam implementasinya tidaklah seperti dibayangkan, terlebih untuk level atau jenjang Pendidikan menengah ke bawah. Tidak sedikit keluhan bermunculan. Banyaknya keluhan, mendorong para akademisi dan lembaga-lembaga terkait dengan Pendidikan dan anak untuk melakukan penelitian.

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) pun menghimpun hasil survei persepsi dan harapan terkait belajar di rumah akibat Covid-19. Menurut Lenny N Rosalin, Deputy Menteri PPPA Bidang Tumbuh Kembang Anak, hasil survei menunjukkan 99% anak menganggap bahwa gerakan di rumah saja adalah hal yang sangat penting. Lenny menambahkan, 58% anak memiliki perasaan yang tidak menyenangkan selama menjalani kebijakan belajar di rumah. Sedang, 38% anak berpendapat

bahwa sekolah belum memiliki program yang baik dalam menerapkan kegiatan belajar di rumah (Ade Nasirudin, 2020).

Survei juga menunjukkan harapan anak tentang program belajar di rumah. Anak-anak yang mengikuti survei dari 29 provinsi berharap agar sekolah tidak terlalu banyak memberikan tugas. Komunikasi dua arah antara guru dan murid dirasa lebih efektif. Penyediaan fasilitas akses internet beserta perangkat yang mumpuni pun sangat diperlukan. Dalam survei, anak-anak juga berharap adanya tugas yang berkaitan dengan Covid-19. Mereka berharap, guru memberikan penjelasan maksimal pada muridnya (Ade Nasirudin, 2020).

Kondisi demikian juga mengusik penulis untuk melakukan kajian tambahan terkait dengan pembelajaran daring. Dalam kajian yang penulis lakukan, dan dituangkan dalam artikel ini, ada dua permasalahan yang dijawab, yaitu: *pertama*, permasalahan apa saja yang banyak dijumpai oleh pendidik, peserta didik, dan orang tua/wali terkait dengan daring *learning* di masa pandemi Corona/Covid-19?; *kedua*, Solusi apa yang ditempuh oleh pendidik, peserta didik, dan orang tua/wali untuk mengatasi permasalahan dalam daring *learning*?

Jawaban atas permasalahan di atas tentu tidak seluruhnya berasal dari data primer hasil penelitian langsung di lapangan, melainkan melalui data sekunder yang penulis peroleh dari berbagai informasi secara *online*, baik dalam bentuk pemberitaan, artikel jurnal, ataupun informasi dari pengalaman guru dan orang tua melalui interaksi *WhatsApp Group* atas kegiatan pembelajaran para putra-putri yang didampinginya di rumah. Dengan demikian, secara metodologis penulis menggabungkan temuan data lapangan, baik melalui wawancara, pengamatan, dan pengalaman pribadi, dengan dokumen-dokumen diskusi atau pembicaraan serta pemberitaan terkait pembelajaran daring di media *online*.

Munculnya sistem pembelajaran daring (*e-learning*) membuktikan semakin kondusifnya pemanfaatan teknologi telekomunikasi untuk kegiatan pembelajaran di sekolah di Indonesia. Istilah daring merupakan akronim dari “dalam jaringan“. Pembelajaran daring merupakan pembelajaran yang dilakukan tanpa melakukan tatap muka atau pembelajaran yang menggunakan media internet, proses pembelajaran yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) secara sistematis dengan mengintegrasikan semua komponen pembelajaran, termasuk interaksi pembelajaran lintas ruang dan waktu. Pembelajaran daring adalah salah satu metode pembelajaran online atau pembelajaran yang dilakukan melalui jaringan internet.

Dengan sudut pandang berbeda, para ahli pun memberikan pengertian

pembelajaran daring atau *E-learning* dengan redaksi yang agak berbeda. Michael memberikan pengertian pembelajaran daring (*E-learning*) sebagai pembelajaran yang disusun dengan tujuan menggunakan suatu sistem elektronik atau juga computer, sehingga mampu untuk mendukung suatu proses pembelajaran. Chandrawati memberikan pengertian *E-learning* sebagai suatu proses pembelajaran jarak jauh dengan cara menggabungkan prinsip-prinsip di dalam proses suatu pembelajaran dengan teknologi. Ardiansyah, memberikan pengertian *e-learning* sebagai suatu sistem pembelajaran yang dilaksanakan dilaksanakan tanpa harus bertatap muka dengan secara langsung antara pendidik dengan siswa/i (Parta Setiawan, 2020).

Pembelajaran daring merupakan salah satu wujud dari inovasi pendidikan yang melibatkan unsur teknologi informasi dalam pembelajaran. Menurut Mustofa et al (2019) sebagaimana dikutip Yani Fitriyani dkk., pembelajaran daring merupakan sistem pendidikan jarak jauh dengan sekumpulan metode pengajaran dimana terdapat aktivitas pengajaran yang dilaksanakan secara terpisah dari aktivitas belajar. Pembelajaran daring diselenggarakan melalui jejaring internet dan web 2.0, artinya bahwa penggunaan pembelajaran daring melibatkan unsur teknologi sebagai sarana dan jaringan internet sebagai sistem (Yani Fitriani, 2020).

Sistem pembelajaran daring ini sebenarnya telah dikembangkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia melalui Program Kuliah Daring Indonesia Terbuka dan Terpadu (KDITT) (Kemendikbud, 2014). KDITT merupakan program pemerintah dalam menjangkau pelajar skala nasional. Dalam Rencana Strategis (Renstra) 2010-2014, Kemdikbud menetapkan Visi 2014 yakni “Terselenggaranya Layanan Prima Pendidikan Nasional untuk Membentuk Insan Indonesia Cerdas Komprehensif”. Untuk mencapai visi tersebut, Kemdikbud melaksanakan “Misi 5K” 2010-2014 sebagai berikut (i) Meningkatkan Ketersediaan Layanan Pendidikan (ii) Meningkatkan Keterjangkauan Layanan Pendidikan (iii) Meningkatkan Kualitas/Mutu dan Relevansi Layanan Pendidikan (iv) Meningkatkan Kesetaraan dalam Memperoleh Layanan Pendidikan dan (v) Meningkatkan Kepastian/Keterjaminan Memperoleh Layanan Pendidikan (Kemendikbud, 2014).

KDITT bertujuan untuk memberikan layanan pembelajaran bermutu secara dalam jaringan (daring) yang bersifat terbuka dan terpadu untuk menjangkau audiens yang lebih luas dalam skala nasional (Kemendikbud, 2014: 6). Manfaat yang diharapkan muncul dari sistem ini adalah:

Meningkatkan mutu pendidikan dengan mengacu pada standar isi dan proses pembelajaran melalui penerapan ISO 19796 dan ISO 29163; Meningkatkan keterjangkauan pendidikan yang bermutu melalui penyelenggaraan kuliah dalam jaringan; dan menekan biaya penyelenggaraan pendidikan yang bermutu melalui pemanfaatan bersama sumber daya Pendidikan (Kemendikbud, 2014: 6).

Dengan bahasa yang sedikit berbeda, Bates dan Wulf, sebagaimana dikutip Musthafa, mengidentifikasi manfaat pembelajaran daring meliputi 4 hal, yaitu: (1) Meningkatkan kadar interaksi pembelajaran antara peserta didik dengan guru atau instruktur (*enhance interactivity*), (2) Memungkinkan terjadinya interaksi pembelajaran dari mana dan kapan saja (*time and place flexibility*), (3) Menjangkau peserta didik dalam cakupan yang luas (*potential to reach a global audience*), (4) Mempermudah penyempurnaan dan penyimpanan materi pembelajaran (*easy updating of content as well as archivable capabilities*) (Mustofa, 2019: 154).

Hasil penelitian Riaz Ahmed, sebagaimana dikutip Yani juga membuktikan bahwa pembelajaran daring memberikan manfaat dalam membantu menyediakan akses belajar bagi semua orang, sehingga menghapus hambatan secara fisik sebagai faktor untuk belajar dalam ruang lingkup kelas, bahkan hal tersebut dipandang sebagai sesuatu yang efektif untuk diterapkan (Yani Fitriani, 2020). Namun demikian menurut Pilkington, sebagaimana juga dikutip Yani, tidak bisa dipungkiri bahwa tidak semua pembelajaran dapat dipindahkan ke dalam lingkungan pembelajaran secara *online* (Yani Fitriani, 2020).

Pembelajaran daring memiliki karakteristik tertentu. Menurut Khoe Yao Tung, sebagaimana diadaptasi oleh Musthofa, karakteristik tersebut, antara lain: 1) Materi ajar disajikan dalam bentuk teks, grafik, dan berbagai elemen multimedia, 2) Komunikasi dilakukan secara serentak dan tidak serentak seperti *video conferencing*, *chats rooms*, atau *discussion forums*, 3) Digunakan untuk belajar pada waktu dan tempat maya, 4) Dapat digunakan berbagai elemen belajar berbasis CD-ROM, untuk meningkatkan komunikasi belajar, 5) Materi ajar relatif mudah diperbaharui, 6) Meningkatkan interaksi antara mahasiswa dan fasilitator, 7) Memungkinkan bentuk komunikasi belajar formal dan informal, 7) Dapat menggunakan ragam sumber belajar yang luas di internet (Mustofa, 2019: 154).

Sebagaimana halnya pembelajaran *offline*, penggunaan sistem pembelajaran daring atau *e-learning* juga memiliki sisi kelebihan dan kekurangan. Sisi positif atau kelebihannya, dengan pembelajaran daring atau *e-learning*

pendidik dan peserta didik dapat belajar secara *online* dari rumah atau tempat lain tanpa harus datang ke kampus atau sekolah. Di era teknologi-informasi, pembelajaran daring atau *e-learning* memberi pilihan yang lebih fleksibel, efisiensi waktu, dan tenaga dalam proses belajar mengajar, bahkan efisiensi dari sisi biaya perjalanan, terutama bagi siswa atau mahasiswa yang tinggal di daerah terpencil yang kesulitan menuju kampus atau sekolah. Selain itu, pembelajaran daring juga dapat membantu mahasiswa yang tinggal di daerah terpencil yang kesulitan akses menuju kampus maupun berbenturan waktu terutama mahasiswa yang kuliah sambil bekerja. Pembelajaran daring juga bisa membuka kebebasan berekspresi bagi mahasiswa yang merasa kurang percaya diri ketika perkuliahan tatap muka, karena rasa malu, segan, takut atau bahkan belum memiliki kemampuan verbal yang baik.

Adapun sisi kekurangan dari pembelajaran daring atau *e-learning* biasanya pada sisi prosesnya yang terkadang tidak berjalan secara efektif. Ada banyak faktor yang mempengaruhi hal tersebut. Beberapa faktor diantaranya adalah: sulitnya mendapatkan sinyal yang bagus (kuat dan stabil) terutama pada beberapa daerah tertentu, dibutuhkan biaya yang relatif tidak murah untuk membeli kuota internet, dan minimnya komunikasi dan interaksi secara langsung atau tatap muka antar sesama peserta didik, maupun peserta didik dengan pendidik. Meski sering dianggap kuno, pembelajaran konvensional dengan tatap muka secara psikologis memiliki kelebihan tersendiri. Melalui tatap muka secara langsung antara pendidik dan peserta didik, selain memberi kesan pada gaya mengajar sang pendidik, cepat atau lambat juga terjadi proses pembentukan karakter pada diri peserta didik.

Permasalahan dalam Pembelajaran Daring Era Pandemi

Sebagaimana disinggung di atas, bahwa pembelajaran berbasis daring (pembelajaran *online*) menemukan momentum ketika pandemi virus Corona atau *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) melanda. Semua Lembaga pendidikan, baik untuk tingkatan sekolah dari TK hingga SMA, bahkan Perguruan Tinggi melakukan proses belajar secara *online*. Banyak dosen/guru dan mahasiswa/murid “kelabakan” dibuatnya. Mulai masalah “kuota data” hingga masih awam soal aplikasi, sistem, atau proses pembelajaran daring.

Dalam presentasi di webinar “Penyesuaian Kebijakan Pembelajaran di Masa Pandemi Covid-19”, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Nadiem Makarim, membuat pemetaan atas kendala yang muncul dalam pembelajaran daring selama masa pandemi. *Pertama*, kendala atau permasalahan yang

dihadapi oleh para pendidik. Berbagai macam kendala yang dihadapi para pendidik, meliputi: pendidik kesulitan dalam mengelola Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) dan cenderung lebih fokus pada penuntasan kurikulum; waktu pembelajaran berkurang sehingga pendidik tidak mungkin memenuhi beban jam mengajar; guru merasa kesulitan berkomunikasi dengan orang tua sebagai mitra di rumah; dan akses ke sumber belajar (bisa karena masalah jangkauan listrik/internet maupun dana untuk aksesnya).

Kedua, kendala atau permasalahan yang dihadapi orang tua. Beberapa kendala yang dihadapi orang tua peserta didik, meliputi: tidak semua orang tua mampu mendampingi anak belajar di rumah karena ada tanggungjawab lainnya, seperti orang tua yang harus bekerja di luar rumah, maupun pekerjaan di dalam rumah, dan sebagainya; kesulitan orang tua dalam memahami pelajaran dan memotivasi anak saat mendampingi belajar di rumah; dan akses ke sumber belajar (baik karena masalah jangkauan listrik/internet maupun dana untuk aksesnya).

Ketiga, kendala atau permasalahan yang dihadapi oleh peserta didik. Beberapa kendala yang dihadapi oleh peserta didik, meliputi: siswa kesulitan berkonsentrasi belajar dari rumah dan mengeluhkan beratnya penugasan soal dari pendidik; peningkatan rasa *stress* dan jenuh akibat isolasi berkelanjutan yang berpotensi menimbulkan rasa cemas dan depresi bagi anak; dan akses ke sumber belajar (bisa karena masalah jangkauan listrik/internet maupun dana untuk aksesnya (Nadiem Makarim, 2020)

Pakar Pendidikan Universitas Brawijaya (UB), Aulia Luqman Aziz, mengungkapkan bahwa satu hal penting yang biasa dipetik sebagai sebuah pelajaran dari dunia pendidikan di tengah pandemi Covid-19, adalah bahwa kegiatan belajar tatap muka dengan guru terbukti lebih efektif ketimbang secara daring (*online*). Menurut Aziz, selamanya profesi guru tidak akan tergantikan oleh teknolog. Pembelajaran penuh secara daring, justru banyak menimbulkan keluhan dari peserta didik maupun orang tua (Sri Harnani, 2020).

Beberapa guru di sekolah mengaku jika pembelajaran daring ini tidak seefektif kegiatan pembelajaran konvensional (tatap muka langsung), karena beberapa materi harus dijelaskan secara langsung dan lebih lengkap. Selain itu, materi yang disampaikan secara daring belum tentu bisa dipahami semua siswa. Berdasarkan pengalaman mengajar secara daring, sistem ini hanya efektif untuk memberi penugasan, dan kemungkinan hasil pengerjaan tugas-tugas ini diberikan ketika siswa akan masuk, sehingga kemungkinan akan menumpuk (Sri Harnani, 2020).

Komisioner Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), Retno Listyarti, melalui keterangan persnya di Jakarta, Senin tanggal 13 April 2020), mengaku menerima 213 pengaduan terkait pelaksanaan pembelajaran jarak jauh (PJJ) dari para siswa di berbagai daerah di Indonesia. Beberapa keluhan pembelajaran daring datang dari anak-anak dari keluarga yang kurang mampu.

“Terdapat sopir ojek *online* (ojol) yang memiliki tiga anak, dengan dua di jenjang, SD dan jenjang SMA. Mereka merasa kewalahan dalam membeli kuota internet. Sedangkan penghasilan sebagai ojol menurun drastis” (Guru.or.id, 2020).

Seorang guru di Yogyakarta juga menceritakan bahwa pembelajaran daring dengan para siswa hanya bisa dilakukan pada minggu pertama belajar di rumah. Setelah itu siswa tersebut sudah tidak bisa lagi mengikuti pembelajaran daring, karena orang tuanya tidak sanggup membeli kuota internet (Guru.or.id, 2020).

Selain itu, tidak sedikit pula di antara siswa yang tidak memiliki *handphone android*, laptop atau komputer, sehingga terpaksa harus bergantian dengan *handphone* orang tuanya.

“Ada anak sopir ojol yang mengaku gantian menggunakan *handphone* dengan ayahnya. Kalau siang dipakai bekerja, jadi malamnya baru bisa digunakan si anak untuk mengerjakan tugas dari gurunya. Masalah sinyal juga menjadi kendala di beberapa daerah yang berbukit-bukit. “Akibatnya ada siswa yang setiap hari harus berjalan 10 KM untuk mendapatkan *signal* dan *wifi*” (Guru.or.id., 2020).

Menurut Ketua Umum Ikatan Guru Indonesia, Muhammad Ramli Rahim, pemahaman yang kurang tepat pada pembelajaran daring oleh sebagian pendidik, juga berdampak pada aktivitas pendidik yang lebih banyak hanya memberikan tugas melalui internet, bukan untuk bertemunya pendidik dan peserta didik di ruang maya. Jika pendidik hanya memberikan tugas atau pekerjaan rumah pada peserta didik, maka yang repot adalah orang tua peserta didik. Apalagi jika orang tuanya juga bekerja dari rumah.

“Seharusnya, pembelajaran daring sama halnya dengan pembelajaran di kelas. Murid dan guru bertemu di ruang maya. Terjadi interaksi guru dan murid. Adanya virus Covid-19 ini membuka mata kita, bagaimana sesungguhnya kualitas guru kita. Pendidikan kita masih gagap dalam menghadapi kondisi seperti ini” (Andri Saubani, 2020).

Pemerhati pendidikan lain, Indra Charismiadi, juga mengatakan, bahwa

banyak kejadian lucu yang ditemui dalam usaha sekolah membuat proses pembelajaran daring. Ada yang membuat konsep ceramah *online*, ada yang tetap mengajar di kelas seperti biasa tetapi divideokan, sehingga menjadi lucu karena mengajar bangku-bangku kosong kemudian dikirim ke aplikasi *WhatsApp* siswa, ada pula yang memanfaatkan konten-konten gratis dari berbagai sumber.

“Suatu usaha awal yang baik tetapi pada dasarnya tidak sesuai dengan pedagogi digital, yang mana konten sudah tidak penting lagi karena dengan adanya internet betapa mudahnya mendapatkan konten dan sebagian besar gratis. Fokus di pendidikan era 4.0 bukan lagi apa yang dipelajari, melainkan bagaimana caranya belajar. Dalam hal itu, peran seorang pendidik sangat dibutuhkan, karena mereka harus membimbing peserta didik tentang caranya belajar dengan memanfaatkan internet. Intinya guru-guru Indonesia belum siap melakukan pembelajaran dalam konsep daring. Guru tidak perlu memberi banyak informasi, namun yang penting informasi yang membuat siswa produktif dan kreatif. Dalam pembelajaran daring, guru dan orang tua memiliki peran pendampingan. Tidak dengan menyuapi anak dengan pengetahuan, tapi membiarkan anak memilih pengetahuan itu sendiri” (Andri Saubani, 2020).

Psikolog dari Universitas Indonesia, Dr. Rose Mini Agoes Salim, mengatakan, peserta didik harus membiasakan diri dengan pembelajaran dalam jaringan (daring) selama berlangsungnya wabah virus Covid-19 di Tanah Air. Dalam hal ini, pendidik bisa menggunakan *platform-platform* pembelajaran daring tertentu yang diharapkan bisa membantu peserta didik, sehingga peserta didik merasa seolah-olah bertatap muka dengan pendidiknya. Bisa dengan menggunakan video dan lainnya. Begitu selesai melihat video, mendengarkan apa yang diterangkan oleh pendidik, kemudian ada bahan pertanyaan yang harus diisi oleh peserta didik. Pertanyaan itu, kalau sudah diisi tidak bisa balik lagi. Dengan pola seperti itu, anak akan mendengarkan dan fokus pada pembelajaran daring, sehingga bisa menjawab pertanyaan. Untuk sisa waktu setelah belajar, Rose menyarankan keluarga melakukan proyek bersama yang dilakukan seluruh anggota keluarga (Andri Saubani, 2020).

Kerja keras untuk menemukan solusi atas permasalahan dalam pembelajaran daring dilakukan oleh Titi, salah seorang guru di Sekolah Dasar, sebagaimana yang disampaikan pada *CNNIndonesia.com*, pada hari Jumat tanggal 27 Maret 2020.

“Saya mengajar kelas 2 SD. Ketika ada *meeting* (pertemuan)

menggunakan aplikasi *Zoom*, tidak semua anak bisa mengakses, karena ada yang orang tuanya masih kerja, ada juga yang orang tuanya gagap teknologi, tidak fasih menggunakan aplikasi” (Tim CNN Indonesia, 2020).

Akhirnya, menurut Titi, jika ada permasalahan yang ingin ditanyakan, para orang tua murid berbondong-bondong menghubunginya melalui *WhatsApp*. Titi pun berupaya mencari alternatif lain sebagai medium pembelajaran secara daring, yakni *Google Docs*. Dengan memberikan satu tautan yang berisi materi pelajaran sekaligus tugas serta batas waktu pengerjaan dinilai lebih bisa mengakomodir kebutuhan orang tua dan anak (Tim CNN Indonesia, 2020).

Berbeda halnya dengan Ritza, guru kelas 3 SD di sebuah sekolah di Bogor. Di sekolah tempat Ritza bekerja, guru diwajibkan memberikan materi pelajaran dan tugas melalui alamat surat elektronik milik orang tua. Namun cara ini dinilai Ritza tidak berjalan dengan efektif, karena menurutnya fakta di lapangan memperlihatkan masih banyaknya orang tua yang kebingungan terkait dengan cara mengirimkan lampiran hasil tugas, mengunduh materi dan mempelajari instruksi tugas.

“Kami mengirim dokumen materi berupa *Power Point*, dilampirkan juga *worksheet*-nya. Anak bisa mengerjakan di laptop, dicetak, lalu tulis tangan. Lalu difoto, diunggah lagi. Hanya satu dua orang yang *gadget*. Jadi ditulis, foto, terus kirim lewat *WhatsApp*” (Tim CNN Indonesia, 2020).

Dengan model tersebut tentu membuat Ritza harus menyisir kotak surat elektroniknya satu per satu. Karena kiriman menggunakan akun milik orang tua otomatis dia harus lebih teliti dengan membuka semua email. Dalam proses pengecekan tugas juga mengharuskan Ritza mengunduh semua dokumen. Ponsel Ritza juga terus berdering karena tidak sedikit orang tua yang mengajukan berbagai macam pertanyaan. Akhirnya, sekolah pun terpaksa melanggar himbauan ‘*work from home*’ demi memberikan pelatihan aplikasi tertentu (Tim CNN Indonesia, 2020).

Sebagaimana dinyatakan Anri Saputra (2020), bahwa penggunaan teknologi dalam proses belajar dan mengajar merupakan suatu kebutuhan saat ini, karena teknologi dapat memperluas dan mengembangkan pembelajaran peserta didik, serta mendukung tujuan pengajaran. Selain itu, menggunakan teknologi memiliki dampak yang signifikan pada aplikasi pendidikan, dan mengubah cara guru mengajar, cara siswa belajar, dan cara guru dan siswa berkomunikasi. Namun, ini bisa menjadi tantangan nyata bagi para pendidik

untuk menguasai berbagai alat teknologi, agar pendidik dapat memahami dan menyampaikan pembelajaran dengan baik, dan tidak salah dalam memahami siswa. Bahkan di era pandemi Covid-19, orang tua siswa pun dituntut menguasai teknologi agar mampu mendampingi anaknya secara lebih baik.

Maka tidak dinafikan bahwa di balik rasa frustrasi karena harus menyesuaikan dengan tuntutan pembelajaran di masa pandemi Covid-19, ada hal-hal positif yang dirasakan oleh para pendidik seperti Titi dan Ritza, dan juga bagi orang tua. Bagi Titi, konsep pembelajaran daring membuatnya lebih fleksibel, baik dalam soal waktu dan sumber pembelajaran. Hal yang serupa juga dirasakan Ritza yang kini memiliki lebih banyak waktu untuk keluarga. Namun demikian, keduanya kompak tetap memilih konsep pembelajaran langsung (tatap muka) di kelas, karena dinilai jauh lebih efektif. Pembelajaran di kelas membuat guru maupun murid bisa berinteraksi sekaligus mendapatkan umpan balik. Berbeda halnya dengan kelas *online*. Jika ada yang tidak faham atau tidak mengerti, ada gangguan konsentrasi karena adiknya ikut bergabung, sinyal kurang bagus (kuat), maka materi pelajaran ataupun pesan lain tidak akan sampai (Tim CNN Indonesia, 2020).

Berbagai masalah yang muncul dalam pembelajaran daring atau kegiatan belajar mengajar yang tidak dilakukan di sekolah atau Lembaga Pendidikan, menurut analisis dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, berpotensi menimbulkan dampak negatif yang berkepanjangan. Ada tiga dampak negatif yang diprediksi akan muncul, yaitu: ancaman putus sekolah; penurunan capaian belajar; dan kekerasan pada anak dan resiko eksternal (Nadiem Makarim, 2020).

Pertama, Ancaman Putus Sekolah. Akibat pandemi berkepanjangan, berdampak pada munculnya kondisi yang memaksa anak harus bekerja. Kondisi tersebut bisa berujung pada resiko putus sekolah dikarenakan anak terpaksa bekerja untuk membantu keuangan keluarga di tengah krisis pandemi Covid-19. Di sisi lain, akan muncul pula persepsi negatif di kalangan orang tua akibat tidak bias melihat peranan sekolah dalam proses belajar mengajar disebabkan proses pembelajaran tidak dilakukan secara tatap muka.

Kedua, Penurunan Capaian Belajar. Kondisi pandemi yang berkelanjutan akan menyebabkan kesenjangan dalam capaian belajar. Perbedaan akses dan kualitas selama pembelajaran jarak jauh dapat mengakibatkan kesenjangan capaian belajar, terutama untuk anak sosio-ekonomi berbeda. Apalagi hasil studi menemukan bahwa pembelajaran di kelas menghasilkan pencapaian akademik yang lebih baik saat dibandingkan dengan PJJ.

Konsep pembelajaran daring menurut sebagian pendidik juga berdampak

pada penurunan standar pembelajaran. Dengan keragaman kondisi ekonomi dan latar belakang pendidikan keluarga (orang tua), tidak mungkin pendidik menaruh ekspektasi yang tinggi. Apalagi kondisi psikis anak yang dalam banyak kasus lebih patuh kepada instruksi guru melalui tatap muka langsung, dibanding dengan penugasan secara *online* meski didampingi orang tua dalam penyelesaiannya. Bahkan bukan merupakan rahasia, kalau tidak sedikit dari tugas-tugas *online* yang diberikan oleh pendidik, yang mengerjakan bukan peserta didiknya, melainkan orang tua bahkan saudaranya yang lebih dewasa. Itu sebabnya, pendidik semacam Titi dan Ritza, atau bahkan juga pendidik-pendidik yang lain, berharap agar orang tua membiarkan si buah hati untuk belajar memahami pelajaran dan mengerjakan tugasnya sendiri. Hal tersebut bukan berarti orang tua tidak boleh membantu. Orang tua boleh membantu tetapi harus dalam batas yang wajar, seperti tidak mengerjakan tugas sekolah anak sepenuhnya (Tim CNN Indonesia, 2020).

Faktor ketidakmampuan secara ekonomi (kemiskinan) juga menjadi kendala bagi pembelajaran daring. Hal demikian terjadi pada Wahyu Agus Nurtino, siswa kelas VI SDN Brumbun, Desa Brumbun, Kecamatan Wungu, Kabupaten Madiun. Keluarganya miskin, tidak memiliki *smartphone* untuk mengikuti kegiatan belajar daring. Untuk mensiasatinya, ia nebang ke rumah temannya yang memiliki *smartphone*. Ini dilakukan supaya tugas-tugas dari guru bisa terpantau. Tetapi, langkahnya itu justru tidak didukung pihak sekolah yang dengan alasan menghindari kerumunan, meminta agar Wahyu tidak lagi nebang di rumah temannya, dan tidak belajar kelompok. Wahyu dianjurkan supaya belajar di rumah dengan mengerjakan LKS (Lembar Kerja Siswa).

Ayah Wahyu, Slamet Nursanto, mengatakan bahwa kegiatan belajar kelompok yang dilakukan anaknya adalah bentuk keterpaksaan, karena kondisinya memang tidak ada HP (*handphone*) yang untuk menunjang kegiatan belajar anak. Dia pun menyesalkan sikap sekolah yang justru tidak mendukung usaha anaknya untuk memenuhi tugas dari sekolah.

“Saya memang tidak punya HP. Orang tua juga tidak punya HP. Makanya saya ke rumah teman yang punya HP yang ada WA-nya, karena tugas dari guru dikirimnya lewat WA..... “Belajar kelompok itu kan positif. Kok dilarang. Karena kondisinya memang tidak punya HP yang seperti itu (*smartphone*).” (Solopos.Com., 2020).

Sejumlah orang tua atau wali murid di Kecamatan Sragi, Lampung Selatan juga Kepala Desa Sumberagung, Ali Rohim, mengatakan sistem belajar mengajar daring yang diperpanjang hingga 30 September mendatang

semakin menambah beban orang tua. Bahkan belajar secara daring itu dinilai tidak efektif.

“Belajar daring ini bukan membuat anak tambah pintar. Tapi, belajar daring ini seperti pembodohan, kurang efisien dan belum bisa diterapkan di sini. Warga saya sudah banyak yang mengeluh. Selain, beban bertambah untuk pendampingan, ada juga orang tua yang tidak mampu harus membeli telepon seluler (ponsel) pintar agar anaknya bisa ikut belajar daring. Harapan kami sebagai orang tua, pemerintah bisa kembali menerapkan belajar di sekolah. Sebab, saat ini Pasar, *Mall*, dan tempat wisata pun sudah dibuka. Sementara untuk belajar mengajar di sekolah belum diizinkan. Mau enggak mau, kami harus beli *handphone android*. Belum lagi beli kuota internet supaya bisa belajar secara daring” (Lamos.Com., 2020).

Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) Sumenep, Carto, mengaku ‘banjir’ keluhan dari para orang tua murid dengan pelaksanaan Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) atau melalui daring (*online*) selama masa pandemi Covid-19.

“Cukup banyak keluhan yang masuk pada kami tentang metode pembelajaran daring. Kami menyadari memang ada banyak kendala untuk menerapkan metode pembelajaran itu. Terkadang orang tua siswa ada yang tidak punya HP *Android*. Kemudian ada juga daerah yang sinyalnya tidak mendukung, dan beberapa faktor alam lainnya yang tidak dapat dipaksakan menggunakan metode daring” (Temmy P., 2020).

Anggota Komisi D Bidang Kesra DPRD Kota Makassar dari PPP, Abdul Wahid, mengakui bahwa di Makassar sendiri masih dianggap sulit menyelenggarakan pembelajaran *offline*. Namun demikian pertimbangan seperti di atas dianggap penting untuk dikaji, akibat dari telah banyaknya keluhan dari orang tua siswa yang merasa tidak sanggup menggelar kelas daring bagi anaknya.

“Tidak bisa kita pungkiri masih banyak kekurangan, karena ada juga orang tua siswa yang tidak mampu lagi karena selama pandemi justru penghasilan mereka berkurang, jadi memang perlu membuka suatu wawasan baru tapi dengan pertimbangan yang cukup matang. “Kondisi yang ada memang ada beberapa masyarakat yang tidak mampu lagi membeli pulsa, apalagi ada juga orang tua yang tidak memiliki HP untuk mengikutkan anaknya sekolah daring, ada kasus malah dekat rumah itu nda pernah ikut absen di kelas. Selain

itu rata-rata laporan juga terkait keluhan orang tua yang merasa tidak bisa sepenuhnya melakukan pendampingan setiap saat kepada anaknya saat melakukan pembelajaran daring” (Ashari Prawira Negara, 2020).

Memang ada *plus minus* ketika belajar dilakukan dari rumah atau secara daring di masa pandemi ini. Nilai *plusnya*: menghindari resiko penularan Covid-19 di sekolah; siswa dan guru/pengajar jadi ‘melek’ teknologi dan internet; pembelajaran dibawah pengawasan orang tua/wali murid; orang tua atau wali murid terlibat aktif; interaksi siswa dan orang tua lebih terjalin. Adapun sisi *minusnya* adalah: butuh ponsel cerdas, komputer/laptop, dan akses internet relatif mahal; aplikasi telekonferensi boros kuota internet; kirim tugas berupa *file* foto/audio/video butuh koneksi cepat internet; butuh pendampingan atau pengawasan penuh orang tua/wali murid; siswa gampang jenuh dan bosan (Yuslianson, 2020).

Ketiga, Kekerasan Pada Anak dan Resiko Eksternal. Tanpa sekolah, banyak anak yang terjebak di kekerasan rumah tanpa terdeteksi oleh guru. Ketika anak tidak lagi datang ke sekolah, terdapat peningkatan resiko untuk pernikahan dini, eksploitasi anak, terutama perempuan, dan kehamilan remaja (Nadiem Makarim, 2020).

Solusi Pembelajaran *Online*

Terlepas dari permasalahan yang muncul sebagai implikasi dari pembelajaran daring, menurut Guru Besar Universitas Tanjungpura (Untan), Pontianak, Thamrin Usman, sistem Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) dianggap sebagai solusi yang terbaik bagi dunia pendidikan di Indonesia di masa pandemi Covid-19, untuk menghindari resiko tinggi tertular virus Corona. Menurut Thamrin Usman, keputusan pemerintah untuk tetap memberlakukan PJJ di 94% aktivitas pendidikan di wilayah Indonesia merupakan kebijakan menarik dan tepat. Memang, menurut beliau, pola PJJ oleh mayoritas masyarakat dianggap tidak menyenangkan oleh para murid atau mahasiswa, pengajar, dan orang tua dengan berbagai argumentasi hambatan. Aspek keselamatan dan kesehatan dari pendidik dan peserta didik itu lebih utama dibanding kendala PJJ. Mengenai hambatan PJJ, menurutnya bisa saja dibahas bersama solusinya antara sekolah dan orang tua murid (Ichsan, 2020).

Sebagaimana disampaikan Mendikbud, Nadiem Makarim, bahwa kebijakan Pendidikan di masa pandemi Covid-19 lebih menekankan pada prinsip (1) kesehatan dan keselamatan peserta didik, pendidik, tenaga kependidikan, keluarga, dan masyarakat merupakan prioritas utama dalam menetapkan kebijakan pembelajaran; dan (2) tumbuh kembang peserta

didik dan kondisi psiko-sosial juga menjadi pertimbangan dalam pemenuhan layanan Pendidikan selama masa pandemi Covid-19 (Nadiem Makarim, 2020).

Untuk mengantisipasi konsekuensi negatif dan isu dari pembelajaran jarak jauh, pemerintah mengimplementasikan dua kebijakan baru, yaitu: *pertama*, memperluas pembelajaran tatap muka untuk zona kuning. Pada zona ini pelaksanaan pembelajaran tatap muka diperbolehkan untuk semua jenjang yang berada di zona hijau dan zona kuning. *Kedua*, menerapkan kurikulum darurat (dalam kondisi masa khusus). Di mana sekolah diberi fleksibilitas untuk memilih kurikulum yang sesuai dengan kebutuhan pembelajaran siswa. Kurikulum darurat ini dimaksudkan untuk mengurangi beban guru dalam melaksanakan kurikulum nasional, dan siswa dalam keterkaitannya dengan penentuan kenaikan kelas, dan kelulusan. Kurikulum darurat ini disiapkan untuk semua jenjang. Adapun untuk jenjang PAUD dan SD, dimana pembelajaran jarak jauh dinilai sangat sulit dilakukan, dibuatkan modul pembelajaran, yang berisi panduan untuk guru, pendamping (orang tua/wali), dan siswa (Nadiem Makarim, 2020).

Poornima Luthra dan Sandy Mackenzi (2020) menyebut ada empat cara Covid-19 mengubah cara kita mendidik generasi masa depan. Pertama, bahwa proses pendidikan di seluruh dunia semakin saling terhubung (*educating citizens in an interconnected world*). Kedua, pendefinisian ulang peran pendidik (*redefining the role of the educator*). Ketiga, mengajarkan pentingnya keterampilan hidup di masa yang akan datang (*teaching life skills needed for the future*). Dan keempat, membuka lebih luas peran teknologi dalam menunjang Pendidikan (*unlocking technology to deliver education*) (Luthfra, 2020).

Pakar lain, Gloria Tam dan Diana El Azar (2020) mengidentifikasi ada tiga perubahan mendasar di dalam pendidikan global sebagai akibat dari pandemi virus Corona. *Pertama*, mengubah cara jutaan orang dididik (*education-nudged and pushed to change-could lead to surprising innovations*). *Kedua*, solusi baru untuk pendidikan yang dapat membawa inovasi yang sangat dibutuhkan (*public-private educational partnerships could grow in importance*); *Ketiga*, adanya kesenjangan digital menyebabkan pergeseran baru dalam pendekatan pendidikan dan dapat memperluas kesenjangan (*the digital divide could widen*).

Apa yang disampaikan Poornima Luthra & Sandy Mackenzi (2020) maupun Gloria Tam dan Diana El Azar (2020) menunjukkan betapa Covid-19 telah mendorong terjadinya percepatan transformasi pendidikan. Di mana, dalam waktu yang sangat singkat pola pembelajaran konvensional

secara tatap muka di sekolah berubah menjadi Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) yang sangat bergantung pada teknologi sebagai solusinya.

Inisiasi solusi yang telah dan akan dilaksanakan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, sebagaimana disampaikan oleh Mendikbud Nadim Makarim adalah dengan mencanangkan: Program Guru Berbagi, Seri Bimtek Daring, Seri Webinar, Penyediaan Kuota Gratis, Relaksasi BOS dan BOP, Ruang Guru PAUD dan Sahabat Keluarga, Belajar di TVRI dari Rumah, Belajar di Radio RRI, Rumah Belajar, dan Kerjasama dengan penyedia *platform* pembelajaran daring.

Keberhasilan dari suatu model ataupun media pembelajaran tergantung dari karakteristik peserta didiknya. Hal ini diungkapkan oleh Nakayama et al (2014) bahwa dari semua literatur mengindikasikan bahwa tidak semua peserta didik akan sukses dalam pembelajaran *online*. Hal itu disebabkan karena perbedaan faktor lingkungan belajar dan karakteristik peserta didik. Salah satu keberhasilan dalam pembelajaran adalah terkait dengan motivasi yang dimiliki siswa (Schunk et al., 2014).

Sebagai bagian dari solusi pemerintah terkait dengan pembelajaran di masa pandemi Covid-19, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Anwar Makarim menerbitkan Surat Edaran Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pendidikan Dalam Masa Darurat *Coronavirus Disease* (Covid-19). Salah satu pokok penting dalam edaran ini adalah keputusan pembatalan Ujian Nasional (UN) Tahun 2020.

“Setelah kami pertimbangkan dan diskusikan dengan Bapak Presiden dan juga instansi di luar, kami di Kemendikbud telah memutuskan untuk membatalkan Ujian Nasional di tahun 2020. Tidak ada yang lebih penting daripada keamanan dan kesehatan siswa dan keluarganya. Kita juga sudah tahu bahwa Ujian Nasional bukanlah syarat kelulusan ataupun untuk seleksi masuk jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Mengikuti UU Sisdiknas (Sistem Pendidikan Nasional), evaluasi itu ada di guru, dan kelulusan ada di sekolah” (Kemendikbud, 2020).

Jika melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, pemerintah telah mengambil langkah solutif atas berbagai permasalahan pembelajaran daring di masa pandemi Covid-19, maka beberapa cara solusi yang telah ditempuh oleh guru, orang tua dan peserta didik adalah sebagai berikut juga bisa dijadikan alternatif, yaitu: (1) memanfaatkan siaran televisi seperti program belajar dari rumah di TVRI; (2) menggunakan aplikasi perbincangan di ponsel yang gratis *call* video, kiriman foto, audio, video; (3) menggunakan rekam

video materi belajar atau penugasan lalu kirim via aplikasi perbincangan di ponsel; (4) menggunakan siaran radio seperti di Kabupaten Sikka Provinsi Nusa Tenggara Timur; dan (5) memakai *handy talky* seperti di Desa Punik di daerah Dataran Tinggi Sumbawa, Nusa Tenggara Barat (Yulianson, 2020; Muhamad Wahyu Hidayad, 2020). Alternatif solusi tersebut tentu saja juga tidak sepenuhnya lancar, karena adanya kendala teknis di lapangan. Seperti penggunaan siaran radio di Kabupaten Sikka, juga terkendala teknis, karena tidak semua orang tua siswa memiliki radio (Ani Nursalikah, 2020).

Khusus bagi para guru ditawarkan juga beberapa alternatif solusi yang bisa digunakan dalam mensiasati pembelajaran daring di masa pandemi, yaitu: (1) memberi tugas-tugas yang kreatif pada siswa; (2) memanfaatkan media teknologi; (3) pembelajaran yang terencana dan efektif; (4) menyatukan persepsi dan konsentrasi siswa; (5) memotivasi siswa menjadi anak yang tangguh; dan (6) membangun kolaborasi antara orang tua dan pihak sekolah (www.sekolahdasar.net, 2020).

Berdasarkan hasil pengamatan dan wawancara, ada sekolah yang menggunakan model *Blanded Learning*, kunjungan rumah, memberi kebebasan kepada siswa untuk mengerjakan tugas atau tetap ikut belajar melalui media *Google Meet*.

Kasus di MINU Kotagede Yogyakarta, menurut Vita, salah satu orang tua siswa, pada awalnya kegiatan pembelajaran daring lebih banyak menggunakan *Google Classroom*, video, melihat tayangan pembelajaran lewat TVRI, dan penugasan. Tetapi kemudian diberikan dua pilihan kepada para siswa (dan orang tua) apakah memilih ikut pembelajaran via *Google Meet* atau penugasan. Bagi siswa yang orang tuanya memiliki laptop ataupun *handphone android* dan memiliki anggaran yang cukup untuk membeli pulsa atau berlangganan *Indihome* (atau semacamnya), maka pilihannya adalah pada pembelajaran daring via *Google Meet* dan sesekali tetap ada penugasan. Adapun bagi orang tua siswa yang belum memiliki cukup sarana semacam laptop maupun *handphone*, dan alokasi anggaran untuk pembelian data internet maupun langganan *Indihome*, maka pilihan jatuh pada penugasan. Di sisi lain, sebagian orang tua/wali siswa juga ada yang melakukan kesepakatan dengan guru untuk memberikan les kepada beberapa siswa tertentu dengan pembiayaan tambahan yang disepakati bersama. Adapun untuk pembelajaran membaca dan hafalan dilakukan melalui video *call* dengan waktu yang ditentukan bersama oleh pihak sekolah dan orang tua siswa. (Wawancara, 2020).

Menurut Plt. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Jawa Tengah, Padmaningrum, pada webinar bertajuk “Tarik Ulur Pembelajaran Jarak Jauh

di Provinsi Jawa Tengah”, ada tiga wilayah kabupaten yang telah dinyatakan sebagai zona hijau dalam masa pandemi Covid-19, yakni Kabupaten Wonosobo, Temanggung dan Kota Tegal, yang diujicobakan untuk melaksanakan pembelajaran tatap muka dengan protokol kesehatan yang sangat ketat (Ahmad Antoni, 2020).

Menurut Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) Kabupaten Tegal, Akhmad Wasari, untuk pembelajaran *offline* yang akan dilaksanakan di level Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP), diatur dengan menggunakan sistem *shifting*.

“Rencananya siswa baru tersebut akan menjalani masa orientasi selama sepekan, untuk menyesuaikan diri dengan sekolahnya. Termasuk pengenalan dengan guru dan sesama siswa lainnya. Setelah itu, mereka melanjutkan tugas belajarnya dari rumah dan masuk kembali sampai ada pengumuman berikutnya. Untuk SD, berarti hanya kelas satu yang masuk, sedangkan SMP hanya kelas tujuh. “Selain menjalani masa orientasi, juga ada pengurusan administrasi yang perlu dilakukan siswa.Skenario tersebut akan diberlakukan pada Agustus dengan catatan masing-masing sekolah harus memiliki izin dari pihak Komite Sekolah. Jika dalam satu kelas terdapat 30 orang siswa maka di hari pertama, hanya siswa dengan nomor absensi satu sampai dengan 15 yang masuk. Hari berikutnya, siswa dengan absensi 16 sampai dengan 30 yang masuk. Sedangkan siswa dengan absensi satu sampai 15 belajar di rumah, begitu seterusnya.....Jika ada orang tua yang tidak mengizinkan anaknya masuk sekolah, maka kami pun tidak memaksa, karena itu juga bagian dari hak orang tua demi melindungi keselamatan putra-putrinya dari ancaman penularan Covid-19. Tidak perlu khawatir juga anaknya akan tertinggal pelajaran, karena seluruh tugas dan pembelajaran didalamnya bisa diikuti secara daring” (Supardi Rasban, 2020).

Namun demikian, seiring dengan penerapan sistem *shifting* dalam pembelajaran tatap muka berjalan ternyata kasus positif Covid-19 terus bertambah, kemudian juga ada warga di wilayah tersebut yang terkena Covid-19, maka sejumlah sekolah yang ada di 10 Kecamatan di Kabupaten Tegal juga menghentikan KBM tatap muka, dan menggantinya dengan belajar dari rumah (daring) sejak hari Senin tanggal 10 Agustus 2020 (Desta Leila Kartika, 2020).

Di sisi lain di Kabupaten Sragen, Jawa Tengah, mulai tanggal 31 Agustus 2020, SMPN 1 Sragen justru memulai pembelajaran tatap muka dengan

sistem *shift*. Kebijakan tersebut dilaksanakan dengan mengikuti protokoler kesehatan yang ketat, dan hanya 50% dari kapasitas ruang yang masuk dalam satu *shift*nya (Mahfira Putri Maulani, 2020).

Jika di Kabupaten Tegal dan Sragen sudah memulai pembelajaran tatap muka dengan sistem *shift*, maka Heri Yuliyanto, salah seorang guru olahraga yang mengajar di SD Negeri 3 dan 7, Desa Sumberejo, Kecamatan Karangrayung, Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah, sejak dikeluarkannya kebijakan WFH (*Work From Home*), justru melaksanakan kegiatan pembelajaran dengan cara mendatangi rumah siswa. Beliau mengatakan, sebagai berikut:

“Pembelajaran lewat daring baik lewat *WhatsApp* atau lewat internet berat diterapkan di sini (Desa Sumberejosari). Dari anak enam, yang punya HP bisa internet hanya dua atau tiga. Karena kondisi itu, maka harus ada pendampingan. Untuk melakukan pendampingan, maka guru harus melakukan kunjungan ke rumah siswa. Karena bukan les privat maka sistem pembelajaran kita gunakan per dukuh atau per RW jika di kota. Nilai *plus* pelajaran saya kan meningkatkan kesehatan anak. Selain masalah pelajaran untuk kesehatan biar badan anak bisa kuat melawan Covid. Maka belajar cari keringat dan *refresing* biar imun anak naik jadi lebih kuat melawan Covid. Malah kadang anak WA ngabari teman-temannya sudah diberitahu jika saya akan datang ke rumah. Dan mereka senang badan jadi sehat dan lebih kuat melawan Covid-19. Saat pertemuan saya bawa termogun untuk ukur suhu badan, yang di atas 37 ya saya minta istirahat dulu tidak ikut pertemuan” (Felek Wahyu, 2020).

Penutup

Berdasarkan uraian pada bagian sebelumnya dapat disimpulkan bahwa pandemi Covid-19 memunculkan permasalahan baru dalam dunia Pendidikan. Pembelajaran tatap muka harus diganti dengan pembelajaran daring demi mengedepankan keselamatan dan kesehatan baik untuk peserta didik maupun pendidik. Pelaksanaan pembelajaran daring secara nasional, yang notabene belum dipersiapkan secara matang jauh sebelumnya, terbukti memunculkan banyak permasalahan, baik bagi guru, peserta didik, maupun orang tua. Selain masalah muncul dari kompetensi pendidik dalam membuat persiapan dan mengimplementasikan pembelajaran daring, bagi siswa dan orang tua juga terkendala secara teknis, yakni lemahnya sinyal, ketiadaan sarana, ketidakmampuan dalam memanfaatkan sarana, dan ketidakmampuan

untuk membeli kuota maupun *handphone*.

Berbagai macam upaya dilakukan oleh pemerintah, guru, dan orang tua siswa dalam meminimalisir kendala dalam pembelajaran daring. Pemerintah melakukan upaya mengeluarkan kebijakan pemberian bantuan pulsa melalui *provider*, seperti Telkomsel, menyelenggarakan program pembelajaran melalui TVRI, penyederhanaan kurikulum (kurikulum darurat). Para guru juga melakukan upaya-upaya seperti memberi keleluasaan kepada orang tua dan siswa untuk memilih kegiatan belajar melalui jaringan *online* semacam *Google Meet*, melalui penugasan, atau melalui kunjungan rumah. Pihak orang tua, terutama yang memiliki kemampuan secara ekonomi juga mengupayakan jaringan sinyal yang lebih baik melalui langganan *Indihome*. Selain itu, keterlibatan masyarakat melalui organisasi ORARI juga ikut memberikan kontribusi solusi bagi terselenggaranya pembelajaran daring untuk wilayah yang masih jauh dari jangkauan sinyal internet. Pada beberapa wilayah tertentu yang dinyatakan sebagai wilayah zona hijau dan kuning, kegiatan pembelajaran melalui *Blanded learning*, dengan memadukan pembelajaran tatap muka dengan sistem *shift* dan pembelajaran daring juga sudah dilakukan sebagai upaya meminimalisir penurunan kualitas pembelajaran daring secara mutlak.

Daftar Pustaka

Buku:

Husamah. (2013). *Pembelajaran Bauran (Blended Learning)*. Jakarta: Prestasi Pustaka, dalam <https://scholar.google.co.id/citations?user=CUBCCX8AAAAJ&hl=en>.

E-book:

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI, *Panduan Pengembangan dan Penyelenggaraan KDITT*, Jakarta: Kemendikbud, 2014, hlm. V. dalam https://issuu.com/download-bse/docs/buku_panduan_pengembangan_kditt_dr/125

Jurnal:

Anealka Aziz Hussin, (2018). Education 4.0 Made Simple: Ideas For Teaching. *International Journal of Education and Literacy Studies*, Volume 6, Juli, hlm. 92-98.

Anri Saputra, Pendidikan dan Teknologi: Tantangan dan Kesempatan, dalam *Indonesian Journal of Islamic Educational Management* volume 3 No.1 2020, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. DOI: <http://dx.doi.org/10.24014/ijiem.v3i1.9095>

Fomunyan, Kehdinga George, G. (2019). Education and the Fourth Industrial Revolution : Challenges and Possibilities for Engineering. *International Journal of Mechanical Engineering and Technology (IJMET)*, 10(8), hlm. 248–250.

Harandi, Safiyeh Rajae. (2015). Effects of *E-learning* on Students' Motivation. *Procedia - Social and Behavioral Sciences*, 181, 423–430. <https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2015.04.905>.

Hung, Min Ling., Chou, C., Chen, C. H., & Own, Z. Y. (2010). Learner readiness for online learning: Scale development and student

- perceptions. *Computers and Education*, 55(3), 1080–1090. <https://doi.org/10.1016/j.compedu.2010.05.004>.
- Husaini, M. (2014). Pemanfaatan Teknologi Informasi dalam Bidang Pendidikan (E-education). *Jurnal Mikrotik*, 2(1), 1–5, dalam <https://ojs.ummetro.ac.id/index.php/mikrotik/article/view/314>
- Lee, J., & Martin, L. (2017). Investigating Students' Perceptions of Motivating Factors of Online Class Discussions. *International Review of Research in Open and Distance Learning*, 18(5), 148–172. <https://doi.org/10.19173/irrodl.v18i5.2883>.
- Mather, M., & Sarkans, A. (2018). Student Perceptions of Online and Face-to-Face Learning. *International Journal of Curriculum and Instruction*, 10(2), 61–76, dalam <http://ijci.wcci-international.org/index.php/IJCI/article/view/178>
- Much. Fuad Saifuddin *E-Learning* dalam Persepsi Mahasiswa, dalam *Jurnal Varia Pendidikan*, Vol. 29, No. 2, Desember 2017: 102-109. <http://journals.ums.ac.id/index.php/varidika/article/download/5637/3680>
- Mustofa, M. I., Chodzirin, M., Sayekti, L., & Fauzan, R. (2019). Formulasi Model Perkuliahan Daring sebagai Upaya Menekan Disparitas Kualitas Perguruan Tinggi. *Walisongo Journal of Information Technology*, Volume 6 No.2, hlm. 166. <https://journal.walisongo.ac.id/index.php/jit/article/download/4067/2299>
- Nakayama, M., Mutsuura, K., & Yamamoto, H. (2014). Impact of Learner's Characteristics and Learning Behaviour on Learning Performance during a Fully Online Course. *Electronic Journal of E-Learning*, 12(4), 394–408, dalam https://scholar.google.com/citations?user=0n9sXA8AAAAJ&hl=en#d=gs_md_cita-d&u=%2Fcitations%3Fview_op%3Dview_citation%26hl%3Den%26user%3D0n9sXA8AAAAJ%26citation_for_view%3D0n9sXA8AAAAJ%3AdfsIfKJdRG-4C%26tzom%3D-420.
- Yani Fitriyani, Irfan Fauzi, Mia Zultrianti Sari, Motivasi Belajar Mahasiswa Pada Pembelajaran Daring Selama Pandemi Covid-19, *Jurnal Kependidikan Jurnal Hasil Penelitian dan Kajian Kepustakaan di Bidang Pendidikan, Pengajaran dan Pembelajaran*, Juli 2020. Vol.6, No.2n, doi:<https://doi.org/10.33394/jk.v6i2>.

Artikel Surat Kabar:

Ade Nasirudin al Anshori, Belajar di Rumah Akibat Corona Covid-19, Ini

- Pendapat dan Harapan Anak Indonesia, dalam <https://www.liputan6.com/health/read/4224969/belajar-di-rumah-akibat-Corona-Covid-19-ini-pendapat-dan-harapan-anak-indonesia>, diunduh Juni 2020.
- Ahmad Antoni, Was-was Pandemi, 3 Kabupaten di Jateng Paksakan Sekolah Tatap Muka, Selasa, 25 Agustus 2020 - 19:51 WIB, dalam <https://edukasi.sindonews.com/read/143846/212/was-was-pandemi-3-kabupaten-di-jateng-paksakan-sekolah-tatap-muka-1598357335>
- Andri Saubani, Gagap Pembelajaran Daring di Tengah Wabah Corona, Jumat 20 Mar 2020 22:41 WIB, dalam <https://republika.co.id/berita/q7i0xj409/gagap-pembelajaran-daring-di-tengah-wabah-Corona>
- Ani Nursalikah, Tak Ada Frekuensi Radio, Siswa Sikka tidak Bisa Belajar, REPUBLIKA.CO.ID, KUPANG Senin 27 Jul 2020 18:36 WIB, dalam <https://republika.co.id/berita/qe4llkv366/tidak-ada-frekuensi-radio-siswa-sikka-tidak-bisa-belajar>.
- Ashari Prawira Negara, Makassar Butuh Persiapan Matang Gelar Pembelajaran Tatap Muka, Rabu, 26 Agustus 2020 - 23:50 WIB, dalam <https://makassar.sindonews.com/read/145200/711/makassar-butuh-persiapan-matang-gelar-pembelajaran-tatap-muka-1598454516>
- Destia Leila Kartika, Video Sejumlah Sekolah di Kabupaten Tegal Hentikan KBM Tatap Muka, Tribunjateng.com, Rabu, 12 Agustus 2020, dalam <https://jateng.tribunnews.com/2020/08/12/video-sejumlah-sekolah-di-kabupaten-tegal-hentikan-kbm-tatap-muka>.
- Felek Wahyu, Suka Duka Guru Berkeliling Datangi Rumah Siswa yang Tak Miliki Ponsel di Grobogan, Liputan6.com, Diterbitkan : 20.00, 09/08/2020, dalam <https://today.line.me/id/article/Suka+Duka+Guru+Berkeliling+Datangi+Rumah+Siswa+yang+Tak+Miliki+Ponsel+di+Grobogan-JqGR1P>
- Ichsan Emerald Alamsyah, Pakar: Sistem PJJ Solusi Terbaik Pendidikan di Masa Pandemi, dalam Republika.co.id., Rabu 17 Jun 2020 02:55 WIB, dalam <https://republika.co.id/berita/qc1bcz349/pakar-sistem-pjj-solusi-terbaik-pendidikan-di-masa-pandemi>
- KPAI Jelaskan Keluhan Belajar Daring Bagi Keluarga Tak Mampu, dalam <https://guru.or.id/kpai-jelaskan-keluhan-belajar-daring-bagi-keluarga-tidak-mampu.html>
- Lampost.Com. Belajar Daring Dikeluhkan Orang Tua di Sragi, <https://www.lampost.co/berita-belajar-daring-dikeluhkan-orang-tua-di-sragi.html>

- Mahfira Putri Maulani, Video Sekolah Tatap Muka di Sragen Terapkan Sistem Shift, *Tribunjateng* Senin, 31 Agustus 2020, dalam, <https://jateng.tribunnews.com/2020/08/31/video-sekolah-tatap-muka-di-sragen-terapkan-sistem-shift>.
- Mochamad Wahyu Hidayat, dan Andina Librianty, Warganet Apresiasi RAPI Sumbawa Bantu Proses Pembelajaran melalui Handy Talky, *Liputan6.com*, 26/07/2020 dalam <https://today.line.me/id/article/Warganet+Apresiasi+RAPI+Sumbawa+Bantu+Proses+Pembelajaran+melalui+Handy+Talky-e8v6ZO>
- Solopos.Com. Anaknya Tak Punya Smartphone Untuk Belajar Daring, Orang Tua Siswa SD Di Madiun Minta Solusi Dari Sekolah, Rabu, 5 Agustus 2020 | 15:00 WIB, dalam <https://www.solopos.com/anaknya-tidak-punya-smartphone-untuk-belajar-daring-orang-tua-siswa-sd-di-madiun-minta-solusi-dari-sekolah-1074198>
- Supardji Rasban Senin, Siswa di Kabupaten Tegal Mulai Belajar di Sekolah, Kamis 09 Juli 2020, 20:00 WIB, dalam <https://mediaindonesia.com/read/detail/326969-senin-siswa-di-kabupaten-tegal-mulai-belajar-di-sekolah>
- Temmy P., Disdik Sumenep ‘Banjir’ Keluhan Pembelajaran Daring, *Beritajatim.Com*. Minggu, 9 Agustus 2020, 12:48 WIB., dalam <https://beritajatim.com/pendidikan-kesehatan/disdik-sumenep-banjir-keluhan-pembelajaran-daring/>
- Tim, CNN Indonesia, Corona, Kelas Daring, dan Curhat 2 Guru untuk Orang Tua, Jumat, 03/04/2020 14:03 WIB, dalam <https://www.cnnindonesia.com/gaya-hidup/20200330165053-284-488368/Corona-kelas-daring-dan-curhat-2-guru-untuk-orang-tua>
- Yuslianson, *Headline: Belajar Dari Rumah Boros Kuota Internet, Bagaimana Solusinya?*, *Liputan 6*, 29 Jul 2020, 00:00 Wib., dalam <https://www.liputan6.com/teknoread/4316926/headline-belajar-dari-rumah-boros-kuota-internet-bagaimana-solusinya>

Makalah Konferensi:

- Riaz, Ahmed. (2018). Effects of Online Education on Encoding and Decoding Process of Students and Teachers. *International Conference E-Learning*, 42–48. <https://files.eric.ed.gov/fulltext/ED590288.pdf>.

Website:

- Kemendikbud, Mendikbud Terbitkan SE tentang Pelaksanaan Pendidikan dalam Masa Darurat Covid-19 24 Maret 2020, dalam <https://www.kemdikbud.go.id/main/blog/2020/03/mendikbud-terbitkan-se-tentang-pelaksanaan-pendidikan-dalam-masa-darurat-Covid-19>
- Luthra, Poornima & Mackenzie, Sandy. 2020. 4 Ways Covid-19 Education Future Generations. Sumber: <https://www.weforum.org/agenda/2020/03/4-ways-Covid-19-education-future-generations/>.
- Nadiem Makarim, Ppt webinar “Penyesuaian Kebijakan Pembelajaran di Masa Pandemi Covid-19”, dalam Youtube Kemendikbud RI, juga dalam <https://bersamahadapiCorona.kemdikbud.go.id/pengumuman-penyesuaian-kebijakan-pembelajaran-di-masa-pandemi-Covid-19/>
- Parta setiawan, Pengertian *E-learning* – Karakteristik, Manfaat, Kelebihan, Kekurangan, Jenis, Komponen, Para Ahli, dalam Gurupendidikan. Com., 05/08/2020, dalam <https://www.gurupendidikan.co.id/pengertian-e-learning/>
- SekolahDasar.Net., 6 Solusi Bagi Guru Menghadapi Tantangan Pembelajaran Daring, Selasa 14 April 2020, dalam <https://www.sekolahdasar.net/2020/04/6-solusi-bagi-guru-menghadapi-tantangan-pembelajaran-daring.html>
- Sri Harnani, “Efektivitas Pembelajaran Daring Di Masa Pandemi Covid-19”, Juli 2020, dalam <https://bdkjakarta.kemenag.go.id/berita/efektivitas-pembelajaran-daring-di-masa-pandemi-Covid-19>
- Tam, Gloria & El-Azar, Diana. 2020. 3 ways the Coronavirus pandemik could reshape education. Sumber: <https://www.weforum.org/agenda/2020/03/3-ways-Coronavirus-is-reshaping-education-and-what-changes-might-be-here-to-stay/>.

Merawat Mentalitas Pembangunan di Masa Pandemi

Agus Saputro

*Prodi Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan
Humaniora, UIN Sunan Kalijaga*

Email: agus.saputro@uin-suka.ac.id

Pendahuluan

A danya Pandemi Covid-19 membawa dampak yang luar biasa dalam berbagai sektor ekonomi, sosial, politik dan budaya. Dampak yang amat sangat terasa untuk sekarang ini adalah ekonomi. Covid-19 mengakibatkan kemacetan pada sektor ekonomi, karena adanya beberapa kebijakan yang dilakukan baik pemerintah maupun pelaku ekonomi sendiri untuk mencegah penyebaran virus.

Kebijakan-kebijakan seperti penutupan transportasi publik, misalnya membawa dampak barang mentah untuk produksi maupun barang jadi yang siap dipasarkan tidak dapat masuk atau keluar. Tentu kondisi ini mempengaruhi dalam hal produksi dan pemasaran barang, terutama untuk perusahaan-perusahaan yang sudah berskala *eksport-import*. Jalan penyelamat bagi perusahaan tersebut untuk menekan biaya produksi yakni merumahkan sebagian tenaga kerjanya dengan PHK. Jalan kedua, banyak perusahaan membuat jadwal kerja *shift* (bergilir) sehingga perusahaan tidak harus memberikan pesangon, karena tidak me-PHK dan perusahaan tidak memiliki kewajiban menggaji dengan penuh, karena hitungannya bekerja dapat dikatakan paruh waktu. Efek Covid-19 tidak hanya mempengaruhi produktivitas perusahaan, bahkan banyak perusahaan yang harus gulung tikar.

Sebagai contoh nyata dampak Covid-19 dalam sektor ekonomi, seperti halnya berita terkait kondisi yang dialami perusahaan-perusahaan di Tangerang. Seperti yang ditulis oleh Ronald (Pasardana.id, 2020), menyebutkan setidaknya terdapat 13 perusahaan gulung tikar. Dari 13 perusahaan yang gulung tikar tersebut, setidaknya ada 23.000 orang terkena PHK. Dari 23.000 karyawan yang di rumahkan, Pemerintah Kabupaten Tangerang mendata sebanyak 15.000 orang untuk diberikan bantuan sosial (Bansos).

Dampak Covid-19 tidak hanya terjadi pada perusahaan produsen barang, akan tetapi juga berdampak pada ekonomi penyedia jasa. Yang sangat nampak

adalah dalam sektor pariwisata, penutupan beberapa akses transportasi publik dan pembatasan berkumpul di ruang publik membuat sektor pariwisata terkoyak. Tulisan Kuntadi (2019) dalam berita *online* dengan (Okezone,2020), mencatat pada tahun 2018 devisa dari sektor pariwisata lebih dari USD 19,2. Jumlah ini mengalahkan sumbangsih dari sektor migas, hal ini diungkapkan oleh Menteri Pariwisata Arif Yahya. Sektor pariwisata juga menyerap tenaga kerja sejumlah 12,7 juta orang, angka ini sekitar 10% dari total penduduk Indonesia yang bekerja.

Setelah adanya Corona Virus pada akhir tahun 2019 sampai sekarang membawa dampak luar biasa pada sektor ekonomi. Wisnu Tama, selaku Menparekraf (Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif) saat ini, menyatakan adanya Corona Virus membawa kerugian USD 4 Miliar atau sekitar Rp. 54,6 triliun. Dari total kerugian tersebut, sekitar Rp. 38,2 triliun diantaranya hilangnya devisa dari kunjungan wisatawan dari Cina (CNN Indonesia, 2020).

Di sisi lain kondisi masa Pandemi yang mengekang mobilitas manusia beraktivitas, ditakutkan ikut memperparah mentalitas menjadi manusia yang tidak kreatif dan inovatif, karena terkungkung oleh ruang dan waktu. Adanya Pandemi telah menuntut individu menghabiskan waktu di dunia virtual. Yang mungkin beberapa aktivitas virtual tersebut tidak produktif, misalnya bermain *game* dan sosial media hanya untuk mengisi waktu untuk bersenang-senang.

Pernyataan Azimah Subagijo, selaku Ketua Perhimpunan Masyarakat Tolak Pornografi (MTP) cukup mencengangkan. Beliau mengutarakan banyaknya orang yang berdiam diri di rumah selama Pandemi sangat memungkinkan menggunakan *gadget* secara intensif, baik untuk bekerja, sekolah, maupun mencari hiburan. Hal ini berdampak pada naiknya akses terhadap pornografi di beberapa tempat. Azizah menjelaskan berdasarkan statistik sebuah situs porno terkenal, mendapatkan data kenaikan akses terhadap situs porno pada laman tersebut di beberapa negara. Bahkan kenaikan kunjungan ada yang mencapai 57 persen. Dalam data stastistik tersebut menunjukkan bahwa akses pornografi di masa Pandemi, terutama naik drastis pada pukul 03.00, 07.00, dan pukul 13.00. Rentan bagi pelajar terpapar situs pornografi entah secara sengaja maupun tidak sengaja mengingat kegiatan pembelajaran sekarang berlangsung secara *online*. Kondisi ini diperparah dengan fenomena 15 juta pencarian pornografi yang mengandung kata kunci Corona dan Covid. Setidaknya ditemukan 1.000 video porno bertema Corona Virus telah ditonton lebih dari 1 juta orang (Agus Yulianto, 2020). Dari sekelumit

dampak Covid-19 pada sektor ekonomi di atas, tentu dalam ruang yang lebih besar Covid-19 juga akan meracuni kondisi dan arah pembangunan suatu bangsa. Menjadi penting di masa Pandemi Covid-19 untuk merawat visi dan misi pembangunan nasional supaya tetap dalam jalurnya. Sehingga cita-cita melalui pembangunan dapat terwujud.

Berbicara perihal membangun suatu bangsa yang proyek besar tersebut disebut pembangunan nasional bukan hanya berbicara terkait membuat bangunan fisik kasat mata. Wacana pembangunan tidak sebatas membuat perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pembangunan. Ada hal penting yang perlu disiapkan sebelum ketiga proses tersebut, yakni bagaimana membangun mentalitas, sehingga mendukung dalam proses pembangunan tersebut. Mentalitas menjadi faktor penting untuk mendorong diri atau kelompok untuk menentukan arah dan tindakan dalam pembangunan nasional. Mentalitas suatu bangsa akan menentukan perkembangan pembangunan secara kuantitas dan kualitas fisik serta manusianya.

Kajian mentalitas pembangunan bangsa sangat menarik, apalagi di masa Pandemi Covid-19. Mentalitas pembangunan kita sedang diuji. Program pembangunan yang sudah direncanakan harus dirancang ulang, karena alasan kemanusiaan dengan berbagai program kebijakan alokasi dana pemerintah dalam tanggap Covid-19. Yang memungkinkan kebijakan tersebut berpengaruh pada mentalitas kolektif, karena sifat kebijakan pemerintah berlaku dan bersifat massal.

Mendefinisikan Ulang Makna Pembangunan

Menurut Damsar & Indrayani (2016:217), pembangunan merupakan suatu proses yang disengaja atau disadari untuk mencapai suatu arah yang positif bagi anggota masyarakat secara keseluruhan. Pemahaman konsep pembangunan tersebut meletakkan konsep pembangunan secara netral dan tidak etnosentris terhadap suatu arah tertentu dari perkembangan masyarakat. Dalam hal ini, *Etnosentris* sendiri memiliki arti adalah sifat yang menilai kelompok lain relatif terhadap kelompok atau kebudayaannya sendiri. Penilaian terhadap kebudayaan lain tersebut atas dasar nilai dan standar budaya sendiri. Karena sebelumnya konsep pembangunan telah mengalami bias, seperti penggunaan konsep westernisasi dan modernisasi untuk menjelaskan gerak pembangunan.

Definisi pembangunan di atas bukanlah definisi tunggal. Beberapa referensi menyebutkan pembangunan tidak hanya perubahan yang sifatnya

direncanakan. Karena pembangunan dapat terjadi pada suatu negara, kerajaan, kota maupun daerah-daerah lain. Sepanjang terdapat kelompok manusia, maka disitu sebenarnya terdapat upaya pembangunan. Masalahnya pembangunan tersebut mencapai kemajuan, statis atau kemunduran; direncanakan atau tidak. Dalam masyarakat primitif misalnya, pembangunan tidak direncanakan secara khusus sehingga hasilnya cenderung statis (Paulus Hariyono, 2017:18).

Dari dua definisi di atas terdapat persamaan dan perbedaan. Ada dua kata kunci yang menjadi unsur penting dalam pembangunan, yakni (1) *perencanaan*, (2) *perubahan*, (3) *tujuan yang baik* dan (4) *nilai dan norma tertentu*. Terkait perencanaan dalam pembangunan dapat disimpulkan, jika pembangunan itu terjadi pada suatu kelompok masyarakat yang sifatnya formal seperti negara atau organisasi legal masyarakat lainnya, maka pembangunan sifatnya direncanakan, karena ada sistem mempertanggungjawabkan kepada pihak lain. Sedangkan jika pembangunan terjadi pada sekelompok masyarakat yang tidak terikat satu sama lain secara formal, biasanya pembangunan tersebut tidak direncanakan, sifatnya eksidental dan fleksibel.

Terkait dengan perubahan dalam pembangunan berkaitan erat dengan tujuan pembangunan itu sendiri. Secara teoritik perubahan dapat berdampak kemunduran (*regress*) maupun kemajuan (*progress*). Baik dalam organisasi formal maupun kelompok sosial tertentu yang tidak formal, tentu mengharapkan adanya pembangunan yang berdampak kemajuan. Pada organisasi kemasyarakatan formal biasanya mengukur kemajuan perubahan dengan peningkatan taraf hidup atau kesejahteraan masyarakat. Gambaran paling sederhana untuk mengetahui peningkatan kesejahteraan adalah dengan melihat apakah perubahan tersebut dapat berdampak pada semakin terpenuhinya kebutuhan masyarakat. Semakin banyak kebutuhan yang terpenuhi merupakan indikasi semakin meningkat kesejahteraan atau taraf hidup masyarakatnya. Sedangkan kemajuan pada pembangunan kelompok masyarakat yang tidak ada ikatan formal lebih cenderung susah diukur, kondisi ini dikarenakan salah satunya pembangunan yang berjalan tidak diawali dengan perencanaan yang sudah dijelaskan pada paragraf sebelumnya di atas (Soetomo, 2013:14).

Menurut Paulus Hariyono (2017:23), secara garis besar tujuan dari pembangunan ada tiga yakni, (1) memiliki arah pertumbuhan ekonomi yang tinggi, (2) pemerataan hasil pembangunan dan (3) campuran antara pertumbuhan ekonomi tinggi dan pemerataan. Pertumbuhan ekonomi tinggi memiliki indikator pada kapital dan konsumsi massal yang tinggi,

hal ini senada dengan yang diutarakan oleh seorang ekonom bernama Rostow (1960). Sedangkan terkait dengan unsur penting terakhir yakni nilai dan norma, Indonesia sebagai negara dengan ideologi dasar Pancasila mengangkat nilai yang terkandung dalam Pancasila sebagai cita-cita yang ingin dicapai pembangunan nasional. Nilai yang terkandung dalam Pancasila yang harus terimplementasikan dalam pembangunan diantaranya ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, menjunjung tinggi kesepakatan kolektif (musyawarah), dan keadilan (pemerataan). Sedangkan norma atau aturan yang dipakai dalam implementasi pembangunan juga bersumber dari Pancasila, karena Pancasila adalah sumber dari segala hukum yang berlaku di Indonesia. Baik UUD 1945 sebagai norma tertinggi di Indonesia, UU, Peraturan Presiden, Peraturan Provinsi, Peraturan Daerah, dan peraturan lainnya yang bersifat formal.

Arah Pembangunan Negara Berkembang Dari Masa Ke Masa

Sejarah penggunaan istilah pembangunan santer terjadi seiring berakhirnya Perang Dunia Ke-II di akhir tahun 1945-an dengan berbagai sebutan. Setelah Perang Dunia Ke-II berakhir, banyak negara-negara baru bermunculan pasca kolonial. Terutama negara-negara baru pasca penjajahan ini muncul di Benua Asia dan Afrika. Pada pasca Perang Dunia Ke-II masyarakat dikenal dengan dua kategori, yakni masyarakat berkembang dan tidak berkembang. Pada awalnya masyarakat dunia hanya berfokus pada perbedaan diantara kedua kategori tersebut, tidak memikirkan bahwa masyarakat tidak berkembang nantinya akan berkembang. Masyarakat berkembang pada waktu itu hanya memikirkan bagaimana mengakses sumber daya yang berasal dari negara tidak berkembang.

Ragam istilah terkait pengembangan atau pembangunan masyarakat terjadi pasca kolonial. Beberapa pihak menyebutkan pengembangan atau pembangunan masyarakat pasca penjajahan tersebut dengan *akselerasi*. Penggunaan istilah ini digunakan dengan alasan karena penjajahan yang sangat panjang menyebabkan perbedaan kondisi sosial dan ekonomi yang cukup jauh. Sehingga untuk mengejar ketertinggalan tersebut tidak dapat menggunakan kecepatan yang normal, perlu menggunakan *akselerasi*. Bagi beberapa kalangan menggunakan istilah *reintegrasi*, karena beranggapan proses penjajahan yang panjang mengakibatkan kondisi kehidupan masyarakat terdisintegrasikan, sehingga perlu reintegrasi. Sebagian berpendapat istilah yang tepat dalam pengembangan masyarakat pasca penjajahan ialah *revitalisasi*.

Revitalisasi dianggap tepat, karena kekangan dan hambatan selama penjajahan mengakibatkan terhambatnya aktualisasi berbagai potensi yang ada dalam masyarakat, sehingga perkembangan terjadi tidak wajar. Kemerdekaan seharusnya memberikan peluang untuk aktualisasi lebih terbuka (Soetomo, 2013: 2).

Dengan berbagai istilah yang dipakai pasca Perang Dunia Ke-II tersebut perlu diingat bahwa menurut UNESCO tujuan dari pengembangan atau pembangunan masyarakat bukan untuk membangun barang, akan tetapi membangun orang dan membangun masyarakat. Dari pernyataan ini bukan berarti membangun secara fisik atau kebendaan diabaikan. Pembangunan fisik tetap perlu dilakukan, tetapi dalam rangka mendukung pembangunan yang diperlukan adalah aspek manusia dan masyarakatnya (Iraj Pootschi, 1986 : 1).

Pada pelaksanaan pembangunan negara-negara yang sedang berkembang pada tahun 1950-an, seperti halnya Indonesia lebih memakai strategi *community development* lebih direkomendasikan. Menurut PBB definisi dari *community development* adalah suatu proses yang merupakan usaha masyarakat sendiri yang diintegrasikan dengan otoritas pemerintah guna memperbaiki kondisi sosial ekonomi dan kultural komunitas, mengintegrasikan komunitas ke dalam kehidupan nasional dan mendorong kontribusi komunitas yang lebih optimal bagi kemajuan nasional (Soetomo, 2013: 79).

Strategi *community development* ini memiliki sifat yang lebih mendorong prakarsa, partisipasi, dan swadaya masyarakat pada tingkat komunitas. Karena negara-negara yang baru merdeka menggunakan strategi ini dalam pembangunan pasca kolonial, maka hal yang harus dilakukan adalah membangun komunikasi dengan komunitas lokal atau membuat organisasi formal yang menjadi rekan pemerintah untuk menjalankan program pembangunan. Sejalan dengan penggunaan pembangunan yang berorientasi pada pertumbuhan ekonomi, pendekatan pembangunan yang berbasis masyarakat pada tingkat komunitas mulai ditinggalkan. Akan tetapi akhirnya ini dirasakan kembali pendekatan pembangunan yang berorientasi pada pendekatan yang lebih memperhatikan aspek manusia dan masyarakat. Ini sebagai refleksi atas pembangunan yang menitikberatkan pendekatan ekonomi ternyata hanya pembangunan yang sifatnya fisik, mengesampingkan aspek manusia dan masyarakat.

Pada dekade 1960-an pembangunan pada masyarakat berorientasi pada pembangunan ekonomi dan dinilai dengan model pembangunan ini banyak sekali kelemahan. Ditengah pertumbuhan ekonomi yang cukup mengesankan, masih banyak penduduk yang miskin dan pengangguran. Faktor yang menjadi

penyebab hal itu diperkirakan adalah kecilnya akses terhadap pasar dan sumber daya, karena keduanya dikuasai oleh kaum kapital besar, lemahnya kemampuan mengelola sumber daya alam dan sumber daya manusia, struktur sosial yang tidak seimbang serta *urban bias* dalam pengambilan keputusan dan alokasi dana. *Urban bias* dalam hal ini diartikan sebagai pembangunan yang hanya menguntungkan masyarakat urban atau perkotaan serta merugikan mereka yang tinggal di pedesaan.

Selanjutnya pembangunan pada tahun 1970-an diusahakan untuk lebih menaruh perhatian pada aspek kemanusiaan dan masyarakat. Hal itu dapat dilihat dalam *tag line* pembangunan pada periode tersebut yakni *Socio-economic Development* dengan pendekatan *delivery approach*. *Delivery approach* adalah pendekatan dalam pembangunan yang fokus terhadap program-program pembangunan yang diusahakan secepat mungkin sampai pada kelompok sasaran. Program pembangunan pada periode ini berorientasi pada pertumbuhan ekonomi yang pesat dan berkesinambungan, berkurangnya pengangguran, berkurangnya dampak negatif di bidang kesehatan sebagai akibat kemiskinan, dan partisipasi masyarakat yang semakin meningkat dalam menikmati hasil pembangunan.

Pembangunan pada tahun 1980-an aspek kemanusiaan dan masyarakat semakin kental dengan jargon *New International Economic Order*. Pembangunan tidak hanya memberikan prioritas pada pemenuhan kebutuhan fisik dan ekonomis, akan tetapi juga mengangkat harkat martabat manusia seperti partisipasi penuh dalam pembangunan, distribusi hasil pembangunan yang lebih baik dan peningkatan *human dignity*. *Human dignity* memiliki arti pengakuan martabat manusia di mata orang lain ataupun di matanya sendiri. Kecenderungan tersebut semakin dikenal dan banyak digunakan dalam perspektif pembangunan berorientasi kerakyatan (Soetomo, 2013: 4-7).

Pada periode 1990-an sampai tahun 2000 seiring dengan bubarnya Uni Soviet, istilah negara maju digunakan untuk menyebut dan menunjuk Negara Barat (Eropa dan Amerika). Negara Barat menjadi kiblat pembangunan dan negara-negara di Asia dan Afrika seakan-akan mengekor. Model pembangunan kapitalis yang khas dengan ideologi Negara Barat seakan juga meracuni model pembangunan di negara-negara berkembang termasuk Indonesia.

Dan pada era setelah milenial 2000-an sampai sekarang, wacana-wacana bergulirnya pasar bebas didukung oleh kemajuan teknologi informatika dikenal era globalisasi memicu pembangunan susah terkontrol. Hilangnya ruang dan waktu karena mudahnya akses informasi membawa dampak arah pembangunan Indonesia terseret arus global. Dalam hal ini Indonesia

mengalami dilema sebagai bangsa, jika menutup diri dari perubahan global akan menjadi bangsa yang tertinggal dan tidak kreatif-inovatif, akan tetapi jika terjun bebas dalam globalisasi akan menjadi bangsa yang kehilangan jati diri. Pembangunan berlandaskan Pancasila menjadi kunci untuk melindungi jati diri bangsa. Pancasila sebagai sumber dari segala nilai dan norma sudah semestinya menjadi filter untuk menjaga bangsa yang menghargai hak individual, akan tetapi juga memperhatikan asas keadilan.

Tantangan Mentalitas Pembangunan di Masa Pandemi

Mentalitas mempengaruhi cara berpikir, bertindak dan menyikapi suatu hal, termasuk pembangunan. Seorang antropolog bernama Koentjaraningrat telah lama menulis buku berjudul “Kebudayaan, Mentalitas dan Pembangunan”. Dalam buku Koentjaraningrat menjelaskan betapa pentingnya budaya dan mental suatu masyarakat sangat menentukan arah serta kondisi pembangunan.

Salah satu contoh, dalam buku Koentjaraningrat ini tentang masyarakat di pedesaan Jawa yang susah maju dalam pembangunan. Misalnya masyarakat Jawa yang “*nrimo ing pandum*”, sikap kompetisi yang rendah dan tradisi panen raya dengan sambatan atau istilah lainnya “bawon” yang menurut Koentjaraningrat ini justru menyebabkan *share poverty* (berbagi kemiskinan). Seharusnya dari hasil panen untuk mencukupi kebutuhan makan sampai panen berikutnya terdapat sisa, karena adanya sistem “bawon” para petani tidak dapat *saving* untuk kebutuhan tidak terduga.

Menurut Koentjaraningrat (1998:351), setidaknya ada empat penghambat dalam melaksanakan pembangunan masyarakat desa di Jawa diantaranya: (1) mentalitas orang Jawa yang terlalu *nerima* dan bersikap pasif dalam hidup, (2) tekanan penduduk yang telah menyebabkan rakyat pedesaan di Jawa yang kelewat miskin, (3) tidak adanya organisasi asli yang telah mantap yang jika dimodernisasi dapan menjadi organisasi masyarakat yang aktif kreatif, (4) tidak adanya kepemimpinan desa yang aktif kreatif untuk dapat memimpin untuk memimpin.

Pentingnya sikap mental dalam pembangunan ini diangkat oleh politikus pemimpin bangsa Indonesia dengan istilah “revolusi mental”. Dalam beberapa referensi *online* istilah revolusi mental pertama kali dicetuskan oleh Ir. Soekarno saat melakukan pidato kenegaraan bertepatan Proklamasi Kemerdekaan Indonesia (Kompas, 2020):

“Revolusi Mental adalah suatu gerakan untuk menggembelng manusia Indonesia agar menjadi manusia baru, yang berhati putih,

berkemauan baja, bersemangat elang rajawali, berjiwa api yang menyala-nyala.”

Hampir setiap masa pemerintahan dikritisi oleh oposisinya berkenaan dengan bagaimana penguasa meracuni mentalitas warga negaranya. Ir. Soekarno dengan sistem berdikari-nya yang dikritisi elit politik lain dikarenakan kondisi Indonesia yang belum stabil pasca kemerdekaan dan belum siap dalam melakukan pembangunan tanpa investor dari asing. Soeharto dengan pemerintahan sentralistik semi-militer. Kebijakan dibuat oleh pemerintah pusat, daerah hanya pelaksana, hal ini mengakibatkan pemerintah daerah kurang inovatif dan kreatif ketika dihadapkan pada permasalahan yang berkenaan lokalitas. Banyak kiranya elit penguasa yang dikritisi oleh oposisinya berkenaan bagaimana membangun mentalitas warga negaranya dalam hal pembangunan.

Di masa pandemi ini mentalitas pembangunan setiap negara terdampak Covid-19 diuji, termasuk Indonesia. Tidak segan-segan pemerintah menggelontorkan dana untuk penanganan Covid-19. Berbagai kebijakan telah diambil pemerintah dengan alasan kemanusiaan akibat Covid-19. Dari penataan dan perubahan anggaran belanja pada instansi-instansi pemerintah. Pemerintah juga memberikan Bantuan Langsung Tunai (BLT) maupun berupa subsidi bagi mereka yang terdampak Covid-19.

Tentu menjadi menarik melihat kebijakan BLT dan pemberian subsidi, karena dua kebijakan ini pernah dan selalu menjadi kritik oposisi. BLT pada era SBY dianggap merusak mentalitas masyarakat. BLT dianggap tidak efektif, karena arahnya konsumtif bukan produktif oleh lawan politik. Dan pemberian subsidi yang selalu dianggap merugikan kas negara. Kebijakan yang mungkin dinanti-nanti oleh sebagian orang pada masa Pandemi ini, sangat berbahaya jika tidak diimbangi dengan membangun sikap mental. Sikap mental yang susah payah dibangun melalui berbagai kebijakan, mungkin bisa runtuh pasca Pandemi nanti kalau tidak dipersiapkan dari sekarang.

Dalam sosiologi, berkenaan sikap mental seseorang dalam menghadapi suatu hal mirip dengan istilah *Habitus* yang dicetuskan oleh Pierre Bourdieu. *Habitus* adalah kerangka kognitif yang mempengaruhi perilaku seseorang dalam merespon fenomena di sekitarnya. Kerangka kognitif ini dibentuk melalui proses sosialisasi dan berinteraksi dengan lingkungan sekitar. Seseorang akan memiliki respon yang berbeda ketika dihadapkan pada masalah yang sama, karena kerangka kognitif dan pembentuknya berbeda. Dengan demikian, seharusnya *Habitus* ini dapat dibentuk oleh siapapun, termasuk pemerintah ke warga negaranya. *Habitus* dalam menghadapi Pandemi dan

Habitus dalam menyikapi pembangunan yang harus terus berlangsung. Habitus dapat dibentuk melalui pengkondisian melalui struktural, maupun internalisasi nilai dengan jalan pendidikan. Membangun Habitus di masa Pandemi membentuk mentalitas unggul yang menjadi investasi dalam pembangunan sekarang dan mendatang.

Jangan salahkan jika masyarakat kembali bergantung pada bantuan pemerintah. Jika pemerintah hanya memberi ikan (bantuan) tanpa menyediakan kolam yang baik (struktural) atau memberikan pengetahuan cara memancing yang baik (pendidikan).

Jalan Tengah: Membangun Mentalitas Ekonomi Rasional

Menggunakan prinsip ekonomi moral, atau rasional menjadi pilihan di masa krisis. Ekonomi moral dari James Scoot cocok untuk masyarakat yang tertutup, sedangkan pada era global sekarang akses sangat terbuka secara tindakan ekonomi yang dianggap lebih cocok menurut Samuel L. Popkin adalah ekonomi rasional. Meski dalam praktiknya mungkin susah dilakukan dengan batas yang tegas diantara keduanya di Indonesia yang dikenal memiliki kehidupan sosial masyarakatnya memiliki ikatan batin yang kuat. Misalnya di Jawa masih ada istilah “*ngumum-i tonggo*”, walaupun merasa tidak mampu masyarakat Jawa akan tetap mengusahakan untuk sama seperti tetangga meski sebenarnya berat untuk dilakukan. Kegiatan berkumpul yang identik pada masyarakat khususnya pedesaan Jawa “*mangan ra mangan sing penting ngumpul*” juga merusak rasionalitas, karena tetap saja moral akan memberi konsumsi untuk tetangga yang berkumpul.

Akan tetapi di masa krisis Covid-19 ini mau tidak mau masyarakat harus dilatih lebih rasional. Adapun langkah rasional yang perlu disiapkan diantaranya: (1) masyarakat sudah harus sadar pentingnya investasi, baik jangka panjang maupun jangka pendek dengan demikian mereka melakukan investasi resiko dan investasi aman. Investasi dapat berupa heman ternak, tanak dan kepemilikan benda lainnya. (2) meninggalkan sistem patron-klien, karena pada hakikatnya meski kelihatan harmonis, sistem ini menghambat klien untuk berkembang. Karena patron akan menjaga hubungan dengan klien, bagaimana klien tetap diadik (Damsar & Indrayani, 2016: 161).

Tindakan rasional lainnya yang dapat dilakukan adalah membangun dan menyadarkan mentalitas masyarakat Indonesia bahwa semua wilayah di Indonesia memiliki masing-masing potensi wilayah yang dapat dikembangkan. Dalam pemberdayaan ini dinamakan dengan OVOP (*one village one product*),

strategi ini diperkenalkan oleh Morihiko Hiramatsu Gubernur Oita, Jepang. Dengan OVOP produk unggulan masing-masing wilayah akan mendapatkan tempat di berbagai daerah yang membutuhkan dan dengan sistem ini akan terjadi resiprositas maksimal dalam penggunaan barang dan peningkatan ekonomi, dengan syarat pemerintah menyediakan skema lelang sehingga produsen dengan produk unggulannya mendapatkan harga terbaik, lepas dari tengkulak.

Dalam masyarakat perkotaan ekonomi rasional dapat dilakukan dengan mempertimbangkan nilai guna barang daripada nilai prestise. Karena selama ini masyarakat urban kebanyakan menjadi masyarakat konsumtif karena terpapar prestise melupakan nilai guna. Hal ini dikarenakan masyarakat kota kemungkinan terpapar informasi terkait *style* dan *fashion* lebih tinggi melalui media massa.

Penutup

Keberhasilan sebuah pembangunan dapat diukur melalui pertumbuhan ekonomi masyarakat yang tinggi. Dilihat melalui produktivitasnya, yakni Produk Nasional Bruto (PNB/GNP), dan Produk Domestik Bruto (PDB/GDP). Untuk melihat realitas produktivitas rata-rata maka digunakanlah PNB/kapita/tahun atau PDB/kapita/tahun. Akan tetapi realitasnya di Indonesia ketimpangan ekonomi menjadi masalah yang konkrit. Sehingga rata-rata produktivitas tidak menjadi ukuran mutlak jika Indeks Gini (skala 0-1) mendekati 1, berarti ketimpangan ekonomi tinggi.

Lepas dari itu pembangunan bukan hanya sekedar perhitungan produktivitas barang dan jasa, akan tetapi yang lebih penting adalah membangun mentalitas. Mentalitas menentukan produktivitas berkelanjutan sedangkan produktivitas belum tentu menentukan mentalitas pembangunan yang baik apalagi berkelanjutan. Sehingga merawat mentalitas pembangunan lebih penting daripada mengutamakan produktivitas barang, karena pembangunan yang baik tidak hanya memikirkan keuntungan ekonomi, tetapi mempertimbangkan aspek kemanusiaan dan masyarakat.

Daftar Pustaka

Buku:

- Damsar & Indrayani. (2016). *Pengantar Sosiologi Pedesaan*. Jakarta: Kencana
- Hariyono, Paulus (2017). *Perencanaan Pembangunan Kota dan Perubahan Paradigma*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- John M. Bryson. (2016). *Perencanaan Strategis: bagi Organisasi Sosial*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Koentjaraningrat.(1998). *Manusia dan Kebudayaan di Indonesia*. Jakarta: Djambatan
- _____.(2000). *Kebudayaan, Mentalitas dan Pembangunan*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama,
- Pootschi, Iraj. (1986). *Rural Development and The Development Countries*. Oshawa: The Alger Press Ltd.
- Soemarwoto, Otto. 1997. *Ekologi, Lingkungan Hidup dan Pembangunan*. Jakarta: Djambatan
- Soetomo.(2013). *Strategi-Strategi Pembangunan Masyarakat*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Norman Long .(1987). *Sosiologi Pembangunan Pedesaan*. Jakarta: PT. Bina Aksara

Website:

- Agus Yulianto (2020, Juli 6). Akses Situs Porno Naik 57 Persen, MTP: Waspada! Anak. Tersedia dari: <https://republika.co.id/berita/qd1bi2396/akses-situs-porno-naik-57-persen-mtp-waspada-anak>
- CNN Indonesia (2020, Februari 7). *Wishnutama Taksir Virus Corona Rugikan Pariwisata RI Rp54,6 T*. Tersedia dari: <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20200207160645-92-472662/wishnutama-taksir-virus-Corona-rugikan-pariwisata-ri-rp546-t>
- Kompas .(2020, Januari 8). Revolusi Mental: Sejarah, Penerapan, dan Capaian. Tersedia dari: <https://www.kompas.com/skola/>

read/2020/01/08/120000169/revolusi-mental-sejarah-penerapan-dan-capaian?page=all

Kuntadi (2019, Agustus 22). *Kalahkan Migas, Pariwisata Sumbang Devisa Terbesar USD19,2 Miliar*. Tersedia dari: <https://economy.okezone.com/read/2019/08/22/320/2095457/kalahkan-migas-pariwisata-sumbang-devisa-terbesar-usd19-2-miliar>

Ronal (2020, Juli 7). *13 Perusahaan di Tangerang Gulung Tikar Akibat Covid-19*. Tersedia dari: <https://pasardana.id/news/2020/7/7/13-perusahaan-di-tangerang-gulung-tikar-akibat-Covid-19/>

Perilaku Tatanan Kesehatan, Moralitas, Kerja dan Keberagaman di Era Pandemi Covid-19

Masdjuri

*Prodi Sosiologi,
Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora, UIN
Sunan Kalijaga
Email: masdjuri@uin-suka.ac.id*

Pendahuluan

Covid-19 pertama dilaporkan di Indonesia pada tanggal 2 Maret 2020 sejumlah dua kasus.⁹ Data 31 Maret 2020 menunjukkan kasus yang terkonfirmasi berjumlah 1.528 kasus dan 136 kasus kematian. ¹ Tingkat mortalitas Covid-19 di Indonesia sebesar 8,9%, angka ini merupakan yang tertinggi di Asia Tenggara. Menurut Syaifudin, Dosen Sosiologi FIS UNJ dalam kolom Tempo.Co yang berjudul “Negara, Masyarakat dan Era *New Normal*” membahas tentang Covid-19 telah menjadi realitas penyakit yang mengubah struktur sosial masyarakat. Perilaku sosial berubah, begitu pun kohesi sosial. Cara (*usage*), kebiasaan (*folkways*), tata kelakuan (*mores*), dan adat istiadat (*custom*) turut beradaptasi. Secara sosiologis setidaknya pandemi Covid-19 terkonstruksi empat persepsi di masyarakat. *Pertama*, Covid-19 merupakan jenis penyakit yang berbahaya. Sejak ditemukan Covid-19 di Wuhan China, Covid-19 diyakini oleh para ahli kesehatan tidak begitu tinggi tingkat *persentase* kematiannya daripada virus lain seperti SARS dan MERS. Namun Covid-19 menjadi virus berbahaya karena tingkat penyebarannya sangat cepat dibandingkan dengan virus lain. Itu terbukti dengan cepatnya penduduk di dunia yang terinfeksi Covid-19. *Kedua*, Covid-19 merupakan ancaman bagi berbagai sektor kehidupan. Selain kesehatan, Covid-19 turut mengancam kehidupan sosial, ekonomi, pendidikan, dan politik di berbagai negara. Pada aspek kehidupan sosial, hubungan sosial terbatas, disorganisasi dan disfungsi sosial terjadi di masyarakat. Sementara pada aspek ekonomi, tingkat kemiskinan meningkat dan mekanisme transaksi perdagangan berbasis online. Sedangkan pada sektor pendidikan, model pembelajaran

¹ <https://infeksiemerging.kemkes.go.id/>.Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Info Infeksi Emerging Kementerian Kesehatan RI [Internet]. 2020 [diunduh pada tanggal 03 September 2020 , pukul 19.07 WIB].

harus dilakukan jarak jauh secara daring. Pada kehidupan politik juga tidak lepas terkena dampaknya. Ego sektoral antar lembaga pemerintah dan politik dramaturgi untuk meraih simpati masyarakat menjadi fenomena dalam konteks politik di tengah pandemi Covid-19. *Ketiga*, Covid-19 diyakini oleh beberapa pihak sebagai bentuk konspirasi global yang sengaja dibuat untuk kepentingan kapitalisme dan penjajahan model baru berbasis senjata biologis. Walaupun belum ada studi ilmiah terkait dengan persepsi ini, hal ini menjadi menarik karena banyaknya perdebatan yang terjadi di masyarakat. Saat masyarakat mulai mengalami berbagai tekanan mekanisme hidup di tengah pandemi Covid-19, rasa ketidakpercayaan masyarakat muncul dan dapat meyakini persepsi ini. Teori konspirasi global berkembang dan menjadi hipotesa masyarakat dalam situasi yang tidak menentu. *Keempat*, pandemi Covid-19 sebagai sumber pendapatan ekonomi baru. Pada persepsi ini beberapa pihak meyakini bahwa pandemi Covid-19 menguntungkan bagi dirinya, bagi kelompoknya, dan bagi perusahaannya untuk meningkatkan sumber pendapatan ekonomi. Persepsi keempat inilah yang melahirkan para aktor ekonomi yang menaikkan harga barang jauh lebih tinggi daripada harga sebenarnya karena permintaan masyarakat yang tinggi. Aktor ekonomi ini tidak peduli dengan rasa simpati dan empati di masa pandemi, bagi mereka bisnis adalah bisnis.²

Berdasarkan tulisan di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa wabah Covid-19 memaksa manusia untuk bertindak dengan kesadaran agar hidup lebih disiplin. Manusia harus bisa beradaptasi dengan tatanan perubahan baru agar bisa terhindar dan selamat, tidak ubahnya bidang kesehatan, tatanan moral kemanusiaan, tatanan kerja serta sistem keberagaman harus bisa menyesuaikan diri. Sampai saat ini (saat tulisan ini ditulis), pandemi Covid-19 ini tidak kunjung reda atau berakhir, upaya telah dilakukan untuk menghadapinya, namun manusia hanya bisa bertahan dengan cara karantina rumah, isolasi mandiri, karantina fasilitas khusus, karantina rumah sakit, dan karantina wilayah. Kondisi dan situasi saat ini akan berpengaruh besar terhadap tatanan kehidupan normal baru atau *new normal* yang artinya, melakukan dan bertindak tidak pada semestinya yang biasa dilakukan akan tetapi harus bisa menerapkan protokol kesehatan sampai ditemukannya vaksin yang dapat menyembuhkannya.

Berdasarkan latar belakang inilah tatanan baru yang sering disebut *new normal* secara sosiologis memiliki makna adaptasi hidup pada keadaan

² Syaifudin, *Negara, Masyarakat dan Era New Normal*, Dosen Sosiologi FIS UNJ dalam kolom Tempo.Co, diambil dari link., <https://kolom.tempo.co/read/1351996/negara-masyarakat-dan-era-new-normal/full&view=ok>, pada tanggal 01 September 2020, pukul 19.13 WIB.

darurat. Sehingga sangat tertarik untuk bisa menelaah kejadian alam yang benar-benar merubah tatanan kehidupan ini dalam analisis perilaku tatanan kesehatan, moralitas, kerja dan keberagaman.

Transisi Tatanan Kesehatan dan Moralitas

Merebaknya berbagai pandemi pada dua dekade terakhir telah menciptakan sejarah baru kesehatan, mengingat tingkat penyebaran dan tingkat kematian yang cukup tinggi. Pentingnya menyadari bahaya Covid-19, akhirnya masyarakat menerapkan gaya hidup sehat dan bersih seperti mencuci tangan rutin dengan sabun pada air mengalir minimal 20 detik, memakai masker jika harus ke luar rumah, serta menutupi mulut dan hidung saat bersin atau batuk, terus memperbarui perkembangan kesehatan tubuh, dan mengupayakan *social distancing* (hindari kerumunan, dan menjaga jarak fisik) sebisa mungkin, tidak bersalaman, tidak berangkulan dan tidak beradu pipi kiri-pipi kanan, yang jarang sekali dilakukan sebelum adanya Covid-19 ini. Transisi kehidupan normal yang baru tersebut menuntut melakukan kebiasaan-kebiasaan untuk hidup bersih dan sehat. Masuknya era normal yang baru adalah satu-satunya cara yang dapat dilakukan untuk bisa mengendalikan Covid-19 ini dengan baik.

Transisi dunia kesehatan yang menerapkan protokol Covid-19 merumuskan tatanan baru bagi perilaku setiap orang dan interaksi antar-individu di ruang publik, di kantor atau tempat kerja, pasar, rumah makan atau kafe hingga sekolah dan rumah ibadah. Artinya, transisi baru kesehatan agar dapat meminimalisir penularan diharuskan setiap orang hanya diminta merubah pola, perilaku atau gaya hidup. Dari pola atau perilaku hidup yang sebelumnya serba cair dan lepas, berubah menjadi individualistik, sedikit kaku dan penuh kehati-hatian serta waspada. Pola transisi baru dibidang kesehatan ini akan membuka peluang pada semua orang agar bisa terus bergerak maju dan apabila bisa ditatai serta bersedia konsisten menerapkan protokol kesehatan, siapapun tidak perlu takut atau ragu dengan pola hidup baru ini karena protokol kesehatan itu sendiri sudah memaksa setiap orang menerapkan kehati-hatian berinteraksi di ruang publik yang membawa dampak pada pola hidup yang penuh kewaspadaan.

Transisi Tatanan Kerja

Menuju Tatanan Baru Era Pandemi Covid-19” yang mengulas bagaimana bekerja dari rumah, belajar di rumah yang secara ekonomi-energi lebih efisien dan telah diimajinasikan dari dulu sekarang seolah mendapat kesempatan

untuk melakukan prakteknya. Sebetulnya teknologi untuk ‘bekerja dari rumah’ itu telah siap dari dulu, namun masyarakat yang terikat pada pola *business as usual* terus mengabaikan peluang pemanfaatannya. Covid-19 membantu penerapannya. Demikian pula, berbagai keahlian teknologi informasi dan komunikasi sekarang dikuasai lebih cepat oleh para pekerja yang harus bekerja dari rumahnya, sementara sebelumnya mereka mengandalkan pada *spesialist* di kantor.

Kebijakan jaga jarak saat pandemi Covid-19 alias virus Corona memberi banyak perubahan pada gaya hidup. Jika dulunya banyak hal dilakukan secara langsung dengan bertatap muka, kini segala yang diakses *online*, termasuk bekerja dan belajar. Berbagai macam tawaran yang diberikan *online shop* ini tentu menarik minat konsumen untuk berbelanja. Karena dengan adanya *online shop*, mereka dapat memenuhi kebutuhan rumah tangga dengan mudah dan cepat sehingga tetap mengikuti aturan yang berlaku. Tanpa harus pergi keluar rumah barang akan tiba dengan aman dan terjamin. Di sisi lain, dengan adanya *online shop* ini muncul perilaku konsumtif dari masyarakat. Ketika kita berada di rumah tentunya kita akan memiliki banyak waktu luang dan hal ini akan mendorong kita untuk membuka *online shop* dan secara tidak sadar berbelanja secara berlebihan tanpa melihat kebutuhan yang diperlukan karena berbagai promo yang ditawarkan. Pelaksanaan *Work From Home* tentunya memberikan dampak dalam segala aktivitas yang dibatasi sehingga masyarakat cenderung lebih senang untuk berbelanja serba *online*.

Untuk ASN melalui Surat Edaran (SE) Nomor 58 tahun 2020 tentang Sistem Kerja Pegawai/ASN Dalam Tata Normal Baru yang secara resmi diberlakukan Jumat (5 Mei 2020), berisi tentang pedoman kinerja Aparatur Sipil Negara (ASN) di masa pandemi Covid-19 yang salah satunya memetakan pegawai dengan usia di atas 45 tahun. Dalam SE tersebut, Menteri PAN-RB mengatur penyesuaian sistem kerja yang fleksibel dalam pengaturan lokasi kerja berupa *work from office* maupun *work from home*. Perjalanan dinas harus dilakukan secara selektif sesuai tingkat prioritas dan urgensinya dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan. Rapat tatap muka diimbau untuk tetap menggunakan teknologi informasi melalui media elektronik (*video confrence* atau pertemuan secara virtual). Akan tetapi apabila sangat urgen untuk melaksanakan pertemuan tatap muka dapat dilakukan dengan memperhatikan *physical distancing*.

Transisi Keberagamaan

Selama pandemi, agama telah menunjukkan peran-peran pentingnya dalam

membantu memotong rantai penyebaran *Coronavirus*. Tentunya berdasarkan pengalaman beberapa negara yang telah mengetahui akibat dahsyat bila mana beragama tanpa berfikir logis tentang pencegahan Covid-19 dengan cara berdoa bersama tanpa memperhatikan protokol pencegahan yang dianjurkan. Mereka sangat yakin bila manusia yang dekat dengan Tuhan tanpa adanya ikhtiar akan dijamin keselamatan oleh-Nya. Sebagaimana yang dialami di beberapa negara seperti kasus di Korea Selatan setelah hampir 5.000 kasus Covid-19 yang dikonfirmasi terhubung ke “pasien 31”, yaitu seorang individu terinfeksi yang merupakan jemaat di Gereja *Shincheonji Yesus* di Daegu. Di Amerika Serikat, gereja besar California dari jemaat Slavia telah menjadi pusat penyebaran virus sebagaimana dinyatakan oleh pejabat kesehatan masyarakat terkait dengan 71 kasus. Di Malaysia, 513 orang dinyatakan positif terpapar Covid-19 setelah menghadiri pertemuan keagamaan yang kemudian berujung kepada kebijakan *lockdown* di Malaysia.

Bersandar secara utuh kepada Tuhan Yang Maha Esa yang dibarengi dengan usaha nyata sangatlah bagus, karena berdasarkan penelitian global menunjukkan 84% orang dewasa mengatakan agama merupakan bagian penting dalam segi kehidupan yang dijalannya. Dalam mensikapi pandemi Covid-19 ini sebagian muslim memiliki persamaan tindakan karena suatu sebab pada saat zaman nabi dengan zaman sekarang, walaupun secara urgen berbeda kesebabankejadiannya, yaitu kutipan hadis (ucapan dan tindakan) Nabi Muhammad untuk melakukan karantina dan memberlakukan larangan bepergian selama pandemi. Nabi Muhammad berkata:

إِذَا سَمِعْتُمْ بِالطَّاعُونَ بِأَرْضٍ فَلَا تَدْخُلُوهَا، وَإِذَا وَقَعَ بِأَرْضٍ وَأَنْتُمْ بِهَا فَلَا تَخْرُجُوا مِنْهَا

“Jika Anda mendengar wabah terjadi di suatu wilayah, janganlah kalian memasuki wilayah tersebut; dan jika wabah itu terjadi di suatu tempat saat Anda ada didalamnya, janganlah meninggalkan tempat itu”(HR.Bukhori). Ada beberapa wabah yang dialami dimasa Nabi Muhammad, Saw, yaitu lepra atau *leprosy*, Kusta, dan *Tha'un* sebagaimana disabdakan Rasulullah saw adalah wabah penyakit menular dan mematikan yang menyerang tubuh manusia.

Perubahan tatanan keberagamaan terlihat adanya seruan dalam membantu memotong rantai penyebaran *Coronavirus*. Para pemimpin agama adalah pemimpin yang dimuliakan dan sangat dihormati di masyarakat. Negara ini telah menunjukkan bahwa agama dapat digunakan sebagai sarana yang *realistis* dalam membantu memerangi penyebaran Covid-19. Pada Maret 2020, saat penyebaran Covid-19 masih sangat awal di Indonesia, umat Hindu

di Bali memodifikasi ritual *Nyepi* dengan merayakan ritual tanpa Karnaval Ogoh-Ogoh. Karena *Coronavirus* sangat menular, para pemimpin agama memutuskan untuk membatalkan karnaval untuk menghindari pertemuan besar. Protestan dan Katolik juga telah memodifikasi perayaan Paskah pada April. Sebagian besar gereja telah menggunakan layanan virtual untuk menyampaikan pesan agama kepada para penganutnya sejak kasus Covid-19 ditemukan di Indonesia.

Organisasi Muslim Indonesia telah mengeluarkan fatwa untuk mengganti salat Jumat, yang seharusnya diselenggarakan di masjid dan wajib bagi pria Muslim, menjadi anjuran salat zuhur di rumah. Selama bulan puasa Ramadan, umat Islam juga diminta untuk sembahyang di rumah untuk mengganti salat Tarawih berjamaah yang biasanya dilakukan di masjid atau di lapangan. Di Taiwan, para pemimpin agama berkolaborasi dengan pusat komando epidemi pemerintah untuk merespons dengan cepat terhadap krisis kesehatan di negara mereka untuk melindungi masyarakat. Tak heran, Taiwan dipuji salah satu negara yang dianggap berhasil menanggulangi pandemi Covid-19 dengan baik. Sementara itu, negara Vatikan telah beradaptasi dan mengubah *liturgi daringnya* dan menyediakan pedoman untuk doa-doa baru cara menanganai pandemi. Di Bangladesh, agama-agama telah merespons terhadap krisis kesehatan dengan menawarkan bantuan spiritual dan material kepada masyarakat

Penutup

Mengubah cara pandang sebagian besar masyarakat atas situasi wabah pandemi, harus dilakukan semaksimal mungkin. Transisi *new normal* akan berdampak pada penolakan yang masif, karena melakukan sesuatu yang biasa menjadi tidak biasa perlu kesabaran dan berproses. Wabah ini telah merubah tatanan baru dunia baik di dunia kesehatan akan pentingnya hidup bersih dan baik, tatanan baru moralitas akan pentingnya sifat kewaspadaan terhadap sebab akibat yang timbul, tatanan kerja baru dari langsung bertemu atau bertatap muka menjadi serba *online*. Tatanan baru keberagamaan agar bisa berfikir realistis dan tidak sekedar doa akan tetapi mulai membuka pikiran dan mendukung temuan-temuan ilmiah rasional untuk menyelamatkan umat manusia dari berbagai permasalahan hidup.

Daftar Pustaka

Buku

- Lauer, R.H. (1993). *Perspektif Perubahan Sosial*. Jakarta : PT. Rineka Cipta.
- Mutakin, A. (2004). *Dinamika Masyarakat Indonesia*. Bandung : PT. Genesindo.
- Ranjabar, J. (2008). *Perubahan Sosial dalam Teori Makro (Pendekatan Realitas Sosial)*. Bandung : Alfabeta.

E-Book

- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, (2013). *Pedoman Umum Kesiapsiagaan Menghadapi Middle East Respiratory Syndrome-Corona Virus (MERS-CoV)*.

Website

- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Info Infeksi Emerging Kementerian Kesehatan RI [Internet]. 2020 [diunduh pada tanggal 03 September 2020 , pukul 19.07 WIB, tersedia dari <https://infeksiemerging.kemkes.go.id/>.

Surat Kabar

- Syaifudin, *Negara, Masyarakat dan Era New Normal*, Dosen Sosiologi FIS UNJ dalam kolom Tempo.Co, tersedia dari <https://kolom.tempo.co/read/1351996/negara-masyarakat-dan-era-new-normal/full&view=ok>, pada tanggal 01 September 2020, pukul 19.13 WIB.

Jurnal

- Zainun Nur Hisyam Tahrus, 2020, *Dunia Dalam Ancaman Pandemi Kajian Transisi Kesehatan Dan Mortalitas Akibat Covid-19*, Yogyakarta University of Indonesia, tersedia dari https://www.researchgate.net/publication/340224377_DUNIA_DALAM_ANCAMAN_PANDEMI_KAJIAN_TRANSISI_KESEHATAN_DAN_MORALITAS_AKIBAT_Covid-19, diakses pada tanggal 02 September 2010, pukul 15.22 WIB.

**Muslim Jawa Berdamai Dengan Corona:
Memahami Beragam Ekspresi Keagamaan
Masyarakat Pinggiran Merespon Pandemi**

Achmad Zainal Arifin

Prodi Sosiologi,

Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora, UIN

Sunan Kalijaga

Pendahuluan

*“Dulu dibilang,
kalo habis sholat ndak usah salaman, ndak percaya”
“Dulu paling ndak suka kalau lihat perempuan bercadar,
sekarang yang lelaki malah disuruh bercadar juga”
“Dulu kalau mau sholat imam selalu minta merapatkan shof,
sekarang malah harus berjarak”*

Ungkapan bernada sindiran ataupun sekedar *joke* seperti diatas, sempat menarik perhatian berbagai kalangan, khususnya di dunia maya. Tentu ada cukup banyak ungkapan-ungkapan sejenis lainnya yang terlontar, sebagai bentuk ekspresi keagamaan, di masyarakat ketika merespon berbagai kebijakan yang ada terkait pandemic Covid-19 yang belum menunjukkan tanda kapan akan berakhir. Wacana *new normal* yang muncul beberapa bulan terakhir juga direspon secara beragam oleh berbagai kelompok masyarakat, baik dilihat dari perbedaan status sosial, ekonomi, politik, maupun budaya (Agustino, 2020; Taufik & Warsono, 2020), lebih-lebih dari perbedaan kelompok agama yang ada di masyarakat (Darmalaksana, 2020; Zulkarnain, Nurdin, & Gojali, 2020). Dalam konteks ini, kehidupan beragama tentu juga terdampak cukup serius karena kasus pandemi ini, meskipun masih sedikit kalangan akademisi yang secara spesifik melakukan kajian pada tataran akar rumput. Langkanya kajian terkait hal ini bisa jadi memang menunjukkan timpangnya pemberitaan media yang hanya fokus melihat isu pandemi beserta dampak-dampaknya dalam perspektif masyarakat kota, khususnya yang disuarakan oleh kalangan terdidik perkotaan, baik yang mewakili bidang medis, ekonomi, sosial, maupun politik. Sementara kehidupan keagamaan yang selama ini lebih diidentikkan dengan masyarakat desa ataupun masyarakat pinggiran, cenderung terabaikan.

Pembicaraan terkait Covid-19 dari kalangan agamawan memang sempat muncul dan menjadi *trending* topik beberapa saat di media sosial, sayangnya hal tersebut lebih terkait dengan sisi negatif kelompok agama, khususnya terkait dengan Jamaah Tabligh yang sempat berencana menghelat kegiatan keagamaan akbar yang diikuti peserta dari mancanegara meski pada akhirnya batal dilaksanakan. Apalagi, pembatalan acara tersebut ternyata tidak serta-merta menghentikan keterkaitan kelompok keagamaan ini dengan merebaknya wabah Covid-19 di tanah air. Ada beberapa anggota Jamaah Tabligh yang kemudian terindikasi telah terpapar Covid-19 sejak mereka menghadiri kegiatan serupa di Malaysia dan inilah yang kemudian menempatkan Jamaah Tabligh sebagai salah satu kluster penting penyebaran Covid-19 pada fase-fase awal (Dahlan, 2020; Mustautina, 2020).

Minimnya pemberitaan terkait Covid-19 dengan perspektif masyarakat desa atau pinggiran baru mulai mendapatkan perhatian yang dari media sosial ketika masyarakat kota, khususnya di Jakarta dan kota-kota satelit di sekitarnya, seperti Depok, Tangerang, Bekasi, dan Tangerang Selatan, dihadapkan pada keinginan untuk melaksanakan ritual Mudik Idul Fitri. Data terkait korban positif Covid-19 di wilayah pedesaan, khususnya di Daerah Istimewa Yogyakarta, sebagian besar memang diawali oleh mereka yang memiliki riwayat perjalanan ke dan dari kota-kota tersebut. Itu pun lebih terkait dengan informasi munculnya transmisi lokal di beberapa desa yang ada di Daerah Istimewa Yogyakarta, khususnya di wilayah Kabupaten Gunung Kidul dan Bantul yang memang memiliki cukup banyak warga yang bekerja di kota-kota besar di Indonesia, khususnya di Jakarta dan sekitarnya.

Artikel ini mencoba untuk menyajikan beragam bentuk adaptasi masyarakat Islam Jawa, khususnya terkait dengan ekspresi keagamaan masyarakat pinggiran, dengan memfokuskan pada sebuah desa di Kabupaten Sleman, yang *notabene* masih masuk zona hijau, akan tetapi karena masifnya pemberitaan terkait pandemic ini juga ikut terdampak dan memaksa warganya untuk mengikuti beragam kebijakan terkait Covid-19, khususnya terkait protokol kesehatan, yang sedikit banyak telah mengubah pola kehidupan keagamaan yang lebih didominasi oleh kehidupan komunal meski disertai dengan kegamangan dan penuh rasa curiga. Beragam ekspresi yang dinarasikan secara *socio-ethnography*, memberikan gambaran bagaimana Muslim Jawa di wilayah pinggiran atau pedesaan beradaptasi dengan berbagai kebijakan pemerintah terkait pandemi Covid-19 ini.

Masjid dan Mushola yang Berseberangan: Sekilas tentang Dusun Kembang

Sebut saja dusun yang menjadi lokasi penelitian sosio-ethnografi ini Dusun Kembang. Terletak di Kabupaten Sleman wilayah Barat, hampir berbatasan dengan Kabupaten Kulon Progo. Dusun Kembang sendiri dihuni oleh sekitar 170 Kepala Keluarga yang terbagi menjadi dua RW. Mayoritas warga di Dusun Kembang ini berprofesi sebagai petani dan pedagang. Hanya ada beberapa warganya yang menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN) di beberapa instansi di level Kabupaten atau Kotamadya. Letak perumahan yang ada di Dusun Kembang ini nampak menggerombol cukup padat, namun dikelilingi oleh lahan persawahan yang cukup luas. Kondisi semacam ini tentu memungkinkan munculnya pola interaksi sosial yang cukup akrab diantara warga dusun. Selain pola perumahan yang menggerombol membawa kehangatan dan keakraban warga, pola semacam ini juga memudahkan warga untuk mendeteksi masuknya orang luar dusun ke dusun mereka. Hanya ada satu jalan aspal yang cukup lebar yang menghubungkan Dusun Kembang dengan dusun-dusun lain di sekitarnya. Oleh karena itu, untuk menutup akses masuk ke Dusun Kembang sangatlah mudah. Tinggal memasang portal bambu di jalan aspal tersebut, maka bisa dipastikan warga luar dusun akan kesulitan untuk masuk tanpa pantauan.

Dari sisi keberagaman, mayoritas warga di Dusun Kembang menganut agama Islam, dengan berbagai corak pemahaman doktrin ke-Islaman yang berbeda satu dengan yang lain. Secara umum, bisa dikatakan kelompok Islam yang paling banyak diikuti di Dusun Kembang ini adalah Islam Jawa. Istilah Islam Jawa yang saya sebutkan disini berbeda dengan makna Islam Kejawaen (Geertz, 1960b; M. R. Woodward, 2004) yang biasanya dihubungkan dengan kelompok-kelompok penghayat atau aliran kepercayaan. Secara ritual keagamaan sehari-hari bisa dikatakan lebih dekat dengan Islam tradisional dalam pengertian kelompok Nahdlatul Ulama (NU), akan tetapi tidak tepat kalau dimasukkan dalam kategori santri, sebagaimana Geertz mengelompokkan NU, karena Islam Jawa lebih mementingkan ritual yang dilaksanakan dengan bahasa Jawa dibandingkan *ibadah-ibadah mahdlloh* sebagaimana yang biasa dikerjakan oleh kelompok santri (Geertz, 1960a). Islam Jawa, dalam konteks ini lebih merujuk pada kelompok warga yang mengklaim diri tidak menjadi bagian dari Muhammadiyah maupun NU, apalagi terkait atau dikaitkan dengan kelompok-kelompok Islam lainnya. Secara sederhana, mereka menganut agama Islam sebagaimana yang diturunkan oleh orang tua mereka dan cenderung menjadikan Islam hanya sebagai identitas pelengkap saja dari

keseharian mereka yang lebih lekat dengan nilai-nilai Jawa dibandingkan doktrin-doktrin keislaman sebagaimana kalangan santri (Mark R. Woodward, 2011).

Di Dusun Kembang sendiri, kelompok Islam Jawa ini seringkali menjadi sasaran kritik dari mereka yang berafiliasi dengan Muhammadiyah ataupun kelompok Salafi yang muncul di Dusun Kembang sejak tahun 2005 melalui pendirian sebuah yayasan, sebut saja al-Makkah, yang menaungi lembaga pendidikan pesantren untuk putra dan putri. Sementara untuk kalangan Nahdliyyin (NU) hanya ada satu atau dua kepala keluarga saja yang secara terang-terangan menunjukkan afiliasinya. Meskipun terdapat berbagai macam kelompok dalam Islam yang dalam konteks masyarakat Indonesia secara umum seringkali dihadap-hadapkan, yaitu: kelompok Muhammadiyah dan Salafi di satu sisi dengan kelompok Islam Jawa dan NU di sisi yang lain, namun keberadaan kelompok-kelompok tersebut saat ini relatif jauh dari konflik. Seakan, diantara mereka sudah menyadari posisi masing-masing dalam berbagai perbedaan ketika mengekspresikan keberagaman mereka sehari-hari. Hanya pada momen-momen tertentu saja yang berpotensi untuk memunculkan friksi, meskipun tidak sampai pada level gontok-gontokan atau saling serang dengan kata-kata, karena secara umum mereka jarang berkumpul dalam satu forum keagamaan yang ada. Satu-satunya momen yang mengumpulkan mereka hanyalah pelaksanaan ibadah Shalat Jum'at dan pihak Takmir sudah mengantisipasi potensi munculnya friksi tersebut dengan menghadirkan khatib-khatib yang dipandang moderat dari berbagai kalangan, termasuk dari wakil aparat desa dan Kantor Urusan Agama (KUA).

Bagi orang dari luar Dusun Kembang, satu simbol kehidupan keberagaman yang paling menonjol dan mudah diamati adalah keberadaan masjid dan mushola yang cukup besar dan hanya dipisahkan oleh jalan utama dusun yang berjarak tidak lebih dari 20 meter. Unikny lagi, masjid dan mushola tersebut memiliki nama yang sama al-Amin. Menurut keterangan Mbah Gimam, salah seorang takmir. Masjid al-Amin yang berdiri sekarang, dulunya adalah kebun yang dibeli oleh sebuah Yayasan yang dimiliki oleh salah satu kelompok Salafi dengan maksud untuk mendirikan pesantren. Kemudian, sebagian tanah di dekat jalan utama Dusun Kembang diwakafkan untuk masjid dan dicarikan dana pembangunan masjid sepenuhnya oleh pihak yayasan. Karena sudah diwakafkan dan bangunannya memang lebih besar, maka takmir memutuskan untuk menurunkan status Masjid al-Amin yang dulu menjadi Mushola al-Amin dan tetap digunakan untuk sholat lima waktu dan kegiatan Taman Pendidikan al-Qur'an. Representasi dari dua bangunan

rumah ibadah ini ternyata mampu menggambarkan dinamika umat Islam di Dusun Kembang. Masjid al-Amin, yang notabene menjadi ruang utama untuk santri-santri yayasan Salafi, seringkali diposisikan berhadap-hadapan dengan jamaah Mushola al-Amin, yang kebanyakan diisi oleh Islam Jawa. Meskipun belum pernah ada konflik diantara keduanya, namun ketegangan-ketegangan antar keduanya terkadang muncul ke permukaan, terutama ketika bertepatan dengan momen-momen tertentu yang bagi Islam Jawa dianggap penting dan perlu untuk diadakan selamatan atau kenduri, seperti satu Muharam (Sura), ketika ada warga yang meninggal dunia, ataupun berbagai tradisi lain, yang oleh jamaah Salafi seringkali dijadikan sasaran kritik karena melaksanakan ibadah yang tidak dicontohkan oleh Nabi Muhammad (Hasan, 2008; Jamhari & Jahroni, 2004).

Dengan mengelompoknya warga Dusun Kembang yang beragama Islam di kedua tempat ibadah tersebut, maka dengan jelas terlihat bahwa jamaah Masjid al Amin bisa dikatakan berada dalam kategori kelompok Islam yang memperjuangkan kemurnian aqidah, sehingga berbagai macam bentuk tradisi Muslim Jawa seringkali diberi label “bid’ah” dan bahkan “syirik” (Ali, 2008; Jaiz, 2008) yang tentu saja apabila tidak dijembatani dengan baik oleh takmir, termasuk penentuan khatib jumat yang melibatkan semua pihak yang ada, termasuk perangkat desa dan KUA. Tentu saja, kesimpulan sederhana ini tidak akan sama persis dengan kondisi di lapangan karena memang pada dasarnya masjid dan mushola bukan seperti gereja yang anggota jamaahnya terdaftar dengan rapi dan ada semacam “kewajiban” untuk beribadah di tempat dimana jamaah tersebut terdaftar. Akan tetapi, secara sosiologis bisa dijadikan sebagai alat untuk membantu melakukan analisis terkait dinamika kelompok-kelompok dalam Islam, yang biasanya hanya terlihat dengan jelas garis batas antar kelompok tersebut hanya ketika kita melihat elit atau pimpinannya. Pada tataran akar rumput, batas antar kelompok dalam Islam tersebut seringkali hilang, melebur dengan berbagai aktivitas sosial-keagamaan masyarakat yang lebih disatukan oleh identitas sosio-kultural mereka sebagai warga dusun (Mulkhan, 1998).

Dalam konteks inilah, masalah terkait respon masyarakat terhadap kebijakan Covid-19 akan dikaji. Bagaimana beragam ekspresi keagamaan ditunjukkan oleh jamaah dari kedua tempat ibadah ini, yang secara sederhana merepresentasikan dua kelompok besar dalam Islam di Indonesia, yaitu: mereka yang pro dengan tradisi lokal sehingga memunculkan istilah “Islam Jawa” dengan mereka yang lebih dekat dengan model kelompok Islam yang mengutamakan kemurnian ajaran Islam.

Kebijakan Covid-19 dan Tantangan Masyarakat Komunal

Sebagaimana yang sudah disinggung di bagian pendahuluan, timpangnya informasi terkait dengan Covid-19 antara perspektif “kota” dan “desa” menjadi sebuah ironi karena sebagian besar penduduk kita bertempat tinggal di desa, yang tentu saja memiliki karakteristik masyarakat yang berbeda. Mengapa disebut ironi? Karena pada akhirnya kebijakan terkait dengan Covid-19 sebagian besar dibuat dengan perspektif “kota” dan kemudian dipaksakan untuk diberlakukan juga seluruh pelosok desa, sehingga memunculkan tantangan yang jauh lebih besar bagi masyarakat desa untuk beradaptasi dan melaksanakan kebijakan tersebut. Pasca diumumkannya pasien pertama positif Covid-19 oleh pemerintah, berbagai kebijakan telah diambil, mulai dari seruan untuk *Work from Home* (WfH), yang kemudian serentak diikuti dengan diliburkannya semua sekolah, wacana *lockdown* yang sempat dilakukan sepihak oleh berbagai kampung, darurat Covid-19, hingga dikeluarkannya kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di beberapa kota besar di Indonesia (Adawiyah & Solichati, 2020; Yunus & Rezki, 2020), telah memunculkan tantangan tersendiri bagi masyarakat pedesaan yang juga terpaksa atau dipaksa harus ikut mengimplementasikan kebijakan-kebijakan tersebut dalam kehidupan keseharian mereka, terlebih aturan protokol kesehatan yang salah satunya mengharuskan adanya *social distancing* maupun *physical distancing* (Pradana & Casman, 2020).

Sepintas, kebijakan tersebut secara tidak langsung menghantam dengan telak sendi-sendi kehidupan masyarakat desa, khususnya masyarakat yang masih kental dengan nilai-nilai budaya Jawa, yang lebih mementingkan keharmonisan antara makro dan mikro kosmos dengan penekanan pada pentingnya kehidupan komunal atau kolektif masyarakat. Masyarakat pedesaan Jawa yang sangat lekat dengan jargon “*mangan ora mangan kumpul*” (makan atau tidak yang penting bersama) serta memiliki berbagai ritual dan tradisi sosial keagamaan dalam setiap siklus kehidupan mereka, sejak dari dalam kandungan hingga meninggal dunia, yang terwujud dalam tradisi slametan dan kenduren (Amin, 2000; Karim, 2017; Sholikhin, 2010). Dalam konteks inilah, masyarakat pedesaan, khususnya yang sudah lekat dengan beragam tradisi atau mereka yang termasuk ke dalam kategori Islam Jawa sebagaimana yang dijelaskan sebelumnya memiliki tantangan relatif lebih berat dan kompleks untuk menjalankan kebijakan terkait pandemi Covid-19, termasuk protokol kesehatan yang ditetapkan oleh pemerintah. Artikel ini tentu bukan untuk mengekspos adanya pembangkangan sipil terhadap kebijakan pemerintah, akan tetapi lebih menggambarkan bagaimana

masyarakat di pedesaan memiliki daya adaptasi yang luar biasa yang disatu sisi tetap ingin menunjukkan loyalitas mereka kepada berbagai bentuk kebijakan pemerintah, akan tetapi disisi lain juga memiliki mekanisme alamiah untuk mempertahankan dan melestarikan nilai-nilai budaya dan agama yang selama ini tidak bisa lepas dari kehidupan keseharian mereka.

Dalam konteks masyarakat Jawa, setiap pergantian siklus kehidupan diyakini selalu menempatkan manusia dalam kondisi “krisis” yang perlu untuk diiringi dengan berbagai upaya agar bisa melewati krisis tersebut dengan baik (Subandrijo, 2000). Tentu saja, pelaksanaan ritual untuk mengiringi pergantian siklus kehidupan disini tidak dilaksanakan secara privat atau hanya melibatkan anggota keluarga saja, akan tetapi juga melibatkan masyarakat di sekitarnya, yang biasa dikelompokkan dengan istilah “*sak kukuban kenduren*” (satu kelompok kenduri atau slamatan), yang biasanya terdiri dari 70 sampai 125 kepala keluarga. Pelibatan warga secara luas semacam ini tentu tidak sekedar untuk meminta doa restu mereka agar tuan rumah bisa melewati krisis dengan selamat, akan tetapi juga memiliki makna dan status sosial yang fundamental bagi kehidupan di pedesaan. Sebagai contoh, ketika sebuah keluarga akan dikaruniai seorang anak, maka ketika usia kehamilan memasuki empat bulan, mereka akan melaksanakan tradisi Mapati (memperingati empat bulan usia kehamilan) yang dipandang sebagai saat-saat kritis bagi calon bayi karena pada usia empat bulan inilah, Allah akan meniupkan ruh ke dalam janin dan akan ditetapkan untuk janin tersebut empat hal: jodoh, rezeki, kematian, dan nasib. Oleh karena itu, Muslim Jawa merasa perlu mengiringi masa-masa kritis dengan mengumpulkan tetangga *sak kukuban kenduren* ditambah dengan keluarga dan kerabat mereka untuk berdoa bersama demi kebaikan dan keselamatan janin tersebut. Inilah mengapa berbagai bentuk ritual yang dilaksanakan oleh Muslim Jawa di pedesaan seringkali disebut dengan istilah yang sama “Slamatan”, mulai dari Mapati, Mitoni (tujuh bulanan), Kelahiran, Aqiqah, Sunatan, Nikahan, hingga Kematian (Sholikhin, 2010; Wahyana Giri, 2010; Yana, 2010).

Tentu saja, pelaksanaan beragam ritual tersebut tidak hanya memiliki makna teologis untuk mendapatkan keselamatan sesuai dengan ritual yang dimaksudkan, akan tetapi seringkali juga dijadikan sebagai indikator yang menunjukkan seberapa besar pengaruh yang dimiliki oleh sebuah keluarga di masyarakat. Status sosial sebuah keluarga biasanya akan bisa dengan mudah terlihat dari pelaksanaan ritual-ritual tersebut. Selain itu, seringkali ritual yang diadakan di pedesaan juga dijadikan sebagai sarana untuk menilai seberapa besar loyalitas warga dalam berbagai aktivitas sosial masyarakat.

Apabila ada warga yang jarang atau tidak pernah menghadiri undangan dari warga lainnya, maka sanksi sosial berupa pengucilan dari berbagai aktivitas sosial akan secara otomatis turun. Dari sini kita bisa memahami mengapa Muslim Jawa sangat lekat dengan kehidupan komunal dan tidak bisa lepas begitu saja dari “ketergantungan sosial” antar warganya yang sudah sangat kuat mengakar dalam kehidupan pedesaan sehingga identik dengan istilah “*mangan ora mangan kumpul*”.(Aulia, 2009; Sholikhin, 2010)

Dari berbagai kebijakan pemerintah terkait dengan penanganan pandemi Covid-19, termasuk pelaksanaan protokol kesehatan, memang tidak semua mendapatkan respon yang sama. Ada kebijakan dan protokol kesehatan yang begitu saja dilaksanakan, misalnya menyediakan air untuk cuci tangan di depan rumah, akan tetapi ada juga aturan yang dilaksanakan dengan agak gamang, semisal menggunakan masker dan jaga jarak (*social* atau *physical distancing*). Tentu saja, ada beragam motivasi dan alasan yang menyertai respon-respon tersebut, salah satunya sebagaimana dijelaskan sebelumnya terkait kehidupan komunal Muslim Jawa di wilayah pedesaan. Dalam konteks masyarakat di Dusun Kembang, beragam respon ini akan digambarkan secara lebih detail, khususnya terkait dengan fenomena bagaimana warga Muslim Jawa di dusun tersebut mengekspresikan keberagaman mereka di tengah pandemi Covid 19, meskipun dusun mereka sejak awal hingga tulisan ini dibuat masih dalam status zona hijau.

Respon Muslim Jawa di Dusun Kembang terhadap Implementasi Protokol Kesehatan

Sebagaimana yang sudah disampaikan sebelumnya bahwa karakteristik masyarakat pedesaan, khususnya masyarakat Jawa tidak bisa dilepaskan dari ciri masyarakat komunal dengan beragam ritual-ritual keagamaan yang seakan sudah menjadi kewajiban sosial untuk dilaksanakan, baik oleh tuan rumah, maupun tetangga kiri-kanan untuk menghidirinya. Dalam konteks kehidupan yang bersifat komunal inilah nampak jelas tantangan yang harus dihadapi oleh Muslim Jawa di Dusun Kembang ketika mereka harus mengimplementasikan berbagai kebijakan dan aturan terkait protokol kesehatan selama pandemi berlangsung. Mereka dipaksa untuk melakukan perubahan yang relatif lebih berat dibandingkan dengan penduduk perkotaan, apalagi jika dikaitkan dengan mayoritas warganya yang berprofesi sebagai petani atau pekerja di sektor informal, seperti menjadi buruh harian lepas di bidang konstruksi (menjadi tukang atau pelayan tukang), penjual makanan asongan, ataupun sekedar sebagai ibu rumah tangga. Diantara aturan yang

dirasa cukup memberatkan mereka terkait kebijakan penanggulangan Covid-19, mulai “*work from home*” hingga implementasi protokol kesehatan, terutama memakai masker dan jaga jarak. Hal ini tentu tidak bisa dilepaskan dari kehidupan keseharian mereka dan juga adat dan kebiasaan mereka. Tiga aturan inilah yang akan dibahas secara mendetail dalam bab ini dengan mengedepankan latar belakang masyarakat Dusun Kembang yang pola hidupnya sangat erat kaitannya dengan dua tempat ibadah yang menjadi simbol perbedaan cara pandang keagamaan warga sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya.

1. Kebijakan *Work from Home* (WfH) dan *Lockdown* Lokal

Istilah “*Work from Home*” atau “bekerja dari rumah” sempat menjadi *trending topic* di dunia maya sekitar pertengahan Maret 2020 ini, menjadi suatu kebijakan yang terasa “aneh” bagi mayoritas warga Dusun Kembang yang umumnya berprofesi sebagai petani atau buruh tani. Memang, himbauan untuk melaksanakan WfH utamanya adalah ditujukan untuk Aparatur Sipil Negara (ASN) yang memang memungkinkan untuk melakukan pelayanan administratif kepada masyarakat melalui jaringan internet. Begitupun dengan beberapa perusahaan yang pastinya memiliki beberapa bagian atau divisi yang memungkinkan untuk membawa pekerjaan mereka ke rumah. Tapi bagi buruh harian lepas dan petani, tentu kebijakan ini terasa sulit untuk dilakukan. Bagi mereka, tidak pergi ke tempat kerja bermakna tidak akan ada pemasukan atau tidak makan. Memang, pada akhirnya pemerintah memberikan bantuan kepada warga masyarakat yang terdampak pandemi, akan tetapi hal tersebut tentu saja bersifat temporer dan tidak bisa menjamin warga yang tidak bekerja akan bisa makan selama pandemi berlangsung. Terlebih, tidak semua warga di Dusun Kembang terdata untuk mendapatkan bantuan pemerintah tersebut.

Alasan yang terakhir ini pulalah yang mengemuka ketika wacana *lockdown* merebak untuk diberlakukan. Malahan, sebelum pemerintah memutuskan untuk tidak memberlakukan *lockdown*, akan tetapi memilih opsi untuk memberlakukan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), warga di Dusun Kembang, sebagaimana warga kampung lain di Yogyakarta, sudah menerapkan kebijakan *lockdown* secara lokal. Mereka menutup akses masuk ke wilayah Dusun Kembang dengan membuat portal dari bambu dan mendirikan *deklit* (tenda) untuk berteduh petugas yang dijadwal secara bergilir untuk membuka dan

menutup portal sambil menyemprot siapa saja yang akan memasuki wilayah Dusun Kembang. Kebijakan *lockdown* lokal ini ternyata diterapkan berbeda antara dua Rukun Warga (RW) yang ada di Dusun Kembang. Menariknya, dari dua Satgas yang dibentuk, ketua Satgas dari masing-masing RW ini berafiliasi dengan masjid dan mushola yang ada di Dusun Kembang. Ketua Satgas RW satu merupakan jamaah aktif Mushola al-Amin, yang masuk dalam kategori Islam Jawa, sementara ketua Satgas dua berafiliasi dengan salah satu ormas keagamaan modern dan menjadi jamaah di Masjid al-Amin.

Keberadaan dua ketua Satgas Covid-19 yang kebetulan memiliki afiliasi yang berbeda ini ternyata memunculkan respon yang berbeda terhadap implementasi kebijakan dan protokol kesehatan diantara keduanya. Ketua Satgas Covid-19 RW 2, yang kebetulan juga berafiliasi dan menjadi anggota aktif salah satu badan otonom sebuah ormas keagamaan cenderung untuk mengikuti apa yang sudah ditetapkan oleh ormas keagamaan tersebut, sehingga kegiatan keagamaan di masjid terpaksa harus vakum cukup lama, sejak sebelum Bulan Ramadhan hingga sekitar pertengahan Bulan Juni mulai melaksanakan shalat Jumat dengan protokol kesehatan yang ketat dan khusus untuk warga Dusun Kembang saja. Sebaliknya, ketua Satgas Covid-19 di RW 1 merupakan jamaah mushola dan secara formal tidak berafiliasi ke ormas keagamaan tertentu cenderung “lebih longgar”, termasuk tetap melaksanakan kegiatan di mushola, seperti shalat tarawih dan shalat jamaah harian, meski juga dengan menerapkan protokol kesehatan dengan memasang alat cuci tangan, menyediakan sabun dan *hand sanitizer* serta penggunaan masker. Bahkan, ketika masjid dirasa sudah cukup lama tidak melaksanakan Jumat, padahal Dusun Kembang termasuk dalam kategori Zona Hijau Covid-19, ketua Satgas Covid-19 RW 1 mengizinkan untuk dilaksanakannya sholat Jumat di mushola karena dianggap lebih aman dan tidak memicu orang dari luar Dusun Kembang untuk ikut bergabung dalam pelaksanaan shalat Jum’at tersebut.

Perbedaan implementasi kebijakan terkait Covid-19 juga terlihat dengan jelas ketika dilakukan rapat Takmir Masjid al-Amin menyikapi pelaksanaan Kurban Bersama tahun 2020. Sebagian jamaah masjid menginginkan agar Kurban Bersama untuk tahun ini ditiadakan saja, mengingat sangat berpotensi untuk menimbulkan kerumunan massa. Bahkan, beberapa jamaah masjid sudah mengikuti anjuran

atau instruksi salah satu ormas keagamaan untuk mengalihkan dana Kurbannya langsung untuk membantu mereka yang terdampak Covid-19. Sementara mayoritas jamaah mushola tetap menginginkan tetap dilaksanakannya Kurban Bersama. Sebagai jalan tengah, pelaksanaan Kurban Bersama yang biasanya dipusatkan di satu tempat (halaman mushola), dibagi menjadi tiga kelompok dan pelaksanaannya diserahkan kepada masing-masing kelompok untuk memecah kemungkinan terjadinya kerumunan saat pelaksanaan.

Dalam konteks respon terhadap kebijakan terkait Covid-19 ini, muncul fenomena yang cukup menarik, bahwa kelompok Islam Jawa, yang sejatinya banyak digambarkan sebagai kelompok yang tidak begitu aktif dalam pelaksanaan kegiatan keagamaan, khususnya ibadah harian dalam Islam atau ibadah mahdlah, malah justru terlihat lebih memiliki ghirah (semangat) untuk menuntut dilaksanakan berbagai bentuk ibadah kolektif dibandingkan dengan kelompok yang sebelumnya dinilai lebih dekat dengan istilah santri yang identik dengan ketaatan yang tinggi dalam pelaksanaan ibadah mahdlah secara berjamaah. Gambaran lebih jauh terkait dengan fenomena ini akan lebih jelas terlihat ketika kita diskusikan bagaimana implementasi regulasi terkait protokol kesehatan di Dusun Kembang.

2. Implementasi Protokol Kesehatan dalam Kegiatan Keagamaan

Pandemi Covid-19 telah mengubah berbagai aspek kehidupan warga Dusun Kembang, tidak terkecuali dengan kehidupan keberagaman mereka. Masjid dan Mushola al-Amin juga terlihat menyediakan alat cuci tangan berupa kran yang dilengkapi dengan sabun cair di depan pintu masuk kedua tempat ibadah tersebut. Selain itu, bagian sisi dalam, baik masjid dan mushola sama-sama menyisakan tumpukan karpet di pojok ruangan yang sebelum masa pandemi selalu terhampar untuk mengatur shaf jamaah. Hanya saja, keramik di masjid tertempel rapi stiker berwarna kuning dengan tulisan huruf shod besar dan dibawahnya tertulis “silahkan berdiri disini” tiap jarak 1.5 meter. Sementara di mushola, hamparan karpet digantikan dengan tikar plastik panjang yang sebelumnya hanya digunakan apabila ada pengajian rutin. Secara tidak langsung, perbedaan ini mengindikasikan bagaimana jamaah masjid dengan ketat menerapkan protokol kesehatan terkait dengan anjuran untuk menjaga jarak, sementara bagi jamaah mushola, mereka menyisakan ruang untuk masing-masing jamaah seberapa jauh mereka perlu untuk menjaga jarak.

Memang, kedua tempat ibadah ini pada masa-masa awal pandemi, sudah meliburkan berbagai kegiatan rutin keagamaan yang ada, mulai dari TPA, pengajian ibu-ibu, pengajian bapak-bapak, dan juga Sholat Jumat. Hanya shalat maktubah (shalat lima waktu) saja yang dilaksanakan dengan tiga atau empat orang jamaah saja. Memasuki bulan suci Ramadhan, beberapa warga Dusun Kembang sudah mulai ada yang menyuarakan untuk mengadakan shalat tarawih. Hal ini kemudian direspon oleh Takmir masjid dan mushola dengan mengadakan rapat persiapan Ramadhan. Dalam rapat diputuskan segala bentuk kegiatan keagamaan yang biasa dilakukan oleh warga Dusun Kembang, seperti: buka puasa bersama, pengajian anak-anak, pengajian remaja, pengajian ibu-ibu, pengajian bapak-bapak, dan pengajian umum, diputuskan untuk ditiadakan. Akan tetapi untuk shalat tarawih, muncul perbedaan pendapat, jamaah masjid berpandangan untuk tidak dilaksanakan, sementara sebagian jamaah mushola menghendaki tetap dilaksanakan meskipun dengan mematuhi protokol kesehatan dan tanpa disiarkan melalui pengeras suara. Parlan, salah satu takmir yang biasa berjamaah di mushola berargumen:

“Kasihlah ibu-ibu dan bapak-bapak yang sangat menginginkan untuk dilaksanakannya shalat tarawih, dan kita juga tidak ada yang tahu, tahun depan masih bisa berjumpa dengan bulan suci Ramadhan atau tidak. Selain itu, toh di wilayah kita termasuk wilayah zona hijau, jadi lebih bagus kalo tetap diadakan shalat tarawih, meskipun jamaahnya bisa dibatasi hanya mereka yang biasa jamaah di mushola saja” (Observasi Rapat Panitia Ramadhan, 11 April 2020).

Dengan memperhatikan berbagai pendapat yang muncul dalam rapat, akhirnya ketua takmir mengambil kesimpulan untuk menyerahkan kepada jamaah masing-masing untuk melaksanakan shalat tarawih atau tidak, akan tetapi takmir tidak akan membuatkan jadwal untuk imam dan pengisi kultum sebagaimana biasa. Akhirnya, pelaksanaan shalat tarawih hanya dilaksanakan di mushola saja, dengan jumlah jamaah yang memang jauh berkurang dibandingkan dengan shalat tarawih pada tahun-tahun sebelumnya.

Selain perbedaan antara jamaah masjid dan mushola dalam menyikapi berbagai kegiatan keagamaan yang bersifat umum dan berjamaah, penerapan protokol kesehatan dalam konteks kehidupan

keseharian di mushola sendiri juga beragam. Ada jamaah yang memang masih konsisten dengan penggunaan masker, misalnya, namun yang bertahan seperti itu hanya dua atau tiga jamaah saja. Salah seorang jamaah, Pak Paidi, sempat menuturkan sebagai berikut:

“lha pripun nggih, kulo niku pendamelane nggih naming ten sabin, mboten pernah ngagem masker, rasane malah sesak yen ngagem masker. Inshaallah mboten nopo-nopo, wong nggih sik jamaah ten ngriki nggih naming tonggo kiwo-tengen mawon kok...”

[Bagaimana ya, pekerjaan saya tiap hari ke sawah, tidak pernah memakai masker, rasanya malah susah bernapas kalo memakai masker, insyaallah tidak apa-apa, apalagi yang sholat jamaah di sini kan hanya tetangga kiri dan kanan saja] (Wawancara dengan Paidi, 28 Juli 2020).

Model pemikiran sebagaimana yang disampaikan Pak Paidi diatas sepertinya memang menjadi alasan sebagian besar jamaah mushola. Nampak jelas, bahwa pernyataan semacam ini, selain didasarkan pada situasi yang dirasa aman, juga memiliki makna kepasrahan yang sangat kental terhadap takdir yang Maha Kuasa atau dalam konteks Budaya Jawa dikenal dengan istilah *“narimo ing pandum”*.

Begitu juga dengan sarana cuci tangan yang disediakan di depan mushola juga hanya ramai digunakan dua atau tiga minggu sejak jamaah di mushola diaktifkan kembali pasca Idul Fitri kemarin. Malahan, sarana cuci tangan lebih banyak digunakan ketika jamaah selesai mengadakan tahlilan atau pengajian yang menghidangkan makan untuk jamaah. Memang untuk konteks mushola atau tempat ibadah yang lain, mungkin bisa dipahami mengapa sarana cuci tangan yang disediakan tidak begitu banyak digunakan jamaah. Beda dengan mall atau toko modern yang biasanya tempat cuci tangan selalu terlihat ramai dan terkadang memunculkan antrian yang cukup panjang. Ibu Karno, selaku jamaah aktif di mushola menuturkan analisis yang menarik terkait kurang optimalnya sarana cuci tangan yang sudah disediakan di depan mushola:

“Begini mas, rata-rata ibu-ibu yang menuju ke mushola untuk berjamaah kan sudah mengenakan mukena dari rumah, hanya satu atau dua saja ibu-ibu yang memang ninggal mukena di mushola. Jadi, sudah barang tentu sebelum ke mushola mereka sudah cuci tangan dan berwudhu dari rumah, sementara yang belum, biasanya datang juga

langsung masuk ke tempat wudhu, jadi ya lebih baik tempat wudhu yang di dalam mushola juga ditambahkan sabun cuci tangannya” (Wawancara dengan Bu Karno, 23 Juli 2020).

Dari penuturan Bu Karno diatas, tentu kita tidak bisa menilai begitu saja bahwa kurang optimalnya pemanfaatan sarana cuci tangan di mushola sebagai indikator tidak diterapkannya protokol kesehatan oleh warga Muslim Jawa di Dusun Kembang.

Selain penggunaan masker dan cuci tangan, sepertinya anjuran untuk jaga jarak menjadi bagian dari implementasi protokol kesehatan yang dirasa paling berat oleh Muslim Jawa di Dusun Kembang. Hal ini tentu saja berkaitan dengan tradisi dan kebiasaan Muslim Jawa dalam menjalankan keyakinan keagamaan mereka. Aturan shaf minimal satu atau dua meter antar jamaah, misalnya, selain terkendala ruang mushola yang relatif lebih sempit dibandingkan masjid, sebagian jamaah mushola juga masih merasa aneh apabila harus berjarak sejauh itu dengan jamaah disampingnya. Karenanya, tidak sedikit kemudian diantara mereka memaknai aturan tersebut hanya sebatas “yang penting sudah berjarak”. Memang, shaf jamaah tidak lagi serapat dulu sebelum pandemi Covid-19 terjadi, akan tetapi dari perspektif aturan ya memang masih belum memenuhi. Disinilah sebenarnya kita bisa memahami bagaimana segala hal yang baru akan direspon secara “kreatif” dengan menghindari potensi benturan sosial yang lebih besar, sesuai dengan prinsip hidup orang Jawa yang menekankan pada keteraturan antara *jagad gedhe* dan *jagad cilik* atau makro dan mikro kosmos (Endraswara, 2010; Suseno, 2001; Sutono, 2015). Selain itu, tradisi salaman setelah selesai jamaah shalat nampaknya juga tidak gampang untuk diubah. Tidak seperti jamaah masjid, yang sebagian besar memang tidak mentradisikan salaman setelah jamaah, bahkan ada yang menghukumi “bid’ah”, jamaah mushola sudah terbiasa saling berjabat tangan setelah shalat berjamaah. Tradisi ini tentu kemudian sangat sulit untuk ditinggalkan begitu saja. Anjuran untuk mengganti jabat tangan dengan gerakan lain, sebagaimana yang banyak dicontohkan di berbagai kampanye tentang protokol kesehatan di televisi, terasa tidak mudah dan hanya bertahan beberapa hari saja. Mbah Ramelan punya penuturan yang menarik terkait dengan hal ini:

Kulo niki nggih naming nderek nopo dawuhipun kyai-kyai riyin, salaman niku sae, triose saget ngrontokkaken dusone wong sing podo salaman. Ning kulo nggih mboten salaman menawi

ten njawi (mushola), nopo malih kalian tiyang ingkang dereng kulo kenal.

[Saya hanya mengikuti apa yang dikatakan oleh kyai-kyai saya dulu, bahwa salaman itu baik, bisa menghapus dosa antar mereka yang salaman. Tapi saya sendiri kalo di luar (bukan di mushola) ya tidak salaman juga, apalagi dengan orang yang tidak saya kenal] (Wawancara dengan Mbah Ramelan, 25 Juli 2020).

Ritual keagamaan lain, yang sangat kental dalam kehidupan Muslim Jawa di Dusun Kembang, seperti tahlilan dan kenduren yang dilaksanakan di rumah-rumah warga memang secara kuantitas berkurang, akan tetapi tetap dilaksanakan dengan memangkas jumlah undangan disesuaikan dengan situasi rumah warga yang menggelar acara. Kebanyakan hanya melibatkan antara 10 sampai 15 orang undangan yang termasuk anggota inti dari Kelompok Yasinan Dusun Kembang yang memiliki pertemuan rutin tiap Malam Jum'at di Mushola, kecuali jika ada undangan untuk menghadiri hajatan warga. Pelaksanaan tahlil, yang biasanya cukup panjang, juga dipangkas dan disesuaikan dengan situasi. Kalau sebelum masa pandemi, pembacaan tahlil bisa dilakukan hampir satu jam, saat ini rata-rata tinggal 20 sampai 30 menit saja. Selain itu, karena pelaksanaannya ada di rumah warga, maka biasanya protokol kesehatan menjadi salah satu perhatian dari Tim Satgas, khususnya penggunaan masker selama hajatan dilangsungkan.

Penutup: Memahami Cara Berdamai Muslim Jawa dengan Covid-19

Dari uraian tentang bagaimana Muslim Jawa di Dusun Kembang mengekspresikan kebutuhan keagamaan mereka di tengah pandemi Covid 19, tentu saja diperlukan kearifan untuk merespon beragam ekspresi tersebut, meski secara kasat mata bisa disimpulkan protokol kesehatan tidak seratus persen diimplementasikan dalam kegiatan keagamaan mereka. Bagian akhir ini dimaksudkan untuk memberikan sebuah refleksi terkait mengapa Muslim Jawa di Dusun Kembang memiliki beragam respon dengan harapan tidak memunculkan stigma negatif terhadap mereka karena “kreatifitas” mereka dalam merespon kebijakan terkait pandemi Covid-19.

Setidaknya ada beberapa aspek yang bisa digali lebih jauh sebagai bagian

dari upaya untuk memahami sikap keberagaman Muslim Jawa. *Pertama*, bahwa sikap “berbeda” yang ditunjukkan oleh Muslim Jawa di Dusun kembang harus didudukkan dalam konteks yang tepat sesuai dengan nalar dan cara berpikir mereka yang bisa jadi memang memiliki perbedaan dengan nalar dan cara berpikir orang kota yang diklaim akademik dan cenderung bersifat individual. Kalau meminjam kerangka konseptual Auguste Comte terkait tiga tahapan masyarakat, tentunya bisa kita andaikan sebagai model komparasi antara masyarakat *religious* dengan masyarakat positif, yang tentu antara keduanya memiliki perbedaan dalam melihat problem kehidupan dan cara yang ditempuh untuk mengatasinya (Calhoun, 2007; Ritzer, 2010). Disinilah kita sebenarnya bisa melihat bagaimana Muslim Jawa memberikan kritik terhadap kebijakan terkait pandemi Covid 19 yang cenderung hanya mewakili kelompok akademik saja, tanpa mau melihat dan mempertimbangkan aspek keterwakilan dari kelompok yang diklaim masih berada dalam tahap *religious* atau keagamaan. Ada banyak nilai dan prinsip hidup masyarakat yang seharusnya perlu untuk dibangun kembali karena klaim negatif yang seringkali dilekatkan pada nilai-nilai tersebut. Sikap *narimo ing pandum*, yang diyakini berakar pada konsep “tawakal”, misalnya, bisa dibaca ulang sebagai suatu kelebihan yang dimiliki oleh masyarakat kita yang bisa digunakan untuk menghadapi pandemi Covid-19 yang berkepanjangan. Setidaknya, dengan sikap “*narimo ing pandum*” masyarakat sudah terlatih tidak akan mudah menyalahkan orang lain. Kita bisa membayangkan kalau masyarakat tidak memiliki sikap ini, maka semua malapetaka yang terjadi sangat berpotensi untuk dibebankan sepenuhnya kepada negara, sebagaimana yang terjadi di negara-negara maju (Barat). Betapa *chaos*-nya situasi bila seluruh warga negara Indonesia sepenuhnya menuntut negara untuk bertanggungjawab memberikan jaminan sosial secara utuh kepada warga negaranya. Oleh karena itu, sebagai wujud apresiasi, seharusnya “kreativitas” kalangan Muslim Jawa seharusnya didudukkan dalam porsi yang benar, terlebih memang situasi masyarakat kota dengan pedesaan relatif berbeda terkait pandemi ini. Sayangnya, masih ada juga kalangan akademisi yang karena ego keilmiahannya memberikan stigma negatif terhadap sikap-sikap yang ditunjukkan oleh masyarakat di pedesaan.

Kedua, pertimbangan zonasi yang telah disusun oleh tim Satgas (merah, oranye, kuning, dan hijau) seharusnya juga memiliki implikasi terhadap aktivitas mana yang boleh atau tidak boleh dilakukan oleh warga masyarakat. Sebenarnya, pedoman terkait dengan hal ini sudah ada, meskipun untuk konteks keagamaan dan tradisi-tradisi yang ada di masyarakat perlu untuk dibuat lebih detail lagi. Sayangnya, yang gencar dikampanyekan melalui

berbagai media hanyalah kebijakan-kebijakan terkait dengan situasi dan kondisi di kota-kota besar saja, sehingga tidak sedikit kemudian yang main pukul rata bahwa kebijakan tersebut untuk semuanya. Sebagai contoh, kebijakan terkait pelaksanaan sholat Jumat, biasa dipahami berlaku untuk semua. Sehingga masjid-masjid di wilayah pedesaanpun, yang masuk kategori zona hijau, ikut-ikutan meniadakan pelaksanaan sholat Jumat. Kondisi ini tentu saja berpotensi untuk memunculkan perdebatan terkait boleh atau tidaknya meninggalkan Sholat Jumat karena penyebabnya (Covid-19) sejatinya tidak ada di sekitar masyarakat pedesaan tersebut. Dari sinilah muncul “kreativitas” warga desa untuk tetap bisa menjaga keseimbangan kosmos sebagaimana yang mereka yakini dan bukan sebagai bagian dari upaya untuk tidak mentaati kebijakan pemerintah, sebagaimana yang banyak disuarakan oleh sebagian kecil kelompok Islam yang memang aktif berpolitik dan selalu berseberangan dengan pemerintah.

Ketiga, perlu adanya kesadaran dari semua pihak bahwa masyarakat di wilayah pedesaanlah yang seharusnya dipandang sebagai kelompok yang mengalami dampak paling berat, mengingat mereka harus berhadapan dengan nilai-nilai baru yang bagi mereka berbeda, dan untuk beberapa hal bahkan bertolak belakang dengan nilai-nilai yang selama ini diyakini dan diamalkan dalam wujud ritual dan tradisi sosial keagamaan di masyarakat. Jadi tidak sebatas dampak ekonomi saja, tapi hampir semua aspek kehidupan bahkan sampai harus mengubah sistem kepercayaan, yang selama ini diyakini menjadi unsur kebudayaan yang paling sulit untuk diubah. Oleh karena itulah, akan lebih bijaksana kalau kemudian melihat proses kreativitas yang muncul sebagai bentuk proses adaptasi yang memang harus dilakukan oleh warga pedesaan untuk bisa tetap memelihara dan melestarikan tradisi-tradisi mereka.

Daftar Pustaka

Buku:

- Ali, M. (2008). *Mantan kiai NU meluruskan ritual-ritual kiai ahli bid'ah yang dianggap sunnah : nisfu sya'ban, Rebo wekasan, tingkepan & bid'ah-bid'ah dari Muharram-Dzulhijjah*. Surabaya: Laa Tasyuk! Press.
- Amin, D. (2000). *Islam dan Kebudayaan Jawa*. Yogyakarta: Gama Media.
- Aulia. (2009). *Ritual puasa orang Jawa* (Cet. 1. ed.). Yogyakarta: Narasi.
- Calhoun, C. J. (2007). *Classical sociological theory* (2nd ed.). Malden, Mass.: Blackwell Pub.
- Darmalaksana, W. (2020). New Normal Perspektif Sunnah Nabi Saw. *Fakultas Ushuluddin UIN Sunan Gunung*
- Endraswara, S. (2010). *Etika hidup orang Jawa : pedoman beretiket dalam menjalani kehidupan sehari-hari* (Cet. 1. ed.). Yogyakarta: Narasi.
- Geertz, C. (1960b). *The religion of Java*. Glencoe, Ill: Free Press.
- Hasan, N. (2008). The Salafi Madrasas in Indonesia. In F. A. Noor, Y. Sikand & M. v. Bruinessen (Eds.), *The Madrasa in Asia: Political Activism and Transnational Linkages*. Amsterdam: ISIM / Amsterdam University Press.
- Jaiz, H. A. (2008). *Kyai kok bergelimang kemusyrikan : kumpulan masalah Ahmadiyah, Syi'ah, pluralisme agama, syirik, bid'ah, Kristenisasi, dan kemunkaran* (Cet. 1. ed.). Jakarta: Pustaka Nahi Munkar.
- Jamhari, & Jahroni, J. (2004). *Gerakan Salafi Radikal di Indonesia [Radical Salafi Movement in Indonesia]*. Jakarta: Rajawali Press.
- Mulkhan, A. M. (1998). *Perubahan pola pemurnian Islam di pedesaan : studi kasus Muhammadiyah Kecamatan Wuluhan, Jember, Jawa Timur : laporan penelitian individual*. Yogyakarta: Proyek Perguruan Tinggi Agama, IAIN Sunan Kalijaga.
- Ritzer, G. (2010). *Classical sociological theory* (6th ed.). Boston: McGraw-Hill.

- Sholikhin, M. (2010). *Ritual dan tradisi Islam Jawa : ritual-ritual dan tradisi-tradisi tentang kehamilan, kelahiran, pernikahan, kematian dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Islam Jawa* (Cet. 1. ed.). Yogyakarta dan Jakarta: Narasi dan Distributor tunggal, Suka Buku.
- Subandrijo, B. (2000). *Keselamatan bagi orang Jawa* (Cet. 1. ed.). Jakarta: BPK Gunung Mulia.
- Suseno, F. M. (2001). *Etika Jawa: Sebuah analisa falsafi tentang kebijaksanaan hidup Jawa*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Woodward, M. R. (2011). *Java, Indonesia and Islam* (1st ed.). Dordrecht: Springer.
- Yana, M. H. (2010). *Falsafah dan pandangan hidup orang Jawa : dilengkapi dengan tata krama, tradisi, kebiasaan dengan butir-butir budaya Jawa, pantangan, karakter dan ritual masyarakat Jawa* (Cet. 1. ed.). Yogyakarta: Absolut.
- Wahyana Giri, M. C. (2010). *Sajen dan ritual orang Jawa* (Cet. 1. ed.). Yogyakarta dan Jakarta: Narasi dan Distributor tunggal, Suka Buku.

E-book:

- Woodward, M. R. (2004). *Islam Jawa; Kesalehan Normatif Versus Kebatinan*: books.google.com.
- Sutono, A. (2015). *Etika Jawa Sebagai “Global Ethic” Baru*.
- Pradana, A. A., & Casman, C. (2020). *Pengaruh Kebijakan Social Distancing pada Wabah Covid-19 terhadap Kelompok Rentan di Indonesia. ... Kebijakan Kesehatan Indonesia: JKKI*.
- Geertz, C. (1960a). *The Javanese Kijaji: The Changing Role of a Cultural Broker. Comparative Studies in Society and History, 2(2), 228-249*.

Jurnal:

- Adawiyah, D. P. R., & Solichati, I. (2020). *Kebijakan PSBB Pemerintah Kota Surabaya dalam Menyegah Penyebaran Virus Covid-19. Sahafa Journal of Islamic ...*
- Agustino, L. (2020). *Analisis Kebijakan Penanganan Wabah Covid-19: Pengalaman Indonesia. Jurnal Borneo Administrator*.
- Dahlan, M. (2020). *Respon Jamaah Tabligh Terhadap Fatwa Majelis Ulama Indonesia Tentang Covid-19. Qiyas: Jurnal Hukum Islam Dan Peradilan*.
- Karim, A. (2017). *Makna ritual kematian dalam tradisi Islam Jawa. Sabda: Jurnal Kajian Kebudayaan*.
- Mustautina, I. (2020). *Praktik Dakwah Jamaah Tabligh Dan Pengaruhnya*

Terhadap Penyebaran Covid19. *Jurnal Living Hadis*.

Taufik, T., & Warsono, H. (2020). Birokrasi Baru Untuk New Normal: Tinjauan Model Perubahan Birokrasi Dalam Pelayanan Publik Di Era Covid-19. *Dialogue: Jurnal Ilmu Administrasi*

Yunus, N. R., & Rezki, A. (2020). Kebijakan Pemberlakuan Lock Down Sebagai Antisipasi Penyebaran Corona Virus Covid-19. *SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i*.

Artikel Surat Kabar:

Zulkarnain, F, Nurdin, A. A., & Gojali, N. (2020). Kebijakan fatwa MUI meliburkan shalat jumat pada masa pandemi Covid 19. *Kebijakan fatwa MUI*

***Mbuh Piye Carane: Inovasi Ugahari Oleh
Desa dalam Merespon Pandemi Covid-19***

Ambar Sari Dewi

Prodi Sosiologi,

Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora,

UIN Sunan Kalijaga

Email: ambarsaridewi@gmail.com

Pendahuluan

Banyaknya jumlah desa di Indonesia merupakan salah satu tantangan dalam upaya pembangunan desa. Data BPS tahun 2018 mencatat jumlah desa di Indonesia mencapai 83.981 yang terdiri dari 75.436 desa, 8.444 kelurahan, dan 51UPT/SPT (Unit Pemukiman Transmigrasi/Satuan Pemukiman Transmigrasi) (Atmoko, 2018). Pengembangan dan pengelolaan puluhan ribu desa tersebut tentu saja memerlukan program pemerintah yang terarah. Oleh karena itu, untuk mencapai pembangunan desa yang maksimal, pada tahun 2017 Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendesa-PDPT) mencanangkan empat program prioritas untuk desa, yaitu mengembangkan produk unggulan kawasan pedesaan, membangun embung air desa, mengembangkan BUMDes, dan membangun sarana olahraga desa. Selain itu, pemerintah lewat Kemendesa-PDPT menggulirkan Program Inovasi Desa (PID) dibawah naungan Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (PPMD) (n/a, 2019) untuk mengoptimalkan pemakaian dana desa. Situs inovasidesa.kemendesa.go.id (<https://inovasidesa.kemendesa.go.id/>) mencatat ribuan praktik inovasi desa dan membaginya dalam 10 kategori, yaitu wirausaha desa, desa wisata, produk unggulan desa, pemerintahan yang baik, teknologi tepat guna, layanan sosial dasar, infrastruktur desa, kerjasama dan kemitraan, dan praktik inovasi untuk keluar dari status daerah tertinggal.

Keterbatasan sumber daya dan minimnya daya beli tidak menghambat desa dan warga desa untuk terus melakukan inovasi. Sebagai contoh, bank sampah yang dikelola oleh Desa Ngabab Malang Jawa Timur dan beberapa desa di Bantul Yogyakarta mengubah sampah organik menjadi pupuk. Selain itu, sampah yang dapat didaur ulang, diolah, dan dikreasikan menjadi kerajinan tangan. Hasil pengolahan sampah menjadi pupuk dan kerajinan

tangan tersebut kemudian dijual dan keuntungannya dikembalikan kepada warga desa tersebut.

Persoalan inovasi dan desa tentu saja bukan sekedar memanfaatkan dana desa, akan tetapi lebih dari itu. Inovasi secara umum dapat dimaknai sebagai pemanfaatan ide baru oleh sebuah organisasi atau komunitas, entah itu dengan tujuan komersialisasi atau pemberdayaan masyarakat. Ide baru yang dimanfaatkan oleh sebuah organisasi atau komunitas bisa jadi adalah ide lama bagi organisasi atau masyarakat lain. Dalam konteks desa, desa sering dianggap tidak mampu melakukan inovasi atau inovasi tidak mungkin terjadi di desa karena sumber daya di desa terbatas dan daya beli masyarakatnya rendah. Kenyataannya, desa justru menjadi salah satu penggerak utama inovasi. Catatan inovasi desa di situs inovasidesa.kemendesa.go.id adalah bukti bahwa desa mampu melakukan inovasi.

Keberhasilan desa mengelola dana desa adalah salah satu bukti bagaimana desa berinovasi. Ketika Corona Virus 2019 (Covid-19) menyebar di Indonesia, desa dituntut untuk segera merespon pandemik ini, tidak terkecuali desa-desa yang telah berhasil melakukan inovasi desa sebelum pandemik. Desa-desa tersebut dituntut untuk melakukan inovasi lain meskipun sumber daya makin terbatas.

Keterbatasan sumber daya dan daya beli masyarakat di negara berkembang, khususnya di wilayah pedesaan menjadi alasan utama terciptanya inovasi frugal atau inovasi ugahari. Inovasi ugahari dimaknai sebagai model inovasi yang *“doing more with less cost for more people”*. Pandemi Covid-19 yang mengharuskan warga desa melakukan isolasi atau *lockdown* dan menjaga jarak untuk mencegah penyebaran lebih besar juga menjadi alasan bagi desa dan warganya untuk melakukan inovasi ugahari. Namun demikian, bagaimana praktik-praktik inovasi ugahari tersebut dilakukan oleh desa?

Artikel ini akan menjelaskan dan mendiskusikan apa dan bagaimana praktik-praktik inovasi ugahari dilakukan oleh desa dan warganya dalam merespon Covid-19. Data yang digunakan dalam artikel ini diambil dan dikumpulkan dari berita di media massa, baik *online* maupun *offline*, dan media sosial selama bulan Maret-Juli 2020. Berita-berita tersebut kemudian dianalisis dengan menggunakan konsep inovasi ugahari yang ditawarkan oleh Radjou dan Prabhu (2015). Praktik-praktik inovasi ugahari yang dilakukan oleh desa kemudian dikelompokkan berdasarkan kriteria inovasi ugahari menurut Bhatti *et al.* (2018) dan Hossain (2018).

Desa, Inovasi, dan Inovasi Ugahari: Sebuah Tinjauan Umum

Desa adalah wilayah terkecil dalam struktur ketatanegaraan Indonesia. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia No 6 Tahun 2014 pasal 1 ayat 1 tentang desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan demikian, desa memiliki otonomi untuk mengelola sumber daya alam dan manusianya untuk kepentingan masyarakat desa tersebut.

Diskusi mengenai inovasi ugahari dan bagaimana desa mempraktikkannya dalam merespon pandemik Covid-19 dapat diletakkan dalam kajian inovasi secara luas. Bagian ini akan mendiskusikan posisi kajian inovasi ugahari dalam konteks kajian inovasi tersebut.

Pengertian Inovasi

Kata 'inovasi' telah lama menjadi salah satu kata yang paling banyak digunakan untuk menjelaskan perubahan yang terjadi akibat penemuan teknologi. Oleh karena itu, inovasi telah didefinisikan oleh banyak disiplin ilmu, misalnya ekonomi, sosiologi, dan kebijakan. Dari perspektif ekonomi, Schumpeter (1934) mendefinisikan inovasi sebagai kombinasi baru dan mengategorikan lima jenis inovasi, yaitu "pengenalan barang, metode produksi, pembukaan pasar, penaklukan sumber, pasokan bahan baku, dan pelaksanaan sistem organisasi baru" (hlm. 68). Baregheh *et al.* (2009) menyatakan bahwa inovasi terjadi ketika perusahaan mengubah ide menjadi produk, layanan, atau proses baru untuk berhasil bersaing dan memposisikan diri di pasar. Dari perspektif kebijakan, pedoman Organisasi untuk Kerjasama Ekonomi dan Pengembangan (OECD) untuk mengumpulkan dan menafsirkan data inovasi teknologi (OECD/Eurostat, 2005), mendefinisikan inovasi sebagai "implementasi produk baru atau yang secara signifikan diperbarui (barang atau jasa), atau proses, metode pemasaran baru, atau metode organisasi baru dalam praktik bisnis, organisasi di tempat kerja, atau hubungan eksternal" (OECD/Eurostat, 2005, hal 46). Definisi ini menekankan bahwa inovasi dianggap berhasil ketika produk, proses, metode pemasaran, atau metode organisasi baru diterapkan atau mulai digunakan dalam operasi perusahaan. Pemaparan mengenai definisi inovasi tersebut mencerminkan betapa inovasi

memiliki banyak dimensi. Namun demikian, secara umum berbagai definisi tersebut menegaskan bahwa inovasi adalah komersialisasi ide-ide baru yang berhasil melibatkan proses identifikasi, pengembangan, dan eksploitasi ide-ide baru tersebut untuk menghasilkan nilai tambah.

Sementara itu, inovasi memiliki beragam jenis dan beberapa ilmuwan telah membuat tipologi inovasi (Garcia & Calantone, 2002). Sebagai contoh, Knight (1967) mengelompokkan inovasi menjadi empat, yaitu inovasi produk-layanan (yaitu penawaran produk atau layanan baru), inovasi proses-produksi (yaitu perubahan operasi dan produksi organisasi), inovasi struktur organisasi (yaitu perubahan hubungan otoritas, sistem komunikasi atau sistem penghargaan dalam organisasi yang berinovasi), dan inovasi sumber daya manusia (yaitu perubahan dalam tingkat kepegawaian, perubahan tugas kerja/peran, dan budaya atau perilaku organisasi). Dalam ulasan literturnya, Rowley *et al.* (2011) mengklasifikasikan inovasi berdasarkan model *binary focus (pairwise)*, yaitu proses-produk, administrasi-teknis, dan inovasi radikal-incremental. Mereka membedakan inovasi produk sebagai “pengembangan produk dan layanan baru untuk pasar”, sementara inovasi proses adalah “cara melakukan operasi produksi atau layanan” (hal. 77). Inovasi teknis mengacu pada setiap inovasi yang terkait dengan proses produksi dan rantai pasokannya; sementara inovasi administratif terkait dengan perubahan struktur sosial organisasi. Selain itu, berdasarkan tingkat, amplitudo, dan luasnya, inovasi dapat dikelompokkan menjadi inovasi radikal dan inovasi incremental/sebagian (Dodgson, 2017; Gronum *et al.*, 2016; Rowley *et al.*, 2011). Inovasi radikal secara fundamental mengubah struktur pasar dan industri, sementara inovasi incremental adalah “melakukan apa yang sudah dilakukan sedikit lebih baik” (Dodgson, 2017, p 88).

Berdasarkan tinjauan mengenai jenis inovasi di atas, kami membedakan inovasi menjadi 3 yaitu inovasi produk, layanan, dan proses. Sejalan dengan apa dinyatakan oleh Dodgson (2017), Gronum *et al.* (2016), dan Rowley *et al.* (2011); kami setuju bahwa ketiga jenis inovasi tersebut dapat terjadi secara radikal atau incremental. Inovasi radikal biasanya menggunakan teknologi yang benar-benar baru atau belum pernah ada sebelumnya. Penggunaan teknologi baru ini menawarkan keuntungan yang lebih besar kepada pelanggan atau pengguna dibandingkan produk, layanan, atau proses yang telah ada (Sorescu *et al.*, 2003)2003. Sebaliknya, dalam inovasi incremental, perubahan yang terjadi relatif kecil/sebagian, sehingga pelanggan mungkin hanya mendapatkan sedikit manfaat dari inovasi ini. Prabhu (2017) meyakini bahwa inovasi incremental yang terjadi secara terus menerus dapat mengurangi

penggunaan sumber daya secara kumulatif. Akan tetapi, mengingat daya perubahan inovasi radikal, mungkin hanya inovasi inilah yang benar-benar akan menyelesaikan akar masalah yang dihadapi planet ini selama beberapa dekade mendatang.

Pengertian dan jenis inovasi yang telah dijelaskan di atas menunjukkan bahwa narasi inovasi lebih banyak didorong oleh kepentingan bisnis, khususnya perusahaan besar. Lebih lanjut, konsep tentang inovasi yang telah dijelaskan di atas umumnya dikembangkan di negara maju yang memiliki sumber daya yang melimpah dan penduduknya memiliki daya beli tinggi. Pada praktiknya, konsep inovasi tersebut sering kali tidak relevan dengan kondisi dan konteks negara berkembang yang umumnya memiliki keterbatasan sumber daya dan kemampuan daya beli penduduknya sangat rendah. Pada titik inilah beberapa ilmuwan inovasi kemudian menawarkan konsep inovasi frugal atau inovasi ugahari.

Inovasi Ugahari

Inovasi Ugahari merupakan jenis inovasi spesifik yang merespons keterbatasan sumber daya dan upaya untuk menghasilkan hasil yang memenuhi kebutuhan spesifik suatu kelompok tertentu (Bhatti, 2012). Oleh karena itu, inovasi ugahari sesuai dengan kebutuhan sebagian besar populasi di negara-negara berkembang yang umumnya memiliki kendala sumber daya sosial yang signifikan, sasaran pelanggan sering memiliki sarana yang terbatas, dan infrastruktur sosial tidak lengkap atau berfungsi dengan buruk.

Penelitian mengenai inovasi dan inovasi ugahari atau *frugal innovation* telah banyak dilakukan, khususnya di negara berkembang. Namun demikian, asal muasal konsep inovasi ugahari tidak diketahui secara jelas. Adalah Carlos Ghosn, Direktur dan CEO *the Renault-Nissan Alliance* yang memperkenalkan konsep *frugal engineering* pada tahun 2006, untuk menjelaskan tentang upaya pengurangan kompleksitas proses produksi dan biaya sebuah produk yang dihasilkan. Beberapa tahun kemudian, istilah “inovasi ugahari” pertama kali digunakan oleh Wooldridge (2010) di majalah *The Economist*. Dalam sebuah tinjauan pustaka komprehensif yang dilakukan oleh Hossain (2018) menunjukkan bahwa penelitian pertama mengenai inovasi ugahari yang muncul dalam *database Web of Science* dilakukan oleh Zeschky *et al.* (2011). Sejak itu, istilah ini dengan cepat mendapatkan popularitas di dunia akademis dan industri karena signifikansinya bagi populasi besar di negara berkembang.

Inovasi ugahari dapat didefinisikan sebagai upaya untuk memaksimalkan proporsi nilai terhadap sumber daya (Radjou & Prabhu, 2015). Dalam hal ini, nilai dapat ditujukan untuk pelanggan, pemegang saham atau masyarakat

secara umum, sedangkan sumber daya dapat berupa energi, modal, atau waktu. Dengan demikian, inovasi ugahari adalah kemampuan untuk “melakukan lebih baik dengan sumber daya yang lebih sedikit untuk lebih banyak orang”, yaitu untuk menciptakan nilai lebih (*added value*) secara signifikan sambil meminimalkan penggunaan sumber daya (Bhatti *et al.*, 2018; Bhatti & Ventresca, 2013; George *et al.*, 2012; Radjou & Prabhu, 2015). Hossain (2018) berpendapat bahwa inovasi ugahari harus “*jauh lebih murah daripada penawaran kompetitif dan cukup baik untuk memenuhi kebutuhan dasar pelanggan yang mungkin tidak (ter)layani (oleh konsep inovasi umum)*” (p. 133, kata-kata dalam kurung adalah tambahan penulis). Tabel 1 menunjukkan ragam definisi inovasi ugahari yang telah dikumpulkan oleh Masin (2019).

Tabel 1. Definisi Inovasi Ugahari

Sumber	Definisi inovasi Frugal/inovasi ugahari
Agarwal, Brem, <i>et al.</i> (2012)	<i>“Frugal innovations have been proposed as potential approach for serving resource-constrained consumers in emerging and developing markets as well as in the low-growth stuck Western markets, due to their notion of affordability, good (enough) quality, and no-frills structure”.</i>
Basu <i>et al.</i> (2013)	<i>“Frugal innovation is a design innovation process in which the needs and context of citizens in the developing world are put first in order to develop appropriate, adaptable, affordable and accessible services and products for emerging markets”.</i>
Bhatti (2012)	<i>“It is not simply about reducing costs, but can also involve increasing the affordability power of the buyer through income generation, saving, [...], the outcome involves [...]. sustainability”.</i>
Radjou and Prabhu (2015)	<i>“Frugal innovation is the ability to ‘do more with less’- that is, to create significantly more business and social value while minimizing the use of diminishing resources such as energy, capital and time”.</i>

Tiwari and Herstatt (2014)	<i>Frugal innovation can be characterized as “new or significantly improved products (goods and services), processes, or marketing and organizational methods that seek to minimize the use of material and financial resources in the complete value chain with the objective of significantly reducing the cost of ownership and/or usage while fulfilling or even exceeding certain pre-defined criteria of acceptable quality standards”.</i>
Weyrauch and Herstatt (2016)	<i>“We propose that innovations are frugal if they simultaneously meet the criteria of substantial cost reduction, concentration on core functionalities and optimized performance level”.</i>
Zeschky et al. (2014)	<i>“Frugal innovations are not re-engineered solutions, but products or services developed for the very specific application in resource constraint environments”.</i>

Sumber: Masin (2019, p. 6)

Dalam bidang inovasi ugahari, beberapa terminologi sejenis digunakan secara bergantian (Bhatti, 2012; Zeschky et al., 2014), antara lain: inovasi berbasis pada sumber daya yang terbatas (*resource-constrained innovation*), inovasi berbasis kendala (*constrained-based innovation*), inovasi terbalik (*reverse innovation*) (Govindarajan & Ramamurti, 2011), *Jugaad* (Prabhu & Jain, 2015; Radjou et al., 2012), inovasi akar rumput (*grassroots innovation*), inovasi ala Gandhi (*Ghandian innovation*) (Pahalad & Mashelkar, 2010), dan inovasi inklusif (*inclusive innovation*) (George et al., 2012; Nijhof et al., 2002). Meskipun belum terlalu populer, istilah ‘ugahari’ dipakai sebagai padanan frugal di Indonesia. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBIDaring, n.d.), kata ugahari berarti ‘sederhana; sahaja; sedang; pertengahan’. Sebagai kata benda, keugaharian berarti ‘kesederhanaan; kesahajaan’.

Semua istilah yang telah dijelaskan di atas sesungguhnya merujuk pada fenomena yang sama, meskipun memusatkan perhatian pada aspek yang berbeda. Akan tetapi, dalam konteks artikel ini, kami meyakini bahwa istilah inovasi ugahari/inovasi frugal paling sesuai untuk menjelaskan bagaimana desa melakukan inovasi dalam keterbatasannya, khususnya di era pandemik Covid-19. Oleh karena itu, kami menggunakan istilah inovasi ugahari dalam artikel ini.

Sebagaimana konsep inovasi yang telah dijelaskan di bagian sebelumnya, jenis inovasi ugahari dapat berupa inovasi produk, layanan, dan/atau proses,

dan memenuhi dua kriteria untuk inovasi: kebaruan dan peningkatan. Pada prinsipnya, inovasi ugahari berupaya meminimalkan penggunaan sumber daya dan secara signifikan mengurangi biaya produksi agar terjangkau oleh populasi berpenghasilan rendah. Beberapa inovasi ugahari bahkan dapat mengungguli inovasi *high-end* jika memadukan sains dan teknologi (Bound & Thornton, 2012).

Selanjutnya, untuk dapat membedakan inovasi ugahari dengan inovasi sejenis lainnya, beberapa ilmuwan inovasi mengidentifikasi atribut dan karakteristik inovasi tersebut. Misalnya, Sjafrizal (2015) membedakan karakteristik inovasi berdasarkan sudut pandang pasar, produk, dan bisnis. Selanjutnya, Weyrauch and Herstatt (2017) mengidentifikasi 9 atribut dan karakteristik yang mereka temukan dalam literatur mengenai inovasi ugahari, yaitu:

1. Fungsional dan fokus pada hal-hal penting.
2. Biaya produksi atau harga jual yang lebih rendah.
3. Biaya kepemilikan minimal.
4. Penggunaan bahan dan sumber daya keuangan minimal.
5. Ramah pengguna dan mudah untuk menggunakan.
6. Kuat.
7. Bernilai tinggi dan berkualitas.
8. *Scalable* dan penjualan dalam jumlah besar.
9. Berkelanjutan.

Lebih lanjut, Bhatti *et al.* (2018) menyimpulkan 3 kriteria inovasi ini, yaitu *affordability* (keterjangkauan), *adaptability* (kemampuan beradaptasi), dan *accessibility* (kemudahan diakses). *Affordability* (keterjangkauan) merujuk pada pertanyaan apakah produk atau layanan yang ditawarkan lebih terjangkau daripada produk atau layanan lain. Sedangkan *adaptability* (kemampuan beradaptasi) adalah kemampuan produk atau layanan untuk beradaptasi dan menyesuaikan diri dengan kebutuhan, secara lebih baik, setara, atau cukup baik. Terakhir, *accessibility* (kemudahan diakses) berkaitan dengan akses dan keterukuran (*scalability*) produk atau layanan bagi keuntungan masyarakat luas. Kemudian, Hossain (2018) menambahkan kriteria *sustainability* (keberlanjutan) sebagai salah satu kriteria inovasi ugahari. *Sustainability* merujuk pada keadaan masyarakat dimana kondisi kehidupan dan penggunaan sumber daya dapat saling melengkapi tanpa mengorbankan stabilitas sistem alam. Dalam konteks inovasi ugahari, *sustainability* menjadi salah satu faktor penting untuk menjamin keberlanjutan inovasi tersebut. Keempat kriteria inovasi ugahari inilah yang digunakan untuk memetakan praktik-praktik inovasi ugahari oleh desa dalam merespon pandemik Covid-19.

Praktik-Praktik Inovasi Ugahari Oleh Desa dalam Merespon Pandemi Covid-19

Praktik inovasi ugahari telah dilakukan di negara berkembang seperti India dan negara maju seperti Jerman. Di Indonesia, praktik-praktik ini tersebar di banyak tempat, namun catatan mengenai praktik-praktik tersebut masih minim. Bagian ini akan menjelaskan dan mendiskusikan bagaimana praktik-praktik tersebut terjadi dengan menggunakan konsep kriteria inovasi ugahari sebagaimana telah dijelaskan di sub-bagian sebelumnya.

Inovasi Ugahari di Masa Pandemi: Cerita Dari Desa

Sebagaimana telah dijelaskan di bagian pendahuluan sub bab ini, pandemi Covid-19 telah memaksa semua pihak dan sektor melakukan tindakan-tindakan responsif untuk mencegah penyebaran virus tersebut. Di desa, situasi ini menambah beban desa dan warganya mengingat keterbatasan sumber daya di wilayah ini. Beberapa upaya dan kebijakan pemerintah untuk membantu desa merespon pandemi ini diantaranya adalah dengan membolehkan penggunaan dana desa untuk penguatan kesehatan masyarakat melalui upaya pencegahan dan penanganan Covid-19 (PermendesPDDT, 2020; Prasetya, 2020)¹. Selain itu, Kemendes PDDT juga meluncurkan dua aplikasi seluler untuk membantu pencegahan dan penanganan Covid-19 dan kesehatan masyarakat, yaitu aplikasi Desa Melawan Covid-19 dan *e-Human Development Worker* (e-HDW) (SetKabinetRI, 2020).

Kebijakan pemerintah pusat terkait penggunaan dana desa dan pengembangan aplikasi pencegahan dan penanganan Covid-19 tersebut menjadi salah satu alternatif dukungan bagi desa dalam merespon pandemi Covid-19. Namun demikian, beberapa desa melakukan inovasi untuk pemenuhan kebutuhan bahan pokok bagi warga. Misalnya, Desa Panggunharjo di Bantul, Yogyakarta mengembangkan *platform* belanja *online* “*pasardesa.id*”. Melalui *pasardesa.id*, Bumdes dan warga desa menjajakan ratusan jenis barang dan komoditas. Barang diantarkan ke rumah warga untuk mengurangi kerumunan di tempat belanja konvensional. *Pasardesa*.

¹Kemendes PDDT memprioritaskan penggunaan dana desa 2020 desa untuk dua hal, yaitu pertama untuk pembangunan infrastruktur secara swakelola dengan sistem Padat Karya Tunai Desa (PKDT) untuk memperkuat daya tahan ekonomi desa dan pendapatan masyarakat. Prioritas kedua adalah penguatan kesehatan masyarakat melalui upaya pencegahan dan penanganan Covid-19. Ketentuan penggunaan dana desa diatur melalui Permendes PDDT No 6 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Permendes, PDDT No 11 Tahun 2019 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020. Selengkapnya dapat dilihat di: <http://www.djpk.kemendek.go.id/?p=14984>.

id juga menggandeng BNI untuk menyediakan kartu debit khusus bagi keluarga penerima bantuan untuk memudahkan pencairan dana bantuan dari pemerintah (Wijana & Maulina, 2020). Mirip dengan Panggungharjo, Pasar Obah (bergerak) di Desa Krandegan, Kecamatan Bayan, Kabupaten Purworejo menyediakan sembako murah untuk semua warga. Pemdes membeli dari warung warga, kemudian dijual kembali kepada warga dengan harga yang jauh dibawah harga pasar karena sudah disubsidi. Pasar Obah juga membantu masyarakat supaya tidak usah keluar rumah untuk membeli kebutuhan mereka. Para relawan yang ditunjuk oleh Pemdes akan berkeliling mengantar kebutuhan warga ke rumah masing-masing dengan menggunakan *pick up* yang berisi berbagai barang kebutuhan warga (Hen, 2020).

Sementara itu, Desa Sukadana di Kecamatan Terara, Lombok Timur, menyiapkan lumbung pangan untuk warga. Saat musim paceklik, masyarakat tidak mampu akan mendapat pembagian beras gratis dari desa. Sementara masyarakat yang mampu membeli akan mendapatkan beras dengan harga murah (TimInovasiDesa, 2020). Sedangkan di Desa Kedunggading Kecamatan Ringinarum Kendal, para ketua RT menggerakkan warga memanfaatkan pekarangan rumah untuk ditanami berbagai jenis tanaman sayuran melalui program kampung iklim (proklam). Gerakan menanam sayuran dilakukan di tiap-tiap RT. Berbagai jenis tanaman sayuran, seperti terong, timun, cabe, tomat, brokoli, seledri, cesim, dan lainnya dalam waktu dua bulan sudah bisa dipanen (Prayitno, 2020).

Inovasi di sektor kesehatan juga dilakukan oleh desa. Komunitas Adat Nua Ja di Desa Nua Ja, Kecamatan Ende, Kabupaten Ende, Nusa Tenggara Timur (NTT) mencegah penyebaran Covid-19 dengan protokol kesehatan yang ketat. Pemeriksaan dilakukan di pintu gerbang masuk Desa Nua Ja. Sederet prosedur dilakukan kepada pengendara/penumpang/sopir di pintu gerbang ini, mulai dari pencatatan identitas, penerapan protokol kesehatan (memakai masker, cuci tangan dengan sabun dan pemeriksaaan suhu badan) hingga penyemprotan kendaraan menggunakan cairan disinfektan (Welan, 2020). Demikian halnya yang dilakukan oleh warga di Dusun Kalipakis, Desa Tirtonirmolo, Kecamatan Kasihan, Kabupaten Bantul. Mereka membuat gerbang disinfektan otomatis yang akan menyemprot setiap kendaraan yang melewati gerbang desa dengan cairan disinfektan. Cara kerja gerbang tersebut adalah mendeteksi kendaraan dengan menggunakan sensor lalu secara otomatis sebuah alat penyemprot akan mengguyur kendaraan tersebut (Mahardikengrat, 2020).

Lebih lanjut, praktik inovasi ugahari di desa dalam merespon pandemik

Covid-19 juga terlihat dalam pelayanan administratif di kantor desa. Sebagaimana telah diketahui, pelayanan dokumen biasanya mengharuskan warga datang ke kantor desa. Namun dalam situasi pandemik dimana kontak fisik harus dikurangi, pelayanan secara *online* adalah satu-satunya pilihan. Oleh karena itu, Pemerintah Desa Krandengan, Kecamatan Bayan, Purworejo, Jawa Tengah, meluncurkan pelayanan *online* untuk warga mengurus administrasi kependudukan dan dokumen lain. Selain memberikan kemudahan bagi warga, inovasi ini juga bertujuan untuk menerapkan imbauan *physical distancing*. Warga tidak perlu datang ke kantor Pemdes tapi cukup menghubungi nomor *Whatsapp* yang akan direspon oleh petugas. Setelah selesai dokumen dikirimkan ke rumah warga (Wicaksono, 2020). Serupa tapi tidak sama, warga yang tergabung ke dalam Kelompok Informasi Masyarakat Cijengkol dan Pemerintah Desa Cijengkol Kabupaten Sukabumi Jawa Barat bekerja sama dalam membuat mesin robot untuk membantu warganya dalam pelayanan administrasi desa (Kautsar, 2020).

Bagaimana dengan pengelolaan bantuan bagi warga miskin? Desa Sukowetan, Kecamatan Karangasem tidak mau sekadar mengandalkan bantuan dari pemerintah pusat. Meski nilainya tidak besar, Desa Sukowetan berusaha menyalurkan bantuan ke warganya yang kurang mampu secara mandiri, yaitu dengan memaksimalkan Unit Pengumpul Zakat (UPZ) desa dan tanggung jawab perusahaan (*Corporate Social Responsibility/CSR*) BUMDes (n/a, 2020).

Selain itu, praktik inovasi desa di sektor ekonomi dilakukan oleh Badan Usaha Milik Desa Tridadi, Kecamatan/Kabupaten Sleman. Mereka memproduksi wastafel dengan desain khusus untuk mencegah Covid-19. Jika biasanya kran digerakkan dengan tangan untuk mengalirkan air, maka BUMDes Tridadi mengubah desain kran dengan pedal yang diinjak sehingga meminimalkan sentuhan tangan yang sangat berpotensi menjadi penyebab penularan virus. Desain wastafel tersebut rupanya menarik minat berbagai pihak. Hasilnya? BUMdes yang sempat menghentikan aktivitasnya itu kembali beroperasi dengan omzet cukup besar dan mampu menyerap tenaga kerja dari warga desa (Dinnata, 2020).

Di Purbalingga, seorang warga di Desa Tunjung Muli di Purbalingga, Jawa Tengah, melatih anak-anak muda keterampilan *digital marketing* dan berbagai aktivitas jasa *marketing online* lainnya. Sebanyak 752 warga diberdayakan dan menjadi marketer. Oleh karena itu, Desa Tunjung Muli sering dijuluki “Kampung Marketer”. Di masa pandemik, jasa *marketing online* menjadi sumber pendapatan bagi sebagian besar warga desa tersebut karena permintaan dari klien meningkat pesat. Atas jasa membantu pemasaran produk warga,

para pemuda desa bisa memperoleh penghasilan antara Rp 1,4 juta hingga Rp 4 juta per bulan (Sumartomdjono, 2020). Ringkasan praktik inovasi desa dalam merespon pandemik Covid-19 dapat dilihat di Tabel 2.

Tabel 2. Praktik inovasi desa dalam merespon pandemik Covid-19

Desa	Praktik inovasi
Panggunharjo, Bantul, Yogyakarta	Pasar desa.id
Krandengan, Purworejo, Jawa Tengah	Pasar Obah, layanan administrasi online
Sukadana, Lombok Timur.	Lumbung Pangan
Kedunggading, Kendal, Jawa Tengah	Gerakan menanam sayuran (Program Kampung Iklim)
Nua Ja, Ende, NTT	Gerbang semprot desinfektan otomatis
Tirtonirmolo, Bantul, Yogyakarta.	Gerbang semprot desinfektan otomatis
Cijengkol, Sukabumi, Jawa Barat	Layanan administrasi online
Sukowetan, Trenggalek, Jawa Timur.	Penyaluran bantuan untuk warga miskin melalui UPZ dan CSR Bumdes
Tridadi, Sleman, Yogyakarta.	Wastafel injak
Tunjung Muli, Purbalingga, Jawa Tengah	Telemarketing untuk warga

Sumber: Data diolah

Memetakan Praktik Inovasi Ughari di Desa

Sebagaimana telah dijelaskan, inovasi ughari merupakan jenis inovasi spesifik yang merespons keterbatasan sumber daya dan upaya untuk menghasilkan hasil yang memenuhi kebutuhan spesifik suatu kelompok tertentu (Bhatti, 2012). Oleh karena itu, inovasi ughari sesuai dengan kebutuhan sebagian besar populasi di negara-negara berkembang yang umumnya memiliki kendala sumber daya sosial yang signifikan, sasaran pelanggan sering memiliki sarana yang terbatas, dan infrastruktur sosial tidak lengkap atau berfungsi dengan buruk.

Artikel ini mencatat 10 desa yang telah melakukan inovasi dalam rangka merespon pandemik Covid-19. Namun, untuk dapat memastikan apakah inovasi ughari di desa dengan jenis inovasi lainnya, 3 kriteria inovasi ughari menurut Bhatti *et al.* (2018) digunakan untuk memetakan praktik-

praktik tersebut. Keenam kriteria tersebut adalah *affordability* (keterjangkauan), *accessibility* (kemudahan diakses), *adaptability* (kemampuan beradaptasi); dan satu kriteria menurut Hossain (2018) yaitu *sustainability* (keberlanjutan). Hasil pemetaan keenam kriteria tersebut dapat dilihat di Tabel 3 dibawah ini.

Tabel 3. Pemetaan inovasi ugahari di desa

Desa	Kriteria inovasi ugahari			
	<i>Affordability</i>	<i>Adaptability</i>	<i>Accessibility</i>	<i>Sustainability</i>
Panggunharjo, Bantul, Yogyakarta	√	√	√	-
Krandengan, Purworejo, Jawa Tengah	√	√	√	√
Sukadana, Lombok Timur.	-	√	-	√
Kedunggading, Kendal, Jawa Tengah	-	√	-	√
Nua Ja, Ende, NTT	-	√	-	-
Tirtonirmolo, Bantul, Yogyakarta.	-	√	-	-
Cijengkol, Sukabumi, Jawa Barat	-	√	√	-
Sukowetan, Trenggalek, Jawa Timur.	√	√	-	-
Tridadi, Sleman, Yogyakarta.	-	√	-	-
Tunjung Muli, Purbalingga, Jawa Tengah	√	√	-	-

Sumber: Data diolah

Dari tabel pemetaan di atas, semua desa yang diteliti dalam artikel ini menunjukkan kesamaan yaitu memiliki kemampuan beradaptasi (*adaptability*). Kemampuan beradaptasi ini menjadi poin penting dalam kajian ini, khususnya di era pandemik Covid-19 dimana protokol kesehatan harus diterapkan untuk mencegah penyebaran virus lebih luas. Protokol

kesehatan seperti menjaga jarak, menjadi sumber keterbatasan baru selain keterbatasan sumber daya (keuangan maupun manusia) yang harus segera direspon oleh desa. Akan tetapi, catatan praktik inovasi ugahari dalam artikel ini menunjukkan bahwa desa mampu bergerak dan beradaptasi dengan cepat.

Namun demikian, di tabel 3 tampak bahwa beberapa desa memiliki ciri khas keinovasiannya masing-masing. Misalnya, praktik inovasi yang dilakukan oleh Desa Panggungharjo melalui pasar desa.id, Desa Krandengan melalui Pasar Obah, Desa Sukowetan, dan Desa Tunjung Muli memenuhi kriteria *affordability* dan *accessibility* (Hossain, 2018; Rao, 2013; Rosca *et al.*, 2017). Hal ini karena produk dan layanannya mampu menjangkau masyarakat luas. Selain itu, *platform* digital yang digunakan oleh Pasar desa.id memberikan akses kepada pengguna untuk membeli produk secara langsung dari petani. Dampak langsung yang dirasakan oleh warga desa dengan adanya Pasar desa.id adalah terbukanya pasar/market baru. Hal ini sejalan dengan pendapat Hossain (2018) yang mengatakan bahwa inovasi ugahari sebagai produk yang terjangkau dan salah satu solusi untuk mengatasi masalah lokal, dapat membuka pasar dan menjadi sumber keuntungan baru bagi usaha masyarakat lokal dan perusahaan besar.

Kriteria lain yang muncul dari praktik inovasi di desa-desa dalam tulisan ini adalah *sustainability* (Agnihotri, 2015; Bhatti *et al.*, 2018; Bhatti *et al.*, 2013; Hossain, 2018; Levänen *et al.*, 2015; Winterhalter *et al.*, 2016). Dalam hal ini, *sustainability* adalah keadaan masyarakat dimana kondisi kehidupan dan penggunaan sumber daya dapat saling melengkapi tanpa mengorbankan stabilitas sistem alam (Hossain, 2018). Berdasarkan tabel, 3 desa yang memiliki kriteria tersebut adalah Desa Krandengan, Desa Sukadana, dan Desa Kedunggading. Lumbung pangan di Desa Sukadana dan gerakan menanam sayuran di Desa Kedunggading adalah praktik menjaga kelangsungan hidup masyarakatnya. Praktik yang dilakukan oleh desa-desa tersebut sejalan dengan apa yang disampaikan oleh Agnihotri (2015), bahwa inovasi ugahari adalah inovasi yang ramah lingkungan dan melindungi sumber daya alam.

Penutup

Sejak dinyatakan secara resmi oleh WHO pada bulan Januari 2020 sebagai pandemik, penyebaran Covid-19 semakin meluas dengan jumlah korban meninggal yang terus bertambah. Berbagai upaya dan kebijakan telah dilakukan dan diterapkan untuk mencegah penyebaran virus ini, diantaranya adalah dengan menerapkan protokol kesehatan yang ketat seperti selalu mencuci tangan, mengenakan masker, dan menjaga jarak. Penerapan protokol

kesehatan tersebut, tidak ayal mengubah perilaku dan tatanan kehidupan manusia baik di kota besar maupun di pedesaan. Desa dipaksa untuk segera merespon situasi ini agar penyebaran virus tersebut tidak meluas. Beberapa kebiasaan yang terjadi di desa harus dikurangi atau bahkan dihilangkan, seperti kegiatan kerja bakti, pengajian, pertemuan RT, dan lain sebagainya.

Di sisi lain, desa dan warganya telah lama terbukti mampu beradaptasi dan berinovasi dalam situasi krisis, seperti pandemic. Sebagaimana telah disinggung, inovasi adalah implementasi teknologi, ide, inovasi ughari adalah inovasi yang merespons keterbatasan sumber daya dan upaya untuk menghasilkan hasil yang memenuhi kebutuhan spesifik suatu kelompok tertentu (Bhatti, 2012). Dalam artikel ini, ada 4 kriteria utama yang membedakan inovasi ughari dengan jenis inovasi lain, yaitu *affordability*, *adaptability*, *accessibility*, dan *sustainability*. Sebagaimana telah dijelaskan, kemampuan desa-desa dalam artikel ini memenuhi kriteria inovasi ughari atau inovasi frugal.

Artikel ini bertujuan memetakan praktik-praktik inovasi ughari di desa dalam merespon pandemik Covid-19. Sebagai inisiasi awal, artikel ini telah menyajikan bukti bahwa desa, dengan segala keterbatasannya, mampu melakukan praktik-praktik tersebut. Meskipun demikian, artikel ini masih menyisakan sejumlah kelemahan. Pertama, data yang dikumpulkan dalam artikel ini hanya berdasarkan liputan media. Artinya, informasi yang didapatkan harus dikonfirmasi ulang dengan cara mengunjungi desa-desa tersebut untuk dapat mengumpulkan data primer dengan menggunakan metode pengumpulan data primer seperti wawancara atau survei. Kedua, dimensi kajian inovasi ughari yang digunakan dalam artikel ini cukup luas, sehingga tidak dapat menangkap praktik nyata inovasi ughari yang terjadi di desa. Oleh karena itu, kajian lebih lanjut dengan topik yang lebih khusus, misalnya terkait *sustainability*, perlu dilakukan.

Daftar Pustaka

Buku:

- Bhatti, Y., Basu, R. R., Barron, D., & Ventresca, M. J. (2018). *Frugal Innovation: Models, Means, Methods*: Cambridge University Press.
- Bhatti, Y., Khilji, S. E., & Basu, R. (2013). Frugal innovation *Globalization, change and learning in South Asia* (pp. 123-145): Elsevier.
- Bound, K., & Thornton, I. W. B. (2012). *Our Frugal Future: Lessons from India's Innovation System*. UK: NESTA.
- KBBIDaring. (Ed.) (n.d.) Kamus Besar Bahasa Indonesia Daring (Vols. Edisi III). Jakarta: Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kemendikbud.
- OECD/Eurostat. (2005). *Oslo Manual: Guidelines for Collecting and Interpreting Innovation 3rd Edition, The Measurement of Scientific and Technological Activities*. Paris: OECD Publishing.

E-book:

- Bhatti, Y. A. (2012). What is frugal, what is innovation? Towards a theory of frugal innovation. *Towards a Theory of Frugal Innovation (February 1, 2012)*.
- Bhatti, Y. A., & Ventresca, M. (2013). How can 'frugal innovation' be conceptualized? *Available at SSRN 2203552*.
- Levänen, J., Hossain, M., Lyytinen, T., Hyvärinen, A., Numminen, S., & Halme, M. (2015). Implications of frugal innovations on sustainable development: Evaluating water and energy innovations. *Available at SSRN 2707070*.
- Masin, E. (2019). *Frugal Innovation and Development; What do we know?* (Master), University of Padua, Italia.
- Radjou, N., & Prabhu, J. (2015). *Frugal Innovation: How to do more with less*:

The Economist.

- Radjou, N., Prabhu, J., & Ahuja, S. (2012). *Jugaad innovation: Think frugal, be flexible, generate breakthrough growth*: John Wiley & Sons.
- Sjafrizal, T. (2015). *Frugal Innovation Characteristics: Market, Product And Business Perspective*.
- Wooldridge, A. (2010). First break all the rules: The charms of frugal innovation. *The Economist*, 3-5.

Jurnal:

- Agnihotri, A. (2015). Low-cost innovation in emerging markets. *Journal of Strategic Marketing*, 23(5), 399-411.
- Baregheh, A., Rowley, J., & Sambrook, S. (2009). Towards a multidisciplinary definition of innovation. *Management decision*, 47(8), 1323-1339.
- Dodgson, M. (2017). Innovation in firms. *Oxford Review of Economic Policy*, 33(1), 85-100. doi:10.1093/oxrep/grw034
- Garcia, R., & Calantone, R. (2002). A critical look at technological innovation typology and innovativeness terminology: a literature review. *Journal of Product Innovation Management: An international publication of the product development & management association*, 19(2), 110-132.
- George, G., McGahan, A. M., & Prabhu, J. (2012). Innovation for Inclusive Growth: Towards a Theoretical Framework and a Research Agenda. *Journal of management studies*, 49(4), 661-683. doi:10.1111/j.1467-6486.2012.01048.x
- Govindarajan, V., & Ramamurti, R. (2011). Reverse innovation, emerging markets, and global strategy. *Global Strategy Journal*, 1(3-4), 191-205.
- Gronum, S., Steen, J., & Verreynne, M.-L. (2016). Business model design and innovation: Unlocking the performance benefits of innovation. *Australian Journal of Management*, 41(3), 585-605. doi:10.1177/0312896215587315
- Hossain, M. (2018). Frugal innovation: A review and research agenda. *Journal of Cleaner Production*, 182, 926-936. doi:https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2018.02.091
- Knight, K. E. (1967). A descriptive model of the intra-firm innovation process. *The journal of business*, 40(4), 478-496.
- Nijhof, A., Fisscher, O., & Looise, J. K. (2002). Inclusive innovation: a research project on the inclusion of social responsibility. *Corporate Social Responsibility and Environmental Management*, 9(2), 83-90.
- Prabhu, J. (2017). Frugal innovation: doing more with less for more.

- Philosophical Transactions of the Royal Society A: Mathematical, Physical and Engineering Sciences*, 375(2095), 20160372.
- Prabhu, J., & Jain, S. (2015). Innovation and entrepreneurship in India: Understanding jugaad. *Asia Pacific Journal of Management*, 32(4), 843-868.
- Prahalad, C. K., & Mashelkar, R. A. (2010). Innovation's holy grail. *Harvard Business Review*, 88(7-8), 132-141.
- Rao, B. C. (2013). How disruptive is frugal? *Technology in Society*, 35(1), 65-73.
- Rosca, E., Arnold, M., & Bendul, J. C. (2017). Business models for sustainable innovation—an empirical analysis of frugal products and services. *Journal of Cleaner Production*, 162, S133-S145.
- Rowley, J., Baregheh, A., & Sambrook, S. (2011). Towards an innovation-type mapping tool. *Management decision*, 49(1), 73-86.
- Schumpeter, J. A. (1934). *The theory of economic development: An inquiry into profits, capital, credit, interest, and the business cycle* (Vol. 55): Transaction publishers.
- Sorescu, A. B., Chandy, R. K., & Prabhu, J. C. (2003). Sources and financial consequences of radical innovation: Insights from pharmaceuticals. *Journal of marketing*, 67(4), 82-102.
- Weyrauch, T., & Herstatt, C. (2017). What is frugal innovation? Three defining criteria. *Journal of frugal innovation*, 2(1), 1.
- Winterhalter, S., Zeschky, M. B., & Gassmann, O. (2016). Managing dual business models in emerging markets: an ambidexterity perspective. *R&D Management*, 46(3), 464-479.
- Zeschky, M. B., Winterhalter, S., & Gassmann, O. (2014). From cost to frugal and reverse innovation: Mapping the field and implications for global competitiveness. *Research-Technology Management*, 57(4), 20-27.

Artikel Surat Kabar:

- Atmoko, C. (2018, 10 Desember). Jumlah desa tertinggal berkurang 6.518 desa. *Antara News*. Retrieved from <https://www.antaraneews.com/berita/776355/jumlahdesa-tertinggal-berkurang-6518-desa>
- Dinnata, R. Y. W. (2020, 17 Juni). Wastafel Anti Corona Buatan BUMDes Tridadi Sleman Laku Keras. *ayoyogya.com*. Retrieved from <http://ayoyogya.com/read/2020/06/17/39639/wastafel-anti-Corona-buatan-bumdes-tridadi-sleman-laku-keras>
- Hen. (2020, 2 Mei). Pasar Obah, Inovasi Desa Krandegan di Tengah

- Pandemi Covid-19. *RMOL Jateng*. Retrieved from <https://www.rmoljateng.com/read/2020/05/02/26978/Pasar-Obah,-Inovasi-Desa-Krandegan-Di-Tengah-Pandemi-Covid-19->
- Kautsar, N. D. (2020, 17 April). Inspiratif, Masyarakat Desa ini Ciptakan Robot Administrasi di Tengah Masa Pandemi. *merdeka.com*. Retrieved from <https://www.merdeka.com/jabar/inspiratif-masyarakat-desa-ini-ciptakan-robot-administrasi-di-tengah-masa-pandemi.html>
- Mahardikengrat, L. (2020, 25 Maret). 4 Kisah inovasi di tengah pandemi Corona, Inspiratif. *Brilio.net*. Retrieved from [4-kisah-inovasi-di-tengah-pandemi-Corona-inspiratif](https://www.brilio.net/4-kisah-inovasi-di-tengah-pandemi-corona-inspiratif)
- n/a. (2019, 19 Juli). Kini Desa Bisa Berinovasi Lewat Bursa Inovasi Desa. *CNN Indonesia*. Retrieved from <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20190719125714-293-413596/kini-desa-bisa-berinovasi-lewat-bursa-inovasi-desa>
- n/a. (2020, 8 Mei). Desa di Kabupaten Trenggalek ini Punya Cara Mandiri untuk Bantu Warga Terdampak Pandemi Covid-19. *Surya.co.id*. Retrieved from <https://surabaya.tribunnews.com/2020/05/08/desa-di-kabupaten-trenggalek-ini-punya-cara-mandiri-untuk-bantu-warga-terdampak-pandemi-covid-19>
- Prasetya, A. W. (2020, 27 Mei). Ini Dua Prioritas Penggunaan Dana Desa di Tengah Pandemi Virus Corona. *Kompas.com*. Retrieved from [https://nasional.kompas.com/read/2020/03/27/17142461/ini-dua-prioritas-penggunaan-dana-desa-di-tengah-pandemi-virus-Corona?page=all](https://nasional.kompas.com/read/2020/03/27/17142461/ini-dua-prioritas-penggunaan-dana-desa-di-tengah-pandemi-virus-corona?page=all)
- Prayitno, E. (2020, 29 Mei). Pandemi Covid-19, Warga Kedunggading Kendal Manfaatkan Proklamasi. *Ayo Semarang.com*. Retrieved from <https://www.ayosemarang.com/read/2020/05/29/57781/pandemi-covid-19-warga-kedunggading-kendal-manfaatkan-proklamasi>
- SetKabinetRI. (2020). Kemendes PDTT Luncurkan Aplikasi Melawan Covid-19 [Press release]. Retrieved from <https://setkab.go.id/kemendes-pdtt-luncurkan-aplikasi-desa-melawan-covid-19/>
- Sumartomdjon, M. (2020, 30 Mei). Pandemi Corona ternyata menumbuhkan ekonomi digital desa lewat BUMDes. *Kontan.co.id*. Retrieved from <https://nasional.kontan.co.id/news/pandemi-corona-ternyata-menumbuhkan-ekonomi-digital-desa-lewat-bumdes>
- TimInovasiDesa. (2020, 30 Juni). Inovasi Desa Sukadana Lawan Pandemi Corona. Retrieved from <https://inovasidesa.kemendes.go.id/>

inovasi-desa-sukadana-lawan-pandemi-Corona/

- Welan, S. (2020, 2 Mei). Komunitas Adat Nua Ja Jadi Contoh Penanganan Covid-19 di Kabupaten Ende. Retrieved from <https://www.aman.or.id/2020/05/komunitas-adat-nua-ja-jadi-contoh-penanganan-Covid-19-di-kabupaten-ende/>
- Wicaksono, B. A. (2020, 27 Mei). Desa di Purworejo Terapkan Pelayanan Online Selama Pandemi Covid-19. *Medcom.id*. Retrieved from <https://www.medcom.id/nasional/daerah/yNLGBaqK-desadi-purworejo-terapkan-pelayanan-online-selama-pandemi-Covid-19>
- Wijana, E. P. E., & Maulina, M. R. (2020, 11 Mei). Kerja sama dengan desa lainnya, Pasardesa.id akan dioptimalkan. *Suarajogja.id*. Retrieved from <https://jogja.suara.com/read/2020/05/10/183000/kerja-sama-dengan-desa-lainnya-pasardesaid-akan-dioptimalkan>

Dokumen Resmi:

- Permendes PDTT No 6 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Permendes, PDTT No 11 Tahun 2019 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020, (2020).

PENGAMALAN AGAMA DI TENGAH
PANDEMI COVID-19: Telaah Kebijakan
Pembatasan Sosial Berskala Besar/PSBB
Perspektif *Ablussunnah Wal-Jama'ah*
An-Nabdliyyah)

Badrun

*Prodi Sejarah dan Kebudayaan Islam
Fakultas Adab dan Ilmu Budaya,
UIN Sunan Kalijaga*

Pendahuluan

Di tengah pandemi *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* yang semakin merajalela dan menyebar ke hampir seluruh titik di Indonesia, Presiden Republik Indonesia Joko Widodo mengeluarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia (PP RI) No 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*. PP No 21 Tahun 2020 yang ditandatangani pada tanggal 31 Maret 2020 tersebut adalah turunan dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Wilayah. Pasca lahirnya kebijakan itu, beberapa pemerintah daerah, baik di tingkat di Provinsi maupun Kabupaten/Kota mulai menerapkan PSBB dan melakukan pembatasan terhadap pergerakan orang dan barang di daerahnya masing-masing. Kebijakan itu diambil setelah meminta persetujuan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Kesehatan (Peraturan Pemerintah Republik Indonesia, 2020).

Dalam PP No 21 Tahun 2020 ini, yang dimaksud dengan PSBB adalah pembatasan kegiatan tertentu penduduk dalam suatu wilayah yang diduga terinfeksi Covid-19 sedemikian rupa untuk mencegah kemungkinan penyebaran Covid-19. Sebagaimana yang tertulis dalam PP No 21 Tahun 2020 tersebut, Pembatasan Sosial Berskala Besar harus memenuhi kriteria sebagai berikut: a. jumlah kasus dan/atau jumlah kematian akibat penyakit meningkat dan menyebar secara signifikan dan cepat ke beberapa wilayah; dan b. terdapat kaitan epidemiologi dengan kejadian serupa di wilayah atau negara lain. Mengacu pada ketentuan tersebut, kebijakan yang diambil oleh pemerintah Indonesia memang sudah tepat. Sebab, kasus kematian akibat penyebaran Covid-19 di semua titik di Indonesia sudah sangat mengkhawatirkan.

Pada saat tulisan ini dibuat, jumlah kematian di Indonesia akibat Covid-19

telah sampai di atas angka lebih dari 1000 (seribu) orang. Hampir setiap hari kita mendengar berita di media massa, baik cetak maupun elektronik mengenai kematian akibat Covid-19. Angka kematian akibat Covid-19 bukan hanya dari kalangan masyarakat biasa, namun juga dari kalangan pejabat. Bahkan, beberapa diantara mereka yang meninggal dunia akibat Covid-19 juga berasal dari kalangan petugas kesehatan. Pintu masuk Covid-19 pertama kali di Indonesia adalah Jakarta. Namun, seiring dengan penyebarannya yang cukup masif, hampir semua Provinsi di Indonesia terkena dampak Covid-19. Virus memang tidak mengenal status sosial. Virus ini bisa menyerang siapa saja, penganut agama apa saja, jenis kelamin apa saja, serta suku apa saja.

Dengan kata lain, Covid-19 memang harus disikapi secara serius untuk menangkal penyebarannya. Sikap tersebut tentu saja harus diambil oleh institusi negara. Penyebaran pandemi Covid-19 tidak akan bisa dicegah tanpa ketegasan dan intervensi negara. Artinya, upaya pencegahan penyebaran pandemi Covid-19 yang sangat masif tidak bisa hanya dipasrahkan kepada masyarakat saja, meskipun seluruh komponen masyarakat *civil society*, seperti Nahdlatul Ulama (NU), Muhammadiyah, Majelis Ulama Indonesia (MUI), dan berbagai organisasi kemasyarakatan lainnya telah ikut andil dalam upaya tersebut. Atas dasar itu, PP RI No 21 Tahun 2020 tentang PSBB adalah indikasi bahwa negara hadir dalam menyikapi Covid-19.

Sebelum pemerintah mengeluarkan kebijakan PSBB, banyak kalangan masyarakat memberi usul kepada pemerintah agar sebaiknya mengambil kebijakan *lockdown*, bukan PSBB. Usulan itu muncul seiring dengan adanya beberapa negara di dunia yang sebelumnya telah mengeluarkan kebijakan *lockdown*. Namun, setelah melewati berbagai macam pertimbangan dan kajian yang mendalam, pemerintah akhirnya mengambil kebijakan PSBB sebagaimana yang telah dituangkan dalam PP No 21 Tahun 2020. Pilihan kebijakan PSBB tersebut juga didasarkan pada disiplin dan kultur masyarakat Indonesia secara umum serta keberhasilan beberapa negara di dunia dalam mengatasi pandemi Covid-19.

Kebijakan pemerintah mengeluarkan PP RI No 21 Tahun 2020 tentu saja berpengaruh besar terhadap pola kehidupan masyarakat Indonesia secara umum. Bukan hanya berpengaruh terhadap dunia pendidikan, aktivitas bisnis, gejala ekonomi, mata pencaharian masyarakat, serta budaya masyarakat, tetapi juga berpengaruh terhadap aktivitas keagamaan (baca: kegiatan ibadah)—khususnya agama Islam—di tengah masyarakat. Selama pandemi Covid-19, menurut ketentuan PP RI No 21 Tahun 2020 tentang PSBB, hampir semua aktivitas-aktivitas keagamaan dibatasi sehingga masyarakat

tidak bisa beraktivitas normal sebagaimana biasanya.

Lantas pertanyaannya dalam konteks pengamalan agama, bagaimana seharusnya masyarakat bersikap terhadap Peraturan Pemerintah Republik Indonesia (PP RI) No 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*?. Lalu bagaimana ajaran Islam *ahlussunnah wal-jama'ah an-nahdliyyah* melihat kebijakan pemerintah tersebut?. Tulisan ini akan mencoba menjawab pertanyaan-pertanyaan itu ke dalam satu telaah dan analisis yang komprehensif dalam perspektif pola keberagamaan *ahlussunnah wal-jama'ah an-nahdliyyah*. Tulisan ini diharapkan bisa memberikan kesimpulan tentang bagaimana sebenarnya agama memandang kebijakan pemerintah (PP RI No 21 Tahun 2020 Tentang PSBB) dan bagaimana seharusnya masyarakat muslim secara umum bersikap terhadap kebijakan tersebut.

Pengamalan Agama dalam Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB)

Pembatasan Sosial Berskala Besar yang disingkat PSBB sebenarnya tidak menutup aktivitas masyarakat secara keseluruhan. Dalam PSBB, beberapa aktivitas masyarakat dibatasi, namun beberapa aktivitas lain seperti aktivitas ekonomi masih berjalan. Mengacu pada Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020 yang merupakan aturan turunan dari PP Nomor 21 Tahun 2020 tentang PSBB, pengertian PSBB adalah pembatasan kegiatan tertentu penduduk dalam suatu wilayah yang diduga terinfeksi *Coronavirus Disease 2019 (Covid-19)* sedemikian rupa untuk mencegah kemungkinan penyebaran *Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)* (Peraturan Menteri Kesehatan, 2020). Pengertian ini dengan jelas menggambarkan bahwa yang dibatasi hanyalah “kegiatan tertentu”, bukan seluruh kegiatan masyarakat.

Berbeda halnya dengan *lockdown* yang secara sederhana maknanya adalah karantina nasional (Faizin dkk, 2020: 392) yang membatasi seluruh aktifitas masyarakat tanpa terkecuali. Dalam kebijakan *lockdown*, suasana sehari-hari selama dua puluh empat jam akan tampak seperti kota mati yang sama sekali tidak ada aktivitas warga. Hal itu disebabkan karena dalam *lockdown* semua orang tidak boleh keluar rumah, semua instansi negeri dan swasta ditutup, semua transportasi dihentikan, baik dalam bentuk kendaraan pribadi maupun kendaraan umum seperti bus, kereta api, pesawat, taksi, dan lain-lain.

Meskipun PSBB sebenarnya tidak menutup aktivitas masyarakat secara keseluruhan, tetapi kebijakan yang dituangkan dalam PP RI No 21 Tahun 2020 itu tetap saja berpengaruh terhadap pola keberagamaan masyarakat

muslim. Sebab, kebijakan tersebut membatasi ruang gerak masyarakat muslim dalam pengamalan agama. Bukan pembatasan terhadap esensi atau substansi pengamalan agamanya, tetapi terhadap cara dan mekanisme pelaksanaannya. Misalnya jika sebelum pandemi Covid-19 merebak masyarakat muslim bisa melaksanakan salat lima waktu, salat tarawih di bulan Ramadhan, dan salat Jum'at secara berjama'ah di Masjid, maka dengan pemberlakuan PSBB masyarakat hanya bisa melaksanakan salat tarawih di bulan Ramadhan dan salat lima waktu di rumah bersama keluarga. Salat Jum'at demikian pun juga diganti dengan salat zuhur di rumah.

Pelaksanaan ibadah sebagaimana dalam ketentuan tersebut di atas termasuk salah satu dari lima hal pokok yang dibatasi dalam PSBB, sebagaimana yang dinyatakan dalam Pasal 13 ayat (1) yang secara keseluruhan meliputi (Peraturan Menteri Kesehatan, 2020): a. peliburan sekolah dan tempat kerja; b. pembatasan kegiatan keagamaan; c. pembatasan kegiatan di tempat atau fasilitas umum; d. pembatasan kegiatan sosial dan budaya; e. pembatasan moda transportasi; dan pembatasan kegiatan lainnya khusus terkait aspek pertahanan dan keamanan.

Ayat selanjutnya menjelaskan bahwa pembatasan kegiatan keagamaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan dalam bentuk kegiatan keagamaan yang dilakukan di rumah dan dihadiri oleh keluarga terbatas, dengan tetap menjaga jarak setiap orang (Peraturan Menteri Kesehatan, 2020). Pembatasan kegiatan keagamaan selain sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan, dan fatwa atau pandangan lembaga keagamaan resmi yang diakui oleh pemerintah (Peraturan Menteri Kesehatan, 2020).

Dari ketentuan pelaksanaan PSBB terkait dengan pengamalan keagamaan sebagaimana yang tertulis dalam Pasal 13 ayat (1), (4), (5) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020, pemerintah sama sekali tidak melarang masyarakat untuk melaksanakan ibadah dan kewajiban-kewajiban keagamaan lainnya. Pemerintah hanya membatasi kegiatan ibadah dengan mengalihkan tempat dan tata cara pelaksanaan ibadah yang semula dilaksanakan di Masjid secara bersama-sama (*jama'ah*), lalu dipindah ke rumah masing-masing dan tetap bisa dilaksanakan secara berjama'ah dengan keluarga terbatas. Pemerintah tentu tidak dapat merubah esensi dan syarat yang harus terpenuhi dalam setiap pelaksanaan ibadah. Sebab, syarat dan rukun ibadah harus tetap terpenuhi dan bersifat universal. Mengacu pada fiqih mazhab Syafi'i yang diikuti oleh mayoritas masyarakat Indonesia, rukun-rukun dan syarat ibadah, serta niat dalam pelaksanaan ibadah harus

terpenuhi dalam setiap pengamalan semua jenis ibadah. Jika tidak terpenuhi, maka ibadah yang dilakukan tersebut menjadi tidak sah (Ahmad, 2015: 163).

Sebagai contoh, syarat-syarat pokok sahnya salat paling tidak ada empat macam. Pertama; suci badan dari hadats dan najis, kedua; menutup aurat dengan pakaian yang suci, ketiga; tahu pasti akan masuknya waktu salat, keempat; menghadap kiblat. Dalam kebijakan PSBB yang membatasi pelaksanaan ibadah umat Islam, pemerintah sama sekali tidak mengurangi satu pun syarat dari empat syarat sahnya salat tersebut. Suci badan dari hadats dan najis (Alauddin, 2019: 173), misalnya, tidak dihilangkan atau dilarang oleh pemerintah dalam kebijakan PSBB. Yang “dilarang” pemerintah melalui PP Nomor 21 Tahun 2020 tentang PSBB hanyalah metode pelaksanaannya secara berjama’ah di Masjid dan dihibau untuk melaksanakan salat di rumah masing-masing secara berjama’ah bersama keluarga.

Ketentuan pelaksanaan ibadah di rumah bersama keluarga dalam jumlah sangat terbatas (bukan di Masjid dengan jumlah jama’ah banyak) adalah ketentuan yang tidak menyalahi ketentuan *syara’* sebagaimana diatur dalam al-Qur’an, hadis Nabi, maupun dalam ijtihad ulama’ *fiqih*. Apabila PP Nomor 21 Tahun 2020 tentang PSBB memuat ketentuan pelaksanaan ibadah di tengah pandemi Covid-19 menyalahi ketentuan *syara’* sebagaimana yang termuat dalam al-Qur’an dan hadis, maka kebijakan tersebut akan batal atau gugur secara teologis. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan hadis Rasulullah yang berbunyi:

كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان مئة شرط

Artinya: “Syarat apa saja yang dibuat yang menyalahi kitabullah, maka itu batil, walaupun yang dibuat adalah seratus persyaratan” (HR. Bukhari, no. 2168 dan Muslim, no. dan Muslim, no. 1504, juga Ibnu Majah, no. 2521, lafaznya dari Ibnu Majah).

Mengacu pada ketentuan hadis di atas, maka PP Nomor 21 Tahun 2020 tentang PSBB sebagai norma yang salah satunya mengatur pelaksanaan ibadah umat Islam di masa pandemi Covid-19 tidaklah batal secara teologis, karena semua norma didalamnya sama sekali tidak menyalahi kitabullah (tidak bertentangan dengan syariat). Dalam hal pengaturan tentang pelaksanaan ibadah, PP Nomor 21 Tahun 2020 tentang PSBB bisa dikatakan batal secara teologis jika norma-norma didalamnya bertentangan dengan menyalahi syarat dan rukun ibadah.

Kebijakan pemerintah mengeluarkan PP Nomor 21 Tahun 2020 tentang

PSBB dan sekaligus “membatasi” pengamalan agama juga selaras dengan ijthad Majelis Ulama Indonesia (MUI). Salah satu fatwa MUI Nomor 14 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ibadah dalam Situasi Terjadi Wabah Covid-19 adalah mengatur tentang ibadah salat Jum’at dan mengenai ketentuan yang harus dilakukan terhadap jenazah pasien pengidap Virus Corona atau Covid-19 (www.mui.or.id, 2020).

Menurut fatwa MUI, orang yang telah terpapar Virus Corona, wajib menjaga dan mengisolasi diri agar tidak terjadi penularan kepada orang lain. Baginya salat Jum’at dapat diganti dengan salat zuhur di tempat kediaman, karena salat Jum’at merupakan ibadah wajib yang melibatkan banyak orang sehingga berpeluang terjadinya penularan virus secara massal. Bahkan lebih jauh lagi, dalam fatwa tersebut MUI juga menegaskan bahwa haram melakukan aktivitas ibadah sunnah bagi siapa saja yang membuka peluang terjadinya penularan, seperti jamaah salat lima waktu atau *rawatib*, salat tarawih, dan Ied (yang dilakukan) di Masjid atau tempat umum lainnya. MUI juga mengharamkan umat Islam menghadiri acara pengajian umum dan *tabligh akbar*, jika berpotensi menyebabkan terjadinya penularan Covid-19 secara massal (www.mui.or.id, 2020).

Tidak hanya bagi yang terpapar (dinyatakan positif) Covid-19, fatwa MUI juga membolehkan orang yang sehat meninggalkan jamaah salat lima waktu atau *rawatib*, *tarawih*, dan Ied di Masjid atau tempat umum lainnya, jika ia berada di suatu kawasan yang potensi terjadinya penularan Covid-19 tinggi atau sangat tinggi berdasarkan ketetapan pihak yang berwenang. Dalam kondisi penyebaran Covid-19 tidak terkendali di suatu kawasan yang mengancam jiwa, menurut fatwa MUI, umat Islam tidak boleh menyelenggarakan salat Jum’at di kawasan tersebut, sampai keadaan menjadi normal kembali dan wajib menggantikannya dengan salat zuhur di tempat masing-masing. Atas dasar itu, berdasarkan kebijakan PP Nomor 21 Tahun 2020 tentang PSBB, pengamalan agama dalam suasana merebaknya pandemi Covid-19 tentu saja berbeda dengan suasana normal, namun sama sekali tidak mengurangi esensi dan nilai-nilai ibadah itu sendiri.

PSBB Perspektif

Ahlussunnah Wal-Jama’ah An-Nahdliyyah

Banyak kalangan “masyarakat awam” di level akar rumput yang mempertanyakan kebijakan pemerintah ketika mengeluarkan PP Nomor 21 Tahun 2020 tentang PSBB, yang salah satu poinnya adalah membatasi pelaksanaan ibadah umat Islam. Mereka menilai bahwa kebijakan PSBB yang

membatasi ibadah umat Islam adalah kebijakan yang tidak tepat. Pasalnya, menurut mereka, pengamalan ibadah kepada Allah swt adalah hak prerogatif umat Islam yang tidak boleh dibatasi atau diintervensi oleh siapa saja, termasuk pemerintah sekalipun. Pelaksanaan salat lima waktu secara berjama'ah di Masjid, misalnya, tidak boleh dilarang oleh pemerintah karena Masjid bukan instansi negara, tetapi rumah Tuhan yang didalamnya terdapat hak seluruh umat Islam untuk melaksanakan ibadah sesuai dengan ajaran agama. Menurut mereka, jika pemerintah melarang pelaksanaan salat berjama'ah di Masjid, berarti larangan itu melanggar tuntunan agama (republika.co.id, 2020).

Selain itu, banyak juga yang beranggapan bahwa kewajiban pertama bagi para penguasa (baca: pemerintah) ialah menyiapkan sarana-sarana dan faktor-faktor yang memungkinkan masyarakat muslim dan individu-individunya menjalankan kewajiban keagamaan di dunia. Yang dimaksud dengan keagamaan adalah segala yang bertalian dengan akidah dan ibadah. Akidah dan ibadah merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari *syari'at* (Taufiq, 1997: 747). Kewajiban pemerintah terhadap kegiatan ibadah masyarakat ialah memfasilitasi apa-apa yang melancarkan pelaksanaan kewajiban agama itu. Misalnya dengan mendirikan masjid-masjid dan memeliharanya, mengatur pengumpulan zakat, melancarkan perjalanan ibadah haji, mengatur segala yang bertalian dengan ibadah puasa, seperti mengumumkan hasil *rukyat* pada permulaan dan akhir bulan dan semua yang berkaitan dengan kewajiban itu (*ibid*, 1997).

Asumsi di atas di satu sisi memang bisa dibilang benar, namun di sisi lain justru menampakkan kesalahan yang sangat besar. Dikatakan benar apabila asumsi tersebut dibangun di atas situasi dan kondisi normal. Dengan kata lain, jika tidak ada penyebaran pandemi Covid-19 di Indonesia seperti sekarang ini, maka kebijakan pemerintah Indonesia mengeluarkan PP Nomor 21 Tahun 2020 tentang PSBB dan sekaligus membatasi kegiatan keagamaan masyarakat muslim memang tidak bisa dibenarkan. Memang benar, dalam situasi normal, pemerintah berkewajiban untuk memperlancar berbagai kegiatan ibadah keagamaan masyarakat, apa pun agamanya, bukan justru membatasinya sebagaimana yang dituangkan dalam PP Nomor 21 Tahun 2020 tentang PSBB.

Namun, yang harus dicatat adalah, PP Nomor 21 Tahun 2020 tentang PSBB yang didalamnya memuat aturan pembatasan kegiatan keagamaan lahir di tengah situasi dan kondisi tidak normal atau darurat, yaitu merebaknya pandemi Covid-19 yang memakan korban jiwa. Salah satu ruang penyebarannya adalah dalam situasi keramaian (kerumunan) yang salah satu

bentuknya adalah kegiatan keagamaan, seperti salat berjamaah di Masjid beramai-ramai. Dalam ajaran Islam *ablussunnah wal-jama'ah* yang dipegang dan dipraktikkan oleh Nahdlatul Ulama (NU *an-nahdliyyah*) (Muchotob dkk, 2017), dikenal satu istilah yang disebut *taqiyyah*, yaitu menampakkan akidah atau melakukan suatu tindakan keagamaan (ibadah) yang tidak sesuai dengan ketentuan *syara'* secara formal, namun tetap memenuhi syarat dan rukun sahnya ibadah. *Taqiyyah* juga bisa didefinisikan sebagai “menjalankan *fiqih* yang diamalkan oleh orang kebanyakan atau *fiqih* yang ditetapkan oleh penguasa untuk menghindari hal-hal buruk, seperti wabah penyakit, pertikaian, perpecahan, dan lain sebagainya” (Jalaluddin, 2003: 51).

Dalam ajaran Islam *ablussunnah wal-jama'ah an-nahdliyyah*, konsep *taqiyyah* merupakan salah satu *rukhsah* (dispensasi) yang dapat diterapkan dalam kondisi darurat. Parameter darurat itu, gambaran nyatanya seperti yang digambarkan oleh Ibnu Mundzir: “Para ulama bersepakat bahwa orang yang dipaksa kafir, saat keselamatan jiwanya terancam, kemudian mengucapkan kata-kata kufur, tapi hatinya tetap teguh keimanannya, demi menyelamatkan nyawa, itulah tindakan yang diperbolehkan. Dengan kata lain, ukur darurat adalah adanya nyawa yang terancam (Kholili, 2011: 314).

Berdasarkan ajaran *ablussunnah wal-jama'ah an-nahdliyyah* tersebut di atas, maka kebijakan pemerintah mengeluarkan PP Nomor 21 Tahun 2020 tentang PSBB yang didalamnya memuat aturan pembatasan kegiatan keagamaan adalah tepat dan benar menurut agama. Bahkan kebijakan tersebut adalah suatu keharusan untuk diambil, karena jika tidak akan banyak nyawa melayang dengan sia-sia. Dalam pandangan Islam *ablussunnah wal-jama'ah an-nahdliyyah*, jiwa manusia sangatlah berharga dan darah setiap manusia adalah suci di mata Allah. Oleh karena itu, setiap jiwa harus dilindungi dan diselamatkan. Tak seorang pun yang berhak mengambil nyawa seseorang, bahkan nyawanya sendiri pun juga tidak boleh diambil (Pradana, 2008: 48).

Jika ditelaah lebih jauh dari kacamata ajaran *ablussunnah wal-jama'ah an-nahdliyyah*, salat berjamaah di Masjid adalah sebuah kebaikan dan kemuliaan dalam menjalankan ibadah kepada Allah Swt. Kebaikan dan kemuliaan itu juga bisa disebut dengan *kemaslahatan*. Namun, penyebaran dan penularan pandemi Covid-19 yang begitu masif adalah sebuah kerusakan yang menyimpan ancaman besar, yaitu hilangnya nyawa manusia (*mudharat*). Pertanyaannya, sebagai seorang muslim, mana yang harus didahulukan antara salat berjamaah di Masjid sebagai sebuah kebaikan dan kemuliaan (*kemaslahatan*) atau menghindari kerusakan dan ancaman penularan pandemi Covid-19? Jika mengacu pada ajaran *ablussunnah wal-jama'ah an-nahdliyyah*,

yang harus didahulukan untuk dilakukan adalah menghindari penularan pandemi Covid-19, karena bisa menimbulkan kerusakan, yaitu hilangnya nyawa manusia. Pertanyaan berikutnya, bagaimana cara menghindarinya? Tentu saja cara menghindarinya adalah dengan tidak melaksanakan salat berjamaah di Masjid, meskipun itu adalah kebaikan dan kemaslahatan dan menggantinya dengan salat di rumah bersama keluarga masing-masing secara terbatas. Cara tersebut sudah ditentukan dalam PP Nomor 21 Tahun 2020 tentang PSBB.

Ajaran *ablussunnah wal-jama'ah an-nahdliyyah* tersebut berpijak pada *kaidah ushuliyah* yang sangat terkenal di kalangan jam'iyah NU, yaitu:

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: “Mencegah bahaya/gangguan harus lebih didahulukan daripada mendatangkan *mashlahat*”

Mengacu pada *kaidah ushuliyah* tersebut di atas, terkena dampak pandemi Covid-19 yang bisa menyebabkan hilangnya nyawa tentu bisa dimaknai sebagai sebuah kerusakan (*mafsadat*). Sedangkan shalat berjamaah di masjid (berkerumun) adalah *mashlahat*. Tetapi, *mashlahat* tersebut bisa mendatangkan kerusakan yaitu tertularnya pandemi Covid-19. Dengan kata lain, sebagaimana yang dikatakan Musthafa Al-Bugha dan Muhyiddin Mistu dalam kitab *Al-Wafi; Syarah Hadits Arba'in Imam Nawawi*, apabila berbenturan antara kerusakan dan *mashlahat*, yang wajib didahulukan adalah mencegah atau menghindari kerusakan (Musthafa, 2002: 301).

Sikap meninggalkan kerusakan yang harus didahulukan bisa dalam bentuk macam-macam, termasuk seperti meninggalkan salat jama'ah di Masjid dan menggantinya dengan salat bersama keluarga di rumah, meninggalkan pengajian, dan lain-lain. Atas dasar itu, kebijakan pemerintah mengeluarkan PP Nomor 21 Tahun 2020 tentang PSBB yang didalamnya memuat aturan pembatasan kegiatan keagamaan tentu adalah sebuah keputusan yang tepat menurut ukuran *ablussunnah wal-jama'ah an-nahdliyyah*.

Tindakan dan kebijakan yang diambil oleh Presiden Jokowi dengan menerbitkan PP Nomor 21 Tahun 2020 tentang PSBB adalah sejalan dengan kepentingan seluruh rakyat Indonesia (*al-mashlahah al-'ammah*) yaitu terhindar dari wabah pandemi Covid-19, bukan untuk diri sendiri, golongan atau pun kelompok tertentu. Dalam pandangan para ulama *ablussunnah wal-jama'ah*, setiap pemimpin umat manusia (baca: Presiden) harus mengambil suatu kebijakan yang mengarah kepada kesejahteraan dan kepentingan seluruh masyarakat. Hal tersebut sesuai dengan salah satu *kaidah ushuliyah*

yang berbunyi:

تصرف الإمام على الرعاية منوط بالمصلحة

Artinya: “tindakan imam (pemimpin/ pemerintah/ presiden) terhadap rakyatnya harus dikaitkan (diorientasikan) dengan kemaslabatan”.

Kesejahteraan dan kepentingan seluruh masyarakat yang hendak dituju dalam PP Nomor 21 Tahun 2020 tentang PSBB dalam istilah lain disebut “keamanan sosial”. Artinya, PP Nomor 21 Tahun 2020 tentang PSBB adalah sebagai upaya Pemerintah Indonesia untuk menciptakan keamanan sosial dari wabah pandemi Covid-19. Lebih jauh lagi, jika kita melihat pemahaman dan ruang lingkup “keamanan sosial” dalam pandangan Islam adalah pemahaman dan ruang lingkup “peradaban manusia”, maka para ulama *ablussunnah wal-jama’ah* dalam bidang *ushul fikih* telah menyimpulkan berdasarkan petunjuk al-Quran dan hadis Nabi yang mutawatir tentang tujuan-tujuan yang harus dicapai dalam setiap ketentuan dan norma kehidupan, salah satu contohnya adalah ketentuan dalam PP Nomor 21 Tahun 2020 tentang PSBB. Tujuan-tujuan yang harus dicapai tersebut dikenal dengan istilah *maqashid syari’ah* (tujuan-tujuan syariat). Menurut Jumhur Ulama *ablussunnah wal-jama’ah*, terdapat *dharurat al-khamsah* (lima urgensitas) yang harus dicapai dalam *maqashid syari’ah*. Jika kelima urgensitas tersebut tidak tercapai, maka kehidupan umat manusia secara umum akan rusak atau terganggunya keberadaan *maslahah*. Jika tercapai, maka kehidupan umat manusia secara umum akan berjalan dengan damai, sejahtera, aman, tenteram dan maju (Muhammad, 1999: 27).

Dharurat al-khamsah (lima urgensitas) tersebut adalah sebagai berikut (Muhammad, 1999: 27):

1. Memelihara agama dan mendirikannya (حفظ الدين), untuk membersihkan jiwa dan mengatur dunia dengan Islam.
2. Memelihara nyawa manusia (حفظ النفس) sebagai khalifah Allah dalam memakmurkan bumi.
3. Memelihara akal manusia (حفظ العقل) yang merupakan sebuah anugerah Ilahi yang dengannya manusia dapat mengetahui mana yang baik dan mana yang buruk, sehingga ia terus mengikuti kebenaran yang dibawa oleh wahyu yang diturunkan untuk memberikan tuntunan kepada manusia.
4. Memelihara keturunan dan nama baik (حفظ النسل) sebagai tanggapan atas *fitriah* manusia yang lurus, serta untuk menumbuhkan faktor-

faktor yang memotivasinya untuk berusaha dan berkarya.

5. Memelihara harta (حفظ المال), seperti mencari mata pencaharian yang halal, pembelanjaan yang benar, mengembangkan usaha/bisnis dengan sebaik-baiknya, serta bersolidaritas bagi sesama manusia yang diberikan mandat untuk menikmati harta dan kekayaan.

Mengacu pada dharurat al-khamsah (lima urgensitas) yang harus dicapai dalam setiap ketentuan dan norma kehidupan, maka PP Nomor 21 Tahun 2020 tentang PSBB termasuk salah satu upaya untuk memelihara nyawa manusia (حفظ النفس) sebagai khalifah Allah dalam memakmurkan bumi. PP Nomor 21 Tahun 2020 tentang PSBB yang salah satu normanya adalah membatasi kegiatan keagamaan masyarakat adalah upaya nyata untuk menyelamatkan manusia.

Atas dasar itu, para ulama jam'iyah Nahdlatul Ulama (NU) di Indonesia berpendapat dan berkeyakinan bahwa kebijakan PSBB yang salah satu poinnya adalah membatasi kegiatan keagamaan adalah benar dan wajib didukung (www.nu.or.id, 2020). Oleh karena itu, secara institusional, NU mendukung kebijakan PSBB dan menyeru masyarakat untuk melaksanakan kegiatan ibadah di rumah saja, bukan di Masjid. Beberapa *kaidah ushuliyyah* yang penulis tulis di atas sebenarnya juga menjadi pijakan dalam setiap langkah NU. Artinya kebijakan pemerintah mengeluarkan PP Nomor 21 Tahun 2020 tentang PSBB yang sejalan dengan pandangan *ablussunnah wal-jama'ah* juga selaras dengan pandangan NU (*ablussunnah wal-jama'ah an-nahdliyyah*). Hal tersebut juga sesuai dengan ciri khas pemikiran NU yang menempatkan penguasa negara (pemerintah) yang sah pada kedudukan yang terhormat dan ditaati selama tidak menyeleweng, memerintah ke arah yang bertentangan dengan hukum dan ketentuan Allah (Faisal, 2020: 339).

Sikap Masyarakat terhadap PSBB

Meskipun pemerintah telah mengeluarkan PP Nomor 21 Tahun 2020 tentang PSBB yang salah satu poinnya adalah membatasi kegiatan keagamaan, namun fakta di lapangan memperlihatkan masih banyak masyarakat muslim yang tidak mematuhi ketentuan itu. Masih banyak Masjid yang mengadakan kegiatan keagamaan sebagaimana dalam situasi normal, seperti salat lima waktu berjamaah, salat tarawih berjamaah, salat Jumat, dan lain sebagainya. Padahal PP Nomor 21 Tahun 2020 tentang PSBB telah disosialisasikan secara masif melalui berbagai instansi pemerintahan, baik di pusat maupun daerah, organisasi kemasyarakatan, termasuk melalui pemberitaan media massa.

Pertanyaan yang penting untuk dikemukakan adalah, menurut Islam bagaimana seharusnya masyarakat bersikap terhadap PP Nomor 21 Tahun 2020 tentang PSBB?, jika mengacu pada ajaran *ablussunnah wal-jama'ah an-nahdliyyah* adalah suatu kewajiban keagamaan dari seorang muslim adalah patuh kepada pemerintahan yang sah dan diangkat sebagaimana layaknya (Muhammad, 2017: 162). Patuh kepada pemerintah juga berarti patuh terhadap aturan-aturan yang dibuat. Dalam konteks PP Nomor 21 Tahun 2020 tentang PSBB adalah sebuah kewajiban bagi orang Islam untuk menjalankan semua ketentuan yang ada dalam PSBB tersebut.

Patuh kepada pemerintah merupakan suatu prinsip kewarganegaraan yang diakui sebagai asas dari semua masyarakat yang patuh terhadap pemimpinnya (Salim, 1983: 77). Tetapi penting untuk dicantumkan bahwa dalam lingkungan peraturan Islam, kewajiban ini tetap menjadi keharusan selama pemerintah tidak menghalalkan tindakan-tindakan yang diharamkan oleh *syariat*, atau melarang perbuatan yang diperintahkan oleh hukum *syariat* agama Islam. Jika terjadi hal semacam itu, maka kewajiban patuh kepada pemerintah tidak mengikat bagi umat Islam lagi. Hal ini jelas ditegaskan dalam hadis Nabi yang berbunyi:

على المرء المسلم فيما أحب وكره ما لم يؤمر بمعصية فإذا أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة

Artinya: “Mendengarkan dan taat itu wajib bagi seorang muslim, baik ia menyukai atau tidak menyukai perintah itu, selama ia tidak diperintahkan untuk melakukan perbuatan maksiat, maka ia tidak diwajibkan untuk mendengarkan dan taat” (HR Bukhari dan Muslim).

Mengacu pada hadis tersebut, PP Nomor 21 Tahun 2020 tentang PSBB sama sekali tidak memuat norma atau ketentuan bagi masyarakat untuk berbuat maksiat, tetapi hanya membatasi kegiatan keagamaan demi keselamatan masyarakat dari pandemi Covid-19. PP Nomor 21 Tahun 2020 tentang PSBB juga tidak lahir melalui tindakan-tindakan yang diharamkan oleh *syariat* Islam. Kebijakan itu diambil sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia, yaitu Presiden sebagai Kepala Pemerintahan memiliki hak untuk mengeluarkan Peraturan Pemerintah. Dengan demikian adalah suatu keharusan bagi umat Islam dan seluruh warga negara Indonesia untuk mematuhi PP Nomor 21 Tahun 2020 tentang PSBB tersebut, yaitu tidak melaksanakan salat lima waktu secara berjamaah di Masjid, meniadakan salat Jum'at dan menggantinya dengan salat zuhur di rumah masing-masing, tidak melaksanakan salat tarawih berjamaah di Masjid, tidak melaksanakan salat Ied, tidak mengadakan pengajian, atau segala macam bentuk kegiatan keagamaan yang mengundang kerumunan.

Dalam kajian yang lebih luas, PP Nomor 21 Tahun 2020 tentang PSBB yang salah satunya memuat pembatasan kegiatan keagamaan sebenarnya mengajak umat Islam untuk beragama secara rasional dan ilmiah. Rasionalitas Islam selalu selaras dengan ilmu pengetahuan. Dengan tegas al-Qur'an mengungkapkan bahwa ilmu pengetahuan dan wahyu merupakan dua aspek dari kebenaran yang sama dan tidak ada pertentangan diantara keduanya. Dalam al-Qur'an dijelaskan bahwa secara gamblang seluruh struktur materi yang ada di alam semesta—termasuk Covid-19 sebagai salah satu contohnya—dipenuhi dengan tanda-tanda kekuasaan Allah. Akan tetapi, kesadaran ini hanya dimiliki oleh manusia yang berilmu—mereka yang mencurahkan perhatian dengan saksama akan semua fenomena semesta itu (Afzalur, 2007: 12). Hal ini menunjukkan bahwa Islam sangat memperhatikan nilai-nilai rasional dalam setiap sisi penting agama bahkan dalam berkeyakinan sekalipun. Misalnya, meyakini suatu wabah penyakit seperti Covid-19 dapat menyerang siapa saja, termasuk pemeluk agama apa saja. Sehingga dalam beribadah harus tetap berhati-hati dan menghindari Covid-19.

Berpijak pada ilmu pengetahuan, pemeluk agama Islam diajak melaksanakan perintah agama Islam secara rasional dengan pertimbangan akal sehat. Dalam konteks penyebaran wabah pandemi Covid-19 yang cukup berbahaya dan mengancam keselamatan manusia, pelaksanaan ibadah bisa dilaksanakan sesuai dengan situasi dan kondisi, yaitu tetap melaksanakan ibadah dengan *khushyu'* sebagai kewajiban kepada Tuhan, tetapi pada saat yang sama juga harus tetap menghindar dari wabah pandemi Covid-19. Pasalnya, dalam pertimbangan rasionalitas, Covid-19 bisa menular dan menyerang siapa saja, dan dalam situasi apa saja, termasuk pada saat orang-orang sedang beribadah di Masjid sekalipun. Artinya Islam sangat memperhatikan akal manusia dan menempatkan sebagai unsur penting dalam setiap kewajiban menjalankan ibadah yang telah diwajibkan kepada setiap umat Islam. Atas dasar itu semua, dengan berpijak pada keimanan dan ketaqwaan serta pertimbangan ilmu pengetahuan dan akal sehat, maka sebagai seorang muslim kita harus mentaati Peraturan Pemerintah Republik Indonesia (PP RI) No 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Rangka Percepatan Penanganan *Coronavirus Disease 2019 (Covid-19)*.

Penutup

Dari ulasan panjang lebar tentang pengamalan agama di tengah pandemi Covid-19 serta kaitannya dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia (PP RI) No 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Rangka Percepatan Penanganan *Coronavirus Disease 2019 (Covid-19)*, maka

kesimpulan yang bisa diambil adalah sebagai berikut:

Pertama, dalam situasi darurat yang mengancam keselamatan masyarakat banyak, pemerintah harus mengambil suatu kebijakan untuk menyelamatkan masyarakat. PP Nomor 21 Tahun 2020 tentang PSBB adalah satu bentuk kebijakan pemerintah dalam rangka menyelamatkan masyarakat dari ancaman pandemi Covid-19.

Kedua, kebijakan pemerintah mengeluarkan PP Nomor 21 Tahun 2020 tentang PSBB sesuai dengan ajaran *ahlussunnah wal-jama'ah an-nahdliyyah*, yaitu ajaran yang dibawa oleh Rasulullah dan dipraktikkan bersama para sahabat, para *tabi'ien*, *tabi'it tabi'ien*, dan seterusnya, yang saat ini digalakkan oleh jam'iyah Nahdlatul Ulama (NU) secara luas. Menurut ajaran *ahlussunnah wal-jama'ah an-nahdliyyah*, PP Nomor 21 Tahun 2020 tentang PSBB adalah suatu kebijakan yang niscaya, yaitu kebijakan yang memang harus diambil oleh pemerintah.

Ketiga, PP Nomor 21 Tahun 2020 tentang PSBB adalah kebijakan pemerintah untuk mencapai *masalahah* bagi rakyat Indonesia dan menghindari *mafsadah* (*mudharat*) yang bisa ditimbulkan akibat Covid-19.

Keempat, umat Islam dan seluruh rakyat Indonesia harus patuh dan melaksanakan semua ketentuan yang ada dalam PP Nomor 21 Tahun 2020 tentang PSBB. Mentaati ketentuan dalam PP Nomor 21 Tahun 2020 tentang PSBB sama nilainya dengan mentaati perintah agama. Sebaliknya, melanggar ketentuan PP Nomor 21 Tahun 2020 tentang PSBB sama nilainya dengan melanggar perintah agama. Pasalnya, kebijakan itu sesuai dengan *dharurat al-khamsah* (lima urgensitas) yang harus dicapai dalam syariat Islam atau yang dikenal dengan istilah *maqashid syari'ah*, yaitu memelihara agama dan mendirikannya (حفظ الدين), memelihara nyawa manusia (حفظ النفس), memelihara akal manusia (حفظ العقل), memelihara keturunan dan nama baik (حفظ النسل), dan memelihara harta (حفظ المال).

Kelima, PP Nomor 21 Tahun 2020 tentang PSBB sebenarnya juga bisa dimaknai sebagai ajakan kepada umat Islam untuk beragama secara rasional dan bersinergitas dengan ilmu pengetahuan. Di satu sisi, kita harus melaksanakan semua perintah Allah dan menjauhi segala larangan-Nya dengan penuh khidmat dan *khusyu'*. Tetapi di sisi lain, saat melaksanakan ibadah kita juga harus memahami situasi dan kondisi di sekitar kita mengenai bahaya Covid-19 yang bisa mengancam keselamatan.

Daftar Pustaka

Buku:

- Alauddin Za'tari, Syaikh. (2019). *Fiqih Ibadah Madzhab Syafi'i*, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar.
- Al-Bugha, Musthafa, dan Mistu, Muhyiddin. (2002). *Al-Wafi; Syarah Hadits Arba'in Imam Nawawi*, Terj. Iman Sulaiman, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar.
- Asy-Syathibi, *al-Muwafaqat fi Ushul al-Ahkam*, Kairo: Maktabah wa Mathaba'ah Muhammad Ali Shubaih, t.t.
- Asy-Syawi, Taufiq. (1997). *Syura Bukan Demokrasi*, Jakarta: Gema Insani Press.
- Azzam, Salim. (1983). *Beberapa Pandangan tentang Pemerintahan Islam*, Bandung: Mizan.
- Boy ZTF, Pradana. (2008). *Fikih Jalan Tengah: Dialektika Hukum Islam dan Masalah-Masalah Masyarakat Modern*, Jakarta: Hamdalah/ PT Grafindo Media Pratama.
- Faizin Karimi, Ahmad, dan Efendi, David (Ed.). (2020). *Membaca Korona: Esai-Esai Tentang Manusia, Wabah dan Dunia*, Gresik: Caremedia Communication.
- Hajar Al-Asqalani, Ibnu. (2011). *Fathul Bari*, Terj. Amiruddin, Jakarta: Pustaka Azzam.
- Hamzah, Muchotob, dkk. (2017). *Pengantar Studi Aswaja An-Nahdliyah*, Yogyakarta: LKiS.
- Hasib, Kholili. (2014). *Sunni dan Syi'ah: Mustahil Bersatu*, Bandung: Tafakur.
- Imarah, Muhammad. (1999). *Islam dan Keamanan Sosial*, Jakarta: Gema Insani Press.
- Iqbal, Muhammad dan Husein Nasution, Amin. (2017). *Pemikiran Politik*

- Islam: Dari Masa Klasik Hingga Indonesia Kontemporer*, cet. Ke 4, Jakarta: Kencana.
- Ismail, Faisal. (2020). *NU, Moderatisme dan Pluralisme*, Yogyakarta: Ircisod.
- Rahman, Afzalur. (2007). *Ensiklopedia Ilmu Dalam Al-Qur'an: Rujukan Terlengkap Isyarat-Isyarat Ilmiah Dalam Al-Qur'an*, Terj. Taufik Ramah, Bandung: Penerbit Mizania.
- Rakhmat, Jalaluddin. (2003). *Dahulukan Akhlak di Atas Fikih*, Jakarta: Muthahhari Press.
- Sarwat, Ahmad. (2015). *Seri Fiqih Kehidupan (3): Shalat*, Jakarta: Rumah Fiqih Publishing.

Artikel Surat Kabar:

- <https://republika.co.id/berita/q9a90i328/sholat-tarawih-berjamaah-bisa-timbulkan-massalah-baru>, diakses tanggal 5 Mei 2020.
- <https://www.mui.or.id>, edisi 17 Maret 2020.
- <https://www.nu.or.id/post/read/119672/sukseskan-psbb--nu-jakpus-bagikan-ratusan-takjil>, diakses tanggal 5 Mei 2020.

Dokumen Resmi:

- Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 21 Tahun 2020 Tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*.



Facebook Sarang *Hoax* selama Pandemi Covid-19

Nur Hadi Prabawa

*Prodi Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan
Humaniora, UIN Sunan Kalijaga
Email: nhprabawa@gmail.com*

Pendahuluan

Teknologi yang ada saat ini telah mengalami perkembangan yang begitu pesat dan menjangkau hampir seluruh negara di dunia. Mulai dari perkembangan di bidang kesehatan, militer serta di bidang teknologi informasi. Berbagai penelitian terus digencarkan diberbagai negara demi meningkatkan perkembangan teknologi. Tindakan ini bertujuan untuk memudahkan pekerjaan manusia. Teknologi merupakan hasil dari olah pikir manusia yang pada akhirnya digunakan manusia untuk mewujudkan berbagai tujuan hidupnya (Ngafifi, 2014 : 37). Oleh karenanya, tidak sedikit dari para pengembang berlomba-lomba menjadi yang terbaik untuk dapat menguasai pasaran teknologi.

Persaingan semakin ketat ketika banyak perusahaan sejenis bermunculan dan memberikan inovasi terbaru. Salah satu dominasi kebutuhan akan teknologi yaitu berkaitan dengan teknologi informasi. Salah satu kebutuhan utama masyarakat modern saat ini adalah gadget. Perkembangan yang berkelanjutan semakin memberikan berbagai kemudahan daripada generasi awal teknologi informasi tersebut. Munculnya istilah *smartphone* telah memberikan gambaran bahwa informasi yang ada di seluruh dunia menjadi mudah untuk diakses oleh siapapun, melewati tapal batas dan waktu. *Handphone* yang telah bertransformasi menjadi *smartphone* tersebut juga dilengkapi dengan berbagai fitur unggulan. Mulai dari layar *touchscreen* dan ukuran yang semakin lebar, *fingerprint* untuk keamanan, *NFC* (Near Field Communication) untuk transaksi pembayaran dan juga kamera depan untuk melakukan komunikasi video (*video call*) serta berbagai keunggulan dari *smartphone* lainnya.

Berbagai kecanggihan dan kehebatan tersebut juga mempengaruhi munculnya inovasi baru seperti lahirnya media sosial (*social media*). Media sosial adalah alat komunikasi yang digunakan oleh pengguna dalam proses sosial (Mulawarman, dkk, 2017 : 37). Dewasa ini, media sosial bertransformasi

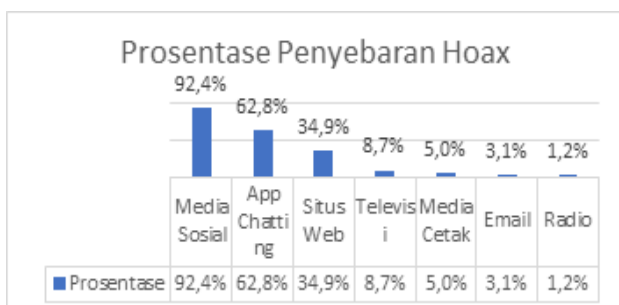
dalam berbagai bentuk, seperti blog, jejaring sosial, microblogging, layanan forum, layanan berbagi media dan layanan kolaborasi. Keseluruhan dari jenis tersebut mempunyai substansi yang paling pokok yaitu sebagai media komunikasi antar personal.

Berdasarkan data yang diambil dari berbagai media dan web di internet, menyatakan bahwa pengguna media sosial di seluruh dunia mencapai 3,8 miliar dan terus mengalami peningkatan dari waktu ke waktu. Tercatat, sampai Januari 2020 jumlah pengguna mencapai 160 juta atau sekitar 59% dari jumlah penduduk Indonesia (Digital, 2020). Penggunaanya tersebar ke beberapa media sosial terkenal seperti Facebook, Twitter, Instagram, Snapachat dan aplikasi sejenis yang juga memberikan kemudahan dalam berinteraksi satu sama lain.

Kecanggihan dan kemudahan dalam berinteraksi di dunia maya tersebut ternyata membawa berbagai dampak dan ancaman bagi penggunanya. Maraknya beredar berita bohong (*hoax*) merupakan salah satu kasus dari penggunaan media sosial yang tidak sesuai dengan fungsi dan aturan yang berlaku. Berita semacam ini terus menjamur di seluruh belahan dunia tidak terkecuali di negara Indonesia. Di Eropa, berita palsu (*fakenews*) bahkan dianalogikan sebagai *wire fire* atau kawat api yang meluluhlantahkan (RonaIndonesia, 2019). Tindakan seperti ini sangat meresahkan karena dapat menyebabkan kerugian baik secara langsung maupun tidak langsung bagi para pengguna aplikasi media sosial. Dan hal ini semakin memprihatinkan ketika banyak anak-anak yang dengan mudahnya mengakses dunia maya.

Media sosial semakin rentan ketika banyak bermunculan para pengguna baru yang belum mempunyai pengetahuan yang cukup akan penggunaan media sosial tersebut. Selain itu, pertumbuhan pengguna aktif yang semakin meningkat dari hari ke hari juga turut menyumbang angka kejahatan penyebaran berita bohong (*hoax*) di internet. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Mastel atau Masyarakat Telematika Indonesia tentang penyebaran berita hoax menunjukkan bahwa angka tertinggi saluran penyebaran berita hoax di Indonesia masih di dominasi oleh sosial media dengan 92.40 %. Aplikasi chatting seperti whatsapp, line dan telegram sebanyak 62.80 %, situs web 34.90 %, televisi 8.70 %, media cetak sebanyak 5 %, email 3,10 % dan yang terakhir radio sebanyak 1,20 % (Mastel, 2017).

Tabel 1.1 Prosentase Penyebaran Hoax



Sumber data : Mastel, 2017

Bentuk dari berita bohong sangatlah beragam, namun yang paling sering diterima dan beredar di masyarakat yaitu dalam bentuk tulisan, gambar dan video. Lebih lanjut, data lain dari Mastel menunjukkan bahwa jenis berita hoax yang menduduki tiga peringkat teratas merupakan berita tentang sosial politik, SARA dan yang terakhir tentang kesehatan. Bahkan sepanjang tahun 2018, menurut Kasubdit Informasi dan Komunikasi Politik dan Pemerintahan Direktorat Informasi dan Komunikasi Polhukam Kementerian Kominfo, Hypolitus menerangkan bahwa sebanyak 961.456 akun media sosial telah berhasil diblokir. Pemblokiran tersebut dikarenakan mengandung banyak berita hoax dan kebencian. Akun media sosial yang diblokir tersebut dilakukan baik oleh perorangan maupun secara kelompok.

Dengan jumlah pengguna media sosial di seluruh dunia saat ini yang mencapai 3,8 miliar, sangat tidak mengherankan apabila pengguna Facebook mencapai 1,95 miliar pengguna sekaligus menjadikannya sebagai media sosial yang paling banyak digunakan (Digital, 2020). Facebook dan sosial media pada umumnya sudah menjadi bagian dari kebebasan berekspresi. Selain itu kehadirannya yang begitu cepat menyebabkan warga di negara demokratis menganggapnya sebagai bagian dari kehidupan (Bayu Tedjo, dkk :356). *Trend* penggunaannya setiap tahun juga mengalami peningkatan seiring banyaknya masyarakat yang menggunakan *smartphone* dan jaringan koneksi internet. Namun hal itu juga selaras dengan banyaknya berita *hoax* yang bermunculan di Facebook. Sepanjang awal tahun 2020 hingga tanggal 18 April 2020, Kominfo telah memblokir sebanyak 681 berita hoax berkaitan dengan pandemi yang beredar luas di platform media sosial tersebut.

Berbagai berita *hoax* yang beredar di Facebook seperti ditemukannya obat anti virus Corona, jahe yang dianggap dapat menangkal virus, mahasiswa UNY yang terpapar virus dan berbagai berita *hoax* lainnya yang dengan mudah menjadi konsumsi publik. Bahkan dari pemberitaan tersebut, tidak sedikit

masyarakat yang meyakini khasiat jahe dalam membunuh virus Corona. Hal tersebut membuat masyarakat berbondong-bondong membeli jahe untuk di konsumsi. Dalam waktu singkat jahe mengalami kelangkaan dan harganya melonjak drastis. Peningkatan permintaan pasar tersebut tidak hanya terjadi pada jahe, melainkan rempah-rempah sejenis seperti temulawak, lengkuas dan kunyit juga mengalami kelangkaan. Namun pada akhirnya berita semacam ini langsung mendapat respon dari dari LIPI (Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia) dan meluruskan pemberitaan yang tidak mempunyai landasan medis yang kuat tersebut.

Penyebaran berita *hoax* seringkali tidak memandang situasi maupun kondisi yang sedang terjadi di masyarakat. Bahkan di dalam keadaan dunia yang sedang bertarung menghadapi pandemi Virus Covid-19 atau Corona, masih banyak orang tidak bertanggung jawab memproduksi dan menyebarkan berita bohong (*hoax*) sehingga menyebabkan kepanikan. Pemberitaan bohong yang kerap kali muncul terkait pandemi sangat beragam dan tidak hanya menyasar wilayah-wilayah yang terdampak parah pandemi, akan tetapi hampir merata terutama di pulau Jawa yang notabene telah melek internet.

Dari data yang dihimpun dari Menteri Komunikasi dan Informasi (Menkominfo) Republik Indonesia Johny G Plate per 18 April 2020 menyatakan sebanyak 554 isu *hoax* atau berita bohong tentang virus Corona atau Covid-19 telah tersebar di sejumlah platform media sosial (Anisatul Ummah, 2020). Jumlah platform penyebaran berita *hoax* tersebut mencapai 1209 platform di berbagai aplikasi media sosial seperti Facebook, Instagram, Youtube, Twitter. Data tersebut sekaligus menunjukkan bahwa masih sangat banyaknya dan mudahnya berita *hoax* beredar di masyarakat terutama dalam kondisi seperti ini.

Banyak faktor yang melatarbelakangi munculnya berita bohong (*hoax*) seperti saat ini. Hal ini sering kali terjadi mengingat kondisi yang memungkinkan dan bahkan terkadang berita yang ada hanyalah hasil dari asumsi pribadi yang tidak memiliki landasan kuat dari segi ilmiah maupun keilmuan sehingga tidak layak dikonsumsi oleh khalayak umum. Belum lagi kondisi literasi media masyarakat Indonesia yang tergolong masih rendah. Hal ini diperparah dengan arus informasi dari luar negeri yang masuk ke Indonesia tergolong banyak dan tidak sedikit berita tersebut bermuatan bohong (*hoax*).

Hunt Allcott and Matthew Gentzkow (2017) pernah melakukan penelitian tentang *hoax* dengan judul *Social Media and Fake News In the 2016 Election*. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa platform sosial media

seperti Facebook mempunyai perbedaan struktur dibanding media teknologi sebelumnya. Konten yang ada dapat disebarluaskan tanpa harus melewati 3 filter seperti penyaringan pihak ketiga, pemeriksaan fakta dan penilaian editorial. Seorang pengguna tanpa rekam jejak atau reputasi dapat digunakan dalam beberapa kasus dan menjangkau banyak pembaca seperti *Fox News*, CNN dan *New York Times*.

Pada dasarnya berita bohong atau *hoax* di Indonesia telah diatur di dalam pasal-pasal yang telah disahkan di dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (LN.2008/58, TLN 4843). Dalam Undang-Undang ini memuat beberapa pasal atau ketentuan yang dengan tegas melarang adanya. Transaksi, penyebaran atau bahkan memproduksi berita bohong melalui internet. Pasal spesifik yang mengatur tindakan berita bohong (*hoax*) yang marak beredar di masa pandemi Covid-19 adalah pasal 28 ayat 1 yang kemudian diperbarui menjadi Undang-undang Nomor 19 tahun 2016. Segala tindakan yang melanggar pasal ini akan mendapat ancaman pidana sebagaimana yang diatur dalam Pasal 45 ayat (1) UU ITE.

Metode penelitian kualitatif-deskriptif yang berguna untuk menguraikan ucapan, tulisan dan data dari objek yang diteliti. Metode ini berguna untuk menjelaskan peredaran berita *hoax* yang terjadi di platform media sosial Facebook. Model penelitian tersebut juga dapat menjelaskan dampak yang muncul bersamaan dengan beredarnya berita *hoax*. Penelitian deskriptif-kualitatif berusaha mendeskripsikan seluruh gejala atau keadaan yang ada, yaitu keadaan gejala menurut apa adanya pada saat penelitian dilakukan (Mukhtar, 2013). Dalam artian metode ini hendak menjelaskan fenomena yang ada dengan hasil yang sesungguhnya tanpa adanya rekayasa. Penelitian ini menggunakan teori fenomenologi milik Alfred Schutz dimana memfokuskan kajian pada dunia sosial yang melihat gejala-gejala yang terjadi pada interaksi sosial masyarakat. Data yang digunakan merupakan data sekunder yaitu data yang didapat dari berbagai media baik media sosial maupun media *online*, kajian ilmiah maupun jurnal, web pemerintah dan web resmi organisasi yang memiliki isu yang sama dengan tema penelitian ini. Kontemplasi data yang ada kemudian dianalisis secara mendalam oleh peneliti untuk mendapatkan suatu kesimpulan dari penelitian.

Penelitian ini menarik untuk dilakukan karena melihat semakin banyaknya pengguna baru dan semakin menjamurnya berita *hoax* di Facebook. Fenomena ini juga berkaitan dengan literasi media yang perlu ditingkatkan oleh semua kalangan. Dengan adanya pengetahuan yang cukup baik dari segi dampak,

bahaya, regulasi dan manfaat, peredaran berita *hoax* akan dapat diminimalisir. Apalagi selama pandemi Covid-19 berita *hoax* banyak diproduksi dan memicu keresahan di masyarakat. Selain itu, hasil dari penelitian ini dapat menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya serta memberikan kewaspadaan akan bahaya peredaran berita bohong atau *hoax* di media sosial.

***Hoax* di Facebook**

Kemudahan dan kecepatan dalam membagikan informasi telah menggoda masyarakat untuk menjadi pengguna Facebook. Pengguna tersebut mempunyai beberapa alasan sehingga pada akhirnya memutuskan membuat akun media sosial. Tujuan mereka menggunakan medsos adalah untuk melakukan komunikasi antara teman-teman, *happy fun* (bersenang-senang), menyebarkan informasi dan mencari penghasilan (Dedi Rianto, 2017). Hal ini tentu menambah angka jumlah pengguna Facebook di seluruh dunia termasuk Indonesia. Namun selaras dengan penambahan tersebut, menjadikan platform ini menjadi salah satu media penyebaran berita *hoax* terbanyak. Berita *hoax* tersebut sangat beragam termasuk menyangkut sosial, ekonomi, politik dan yang paling banyak mengenai kesehatan. Hal ini juga dibenarkan oleh CEO sekaligus pendiri Facebook, Mark Zuckerberg. Berita palsu atau *hoax* tidak bisa terhindarkan di era media sosial, Facebook menjadi salah satu tempat favorit untuk menyebarkan berita palsu tersebut. Ketika anda menghubungkan dua miliar orang (melalui Facebook) anda akan melihat semua keindahan dan keburukan umat manusia (Ahmad Zainudin, 2020).

Sepanjang heboh pemberitaan tentang masuknya Covid di Indonesia, laman Facebook telah memunculkan banyak berita bohong (*hoax*). Bentuknya memang tidak dalam bentuk status langsung, akan tetapi seringkali di tautkan ke sumber berita lain. Beberapa diantaranya seperti pemberitaan mengenai mahasiswa UNY yang dinyatakan positif terpapar virus Covid-19, namun ternyata berita tersebut tidak benar adanya dan langsung dibantah oleh Rektor UNY, Prof. Dr. Sutrisna Wibawa, M.Pd. Kemudian berita mengenai jahe atau lengkuas yang sering di konsumsi masyarakat Indonesia dapat menangkal virus Covid-19, sehingga masyarakat Indonesia tidak dapat tertular, akan tetapi berita tersebut juga tidak dapat dibuktikan kebenarannya. Bahkan dengan berita akan khasiat jahe maupun lengkuas tersebut menyebabkan kelangkaan dan kenaikan harga karena tingginya permintaan konsumen.

Gambar 1. Kelangkaan Jahe dan Kunyit di Pasaran



Sumber : Liputan6.com,2020

Beredarnya berita *hoax* semacam ini tentu dapat membuat keresahan terutama masyarakat awam. Selain itu, indikasi lain menyebutkan bahwa diproduksi berita *hoax* digunakan sebagai alat perpecahan atau propaganda. Seperti yang dibagikan di laman Facebook bernama Sayuti Ibrahim. Postingan akun tersebut melampirkan link video youtube dengan judul “Waspadalah : Hati2 Alat. Ini Sudah di Setting Suhu 36-37°C Oleh Komunis China utk membunuh Para Ulama”. Berita tersebut dilengkapi dengan video sehingga dapat meyakinkan pengguna lain akan kebenaran judul tersebut.

Gambar 2. Contoh Berita Hoax



Sumber : turnbackhoax.id,2020

Produsen berita *hoax* juga tidak segan-segan mencatumkan nama pejabat publik seperti yang terjadi di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Muncul berita anjuran Sri Sultan Hamengkubuwono X atau Gubernur DIY untuk mengkonsumsi sayur lodeh tujuh warna yang dianggap mampu menangkal virus Corona. Hal ini langsung mendapatkan respon luas dan bahkan banyak masyarakat mengkonsumsi sayur lodeh tersebut. Sejumlah warga di Kabupaten Bantul, tepatnya Kampung Kepuhan Gonanag, Pedukuhan Ngasem, Desa Timbulharjo, Kecamatan Sewon juga memasak sayur lodeh (Gunadha Reza, 2020). Namun berita tersebut akhirnya dibantah oleh Kahumas Biro Humas Umum dan Setda DIY yang menyatakan bahwa berita tersebut tidak benar adanya, bukan merupakan informasi resmi dari Humas Pemda DIY maupun Kraton (Sasmito A, 2020).

Gambar. 3. Anjuran Sultan HB X selama Pandemi



Sumber : *turnbackhoax.id,2020*

Data yang dilansir dari Kementerian Komunikasi dan Informasi per 8 April 2020 menyatakan selama terjadinya kasus Covid-19 di Indonesia, sudah terjadi penyebaran berita bohong *hoax* sebanyak 468 kasus di berbagai platform. Dengan jumlah penyebaran berita yang beragam di media sosial mainstream. Jumlah paling banyak penyebaran tersebut masih didominasi oleh Facebook, kemudian Instagram, setelah itu Twitter dan yang terakhir Youtube dan jumlah tersebut terus mengalami kenaikan. Terhitung per tanggal 18 April 2020 sudah tercatat sebanyak 554 kasus berita *hoax*.

Kapolda Kalbar, Irjen Didi Haryono dalam acara “Milenial Anti *Hoax*” yang diadakan di Pontianak menjelaskan sedikitnya ada empat tujuan

penyebaran berita *hoax*. Berita tersebut diciptakan untuk mengadu domba, menyebarkan fitnah-fitnah dan mencemarkan nama baik, membuat cemas dan perang menggunakan jaringan (mempengaruhi orang lain). *Hoax* paling banyak berkaitan dengan sosial politik, kesehatan dan SARA. Kemudian data yang paling banyak disebar dalam bentuk tulisan sebanyak (62,10%), gambar (37 %) dan video sebanyak (0,40%) dan saluran penyebaran paling banyak ada di media sosial (Oktaviani Isa, 2020).

Banyak kekacauan dan kepanikan yang terjadi akibat beredarnya berita *hoax*. Salah satu yang paling menyita perhatian adalah ramalan tentang Virus Covid-19 yang ada sejak 2016 yang di unggah di laman Facebook bernama Eka Pras (Rachmawati,2020). Kasus ini akhirnya diberitakan di berbagai media nasional seperti Kompas dan TribunNews. Eka mengaku mengedit posting sebelumnya kemudian di *screenshoot* dan setelah itu dijadikan story WA yang akhirnya menjadi viral. Postingan berita tersebut akhirnya dengan cepat menyebar di platform Facebook.

Pencarian lain mengenai penyebaran *hoax* selama pandemi menemukan fakta bahwa iklan masih menjadi komoditas utama untuk mencari penghasilan. Seperti yang diberitakan liputan6.com, Facebook mengumumkan bahwa pemberitaan palsu memiliki motif uang. Penyebaran berita palsu menghasilkan uang dengan menyamar sebagai organisasi media terkenal dan memuat berita *hoax* yang mengundang pembaca untuk mengunjungi situs mereka, padahal kebanyakan situs mereka adalah iklan (Corry Anastasia, 2020). Adanya temuan kepolisian sebesar 5000 Dollar (69 juta) pada tahun 2019 yang dibagikan kepada pengguna Facebook dan Instagram untuk menyebarkan materi *hoax* semakin memperkuat bisnis ini terus tumbuh subur. Lebih lanjut, Septiaji Eko Nugroho sekaligus perwakilan Masyarakat Anti Hoax menyatakan ada dua otak dibalik penyebaran berita dan informasi *hoax* di Indonesia yaitu Postmetro dan Nusanews. Aksi yang mereka lakukan itu mampu mendulang keuntungan yang masif dengan angka mencapai 700 jutaan pertahun dan dengan trafik yang besar meskipun namanya tidak banyak dikenal orang (CNNIndonesia, 2020).

Kerugian materil akibat berita *hoax* selama masa pandemi juga pernah terjadi kepada para pengguna Facebook. Detik-Palembang melaporkan bahwa ada satu korban yang terkena imbas dari berita bohong (*hoax*) bernama Sakdiah berusia 40 tahun. Penipuan tersebut terjadi akibat tawaran sembako murah yang diberikan oleh pelaku. Karena Sakdiah tergiur dengan tawaran tersebut, akhirnya mereka berkomunikasi melalui pesan singkat di Whatsapp. Setelah komunikasi berlangsung, Sakdiah akhirnya mentransfer uang sebesar

11 juta kepada pelaku sebagai syarat pengiriman sembako murah tersebut. Namun seminggu setelah tanggal pengiriman, barang tidak kunjung datang dan bahkan nomor pelaku tidak dapat dihubungi. Korban akhirnya menyadari bahwa dia adalah korban penipuan berita sembako murah di Facebook. Kasus ini akhirnya dilaporkan ke Kepolisian Terpadu Polrestabes Palembang untuk diurus.

Dari beberapa kasus diatas, dapat disimpulkan setidaknya ada 4 dampak negatif dari keberadaan berita bohong (*hoax*) di media sosial Facebook seperti : (1) membentuk persepsi dan tindakan; (2) sarana penipuan publik; (3) memicu kepanikan dan keresahan serta (4) membuang waktu dan uang.

Modus yang sering dilakukan produsen *hoax* tergolong tersistem dan terstruktur dengan baik. Beberapa kasus penipuan tidak hanya bekerja secara personal, melainkan mempunyai kelompok khusus dalam melaksanakan kejahatan yang mereka lakukan. Mereka juga di bekali kemampuan yang baik dalam menggunakan media sosial. Mantan Menkominfo Rudiantara menyampaikan modus *hoax* di media sosial Facebook yakni dengan cara memposting dan *men-screenshoot* postingannya, namun setelah selesai pemilik akun akan segera menutup akun tersebut dan kemudian disebarakan melalui pesan instan (Liputan6, 2020). Tindakan seperti ini bertujuan agar pelaku dapat menghilangkan barang bukti yang ada.

Faktor yang menyebabkan beredar luasnya berita maupun konten yang mempunyai muatan bohong atau *hoax* dimasa pandemi Covid-19 seperti saat ini bervariasi. Berikut beberapa data terhadap faktor penyebaran yang diambil dari beberapa sumber terpercaya : (1) Literasi publik terhadap pesan-pesan di media sosial masih rendah; (2) Hal ini berkaitan erat dengan pengetahuan dan daya analisis terhadap pesan maupun berita yang beredar luas di sosial media; (3) Dunia media sosial merupakan sesuatu yang baru bagi masyarakat Indonesia; (4) Terbatasnya perhatian manusia dan banyaknya informasi yang muncul di internet; (5) Karakteristik masyarakat; (6) Kondisi maupun situasi yang mendukung dan (7) Kemudahan mendapatkan informasi

Identifikasi dan Pencegahan

Penyebaran berita bohong (*hoax*) di media sosial seperti Facebook selaras dengan karakteristik masyarakat penggunanya. Berkaitan dengan karakteristik tersebut, Ryan Ariesta dari Analisis Political Waves menjelaskan bahwa pengguna yang cepat mengambil kesimpulan tanpa adanya klarifikasi dapat melatarbelakangi Facebook menjadi sarang penyebaran *hoax*. Fakta ini diperkuat dari Guru Besar Ilmu Komunikasi Universitas Padjajaran Bandung,

Dedi Mulyana yang mengungkapkan bahwa memang sejak dulu Indonesia senang berkumpul dan bercerita. Akan tetapi kegiatan tersebut tidak dibarengi dengan kemampuan pengolahan data, sehingga apa yg dibicarakan belum tentu kebenarannya. Mengutip dari kalimat Mastel.id (Masyarakat Telematika Indonesia) yang relevan dengan kondisi Indonesia menyebutkan bahwa sebenarnya banyak masyarakat yang tidak langsung mempercayai berita yang ada, akan tetapi mereka kesulitan mendapatkan referensi dalam upaya menangkal berita yang janggal.

Kelemahan mendasar tersebut tentu berdampak luas terhadap keberadaan berita *hoax* di Facebook. Kemudian hal ini juga dapat menjadi indikasi lemahnya tingkat edukasi masyarakat Indonesia. Berita *hoax* mengakibatkan masyarakat menjadi keliru dalam memahami suatu kejadian dan menyebabkan kurang informatif. Sebagai tanggug jawab tersebut, Facebook telah berupaya meningkatkan pemahaman tersebut dengan merilis berbagai identifikasi berita *hoax* yang ada di platform media mereka. Setidaknya ada sepuluh (10) tips dalam mengidentifikasi keberadaan berita *hoax* terutama ditengah kondisi pandemi Covid-19, seperti : (1) Jangan langsung percaya dengan judul, Bersikap skeptis terhadap judul berita yang terkadang bombastis, spektakuler, menggunakan huruf kapital dan tanda seru. Judul seperti ini memang sering dibuat untuk menarik rasa penasaran pembacanya; (2) Perhatikan alamat URL berita, Produsen berita *hoax* seringkali membuat URL menyerupai URL asli dari situs ternama dan berpura-pura sebagai sumber berita autentik. Bandingkan URL yang mencurigakan dengan URL sumber terpercaya untuk mengantisipasi salah URL; (3) Selidiki sumbernya, Pastikan berita yang beredar memiliki reputasi yang baik. Apabila muncul berita dari organisasi yang tidak jelas maka dapat diantisipasi dengan membaca bagian “tentang” di situs mereka; (4) Amati bila ada performatan yang tidak wajar, Banyak situs berita bohong (*hoax*) mempunyai banyak kejanggalan seperti kesalahan ejaa, tata letak yang tidak terstruktur dan *misleading*; (5) Cek fotonya, Berita bohong memanipulasi korbanya dengan menempatkan foto atau gambar sehingga lebih meyakinkan. Terkadang foto yang ada memang asli, namun konteks berita yang ada berbebeda. Penulusuran foto atau gambar yang ada dapat menjadi kunci keasliaan foto atau gambar tersebut; (6) Periksa tanggalnya, Periksa kembali berita dan amati linimasa yang ada. Karena terkadang berita palsu memiliki linimasa yang tidak masuk akal atau tanggal peristiwa yang sudah di ubah; (7) Periksa buktinya, Pelaku kejahatan berita bohong sering tidak mencantumkan sumber yang jelas dan tidak adanya rujukan materi ke ahli terkait. Hal itu mengindikasikan kabar berita palsu; (8) Lihat laporan

lainnya, *Crosscheck* terhadap laporan berita lainnya juga berpengaruh terhadap kredibilitas berita. Apabila berita tersebut diberitakan oleh sumber berita yang autentik dan terpercaya, maka dapat dipastikan pula berita tersebut terbukti kebenarannya; (9) Apakah berita tersebut hanya lelucon?, Amati dengan teliti sumber berita yang ada, pastikan apakah berita tersebut lelucon atau tidak dengan melihat postingan lainnya yang ada di akun tersebut dan (10) Beberapa berita memang sengaja dipalsukan

Penelitian dari Muhammad Iqbal (2019:7) menjelaskan ciri yang lebih spesifik mengenai keberadaan berita *hoax*. Beberapa rangkuman dari ciri berita *hoax* meliputi penggunaan bahasa yang sangat emosional dan provokatif, menyarankan pengguna untuk mengklik, mengshare dan melike tulisan mereka dengan nada lebay, misalnya “jika anda seorang muslim klik..”, “rugi kalo tidak di klik”, “klik sebelum keluarga anda menjadi korban Covid-19” dan menarik perhatian pengguna dengan memasang foto wanita cantik dan seksi. Konten berita mengenai isu SARA juga menjadi domain utama penyebaran berita bohong.

Pengaturan transaksi informasi elektronik yang beredar di masyarakat sudah seharusnya mempunyai ketegasan hukum. Hal ini untuk meminimalisir berita bohong. Idealnya transaksi harus didasarkan pada kepercayaan antara para pihak yang bertransaksi (*mutual trust*) (Iqbal,2019:7). Penanganan berita bohong (*hoax*) di Indonesia telah diatur dalam beberapa pasal maupun undang-undang yang mempunyai relevansi substansi yang sama. Dari beberapa landasan hukum tersebut yang paling sesuai digunakan oleh pihak berwajib dalam mengatur transaksi elektronik disaat pandemi Virus Covid-19 saat ini yaitu pasal 28 ayat 1 tentang Undang-Undang Informasi Transaksi Elektronik atau yang lebih dikenal dengan sebutan UU ITE. Pasal 28 ayat 1 ini sebagai mana yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik (UU 19/2019) yang mengatur penyebaran berita bohong di media elektronik (termasuk media sosial).

Bunyi Pasal 28 ayat 1 yang telah di ubah menjadi UU Nomor 19 Tahun 2016 menyatakan bahwa “*Setiap orang dengan sengaja, dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan dan mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik.* Pemerintah dengan tegas melarang adanya produksi maupun penyebaran konten atau berita yang mengandung muatan yang tidak sesuai aslinya (*hoax*) sehingga dapat menyebabkan kerugian bagi orang lain, dalam artian konsumen. Sanksi tegas pelanggaran pasal ini termuat dalam pasal 45 ayat 1 yang berbunyi ”Setiap orang yang

dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang menyebabkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik di pidana dengan pidana penjara paling lama enam tahun dan denda paling banyak Rp.1.000.000.00,00 (Satu Miliar Rupiah).

Tindak pidana dalam ayat satu (1) terdiri dari unsur-unsur berikut :

1. Kesalahan:dengan kesengajaan
2. Melawan hukum : tanpa hak
3. Perbuatan : menyebarkan
4. Objek : berita bohong dan menyesatkan
5. Akibat konstitutif: mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik.

Ruang lingkup yang luas dan ancaman yang terhitung berat tersebut ternyata belum sepenuhnya mampu meminimalisir angka penyebaran berita *hoax*. Tercatat sepanjang bulan April sampai awal Mei 2020, Kepolisian Republik Indonesia telah memproses sebanyak 443 kasus berita *hoax* dan ujaran kebencian yang tersebar di sejumlah media sosial seperti Facebook, Instagram dan Twitter. Bahkan 14 kasus telah masuk sampai tingkat penyidikan dan total ada 10 tersangka dalam kasus tersebut. Tersangka dijerat pasal 28 Juncto pasal 45 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) Juncto Pasal 14 UU Nomor 1 tahun 1946 tentang peraturan hukum pidana dan Pasal 207, 208 Ayat 1 KUHP (Tribunnews, 2020).

Selain tindakan tegas dari sisi hukum, perlu adanya edukasi lebih dari sisi literasi media. Rendahnya kesadaran literasi masih menjadi salah satu faktor pendorong masifnya peredaran berita bohong (*hoax*). Budaya baca yang rendah menyebabkan masyarakat dengan mudahnya menelan informasi secara instan dan utuh. Hal ini relevan dengan data UNESCO (Organisasi Pendidikan, Ilmu Pengetahuan dan Kebudayaan Perserikatan Bangsa-Bangsa) pada 2012 menyebutkan indeks membaca masyarakat Indonesia hanya 0,001. Artinya diantara 1000 orang , hanya 1 orang yang membaca dengan serius (Kominfo, 2020). Demikian juga dengan data dari *Most Literated Nation In The World* pada 2015 menyebutkan ranking Indonesia berada peringkat 60 dari 61 Negara. Fakta yang sangat memprihatinkan ketika teknologi informasi dan perkembangan internet menjadi konsumsi utama masyarakat modern di Indonesia seperti saat ini.

Literasi media merupakan istilah yang sering digaungkan oleh para praktisi, pejabat pemerintah, pegiat media sosial bahkan akademisi dalam kaitannya untuk memberikan solusi memberantas berita *hoax*. Istilah literasi media yang ada mempunyai pengertian sebagai kemampuan untuk mengakses,

menganalisis, mengevaluasi, dan mengkomunikasikan pesan (Yolanda Adelia, 2018 : 18). Istilah tersebut muncul atas jawaban maraknya persepsi masyarakat tentang dampak yang timbul akibat isi (*content*) berita yang cenderung negatif atau bahkan merupakan berita bohong (*hoax*). Urgensi kajian literasi ini penting karena dampak yang ditimbulkan meliputi dampak kognitif, afektif dan konatif terutama bagi anak-anak (Isda Fitriyani, 2016).

Perwakilan dari kantor UNICEF (Organisasi Pendanaan bagi Anak-anak) untuk Kroasia, Regina M Castilo menjelaskan bahwa penggunaan media sosial oleh anak-anak, remaja dan dewasa selama isolasi mandiri yang disebabkan pandemi Covid-19 mengalami kenaikan yang begitu signifikan. Kekhawatiran muncul karena hal tersebut dapat menambah risiko anak-anak menemukan konten tidak pantas seperti berita bohong (*hoax*) dan bahkan kekerasan online. Akan tetapi, selaras dengan peningkatan risiko tersebut, minat terhadap literasi media juga mengalami kenaikan. Tercatat hingga bulan April 2020, materi literasi media bagi anak-anak guru dan orang tua di situs edukasi global *medijskapismenost.hr* mengalami peningkatan sebesar 300 % (UNICEF, 2020). Keterlibatan orang tua berperan penting dalam meningkatkan minat anak-anak terhadap literasi media.

Melalui peningkatan dan pendidikan literasi media bagi setiap masyarakat pengguna internet (*netizen*) yang terukur. Seperti upaya mempersiapkan individu yang sadar akan pentingnya informasi, penjabaran akan hak dan kewajiban serta tanggung jawab dalam menggunakan media akan memberikan pemahaman media yang berbeda dari sebelumnya. Literasi media juga dapat dirancang untuk meningkatkan kesadaran dari individu atau pengguna terhadap media yang mereka gunakan dalam mengirim dan menerima pesan. Hal ini dirasa sangat bermanfaat untuk mengurangi penyebaran berita hoax terutama menciptakan kondusifitas, kesesatan maupun tindakan yang berujung konflik.

Tindakan sederhana tentang konsep literasi media dalam memberantas berita bohong yaitu dengan meningkatkan kesadaran akan norma atau aturan yang berlaku. Secara operasional, peran literasi media dan peraturan tentang kegiatan bertransaksi di media elektronik haruslah dapat memberikan kesadaran penuh para pengguna media tersebut. Masyarakat harus paham bahwa berita yang tersebar di media elektronik mempunyai dampak yang luas dan dapat mempengaruhi siapapun yang membacanya. Apalagi bagi mereka yang mempunyai daya literasi yang rendah dan tidak dibarengi analisis yang kuat.

Penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa FISIP Universitas Mulawarman dalam jurnalnya berjudul Literasi Media Pada Mahasiswa Prodi Ilmu

Komunikasi memberikan gambaran bahwa tingkat literasi media dipengaruhi oleh lingkungan dan fasilitas yang mendukung. Hasil tersebut didapatkan karena adanya keharusan bagi mahasiswa untuk mengakses sumber berita yang akurat untuk tugas mereka dan diiringi adanya akses internet yang baik. Sehingga ruang gerak berita *hoax* sangat minim beredar di perguruan tinggi.

Pengelola media juga mempunyai peran yang sangat penting dalam meminimalisir penyebaran berita *hoax* Covid-19 terutama dalam memberikan edukasi yang cukup tentang sumber yang kredibel. Usaha dari media sosial yang mengarahkan langsung berita-berita terkait Covid-19 yang saat ini merupakan tingkat urgensi yang paling tinggi (Bayu Tedjo, 2020 : 356). Keberadaan media sosial seperti Facebook sejatinya dapat berperan sebagai pelengkap ke sarana resmi seperti web pemerintah untuk pengumpulan data kesehatan, yang sebelumnya telah dianggap sukses seperti kegiatan pengawasan epidemiologi dan kontrol yang dilakukan oleh otoritas kesehatan (Hanson, dkk, 2011). Hal ini sudah di aplikasikan di platform twitter dan Instagram. Namun sangat disayangkan Facebook dengan jumlah pengguna yang begitu banyak dan menjangkau semua lapisan masyarakat masih belum tersedia.

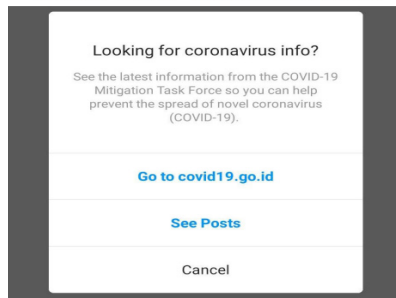
Notifikasi di Twitter bahkan sudah ada sejak bulan Februari dan di umumkan langsung melalui akun resmi Twitter Indonesia. Notifikasi tersebut langsung tersambung ke web Kementerian Kesehatan Republik Indonesia (Kemenkes RI). Muatan berita yang disediakan mencakup informasi perkembangan terkini, aneka infografik hingga arahan dari WHO soal pencegahan infeksi. Upaya lainnya juga dilakukan oleh Instagram dengan menautkan pengguna ke web resmi pemerintah. Bahkan media sosial yang identik dengan gambar dan video itu banyak mempromosikan masyarakat untuk *work from home* melalui stiker di *instagram story*.

Gambar 5. Berita Covid di Twitter



Sumber : Twitter,2020

Gambar 6. berita Covid di Instagram



Sumber : Instagram, 2020

Kendati tidak adanya rujukan utama tentang berita Covid-19 seperti yang dilakukan oleh Instagram dan Twitter, Facebook menyampaikan bahwa mereka senantiasa melakukan program edukasi literasi berita dan menambah jumlah kemitraan dengan akademisi, perusahaan teknologi dan mitra-mitra lainnya untuk mengurangi penyebaran berita palsu (Detik, 2018). Selain itu, Facebook juga berkomitmen untuk memastikan para pengguna aplikasi media sosial mereka mendapatkan akses informasi yang terpercaya dan akurat. Pada tahun 2017, Facebook telah menginisiasi pertemuan pertama Grup Literasi Asia Pasifik atau *Asia Pacific News Literacy Grup* yang menggandeng The University of Hongkong (HKU) dan The Society of Publisher Asia (SOPA). Pada pertemuan tersebut sedikitnya telah mengumpulkan lebih dari 40 pakar dari berbagai kantor berita, publisher, platform, institusi pendidikan dan organisasi pihak ketiga di seluruh kawasan Asia Pasifik termasuk Hongkong, Singapura, Indonesia Filipina, Myanmar, Taiwan, dan Australia.

Seperti yang diberitakan oleh Koran Warta Ekonomi, Facebook juga memberikan layanan iklan gratis bagi WHO sebagai bentuk upaya untuk memastikan pengguna tidak salah informasi tentang virus, risiko, dan cara bereaksi terhadapnya. Peran Facebook lainnya dalam mengencarkan kampanye literasi media adalah dengan meluncurkan program Asah Digital. Ruben Hatari, selaku kepala Kebijakan Publik Facebook Indonesia menjelaskan program ini merupakan program peningkatan literasi global Facebook yang dilokalkan, menyesuaikan dengan kondisi negara yang dituju. Target peserta dari program tersebut mencapai dua (2) juta orang dari 10 negara di Asia Pasifik. Dengan program tersebut, Facebook berharap dari peserta penerima latihan akan menjadi agen pelatihan juga bagi komunitas dan masyarakat di sekelilingnya.

Komitmen pemberian edukasi dan literasi berita oleh Facebook

merupakan salah satu itikad baik dalam memerangi berita hoax dan membantu para penggunaannya mempunyai kemampuan literasi yang baik. Sudah seharusnya peningkatan literasi media dan penyediaan sumber berita yang kredibel mendapatkan perhatian lebih dari pemerintah. Upaya ini turut memberikan batasan yang jelas tentang apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan sebagai warga negara ketika menggunakan media. Di negara-negara maju seperti Inggris, Kanada, (terutama Ontario), Australia, Finlandia, Denmark, Norwegia, Belanda, Swedia, Perancis dan Switserland kemampuan dan kecakapan literasi media diajarkan melalui kurikulum sekolah. Potter menyebutkan setidaknya ada 5 unsur struktur pengetahuan yang mendasari perspektif literasi media seseorang. Struktur pengetahuan tersebut yaitu pengetahuan tentang konten media, pengetahuan tentang industri media, pengetahuan tentang efek media, pengetahuan tentang informasi dunia nyata dan pemahaman diri (Potter, 2004).

Kondisi seperti saat ini memang membutuhkan berbagai informasi, namun kecepatan informasi bukan lagi menjadi hal utama. Pengecekan fakta (*fact check*) harus menjadi *mindset* bersama dan hal tersebut sangatlah penting. Kemudian keberadaan lembaga pendidikan independen seperti kampus sudah selayaknya berperan aktif terhadap tingkat literasi media di masyarakat. Gerakan yang dilakukan oleh kampus haruslah dapat menyebarkan nilai positif. Salah satunya dengan meningkatkan kesadaran masyarakat dalam menerima materi berita yang bernilai pendidikan dan kemanusiaan. Dalam konteks ini, berita dapat diangkat dari budaya sendiri yang penuh kearifan lokal (Isda Fitriyani, 2018 : 56). Selain itu, tindakan nyata peningkatan literasi oleh sivitas akademika dapat dilakukan melalui seminar, pengembangan masyarakat berbasis edukasi media, maupun kolaborasi dengan *stakeholder* terkait.

Penutup

Dari pembahasan yang telah disampaikan diatas maka dapat kita ambil kesimpulan bahwa semakin marak beredarnya berita hoax yang ada saat ini, selaras dengan semakin canggihnya teknologi informasi yang ada. Berbagai kemunculan seperti obat pencegah Corona dan mencatut pejabat publik menunjukkan masih adanya orang-orang yang tidak bertanggung jawab sehingga melahirkan berita hoax semacam ini. Kemunculan berita *hoax* secara global di Indonesia mempunyai signifikansi dari tahun ke tahun. Bahkan di masa seperti Pandemi Covid-19 masih ditemukan lebih dari 500 kasus berita *hoax* yang beredar di masyarakat. Berita semacam ini bersifat paralel dengan rendahnya literasi media masyarakat Indonesia. Dari sekian

banyak pengguna media sosial dari berbagai kalangan, hanya sebagian saja yang sadar akan pentingnya literasi media.

Peningkatan literasi media dan penegakan UU ITE merupakan salah satu langkah preventif untuk mencegah maraknya kasus serupa di Indonesia. Hal ini juga menjelaskan pentingnya kesadaran seluruh elemen masyarakat dan penegak hukum untuk berkomitmen secara bersama-sama memberantas beredarnya berita bohong (*hoax*). Peran terpenting adalah kehadiran pengelola media sosial sebagai garda terdepan pelopor penyedia berita atau konten yang kredibel. Hal ini dapat terlihat dari adanya tautan ke sumber berita pemerintah tentang Covid-19 yang ada di Twitter dan Instagram. Dengan itu semua, hak masyarakat untuk mendapatkan berita yang terpercaya dan mempunyai nilai edukasi dapat di maksimalkan sehingga terhindar dari berbagai kesesatan dalam bersosial media.

Berdasarkan hasil tersebut, penelitian berkelanjutan mengenai berita bohong *hoax* di Facebook dan media sosial pada umumnya harus terus diupayakan. Selain itu, sangat penting untuk merumuskan masalah dan merumuskan penanganan peredaran berita bohong yang efektif dengan berbagai pihak atau *stakeholder* terkait sehingga penelitian selanjutnya dapat langsung diaplikasikan. Dengan pembahasan singkat tentang penyebaran berita *hoax* di Facebook ini, semoga dapat menjadikan referensi bagi para peneliti lain dalam upaya meningkatkan kesadaran masyarakat dalam menggunakan media sosial dengan bijak.

Daftar Pustaka

Buku:

- Mukhtar *Metode Penelitian Deskriptif Kualitatif*. Jakarta : Gp Press Group. (2013).
- Potter, J. *Theory of Media Literacy : A Cognitive Approach* Thousands Oaks, CA: Sage Publications. (2004)
- Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia

Skripsi:

- Yolanda Adelia P. *Literasi Media Terhadap Berita Pada Heacy User Media Sosial line Today*. (Skripsi Universitas Negeri Lampung. Hal 18. (2018)

Jurnal:

- Arif Rauf. *Internet as a Hopeor a Hoax For Emerging Demovraticies : Revisiting the Concept of Citizenship in a Digital Age*. Procedia- Journal of Social and Behavioral Science. (2016)
- Bayu Tedjo S, Muhammad dkk. *Budaya Media Sosial, Edukasi Masyarakat dan Pandemi Covid-19*. Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i. Vol 7 No. 6 tahun 2020 hal 356
- Budiana I Nyoman dkk. *Fighting Hoax and Hate Speech by Strengthening The Spirit of Pancasila in Preventing Disintegration of The Nation*. International Jurnal of Sociological Jurispudence. Vol.2 No 1.(2019)
- Dedi Rianto Rahadi. *Perilaku Pengguna dan InFormasi Hoax di Media Sosial*. Jurnal Manajemen dan Kewirausahaan. Vol 5 No.1 2017. Hal 67
- Fitriyarini, Isda. *Literasi Media Pada Mahasiswa Prodi Ilmu Komunikasi Universitas Mulawarman*. Jurnal Komunikasi. Vol. 8, No. 1 , Juli 2016 . Hal 56
- Guntarto, Bobi. *Tantangan dalam kegiatan Literasi Media di Indonesia*. Jurnal Ilmu Komunikasi Ultimacom. Vol 8 No. 1(2016).

- Hanson dkk, *Use and Acceptance of Social Media among Health Educators*. American Journal of Health Education 42, No 4 (2011) hal 198
- Hunt Allcott and Matthew. *Social Media and Fake News In the 2016 Elction*. Journal of Economic Perspectives. Volume 31, Number 2.Spring 2017 hal 211–236
- Iqbal, Muhammad. *Efektifitas Hukum dan Upaya Menangkal Hoax Sebagai KONSEWAKUNSI Negatif Perkembangan Interaksi Manusia*. Jurnal Untidar . Vol 3, No 2 (2019). Hal 7
- Lee, A. *Media Education : Definition, Approaces and Development Arround the Globe*.New Horizon in Education. Vol 58, No 3 Desember 2010 hal 1-13
- Marwan Raffi M. *Analisis Penyebaran Berita Hoax Di Indonesia*. Jurnal Universitas Ghundarma
- Mulawarman dkk. *Perilaku Pengguna Media Sosial beserta Implikasinya ditinjau dari Persepektif Psikologi Sosial Terapan*. Jurnal Buletin Psikologi 2017. Hal 37
- Ngafifi Muhammad. *Kemajuan Teknologi dan pola Hidup Manusia dalam perspektif Sosial Budaya*. Jurnal Pembangunan Pendidikan : Fondasi dan Aplikasi (2014). Hal 37
- Klau Lekik, Oktavianus dkk. *The Descriptive Analysis of Hoax Spread Through Social Media In Indonesia Media Perspective*. Researchgate (2019)
- Shunhaji Akhmad.(2020) *Pendidikan Anti Hoaks Era 4.0 Perspektif Al-Qur'an*. Jurnal Studi Al-Qur'an. Vol 16. No 1
- Vibriza Juliswara. *Mengembangkan Model Literasi Media yang Berkebhinekaan dalam Menganalisis Informasi Berita Palsu (HOAX) di Media Sosial*. Jurnal Pemikiran Sosiologi. Vol 4 No 2 Agustus (2017)

Website:

- Anestia, Corry. *Pengguna Kini Bisa Laporkan Berita Hoax di Facebook, ini Caranya*. Diakses 11 juli 2020 . Lihat situs : <http://m.liputan6.com/teknologi/read/12680259/Pengguna-kini-bisa-laporkan-berita-hoax-di-Facebook-ini-caranya>
- Bintoro, Agung Sugiharto. *Penyebara Berita Hoax di Indonesia Bisa Raup Rp.700 Jutaan*. Diakses : 11 Juli 2020. Lihat situs : <http://m.cnnindonesia.com/teknologi/201612020885641-185-176767-penyebara-berita-hoax-di-indonesia-bisa-raup-rp-700-jutaan>
- Habibie, Nur. *Menkominfo : Hoaks Terbanyak terjadi di Facebook dan Instagram* Di Akses 10 Juli 2020. Lihat Situs : <http://m.liputan6.com/news/read/13928066/menkominfo-hoaks-terbanyak-terjadi->

di-Facebook-dan-istagram

Tim Manadon. *Ada 443 Hoaks Selama Pandemi Corona*. Di akses 10 Juli 2020.

Lihat situs : <http://www.google.com/amp/s/manado/tribunnews.com/amp/2020/05/05/ada-443-hoaks-selama-pandemi-Corona>

Tri Haryanto, Agus. *10 Tips Identifikasi Hoax Ala Facebook*. Di akses 12 Juli 2020. Lihat situs : www.m.detik.com/inet/tips-dan-trik/d-4247082/10-tips-identifikasi-hoax-ala-Facebook

www.Detak-Palembang.com/2020/04/pandemi-Covid-19-hati-hati-sembako-murah-lagi-marak. Diakses 12 Juli 2020

<https://tekno.kompas.com/read/2019/07/20/16370017/hampir-setengah-penduduk-bumi-sudah-melek-media-sosial>

www.CNNIndonesia.com

www.CNNIndonesia.com

www.Detik.com

www.Hukumonline.com

www.mafindo.or.id

www.Kominfo.go.id

www.Polri.go.id

[www.PMJ news](https://www.PMJnews.com)

www.Suara.com

www.turnbackhoax.id

[www. UNICEF.org](https://www.UNICEF.org)

**Meningkatnya Kejahatan Pencurian
Kabupaten Klaten di Masa Pandemi
Covid-19**

Nurul Fitriana

*Prodi Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan
Humaniora, UIN Sunan Kalijaga
Email: fitriananurul099@gmail.com*

Pendahuluan

*C*orona Virus Disease 2019 atau yang sering kita kenal dengan sebutan Covid-19 merupakan virus yang menyebabkan penyakit ringan hingga berat. Kasus pertama munculnya virus ini ialah pada bulan Desember 2019 di Wuhan Provinsi Hubei. Virus ini menular dari hewan ke manusia dan dari manusia ke manusia lainnya. Sejak akhir Desember 2019 virus ini semakin pesat menyebar di berbagai penjuru, baik di negara China sendiri dan menyebar ke negara-negara lain seperti Korea Selatan, Jepang dan Thailand (Aditya, 2020). Kemudian pada 2 Maret 2020 Presiden Joko Widodo mengumumkan secara resmi bahwa dua warga negara Indonesia positif Covid-19, diketahui bahwa dua warga tersebut telah mengadakan kontak fisik dengan warga negara Jepang yang datang ke Indonesia (Baskara, 2020).

Semakin hari jumlah kasus positif Covid-19 semakin bertambah dan menyebar ke berbagai provinsi di Indonesia. Karena kondisi yang semakin darurat memaksa beberapa daerah sentral untuk melakukan PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar) dengan meniadakan semua kegiatan yang akan membuat perkumpulan orang banyak, bahkan semua warga di Indonesia dianjurkan untuk di rumah saja. Semua kegiatan dan pekerjaan yang bisa dilakukan di rumah dialihkan untuk dikerjakan di rumah masing-masing, hal ini bertujuan untuk menekan persebaran virus yang semakin pesat. Bahkan semua sektor industri baik pabrik, mall, toko-toko akhirnya ditutup untuk sementara waktu.

Akibat ditutupnya berbagai sektor industri di kota-kota besar mengakibatkan warga perantau kembali ke desa mereka masing-masing. Provinsi Jawa Tengah sendiri memiliki jumlah pemudik yang banyak, dilansir dari salah satu surat kabar bahwa 897.713 orang telah kembali ke berbagai daerah Jawa Tengah (Rahma, 2020). Tidak terkecuali warga Klaten Provinsi Jawa Tengah, banyak dari warga Klaten yang merantau ke kota-kota seperti

Jakarta, Bekasi, Surabaya, dan kota-kota lain. Karena banyak dari mereka yang kehilangan pekerjaan maka mereka memilih untuk pulang ke daerah asal karena tidak memiliki pemasukan dan biaya hidup yang tinggi jika tetap tinggal di kota. Di Kabupaten Klaten sendiri jumlah pemudik terhitung banyak, menurut Roni Reokmito jumlah pemudik pada kisaran bulan Maret sampai 26 Mei 2020 mencapai jumlah 25.423 orang yang tersebar di 26 kecamatan (Syauqi, 2020). Dari pendataan gugus tugas tingkat Rw di 26 kecamatan di Klaten, Kecamatan Bayat tercatat sebagai daerah dengan jumlah pemudik yang paling banyak yaitu mencapai 1.688 orang per 7 April 2020 (Kridhangkara, 2020).

Dengan adanya himbauan untuk seluruh masyarakat Indonesia agar tetap di rumah saja membuat banyak dari mereka mengalami kesulitan ekonomi. Tidak dipungkiri bahwa dengan ditutupnya berbagai sektor ekonomi semakin menambah sulit masyarakat untuk mendapat pekerjaan guna memperoleh pemasukan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Oleh karena itu ada sebagian orang yang memilih jalan pintas untuk dapat memenuhi kebutuhan mereka dengan cara mengambil barang milik orang lain atau mencuri, akibatnya dimasa pandemi Covid-19 ini kejahatan semakin marak terjadi. Menurut data yang berasal dari Polri bahwa tingkat kejahatan di Indonesia mengalami kenaikan dari pekan ke-15 sampai ke-16, menurut Kepala Bagian Penerangan Umum Divisi Humas Polri Kombes Asep Adi Saputra kenaikan tingkat kejahatan mencapai 11,80 persen dengan didominasi oleh tindak pidana pencurian dengan pemberatan (Halim, 2020).

Kejahatan atau tindak kriminal menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia merupakan perilaku yang bertentangan dengan nilai dan norma yang berlaku yang telah disahkan oleh hukum tertulis (KBBI, 2020). Kejahatan adalah salah satu bentuk perilaku menyimpang yang menimbulkan suatu ancaman yang nyata atau ancaman terhadap norma-norma sosial yang mendasari kehidupan atau keteraturan sosial, dapat menimbulkan ketegangan individu maupun ketegangan sosial. Kejahatan juga merupakan ancaman yang nyata dalam proses berlangsungnya ketertiban sosial.

Salah satu jenis kejahatan yang sering terjadi ialah pencurian. Pencurian sendiri adalah pengambilan properti milik orang lain tanpa seizin pemiliknya. Pelaku pencurian ini biasanya disebut dengan pencuri dan tindakannya oleh masyarakat seringkali disebut dengan mencuri (Wikipedia, 2020). Pencurian memiliki dua unsur yaitu unsur objektif dan unsur subjektif. Unsur objektif tindakan pencurian adalah perbuatan mengambil suatu benda, dan unsur

keadaan yang melekat pada benda tersebut, yaitu unsur kepemilikan barang baik sebagian atau seluruhnya. Kemudian unsur subjektif dari tindakan pencurian adalah adanya maksud yang ditunjukkan untuk memiliki, dan dengan melawan hukum.

Kasus pencurian yang semakin marak terjadi pada akhir-akhir ini terlebih disaat masa pandemi Covid-19 sangat meresahkan warga masyarakat. Disaat masyarakat sedang digemparkan dengan semakin merebaknya Virus Covid-19, ditambah dengan semakin rumitnya permasalahan ekonomi karena banyak terjadi pengurangan pegawai atau bahkan penutupan tempat-tempat produksi barang membuat masyarakat kehilangan mata pencaharian mereka. Hal tersebut juga mendorong individu melakukan tindak pidana pencurian dengan dalih “terhimpit” karena keadaan yang sedang tidak menentu saat ini.

Lebih membuat resah masyarakat lagi karena modus pencurian semakin kesini semakin mengalami perkembangan, cara-cara yang digunakan oleh pencuri juga semakin beragam. Pada awalnya pencurian dilakukan dengan cara-cara konvensional seperti merusak pintu, jendela, melompat pagar rumah sampai dengan melewati atap rumah. Namun dalam perkembangannya pencurian dilakukan dengan semakin terang-terangan, bahkan pencurian dilakukan lebih dari satu orang, tidak lagi di tempat sepi akan tetapi di tempat ramai pun tidak luput menjadi sasaran tindak pencurian.

Tulisan ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Metode ini merupakan metode penelitian yang menghasilkan uraian yang mendalam tentang ucapan, tulisan, atau perilaku yang dapat diamati dari individu atau suatu kelompok masyarakat (Rahmat, 2009). Metode ini berusaha untuk memahami dan menafsirkan suatu peristiwa dalam kehidupan manusia dalam situasi tertentu menurut perspektif peneliti sendiri. Dengan metode ini peneliti memiliki tujuan untuk memahami objek yang diteliti secara mendalam (Gunawan, 2020). Dengan metode ini peneliti menceritakan suatu kejadian tanpa adanya rekayasa, peneliti menjelaskan suatu peristiwa dengan apa adanya. Dalam penelitian ini menggunakan sumber data sekunder yang bersumber dari jurnal terdahulu, undang-undang, berita-berita dari berbagai surat kabar, dan data-data statistik pemerintah negara Indonesia yang berkaitan dengan tema penelitian. Dari data-data sekunder yang didapatkan kemudian penulis melakukan analisa untuk dapat menghasilkan kesimpulan yang tertulis dalam penelitian ini.

Menarik tulisan ini terkait ragam kasus pencurian yang semakin marak terjadi di daerah Klaten, beragamnya modus-modus dan cara yang dilakukan oleh pencuri di Klaten yang sedikit berbeda dari yang lain. Dalam tulisan ini

juga membahas tentang semakin inovatif dan agresifnya sang pencuri dalam melakukan aksinya.

Dinamika Kejahatan Ditengah Pandemi Covid-19

Semakin meluasnya penyebaran virus Covid-19 yang kemudian masuk ke Indonesia membuat pemerintah menetapkan KLB di daerah tertentu karena adanya kasus positif Covid-19. Kemudian lebih lanjut lagi karena peningkatan kasus positif yang signifikan akhirnya pemerintah menetapkan PSBB bagi kota tersebut. Dengan ditetapkannya PSBB membuat semua aktivitas warga di luar rumah harus dihentikan, mereka harus tetap berada di rumah masing-masing. Semua pabrik dan pemilik usaha terpaksa harus mempekerjakan sebagian pegawai mereka, mengurangi gaji, merumakan pegawai, bahkan melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK). Data nasional yang dikeluarkan oleh Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi menyatakan bahwa ada 9.096 perusahaan yang merumahkan 72.770 pekerja. Data per 16 April 2020 pekerja informal yang terdampak Covid-19 berjumlah 1.500.156 orang, yang mana 229.789 orang di PHK dan 1.270.367 orang di rumahkan. Sedangkan dalam sektor informal sebanyak 443.760 orang di PHK (Nurwati, 2020). Dengan demikian dimasa pandemi Covid-19 ini menjadikan semakin bertambah banyaknya jumlah pengangguran di Indonesia.

Tidak hanya masalah bertambah banyaknya jumlah pengangguran yang dihadapi Indonesia, terdapat beberapa masalah besar lain yang sedang dihadapi sebagai dampak pandemi Covid-19 ini, yaitu masalah pengamanan kesehatan penduduk, masalah perlindungan sektor usaha dan masalah kriminalitas. Diantara ketiga masalah tersebut masalah kriminalitas nampaknya kurang mendapat perhatian. Padahal data dari Mabes Polri menyebutkan bahwa telah terjadi peningkatan kriminalitas sebesar 19,72 persen dari masa sebelum terjadinya pandemi Covid-19 (Zaelany, 2020). Masalah kriminalitas yang banyak terjadi ditengah masa pandemi ini antara lain begal, tawuran, bahkan pencurian.

Separovic mengemukakan bahwa faktor yang menyebabkan kejahatan itu ada dua, yaitu faktor personal yang termasuk didalamnya faktor biologis berupa umur, jenis kelamin, keadaan mental dan psikologis berupa agresivitas, kecerobohan dan keterasingan. Kemudian faktor kedua ialah faktor situasional seperti situasi konflik, faktor tempat dan waktu (Pangaila, 2020). Menurut Widyanti dan Weskita kejahatan juga memiliki dua faktor, yaitu endogen dan eksogen. Faktor endogen adalah faktor yang berasal dari dalam diri individu itu sendiri seperti cacat yang bersifat biologis dan psikis, dan perkembangan

kepribadian dan intelegensi yang terhambat sehingga tidak bisa menghayati norma-norma yang berlaku. Faktor eksogen adalah faktor yang berasal dari luar diri seseorang seperti pengaruh negatif dari orang tua, lingkungan sekolah dan lingkungan masyarakat, kurangnya pengawasan dari orang tua, tidak memiliki pekerjaan, anonimitas akibat banyaknya penduduk di suatu kota (Felicia Nathnia, 2017).

Pada masa pandemi Covid-19 ini kasus pencurian di Kabupaten Klaten semakin meningkat, hal tersebut terbukti dengan semakin meningkatnya laporan pencurian yang diajukan oleh masyarakat kepada Polres setempat. Tidak hanya dengan melaporkan kasus pencurian tersebut kepada pihak yang berwajib, untuk semakin menyebarluaskan berita tersebut masyarakat menggonggahnya di media sosial yang mereka miliki seperti facebook dan whatsapp. Dilansir dari salah satu surat kabar juga disebutkan bahwa angka pencurian di masa pandemi ini semakin meningkat, AKP Andriyansyah Rithas Hasibuan mengatakan pengungkapan kasus yang dilakukan Satreskrim Polres Klaten sepanjang Januari 2020 sekitar 20 kasus, namun angka tersebut telah mengalami kenaikan hingga 10 persen disaat pandemi Corona 19. Puluhan kasus yang ditangani Satreskrim didominasi dengan 3C, yakni pencurian dengan pemberatan (curat), pencurian dengan kekerasan (curas), dan pencurian sepeda motor (curanmor) (Suseno P. , 2020).

Pada 26 April 2020 telah terjadi pencurian di Desa Sidowayah Kecamatan Polanharjo, pencurian ini terjadi pada pukul 04.45 dini hari. Dalam kasus pencurian ini sang korban bahkan disekap dan diancam akan dibunuh jika melawan. Kemudian sang pencuri meminta pemilik rumah untuk menunjukkan dimana letak barang berharga miliknya. Karena takut dengan ancaman dari pelaku sang pemilik rumah menunjukkan bahwa barang berharganya berada di lemari. Akhirnya sang pencuri berhasil mendapatkan uang tunai senilai 1 juta rupiah dan perhiasan milik korban (Suseno P. , pencurian di Sidowayah Klaten, 2020).

Tidak berselang lama pada 29 April 2020 rumah salah satu warga Desa Cantelan Ketandan menjadi korban pencurian. Rupanya sebelum pencurian terlaksana sang pelaku pencurian telah memberikan gambar tanda anak panah hitam dan huruf X sebanyak 3 kali. Pemilik rumah tidak menyadari arti tanda tersebut malah menghapusnya dengan santai. Namun pada malam harinya sang pencuri berhasil masuk ke rumah tersebut dengan memanjat dinding dan naik ke lantai dua. Untungnya pencuri tidak mendapatkan hasil apapun, karena situasi yang gaduh membuat mereka kabur terlebih dahulu sebelum ketahuan warga yang sedang ronda (Garjito, 2020).

Tidak selesai pada bulan Juli saja, kasus-kasus pencurian masih berlanjut di bulan berikutnya. Pada bulan tanggal 3 Juli 2020 bahkan Polres Klaten juga menangkap pelaku pencurian sepeda motor, pencuri tersebut adalah sepasang suami istri. Mereka bahkan pernah mengajak anaknya yang masih berusia balita untuk mencuri. Pelaku tersebut merupakan warga Kecamatan Delanggu, sebelumnya sang pelaku adalah karyawan dari sebuah perusahaan baja yang berada di Ceper Klaten. Namun akibat pandemi Covid-19 beliau harus di PHK dari perusahaan tempatnya bekerja. Karena kehilangan pekerjaan tersebut sang pelaku berani melakukan kejahatan pencurian motor dengan dibantu oleh sang istri. Namun akhirnya kejahatan tersebut terungkap setelah pelaku melakukan pencurian sepeda motor milik seorang warga Kecamatan Bayat dan ditangkap polisi di Ceper. Dari alasan yang dituturkan oleh pelaku terpaksa mencuri karena kebingungan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari dan untuk membayar kontrakan (Nurmansyah, 2020).

Dari berbagai sumber surat kabar seperti Solopos, Jateng Suara dan kompas peningkatan pencurian di Klaten sebagai dampak pandemi Covid-19 terjadi di daerah Cawas, Pedan, Polanharjo, Delanggu, Kebonharjo, Kecamatan Klaten Tengah, Kecamatan Klaten Selatan, Jogonalan. Dilihat dari daerah-daerah tersebut bisa dikategorikan jika pencurian semakin meningkat di kota, karena daerah-daerah tersebut merupakan daerah yang sudah berkembang dan berada di dekat pusat Kota Klaten. Biasanya pencuri mengambil uang, perhiasan, kendaraan bermotor, serta barang lain yang memiliki nilai jual. Barang lain tersebut seperti tabung gas, besi untuk konstruksi bangunan, beras dari tempat penggilingan padi. Tidak hanya itu, pencurian yang terjadi di Pabrik Gula Gondang Kecamatan Jogonalan sang pencuri membawa lari roda loko, travo las, plandes, bureng, gear box loko, besi dengan total berat 2,5 ton. Pencurian itu diketahui pihak gudang pada 20 April 2020 lalu (Prakoso T. S., 2020).

Dilihat dari modus operasi yang dilakukan dalam tindak pencurian, terjadi perkembangan dan beragam serta sangat berani, semula pencurian banyak dilakukan pada malam hari, namun saat ini pencurian juga dilakukan saat siang hari. Karena isu pencurian semakin marak dan masyarakat lebih meningkatkan kewaspadaan di malam hari mereka mencari celah lain untuk mencuri dengan melakukan aksi pencuriannya di siang hari. Peralatan yang digunakan juga berkembang, dimulai dari senjata yang digunakan saat mencuri, alat angkut yang semakin modern sehingga memudahkan mobilitas si pencuri, menggunakan alat komunikasi yang lebih canggih untuk melancarkan misi mereka, zat kimia dan kerja sama dengan pihak keamanan

yang harusnya mengamankan barang-barang tersebut (Abintoro, 2013). Ketika ada perlawanan dari korban sang pencuri tidak segan-segan melukai bahkan sampai mengakibatkan hilangnya nyawa sang korban.

Faktor-Faktor Penyebab Peningkatan Pencurian

Adapun sebab semakin meningkatnya kasus pencurian di Kabupaten Klaten terjadi karena kondisi ekonomi yang semakin carut marut, harga-harga barang pokok yang dijual semakin mahal tidak sebanding dengan susahnyanya mencari pemasukan di tengah masa pandemi, juga karena pemutusan hubungan kerja (PHK) yang dilakukan oleh pabrik-pabrik atau tempat produksi yang menyebabkan bertambah banyaknya pengangguran karena berbagai peraturan pemerintah daerah yang dikeluarkan guna menghalau penyebaran virus Covid-19. Bahkan adanya asimilasi yang diberikan kepada para narapidana yang semakin menambah jumlah pengangguran, yang mana sebagian dari mereka tidak memiliki rasa jera terhadap hukuman yang sudah diterima sebelumnya.

Asimilasi tersebut berdasarkan peraturan Menteri Hukum dan HAM RI No. 10 Tahun 2020 tentang syarat pemberian asimilasi dan hak integrasi bagi narapidana dan anak dalam rangka pencegahan dan penanggulangan penyebaran Covid-19. Serta keputusan Menteri Hukum dan HAM RI No.M.HH-19 PK.01.04.04 tahun 2020 tentang pengeluaran dan pembebasan narapidana dan anak melalui asimilasi dan integrasi bagi narapidana dan anak dalam rangka pencegahan dan penanggulangan penyebaran Covid-19 (indra, 2020). Namun karena sebagian dari mereka memiliki kesadaran dan rasa jera yang rendah maka beberapa narapidana yang mendapatkan hak asimilasi justru melakukan kejahatan pencurian, hal tersebut juga didorong karena mereka kesusahan mendapatkan pekerjaan.

Pada kurun waktu 1-6 April 2022 sebanyak 75 narapidana Lembaga Pemasyarakatan (LP) Kelas II B Klaten dibebaskan karena adanya asimilasi di masa pandemi Covid-19. Namun begitu mereka tidak bebas murni, melainkan mereka masih diwajibkan untuk melapor ke Bapas setiap minggunya (Suseno P. , 2020). Pada 10 April 2020 mereka menerima bantuan paket sembako yang diserahkan langsung oleh Bupati Klaten Sri Mulyani, beliau juga berharap agar para penerima asimilasi dapat kembali ke masyarakat dengan didasari rasa syukur dan membuka lembaran baru untuk menjadi masyarakat yang lebih baik (Kominfo, 2020). Pada kurun bulan April napi asimilasi akan bertambah lagi, sampai pada 8 Mei 2020 jumlah napi yang dibebaskan berjumlah 92 orang, mereka semua berdomisili di Klaten (Suseno P. , 2020).

Pemerintah pusat dan daerah yang dibantu pihak kepolisian sudah berulang kali beserta menganjurkan masyarakat agar semakin meningkatkan keamanan, khususnya di masa pandemi ini. Karena kasus pencurian semakin marak masyarakat harus semakin waspada dan lebih teliti dalam menjaga barang milik mereka. Semakin berkembangnya teknologi semakin bermacam pula modus dan cara yang digunakan untuk mencuri. Adapun modus dan cara pencurian semakin beragam dan semakin mengalami perkembangan seiring berjalannya waktu. Jika sebelumnya pencuri hanya muncul di malam hari, namun saat ini mereka berani beraksi dengan tidak mengenal waktu dan tempat. Seperti saat ini pencuri mempunyai banyak cara yang akan digunakan untuk mencuri barang milik orang lain. Seperti yang terjadi di Desa Malang pada awalnya saat tahap persiapan pencurian mereka melakukan survei di desa-desa terlebih dahulu, mereka mencari dimana titik rawan yang bisa mereka manfaatkan untuk mencuri. Biasanya survei dilakukan pada siang hari dengan cara menyamar menjadi tukang mencari barang bekas atau sekedar bersepeda melewati lingkungan tersebut. Kemudian ketika malam hari mereka beramai-ramai mengendarai mobil menuju daerah tertentu dan ketika sampai di suatu titik mereka diturunkan dan disebar ke rumah-rumah penduduk untuk mencuri. Untuk melancarkan aksinya mereka akan menggunakan cara mematikan aliran listrik rumah yang menjadi sasaran, kemudian mereka mulai mengambil barang yang sudah diincar. Ataupun dengan menyalakan kran air agar si pemilik rumah keluar rumah dan pencuri bisa masuk ke dalam rumah untuk mengambil barang-barang yang memiliki nilai jual.

Di tengah masa pandemi Covid-19 ini barang yang dicuri semakin beragam, apapun yang ada di luar rumah yang memiliki nilai jual tinggi, pun nilai jual yang rendah akan mereka ambil. Biasanya barang yang diambil ialah barang-barang berharga seperti perhiasan, uang, motor, barang elektronik, ternak bahkan hasil pertanian juga mereka curi. Bahkan kasus di salah satu daerah karena barang-barang berharga lainnya disimpan di dalam rumah dan di luar rumah hanya ada gabah (biji padi) pun mereka ambil, tidak hanya itu buah pisang yang masih di pohonnya juga dicuri. Hal tersebut terjadi karena semakin sedikit akses para pencuri untuk dapat mencuri barang-barang berharga lainnya, karena sudah diamankan atau disimpan oleh sang pemilik di dalam rumah.

Dilansir dari Solopos.com dari banyaknya kasus pencurian yang terjadi di Klaten sebagian besar dilandasi karena alasan ekonomi, dari data penyidikan mereka mengaku melakukan pencurian karena terdesak kondisi ekonomi. Mereka terpaksa mencuri karena mencari pekerjaan ditengah masa pandemi

Covid-19 ini sangat susah, atau karena usaha yang mereka miliki terpaksa tutup. Sebagian lain yang melatar belakangi pencurian yang terjadi belum diketahui karena masih dalam proses penyelidikan. Namun ada salah satu kasus yang sedikit berbeda dari yang lain, yaitu kasus pencurian celana dalam yang terjadi Desa Jomboran Kecamatan Klaten Tengah. Kejadian tersebut membuat resah warga, karena yang dicuri hanyalah celana dalam wanita saja. Pencurian ini dilakukan oleh seorang remaja, diketahui alasan pencurian ialah celana dalam tersebut digunakan untuk onani (Prakoso T. S., 2020).

Upaya Penanggulangan Kejahatan

Penanggulangan kejahatan pada umumnya berkaitan erat dengan kebijakan kriminal yaitu suatu usaha yang rasional dari masyarakat untuk menanggulangi kejahatan. Kebijakan atau upaya penanggulangan kejahatan pada hakikatnya merupakan bagian dari upaya perlindungan masyarakat dan upaya mencapai kesejahteraan masyarakat. Kebijakan kriminal yang merupakan usaha dalam penanggulangan kejahatan dapat dilakukan melalui upaya pidana maupun non pidana. Tidak hanya itu, untuk mengatasi atau menanggulangi tindak kejahatan bisa menggunakan upaya preventif dan represif. Dimana penanggulangan kejahatan secara preventif dilakukan untuk mencegah terjadinya atau timbulnya kejahatan. Sangat beralasan bila upaya preventif diutamakan karena upaya preventif dapat dilakukan oleh siapa saja tanpa suatu keahlian khusus.

Melihat permasalahan yang ada di masyarakat dengan terjadinya banyak pelanggaran hukum sebagai akibat dari sebuah perubahan tatanan sosial, hal tersebut diakibatkan oleh upaya penanggulangan penyebaran Virus Covid-19. Dengan adanya aturan baru yang bersifat mengikat hal ini cenderung akan membawa dampak negatif dalam tatanan sosial seperti adanya PSBB. Hal tersebut akan membawa berbagai dampak dalam berbagai bidang, juga bagi sektor ekonomi?. Maka dari itu, dengan adanya perubahan ini mengakibatkan munculnya berbagai upaya baru untuk bisa tetap bertahan. Dengan ini masyarakat bergotong-royong untuk memikirkan ulang apa yang harus mereka lakukan demi keamanan bersama, hal tersebut sesuai dengan pernyataan Durkheim bahwa masyarakat adalah satu kesatuan yang terdiri dari bagian-bagian yang mana di setiap bagian memiliki fungsi mereka masing-masing untuk memberntuk sistem menjadi seimbang (Anto, 2020).

Alhasil masyarakat Klaten melakukan upaya preventif guna meminimalisir pencurian yang semakin marak, masyarakat saling bahu-membahu dengan melakukan berbagai upaya. Dimulai dengan diadakannya ronda rutin setiap

malam, dimana semua penduduk laki-laki mulai dari remaja sampai yang lanjut usia dengan syarat keadaan fisik masih sangat segar dan kuat harus ikut ronda. Mereka dibagi menjadi beberapa kelompok dan kemudian digilir setiap harinya. Upaya tersebut dilakukan karena sudah mendengar dari daerah lain bahwa pencurian sedang marak-maraknya terjadi pada masa pandemi ini. Kemudian upaya berikutnya ialah dibangunnya palang-palang pada pintu masuk desa dan ketika malam hari akan ditutup untuk memutus akses jalan, dan dijaga oleh petugas ronda. Kemudian upaya lain yang dilakukan oleh masyarakat ialah menutup pintu dan tidak membiarkan barang-barang berharga seperti motor terparkir di luar ketika siang hari serta memasang pengaman ganda pada pintu rumah atau kendaraan yang dimiliki. Upaya pencegahan lainnya yang bisa dilakukan ialah dengan meningkatkan resiko pelaku tertangkap, usaha yang dapat dilakukan misalnya memasang CCTV di rumah, toko atau di tempat umum lainnya.

Upaya pencegahan terjadinya pencurian yang dapat dilakukan oleh pihak pemerintah ialah memasifkan sosialisasi untuk meningkatkan keamanan sekitar, sosialisasi tersebut dilakukan oleh berbagai pihak baik dari kepolisian, pemerintah desa, serta ketua RT atau RW pada masing-masing daerah. Upaya berikutnya ialah penyaluran bantuan sosial oleh pemerintah untuk masyarakat yang membutuhkan, hal tersebut dilakukan untuk membantu mencukupi kebutuhan pokok agar orang-orang yang akan mencuri dengan alasan untuk memenuhi kebutuhan pokok mereka dapat diurungkan (Salsabila, 2020). Kemudian dari pihak Kepolisian sering-sering melakukan patroli dan penjagaan ke masyarakat, serta peningkatan penegakan hukum agar orang-orang enggan melakukan pencurian.

Pada saat upaya pencegahan telah dilakukan namun masih tetap terjadi pencurian, masyarakat melakukan upaya penanggulangan dengan menangkap pelaku kemudian melaporkannya ke polisi agar pelaku mendapat hukuman yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Kemudian upaya yang dapat pemerintah lakukan melalui kepolisian ialah tidak segan-segan melakukan tindakan tegas kepada pelaku kejahatan, hal ini juga akan memberikan jaminan kepada masyarakat serta mengurangi ruang gerak para pelaku pencurian (Rozie & dkk, 2020). Upaya selanjutnya ialah pihak pemerintah melakukan memperbaiki perilaku pencuri ketika di dalam tahanan agar ketika keluar dari tahanan perilaku mereka menjadi lebih baik lagi dan agar tidak mengulangi perbuatan mencuri di kemudian hari.

Indonesia telah menetapkan sanksi pidana penjara dalam perundang-undangan sebagai salah satu sarana untuk menanggulangi masalah kejahatan,

hal ini merupakan salah satu bagian kebijakan kriminal atau politik kriminal. Namun sepertinya kejahatan yang terjadi di masyarakat sulit dihilangkan, meskipun sudah ada perangkat hukum dan undang-undang yang dirumuskan oleh badan legislatif negara (Arief, 2009).

Pemerintah menindak tegas para pelaku tindak pidana pencurian sesuai dengan undang-undang yang berlaku, dimana telah diatur dalam Bab XXII Pasal 362-367 KUHP. Pencurian secara umum telah dirumuskan dalam Pasal 362 KUHP bahwasanya “Barangsiapa mengambil seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau denda paling banyak enam puluh rupiah” (UU, 2020). Terdapat penggolongan lanjutan mengenai hukum-hukum yang diberikan kepada pelaku kejahatan pencurian ini, semuanya telah tercantum dalam Pasal 362-367 KUHP tersebut. Unsur melawan hukum dalam tindak pidana pencurian telah dirumuskan secara tegas, sehingga dapat diketahui bahwa perbuatan mengambil barang milik orang lain secara melawan hukum merupakan perbuatan yang dilarang oleh undang-undang dan memiliki sanksi berupa pidana.

Meskipun telah ada ancaman hukuman bagi para pelaku pencurian namun hal tersebut belum membuat jera sang pelaku, hal ini terjadi karena masih kurangnya kesadaran hukum di masyarakat. Hal ini dapat dilihat banyaknya pelaku pencurian yang sudah dihukum namun setelah keluar dari menjalani hukuman mereka mengulangi lagi tindak pidana pencurian, mereka melakukannya dengan tanpa perasaan menyesal atau malu, hal ini terjadi karena mereka menganggap bahwa perbuatan yang mereka lakukan adalah suatu perbuatan yang lumrah dilakukan.

Minimnya rasa jera yang dimiliki oleh sebagian NAPI akibatnya ada beberapa yang harus kembali masuk ke LP. Bahkan baru-baru ini kejadian seperti itu terjadi, menurut Kepala Seksi Bimbingan Narapidana Anak Didik dan Kegiatan Kerja LP Kelas II B Klaten, Roni Asmoro mengatakan bahwa beliau menerima laporan bahwa ada dua napi yang berulah lagi di luar LP. Mereka melakukan tindak kejahatan pada akhir bulan April 2020. Akibatnya dua napi tersebut harus dijebloskan lagi ke sel isolasi sekaligus menjalani sisa masa hukuman di LP. Selanjutnya kasus serupa yaitu kasus Femo yang mengantarkan narkoba ke dalam lapas untuk temannya, diketahui bahwa Femo meletakkan sabu lebih dari 5 gram dan 1,77 gram inex ke dalam kepala ayam. Dia mengantarkan narkoba tersebut untuk temannya yang berada di lapas karena alasan balas budi, akhirnya dia mau melakukan hal

tersebut. Akibat perbuatannya tersebut Femo disangkakan pasal 114 ayat (2) sub pasal 112 ayat (2) jo pasal 132 ayat (1) jo pasal 144 ayat (1) sub pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba. Dengan ancaman hukuman enam sampai 20 tahun dan pidana denda maksimal Rp 10.000.000.000 ditambah sepertiganya (Purenda, 2020)

Banyak upaya yang dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat untuk bisa tetap bertahan di tengah banyaknya perubahan yang terjadi akibat pandemi Covid-19. Banyak hal-hal baru yang muncul dan menjadi kebiasaan di masa pandemi ini, contohnya dengan tetap menjaga jarak, sering mencuci tangan, munculnya strategi baru dalam pemasaran produk, meningkatkan keamanan dan kewaspadaan masyarakat dengan berbagai cara yang lebih efektif dan lain sebagainya. Semua hal tersebut merupakan usaha yang dilakukan untuk tetap menjaga keseimbangan yang ada di masyarakat. Semua perubahan yang dilakukan semata untuk membawa pada keseimbangan yang baru.

Segala upaya pencegahan dan penanggulangan sudah dilakukan, harapannya dapat menekan jumlah pencurian atau kejahatan yang lain terjadi di masyarakat. Menilik kembali tentang program asimilasi yang diberikan kepada 92 narapidana Lembaga Pemasyarakatan (LP) Kelas II B Klaten, sejauh dari banyaknya narapidana yang mendapatkan asimilasi hanya tiga orang saja yang menyelewengkan kesempatan berharga tersebut. Tiga orang tersebut kembali melakukan tindakan melanggar aturan yang membuat mereka harus kembali menerima hukuman pidana. Dengan demikian adanya asimilasi tersebut masih efektif karena para penerima asimilasi masih banyak yang berubah menjadi orang lebih baik dan tidak mengulangi tindakan yang melanggar hukum ketika telah keluar dari lembaga pemasyarakatan.

Penutup

Kejahatan merupakan salah satu bentuk dari perilaku menyimpang, salah satu kejahatan yang semakin marak terjadi di tengah masa pandemi Covid-19 ialah kejahatan pencurian. Pencurian merupakan kejahatan yang dilakukan oleh seseorang dengan maksud mengambil barang milik orang lain dan tanpa seizin pemilikannya. Di Kabupaten Klaten tingkat kejahatan pencurian semakin meningkat sebesar 10 persen dari sebelum pandemi Covid-19. Banyak faktor yang mendasari seseorang melakukan pencurian, namun kebutuhan ekonomi karena situasi yang sedang tidak menentu menjadi pemicu seseorang melakukan tindak pidana pencurian. Dalam kaitannya dengan upaya penanggulangan tindak kejahatan pencurian, masyarakat Klaten mengupayakan berbagai tindakan penanggulangan baik yang bersifat

preventif maupun represif. Masyarakat melakukan upaya preventif guna meminimalisir pencurian yang semakin marak, dimulai dengan diadakannya ronda rutin setiap malam, dibangunnya palang-palang pada pintu masuk desa, menutup pintu dan tidak membiarkan barang-barang berharga berada di luar ketika siang hari, serta memasifkan sosialisasi untuk meningkatkan keamanan desa. Kemudian adanya asimilasi narapidana yang dilakukan oleh Lembaga Pemasyarakatan (LP) Kelas II B Klaten terbilang efektif, karena hanya sedikit dari mereka yang kembali melakukan tindakan melanggar hukum.

Diharapkan dengan adanya tulisan ini dapat bermanfaat bagi berbagai pihak baik masyarakat maupun pihak kepolisian guna meningkatkan kewaspadaan dan meningkatkan pengamanan agar tidak semakin banyak jumlah tindak pidana pencurian yang terjadi di masyarakat. Untuk penulis selanjutnya diharapkan dapat menilik lebih dalam lagi tentang tema serupa dan menghasilkan temuan yang dapat bermanfaat di masyarakat secara umum.

Daftar Pustaka

Buku:

- Prakoso, Abintoro. (2013). *Kriminologi dan Hukum Pidana*. Yogyakarta: Laksbang Grafika.
- Arief, Barda Nawawi. (2009). *Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana Penjara*. Yogyakarta: Genta Publishing.

Jurnal

- Nathania, Felicia, dkk. (2017). Analisis Gambaran Subjective Well-Being Korban Kejahatan Pencurian dan Penculikan. *Institusi Jurnal Psikologi Ilmiah*, 9(3), 196-209.
- Anwar, Mohammad. (2020). Asimilasi dan Peningkatan Kriminalitas di tengah Pembatasan Sosial Berskala Besar Pandemi Corona. *Adalah Buletin Hukum & Keadilan*, 4(1), 101-106.
- Jufri, Ely Alawiyah, dkk. (2017). Pelaksanaan Asimilasi Narapidana di Lembaga Pemasarakatan Terbuka Jakarta. *ADIL: Jurnal Hukum*, 8(1), 1-26.
- Nuraiman. (2019). Faktor-faktor yang memicu Perubahan Solidaritas dalam Masyarakat di Nagari Solok Ambah Kabupaten Sijunjung. *Jurnal Ilmu Pendidikan Ahlussunnah*, 2(2), 6-12.
- Kurnianingrum, Trias Palupi. (2020). Kontroversi Pembebasan Narapidana di Tengah Pandemi Covid-19. *Info Singkat*, 12(8), 1-6.
- Aditya, Susilo, dkk. (2020). Coronavirus Disease 2019: Tinjauan Literatur Terkini. *Jurnal Penyakit Dalam Indonesia*, 7(1), 45-67.
- Rahmat, Pupu Saeful. (2009). Penelitian Kualitatif. *Jurnal Equilibrium*, 5(9), 1-8.
- Maunah, Binti. (2016). *Pendidikan dalam Perspektif Struktural Fungsional*. Cendekia, 10(2), 159-178.

Artikel dalam Internet:

- Pangaila, Farrid F. F. (2013). *Perilaku Kejahatan di Kecamatan Malalayang Kota Manado*. Diperoleh dari (<https://media.neliti.com>)
- Setiawan, Syeikh Nabila., Nunung Nurwati. (2020). *Dampak Covid-19 terhadap Tenaga Kerja di Indonesia*. Diperoleh dari (<https://www.researchgate.net/publication>)
- Gunawan, Imam. (2015). *Metode Penelitian Kualitatif*. Diperoleh dari (<http://fip.um.ac.id>)
- Anto, Rusdi. (2018). *Teori-teori Sosiologi hukum Fungsional Struktural*. Diperoleh dari <https://www.researchgate.net/publication>
- Akbar, Andi. (2017). *Pengertian Tindak Pidana Pencurian Pasal 362-367 KUHP*. Diperoleh dari <https://seniorkampus.blogspot.com>

Artikel Surat Kabar:

- Baskara, Bima. (2020, April 18). *Rangkaian Peristiwa Pertama Covid-19*. Diperoleh dari <https://bebas.kompas.id>
- Prakoso, Taufik Sidik. (2020, Februari 23). *Remaja Klaten Curi Pakaian Dalam Wanita*. Diperoleh dari [Solopos.com](http://solopos.com).
- Suseno, Ponco. (2020, April 07). *76 Napi di Klaten Dibebaskan, Biaya Makan Lebih Irit*. Diperoleh dari <https://m.solopos.com>
- Kominfo. (2020, Juli 10). *75 Klien Asimilasi Bapas Klaten Terima Bantuan Sembako*. Diperoleh dari klatenkab.go.id
- Suseno, Ponco. (2020, Mei 9). *Gegara Berulah di Luar Penjara 2 Napi Asimilasi di Klaten akan Masuk Sel Isolasi*. Diperoleh dari <https://solopos.com>
- Purenda, Angga. (2020, Mei 21). *Napi Asimilasi berulah, Masuk Bui Lagi*. Diperoleh dari radarsolo.jawapos.com
- Rahma, Athika. (2020, Mei 26). *Hampir 900 Ribu Orang Nekat Mudik ke Jawa tengah di Masa Pandemi*. Diperoleh dari <https://m.liputan6.com>
- Syauqi, Achmad. (2020, Mei 27). *25.000 Pemudik Berhasil Masuk Klaten*. Diperoleh dari <https://m.detik.com>
- Kridhangkara, Whisnupaksa. (2020, April 8). *Pemudik Klaten di tengah Pandemi Corona*. Diperoleh dari <https://m.solopos.com>
- Halim, Devina. (2020, April 20). *Dua Pekan terakhir Polri Catat Peningkatan Kejahatan 11,80 persen*. Diperoleh dari <https://amp.kompas.com>
- Prakoso, T S. (2020, Mei 1). *Bantu Pencurian 2,5 Ton Besi, Satpam PG Gondang Baru Klaten Diciduk*. Diperoleh dari www.solopos.com/tag/pencurian-klaten/amp
- Zaelany, Andy Ahmad. (2020, Juni 03). *Kriminalitas di Era Covid-19 dan*

- Pekerja Muda*. Diperoleh dari <https://kependudukan.lipi.go.id>
- Suseno, Ponco. (2020, April 21). *Angka Kriminalitas Naik, Polisi Tak Segan tembak Pelaku*. Diperoleh dari <https://m.solopos.com>
- Garjito, Dany. (2020, Mei 1). *Perampokan di Klaten, Rumah Sasaran Sudah Ditandai Lambang Misterius*. Diperoleh dari <https://jateng.suara.com>
- Nurmansyah, Rizki. (2020, Juli 03). *Kena PHK Warga Klaten Ajak Istri dan Bawa Anak Balitanya Curi Motor*. Diperoleh dari <https://jateng.suara.com>
- Indra. (2020, April 2). *Syarat Pemberian Asimilasi dan Hak Integrasi*. Diperoleh dari <https://jakarta.kemerkumham.go.id>
- Salsabila, Annisa. (2020, Mei 24). *Analisis Penyebab dan Upaya Pencegahan Kejahatan Selama Pandemi Covid-19*. Diperoleh dari <https://www.kompasiana.com>
- Rozie, Fachrur., dkk. (2020, April 22). *Kejahatan Meningkat di Tengah Pandemi Corona, Bagaimana Upaya Polri Meredamnya*. Diperoleh dari <https://m.liputan6.com>

Tulisan Tanpa Pengarang:

- Kamus Besar Bahasa Indonesia. Diperoleh dari <https://kbbi.web.id/kejahatan.html>
- Kejahatan. Diperoleh dari <https://id.m.wikipedia.org>
- Bab 22 - Pencurian. Diperoleh dari <https://uu.direktorimu.com>
- Pencurian di Sidewayah Klaten. (2020, April 26). Diperoleh dari <https://m.solopos.com>
- Teori Struktural Fungsional. Diperoleh dari digilib.uinsby.ac.id

**Munculnya Stigma Masyarakat Kabupaten
Semarang Jawa Tengah sebagai Akibat
Priming Pemberitaan Covid-19
di Facebook**

Misfalah

*Prodi Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan
Humaniora, UIN Sunan Kalijaga
Email: misfallach90@gmail.com*

Pendahuluan

Dinamika kehidupan masyarakat mengalami perkembangan yang sangat pesat. Adanya media telah mempengaruhi kehidupan sosial dalam masyarakat. Media memegang peranan yang sangat penting. Dari berbagai kalangan dan usia hampir semua masyarakat Indonesia memiliki dan menggunakan media sosial sebagai salah satu sarana guna memperoleh dan menyampaikan informasi ke publik. Di sisi lain media bukanlah kekuatan yang netral. Ia tidak merefleksikan realitas, tapi mengkonstruksi realitas. Konstruksi realitas inilah yang pada akhirnya menentukan cara pandang kita terhadap dunia. Cara pandang kita terhadap persoalan-persoalan yang ada di sekeliling kita. Semua dipengaruhi oleh cara-cara media menyampaikannya kepada kita. Dalam hal *priming* pemberitaan juga terdapat penjonjolan isu-isu tertentu seperti hal-hal negatif yang terjadi dan tidak menyampaikan hal positif lainnya yang juga terjadi.

Masyarakat modern saat ini hampir tidak mungkin tidak terkena paparan media. Disadari atau tidak, media dengan segala kontennya hadir menjadi bagian hidup manusia. Seiring dengan perkembangan zaman, kehadiran media makin beragam dan berkembang. Awalnya komunikasi dalam media berjalan hanya searah, dalam arti penikmat media hanya bisa menikmati konten yang disajikan sumber media. Namun seiring perkembangan zaman, orang awam sebagai penikmat media tidak lagi hanya bisa menikmati konten dari media yang terpapar padanya, namun sudah bisa ikut serta mengisi konten di media tersebut. Media sosial telah banyak merubah dunia. Memutarbalikkan banyak pemikiran dan teori yang dimiliki. Tingkatan atau level komunikasi melebur dalam satu wadah yang disebut jejaring sosial/media sosial. Konsekuensi yang muncul pun juga wajib diwaspadai. Media sosial semakin membuka kesempatan tiap individu yang terlibat didalamnya untuk bebas mengeluarkan pendapatnya. Akan tetapi

kendali diri harusnya juga dimiliki, agar kebebasan yang dimiliki juga tidak melanggar batasan dan tidak menyinggung pihak lain (Watie, 2011).

Laju perkembangan media sosial selain membawa dampak positif ternyata membawa dampak negatif bagi masyarakat, dalam hal ini pengguna media sosial. Oleh karena itu pemanfaatan yang keliru terhadap media sosial dapat membawa petaka bagi kehidupan sosial masyarakat. Salah satunya adalah maraknya pemberitaan mengenai Virus Corona atau Covid-19 yang sedang hangat di tengah-tengah kita hingga memunculkan stigma sosial dalam masyarakat (Mardiana, 2018).

Facebook telah menempatkan informasi Virus Corona di bagian atas halaman muka pengguna untuk menyebarkan materi terverifikasi dari sumber terpercaya termasuk Organisasi Kesehatan Dunia (WHO). Halaman informasi ini juga bertujuan untuk menangkal penyebaran informasi palsu atau hoaks seputar pandemi Virus Corona jenis baru (Covid-19). *Chief Executive Officer* Facebook, Mark Zuckerberg mengatakan pusat data ini akan menyajikan konten oleh akademisi dan selebritas, tips-tips dan praktik-praktik terbaik dari WHO dan Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit (CDC) AS mengenai masalah seputar menjaga jarak interaksi sosial dan mencuci tangan. Facebook mencatat adanya lonjakan aktivitas pengguna, bahkan lebih tinggi saat Tahun Baru, karena pengguna ingin mengetahui, memahami apa yang terjadi dengan Corona dan mencoba tetap terhubung dengan teman dan keluarga, terutama saat mereka bekerja dari rumah. Hal ini berarti banyak orang mengandalkan Facebook sebagai cara utama untuk mendapatkan berita.

Selain itu, Facebook juga mencatat peningkatan drastis penggunaan Facebook Live, Instagram Live, dan aplikasi pengiriman pesan. Facebook memperkirakan lonjakan terus berlanjut, karena lebih banyak negara memerintahkan penduduknya untuk tinggal di rumah atau memberlakukan pembatasan wilayah. Meski begitu, Zuckerberg memperkirakan bahwa wabah Covid-19 dan strategi penahanan yang diberlakukan untuk membendung penyebaran virus akan menyebabkan “Kejutan Ekonomi Besar.” Zuckerberg juga mengatakan lembaga pemerintah belum meminta perusahaan media sosial untuk memberikan informasi pengguna guna melacak penyebaran virus (databoks, 2019).

Berita mengenai Covid-19 sudah menyebar dengan sangat cepat dan meluas di berbagai negara dan masyarakat di penjuru dunia. Pemberitaan tentang Virus Corona pertama kali diberitakan oleh media Cina, *The Lancet*; Jurnal medis yang ditulis oleh dokter China dari Rumah Sakit Jinyinhan dari

Wuhan, yang merawat beberapa pasien paling awal. *Priming* dalam media adalah proses ketika media berfokus pada sebagian isu dan tidak pada isu lainnya dengan demikian mengubah standar berita yang dikonsumsi oleh banyak orang. Adanya pemberitaan yang diselipkan dalam media sosial dan gencar dipublikasikan dalam suatu halaman, ukuran *headline* dan ruang yang diberikan untuk berita tersebut. Banyaknya media sosial yang menempatkan berita-berita atau isu-isu yang menonjol dalam media sosial. Hal ini mendorong khalayak untuk belajar mengenai isu-isu yang dianggap penting. Seringnya intensitas informasi mengenai masyarakat sangat berpengaruh terhadap aspek kehidupan masyarakat, seperti perubahan perilaku masyarakat dan munculnya stigma sosial dalam kehidupan masyarakat.

Angka kasus Covid-19 di Jawa Tengah masih terus meningkat. Kota Semarang menempati urutan pertama menjadi daerah yang paling banyak tercatat kasus Covid-19. Sementara Kota Tegal berada di peringkat paling bawah. “Positif Covid-19 sebanyak 1.346 dengan rincian 585 (43,46%) dirawat, 671 49,85% (sembuh), dan 90 6,69% (meninggal),” Berikut sebaran kasus Covid-19 di 35 Kabupaten/Kota di Jawa Tengah:

1. Kota Semarang : 245 pasien
2. Magelang : 85 pasien
3. Purworejo : 75 pasien
4. Wonosobo : 71 pasien
5. Purbalingga : 57 pasien
6. Banyumas : 57 pasien
7. Temanggung : 54 pasien
8. Cilacap : 44 pasien
9. Banjarnegara : 40 pasien
10. Sukoharjo : 40 pasien. (Budi, 2020)

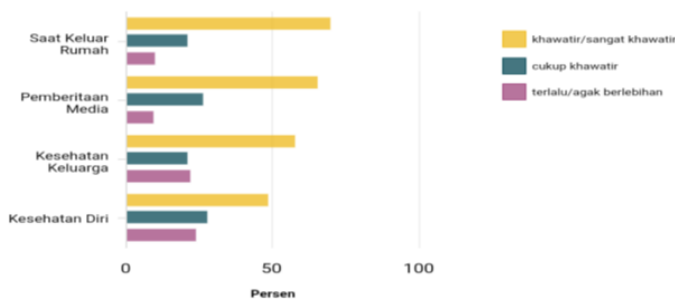
Kabupaten Semarang merupakan suatu wilayah yang berada di Provinsi Jawa Tengah. Wilayah Kabupaten Semarang terbagi menjadi 19 Kecamatan, 208 Desa, dan 27 Kecamatan. Banyaknya Satuan Lingkungan Setempat (SLS) pada tahun 2016 mengalami pertambahan. Rukun Warga (RW) sebanyak 21 RW menjadi 1.589 RW dan untuk Rukun Tetangga (RT) juga bertambah sebanyak 81 RT menjadi 6.694 RT dibanding tahun 2015. Hal ini dikarenakan adanya pemekaran RW di beberapa Kecamatan yang mengakibatkan bertambah pula jumlah RT (Fachrurrozi, Potret Pulu Indonesia: Menolak Pemakaman Perawat Covid-19, 2020).

Jumlah penduduk Kabupaten Semarang pada tahun 2016 berdasarkan

data proyeksi penduduk sebanyak 1.014.198 orang, jumlah ini meningkat 52.777 orang atau 5,49% dibanding tahun 2015. Peningkatan cukup tinggi ini disebabkan perubahan sumber data, pada tahun sebelumnya data kependudukan berdasarkan data registrasi penduduk. Menurut jenis kelamin, jumlah penduduk perempuan lebih banyak dibanding jumlah penduduk laki-laki, yakni 515.874 orang penduduk perempuan dan 498.324 orang penduduk laki-laki. Hal ini juga ditunjukkan dengan angka *sex* rasio dibawah 100%. Secara rata-rata kepadatan penduduk Kabupaten Semarang sebesar 1.067 orang/km², Kecamatan dengan kepadatan penduduk terbesar adalah Kecamatan Ungaran Barat, Kecamatan Ambarawa, dan Kecamatan Ungaran Timur, masing-masing dengan kepadatan penduduk mencapai 2.332 orang/km², 2.198 orang/km², dan 2.1083 orang/km² (BPS, 2017).

Seperti halnya di Kabupaten Semarang, akibat pandemi Covid-19 yang muncul di wilayah ini yaitu munculnya stigma sosial terhadap anggota masyarakat yang berstatus positif Covid-19.

Gambar 1: Data Statistik Ragam Kekhawatiran Masyarakat Akibat Pandemi Covid-19



Sumber : Databoks, 2020

Pandemi Covid-19 telah menciptakan kekhawatiran terhadap beragam kondisi. Ketidakpastian dan menjauhkan diri dari dunia luar berpotensi mempengaruhi kesehatan mental tiap orang. Dalam survei yang dilakukan Badan Pusat Statistik (BPS), sebanyak 69,43% responden mengaku sangat khawatir saat keluar rumah. Begitu pula dengan masifnya pemberitaan media tentang Covid-19 menyebabkan kecemasan 65,03% responden. Hal ini tertuang dalam publikasi hasil survei BPS bertajuk Sosial Demografi Dampak Covid-19 2020. Survei tersebut berlangsung pada 13-20 April 2020 yang menjangkau 87.379 responden.

Penelitian yang relevan dengan penelitian ini diantaranya dilakukan oleh Heny Triyaningsih (2020) menunjukkan bahwa media terutama media sosial

menjadi rujukan bagi masyarakat untuk mendapat informasi mengenai Virus Corona. Adapun efek media kepada masyarakat menunjukkan *strong effect* bahkan mampu membentuk persepsi masyarakat Pamekasan tentang pencegahan penularan Virus Corona kepada individu. Penelitian lainnya yaitu yang dilakukan oleh Muhammad Hanafi (2016) menunjukkan bahwa media sosial Facebook mempengaruhi motivasi belajar mahasiswa FISIP Universitas Riau. Kemudian penelitian yang lainnya dilakukan oleh Bayu Surya Hakiki (2019) diketahui bahwa Facebook dapat mempengaruhi perilaku sosial masyarakat, setelah seseorang mengetahui Facebook, dan menggunakannya secara berlebihan maka akan mempengaruhi perilaku keagamaannya terutama ibadah sehari-hari.

Penelitian tentang pengaruh pemberitaan di media sosial dalam kehidupan masyarakat pernah dilakukan sebelumnya, antara lain penelitian tentang Efek Pemberitaan Media Massa terhadap Persepsi Masyarakat Pamekasan tentang Virus Corona. Penelitian ini mengambil fokus efek pemberitaan media massa terhadap persepsi masyarakat tentang Virus Corona. Penelitian dilakukan di kota Pamekasan, Madura. Hasil survei menunjukkan bahwa media terutama media sosial menjadi rujukan bagi masyarakat untuk mendapat informasi mengenai Virus Corona. Adapun efek media kepada masyarakat menunjukkan *strong effect* bahkan mampu membentuk persepsi masyarakat Pamekasan tentang pencegahan penularan Virus Corona kepada individu. Penelitian ini menarik karena di tengah-tengah kita sedang maraknya informasi mengenai Covid-19 yang disebarluaskan melalui media sosial Facebook yang dapat memunculkan stigma sosial dalam suatu masyarakat.

Data penelitian diperoleh dari berbagai pemberitaan yang muncul di media sosial Facebook. Data primer penelitian mengenai pemberitaan pandemi Covid-19 di Facebook. Data sekunder penelitian berkaitan dengan berbagai literatur (jurnal, artikel, news, skripsi yang relevan), sehingga dapat dijadikan sebagai rujukan dalam proses analisis pemberitaan baik dari sisi media maupun realitas yang diteliti.

Masyarakat *Digital Society* dan Media Sosial

Media sosial adalah sebuah media online, dengan para penggunanya bisa dengan mudah berpartisipasi, berbagi dan menciptakan isi meliputi Blog, jejaring sosial, Wiki, forum dan dunia virtual. Blog, jejaring sosial, dan Wiki merupakan bentuk media sosial yang paling umum digunakan oleh masyarakat di seluruh dunia. Pendapat lain mengatakan bahwa media sosial adalah media online yang mendukung interaksi sosial dan media sosial menggunakan

teknologi berbasis web yang mengubah komunikasi menjadi dialog interaktif. Andreas Kaplan dan Michael Haenlein mendefinisikan Media Sosial sebagai “sebuah kelompok aplikasi berbasis internet yang membangun di atas dasar ideologi dan teknologi Web 2.0 dan yang memungkinkan penciptaan dan pertukaran *user-generated content*”. Jejaring sosial merupakan situs dimana setiap orang bisa membuat *web page* pribadi, kemudian terhubung dengan teman-teman untuk berbagi informasi dan berkomunikasi. Jejaring sosial terbesar antara lain Facebook, *Myspace*, dan Twitter. Jika media tradisional menggunakan media cetak dan media *broadcast*, maka media sosial menggunakan internet. Media sosial mengajak siapa saja yang tertarik untuk berpartisipasi dengan memberi kontribusi dan *feedback* secara terbuka, memberi komentar, serta membagi informasi dalam waktu yang cepat dan tidak terbatas (Cahyono, 2016).

Media sosial/*social media* atau yang dikenal juga dengan jejaring sosial merupakan bagian dari media baru. Jelas kiranya bahwa muatan interaktif dalam media baru sangatlah tinggi. Media sosial didefinisikan sebagai sebuah media *online*, dengan para penggunanya bisa dengan mudah berpartisipasi, berbagi, dan menciptakan isi meliputi Blog, jejaring sosial, Wiki, forum, dan dunia virtual. Blog, jejaring sosial, dan Wiki merupakan bentuk media sosial yang paling umum digunakan oleh masyarakat di seluruh dunia. Ardianto dalam buku “Komunikasi 2.0” mengungkapkan bahwa media sosial *online* disebut jejaring sosial online bukan media massa *online*, karena media sosial memiliki kekuatan sosial yang sangat mempengaruhi opini publik yang berkembang di masyarakat. Penggalangan dukungan atau gerakan massa bisa terbentuk dari kekuatan media *online*, karena apa yang ada di dalam media sosial, terbukti mampu membentuk opini, sikap, dan perilaku publik atau masyarakat. Fenomena media sosial ini bisa dilihat dari kasus Prita Mulyasari versus Rumah Sakit Omni International. Inilah alasan mengapa media ini disebut media sosial bukan media massa (Watie, 2011).

Karakteristik media sosial tidak jauh berbeda dengan media siber (*cyber*) dikarenakan media sosial merupakan salah satu *platform* dari media siber. Namun demikian, menurut Nasrullah (2015) media sosial memiliki karakter khusus, yaitu: (1) Jaringan (*network*) yaitu infrastruktur yang menghubungkan antara komputer dengan perangkat keras lainnya. Koneksi ini diperlukan karena komunikasi bisa terjadi jika antar komputer terhubung, termasuk didalamnya perpindahan data; (2) Informasi (*informations*) yaitu menjadi entitas penting di media sosial, karena pengguna media sosial mengkreasi representasi identitasnya, memproduksi konten, dan melakukan interaksi

berdasarkan informasi; (3) Arsip (*archive*), bagi pengguna media sosial, arsip menjadi sebuah karakter yang menjelaskan bahwa informasi telah tersimpan dan bias diakses kapanpun dan melalui perangkat apapun; (4) Interaksi (*interactivity*), media sosial membentuk jaringan antar pengguna yang tidak sekedar memperluas hubungan pertemanan atau pengikut (*follower*) semata, tetapi harus dibangun dengan interaksi antar pengguna tersebut; (5) Simulasi Sosial (*simulation of society*), media sosial memiliki karakter sebagai medium berlangsungnya masyarakat (*society*) di dunia virtual. Media sosial memiliki keunikan dan pola yang dalam banyak kasus berbeda dan tidak dijumpai dalam tatanan masyarakat yang real dan (6) Konten oleh pengguna (*user-generated content*). Konten media sosial sepenuhnya milik dan berdasarkan kontribusi pengguna atau pemilik akun (Setiadi, 2016).

Tidak bisa dipungkiri jika kemajuan teknologi informasi saat ini justru menggiring masyarakat global ke arah akhir sosial. Alan Touraine melihat bahwa proses akhir sosial ini sebagai akibat modernisasi yang telah mencapai titik ekstremnya dewasa ini, yang disebut sebagai Hipermodernisasi Kontemporer. Proses sosial ini kini dipercepat dan mencapai keadaan maksimal di tangan media internet yang menciptakan berbagai informasi relasi sosial. Realitas yang ada ini membuat individu-individu penikmatnya seolah saling berlomba dalam sebuah arena duel, kontes tantangan, rayuan, dan godaan masyarakat konsumen. Akhir sosial juga ditandai oleh transparansi sosial, yaitu satu kondisi lenyapnya kategori sosial, batas sosial, hierarki sosial yang sebelumnya membentuk suatu masyarakat. Jaringan informasi menjadi bersifat transparan dan virtual tatkala tidak ada lagi kategori-kategori moral yang mengikatnya dan ukuran-ukuran nilai yang membatasinya. *Party-line* merupakan gambaran masyarakat *cyber* kita yang tenggelam di dalam ekstasi komunikasi. Orang yang terbuai dalam komunikasi di dalam dunia *cyber* bisa tenggelam didalamnya dan terbawa arus gaya komunikasi yang ada, hingga tidak jarang bisa seolah menjadi sosok lain, yang jauh beda dengan dunia nyatanya.

Terpaan media, interaksi dalam media di abad informasi saat ini, seringkali membuat diri orang yang terlibat didalamnya tidak lebih dari bentukan media. Christopher Wulf dalam artikelnya "*The Temporality of World-View and Self Image*", mengatakan bahwa pandangan dunia dan citra diri memang tidak bisa dipisahkan. Cara manusia memandang dunia adalah cara manusia memandang dirinya, dan cara manusia memahami dirinya adalah cara manusia memahami dunia. Kehadiran dunia virtual semakin mengukuhkan citraan-citraan yang dibentuk ini. Memang tidak bisa dipungkiri bahwa manusia

modern saat ini sangat tergantung hidupnya pada teknologi. Kehadiran internet yang diikuti dengan munculnya media sosial didalamnya membawa pula berbagai masalah etika berkomunikasi. Penggunaan identitas palsu untuk kepentingan yang “negatif”, penyebaran dan pengunduhan materi yang dilindungi hak cipta atau materi yang dilarang, merupakan hal yang melanggar etika dan dilarang. Namun kebebasan yang ditawarkan internet terutama dalam hal ini media sosial, seolah membuat matinya kepekaan etika. Apa yang harusnya tidak dilakukan, menjadi “nampak wajar” dilakukan. Bahkan tidak jarang ada yang menganggapnya bukan suatu kesalahan dengan berbekal berbagai pembenaran yang dimunculkan (Watie, 2011).

Banyaknya masyarakat yang mengakses informasi melalui media digital daripada media cetak. Menurut Hellen, anggapan bahwa media harus gratis mengerek tingkat penetrasi media digital hingga 11% dengan jumlah pembaca 6 juta orang pada tahun ini. Jauh lebih banyak dibanding pembaca media cetak sebanyak 4,5 juta orang (Reily, 2017).

Facebook juga mencatat peningkatan drastis penggunaan Facebook Live, Instagram Live, dan aplikasi pengiriman pesan. Facebook memperkirakan lonjakan terus berlanjut karena lebih banyak negara memerintahkan penduduknya untuk tinggal di rumah atau memberlakukan pembatasan wilayah. Meski begitu, Zuckerberg memperkirakan bahwa wabah Covid-19 dan strategi penahanan yang diberlakukan untuk membendung penyebaran virus akan menyebabkan “Kejutan Ekonomi Besar.” Zuckerberg juga mengatakan lembaga pemerintah belum meminta perusahaan media sosial untuk memberikan informasi pengguna guna melacak penyebaran virus (Nugroho, 2020).

Dari data yang dikutip Kompas Tekno di *We Are Social*, Jumat (2/3/2018), Indonesia menyumbang jumlah pengguna Facebook terbesar urutan keempat secara global. Hingga Januari 2018, jumlah pengguna Facebook dari Indonesia mencapai 130 juta akun dengan persentase enam persen dari keseluruhan pengguna. Angka ini sekaligus mencatat nama Indonesia sebagai negara di Asia Tenggara dengan jumlah pengguna Facebook paling banyak. Di bawah Indonesia, Filipina menempati urutan keenam dengan jumlah pengguna 67 juta akun. Disusul dengan Vietnam dan Thailand di urutan tujuh dan delapan dengan masing-masing jumlah pengguna mencapai 55 juta dan 51 juta akun (Septania, 2018).

Gambar 2. Pengguna Facebook di Dunia

COUNTRIES WITH THE LARGEST NUMBER OF ACTIVE FACEBOOK USERS			CITIES WITH THE LARGEST NUMBER OF ACTIVE FACEBOOK USERS				
#	TOP COUNTRIES	USERS	% TOTAL*	#	TOP CITIES	USERS	% TOTAL*
01	INDIA	250,000,000	12%	01	BANGKOK	22,000,000	1.0%
02	UNITED STATES	230,000,000	11%	02	DHAKA	20,000,000	0.9%
03	BRAZIL	130,000,000	6%	03	BEKASI	18,000,000	0.8%
04	INDONESIA	130,000,000	6%	04	JAKARTA	16,000,000	0.7%
05	MEXICO	83,000,000	4%	05	MEXICO CITY	7,000,000	0.6%
06	PHILIPPINES	67,000,000	3%	06	QUEZON CITY	7,000,000	0.6%
07	VIETNAM	55,000,000	3%	07	ISTANBUL	7,000,000	0.6%
08	THAILAND	51,000,000	2%	08	SÃO PAULO	13,000,000	0.6%
09	TURKEY	51,000,000	2%	09	CAIRO	13,000,000	0.6%
10	UNITED KINGDOM	44,000,000	2%	10	HO CHI MINH	13,000,000	0.6%

Sumber : Kompas, 2018

Penelitian yang dilakukan *We Are Social*, perusahaan media asal Inggris yang bekerja sama dengan *Hootsuite*, rata-rata orang Indonesia menghabiskan tiga jam 23 menit sehari untuk mengakses media sosial. Dari laporan berjudul “*Essential insights into internet, social media, mobile and e-commerce use around the world*” yang diterbitkan tanggal 30 Januari 2018, dari total populasi Indonesia sebanyak 265,4 juta jiwa, pengguna aktif media sosialnya mencapai 130 juta dengan penetrasi 49 persen. Sebanyak 120 juta orang Indonesia menggunakan perangkat *mobile*, seperti *smartphone* atau tablet untuk mengakses media sosial, dengan penetrasi 45 persen. Dalam sepekan, aktivitas *online* di media sosial melalui *smartphone* mencapai 37 persen.

Figur presentase rata-rata orang Indonesia menghabiskan waktunya untuk mengakses media sosial. Berdasarkan aplikasi yang paling banyak diunduh, perusahaan media sosial dibawah Mark Zuckerberg mendominasi di tiga teratas. Berdasarkan rata-rata trafik situs per bulan, Facebook menjadi media sosial paling banyak dikunjungi dengan capaian lebih dari 1 miliar juta pengunjung per bulan. Rata-rata pengunjung Facebook menghabiskan waktu 12 menit 27 detik untuk mengakses jejaring sosial tersebut. Sebesar 92 persen mengakses Facebook via *mobile* dengan perbandingan persentase berdasar gender sebanyak 44 persen untuk wanita dan 56 persen adalah pengguna pria. Pengguna Facebook didominasi golongan usia 18-24 tahun dengan presentase 20,4 persennya adalah wanita dan 24,2 persennya adalah pria (Pertiwi, 2018).

Pengguna Media Sosial

Berdasarkan hasil riset *We Are Social Hootsuite* yang dirilis pada Januari 2019 pengguna media sosial di Indonesia mencapai 150 juta atau sebesar 56% dari total populasi. Jumlah tersebut naik 20% dari survei sebelumnya (2018). Dalam sumber lain, berdasarkan hasil studi *polling* Indonesia yang

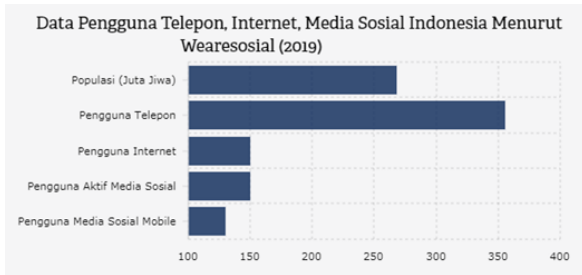
bekerja sama dengan Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (AJII) mengambil data Maret-April 2019 pengguna internet berjumlah 171.17 juta jiwa atau sekitar 64.8% dari total populasi penduduk Indonesia sebanyak 264 juta jiwa.

Sementara pengguna media sosial *mobile (gadget)* mencapai 130 juta atau sekitar 48% dari populasi. Besarnya populasi, pesatnya pertumbuhan pengguna internet dan telepon merupakan potensi bagi ekonomi digital nasional. Alhasil, muncul *E-commerce*, transportasi *online*, toko *online*, dan bisnis lainnya berbasis internet di tanah air. Ini akan menjadi kekuatan ekonomi digital di kawasan Asia Tenggara. Ditambah lagi dengan proyek “Palapa Ring” yang ditargetkan akan selesai tahun ini akan semakin meningkatkan penetrasi internet yang saat ini baru mencapai 56% maupun media sosial di Indonesia. “Palapa Ring” merupakan jaringan fiber optik 4G dengan kecepatan hingga 30 Mbps dengan panjang lebih dari 12.000 KM yang terbentang dari Sumatera hingga Papua (databoks, 2019).

Data tersebut sangat relevan dengan pertumbuhan signifikan pengguna media terutama media sosial di Indonesia, termasuk juga Pamekasan. Sehingga, penggunaan media digital membentuk karakter baru dalam bentuk komunikasi di Indonesia. Tren penggunaan media massa terutama media sosial pada akhirnya mampu mengubah suatu wilayah yang dipetakan sebagai pedesaan oleh sistem komunikasi Indonesia dimana suatu daerah yang pada awalnya menjadikan *opinion leader* sebagai sumber informasi dan sumber rujukan, posisinya digantikan oleh media.

Salah satu bentuk eksperimen yang paling sederhana ketika terjadi kasus dengan pemberitaan masif, sehingga dapat terbaca kecenderungan masyarakat bagaimana mereka mengonsumsi informasi Covid-19. Bahkan *trend* Covid-19 selalu menjadi nomer 1 dan *trending topic* di semua media sosial tanpa terkecuali. Dalam hal ini, pemerintah juga berencana meluncurkan Covid-19. Sebuah aplikasi diperuntukkan bagi pasien positif Corona atau diduga Corona untuk dapat melaporkan kondisi kesehatannya yang terintegrasi dengan Sistem Informasi Rumah Sakit (SIRS) dan pelaporan Corona Kementerian Kesehatan RI. Melalui Covid-R, pasien akan mendapatkan bimbingan dan layanan kesehatan yang mengutamakan kerahasiaan identitas pasien. Covid-R akan dikembangkan pada *platform Android* yang saat ini menjadi *platform* Heny Triyaningsih, sistem operasi *mobile* yang paling banyak penggunaannya di Indonesia. Fakta ini semakin memperkuat posisi media, peran serta tingkat keberpengaruhannya pada masa pandemi ini. Melalui media, apa yang dikonsumsi dapat dipantau secara berkala dan presisten (Triyaningsih, 2020).

Gambar 3. Perbandingan Data Statistik antara Pengguna Media Sosial dengan Pengguna Media Massa



Sumber : Databoks, 2020

Nielsen Indonesia menyatakan bahwa di Indonesia, saat ini pembaca media digital sudah lebih banyak ketimbang media cetak. Jumlah pembeli koran terus merosot dalam empat tahun terakhir karena masyarakat beranggapan bahwa informasi seharusnya bisa didapat secara gratis. Survei Nielsen *Consumer & Media View* hingga triwulan ketiga 2017 menyatakan kebiasaan membaca orang Indonesia telah mengalami pergeseran. Pada 2017, tingkat pembelian koran secara personal hanya sebesar 20%, menurun dibandingkan 2013 yang mencapai 28%. Masyarakat cenderung membaca koran di Kantor, Sekolah, dan Perpustakaan, sehingga tidak perlu mengeluarkan biaya. Menurut Hellen, anggapan bahwa media harus gratis mengerek tingkat penetrasi media digital hingga 11% dengan jumlah pembaca 6 juta orang pada tahun ini. Jauh lebih banyak dibanding pembaca media cetak sebanyak 4,5 juta orang. Padahal, jumlah pembaca media cetak pada 2013 bisa mencapai 9,5 juta orang. Sementara jumlah pembaca media cetak sekaligus digital hanya 1,1 juta orang. Selain itu, media cetak hanya menjadi pilihan kelima masyarakat untuk mendapatkan informasi dengan penetrasi sebesar 8%. Sementara urutan pertama di tempati televisi dengan 96%, kemudian diikuti papan iklan di jalanan 52%, penggunaan internet sebesar 43%, dan radio sebanyak 37%. Untuk penetrasi media cetak, masyarakat memilih koran dengan porsi 83%, tabloid 17%, dan majalah 15%. Survei Nielsen dilakukan di 11 kota dengan mewawancarai 17 ribu responden dan mencapai populasi sebanyak 54 juta orang. Masyarakat yang membaca media cetak pun didominasi oleh orang-orang berusia 20-49 tahun dengan porsi sebanyak 73%. Hanya 10% anak muda berusia 10-19 tahun yang mengakses media cetak sebagai sumber informasinya. Sebaliknya, sebanyak 17% anak muda berusia 10-19 memperoleh informasi lewat internet. Untuk pembaca berusia 20-49 tahun

jumlahnya sebesar 80%. Artinya, media harus mulai mempertimbangkan digitalisasi untuk menarik generasi Z (10-19 tahun). Apalagi, Nielsen juga menemukan bahwa 36% pembaca media cetak adalah pemimpin perusahaan atau birokrat mapan.

Dengan jumlah pengeluaran yang lebih tinggi daripada masyarakat biasa, mereka punya tendensi untuk beralih ke media digital. Tak hanya jumlah pembaca, pengeluaran iklan untuk media cetak pun berkurang. Pada Januari-September 2017, jumlah belanja iklan media cetak Rp 21,8 triliun, berkurang 13% dibanding periode yang sama pada 2013 yakni Rp 25 triliun. Selain itu, produsen media cetak juga berkurang sebesar 23%. Nielsen mencatat ada 268 media cetak pada 2013, namun merosot tajam menjadi hanya 192 media pada 2017. Namun, angka itu dipengaruhi oleh penurunan jumlah produsen tabloid dan majalah yang berkurang sebanyak 92 unit, hanya 2 produk koran yang menyatakan gulung tikar. Lalu apakah ini berarti media cetak telah benar-benar memasuki senja kala di Indonesia? Nielsen menemukan media cetak masih lebih populer dibandingkan media digital di luar Pulau Jawa. Masyarakat di Medan, Makassar, Palembang masih memilih cetak dibandingkan digital. Kemungkinannya, mereka lebih tertarik mengakses berita lokal. “Mungkin juga karena akses internet masih terbatas,” ujar Hellen. Peluang bisnis bagi media cetak tampaknya juga cukup baik karena 2018 merupakan tahun politik sehingga kemungkinan organisasi politik untuk beriklan di media cetak pun semakin tinggi. Selain itu, 56% pembaca media cetak memilih koran dibanding media digital, karena tingkat kepercayaannya tinggi (Reily, 2017).

Berita dan Teori *Priming* dalam Media Sosial

Konsep *priming* berawal dari penelitian Berkowitz & Rogers tahun 1986. Konsep *priming* membahas tentang “*short-term media effect*” atau efek-efek jangka pendek yang timbul dalam pikiran dan perilaku seseorang setelah mengkonsumsi media. Berkowitz berpendapat bahwa konten yang dimuat media massa akan memiliki pengaruh temporer pada khalayaknya. Sesaat setelah mengkonsumsi media, siapapun khalayak media tersebut, baik anak-anak maupun orang dewasa, pikirannya pasti akan diwarnai oleh apa yang mereka saksikan di media tersebut (Andi Youna Bachtiar, 2016).

Konsep *priming* berawal dari penelitian Berkowitz & Rogers pada tahun 1986. Konsep *priming* membahas tentang “*short-term media effect*” atau efek-efek jangka pendek yang timbul dalam pikiran dan perilaku seseorang setelah mengkonsumsi media. Berkowitz berpendapat bahwa konten yang dimuat

media massa akan memiliki pengaruh temporer pada khalayaknya. Sesaat setelah mengkonsumsi media, siapapun khalayak media tersebut, baik anak-anak maupun orang dewasa, pikirannya pasti akan diwarnai oleh apa yang mereka saksikan di media tersebut. Asumsi ini menjelaskan mengapa sesaat setelah menonton film horor kita akan merasa takut dan ngeri, mengapa setelah menyaksikan drama yang melankolis kita akan merasa sedih dan terharu. Berkowitz meyakini bahwa sekecil apapun dan secepat apapun dampak tersebut bertahan, media pasti tetap memberikan dampak pada khalayaknya. Dalam mengembangkan konsep *Priming*, Berkowitz berlandaskan pada perspektif *cognitive-neoassociation*. Tradisi dan perspektif psikologi sosial ini berada dalam lingkaran teori kognitif dalam konteks ilmu komunikasi. Perspektif ini menyebutkan bahwa memori manusia pada dasarnya merupakan sekumpulan jaringan yang setiap jaringannya terdiri dari unit-unit atau nodus-nodus yang merepresentasikan elemen substantif pemikiran dan perasaan manusia, yang selanjutnya terhubung melalui lintasan asosiatif. Kuat lemahnya hubungan asosiatif ini ditentukan oleh berbagai faktor, meliputi kontinuitas, similaritas, dan keterkaitan makna.

Pada saat berita kekerasan terus menerus menerpa otak kita, otak sepertinya otomatis menyimpan berita ini. Memori *blue print* proses *priming* kekerasan itu akan mempengaruhi kognisi, afeksi, dan psikomotorik. Suatu saat *violence* yang tersimpan ini akan dengan mudah diaktifkan dengan pemaparan (*exposure*) suatu tindakan atau berita yang berbau *violence* pula. Apa yang dilakukan orang lain terhadap kita, secara tidak sadar akan kita gunakan pula terhadap orang-orang di sekeliling kita. Pemaparan yang secara terus menerus dan sistematis ini bisa memengaruhi persepsi sosial, dan sikap serta perilaku dari seseorang. Gejala ini dikenal dengan nama efek *priming* (*priming effect*). Secara teori, efek *priming* merupakan pengaktifan suatu *potential knowledge* yang telah tertanam dalam memori manusia. Pengaktifan ini bertujuan untuk mempercepat pemrosesan informasi.

Berkowitz dan Jo menjelaskan tentang kemungkinan yang akan terjadi setelah seseorang mengkonsumsi tayangan kekerasan di media massa, yaitu dalam kondisi tertentu dan kurun waktu singkat, akan terdapat kecenderungan peningkatan: (1) pikiran negatif yang mewarnai interpretasi mereka terhadap orang lain; (2) kepercayaan bahwa perilaku agresif dapat dibenarkan dan menguntungkan diri mereka dan (3) berperilaku lebih agresif.

Priming adalah proses ketika media berfokus pada sebagian isu dan tidak pada isu lainnya dengan demikian mengubah standar berita yang dikonsumsi oleh banyak orang. Adanya pemberitaan yang diselipkan dalam media sosial

dan gencar dipublikasikan dalam suatu halaman tertentu, ukuran *headline*, dan ruang yang diberikan untuk berita tersebut. Banyaknya media sosial yang menempatkan berita-berita atau isu-isu yang menonjol dalam media sosial. Hal ini mendorong khalayak untuk belajar mengenai isu-isu yang dianggap penting.

Dalam teori *priming*, bukan apa saja yang dianggap penting media akan dianggap penting oleh khalayak, tetapi adanya penonjolan-penonjolan berita tertentu juga mempengaruhi persepsi khalayak mengenai isu tersebut. Dalam hal pemberitaan media sosial mengenai isu Covid-19 ini lebih mengarah kepada hal-hal yang negatif. Hal-hal negatif yang terus gencar dipublikasikan kepada masyarakat akan mempengaruhi pola pikir serta perilaku masyarakat. Banyaknya perilaku negatif masyarakat yang muncul akibat mengkonsumsi berita Covid-19 yang bernada negatif, seperti munculnya stigma sosial kepada korban Covid-19 adanya sikap diskriminasi terhadap pasien, rasa benci, kasus pengusiran perawat yang tinggal di kos maupun kontrakan, karena dikhawatirkan mampu menularkan virus hingga kasus penolakan jenazah pasien Covid-19.

Newcomb mengatakan dalam konteks Sosiologis, perubahan sikap suatu masyarakat umumnya dipengaruhi oleh adanya informasi baru yang didapatnya. Hal ini sesuai dengan konsep media sosial yang berkecimpung dalam memberikan informasi, mendidik, menghibur serta memengaruhi. Melalui fungsinya ini, pers memegang peranan penting dalam tatanan kehidupan masyarakat. Kurt Lang dan Gladys Lang menghasilkan pernyataan awal tentang gagasan penentuan agenda. Media massa memaksakan perhatian pada isu-isu tertentu. Media massa secara konstan menghadirkan objek-objek yang menunjukkan apa yang hendaknya dipertimbangkan, diketahui, dan dirasakan individu-individu dalam masyarakat (Ansor, 2011).

Gambar 4. Priming di Facebook

16.31

Postingan Don

Don As Samarani IKATAN KELUARGA BESAR SEMARANG
2 jam

Melansir data dari laman siagacorona.semarangkota.go.id, per Minggu (9/8/2020) pukul 19.00 WIB, jumlah pasien yang terkonfirmasi positif virus corona di Kota Semarang naik kembali. Per hari itu ada 13 kasus baru pasien positif yang dirawat di Ibu Kota Jawa Tengah tersebut.

IDN TIMES JATENG

#HIDUPBERSAMACORONA NEWS BUSINESS SI >

Update Virus Corona di Semarang, Tambah 13 Positif dan 7 Meninggal

Jumlah pasien positif COVID-19 yang dirawat capai 585 orang



16.33

Postingan Syiar Islam

Syiar Islam
11 Jul 2020

Dua Dokter Kakak Beradik di Semarang Meninggal karena Virus Corona
Baca selengkapnya pada artikel berikut ini.



Dua Dokter Kakak Beradik di Semarang Meninggal karena Virus Corona - Ayo Baca
Ketika masyarakat Indonesia sudah dapat kembali bernafas lega, dengan longgarn...
muslimiina.com

42

42 1

Paling Relevan dipilih, sehingga beberapa komentar mungkin sudah difilter.

Tulis komentar...

16.33

Postingan Syiar Islam

Syiar Islam
11 Jul 2020

Dua Dokter Kakak Beradik di Semarang Meninggal karena Virus Corona
Baca selengkapnya pada artikel berikut ini.



Dua Dokter Kakak Beradik di Semarang Meninggal karena Virus Corona - Ayo Baca
Ketika masyarakat Indonesia sudah dapat kembali bernafas lega, dengan longgarn...
muslimiina.com

42

42 1

Paling Relevan dipilih, sehingga beberapa komentar mungkin sudah difilter.

Tulis komentar...

16.33

Postingan IDN Times Jateng

IDN Times Jateng
1 hari

Jumlah pasien positif yang dirawat mencapai 572 orang



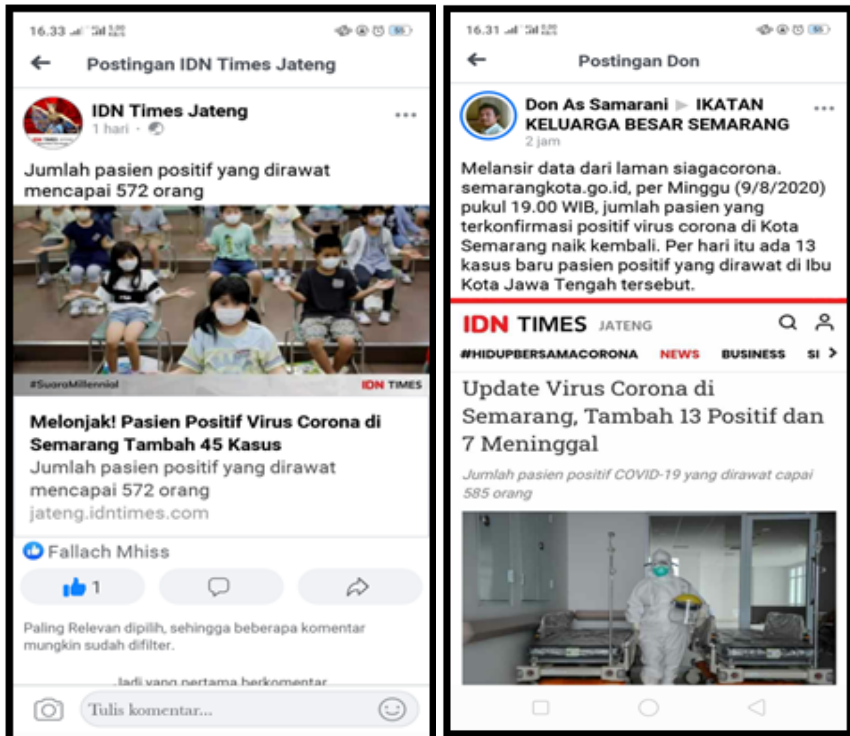
Melonjak! Pasien Positif Virus Corona di Semarang Tambah 45 Kasus
Jumlah pasien positif yang dirawat mencapai 572 orang
jateng.idntimes.com

Fallach Mhiss

1

Paling Relevan dipilih, sehingga beberapa komentar mungkin sudah difilter.

Tulis komentar...



Sumber : (Facebook, 2020)

Berdasarkan gambar di atas dapat kita lihat, banyak terdapat informasi-informasi mengenai Covid-19 didalam media sosial Facebook. Berita mengenai Virus Corona ini sangat mendominasi di Facebook.

Guru Besar Psikologi Universitas Gadjah Mada, Prof. Koentjoro menilai, penolakan masyarakat karena adanya ketidakpahaman sehingga bertindak berlebihan hingga melebihi batas. “Itu ada dua kemungkinan. Satu, keyakinan yang salah. Jadi mereka itu bahasa Jawaanya sok keminter.” Menurut Koentjoro hal itu disebabkan hubungannya dengan rasa ketakutan yang berlebih, padahal semuanya itu tidak perlu (Kompas.com, 2020). Ia menjelaskan ketakutan berlebihan seharusnya tidak perlu terjadi, karena semua tindakan yang diambil pasti sudah berdasarkan perhitungan yang matang. Koentjoro mengajak masyarakat untuk merenung dan memposisikan diri sebagai tenaga medis atau mereka yang menderita Covid-19.

Sementara itu, saat dihubungi terpisah, Guru Besar Sosiologi Universitas Gadjah Mada Prof. Dr. Sunyoto Usman, menilai penolakan warga salah satunya karena tidak tersampainya informasi secara jelas soal Virus Corona

hingga ke akar rumput. Menurut Sunyoto, informasi yang beredar mengenai Covid-19 menimbulkan rasa takut yang berlebihan di tengah masyarakat. “Ini kan memang media luar biasa memberitakan Covid itu, sehingga di satu sisi kalangan tertentu (terasa) mencekam (Kompas.com, 2020). Ketika terjadi kebingungan dan kepanikan, tidak semua mendapatkan informasi yang benar. Penjelasan yang jelas dan disampaikan dengan tenang, menurut Usman, akan efektif untuk mencerahkan masyarakat terkait penyakit ini. Menurut dia, penyampaian informasi secara berlebihan juga menyebabkan Virus Corona ini menjadi hal yang sangat menakutkan bagi masyarakat (Azanella, 2020).

Covid-19 dan Munculnya Stigma Sosial

Stigma merupakan suatu istilah yang menggambarkan suatu keadaan atau kondisi terkait sudut pandang atas sesuatu yang dianggap bernilai negatif. Stigma dipahami sebagai konstruksi sosial dimana tanda membedakan aib sosial melekat pada orang lain untuk mengidentifikasi dan mendevalusi mereka. Biasanya stigma ada pada beban penyakit. Stigma sosial dalam konteks kesehatan adalah hubungan negatif antara seseorang atau sekelompok orang yang berbagi karakteristik tertentu dan penyakit tertentu. Stigma dapat: 1) mendorong orang untuk menyembunyikan penyakit untuk menghindari diskriminasi; 2) mencegah orang mencari perawatan kesehatan segera dan 3) mencegah mereka untuk mengadopsi perilaku sehat. Stigma dari beberapa penyakit dan kelainan merupakan isu sentral dalam kesehatan masyarakat (Septiawan, Mulyani, dan Susanti, 2018). Para penderita dari beberapa penyakit tertentu sering mendapatkan stigma yang memberikan rasa rendah diri. Penderita kusta, TBC, Diabetes, dan lain-lain dianggap memiliki stigma negatif di masyarakat. Sehingga orang-orang di sekitarnya cenderung menjauh dan tidak mau terlibat kontak dengan mereka walaupun mereka sudah dinyatakan sembuh sekalipun (Abdillah, 2020).

Stigmatisasi sering terjadi seiring munculnya wabah penyakit infeksi, seperti halnya Covid-19. Stigma ini diawali dengan perasaan takut dan khawatir tertular, yang menyebabkan munculnya pandangan negatif di tengah masyarakat terhadap hal-hal yang berhubungan dengan Covid-19. Sebut saja, penderita Covid-19 bahkan keluarganya telah diberikan label sebagai penyebar penyakit, lalu diikuti dengan sikap masyarakat yang menjauhi mereka. Tidak hanya itu, mereka yang terkena Virus Corona ini mengalami diskriminasi dalam beberapa hal, seperti penyewaan rumah dan transportasi umum. Yang sangat disayangkan, pengalaman stigmatisasi ini juga dirasakan oleh tenaga kesehatan, terutama perawat yang jelas-jelas telah berkorban untuk menolong di garda depan.

Sebuah survei yang dilakukan oleh peneliti dari Fakultas Ilmu Keperawatan UI bekerjasama dengan Ikatan Perawat Kesehatan Jiwa Indonesia di awal April 2020 kepada 2050 perawat se-Indonesia menunjukkan 140 perawat pernah merasa dipermalukan oleh orang lain, karena statusnya sebagai perawat Covid-19 atau bertugas di Rumah Sakit tempat penanganan Covid-19. Survei ini juga menunjukkan sekitar 135 perawat pernah diminta meninggalkan tempat tinggalnya.

Bentuk nyata penolakan yang dirasakan antara lain: ancaman pengusiran (66 responden), orang-orang di sekitar menghindar dengan menutup pagar rumah/ pintu mereka ketika melihat perawat (160 responden), dan masyarakat ikut menjauhi keluarga perawat (71 responden). Survei ini membuktikan adanya penolakan terhadap perawat yang selama ini diberitakan media, seperti tidak diperbolehkan kembali ke tempat tinggal. Baru-baru saja seorang perawat di Jawa Tengah yang wafat ditolak jenazahnya untuk dikuburkan di tempat pemakaman umum (Fachrurrozi, Potret Pilu Indonesia: Menolak Pemakaman Perawat Covid-19, 2020).

Dalam Teori Peluru (*bullet theory*) oleh Wilbur Schramm. Teori ini menyiratkan bahwa efek media mengalir secara langsung dari media ke individu seperti peluru. Menurut Joseph Klapper, Teori Peluru ialah komunikasi massa yang memiliki dampak atau efek umum yang mempengaruhi penguatan sikap suatu komunitas masyarakat. Berdasarkan Teori Peluru, orang yang menonton televisi atau memainkan *video games* yang mengandung kekerasan akan langsung terpengaruh, sehingga dia akan melakukan kekerasan di kehidupan nyata sebagaimana yang dia lihat dari media. Kemudian Teori *Two Step Flow*, dimana efek media terjadi sebagian besar dalam interaksi dengan komunikasi antar perseorangan. Media tidak mempunyai efek langsung, namun efek media terbantu oleh *opinion leader* yang menyampaikan informasi yang sama dengan media atau menguatkan informasi dari media. Adapun ke (3) Teori *Multi Step Flow*, yang artinya efek media adalah bagian dari kompleksitas interaksi. Pada satu level, opini media massa dapat dipertajam oleh opini dari *opinion leader*, namun pada saat yang sama interaksinya dengan orang-orang di sekitarnya atau informasi dari berbagai sumber mampu menguatkan atau melemahkan opini media massa tersebut. Interaksi yang kompleks tersebut dapat bersumber dari interaksinya dengan teman, keluarga, sekolah, perusahaan yang kemudian akan menjadi penyaring (*filter*) informasi dari media yang akan mempengaruhi reaksi individu terhadap informasi media.

Berdasarkan perspektif pengetahuan sosial (*social science perspective*) atau sering juga disebut teori model berdasar dari asumsi bahwa orang

mempelajari bagaimana bertingkah laku adalah dengan mengamati orang lain, termasuk mengamati yang digambarkan oleh media massa. Teori yang terkenal dari perspektif pengetahuan sosial beberapa diantaranya yaitu *individual differences theory*. Teori ini memprediksi bahwa orang dengan karakteristik yang berbeda akan dipengaruhi dengan cara yang berbeda oleh media massa. Perbedaan termasuk umur, jenis kelamin, wilayah geografis audiens, dan tingkat pendidikan, serta level kekerasan yang terjadi di keluarganya itulah yang akan membedakan reaksi ketika mendapat tayangan atau informasi dari media massa (Triyaningsih, 2020).

Stigma sosial terbukti tidak dapat meningkatkan kemampuan masyarakat modern untuk bertahan dari penyakit menular, tetapi pada kenyataannya hal tersebut malah menjadi salah satu faktor penyebab kegagalan dalam melindungi kesehatan masyarakat akibat penyakit menular baru (Smith & Hughes, 2014). Bukti yang ada jelas menunjukkan bahwa stigma dan ketakutan terhadap beberapa penyakit menular justru menghambat respon yang efektif dan memperumit penanganan kasus penyakit menular. Pengucilan penderita seperti yang terjadi pada beberapa penyakit menular (HIV-AIDS, TBC dan lainnya) malah menimbulkan dampak perburukan psikologis dan fisik bagi penderita dan keluarga. Hal ini tentunya berlaku pula pada orang yang terdampak Covid-19. Orang-orang kemudian dapat bersifat defensif dengan menyembunyikan kasusnya dan mencegah mereka mencari pengobatan yang tepat, sehingga akan semakin mempersulit pencegahan penyebaran penyakit tersebut. Upaya yang harus dilakukan untuk menunjang keberhasilan penanganan Covid-19 adalah seharusnya dengan cara membangun kepercayaan pada layanan dan sarana kesehatan yang ada, menunjukkan empati pada mereka yang terdampak, memahami penyakit itu sendiri, dan mengadopsi langkah-langkah praktis dan efektif, sehingga orang dapat membantu menjaga diri dan orang yang dicintai tetap aman (Dai, 2020).

Perilaku seseorang yang dipublikasi oleh media kadang dapat mendorong orang lain untuk melakukan tindakan mengadopsi perilaku tersebut. Tindakan menduplikasi apa yang dilihat di media bukan melulu dilakukan oleh anak-anak melainkan juga orang dewasa. Teori Dampak yang Kuat (*The powerfull- effects models*) menyatakan bahwa dalam keadaan-keadaan tertentu, media massa bisa mempunyai dampak yang signifikan pada sejumlah besar orang. Teori Spiral Kesunyian (*Spiral of Silence*) miliknya sesuai dengan model dampak yang kuat. Tiga penelitian lain yang juga mengindikasikan dampak yang kuat yang disebabkan oleh media massa dilaksanakan oleh Mendelsohn

(1973); Maccoby dan Furquhar (1975); dan Ball Rokeach, Rokeach dan Grube (1984) (Severin, Teori Komunikasi, 315). Media massa merupakan sesuatu yang akrab dalam kehidupan masyarakat sehari-hari. Baik itu media cetak maupun elektronik. Kehadirannya menjadikan suplemen tersendiri terutama bagi masyarakat dengan mobilitas tinggi. Kehadiran media massa dapat dijadikan sebagai hiburan sebagaimana dijelaskan oleh Devito di atas. Artinya, kebutuhan masyarakat terhadap media massa sangat tinggi. Jika merujuk pada hasil penelitian tentang seberapa tinggi intensitas masyarakat dalam menonton televisi maka dapat dilihat bahwa masyarakat memiliki kecenderungan yang besar dalam mengakses informasi melalui televisi (Holilah, 2016).

Berita yang keluar masuk melalui laman media sosial bisa bercampur antara berita valid dan berita *hoax*, sehingga berita mengenai Virus Corona semakin mendominasi bahkan bisa dikatakan berita mengenai Virus Corona tersebut memonopoli pemberitaan di Indonesia pada kurun waktu sepanjang akhir Februari-Maret 2020. Berita-berita yang lain seolah tenggelam. Dalam hal ini, memaklumkan sebuah teori bahwa jika berita yang sama dimasukkan terus menerus dalam pemikiran/sajian, maka akan menjadikan konstruksi media berupa tulisan atau liputan mampu menciptakan/mengkonstruksi realitas di masyarakat relevan dengan isi media. Artinya, jika media meliput betapa gawatnya Virus Corona maka yang akan terkonstruksi pada pemikiran masyarakat adalah betapa gawatnya keadaan sekarang sehingga pada kondisi yang gawat ini apa yang harus disiapkan. Salah satu pengaruh yang signifikan akan kekhawatiran virus adalah dengan pemborongan barang-barang sembako dan bahan makanan lain, misalnya mie dan makanan instan yang lain. Rak toko-toko kelontong dan minimarket terutama di daerah terdampak yaitu DKI dan Jawa Barat tampak kosong dari dagangan bahan makanan dan alat kesehatan sederhana, yaitu *hand sanitizer*, masker serta sarung tangan.

Respon masyarakat dalam menanggapi pemberitaan mengenai Virus Corona dapat dikatakan reaktif bahkan cenderung “kalap”. Beberapa pihak yang kurang bertanggungjawab malah melakukan pemborongan/penimbunan barang-barang sehingga kelangkaan terjadi. Barang-barang yang diperlukan dalam kegiatan sehari-hari langka dan bahkan jika tersedia maka harganya mahal berpuluh kali lipat dari harga normal. Disebutkan bahwa harga per box masker merk “Sensi” dibandrol Rp. 350.000 per pack sampai 2.500.000, dimana harga normalnya berkisar Rp. 45.000-60.000.

Gambar 5 : Priming di Facebook



Sumber : Facebook, 2020

Penolakan terhadap pemakaman jenazah pasien positif Covid-19 terjadi di sejumlah daerah. Terakhir, jenazah seorang perawat RSUP Dr. Kariadi Semarang yang meninggal dunia karena terinfeksi virus Corona ditolak oleh warga untuk dimakamkan di Tempat Pemakaman Umum (TPU) Sewakul di RT 06, Ungaran Barat, Kabupaten Semarang. Peristiwa ini semakin menambah keprihatinan di tengah perjuangan semua orang melawan Virus Corona. Ada stigma yang berkembang terhadap penderita Covid-19 atau bahkan mereka yang berada di garis depan menangani pasien Virus Corona. Alasannya, khawatir menjadi sumber penyebaran Virus Corona (Kompas, 2020).

Disinilah tampak kuatnya pengaruh media. Media menjadi kekuatan yang mampu memberi dorongan untuk melakukan sesuatu. Dampak konsumsi media menjadikan konsumen media mengkonstruksi realitas sesuai dengan konstruksi media. Seperti halnya yang terjadi pada kasus lain pada awal Maret terkait paparan media. Masih di bulan yang sama, yaitu Maret 2020. Kasus NF, seorang remaja berumur 14 tahun yang membunuh dengan sengaja seorang anak di rumahnya sangat viral pada bulan tersebut. Dalam investigasi yang dilakukan oleh Kepolisian, ditemukan bahwa keinginan membunuh

NF; salah satunya adalah dipicu oleh media yang ditontonnya, khususnya film. Diambil dari Tribunnews.com tanggal 10 Maret 2020 disebutkan bahwa tontonan film horror sekaligus tokoh film mempengaruhinya sehingga ingin mempraktekkan adegan di film dalam kehidupan nyata. Terlepas dari kompleksnya faktor-faktor penyebab pembunuhan, kasus tersebut adalah salah satu dari deretan kasus yang terjadi akibat terpaan media. Kasus sebelumnya yang terjadi juga didominasi oleh terpaan media, seperti kasus *bullying* dan kekerasan kepada teman sekolah. (Triyaningsih, 2020)

Media berperan penting dalam komunikasi risiko kepada masyarakat dengan tidak hanya fokus pada pertumbuhan kasus dan kurangnya keterbukaan informasi perihal penanganan Covid-19. Dia menilai, pemberitaan media terkait informasi yang utuh soal penularan virus yang tidak sampai ke masyarakat sangat memengaruhi stigma terhadap orang terkait Covid-19 baik itu kategori Orang Tanpa Gejala (OTG), Orang Dalam Pemantauan (ODP), Pasien Dalam Pengawasan (PDP), dan pasien positif dan keluarga pasien serta tenaga kesehatan. (Fachrurrozi, Potret Pulu Indonesia: Menolak Pemakaman Perawat Covid-19, 2020)

Penutup

Maraknya pemberitaan mengenai Covid-19 di media sosial Facebook memunculkan dampak di berbagai aspek kehidupan masyarakat salah satunya muncul fenomena stigma sosial terhadap seseorang atau sekelompok orang yang mengalami gejala atau menyandang status pasien ODP, PDP, maupun Positif Covid-19. Peristiwa ini salah satunya terjadi di Kabupaten Semarang, Jawa Tengah. Adanya pengaruh signifikan yang disebabkan oleh masifnya pemberitaan mengenai Covid-19 terhadap munculnya stigma sosial dalam masyarakat. Mulai dari ketakutan dan kekhawatiran yang berlebihan hingga memunculkan stigma sosial, seperti ancaman pengusiran (66 responden), orang-orang di sekitar menghindari dengan menutup pagar rumah/pintu mereka ketika melihat perawat (160 responden), dan masyarakat ikut menjauhi keluarga perawat (71 responden). Survei ini membuktikan adanya penolakan terhadap perawat yang selama ini diberitakan media, seperti tidak diperbolehkan kembali ke tempat tinggal. Fenomena semacam ini sangat disayangkan karena dalam hal ini tenaga medis telah menerapkan protokol kesehatan dan juru pemerintah telah memberikan sosialisasi tentang penularan virus ini. Sehingga masyarakat diharapkan tidak panik atau memiliki kekhawatiran yang berlebihan terhadap virus Covid-19. Namun tetap mentaati anjuran pemerintah.

Daftar Pustaka

E-book:

Abdillah, L. A. (2020). Stigma Terhadap Orang Positif Covid-19 . 16. Diperoleh dari (<https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=http://eprints.binadarma.ac.id/4163/1/Abdillah2020%2520KitaMenulis%2520%255BStigma%2520Terhadap%2520Orang%2520Positif%2520COVID19%255D.pdf&ved=2ahUKEwiJwoG797zrAhXafX0KHXboAG4QFjAAe-gQIBhAC&usq=AOvVaw0hds9gjM5wgXV-peWXAu7>)

Jurnal:

- Andi Youna Bachtiar, D. H. (2016). Peran Media Dalam Propaganda. *Jurnal Komunikologi*, 13(2), 87.
- Ansor. (2011). Teori Agenda Setting Dan Citra Pemerintah: Analisis Pemberitaan Korupsi Dan Penurunan Citra Pemerintahan Sby. *Jurnal Komunikasi*, 5(2), 148.
- Cahyono, A. S. (2016). Pengaruh Media Sosial Terhadap Perubahan Sosial Masyarakat Di Indonesia. *Publiciana*, 9(1), 141.
- Dai, N. F. (2020). Stigma Masyarakat Terhadap Pandemi Covid-19. 72. Diperoleh dari (<https://www.jurnal-unita.org/index.php/publiciana/article/view/79>)
- Holilah, I. (2016). Dampak Media Terhadap Perilaku Masyarakat. *Jurnal Studi Gender Dan Anak*, 3(1), 109.
- Mardiana. (2018). Pengaruh Media Sosial Terhadap Tingkat Pidana Narkotika di Sulawesi Tenggara Communicatus. *Jurnal Ilmu Komunika*, 2(2), 110.
- Setiadi, A. (2016). Pemanfaatan Media Sosial Untuk Efektifitas Komunikasi,. *Cakrawala-Jurnal Humaniora*, 16(2), 2-3.
- Triyaningsih, H. (2020). Efek Pemberitaan Media Massa Terhadap Persepsi Masyarakat Pamekasan Tentang Virus Corona. *Jurnal Meyarsa*,

1(1) 7-10.

Watie, E. D. (2011). Komunikasi dan Media Sosial. *The messenger*, 3(2), 70-72.

Website:

BPS. (2017). Kabupaten Semarang. Diperoleh dari (<https://semarangkab.bps.go.id/publication/2017/08/11/8c4a5e64fef26d813f02802/kabupaten-semarang-dalam-angka-2017.html>)

Databoks. (2019). Berapa Pengguna Media Sosial Indonesia?. Diperoleh dari (<https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2019/02/08/berapa-pengguna-media-sosial-indonesia>)

Nugroho, A. C. (2020). Facebook Akan Tempatkan Informasi Seputar Covid-19 di Halaman Muka. *Bisnis.com*. Diperoleh dari (<https://www.google.com/amp/s/m.bisnis.com/amp/read/20200319/19/1215288/facebook-akan-tempatkan-informasi-seputar-Covid-19-di-halaman-muka>)

Reily, M. (2017). Nielsen: Pembaca Media Digital Sudah Lampau Media Cetak. *Katadata*. Diperoleh dari (<https://katadata.co.id/berita/2017/12/07/nielsen-pembaca-media-digital-sudah-lampau-media-cetak>)

Artikel Surat Kabar:

Azanella, L. A. (2020). Penolakan Jenazah Pasien Covid-19, Mengapa Bisa Terjadi?. Diperoleh dari (<https://www.google.co.th/amp/s/amp.kompas.com/tren/read/2020/04/13/110821765/penolakan-jenazah-pasien-Covid-19-mengapa-bisa-terjadi>)

Budi, T. (2020). Data Terkini Sebaran Covid-19 di Jateng, Kota Semarang Tertinggi. *Okezone*. Diperoleh dari (<https://www.google.com/amp/s/news.okezone.com/amp/2020/05/25/512/2219337/data-terkini-sebaran-Covid-19-di-jateng-kota-semarang-tertinggi>)

Fachrurrozi. (2020). Potret Pulu Indonesia: Menolak Pemakaman Perawat Covid-19. *Antara*. Diperoleh dari (<https://www.google.com/amp/s/m.republika.co.id/amp/q9vvhw282>)

Pertiwi, W. K. (2018). Riset Ungkap Pola Pemakaian Medsos Orang Indonesia. *Kompas*. Diperoleh dari (<https://www.google.com/amp/s/amp.kompas.com/tekno/read/2018/03/01/10340027/riset-ungkap-pola-pemakaian-medsos-orang-indonesia>)

Septania, R. C. (2018). Indonesia, Pengguna Facebook Terbanyak ke-4 di Dunia. *Kompas*. Diperoleh dari (<https://www.google.com/amp/s/>)

amp.kompas.com/tekno/read/2018/03/02/08181617/indonesia-pengguna-facebook-terbanyak-ke-4-di-dunia).

Media Sosial:

Facebook. (2020). Diperoleh dari:

(<https://www.facebook.com/1113886165450983/posts/1484860128353583/?app=fbl>

<https://www.facebook.com/2168427309858581/posts/3585585384809426/?app=fbl>

<https://www.facebook.com/groups/515633061805420/permalink/3182652135103486/?app=fbl>)

**Pengaruh Pandemi Covid-19 terhadap
Komunikasi dan Interaksi Sosial
Pendidikan di MAN 2 Yogyakarta**

Alfina Hawawi

*Progam Studi Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial
dan Humaniora,*

UIN Sunan Kalijaga

Email: alfinhawawi@gmail.com

Pendahuluan

Wabah Virus Covid-19 masih menjadi berita atau informasi sehari-hari masyarakat yang terus diperbincangkan di Indonesia, bahkan dunia hingga saat ini. Grafik jumlah kasus Covid-19 pun terus menjadi sorotan setiap harinya karena peningkatan jumlah kasus yang semakin bertambah. Keadaan seperti ini membuat sebagian masyarakat merasa resah dan mulai mengeluhkan kondisi kehidupan saat ini, dimana tidak adanya penghasilan dan kebutuhan sehari-hari yang tidak ada habisnya bahkan semakin bertambah dari keadaan sebelumnya. Oleh karenanya banyak masyarakat yang memutuskan untuk keluar dan kembali bekerja meskipun dengan aturan baru yang terkadang membuat masyarakat sedikit kerepotan dengan berbagai protokol kesehatan yang mana masyarakat diharuskan untuk selalu menjaga kebersihan dan sebagainya lebih dari sebelumnya. Atas dasar tersebut, kasus penyebaran Covid-19 kembali menunjukkan grafik peningkatannya di berbagai daerah (news.detik, 2020).

Berikut data terbaru mengenai perkembangan Virus Covid-19 di Indonesia pada 13 Juli 2020. Indonesia mengalami penambahan kasus sebanyak 1282 kasus. Sehingga jumlah total 76.981 kasus, 36.689 sembuh, 3656 meninggal, 33.504 ODP (Orang Dalam Pemantauan), 13.439 PDP (Pasien Dalam Pengawasan), dan 36.636 dirawat. Jumlah tersebut menyebar di 461 Kabupaten/Kota (aceh.tribunnews, 2020).

Tabel 1. Data Rincian Penyebaran Virus Covid-19 di 461 Kabupaten/ Kota di 34 Provinsi di Indonesia

Aceh 106 kasus	Bali 2257 kasus	Banten 1600 kasus	Bangka Belitung 172 kasus	Bengkulu 163 kasus	Yogya- karta 379 kasus
-------------------	-----------------------	----------------------	---------------------------------	-----------------------	------------------------------

DKI Jakarta 14.797 kasus	Jambi 122 kasus	Jabar 5160 kasus	Jateng 5573 kasus	Jatim 16.877 kasus	KalBar 355 kasus
KalTim 695 kasus	KalTeng 1222 kasus	KalSel 4218 kasus	KalUt 215 kasus	Kep. Riau 332 kasus	NTB 1573 kasus
SumSel 2703 kasus	SumBar 800 kasus	SulUt 1680 kasus	SumUt 2367 kasus	SulTengah 193 kasus	SulTenggara 518 kasus
SulSel 7097 kasus	Lampung 209 kasus	Riau 243 kasus	Maluku Utara 1143 kasus	Maluku 900 kasus	Papua Barat 286 kasus
Papua 2365 kasus	SulBar 143 kasus	NTT 121 kasus	Gorontalo 363 kasus	-	-

*Dalam proses verifikasi lapangan sebanyak 34 kasus.

Sumber : idntimes.com , diakses pada hari Senin, 13 Juli 2020, pukul 12.10 WIB. Informasi terbaru : Indonesia saat ini sudah menyediakan 161 Laboraturium Real Time PCR dan 115 Laboraturium TCM.

Dapat kita ketahui dari data diatas bahwa penyebaran virus Covid-19 semakin hari kian meluas, tidak hanya meluas di pulau Jawa, virus tersebut juga meluas ke berbagai pulau lainnya seperti Sumatra, Kalimantan, Sulawesi, NTT, NTB, Bali, dan sebagainya. Virus Covid-19 membawa dampak begitu besar bagi kehidupan masyarakat di Indonesia. Seluruh aspek kehidupan manusia terkena dampak virus tersebut, terlebih dalam aspek ekonomi dan pendidikan. Aktivitas masyarakat yang mengalami penurunan drastis bahkan dapat dikatakan "lumpuh" sehingga membuat sebagian masyarakat tidak dapat memenuhi kebutuhan hidupnya. Terlebih masyarakat yang pekerjaannya dalam sektor non formal, banyak yang akhirnya harus mengalami kenyataan pahit yaitu ter-PHK, di rumahkan, tidak diberi gaji sementara, dan sebagainya (researchgate, 2020).

Akibat dari pandemi Covid-19 tersebut selain yang sudah dijabarkan sebelumnya, pandemi Covid-19 juga membawa berbagai perubahan, salah satunya perubahan yang terjadi pada pola komunikasi dalam masyarakat Indonesia. Pola komunikasi masyarakat Indonesia sangat jelas pasti akan berubah dengan adanya pandemi ini. Seperti komunikasi keseharian apapun yang biasanya dilakukan dengan cara bertatap muka langsung, sementara ini terpaksa harus dilakukan dengan cara *online/daring/jarak jauh*. Cara tersebut berlaku dalam kegiatan apapun, baik sekolah, bekerja dan bisnis. Sekalipun

memang harus keluar rumah, masyarakat diwajibkan menaati protokol atau aturan pemerintah seperti dengan menggunakan masker, dan sebagainya dan mencuci tangan, seringkali tidak mengenali siapa yang berada di sekitar mereka, hal tersebut terjadi karena seluruh masyarakat diwajibkan untuk selalu menggunakan masker dan saling menjaga jarak satu sama lain, serta mengurangi intensitas komunikasi secara dekat (news.detik, 2020).

Perubahan yang terjadi dalam masyarakat sangatlah kompleks dan bisa dikatakan saat ini semakin saling mendominasi antar perubahan tersebut. Selain perubahan yang telah disebutkan serta dijelaskan sebelumnya, juga terdapat perubahan lain seperti berubahnya pola komunikasi yang terjadi pada masyarakat Indonesia. Menurut Deddy Mulyana (2004), salah satu fungsi dari komunikasi adalah sebagai komunikasi sosial yang setidaknya mengisyaratkan bahwa komunikasi membantu masing-masing individu dalam membentuk konsep diri, aktualisasi, guna mempertahankan hidup, terhindar dari tekanan, dan menjaga hubungan antar individu atau kelompok lainnya. Terdapat beberapa pola komunikasi dalam masyarakat, antara lain : 1. pola komunikasi linear (komunikasi secara lurus, komunikator kepada komunikan pertama merupakan titik terminal informasi. Dalam komunikasi tersebut biasa dilakukan dengan tatap muka, dan bisa juga dengan bermedia). 2. Pola sirkular (pola komunikasi yang dilakukan secara berkeliling, memutar, bulat. Dimana komunikan serta komunikator sebagai penentu keberhasilan sebuah komunikasi. Dalam komunikasi dengan pola tersebut umpan balik merupakan hal penting yang harus dihasilkan dalam pola tersebut). Pola-pola tersebut merupakan salah satu pola komunikasi yang banyak terjadi di masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Akan tetapi saat ini masyarakat melakukan sedikit hal berbeda dalam pola komunikasi, yaitu mengurangi bahkan tanpa tatap muka, (Salsabilla, Nadira,2020).

Pola komunikasi masyarakat yang biasa dilakukan dalam keseharian mereka yang berjalan dengan natural alamiah serta terlihat begitu baik sekarang kebiasaan tersebut terpaksa harus sedikit banyak mengalami perubahan. Interaksi, komunikasi, yang dilakukan sebelumnya dapat terjadi dengan begitu mudah, saling mendekat tanpa sekat, saat ini hal tersebut lambat laun seperti asing dilakukan (digilib.uinsby, 2020). Komunikasi dilakukan secara online, berjarak, bahkan sedikit kita belajar untuk terbiasa berkomunikasi tanpa mengenal dahulu siapa lawan bicara kita karena tertutup oleh masker dan pelindung diri lainnya. Namun, dengan demikian kebiasaan baru tersebut perlahan juga membawa warna baru dalam kehidupan masyarakat. Pengetahuan teknologi di kalangan masyarakat sedikit meningkat karena

“kebiasaan” dalam “keterpaksaan” yang “mengharuskan” semua kalangan melakukannya (Salsabilla, Nadira, 2020).

Begitupun dengan aspek pendidikan seperti di sekolah, kampus, dan lembaga pendidikan lainnya terpaksa harus diliburkan lebih awal untuk sementara waktu ini. Aktivitas belajar mengajar dilakukan via daring atau *online*, melalui berbagai aplikasi seperti *Whatsapp Group*, *Zoom* atau pun *Google Classroom* guna mendorong proses belajar para siswa, seperti yang diterapkan pada sistem pembelajaran di MAN 2 Yogyakarta selama pandemi ini. Dalam pemberlakuan belajar mengajar via daring atau *online* pun tidak jarang menuai kritikan dari para siswa bahkan hingga wali/orang tua. Biaya kuota untuk akses internet yang sangat begitu banyak akhirnya membuat para orang tua dan siswa mengeluh (journal.uinjkt, 2020). Selain persoalan tersebut, belajar mengajar via *online* atau daring terkadang tidak diindahkan secara pas oleh para guru, mereka justru memberi setumpuk tugas yang tidak jarang membuat siswa semakin stres (djkn.kemenkeu, 2020). Pandemi Covid-19 membuat seluruh elemen dalam pendidikan menjadi kacau serta kemungkinan besar dapat menyebabkan berbagai disfungsi sosial, dekonstruksi, hingga disorganisasi dalam tatanan pendidikan di berbagai wilayah di Indonesia (djkn.kemenkeu, 2020).

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis. Ada sedikit data grafik yang dituliskan dalam penelitian guna memperkuat isi serta analisis yang digunakan dalam menyusun isi penelitian ini. Proses dan makna lebih ditonjolkan dalam penelitian kualitatif. Teori didalamnya dimanfaatkan sebagai pemandu agar fokus penelitian sesuai dengan apa yang terjadi di lapangan.

Profil Man 2 Yogyakarta

MAN 2 Yogyakarta berlokasi di Jalan K.H Ahmad Dahlan No. 130 Yogyakarta. MAN 2 Yogyakarta ditetapkan sebagai cagar budaya berdasarkan surat Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 185/KEP/2011. Sejarah awalnya bangunan yang saat ini menjadi MAN 2 Yogyakarta ini adalah milik seorang warga Cina yaitu Ngok An yang pada akhirnya bangunan milik warga Cina tersebut diambil oleh Pemerintah Indonesia. Pada tahun 1946-1949 bangunan ini digunakan untuk kantor Departemen Agama RI yang pertama, lalu pada tahun 1954-1974 digunakan untuk Sekolah Pendidikan Guru Agama Atas II (PGAA II), tahun 1974 berubah menjadi PGAN 6 Tahun Putri Yogyakarta. Setelah terbitnya SK Menteri Agama No. 17 Tahun 1978, PGAN 6 Tahun Putri Yogyakarta berubah menjadi MAN 2 Yogyakarta

hingga sekarang. Secara arsitektural, MAN 2 Yogyakarta memiliki gedung bercorak indis. Ciri khasnya terdapat pada gunung-gunung yang menyatu dan menggunakan material yang sama dengan dinding, serta hiasan atap yang berbentuk “gada”, dan ada beberapa ornamen bercorak Cina. Bangunan utama menggunakan model atap segi enam dan limasan, lantai menggunakan tegel atau keramik tua bermotif, meskipun MAN 2 Yogyakarta terus diperbarui bangunannya tetapi ciri khas bangunan tersebut tetap dipertahankan hingga saat ini (kebudayaan.kemdikbud, 2020).

Tabel 2. Profil sekolah MAN 2 Yogyakarta tahun ajaran 2019/2020.

	MAN 2 Yogyakarta
Nomor Statistika	131134710002
NPSN	20403387
Status Madrasah	Negeri
NPWP	000151779541000
Alamat	JL. K.H Ahmad Dahlan 130 Yogyakarta
Jalan/Nosmor	130
Desa/Kelurahan	Ngampilan
Kecamatan	Ngampilan
Kab/Kota	Yogyakarta
Provinsi	Daerah Istimewa Yogyakarta
Kode Pos	55261
Telepon/Fax	0274-513347
Email Madrasah	man_jogja@yahoo.com
Tahun Berdiri/izin	1978
No. SK izin	WI/1.b/pt/702/6a/1978
Tgl. SK izin	16 Maret 1978

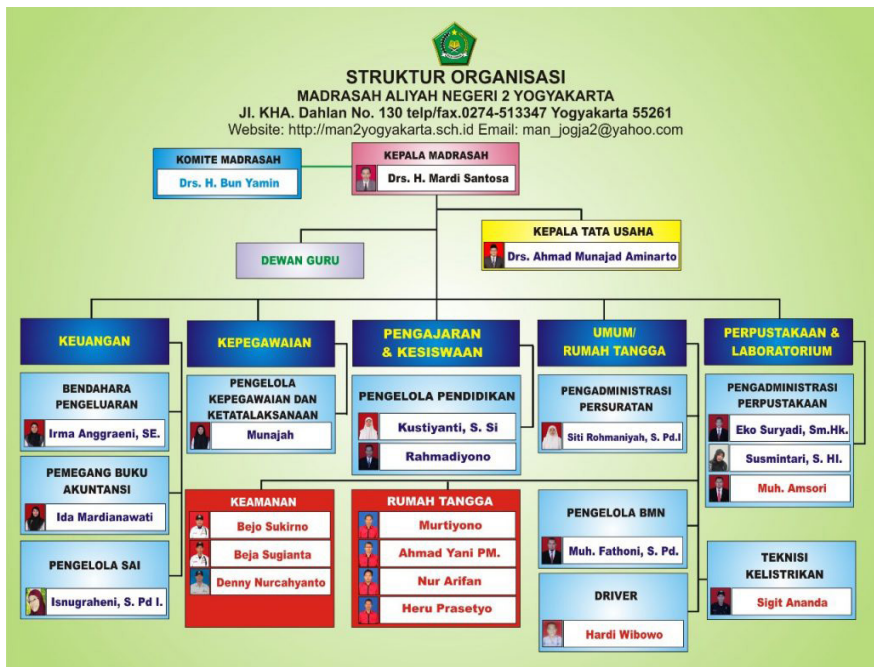
Sumber : man2yogyakarta.sch.id,2020

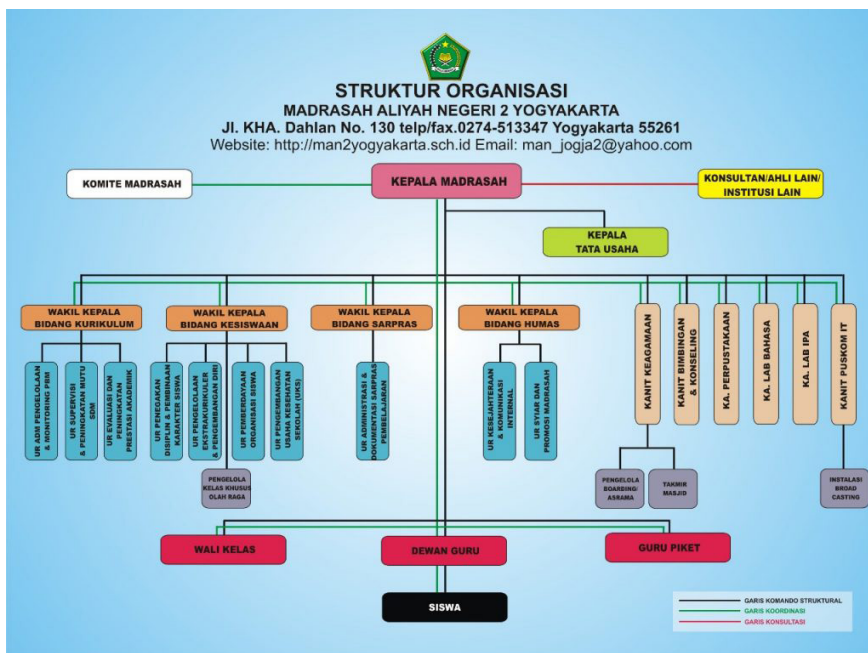
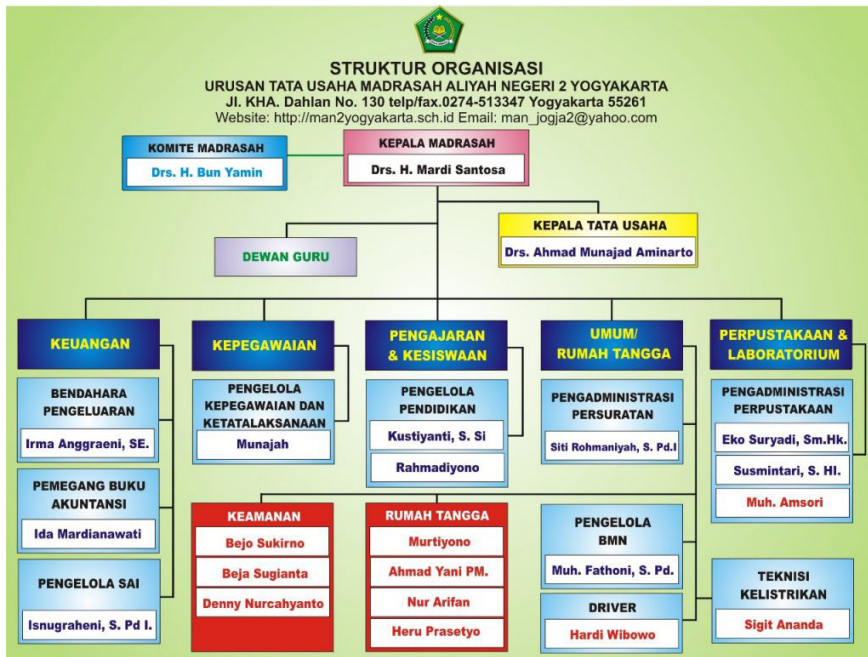
Visi Misi MAN 2 Yogyakarta : (man2yogyakarta,2020), yaitu **1) Visi** :Taqwa, Mandiri, Prestasi, Inovatif, berwawasan Lingkungan, dan Islami yang diakronimkan **TAMPIL ISLAMI**. **2) Misi:** (a) Mewujudkan Insan Madrasah yang berilmu, beramal, dan berkepribadian mulia (akhlak mahmudah); (b) Mewujudkan Insan Madrasah yang menguasai iptek, bahasa, budaya, olahraga dan seni; (c) Mewujudkan madrasah yang berdaya saing global dan (d) Mewujudkan lingkungan madrasah yang kondusif dan islami. Sedangkan

3) **Tujuan Umum:** (a) Terwujudnya Insan Madrasah yang mengamalkan nilai dan ajaran Islam dalam kehidupan sehari-hari; (b). Terwujudnya peserta didik yang cerdas, terampil, mandiri untuk melanjutkan pendidikan; (c). Terwujudnya budaya kerja tinggi dalam memberikan pelayanan pendidikan yang prima; (d). Terwujudnya madrasah yang memberi keluasan akses, akuntabilitas, dan bermartabat; (e). Terwujudnya Insan Madrasah yang menguasai teknologi informasi dan bahasa asing; (f). Terciptanya lingkungan dan suasana madrasah yang bersih, sehat, tertib, nyaman, aman dan islami dan (g). Terintegrasinya wawasan lingkungan dalam proses pembelajaran.

MAN 2 Yogyakarta memiliki fasilitas lengkap untuk menunjang pendidikan, (man2yogyakarta,2020). Fasilitas tersebut antara lain : (1) Pelayanan terpadu satu pintu (PTSP); (2) *Boarding School* khusus putri; (3) Masjid yang menampung 600-an jamaah; (4) Laboraturium kimia; (5) Laboratorium fisika; (6) Laboratorium Biologi; (7) Laboratorium TIK; (8) Studio *broadcasting*; (9) Lapangan olahraga dan (10) Kantin

Bagan 1: Struktur Organisasi MAN 2 Yogyakarta





Sumber : man2yogyakarta.sch.id,2020

Kegiatan Belajar Mengajar Di MAN 2 Yogyakarta Sebelum dan Sesudah Pandemi

Selain profil sekolah MAN 2 Yogyakarta seperti yang telah dilampirkan pada bagian sebelumnya, MAN 2 Yogyakarta juga tidak luput dari segudang prestasi. Prestasi-prestasi tersebut mulai dari bidang akademik ataupun non akademik sudah pernah diraih oleh para siswa MAN 2 Yogyakarta, seperti kejuaraan tenis meja, silat, taekwondo, futsal, berbagai olimpiade, *broadcasting*, karya ilmiah, pasukan baris berbaris, dan masih banyak lagi. Prestasi tersebut juga merupakan salah satu bentuk hasil dari kerja keras, keuletan, serta kerjasama yang baik antara siswa dan para pembimbing atau guru selama membimbing dalam proses berlangsungnya belajar mengajar di setiap mata pelajaran yang ada setiap harinya dan juga ekstrakurikuler yang ada di MAN 2 Yogyakarta (man2yogyakarta.sch.id, 2020).

Namun, saat ini proses belajar mengajar di MAN 2 Yogyakarta untuk sementara waktu dilakukan via *online* atau jarak jauh yang biasa kita kenal dengan sebutan sistem daring. Perubahan tersebut bukanlah tanpa dasar dan alasan, adanya pandemi Covid-19 membuat berbagai lapisan kehidupan banyak mengalami perubahan. Komunikasi dan interaksi menjadi salah satu hal penting bagi kehidupan yang sangat terasa perubahannya. Komunikasi merupakan inti dari terciptanya interaksi antar manusia, baik individu dengan individu ataupun kelompok dengan kelompok. Perubahan pendidikan sangat kompleks sekali selama pandemi, beralihnya sistem *offline* menjadi *online* pun tidak jarang menuai pro dan kontra di kalangan masyarakat terlebih dalam lingkup anak sekolah atau siswa (man2yogyakarta.sch.id, 2020).

Mereka mengeluhkan betapa lelah dan membosankannya belajar dengan cara *online* atau daring selama ini. Sama halnya seperti yang diutarakan oleh salah satu siswa kelas 11 IPS 2 MAN 2 Yogyakarta, bernama Nanda. “saya merasa sudah bosan bahkan malas ketika harus kuliah *online* seperti sekarang, sudah kendala sinyal, fasilitas, dan masih banyak lagi”, ungkap Nanda ketika wawancara (Nanda, 2020). Selain itu, Nanda juga mengatakan bahwa tidak jarang tugas yang diberikan oleh guru dinilai masih ribet dan membuang waktu karena tidak langsung pada intinya yaitu belajar, “ya saya juga sering merasa kesal ketika sudah serius siap belajar tetapi guru saya malah menyuruh para siswa untuk berfoto dahulu menggunakan seragam, mengabadikan moment aktivitas saat itu, dan masih banyak lagi hal yang membuat saya kadang kelabakan karena harus keluar membeli barang request dadakan guru tersebut”, “saya juga terkadang mengeluh ketika saya tidak siap barang atau properti yang diminta guru saat itu juga, karena waktu saya akan terbuang

cukup banyak untuk keluar dan membeli di toko atau warung. Seperti pada saat pelajaran olahraga, saya diharuskan *take foto* bersama bola yang untuk sepak bola itu, dengan berbagai gaya yang ada dipermainan bola, ya saya bingung ya, ini harus gimana”, tambahnya sambil sedikit tertawa (Nanda, 2020)

Hal serupa juga diungkapkan oleh Dhafi, teman Nanda. Sambil mengobrol santai, Dhafi mengeluhkan betapa ribet dan terkadang bingung ketika melakukan belajar secara *online*. “sebenarnya saya sih bisa-bisa saja menggunakan aplikasi yang diperintahkan oleh guru saya. Tetapi terkadang ribet dan serba membingungkannya perintah guru tersebut yang sedikit membuat saya terkadang emosi ya, hehe. Saya paham, keadaan ini tidak lah mudah bagi semua baik saya ataupun guru saya ya karena ini pertama kalinya kita harus *full day* dengan *online*. Selain itu, kendala sinyal, kuota yang sangat banyak, subsidi kuota yang dijanjikan ada tapi sampai sekarang saya belum juga menerima, dan sebagainya menambah faktor tidak lagi saya merasa semangat seperti sebelumnya dalam mengikuti pembelajaran *online*”. “pemberian materi pelajaran juga tidak dapat maksimal, sehingga seperti kemarin ketika ujian semester tiba saya setiap hari ujian terus meminta bantuan pada kakak saya untuk mendampingi saya dalam mengerjakan, karena materi yang diterima tidak maksimal sedangkan soal masih sama seolah-olah tidak sedang terjadi pandemi, huftt itu membuat saya sedikit kesal, akan tetapi saya tetap berusaha maksimal ya”, ungkap Dahfi ketika wawancara di rumahnya (Dhafi, 2020). “meskipun belajar online ini banyak sekali kontranya lama kelamaan, tetapi ada sisi baik yang dapat saya ambil, ketika saya semakin hari semakin memahami perihal IT terlebih dalam hal penunjang pendidikan. Jadi saya yakin tidak selamanya hal buruk itu menjadi buruk, ada kalanya dia hadir untuk memberi kebaikan pada kita”, tambah Dhafi saat diujung sesi wawancara (Dhafi, 2020).

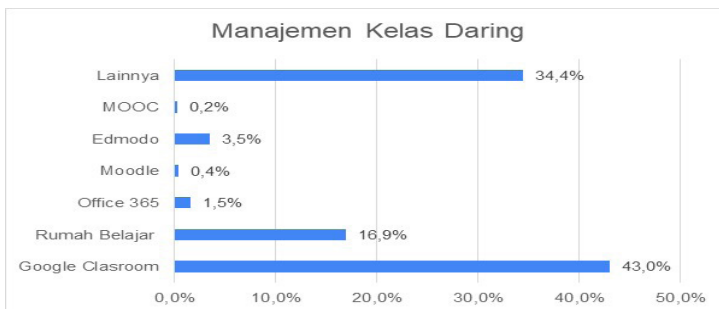
Selain pendapat hingga keluh kesah dari beberapa siswa MAN 2 Yogyakarta perihal pembelajaran *online* selama ini, para guru pun juga memberikan berbagai macam respon seputar sistem pendidikan daring selama ini. Sama halnya dengan para siswa yang mengeluhkan kondisi seperti ini, meski sedikit berbeda kategori sisi keluhannya. Guru cenderung pada menyayangkan ketika sistem *online* hingga saat ini dirasa belum maksimal saat digunakan untuk mengajar anak-anak. Kendala sinyal dan kuota internetlah yang menjadi dasar atau alasan terbesar ketidakmaksimalan semua hal saat ini. Ketika guru memberikan materi pun serasa kurang maksimal, karena tidak dapat memastikan apakah para siswa memperhatikan atau paham dengan materi

yang diberikan tersebut, lalu ketika ada tugas, terkadang beberapa siswa tidak dapat mengumpulkan tugas dengan tepat waktu pada jam pelajaran karena keterbatasan sinyal dan kuota mereka. Hal-hal tersebut yang lamban laun menjadi keluhan terbesar para guru (man2yogyakarta.sch.id, 2020).

Guru pun terus dibenturkan dengan target pendidikan yang dinilai tidak ada perubahan seperti keringanan dan sebagainya. Oleh karena itu guru harus sebisa mungkin mengatur waktu dan strategi bagaimana agar materi dan pernak-pernik pembelajaran tersampaikan dengan maksimal kepada semua siswa di MAN 2 Yogyakarta ini. Selain menggunakan aplikasi belajar *online* seperti *Google Classroom*, *Whatsapp Group*, dan sebagainya, para guru MAN 2 Yogyakarta pun juga melakukan *video call* atau telepon ke nomor pribadi setiap siswa yang diampunya, agar dapat mengetahui apakah setiap siswa sudah paham dan menerima materi dengan baik atau belum (man2yogyakarta.sch.id,2020). Jika ada tugas, para guru selalu berusaha untuk mem-*follow-up* para siswa agar tetap mengerjakan secara maksimal meskipun masih saja hingga sekarang ada beberapa siswa yang belum bisa mengumpulkan tugas secara tepat waktu.

Sama halnya dengan yang terjadi di daerah Provinsi Jambi mengenai efektivitas belajar *online*. Hasil penelitian mengenai belajar mengajar via *online* dijelaskan di dalam laporan penelitian pembelajaran yang berjudul “LPMP Jambi, Pelaksanaan Belajar dari Rumah di Provinsi Jambi dalam Masa Darurat Penyebaran *Corona Virus Disease* (Covid-19), 1 Mei 2020”, guna memperjelas bagaimana keefektifan serta keefisienan belajar mengajar via daring atau *online*.

Bagan 2 : Manajemen Kelas *Online/Daring*

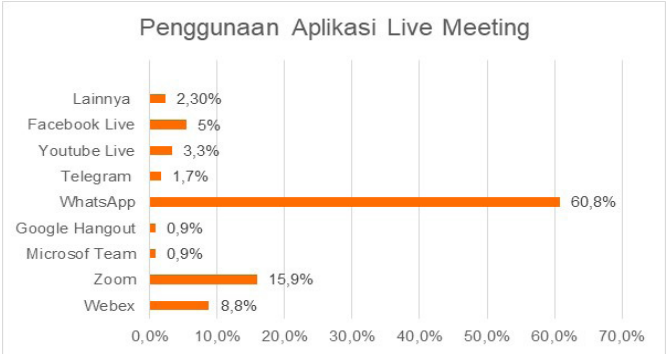


Sumber : man2yogyakarta.sch.id, 2020

Dari grafik diatas dapat disimpulkan bahwa manajemen kelas online yang paling banyak digunakan para guru untuk mengajar adalah *Google Classroom*.

Ada juga guru yang mengajar melalui *Whatsapp Group*, dan sebagainya guna memenuhi jadwal pertemuan wajib kepada siswa. *Google Classroom*, *Whatsapp Group* selain mudah diakses dan mudah digunakan oleh guru serta siswa juga biaya kuota yang terhitug tidak terlalu banyak.

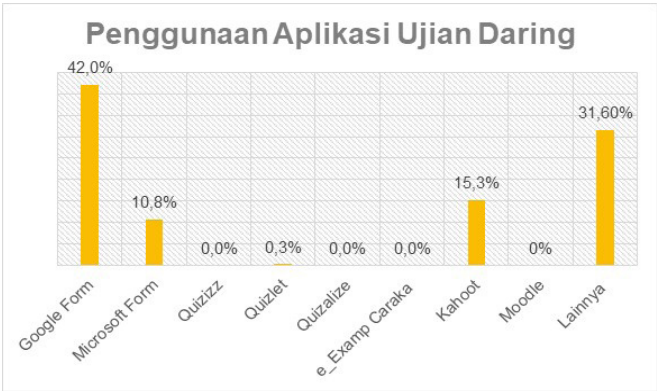
Bagan 3 : Penggunaan Aplikasi *Live Meeting*



Sumber : *man2yogyakarta.sch.id*, 2020

Dapat disimpulkan bahwa *live meeting* paling sering dilakukan via *Whatsapp*. Selain faktor sudah pasti banyak yang mempunyai aplikasi tersebut dan menjadi aplikasi sehari-hari baik guru atau siswa, *whatsapp* juga tidak terlalu banyak menghabiskan kuota dan mudah diakses serta cukup efektif dan efisien. Guru bisa langsung *share* materi lalu menjelaskan dan membuka sesi tanya jawab dengan siswa, bisa dengan dibuka bebas sesi tanya jawabnya bisa juga dengan guru menunjuk beberapa siswa di dalam kelas tersebut.

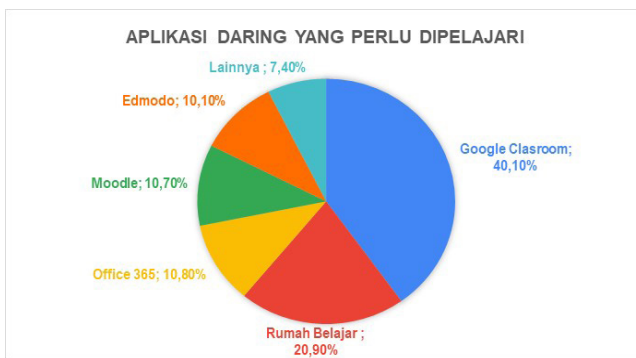
Bagan 4: Penggunaan Aplikasi Ujian Online



Sumber : *man2yogyakarta.sch.id*, 2020

Penggunaan aplikasi untuk melakukan ujian dan sebagainya via *online* terbanyak melalui google form, selain mudah dibuat, siswa juga sudah familiar dengan aplikasi atau akses tersebut. *Google form* dapat diakses dengan cara membuat akun, mengisi opsi didalamnya serta kolom untuk jawaban. Setelah itu link *google form* dibagikan kepada siswa sesuai dengan kelas dan mata pelajaran. Meskipun guru telah menggunakan aplikasi pembelajaran secara daring, guru tetap harus mempelajari lebih dalam mengenai aplikasi pembelajaran *online*/daring yang sudah digunakan. Seperti terlihat pada grafik berikut :

Bagan 5 : Aplikasi Daring yang perlu dipelajari



Sumber : *man2yogyakarta.sch.id*, 2020

Menyikapi hal tersebut diharapkan lembaga-lembaga pendidikan dapat terus meningkatkan kemampuan dibidang IT dan memperdalam aplikasi pembelajaran *online*, karena tidak menutup kemungkinan pembelajaran online akan digunakan kembali dalam pelaksanaan pembelajaran disekolah serta tidak lagi digunakan pada saat pandemi Covid-19 ini saja. Keefisienan serta keefektifan setiap sistem online dapat terlihat dari seberapa besar peminat menggunakan aplikasi online tersebut. Mudah dan tidak memerlukan banyak kuota ketika menggunakannya menjadi hal terbesar yang selalu diutamakan selama masa pandemi ini untuk melakukan aktivitas apapun. Apabila dilihat dari grafik hasil penelitian diatas mengenai aplikasi apa saja dan berapa prosentase penggunaannya serta kemudahan terjangkaunya yang dimiliki aplikasi tersebut, para guru dan siswa MAN 2 Yogyakarta pun juga melakukan hal yang sama, salah satunya adalah menggunakan aplikasi yang dinilai mudah dan tidak banyak menghabiskan kuota seperti salah satunya adalah *Whatsapp Group* atau *Google Form* sehingga meminimalisir hambatan yang kemungkinan dapat terjadi nantinya. Namun, itu semua tidak semudah

yang ada dalam bayangan selama ini, masih saja ada siswa yang terkendala seperti kemampuan mengoperasikan IT yang kurang maksimal, sinyal, hingga biaya pembelian kuota yang bisa dibilang tidak sedikit (man2yogyakarta.sch.id, 2020).

Selain hal-hal tersebut pandemi ini juga memberi dampak yang cukup signifikan terhadap pelaksanaan kegiatan ekstrakurikuler MAN 2 Yogyakarta yang biasa dilakukan secara rutin dengan bertatap muka di setiap pertemuannya. Saat ini kegiatan ekstrakurikuler tersebut terpaksa dihentikan karena keterbatasan akses dan juga waktu. Meskipun ada beberapa kali pertemuan secara *online* tetapi tetap saja hasilnya kurang maksimal seperti biasanya, dimana sebelum adanya pandemi Covid-19 ini. Selain itu, penerimaan siswa baru juga dilakukan secara online, mengalami beberapa kendala yang sama seperti kegiatan lainnya, pendaftaran *online* pun harus melewati berbagai persoalan selama pelaksanaannya. Mulai dari akses, berkas siswa baru yang belum lengkap sehingga harus mengulang *input* dikemudian hari, dan lain sebagainya. Kendala tidak hanya ada dipihak siswa atau sekolah, pihak orang tua pun juga mengalami kendala ketika harus mendaftarkan anaknya dengan menggunakan sistem *online* ini, banyak orang tua yang belum paham dan mengerti bagaimana caranya mendaftar sehingga banyak berkas yang tercecer dan belum terinput, hal-hal seperti itulah yang harus di hadapi selama masa pendaftaran ditengah pandemi Covid-19 ini (man2yogyakarta.sch.id, 2020).

Komunikasi yang tidak maksimal serta sosialisasi yang tidak merata mengenai sistem *online* atau daring ini membuat sebagian besar masyarakat kebingungan dan terpaksa harus sesegera mungkin melakukan adaptasi. Keadaan seperti saat ini membuat pengeluaran semakin membengkak tanpa diimbangi dengan pemasukan dalam kehidupan setiap masyarakat. Sulitnya masa ini berdampak dalam berbagai kualitas kehidupan seperti salah satunya adalah komunikasi dan tentu nantinya juga akan berimbas pada interaksi. Komunikasi serta interaksi merupakan hal terpenting yang tidak dapat dihilangkan dalam kehidupan di dunia ini baik dimanapun dan kapanpun. Secara emosional komunikasi serta interaksi akan lebih terasa bermakna ketika antar aktor saling bertemu dan membicarakan sesuatu dengan baik didalamnya. Sedangkan saat seperti ini, kita terpaksa mengubah pola komunikasi dan juga interaksi tersebut menjadi sedikit berbeda dari sebelumnya. Sebelum terlampau jauh membahas mengenai komunikasi dan interaksi dalam masa pandemi ini, ada baiknya untuk kita mengetahui apa dan bagaimana komunikasi serta interaksi yang sebenarnya (Journals.ums, 2020).

Komunikasi berasal dari kata bahasa Inggris yaitu “*communication*” yang bersumber pada kata “*communis*” yang berarti sama. Sama disini memiliki maksud yaitu sama makna, komunikasi berpangkal pada perkataan latin “*communis*” yang artinya membuat kebersamaan atau membangun kebersamaan antara dua orang atau lebih (*Hafied Cangara*). Sedangkan menurut *Webster New Collogiate Dictionary*, komunikasi juga merupakan suatu proses pertukaran informasi antara individu melalui sistem lambang-lambang, tanda-tanda, ataupun tingkah laku (*Journals.ums.ac.id*. 2020). Secara terminologi, para ahli komunikasi memberikan penjelasan mengenai komunikasi dengan berbagai sudut pandang dan pendapat yang tentu berbeda-beda. Berikut merupakan nama beberapa tokoh ahli komunikasi :

1. Gode
2. Jenis dan Kelly
3. Berelson dan Stainer
4. Brandlun
5. Resuch
6. Weaver
7. Deddy Mulyana
8. Theodore M. Newcomb
9. Carl I. Hovland
10. Gerald R. Miller
11. Mary B. Cassata
12. Harold Laswell

Komunikasi merupakan salah satu aktivitas manusia yang harus dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. Komunikasi merupakan tanda bahwa manusia adalah makhluk sosial yang selalu ingin bersosialisasi dan menjalin hubungan timbal balik dengan orang lain. Menurut A. W. Wijaya (2000:15), komunikasi akan berhasil apabila dalam komunikasi tersebut timbul dan tercipta saling pengertian, antara pengirim dan penerima pesan dapat saling memahami satu sama lain, sehingga informasi yang dikomunikasikan antara mereka dapat tersampaikan dengan baik dan benar (Haqani, 2015). Dalam komunikasi menyetujui gagasan satu sama lain pun juga sangat penting dan diperlukan, mengapa demikian? Karena persetujuan yang terjadi dalam sebuah komunikasi akan memudahkan hubungan timbal balik antara pengirim dan penerima pesan atau informasi serta penyaluran informasi kepada elemen atau penerima lain nantinya. Hal tersebut dapat dilihat dari adanya proses saling bertatap muka dan berbicara antara siswa dan guru saat berlangsungnya pembelajaran dikelas. Dari proses itulah terjadi hubungan timbal balik antara

2 aktor tersebut, siswa mendapat pemahaman baru mengenai pelajaran saat itu dan guru dapat melakukan kewajiban mengajarnya dengan baik, serta saling bertukar pikiran satu sama lain sehingga menghasilkan berbagai ilmu baru tanpa disadari para aktor yang terlibat dalam sebuah komunikasi yang terjadisaat itu (Nurhadi, 2018).

Interaksi juga tidak kalah pentingnya berperan dalam kehidupan manusia dalam kesehariannya. Perlu diingat kembali bahwa manusia adalah makhluk sosial yang mustahil rasanya apabila melakukan hal di dunia ini tanpa bantuan dari orang lain di sekitarnya, oleh karena itu perlu sekali adanya interaksi antar sesama. Interaksi merupakan sebuah relasi antara dua sistem atau aktor yang terjadi sedemikian rupa sehingga kejadian yang berlangsung pada satu sistem akan memberikan pengaruh terhadap kejadian yang terjadi pada sistem lainnya (Chaplin, 2011). Sedangkan menurut Gillin dalam Soekanto (1982), interaksi sosial merupakan hubungan sosial yang terjadi antara kelompok dengan kelompok atau individu dengan individu yang didalamnya terdapat hubungan timbal balik. Aktivitas interaksi sosial sangatlah dekat dengan keseharian kita sebagai manusia dengan kodrat makhluk sosial, aktivitas tersebut seperti mengobrol, berjabat tangan, saling menegur, bahkan mungkin berkelahi. Jadi inti atau kesimpulan dari interaksi dan interaksi sosial adalah kemampuan setiap individu atau kelompok dalam melakukan hubungan sosial dalam kehidupan sehari-hari yang ditandai dengan adanya kontak sosial dan komunikasi (Astuti, 2018).

Dalam sebuah interaksi sosial ada beberapa komponen pendukung didalamnya. Salah satunya ialah faktor yang mempengaruhi interaksi sosial tersebut. Berikut adalah faktor yang mendasari berlangsungnya interaksi sosial (Anwar, 2016) : (1) Faktor imitasi. Menurut Gabriel Tarde, kehidupan sosial itu sebenarnya berdasarkan pada faktor imitasi saja. Meskipun anggapannya tidak terlalu dibenarkan, tetapi banyak juga yang mengakui adanya faktor imitasi dalam kehidupan manusia untuk melakukan sebuah interaksi sosial. Terbukti dengan kita melihat seseorang yang sedang berlatih pencak silat di suatu gelanggang olahraga, ia terus mengulangi gerakan yang sudah dicontohkan pada sebelumnya oleh sang pelatih, apabila seseorang tersebut tidak dapat mengimitasi dirinya maka ia akan kesulitan untuk melakukan setiap gerakan pencak silat tersebut; (2) Faktor sugesti. Sugesti mengarah pada pengaruh psikis, baik pengaruh yang datang dari diri sendiri maupun dari orang lain. Sugesti merupakan salah satu proses dimana seorang individu menerima suatu pedoman baik dari internal atau eksternal tanpa adanya kritik tentang sesuatu tersebut terlebih dahulu; (3) Faktor identifikasi. Identifikasi merupakan

salah faktor terjadinya interaksi sosial. Secara psikologi identifikasi berarti dorongan untuk menjadi sama atau identik dengan seseorang. Misalnya kita menyukai salah satu selebgram bernama Dwi Handayani, ketika itu juga kita akan meniru gaya, cara berpikir, cara sosial selebgram tersebut. Hal tersebut merupakan efek lanjutan dari aktivitas identifikasi yang dilakukan seseorang; (4) Faktor simpati. Simpati merupakan perasaan tertarik seseorang pada orang lain. Seseorang tiba-tiba merasa tertarik pada orang lain yang dilihatnya suatu waktu, lalu ia akan merasa terus tertarik pada orang tersebut dan akan terus mengikuti cara atau tindakan yang orang tersebut lakukan.

Faktor-faktor tersebut saling berkaitan dalam jalannya interaksi sosial dalam kehidupan sehari-hari. Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan faktor yang mempengaruhi interaksi sosial yaitu imitasi, identifikasi, sugesti, dan simpati. Dalam interaksi sosial juga terdapat syarat didalamnya (media.neliti, 2020). Syarat interaksi sosial adalah adanya kontak sosial dan komunikasi diantara para aktor interaksi tersebut. Komunikasi dalam interaksi tersebut tidak selalu terjadi dengan tatap muka saja, bisa juga dengan perantara media elektronik seperti internet dan sosial media lainnya, (Muslim. Jurnal diskursus Islam, 2013). Interaksi antar siswa dan juga guru atau siswa dengan siswa, dan juga antar jajaran guru dapat dilihat ketika adanya komunikasi antara aktor-aktor tersebut dalam setiap waktunya baik kapan dan dimanapun mereka saling bertemu atau melakukan kontak fisik. Interaksi membuat orang menjadi saling berpengaruh satu sama lain, saling mengenal, dan juga mempermudah penambahan relasi sesama dimana kita berada.

Dalam berkomunikasi dan juga interaksi tanpa sadar kita mengetahui bagaimana proses komunikasi serta interaksi sosial yang baik dan benar. Seperti komunikasi yang pada awal pembahasan sedikit mendapat singgungan terlebih dahulu, dalam sebuah komunikasi pastilah memiliki beberapa tolok ukur atau semacam indikator guna mengetahui seberapa baik dan benar komunikasi tersebut yang terjadi antara pihak pemberi dan penerima komunikasi. Indikator komunikasi yang baik dan benar adalah sebagai berikut (researchgate, 2016): (1) Adanya pengetahuan dalam komunikasi. Pengetahuan tersebut meliputi : mengetahui dan memahami pengetahuan di bidangnya masing-masing yang menyangkut tugas dan tanggung jawab dalam bekerja atau aktivitas, mengetahui pengetahuan yang berhubungan dengan peraturan, prosedur, yang baru dan tepat diterapkan dalam komunikasi pada saat waktu itu, mengetahui bagaimana cara menggunakan informasi yang tepat dan benar; (2) Adanya keterampilan. Keterampilan tersebut meliputi : kemampuan berkomunikasi dengan baik secara tulis maupun lisan; (3) Adanya

attitude. *Attitude* tersebut meliputi : memiliki kemampuan dalam kreativitas berkomunikasi, adanya semangat pribadi, dan kemampuan pengorganisasian; (4) Adanya aktor, penerima dan pengirim pesan atau informasi dan (5) Adanya hubungan timbal balik diantara keduanya.

Dengan demikian kita dapat dengan mudah dan tentu tepat dalam menilai apakah komunikasi yang selama ini dilakukan baik oleh kita pribadi maupun orang lain sudah benar dan baik. Komunikasi dapat sesuai *rules* dan *goals* yang diinginkan setiap aktor sehingga menghasilkan informasi yang valid dan sesuai dengan apa yang diinginkan oleh setiap pihak. Sedangkan untuk kualitas komunikasi yang baik adalah komunikasi yang dapat berjalan sebagaimana mestinya, memiliki kesamaan, tujuan, aturan, yang sama dan seimbang antara pengirim dan penerima pesan. Berikut adalah poin-poin penting mengenai kualitas komunikasi yang baik (Rumono, 2016) : (1) Adanya timbal balik yang benar dan baik antara pengirim dan penerima pesan; (2) Adanya pesan atau informasi yang disampaikan; (3) Ada pengirim pesan; (4) Ada penerima pesan; (5) Saluran atau media perantara; (6) Ada efek atau pengaruh dari komunikasi tersebut (*feedback*) dan (7) Ada sumber resmi dan dapat dipertanggung jawabkan nantinya mengenai pesan atau informasi yang disampaikan

Pentingnya komunikasi dalam keberlangsungan hubungan timbal balik yang ada di ruang lingkup pendidikan pun semakin terasa berbeda selama adanya pandemi Covid-19 ini, beberapa bagian atau point penting mengenai indikator serta kualitas komunikasi yang baik tidak semua dapat terealisasikan dalam hubungan keseharian para pelajar dan pendidik saat ini, terlebih dalam hal pola komunikasi. Pola komunikasi menjadi bagian yang dapat dikatakan sangatlah terpengaruh oleh perubahan selama adanya pandemi ini. Pola komunikasi menjadi salah satu hal yang mengalami berbagai perubahan, selama pandemi Covid-19 perubahan pola komunikasi tersebut tidak luput dari sorotan serta pembahasan di berbagai kalangan terlebih dalam ruang pendidikan. Ada berbagai jenis pola komunikasi yang ada dalam kehidupan ini. Pola komunikasi diri sendiri, pola komunikasi primer, dan juga pola komunikasi sekunder. Pola komunikasi diri sendiri adalah pola komunikasi yang terjadi karena adanya seseorang yang menginterpretasikan sebuah objek yang dipikirkannya (*Hafied Changara*). Ketika seseorang mengamati atau bertemu sesuatu disisinya maka secara tidak langsung ia akan memaknai sesuatu tersebut sesuai dengan apa yang ia pikirkan. Jika dikaitkan dengan keadaan saat ini, dimana Covid-19 masih menyebar diberbagai negara bahkan Indonesia sendiri, maka seseorang akan menyimpulkan sendiri perihal wabah

tersebut, ada yang berpikir bahwa ini benar-benar wabah, ada juga yang berpikir ini merupakan bagian dari taktik atau propaganda politik suatu negara kuasa di dunia ini (news.detik, 2020).

Pola komunikasi primer, pola tersebut merupakan pola komunikasi yang menggunakan simbol verbal, ataupun non verbal. Simbol verbal bisa diartikan seperti kita berbicara saat memberi informasi dan sebagainya, ketika ada berita di televisi atau radio kita akan mendengarkan baik-baik apapun yang sedang dibicarakan melalui media tersebut, setelahnya kita akan memahami lalu memberikan informasi kepada orang lain. Lalu, untuk simbol non verbal kita dapat menggunakan spanduk, pamflet, poster, dan sebagainya sebagai media visual untuk menyampaikan sebuah informasi. Seperti saat ini, banyak sekali ditemukan spanduk perihal informasi mengenai bahaya Covid-19 dan cara pencegahannya, hal tersebut tanpa kita berbicara panjang lebar di khalayak sudah dapat dimengerti oleh masyarakat karena menggunakan simbol-simbol seperti gambar dan sebagainya yang menyangkut pandemi Covid-19 tersebut. Terakhir adalah pola komunikasi sekunder. Pola tersebut didasari atas model sederhana yang dibuat Aristoteles sehingga mempengaruhi Harold D. Laswell, yang kemudian membuat model komunikasi yang dikenal dengan formula Laswell pada tahun 1984. Komunikasi ini merupakan komunikasi dengan komunikator dan komunikan menggunakan alat atau media sebagai media kedua setelah menggunakan lambang pada media utama, media kedua dalam pola tersebut biasanya menggunakan media IT, sehingga dapat digunakan efisien pada komunikasi jarak jauh sekalipun (digilib.uinsby, 2020).

Pola-pola tersebut sementara waktu ini tidak dapat berjalan maksimal seperti biasanya, berubahnya tatanan komunikasi menjadi serba *online*/jarak jauh/daring membuat masyarakat sebisa mungkin untuk segera melakukan penyesuaian. Selain itu, pembatasan sosial dan aturan mengenai jaga jarak satu sama lain juga mempengaruhi komunikasi masyarakat. Komunikasi menjadi sedikit terhambat dan mengalami perlambatan dalam penyampaian. Penggunaan media komunikasi via *online* juga tidak selalu menjadi solusi cepat dimasa seperti ini, kendala sinyal dan melemahnya akses karena banyaknya pengguna di setiap detiknya juga berpengaruh terhadap kualitas komunikasi serta interaksi masyarakat. Dengan adanya berbagai perubahan dalam komunikasi terlebih dalam hal pola komunikasi, interaksi antar siswa dengan siswa atau pendidik sekalipun mengalami perbedaan yang signifikan dari sebelumnya (sebelum adanya pandemi Covid-19), (digilib.uinsby, 2020).

Perubahan Pembelajaran Di MAN 2 Yogyakarta dengan Adanya Pandemi

Perubahan pembelajaran di berbagai lembaga pendidikan, salah satunya di MAN 2 Yogyakarta tersebut sangat dirasakan. Siswa dan para guru MAN 2 Yogyakarta sangat merasakan dampak dari pandemi ini. Kalangan siswa perlahan merasakan betapa lelahnya mengikuti pembelajaran *online*, selain harus terus mengikuti sistem *online* yang menghabiskan banyak kuota, juga target penyelesaian tugas dan sebagainya yang tetap diharuskan tepat waktu. Guru pun juga tidak kalah dilelahkan oleh situasi kondisi seperti ini, mulai dari mencari cara menggunakan media pembelajaran online dengan biaya terjangkau, mencari topik pembahasan yang tidak membosankan, dan sebagainya. Selain itu, tuntutan dari petinggi pendidikan yang harus tetap melaksanakan kebijakan pendidikan seperti yang sudah dibuat atau dirancang sebelum adanya pandemi juga harus terus memenuhi target (Covid-1919.go.id, 2020).

Dengan kondisi seperti itu disaat situasi sedang seperti ini, tingkat kesetresan tidak hanya dirasakan oleh guru ataupun orang tua, anak-anak pun juga merasakan stres atau depresi yang tidak kalah dengan para orang tua mereka. Munculnya sikap-sikap baru di tengah pandemi juga tidak dapat dielakkan kembali, seperti apatis, cenderung anti sosial, hilangnya rasa percaya, depresi, temperamental, dan sebagainya harus dihadapi sementara waktu ini. Keadaan sosial yang penuh dengan tekanan serta bertebarannya informasi yang di luar kebenaran selalu mengaduk emosi masyarakat baik dari kalangan apapun tanpa memikirkan bagaimana dampak setelah dilakukannya hal tersebut. Oleh karena itu, perubahan struktur masyarakat terutama dalam hal pendidikan yang didalamnya mencakup komunikasi hingga interaksi menjadi suatu hal yang benar-benar harus diberi maklum dan pengertian. Penggunaan informasi secara *online*, interaksi secara online pun selain memberi dampak positif seperti meningkatnya kemampuan penguasaan IT, waktu lebih efisien, tidak terlalu membuang tenaga untuk bertemu kesana kemari, masyarakat mengerti *social distancing* (pembatasan dalam penggunaan sosmed/bijak dalam sosmed), kebiasaan baru ini juga memberikan berbagai dampak negatif pada *circle* kehidupan (Covid-1919.go.id/situasi-virus-Corona/, 2020).

Dampak negatif dari pola baru tersebut diantaranya seperti munculnya berbagai informasi bohong atau hoaks dimana-mana, pembengkakan biaya hidup karena kuota yang berkali-kali lipat dihabiskan dalam setiap waktu, muncul sikap apatis, hilangnya rasa percaya satu sama lain, konflik psikologis dan sebagainya. Kenyataan seperti itulah yang memang harus kita hadapi

sementara waktu ini, begitupun keadaan ke depan yang juga harus kita hadapi lebih dari keadaan saat ini. Keadaan ke depan seperti tidak lagi sama seperti sebelumnya, karena trauma akan keadaan sebelumnya, konflik psikologis yang membutuhkan waktu untuk pulih, konsekuensi kehidupan yang berat karena penundaan, seperti beban hutang dan sebagainya, tuntutan hidup untuk pemulihan keadaan yang membutuhkan biaya sangat banyak, serta target hidup yang sempat tertunda dimasa sebelumnya pun harus segera diselesaikan dimasa pasca pandemi nantinya. Hal tersebut mungkin akan menjadikan kita seolah lupa akan kodrat manusia sebagai makhluk sosial, karena secara tidak langsung kita sudah seperti terbentuk menjadi manusia yang terbiasa dengan keadaan serba-serbi *online* ini dan tidak mengharuskan lagi bertatap muka atau bertemu, dalam pandangan lain, situasi seperti ini dapat diartikan sebagai titik meningkatnya kembali arus globalisasi dunia karena penguasaan IT yang semakin digencarkan dan menjadi kegiatan utama setiap manusia dalam kesehariannya, dengan adanya keadaan seperti itu, keadaan pasca pandemi yang benar-benar mengalami perubahan besar dan sangat bertolak-belakang dari sebelumnya akan dirasa wajar karena merupakan bagian salah satu konsekuensi besar dari keadaan sebelumnya (psychiatrictimes.com/Coronavirus/panic-and-pandemicsreturn-absurd, 2020).

Pandemi Covid-19 yang masih terjadi hingga saat ini merupakan fenomena besar yang menghadirkan berbagai krisis dalam seluruh aspek kehidupan, terutama dalam aspek pendidikan. Anak sekolah dan para guru di Indonesia tidak dapat beraktivitas seperti biasanya untuk sementara waktu. Aktivitas seperti bersekolah tidak dapat dilakukan secara *offline* atau bertatap muka secara langsung saat ini. Kegiatan yang biasa dilakukan dalam sehari-hari menjadi lumpuh. Pemerintah Indonesia pun terus mencari dan melakukan berbagai cara guna menumpas penyebaran virus Covid-19. Pemerintah Indonesia melakukan berbagai metode diantaranya *physical distancing*, *social distancing*, PSBB, *Lockdown*, dan sebagainya yang berimplikasi pada penutupan sebagian aktivitas keseharian masyarakat. Pemberlakuan belajar via online atau daring pun dilakukan sebagai salah satu upaya guna memutus tali penularan virus tersebut (psychiatrictimes.com, 2020).

Berkurangnya komunikasi serta interaksi sosial dalam lingkup pendidikan pada beberapa daerah di Indonesia membuat siswa banyak yang merasakan stres, lelah, bosan, bahkan ada beberapa yang berubah menjadi sangat sensitif dalam kesehariannya, semua terjadi akibat dari konflik batin serta mulai terganggunya keadaan psikis tersebut tidak sedikit siswa yang merasa sudah tidak nyaman dalam mengikuti pembelajaran dengan menggunakan sistem

daring ini. Pandemi ini juga membuat adanya disfungsional dan disorganisasi dalam berbagai struktur tatanan pendidikan. Disfungsional merupakan suatu peristiwa dimana fungsi-fungsi sosial dalam lingkup pendidikan tidak berjalan sebagaimana mestinya, seperti halnya interaksi yang biasa dilakukan normal sehari-hari, selama masa Covid-19 ini tidak dapat berjalan seperti biasa karena adanya pembatasan sosial, rasa takut serta khawatir akan tertular virus, dan sebagainya. Sedangkan disorganisasi merupakan suatu keadaan dimana keadaan tersebut mengalami situasi yang tidak menentu. Keadaan yang terkadang membuat para siswa ataupun guru takut, khawatir berlebih, hingga tidak berkenan untuk bertemu atau bertatap muka, serta bersosialisasi dengan siswa secara langsung seperti biasanya (psychiatrictimes.com, 2020).

Apabila hal-hal tersebut terus terjadi, kita semua akan berada dalam situasi kondisi dimana munculnya dekonstruksi sosial. Dekonstruksi sosial merupakan keadaan dimana situasi kondisi sudah tidak dapat lagi dibicarakan secara rinci, perlahan, dan pasti. Keadaan terus menuntut seluruh siswa dan juga guru untuk sesegera mungkin melakukan tindakan tanpa pertimbangan, kesadaran, atau secara terorganisir lagi. Gerak cepat seperti itu dilakukan bukan lagi tanpa dasar atau alasan yaitu guna menumpas, menghilangkan pandemi Covid-19 tersebut terus digencar-gencarkan di Indonesia, adanya kondisi seperti ini membuat tidak sedikit siswa atau bahkan guru merasa menjadi cenderung anti sosial karena waktu yang lama untuk selalu melakukan isolasi diri, pembatasan fisik serta sosialnya, dan lain sebagainya, sedangkan pemerintah terus mengeluarkan serta membuat aturan-aturan baru yang sering kali terdengar dan terlihat rancu, tidak pas, dan sedikit menghilangkan sisi kemanusiaan. Semua terjadi bukan karena perbuatan setiap individu atau kelompok, melainkan dampak dari adanya wabah atau pandemi Covid-19 ini, kualitas komunikasi serta interaksi antar siswa dengan siswa ataupun dengan para guru mereka pun sangat dimungkinkan akan mengalami penurunan, diakibatkan karena adanya kekurangan dalam hal *sharing* atau berbagi informasi diantara siswa dan guru atau sebaliknya mengenai pandemi ataupun pembelajaran selama pandemi, dan sebagainya sehingga beberapa elemen dalam pendidikan mengalami degradasi dalam proses sosialnya. Pembekuan pikiran, tekanan luar bisa baik dari internal maupun eksternal akibat tidak terjalannya komunikasi dengan baik, mempengaruhi keadaan setiap siswa dan guru (psychiatrictimes.com, 2020).

Oleh karena itu, pemahaman mengenai pandemi ini dengan benar sangatlah diperlukan. Analisis yang kuat serta pikiran yang selalu terbuka pun sangat penting bagi setiap lapisan masyarakat. Media boleh saja mengeluarkan

fatwa-fatwanya baik itu dilakukan pada sosial media, seperti *twitter, ig, televisi*, dan sebagainya akan tetapi ketenangan serta logika harus terus dibangun ketika mendapati informasi apapun dari sumber-sumber tersebut agar kita tidak selalu menjadi korban *hoax* media yang sering kali mengaduk-aduk emosi kita tanpa disertai pertanggung jawaban setelahnya. Untuk para siswa sekolah agar tetap selalu menjaga kesehatan, semangat belajar, dan terus berpikiran positif. Meskipun kondisi sedang seperti ini akan tetapi tetap berusaha lah menjadi yang terbaik ketika belajar. Guru atau tenaga pendidik untuk selalu menjaga kesehatan juga dan bersemangat dalam memberikan proses belajar terbaik untuk para siswanya.

Penutup

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwasannya pandemi Covid-19 ini begitu banyak memberikan dampak terhadap berbagai aspek kehidupan, terlebih dalam aspek pendidikan. Pendidikan di MAN 2 Yogyakarta sementara waktu ini tidak dapat berjalan dengan sebagaimana mestinya, komunikasi dan interaksi yang biasa dilakukan secara bertatap muka langsung, bertemu di sekolah, saat ini tidak dapat dilakukan oleh para siswa dan para guru karena adanya berbagai perubahan dalam beberapa pola-pola komunikasi.

Guru saat ini harus memutar otak dan mencari cara kreatif serta menggunakan aplikasi belajar *online* guna memberikan materi dan pembelajaran kepada siswa. Selain itu, siswa juga harus segera menyesuaikan atau beradaptasi dengan keadaan untuk mengikuti proses belajar secara daring/*online* yang entah akan sampai kapan dilakukan. Tidak jarang dan sedikit para siswa yang mengeluh bosan, banyak tugas, dan sebagainya sehingga justru membuat mereka stres dan kehilangan semangat belajar, banyaknya biaya kuota yang harus dikeluarkan juga menjadi keluhan utama selain keluhan-keluhan sebelumnya, tidak hanya siswa orang tua juga ikut merasakan dampak dari pandemi ini karena pengeluaran yang begitu membengkak dan tidak seimbang dengan pemasukan atau penghasilan saat ini.

Komunikasi serta interaksi sosial para siswa dan guru yang biasa dilakukan di sekolah secara langsung seperti biasa, saat ini tidak dapat dilakukan untuk sementara waktu. Kualitas komunikasi dan interaksi mengalami penurunan yang begitu signifikan, karena tidak adanya kontak sosial dan kurangnya partisipasi aktor didalamnya. Komunikasi yang dihasilkan juga tidak maksimal karena akses yang terbatas sehingga berpengaruh juga pada interaksi yang terjadi diantara masyarakat. Peran media yang cenderung tidak mendukung, seperti banyaknya *hoax* yang mengaduk emosi, dan sebagainya

semakin menjadikan keadaan ini semakin terbalutkan oleh rasa takut dan khawatir berlebihan. Hal tersebut membuat daya tahan tubuh masyarakat menurun dan kurangnya berpikir positif dalam kehidupan sehari-hari.

Oleh karena itu, sikapilah pandemi ini dengan bijak-bijaknya, tetap jaga kebersihan, semangat belajar, serta untuk para guru untuk selalu menjalankan kewajiban dalam mengajar siswanya dengan baik, dan melakukan pembatasan sosial untuk sementara waktu. Apabila kita semua dapat menjalani semua ini dengan bijak, mencari informasi tentang Covid-19 dengan tepat, tanpa kepanikan dan takut secara berlebihan pastilah hidup kita akan semakin tenang serta kesehatan tubuh kita pun akan terus terjaga. Sehingga kehidupan akan berjalan layaknya seperti biasa tanpa tekanan meskipun ada beberapa hal yang harus dibatasi untuk sementara waktu.

Beberapa rekomendasi terkait dengan hasil penelitian ini yaitu: (1) Sosialisasi, pengarahan, pembelajaran, dan mengubah mindset (pola pikir) mengenai pandemi Covid-19; (2) Konsumsi berita, informasi, baik di sosial media atau non sosial media dengan bijak; (3) Jangan mudah terprovokasi oleh apapun; (4) Analisis dan cek selalu mengenai info yang didapatkan setiap harinya; (5) Lakukan pembatasan sosial, fisik, untuk sementara waktu ini guna memutus tali penularan virus Covid-19 tersebut; (6) Lakukan cuci tangan sebelum beraktivitas seperti makan, minum, dan sebagainya; (7) Perbanyak bacaan tentang teori-teori mengenai virus Covid-19, dunia virus (terutama virus Covid-19), bagaimana ciri sebenarnya, proses penyebaran sebenarnya, cara pencegahan, serta pengobatan bagi yang sudah tertular agar kita tereduksi dengan baik, benar, dan tepat perihal virus Covid-19; (8) Menjaga kesehatan dengan banyak berolahraga, makan makanan bergizi, vitamin, dan perbanyak mengonsumsi air putih atau mineral; (9) Semangat belajar bagi seluruh siswa dan semangat mengajar bagi seluruh guru di Indonesia

Daftar Pustaka

Jurnal :

- Nurhadi. Jurnal Komunikasi. “*Kajian Tentang Efektivitas Pesan Dalam Komunikasi*”. 2018.
- Rumono. Jurnal Ilmu Komunikasi. “*Hubungan Intensitas Komunikasi Orang Tua-Anak*”.
“*Kecenderungan Kajian Penelitian Jurnal Komunikasi Pada Penulis Apjiki*”. 2016.
- Wisman. Jurnal Unmer. “*Komunikasi Efektif Dalam Dunia Pendidikan*”. 2017.
- Haqani. Jurnal Ilmu Komunikasi. “*Komunikasi Antar Pribadi*”. 2015.
- Astuti.”*Studi Deskriptif Interaksi Sosial*”. 2018
- Muslim. Jurnal Diskursus Islam. “*Interaksi Sosial Dalam Masyarakat Multietnis*”. 2013
- Anwar, Khairul. Jurnal Ilmu Pendidikan. “*Hubungan Antara Konsep Diri Dengan Interaksi*”. 2016
- Tejokusumo. Jurnal Studi Islam Dan Budaya. “*Dinamika Masyarakat*”.
Journal.Uin.Alauddin.Ac.Id. “*Konsep Masyarakat*”
Journal.Ui.Ac.Id. “*Model Sosial Dan Mekanisme Adaptasi Masyarakat Pedesaan*”.
- Jurnal Sosiologi. “*Masyarakat*”.
- Eprints.Walisongo.Ac.Id. “*Masyarakat Dan Pesantren*”.
- Https://Syekhnujati.Ac.Id “*Analisis Kehidupan Masyarakat Melalui Pendidikan Sosiologi*”.

Artikel dalam Internet :

- Journals.Ums.Ac.Id
Https://Jurnal.Ugm.Ac.Id
Ejournal.Bsi.Ac.Id

[Https://Journal.Uii.Ac.Id](https://Journal.Uii.Ac.Id)
Journal.Uad.Ac.Id
[Https://Journal.Unnes.Ac.Id](https://Journal.Unnes.Ac.Id)
[Https://Jurnal.Untag-Sby.Ac.Id](https://Jurnal.Untag-Sby.Ac.Id)
[Https://Ejournal.Unib.Ac.Id](https://Ejournal.Unib.Ac.Id)
[Https://Media.Neliti.Com](https://Media.Neliti.Com)
[Https://Www.Researchgate.Net](https://Www.Researchgate.Net)
Oknews.Co.Id, Hootsuite.
[Https://Kompas.Com](https://Kompas.Com)
M.Detik.Com, Tim Detikcom-Detiknews
Kementerian Kesehatan Ri
Www.Journal.Uinjkt.Ac.Id , “*Langkah Taktis Pemerintah Daerah Dalam Pencegahan Penyebaran Virus Covid-19*”.
[Https://Www.Researchgate.Net](https://Www.Researchgate.Net) , “*Analisis Perilaku Masyarakat Indonesia Dalam Menghadapi Pandemi Covid-19*”.
“*Lpmp Jambi, Pelaksanaan Belajar Dari Rumah Diprovinsi Jambi Dalam Masa Darurat Penyebaran Corona Viirus Disease (Covid-19), 1 Mei 2020*”
[Https://Wellness.Journalpress.Id](https://Wellness.Journalpress.Id) , “*Corona Virus Dieases (Covid-19)*”.
[Https://Syekh Nurjati.Ac.Id](https://Syekh Nurjati.Ac.Id)
Aceh.Tribunnews.Com
Idntimes.Com
News.Detik.Com
Kpi.Go.Id
Digilib.Uinsby.Ac.Id , “*Studi Teoritis Tentang Pola Komunikasi Komunitas*”.
[Https://Www.Djkn.Kemenkeu.Go.Id](https://Www.Djkn.Kemenkeu.Go.Id)
[Https://Www.Bbc.Com/Indonesia/Vert-Cap-51887198](https://Www.Bbc.Com/Indonesia/Vert-Cap-51887198)
[Https://Www.Covid19.Go.Id/Situasi-Virus-Corona/](https://Www.Covid19.Go.Id/Situasi-Virus-Corona/)
[Https://Www.Psychiatrictimes.Com/Coronavirus/Panic-And-Pandemicsreturn-Absurd](https://Www.Psychiatrictimes.Com/Coronavirus/Panic-And-Pandemicsreturn-Absurd)
[Https://Kebudayaan.Kemdikbud.Go.Id](https://Kebudayaan.Kemdikbud.Go.Id)

Website :

man2yogyakarta.sch.id.
<http://man2yogyakarta.sch.id/profil-sekolah/>
<http://man2yogyakarta.sch.id/visi-misi-sekolah/>
<http://man2yogyakarta.sch.id/fasilitas-sekolah/>
<http://man2yogyakarta.sch.id/struktur-organisasi/>

Wawancara :

Wawancara di rumah Nanda pada hari Minggu, 26 Juli 2020, pukul 10.30 WIB.

Wawancara di rumah Nanda pada hari Minggu, 26 Juli 2020, pukul 10.41 WIB.

Wawancara di rumah Dhafi, pada hari Senin 27 Juli 2020, pukul 11.00 WIB.

Wawancara di rumah Dhafi, pada hari Senin 27 Juli 2020, pukul 11.15 WIB.

Kebijakan Larangan Mudik di Tengah Pandemi Covid-19 sebagai Alat untuk Menertibkan Masyarakat

Nurhanny Agusti

Prodi Sosiologi,

Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora,

UIN Sunan Kalijaga

Email: nurhannyagusti18@gmail.com

Pendahuluan

Tahun 2020 menjadi tahun kelam karena seluruh masyarakat di dunia dihebohkan oleh pandemi baru yaitu Virus Corona (Covid-19). Virus ini awal mulanya ditemukan di Wuhan, Cina. Virus Corona merupakan fenomena luar biasa yang terjadi di abad 21. Sejak Januari 2020 WHO telah menetapkan dunia dalam keadaan darurat global terkait virus ini (Sebayang, 2002). Virus ini telah menyebar ke seluruh dunia, termasuk Indonesia. Berdasarkan data dari *Worldometers* terhitung sejak tanggal 07 Mei 2020 jumlah kasus virus Corona tercatat 3.810.744 kasus. Adapun jumlah korban meninggal dunia sebanyak 264.021 orang dan pasien yang sembuh berjumlah 1.287.653 orang (Erika, 2020).

Dari persebarannya di 32 Provinsi, pusat kasus paling banyak ditemukan di Ibukota Jakarta. Hingga 1 April 2020, terdapat 816 pasien Covid-19 di wilayah DKI Jakarta. Data ini belum dihitung jumlah kasus yang menunggu hasil yakni 720 kasus. Persebaran Covid-19 di DKI Jakarta telah mencapai hampir seluruh wilayah kelurahan (Garnesia, 2020). Menurut Achmad Yurianto juru bicara penanganan Covid-19, di DKI Jakarta memiliki kasus Corona terbanyak dikarenakan gerbang masuk DKI Jakarta dinilai besar dan DKI Jakarta menjadi mobilitas keluar-masuknya masyarakat (Putri, 2020).

LAPORAN MEDIA HARIAN COVID19 TANGGAL 27 MARET 2020 PUKUL 12.00 WIB

data dapat berubah sesuai hasil verifikasi

NO	PROVINSI	JUMLAH KASUS TANGGAL 27 MARET 2020			JUMLAH KASUS DENGAN FOLLOWUP SPESIMEN ZX NEGATIF			JUMLAH KASUS MENINGGAL		
		S/D 26 MARET 2020	27 MARET 2020	KASUS KUMULATIF	S/D 26 MARET 2020	27 MARET 2020	KUMULATIF	S/D 26 MARET 2020	27 MARET 2020	KUMULATIF
1	ACEH	1	3	4	0	0	0	0	0	0
2	BALI	9	0	9	0	0	0	2	0	2
3	BANTEN	67	17	84	1	0	1	4	0	4
4	DI YOGYAKARTA	16	6	22	1	0	1	2	0	2
5	DKI JAKARTA	515	83	598	25	6	31	46	5	51
6	JAMBI	1	0	1	0	0	0	0	0	0
7	JAWA BARAT	78	20	98	5	0	5	11	3	14
8	JAWA TENGAH	40	3	43	0	0	0	6	0	6
9	JAWA TIMUR	59	7	66	3	5	8	3	1	4
10	KALIMANTAN BARAT	3	0	3	0	0	0	0	0	0
11	KALIMANTAN TIMUR	11	0	11	0	0	0	0	0	0
12	KALIMANTAN TENGAH	6	0	6	0	0	0	0	0	0
13	KALIMANTAN SELATAN	1	0	1	0	0	0	0	0	0
14	KEPULAUAN RIAU	5	0	5	0	0	0	1	0	1
15	NUSA TENGGARA BARAT	2	0	2	0	0	0	0	0	0
16	SUMATERA SELATAN	1	0	1	0	0	0	1	0	1
17	SUMATERA BARAT	3	2	5	0	0	0	0	0	0
18	SULAWESI UTARA	2	0	2	0	0	0	0	0	0
19	SUMATERA UTARA	8	0	8	0	0	0	1	0	1
20	SULAWESI TENGGARA	3	0	3	0	0	0	0	0	0
21	SULAWESI SELATAN	27	2	29	0	0	0	1	0	1
22	SULAWESI TENGAH	1	0	1	0	0	0	0	0	0
23	LAMPUNG	3	1	4	0	0	0	0	0	0
24	RIAU	1	0	1	0	0	0	0	0	0
25	MALIKU UTARA	1	0	1	0	0	0	0	0	0
26	MALIKU	1	0	1	0	0	0	0	0	0
27	PAPUA BARAT	0	2	2	0	0	0	0	0	0
28	PAPUA	7	0	7	0	0	0	0	0	0
	Dalam Proses Verifikasi di Lapangan	21	7	28	0	0	0	0	0	0
	TOTAL	893	153	1046	35	11	46	78	9	87

Sumber: Zona Utara, 2020

Berdasarkan tabel, dapat disimpulkan daerah perkotaan memiliki resiko lebih besar untuk penularan Covid-19. Menurut Dr. Steven Goodmab, epidemiolog Stanford University Kepada New York Times, “kepadatan penduduk adalah musuh besar dalam situasi seperti sekarang. Semua penyakit, khususnya yang dapat menyebar melalui udara, aerosol, dan kontak, seperti TBC, Campak, dan kini Corona. Kepadatan selalu berpengaruh terhadap penyebaran Virus Corona.

Pemerintah Indonesia telah mengeluarkan status darurat bencana terhitung mulai tanggal 29 Februari 2020 hingga 29 Mei 2020 terkait pandemi virus ini dengan jumlah waktu 91 hari (Zaenudin, 2020). Banyak langkah-langkah yang telah dilakukan pemerintah untuk mengatasi kasus luar biasa ini, dari mensosialisasikan *social distancing*, PSBB, hingga yang baru-baru ini berlaku yaitu larangan mudik. Larangan mudik ini diberlakukan sejak tanggal 24 April 2020. Larangan mudik tersebut disampaikan langsung oleh Presiden Joko Widodo dalam rapat terbatas pada hari selesa tanggal 24 April 2020 (Koesmawardhani, 2020). Larangan mudik ini bertujuan untuk mencegah meluasnya penyebaran wabah Corona. Peraturan ini diatur oleh peraturan menteri perhubungan nomor 25 tahun 2020 tentang pengendalian

transportasi selama masa mudik Idul Fitri 1441 Hijriah.

Mudik berpotensi besar dalam penyebaran Virus Corona. Hal ini dapat dilihat dari contoh tiga kasus masyarakat yang positif Covid-19 di Sumatra Selatan yang memiliki riwayat perjalanan dari Jakarta dan Bogor. Menurut survei yang dilakukan oleh Kementerian Perhubungan, terdapat 14 juta warga Jabodetabek melakukan mudik dengan rincian: 5,6 juta tujuan utama pemudik ialah Jawa Tengah; 3,7 juta tujuan Jawa Barat dan 1,6 juta Jawa Timur (Pratama, 2020). Daerah tujuan mudik dari Jabodetabek itu persatu April memiliki kasus Covid yang cukup tinggi. Hal ini diduga karena adanya mobilisasi masyarakat.

Menurut survei yang dilakukan oleh detik.com dari pembaca berita online, alasan masyarakat tetap mudik beragam. Alasan-alan tersebut antara lain ialah mulai dari yang tetap menjalankan protokol kesehatan, percaya diri dengan kondisi tubuh yang sehat, pandemi akan berakhir, hingga rasa rindu bertemu orang tua (Kusuma, 2020). Pada awalnya larangan mudik hanya sebatas himbauan saja, tanpa ada hukuman bagi pelanggar himbauan. Meski sudah ada himbauan untuk tidak mudik, mobilitas warga perantau datang ke kota asal tetap terlihat. Untuk mendukung kebijakan tersebut, sanksi hukum juga disertakan. Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD mengatakan bahwa larangan mudik lebaran berlaku di seluruh wilayah Indonesia.

Virus Corona dan Masyarakat Perkotaan

Virus Corona atau Covid-19 pertama kali muncul di Wuhan, China pada akhir 2019 lalu. Hingga kini sudah 200 lebih negara di dunia melaporkan adanya kasus terpapar Virus Corona. Hingga kini penyebaran virus yang belum terkendali ini terus meningkat bahkan obat untuk virus ini belum ditemukan. Di beberapa negara yang sudah berhasil menghilangkan virus ini, nyatanya ada gelombang kedua untuk penjangkitan Virus Corona. Virus Corona menular lewat lendir (droplet) manusia positif Covid-19 ke manusia negatif Covid-19. Lendir itu tersebar saat manusia positif Covid-19 bersin, batuk atau berbicara lalu terkena orang lain yang negatif. Karena cepat dan mudahnya persebaran virus ini, maka diberlakukan kebijakan-kebijakan yang sekarang berlaku, salah satunya larangan mudik.

Di Indonesia kasus ini pertama kali ditemukan pada dua warga Depok, Jawa Barat pada awal Maret lalu. Tercatat hingga 29 Mei 2020 jumlah yang terjangkit Virus Corona sebanyak 25.216 orang, yang sembuh sebanyak 6.492 orang dan yang meninggal sebanyak 1.520 orang (kumparan.com. 2020).

Setiap hari jumlah kasus Corona di Indonesia terus meningkat menurut Yuri dalam detik.news, hal ini dikarenakan masih banyak warga negara yang masih berkumpul di luar rumah tanpa menyadari bahwa setiap warga berperan untuk memutus mata rantai penyebaran Virus Corona. Banyak warga yang tidak mengikuti instruksi pemerintah.

Sejak merebaknya virus ini di Indonesia, berbagai kebijakan telah ditentukan guna memperlambat laju penyebaran Virus Covid-19. Kebijakan-kebijakan dan himbauan yang dikampanyekan diantaranya ialah *physcal distancing*, tagar di rumah saja, larangan mudik, *work from home*, hingga *new normal*. Banyak yang mengkampanyekan kebijakan dan himbauan tersebut, dari artis, *influencer*, pejabat hukum, petinggi negara, hingga rakyat biasa. Media-media dipenuhi berita tentang pandemi ini, baik tentang perkembangan, jumlah yang terjangkit, kebijakan yang diberlakukan dan dilanggar, maupun jumlah korban yang meninggal.

Dari berita-berita yang beredar, dapat kita ketahui Virus Corona berpotensi menyebar di perkotaan. Menurut riset yang dilakukan oleh Newslab Katadata, terdapat tiga provinsi yang memiliki kerentanan tinggi terhadap Virus Corona yakni DKI Jakarta, Jawa Barat (Jabar) dan Banten. Masyarakat metropolitan lebih berpotensi dibandingkan masyarakat desa. Menurut survei yang dilakukan Newslab Katadata, sebab-sebab mengapa kota metropolitan rentan terhadap Corona: (1) Posisi Jakarta adalah gerbang utama Indonesia dari luar negeri, sedangkan Jabar dan Banten adalah Provinsi penyangga dari sang gerbang tersebut; (2) Kawasan-kawasan tersebut menampung lebih dari 10% jumlah penduduk Indonesia dalam kepadatan mendekati 5.000 orang perkilo meter persegi; (3) Penggunaan transportasi yang padat dan (4) Mobilitas penduduk yang cukup tinggi (Dhyaksa, 2020).

Merebaknya virus ini, pola hidup orang-orang pun turut berubah. Dari yang *Work from Home*, *School from Home* via daring, harus rajin mencuci tangan, masuk pusat perbelanjaan harus dicuci tangan dan diperiksa suhu tubuh orang tersebut. Virus ini sangat berisiko untuk masyarakat perkotaan terlebih karena padatnya jumlah penduduk. Ibu Herdiyati yang berusia 46 tahun mengakui adanya perubahan ritme kehidupannya karena pandemi. Ibu Herdiyati tinggal di Kampung Elektro RT 15 RW,17 Muara Baru, Panjaringan, Jakarta Utara. Sebuah kampung padat pemukiman yang justru tidak padat penduduk namun warga tetap menyimpan kekhawatiran. Bu Herdiyati mengaku sejak ramainya pemberitaan Virus Corona yang ramai di media ia mengubah kebiasaannya. Yang biasanya jika sampai di rumah beliau langsung menonton TV, namun sejak adanya Virus Corona beliau harus

membersihkan diri terlebih dahulu badannya (cnnindonesia, 2020).

Dari persebarannya di 32 provinsi, pusat kasus paling banyak ditemukan di Ibukota Jakarta. Hingga 1 April 2020, terdapat 816 pasien Covid-19 di wilayah DKI Jakarta. Data ini belum dihitung jumlah kasus yang menunggu hasil yakni 720 kasus. Persebaran Covid-19 di DKI Jakarta telah mencapai hampir seluruh wilayah kelurahan (Garnesia, 2020). Menurut Achmad Yurianto juru bicara penanganan Covid-19, d DKI Jakarta memiliki kasus Corona terbanyak dikarenakan gerbang masuk DKI Jakarta dinilai besar dan DKI Jakarta menjadi mobilitas keluar-masuknya masyarakat (Putra, 2020). Sempat ada isu bahwa Indonesia akan menerapkan kebijakan *lockdown*. *Lockdown* bermakna mengunci seluruh akses masuk atau keluar dari suatu wilayah/daerah/negara untuk mencegah covid-19, *lockdown* juga membantu masyarakat agar terhindar dari pengambilan keputusan yang tidak tepat seperti pulang kampung di tengah pandemi.

Mudik berpotensi besar dalam penyebaran Virus Corona hal ini dapat dilihat dari beberapa contoh tiga kasus masyarakat yang positif Covid-19 di Sumatra Selatan memiliki riwayat perjalanan dari Jakarta dan Bogor. Menurut survei yang dilakukan Kementerian Perhubungan, terdapat 14 juta warga Jabodetabek melakukan mudik pada 2019. 5,6 juta tujuan utama pemudik ialah Jawa Tengah, 3,7 juta Jawa Barat, dan 1,6 juta Jawa Timur (Pratama, 2019). Daerah tujuan mudik dari Jabodetabek itu per-satu April memiliki perkembangan kasus Covid-19 yang cukup tinggi. Hal ini diduga karena adanya mobilisasi masyarakat. Awalnya larangan mudik hanya bersifat himbauan namun menurut data dari Kementerian Perhubungan 24 persen masyarakat tetap mudik. Hal ini dikhawatirkan akan menjadi medium penularan Covid-19 di desa-desa sebab para perantau dianggap merupakan orang yang tinggal di daerah terjangkau Corona-19 (Hakim, 2020). Untuk alasan itu, Presiden RI menetapkan kebijakan larangan mudik.

Awalnya larangan mudik hanya berupa himbaun. Kemudian larangan mudik berlaku hanya untuk ASN, TNI, Polri dan Pegawai BUMN. Kemudian berdasarkan hasil evaluasi lapangan bahwa mudik akan dilarang untuk semua pihak (Nurita, 2020). Pasca diterbitkan peraturan Menteri Perhubungan Nomor 25 Tahun 2020 tentang Pengendalian Transportasi. Selama masa mudik Idul Fitri 1441 H dalam rangka pencegahan Covid 19, Kementerian Perhubungan melakukan pemantauan implementasi dari peraturan tersebut. Pemantauan dilakukan pada moda transportasi darat, laut, udara dan perkeretaapian di sejumlah daerah Indonesia. Menurut Juru Bicara Kementerian Perhubungan, pelaksanaan di lapangan berjalan dengan

baik, terjadi jumlah penurunan kendaraan yang diminta putar balik. Untuk angkutan penyeberangan sudah tidak melayani angkutan penumpang. Selain itu, sejumlah pelabuhan besar, tidak lagi mengangkut penumpang (wartakota.tribunews.com, 2020).

Dari beberapa sumber yang dibaca penulis, beberapa orang sudah mentaati aturan tersebut. Namun, tidak dipungkiri masih ada beberapa yang masih nekad mudik meskipun sudah ada kebijakan larangan mudik. Untuk itu, tulisan ini hendak mengkaji apa sanksi yang diterapkan pemerintah untuk mendukung kebijakan larangan mudik ditengah pandemi Covid-19, dan bagaimana peran hukum dalam menertibkan masyarakat di tengah pandemi Covid-19.

Sanksi Pemerintah Untuk Mendukung Kebijakan Larangan Mudik

Adapun kebijakan-kebijakan yang dibuat pemerintah guna memutus rantai penyebaran Covid-19, salah satunya ialah larangan mudik. Sebelumnya, pemerintah telah menerapkan kebijakan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) di sejumlah Kota dan Kabupaten. Larangan mudik merupakan penguatan dari kebijakan PSBB di sejumlah daerah. Larangan mudik sebelumnya hanya berlaku bagi ASN, TNI, Polri dan pegawai BUMN. Namun Presiden Joko Widodo menyebutkan, berdasarkan data perintah, masih ada 24% masyarakat yang bersikeras akan mudik. Angka 24% adalah jumlah angka yang besar jika terjadi perpindahan orang dari sejumlah Kota, Kabupaten, Provinsi (Kompas.com, 2020). Oleh karena itu larangan mudik diberlakukan untuk seluruh lapisan masyarakat.

Pelarangan mudik didasarkan pada Peraturan Menteri Perhubungan No. PM 25 Tahun 2020 tentang Pengendalian Transportasi selama masa mudik Idul Fitri Tahun 1441 Hijrah dalam rangka penyebaran Virus Corona. Kebijakan tersebut mulai berlaku pada 24 April 2020. Pasal 2 Permenhub No. PM 25 Tahun 2020 menyebutkan bahwa larangan sementara penggunaan sarana transportasi darat berlaku untuk sarana transportasi dengan tujuan keluar dan/ atau masuk wilayah PSBB. Pelanggaran terhadap larangan tersebut dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Penegakan hukum bukan semata-mata berarti pelaksanaan perundang-undangan, tetapi penegakkan hukum yang mengandung nilai-nilai yang sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Soekanto, 2008). Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum, yaitu: (1) Faktor hukumnya sendiri. Yang dimaksud

adalah undang-undang dalam arti materil, yaitu peraturan tertulis yang berlaku umum dan dibuat oleh penguasa pusat maupun daerah yang sah; (2) Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum. Ruang lingkup dalam penegak hukum luas sekali yakni mencakup mereka yang secara langsung dan tidak langsung berkecimpung di bidang penegakan; (3) Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum. Sarana atau fasilitas tersebut antara lain mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai dan keuangan yang cukup; (4) Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan. Penegakkan hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian dalam masyarakat. Masyarakat dapat mempengaruhi penegakan hukum dan (5) Faktor kebudayaan, yakni hasil karya, cipta dan rasanya yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup. Faktor kebudayaan sebenarnya bersatu padu dengan faktor masyarakat.

Faktor-faktor tersebut saling berkaitan dengan erat, karena faktor-faktor tersebut merupakan esensi dari penegakan hukum serta menjadi tolak ukur efektivitas penegakan hukum. Adapun kebijakan tersebut dianalisis dengan kelima faktor yang mempengaruhi penegakan hukum tersebut:

1. Faktor Hukum

Permenhub No. PM 25 Tahun 2020 mengatur pengendalian transportasi selama masa mudik Idul Fitri 1441 Hijriah dalam rangka pencegahan penyebaran Covid-19 yang dilakukan melalui larangan sementara penggunaan sarana transportasi. Dalam permenhub No. PM 25 Tahun 2020 diatur pemberian sanksi. Pasal Permenhub No. PM 25 Tahun 2020 mengatur sanksi yang diberikan secara bertahap.

2. Faktor Penegak Hukum

Penegak hukum dalam arti sempit adalah Kepolisian Republik Indonesia (Polri). Berkaitan dengan pelaksanaan permenhub No. PM 25 Tahun 2020, tugas polri dalam pengawasan pengaturan lalu lintas dalam pelaksanaan larangan sementara penggunaan transportasi darat dibantu oleh Tentara Nasional Indonesia. Selain itu di transportasi laut diatur oleh unit penyelenggara Pelabuhan. Dalam pelaksanaan larangan mudik, akses lalu lintas antar kota dibatasi. Pemerintah telah menyiapkan pembatasan lalu lintas jalan pada akses masuk dan keluar wilayah. Selain itu, di beberapa titik kepolisian telah mendirikan pos penyekatan

3. Faktor Sarana atau Fasilitas

Kebijakan larangan mudik membutuhkan sarana tempat pemeriksaan dan pos penyekatan yang dijaga oleh polri dan petugas lainnya. Dalam pelaksanaannya menimbulkan kendala. Karena luasnya wilayah Indonesia, khususnya pulau Jawa dimana kendaraan pemudik dapat melalui jalur tikus yang tidak memungkinkan untuk dibuat tempat pemeriksaan dan pos penyekatan. Mereka melewati jalur yang kurang pengawasan karena jalur-jalur utama dijaga ketat oleh petugas.

4. Faktor Masyarakat dan Kebudayaan

Mudik pada saat Idul Fitri merupakan tradisi tahunan di Indonesia. Idul Fitri dirayakan dengan berkumpul bersama keluarga. Banyak orang yang terpaksa menghabiskan tabungan untuk dapat “mudik lebaran”, mempertaruhkan keselamatan naik angkutan umum lebaran (*Kalimatun Sawa*, 2005: 5). Budaya masyarakat yang demikian membuat mereka melakukan berbagai cara agar dapat lolos dari pemantauan petugas. Mereka tidak menyadari bahaya penularan Covid-19 bagi warga di kampungnya. Oleh karena itu, pemerintah dan pemerintah daerah perlu terus mengingatkan masyarakat terhadap bahaya penularan Covid-19 dan menutup wilayah dari pemudik.

Dalam Permenhub No. PM 25 Tahun 2020 diatur pemberian sanksi. Pasal 6 Permenhub No. PM 25 Tahun 2020 mengatur sanksi yang diberikan secara bertahap, yaitu: (1) Kendaraan yang akan keluar dan/ atau masuk wilayah sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 pada tanggal 24 April 2020 sampai dengan tanggal 7 Mei 2020 diarahkan untuk kembali ke asal perjalanan dan (2) Kendaraan yang akan keluar dan/atau masuk wilayah sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 pada tanggal 8 Mei 2020 diarahkan untuk kembali ke asal perjalanan dan dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dari ketentuan tersebut sanksi yang diberikan berlaku terhadap kendaraan yang melanggar larangan. Di Indonesia, segala aturan diatur dalam peraturan perundang-undangan. Dalam Undang-Undang No.12 Tahun 2011 tentang pembentukan perundang-undangan (UU No.12 Tahun 2011), mengenai tata urutan peraturan perundang-undangan di Indonesia, peraturan menteri (Permen) tidak termasuk didalamnya. Permen dibuat untuk melaksanakan peraturan yang lebih tinggi.

Untuk mengetahui peraturan yang lebih tinggi sebagai dasar pembentukan Permenhub No. PM 25 Tahun 2020, dapat dilihat pada dasar mengingat Permenhub tersebut. Undang-undang yang berkaitan langsung dengan dasar pembentukan Permenhub No. PM 25 Tahun 2020 adalah Undang-Undang

No. 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan (UU No. 6 tahun 2018) Berdasarkan UU No.12 Tahun 2011, permen tidak dapat memuat ketentuan pidana. Oleh karena itu, Permenhub No. PM 25 Tahun 2020 tidak boleh memuat ketentuan sanksi pidana. Sanksi pidana yang dipicu oleh Permenhub No. PM Tahun 2020 adalah sanksi pidana yang diatur dalam UU No.6 Tahun 2018. Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan Budi Setiyadi menyatakan bahwa sanksi yang dikenakan terhadap pelanggaran larangan mudik mengacu pada UU No.6 Tahun 2018 (Nekat Mudik, 2020). Pasal 93 UU No.6 Tahun 2018 menyebutkan "setiap orang yang tidak mematuhi penyelenggaraan keekarantinaan kesehatan dan/ atau menghalangi penyelenggaraan keekarantinaan kesehatan sehingga menyebabkan kedaruratan kesehatan masyarakat dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/ atau pidana denda paling banyak Rp 100.000.000 (seratus juta rupiah)."

Pasal ini dapat dikenakan terhadap siapa pun yang tidak mematuhi penyelenggaraan keekarantinaan kesehatan atau menghalang-halangi penyelenggaraan keekarantinaan kesehatan, termasuk orang yang melanggar ketentuan Permenhub No. PM 25 Tahun 2020. Jika dilihat secara substansi bahwa hukum itu ada semata-mata untuk mengatur dan melindungi kehidupan bermasyarakat. Oleh karena itu lah hukum memiliki keberlakuannya. Pemaknaan hukum sebagai sesuatu yang mewajibkan akan memberikan dampak bagi praktik hukum dengan semakin meningkatnya kepatuhan hukum yang memang dilandasi oleh penerimaan atau internalisasi secara evaluatif oleh tiap-tiap individu sebagai anggota masyarakat. Hukum memanglah cerminan perlindungan kepentingan masyarakat, maka pada dasarnya hukum tersebut memiliki sifat mewajibkan bagi masyarakat yang bermakna kewajiban hukum dalam sudut pandang intern sehingga masyarakat secara batiniah memiliki kewajiban untuk mentaati hukum karena mereka menyadari sebenar-benarnya bahwa hukum itu ada untuk melindungi kepentingan masyarakat (Widowati).

Sama halnya dengan kebijakan larangan mudik yang diberlakukan. Kebijakan ini dibuat berdasarkan situasi dan kondisi yang dianggap genting. Kebijakan ini dibuat guna kepentingan dan kemaslahatan bersama. Mengingat virus ini menular dengan cepat dan mudah, maka kebijakan ini dibuat. Melalui mekanisme inilah sebenarnya hukum memiliki keberlakuannya.

Peran Hukum dalam Menertibkan Masyarakat di Tengah Pandemi Covid-19

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mudik berarti berlayar atau pergi. Secara epistemologi, mudik berarti perjalanan pulang ke kampung halaman dalam kurun waktu tertentu untuk bertemu dan berkumpul dengan sanak keluarga dan terjadisaat momentum khusus. Istilah mudik sering dikaitkan dengan kirata basa dari bahasa Jawa yaitu *mulih disik* yang berarti pulang dulu ke kampung halaman. Fenomena mudik menjadi budaya yang berkembang pesat sejak tahun 1970-an. Muskinul Fuad (2011) menyatakan bahwa ritual mudik memiliki banyak makna dan motif sehingga upaya mempertahankan dan pencegahan sulit dilakukan.

Awalnya larangan mudik hanya sebatas himbauan namun menurut Jawa Pos, hingga 5 Mei tidak sedikit masyarakat yang berusaha menerobos penyekatan yang dilakukan polisi dengan berbagai cara. Kebagops Korlantas Polri Kombespol Benyamin mengakui, setiap hari selalu ada upaya sebagian masyarakat untuk melewati sekat larangan mudik. Modusnya beragam, mulai dari masuk bagasi hingga menggunakan mobil pikap. Pada 07 Mei 2020, himbauan mudik berubah menjadi larangan mudik yang apabila dilanggar dikenakan sanksi berdasarkan peraturan yang berlaku.

Namun berdasarkan sumber dari Berita Satu TV pada tanggal 28 Mei 2018 sebanyak 1,8 juta orang diperkirakan meninggalkan kawasan Jabodetabek untuk mudik padahal telah ada imbauan larangan mudik selama pandemi Covid-19. Menurut Berita Satu TV pada Jum'at, 22 Mei 2020 Korlantas Polri mengatakan terjadi peningkatan atau puncak kendaraan pemudik nekat yang gendak menembus sekat. Terdapat 4.000 kendaraan pribadi yang diminta putar balik. Dari 4.000 itu termasuk 80 travel dan bus gelap yang langsung diamankan petugas. Mereka dikenakan tilang (YUD, 2020)

Selain itu menurut liputan 6 pada 21 Mei 2020, ada 4.304 kendaraan pemudik berhasil ditindak. Rinciannya ada 4.221 di Cikarang Barat dan 83 di Cikupa. Dari beberapa berita atau artikel yang kita lihat, menunjukkan peran hukum sudah berfungsi cukup baik dalam menertibkan masyarakat jika dilihat dari tindakan-tindakan yang dilakukan, seperti meminta kendaraan yang mencoba keluar area Jabodetabek memutar kembali ke tempat asal atau kebijakan-kebijakan yang dibuat setelah diberlakukannya kebijakan pelarangan mudik seperti diberhentikannya operasi beberapa maskapai penerbangan atau ditutupnya pelabuhan (Azhari, 2020).

Namun bila dilihat dari data yang diperoleh dari *Corporate Communication and Community Development Group Head* Jasa Marga Dwimawan Heru

Susanto, volume lalu lintas menurun sebanyak 68 persen dari tahun-tahun sebelumnya, dari 1, 21 juta unit sebelumnya berubah menjadi 465.582 unit. Dan yang masuk ke Jabodetabek turun signifikan sebanyak 68 persen (Ade Miranti Karunia, 2020). Dari data-data yang diperoleh, dapat disimpulkan kebijakan yang berlaku cukup efektif. Jumlah pemudik dan kendaraan yang masuk maupun keluar Jabodetabek mengalami penurunan sebesar 68 persen. Meskipun dari beberapa sumber dilihat masih ada yang masih tetap berusaha mudik. Namun mereka yang masih nekad segera ditertibkan petugas dengan cara diminta putar balik.

Dari penjelasan di atas menurut Soerjono Soekanto yang menjadi faktor-faktor penegakan hukum ialah: undang-undang, faktor penegakan hukum, faktor sarana atau fasilitas, faktor masyarakat, dan faktor kebudayaan. Pelaksanaan hukum dapat terjadi karena pelanggaran hukum, yaitu dengan menegakkan hukum tersebut dengan bantuan alat-alat perlengkapan Negara. Dalam menegakkan hukum kemanfaatan dan keadilan (Mertokusumo, 1986). Dilihat dari paparan di atas kebijakan larangan mudik dibentuk dari faktor-faktor penegakan hukum. Kebijakan ini dibentuk demi kemaslahatan bersama mengingat bahayanya pandemi ini. Kebijakan ini dibentuk sebagai salah satu upaya untuk menghilangkan pandemi ini. Untuk itu hukum harus dilaksanakan dan ditegakkan. Karena faktor-faktor penegakan hukum mempertimbangkan banyak hal. Bagaimanapun hukumnya, itulah yang harus diberlakukan pada peristiwa yang terjadi. Penegakkan hukum ditegakkan agar tidak terjadi penyimpangan (Mertokusumo, 1986).

Jika dilihat dari teori Struktural Fungsional Talcott Parson yang mengasumsikan bahwa dasar dari teori ini ialah prespektif di dalam sosiologi yang memandang masyarakat sebagai satu sistem yang terdiri dari bagian-bagian yang saling berhubungan satu sama lain dan bagian yang satu tidak dapat berfungsi tanpa adanya hubungan dengan yang lainnya. Kemudian perubahan yang terjadi pada satu bagian akan menyebabkan ketidakseimbangan dan pada gilirannya akan menciptakan perubahan pada bagian lainnya (Bernard Raho, 2007). Dari teori tersebut dapat dilihat bahwa masyarakat dan kebijakan larangan mudik yang dibuat oleh pemerintah saling berhubungan. Apabila antara masyarakat dan kebijakan tersebut berjalan lancar maka yang tercipta adalah harmoni. Namun, apabila masyarakat tidak mematuhi kebijakan tersebut, maka terjadinya ketidakseimbangan. Ketidakseimbangan tersebut bisa berupa makin merebaknya pandemi Covid-19 dan yang melanggar kebijakan tersebut mendapat sanksi.

Menurut pandangan Parson, masyarakat terintegrasi atas dasar

kesepakatan dari para anggotanya akan nilai-nilai kemasyarakatan tertentu yang mempunyai kemampuan mengatasi perbedaan-perbedaan sehingga masyarakat tersebut dipandang sebagai suatu yang secara fungsional terintegrasi dalam suatu keseimbangan. Dengan demikian masyarakat adalah merupakan kumpulan sistem sosial yang satu sama lain berhubungan dan saling ketergantungan (Grathoff, 2000). Maka dari itu, antara hukum dan masyarakat adalah sistem sosial yang saling ketergantungan, keduanya memiliki kapasitas masing-masing dan peran masing-masing. Hukum dan masyarakat tidak bisa berjalan sendiri-sendiri, keduanya harus saling beriringan agar terciptanya keseimbangan. Kebijakan larangan mudik, apabila tidak ditaati masyarakat maka akan pincang. Begitu pula sebaliknya, apabila kebijakan ini, tidak dipatuhi masyarakat kemungkinan keadaan akan semakin parah. Untuk menciptakan harmoni, keduanya harus berjalan sesuai perannya masing-masing.

Dari data jumlah pemudik kebijakan ini dapat dikatakan berhasil karena banyaknya jumlah penurunan angka pemudik. Dari beberapa sumber beritapun implementasi kebijakan larangan mudik inipun berjalan cukup baik. Namun berdasarkan kenyataan di lapangan dan berita yang ada, masih ada beberapa masyarakat yang nekad mudik meskipun hal tersebut dilarang keras. Seharusnya masyarakat lebih sadar bahwa hukum sebagai suatu tatanan yang memiliki sifat mewajibkan karena substansi atau materi hukum ditujukan untuk melindungi kepentingan tiap-tiap individu dalam masyarakat dan tentu saja hukum tercipta berupaya untuk mempertahankan kehidupan bermasyarakat (Widowati).

Penutup

Pandemi Virus Covid-19 atau yang dikenal dengan Corona virus semakin hari penyebarannya semakin masif. Hal ini membuat pemerintah berupaya untuk mengurangi penyebaran virus tersebut. salah satu upaya yang dilakukan pemerintah ialah membuat berbagai kebijakan-kebijakan baru. kebijakan-kebijakan tersebut dari yang hanya sekedar himbauan sampai ke larangan yang mengandung hukum. Himbauan dan larangan tersebut antara lain Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), taggar #di rumahaja, hingga larangan mudik Idul Fitri 1441 H.

Penegakan hukum larangan mudik sebagaimana diatur dalam Permenhub No. PM 25 Tahun 2020 dipengaruhi oleh beberapa faktor. Ketentuan sanksi pidana dalam Permenhub No. PM 25 Tahun 2020 mengacu pada UU No. Tahun 2018 yang dapat dikenakan terhadap siapapun yang tidak mematuhi

atau menghalang-halangi penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan. Pengawasan pelaksanaan Permenhub No. Pm 25 Tahun 2020 dilakukan oleh Kepolisian RI dibantu oleh Tentara Nasional Indonesia dan Balai Pengelola Transportasi Darat atau Unit Penyelenggaraan Pelabuhan.

Dari beberapa sumber berita, implementasi kebijakan ini sudah cukup baik, meskipun masih ada beberapa masyarakat yang nekad mudik dan mencoba menerobos jalur-jalur transportasi tersebut. Namun, yang berusaha melanggar beberapa berhasil ditertibkan sesuai peraturan yang berlaku.

Daftar Pustaka

Buku:

Mertokusumo, Sudikno. (1986). *Hukum Mengubah*. Yogyakarta. Siberty Raho, Bernard, SVD. *Teori Sosiologi Modern*. (Jakarta: Prestasi Pustaka 2007)
Grathoff, Richard. *Kesesuaian Alfred Scudzdan Talcot Parson: Teori Aksi Sosial*, (Jakarta: Kencana, 2000)

Jurnal

Widowati, Christiani. *Hukum Sebagai Norma Sosial Memiliki Sifat Mewajibkan*, ADIL: Jurnal Hukum Vol.4 No.1

Artikel dan Surat Kabar

Rehia Sebayang, (2020, 12 Maret), *Alert! WHO Resmi Tetapkan Corona Pandemi*, diperoleh dari: <https://www.cnbcindonesia.com>.

Dian Erika, (2020, 7 Mei), *Update 7 mei: Bertambah 338, Kini Ada 12.776 Kasus Covid-19 di Indonesia*, diperoleh dari: <https://www.google.com/amp/s/amp/.kompas.com>

Irma Garnesia, (2020,03 Apri), *Menilik Daerah Rentan Covid-19 di RI dan Bahaya daripada Mudik*, 03 diperoleh dari: <https://www.google.com/amp/s/amp.tirto.id>.

Teatrika Handiko Putri, (2020, 17 Maret), *Ini Alasan DKI Jakarta Punya Kasus Covid-19 Terbanyak*, diperoleh dari: <https://www.google.com/am/s/www.idntimes.com>

Ahmad Zaenudin, (2020. 29 April), *Kepadatan Penduduk Perparah Covid-19: Saatnya Ubah Tata Kota?*, diperoleh dari: <https://www.google.com/amp/s/amp.tirto.id>

Nograhany Widhi Koesmawardhani, (2020, 17 Maret), *Pemerintah Tetapkan Masa Darurat Bencana Corona hingga 29 Mei 2020*, Diperoleh dari:

<https://m.detik.com>

Rully R. Ramli (2020, April 22), *Fakta-fakta Larangan Mudik diterapkan 24 April Hingga Tak Boleh Keluar Zona Merah*, diperoleh dari: <https://google.com/amp/s/amp.kompas.com>

Akhdi Martin Pratama (2020, 09 April), *Sebanyak 14,9 Juta Warga Jabodetabek Akan Mudik Lebaran 2019*, diperoleh dari : <https://www.google.com/amp/s/amp.kompas.com>

Hendra Kusuma, (04 April 2020), *Beragam Alasan Masyarakat Nekat Mudik Meski Corona Merebak*, diperoleh dari: <https://m.detik.com>

Andya Dhyaksa, (03 April 2020) *Penyebab Para Kota Metropolitan Rentan Terhadap Virus Corona*, diperoleh dari: <https://www.google.com/amp/s/m.bisnis.com>.

Rakhmat Nur Hakim, (2020, 21 april), *Ini Alasan Jokowi Tetapkan Larangan Mudik untuk Seluruh Masyarakat*, diperoleh dari: <https://www.google.com/amp/s/amp.kompas.com>.

Dewi Nurita, (2020, 21 April), *Jokowi Jelaskan Alasan Larangan Mudik*, diperoleh dari: <https://www.google.com/amp/s/nasional.tempo.co>

Iqbal Musyaffa (2020, 21 April), *Pemerintah Siapkan Pembatasan Lalu Lintas Dukung Pelanggaran Mudik*, diperoleh dari: <https://www.aa.com>

Giri Hartomo, (2020, 21 April), *Nekat Mudik, Siap-siap Kena Sanksi*, diperoleh dari: <https://google.com/amp/s/esconomy.okezone>

YUD, (2020, 28 Mei), *1,8 Juta Orang Diperkirakan Tinggalkan Jabodetabek untuk Mudik*, diperoleh dari: <https://www.google.com/amp/s/amp.beritasatu.com>

Arief Azhari, (2020, 21 April), *Terindikasi Mudik, 4000 Kendaraan Dipaksa Putar Balik ke Jakarta*, diperoleh dari: <https://m.liputan6.com>

Ade Miranti Karunia, (2020, 17 Juni), *Jasa Marga: Volume Lalu Lintas yang Menuju Jakarta Turun*, diperoleh dari <https://www.google.com/amp/s/amp.kompas.com>.

Tulisan Tanpa Pengarang

(2020), *Update Corona di Indonesia* 29 Mei: 25. 216 Positif, 1.520 Meninggal, 6.492. diperoleh dari: <https://www.google.com/amp/s/m.kumparan.com>

(2020, 25 April), *Kisah-kisah Warga yang Masih Berupaya Mudik Meski Dilarang, Tak Jujur, 100 Orang diminta Putar Balik*, diperoleh dari: <https://www.google.com/amp/s/amp.kompas.com>.

(2020, 21 April), *Wabah Corona dan Cerita Warga di Pemukiman Padat Penduduk*. Diperoleh dari: <https://m.cnnindonesia.com>

Fenomena Covid-19 sebagai Pendorong Terjadinya Perubahan Sosial Pendidikan

Nur Kholisoh

*Prodi Sosiologi,
Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora,
UIN Sunan Kalijaga
Email: nur14kholisoh@gmail.com*

Pendahuluan

Munculnya sebuah virus baru pada akhir tahun 2019 silam membuat dunia gempar, pasalnya virus ini menyebar dengan sangat cepat serta belum ditemukannya vaksin untuk dapat mengobatinya. Virus tersebut bernama *Coronavirus diseases 2019* atau yang lebih dikenal sebagai Covid-19. Corona berasal dari Bahasa Latin yang artinya mahkota, dinamakan Corona karena permukaan virus tersebut semacam duri berbentuk seperti mahkota yang ujung-ujungnya berpaku ketika dilihat melalui mikroskop (<https://www.bbc.com/indonesia/dunia-51396818>, akses 29 Mei 2020). Penamaan Covid-19 ini diumumkan oleh WHO pada 11 Februari 2020. Covid-19 merupakan penyakit menular yang menyerang sistem pernapasan. Sebagian orang yang terinfeksi virus ini akan mengalami gangguan pernapasan ringan hingga sedang, serta dapat sembuh tanpa memerlukan perawatan khusus, namun orang tua yang memiliki penyakit sebelumnya jika terinfeksi virus ini dapat membuatnya menjadi penyakit yang lebih serius hingga dapat mengakibatkan kematian (https://www.who.int/health-topics/Coronavirus#tab=tab_3, akses 29 Mei 2020). Covid-19 menular melalui berbagai media seperti droplet atau tetesan yang dihasilkan ketika orang yang terinfeksi virus ini batuk, bersin atau berbicara, bisa juga menempel terlebih dahulu pada benda-benda, dan bisa pula melayang-layang di udara (<https://COVID19.go.id/p/hoax-buster/salah-who-sebut-penularan-Corona-tidak-lagi-hanya-lewat-droplet-tapi-juga-udara>, akses 30 Mei 2020).

Virus baru yang berhasil menggemparkan dunia ini ditemukan pertama kali di Negara China yang kemudian menyebar ke banyak negara. Indonesia sebagai negara yang sama-sama berada di Benua Asia seperti China pun tidak terlepas dari infeksi virus ini. Pada 2 Maret 2020 tercatat kasus pertama di negeri ini, yaitu 2 warga negara Indonesia yang tinggal di Kota Depok. Semenjak dinyatakannya kasus pertama tersebut dari hari ke hari Indonesia selalu mengalami penambahan kasus.

Pada 11 Maret 2020, Covid-19 dinyatakan sebagai pandemi oleh Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) setelah wabah ini menjangkiti semakin banyak orang di banyaknya negara karena persebarannya yang sangat cepat (cnbcindonesia, 2020), sehingga hal ini membuat berbagai negara terutama negara terdampak memberlakukan kebijakan-kebijakan guna memperlambat hingga mengentaskan virus ini. Menurut Ahmad Zainal Arifin (2020) dalam diskusi *online* dengan tema “*Dampak Covid-19 Terhadap Pekerja di Sektor Informal*” kebijakan-kebijakan yang diberlakukan oleh berbagai negara itu berbeda-beda, tergantung daripada pemerintahnya, kondisi masyarakatnya, dan hal-hal lainnya yang menjadi pertimbangan untuk kebijakan-kebijakan tersebut diberlakukan. Berbagai model kebijakan yang ada diantaranya ialah *lockdown*, *social distancing*, *physical distancing*, ataupun *herd-immunity* yang dilakukan dengan membiarkan warganya terpapar dan kemudian secara alamiah akan terbentuk immunitas atas virus tersebut.

Indonesia sendiri telah menyatakan Covid-19 ini sebagai bencana non-alam, berupa wabah penyakit yang wajib dilakukan upaya penanggulangan sehingga tidak terjadi peningkatan kasus, maka dari itu pemerintah mengambil langkah *social distancing* dan *physical distancing* dalam menghadapi wabah ini, dengan mewujudkan konsep tersebut dalam sistem Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang dibersamai penerapan protokol kesehatan sesuai dengan anjuran yang diberikan oleh WHO, hal ini sesuai dengan keputusan yang tertera dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*. Pembatasan Sosial Berskala Besar adalah pembatasan kegiatan tertentu dalam suatu wilayah yang diduga terinfeksi Covid-19 sedemikian rupa untuk mencegah kemungkinan penyebaran virus tersebut. Penerapan PSBB ini meliputi peliburan sekolah dan tempat kerja, pembatasan kegiatan keagamaan, serta pembatasan kegiatan di tempat atau fasilitas umum. Dengan ketentuan PSBB ini diharapkan dapat meminimalisir kegiatan-kegiatan yang dilakukan secara berkumpul dan di luar rumah, orang-orang hanya diperbolehkan keluar rumah jika dirasa itu penting dan mendesak, sehingga dengan demikian persebaran akan virus semakin melambat, pasien terinfeksi akan semakin menipis, seluruh pasien terinfeksi bisa mendapatkan perawatan dengan baik karena kuantitas pasien terinfeksi tidak melebihi kapasitas rumah sakit, dan para tenaga medis akan lebih fokus berjuang di garis terdepan dengan tenang.

Kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah tersebut tidak dapat dipungkiri berdampak pada berbagai bidang, tidak terkecuali bidang

pendidikan. Seluruh kegiatan pendidikan mengalami perubahan yang sangat signifikan yang dirasakan oleh berbagai *stakeholder* pendidikan. Peserta didik, tenaga pendidik, orang tua hingga pemerintah mau tidak mau mestilah dapat beradaptasi dengan perubahan-perubahan yang terjadisaat ini demi kemaslahatan bersama. Kebijakan tersebut memaksa seluruh masyarakat yang ada di negara ini untuk dapat melakukan berbagai aktivitas yang biasanya dilakukan secara tatap muka kini dilakukan di rumah serta juga membatasi berbagai aktivitas di luar rumah. Para peserta didik harus menjalankan belajar dari rumah, begitu pula dengan para pendidik yang harus dapat mengajar dari rumah. Hal ini dilakukan tentulah untuk dapat menerapkan *social distancing* dan *physical distancing* agar dapat menekan laju peyebaran wabah ini. Namun nyatanya penerapan belajar dari rumah yang memanfaatkan teknologi juga menimbulkan kesenjangan budaya. Hal tersebut layaknya teori fungsionalisme yang dikemukakan oleh Emile Durkheim yang dengan asumsi bahwa perubahan dapat mengacaukan sistem sosial yang mapan. Teori fungsionalis sebagai teori perubahan sosial melihat proses perubahan sosial sebagai hal yang wajar, namun berdampak pada perubahan sistem sosial. Secara ekstrem, perubahan sosial dapat membuat sistem sosial mengalami disfungsi. Akhirnya terjadi kesenjangan budaya/*cultural lag* (sosiologis.com, 2020).

Tulisan ini akan membahas mengenai perubahan sosial dalam komunikasi publik di bidang pendidikan pada masa pandemi Covid-19. Penulis merasa perlu melakukan penelitian ini karena pasalnya meskipun permasalahan yang dihadapi dunia saat ini berkaitan mengenai masalah kesehatan, namun dampaknya bukan hanya dirasakan dalam bidang kesehatan saja, seluruh bidang ikut terdampak atas fenomena yang terjadisaat ini. Maka dari itu seluruhnya pun harus ikut mendapatkan perhatian yang sama agar semuanya dapat berjalan secara seimbang. Bidang pendidikan merupakan salah satu bidang yang juga harus mendapatkan perhatian khusus, karena pendidikan sebagai sarana dalam mencerdaskan bangsa, sehingga meskipun situasi pandemi saat ini pendidikan tidak boleh berhenti dan harus tetap terlaksana dengan baik sebagaimana mestinya. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, data yang digunakan dalam penelitian ini ialah data sekunder yang didapatkan melalui studi literatur.

Wabah dalam Sejarah

Menurut Butar-Butar (2020: 12-17), fenomena wabah yang ada saat ini nyatanya bukanlah peristiwa pertama yang terjadi di dunia, jauh sebelum

wabah Covid-19 muncul sudah ada wabah yang juga menjangkiti masyarakat secara luas sejak zaman Nabi Muhammad SAW, berikut rincian terjadinya wabah sejak tahun 1 Hijriyah/7 Masehi hingga 8 Hijriyah/19 Masehi:

Abad 1 H/7 M

1. Tha'un Syairawiyah di Mada'in (Persia) pada tahun ke 6 H/627 M yaitu di zaman Nabi SAW.
2. Tha'un 'Amwas (nama desa antara Quds dengan Ramlah) tahun 17 H/638 M atau tahun 18 H/639 M yaitu di Syam, yang merenggut 25 ribu orang (ada yang mengatakan 30 ribu orang), dimana pada pandemi ini juga banyak menewaskan sejumlah sahabat seperti Abu Ubaidah, Mu'adz bin Jabal, Abu Malik al-'Asy'ary, Yazid bin Abi Sufyan, al-Harits bin Hisyam, Suhail bin Amr, dan lain-lain.
3. Tha'un di Kufah tahun 49 H/669 M.
4. Di Hasanah tahun 53 H/673 M, yang menewaskan Ziyad bin Abihi.
5. Di Mesir tahun 66 H/686 M.
6. Di Basrah tahun 69 H/689 M (ada pendapat yang menyatakan tahun 67 H/687 M, 69 H/689 M, 70 H/690 M, dan 72 H/692 M). Dinamakan juga dengan Tha'un 'al-Jarif' yang merenggut puluhan ribu nyawa.
7. Di Mesir tahun 85 H/704 M.
8. Di Basrah yaitu Tha'un 'al-fityat' dan 'al-'adzry' tahun 87 H/706 M (ada pendapat yang menyatakan tahun 82 H/701 M, 84 H/703 M, 85 H/704 M, 86 H/705 M, 87 H/706 M), dinamakan demikian oleh karena sangat banyak orang yang meninggal dunia.
9. Tahun 86 H/705 M (yaitu tahun wafatnya Abdul Aziz bin Marwan)
10. Lalu Tha'un 'al-asyraf', dinamakan demikian karena banyaknya orang-orang mulia yang wafat, yaitu tahun 100 H/718 M.
11. Tha'un 'Ady bin Arthah tahun 100 H/718 M.

Abad ke-2 H/8 M

1. Tahun 107 H/725 M di Syam.
2. Tahun 115 H/733 H di Syam.
3. Tahun 127 H/745 M (dinamakan Tha'un Ghurab).
4. Tahun 131 H/749 M (dinamakan Tha'un Sullam bin Qutaibah).
5. Tahun 134 H/751 M (dinamakan Tha'un Rayy).
6. Tahun 146 H/763 M di Baghdad.

Abad ke-3 H/9 M

1. Tahun 221 H/836 M di Basrah.
2. Tahun 249 H/863 M di Irak.

Abad ke-4 H/10 M

1. Tahun 301 H/913 M.
2. Tahun 324 H/936 M di Isfahan.
3. Tahun 346 H/957 M.

Abad ke-5 H/11 M

1. Tahun 406 H/1015 M di Basrah.
2. Tahun 423 H/1032 M di India dan Asia.
3. Tahun 425 H/1034 M di Syiraz, Wasith, Ahwaz, Basrah, dan Bagdad.
4. Tahun 433 H/1041 M di Mousil, Aljazera, dan Bagdad.
5. Tahun 449 H/1057 M di Bukhara, Azerbaijan, Ahwaz, Wasith, Basrah, dan Samarkand.
6. Tahun 452 H/1060 M di Hijaz dan Yaman.
7. Tahun 455 H/1063 M di Mesir.
8. Tahun 469 H/1076 M di Damaskus.
9. Tahun 478 H/1085 M, bermula di Irak lalu menyebar ke seluruh dunia.

Abad ke-6 H/12 M

1. Tahun 575 H/1179 M di Bagdad.
2. Tahun 597 H/1200 M di Mesir.

Abad ke-7 H/13 M

1. Tahun 633 H/1235 M.

Abad ke-8 H/14 M

1. Tahun 720 H/1320 M di Mesir.
2. Tahun 749 H/1348 M di Makkah.
3. Tahun 764 H/1362 M di Cairo dan Damaskus.
4. Tahun 769 H/1367 M.
5. Tahun 771 H/1369 M di Damaskus.
6. Tahun 781 H/1379 M dan 783 H/1381 M di Mesir.
7. Tahun 791 H/1389 M.

Abad ke-9 H/15 M

1. Tahun 809 H/1406 M di Mesir.
2. Tahun 813 H/1410 M.
3. Tahun 819 H/1416 M
4. Tahun 821 H/1418 M
5. Tahun 822 H/1419 M

6. Tahun 827 H/1423 M di Quds.
7. Tahun 833 H/1429 M di Mesir.
8. Tahun 841 H/1437 M
9. Tahun 849 H/1445 M
10. Tahun 853 H/1449 M
11. Tahun 859 H/1454 M
12. Tahun 864 H/1459 M
13. Tahun 873 H/1468 M
14. Tahun 886 H/1481 M di Andalusia.
15. Tahun 897 H/1491 M di Quds.

Abad ke-10/16 M

1. Tahun 969 H/1561 M di Bait al-Maqdis dan sekitarnya.
2. Tahun 980 H/1572 M sampai 982 H/1574 M
3. Tahun 987 H/1579 M
4. Tahun 995 H/1586 M

Abad ke-11 H/17 M

1. Tahun 1028 H/1618 M di Quds dan sekitarnya.

Abad ke-12 H/18 M

1. Tahun 1156 H/1742 M
2. Tahun 1174 H/1760 M
3. Tahun 1200 H/1785 M di Bait al-Maqdis dan sekitarnya.

Abad ke-13 H/19 M

1. Tahun 1228 H/1812 M.

Komunikasi dalam Bidang Pendidikan Sebelum Pandemi Covid-19

Berbicara mengenai pendidikan yang akan terlintas dalam benak banyak orang ialah sekolah. Sekolah memang merupakan salah satu sarana pelaksanaan proses pendidikan, meskipun begitu sekolah bukanlah satu-satunya sarana dalam realisasi proses pendidikan. Sebelum terjadinya fenomena pandemi Covid-19 yang memberikan dampak luar biasa bagi dunia ini, proses pendidikan masih masih dilaksanakan secara tatap muka. Pelaksanaan pendidikan secara tatap muka masih menjadi pilihan utama masyarakat untuk menempuh pendidikan, pasalnya mayoritas sekolah yang ada di Indonesia memang masih melaksanakan kegiatan pendidikan secara tatap muka, baru sebagian kecil dari perguruan tinggi yang melaksanakan pendidikan secara *online*, belum lagi proses transfer ilmu dirasa lebih efektif

terlaksana jika dilakukan secara tatap muka. Pendidikan secara tatap muka yang dilaksanakan oleh instansi pendidikan memiliki berbagai metode pembelajaran diantaranya ialah metode karya wisata (*out door*), *talking stick*, simulasi, *discovery learning*, *brainstorming*, diskusi, dan berbagai metode yang lainnya.

Metode karya wisata ialah aktivitas belajar peserta didik yang dilaksanakan di luar kelas dengan tujuan untuk meningkatkan psikologi peserta didik seperti rasa senang dan rasa kebersamaan yang selanjutnya berdampak terhadap peningkatan motivasi belajar siswa. Metode *talking stick* adalah metode pembelajaran yang dilakukan dengan bantuan tongkat, siapa yang memegang tongkat wajib menjawab pertanyaan dari guru setelah siswa mempelajari materi pokok, metode ini berorientasi pada terciptanya kondisi belajar yang membuat peserta didik lebih aktif dalam mengikuti pelaksanaan pembelajaran. Metode simulasi adalah suatu cara yang dipergunakan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dengan melakukan peniruan suatu keadaan. Metode *discovery learning* adalah metode pembelajaran mencari dan menemukan sendiri, dalam metode ini pendidik menyajikan bahan pelajaran yang tidak berbentuk final, kemudian anak didik diberi kesempatan untuk mencari dan menemukan sendiri dengan menggunakan teknik pendekatan masalah. Metode *brainstorming* merupakan suatu bentuk diskusi dalam rangka menghimpun gagasan, pendapat, informasi, pengetahuan, dan pengalaman dari semua peserta yang bertujuan untuk membuat kumpulan pendapat, informasi, pengalaman semua peserta, baik yang sama ataupun berbeda dan hasilnya kemudian dijadikan peta informasi atau peta gagasan untuk menjadi pembelajaran bersama. Metode diskusi adalah suatu cara penyajian bahan pelajaran yang memberi kesempatan kepada seluruh peserta didik untuk mengadakan perbincangan ilmiah guna mengumpulkan pendapat, membuat kesimpulan atau penyusunan berbagai alternatif pemecahan atas suatu masalah (Afandi, *et al.*, 2013: 83-109).

Berbagai metode yang telah dipaparkan di atas merupakan metode-metode yang dilaksanakan secara tatap muka. Terdapat berbagai macam metode pembelajaran yang dilakukan secara tatap ini bukanlah tanpa sebab, karena sejatinya proses pembelajaran jika hanya dilakukan dengan satu cara saja akan membuat peserta didik jenuh dalam mengikuti kegiatan belajarnya, akibatnya jika kejenuhan sudah melanda dalam diri peserta didik, maka apa yang sedang maupun akan dipelajarinya tidak akan maksimal untuk diserap dan dipahami sehingga dibutuhkan variasi-variasi pembelajaran agar peserta didik tetap terjaga antusiasnya dalam belajar. Selain itu pula berbagai metode

pembelajaran tersebut mendorong peserta didik untuk menjadi lebih aktif, kreatif, inovatif, dan kritis sehingga proses pendidikan tidak hanya terjadi satu arah saja, serta hal ini akan membentuk pribadi yang lebih siap dalam menghadapi berbagai tantangan yang ada.

Perubahan Metode Pendidikan dan Pengajaran

Dalam setiap kehidupan perubahan ialah sebuah keniscayaan. Perubahan sosial merupakan hal yang sangat melekat dalam masyarakat. Perubahan yang terjadi boleh jadi merupakan sebuah hal yang disadari dan juga disengaja, namun ada pula perubahan-perubahan yang terjadi tanpa kita sadari. Masyarakat dikatakan mengalami perubahan sosial apabila terjadi ketidaksamaan antara keadaan di masa lampau dengan sekarang dalam waktu yang cukup lama. Perubahan sosial merupakan perubahan dalam segi struktur sosial dan hubungan sosial yang menyangkut berbagai segi, seperti perubahan nilai dan norma sosial, pola-pola perilaku organisasi, perubahan susunan lembaga kemasyarakatan, dan perubahan di bidang kependudukan (Suhardi dan Sunarti, 2009: 4).

Terdapat teori utama mengenai perubahan sosial yaitu teori siklus dan teori perkembangan. Seperti namanya, dalam teori siklus perubahan sosial terjadi menyerupai siklus yaitu terus berputar secara berulang-ulang. Perubahan sosial model ini tidak dapat ditentukan ke titik tertentu, tetapi berputar-putar menyerupai pola lingkaran. Sedangkan dalam teori perkembangan perubahan sosial bersifat linear dan mencapai pada titik tertentu. Perubahan sosial dalam model ini merupakan perubahan sosial yang dapat direncanakan untuk menuju kepada titik tertentu (Ruswanto, 2009: 3-4).

Wujud dari perubahan sosial ialah bermacam-macam, mulai dari perubahan yang terjadi secara lambat dan cepat, perubahan yang pengaruhnya kecil dan besar, serta perubahan yang dikehendaki dan tidak dikehendaki. Perubahan yang terjadi secara lambat biasanya kita dapat menemuinya dalam peristiwa evolusi, sedangkan perubahan yang terjadi secara cepat dapat kita temukan dalam peristiwa revolusi. Perubahan yang pengaruhnya kecil ialah perubahan yang mempengaruhi unsur-unsur kehidupan masyarakat, tetapi tidak memiliki arti penting dalam struktur sosial, sedangkan perubahan yang pengaruhnya besar merupakan perubahan-perubahan yang mempengaruhi lembaga-lembaga dalam masyarakat. Perubahan yang dikehendaki merupakan perubahan yang telah direncanakan sebelumnya, sedangkan perubahan yang tidak dikehendaki merupakan perubahan yang tidak direncanakan sebelumnya, biasanya perubahan yang tidak dikehendaki beriringan dengan

perubahan yang dikehendaki (Waluya, 2009: 3-4).

Perubahan sosial agar dapat diterima oleh masyarakat secara luas harus memenuhi beberapa persyaratan, menurut Ayat Suryatna persyaratan-persyaratan tersebut diantaranya:

1. Masyarakat harus merasa butuh dengan perubahan, serta ada kesadaran bersama bahwa kehidupan yang dialami saat itu sudah tidak cocok lagi.
2. Perubahan yang disebabkan terjadinya inovasi harus dapat dipahami dan dikuasai oleh anggota masyarakat yang lainnya.
3. Perubahan itu harus dapat diajarkan. Hal ini mengingat inovasi adalah suatu konfigurasi mental atau adanya perubahan dalam tatanan sistem berpikir seseorang. Konfigurasi mental tersebut akan menghasilkan perilaku dan hasil perilaku itu diantaranya dalam bentuk benda-benda.
4. Perubahan itu harus menggambarkan keuntungan masyarakat pada masa yang akan datang.
5. Perubahan tidak merusak prestise pribadi atau golongan (Wrahatnala, 2009:25).

Perubahan sosial dalam masyarakat memiliki dua ciri-ciri, yang pertama ialah tidak ada masyarakat yang statis, dimana dalam hal ini tidak ada satupun masyarakat yang diam, stagnan, atau mandek meskipun suatu masyarakat tinggal di dalam hutan terpencil, tanpa pengaruh dari luar sama sekali, mereka akan tetap mengalami perubahan. Hal ini disebabkan karena pada hakikatnya manusia memiliki naluri untuk mengubah nasibnya agar lebih baik dan menjadi cita-cita mereka. Ciri-ciri yang kedua ialah proses perubahan sosial budaya bersifat mata rantai, perubahan-perubahan yang terjadi pada lembaga sosial tertentu, akan diikuti dengan perubahan-perubahan sosial budaya lainnya. Sangat tidak mungkin untuk menutup lembaga-lembaga tertentu dari pengaruh proses perubahan. Misalnya pengaruh perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi telah menyebabkan perubahan di berbagai bidang dalam kehidupan manusia. Hal ini menunjukkan bahwa suatu perubahan akan menimbulkan perubahan lain yang menyertainya (Aman, *et al.*,2009: 25).

Perubahan sosial terjadi karena adanya berbagai faktor, faktor-faktor tersebut dapat diklasifikasikan ke dalam dua kategori yaitu faktor yang berasal dari masyarakat itu sendiri atau bisa kita sebut sebagai faktor internal dan faktor yang berasal dari luar masyarakat atau bisa disebut sebagai faktor eksternal. Terdapat beberapa faktor internal yang menyebabkan perubahan sosial itu terjadi diantaranya ialah yang pertama perubahan jumlah penduduk, baik jumlah penduduknya itu berkurang maupun bertambah dalam suatu wilayah. Faktor yang kedua ialah adanya penemuan-penemuan baru, penemuan ini

mencakup penemuan dalam berbagai bidang. Faktor yang ketiga ialah pertentangan dalam masyarakat, pertentangan ini dapat terjadi antar individu, individu dengan kelompok, maupun antar kelompok. Faktor yang keempat ialah pemberontakan dan revolusi yang terjadi dalam suatu masyarakat atau negara. Dan faktor yang kelima ialah terjadinya reformasi, tujuan dari reformasi ini ialah untuk segera memperbaiki struktur kemasyarakatan yang telah rusak atau terancam rusak dibentuk menjadi baik kembali. Sementara untuk faktor eksternal sendiri terdapat tiga faktor yang mempengaruhi perubahan sosial itu terjadi diantaranya yang pertama ialah faktor lingkungan fisik, seperti terjadinya bencana alam. Yang kedua ialah terjadinya peperangan, peristiwa ini berdampak pada tingginya angka kematian, rusaknya berbagai sarana dan prasarana kebutuhan hidup sehari-hari, terjadinya kekacauan ekonomi dan sosial serta tergoncangnya mental penduduk, sehingga merasa frustrasi dan tidak berdaya. Dan faktor yang ketiga ialah pengaruh kebudayaan masyarakat lain, hal ini terjadi karena adanya kontak dengan masyarakat lain yang berbeda kebudayaannya (Muin, 2006: 11-16).

Dalam perubahan sosial terdapat berbagai faktor yang mendorong perubahan sosial itu terjadi serta terdapat pula faktor yang menghambat perubahan sosial. Faktor-faktor yang mendorong perubahan sosial itu terjadi diantaranya ialah adanya kontak dengan kebudayaan lain, sistem pendidikan formal yang maju, sikap menghargai hasil karya seseorang dan keinginan ingin maju, toleransi atau memiliki sikap mau menerima hal-hal baru, sistem terbuka dalam lapisan-lapisan masyarakat, penduduk yang heterogen, ketidakpuasan masyarakat terhadap bidang kehidupannya, orientasi ke masa depan, dan nilai bahwa manusi harus senantiasa beriktir untuk memperoleh kehidupannya. Sedangkan faktor-faktor yang menghambat perubahan sosial itu terjadi diantaranya ialah kurangnya hubungan dengan masyarakat lain, perkembangan ilmu pengetahuan yang terlambat, sikap masyarakat yang tradisional, adanya kepentingan yang telah tertanam dengan kuat, rasa takut akan terjadinya kegagalan pada integrasi kebudayaan, prasangka terhadap hal-hal baru atau sikap tertutup, dan hambatan-hambatan yang bersifat ideologis (Elisanti dan Rostini, 2009: 9-14).

Proses awal perubahan sosial menurut Alvin L. Betrand adalah adanya komunikasi. Melalui kontak dan komunikasi, unsur-unsur kebudayaan baru dapat menyebar baik berupa ide-ide, gagasan, keyakinan, maupun kebendaan. Proses penyebaran unsur kebudayaan dari satu masyarakat kepada masyarakat lainnya disebut sebagai proses difusi. Proses berlangsungnya difusi akan mendorong terjadinya akulturasi dan asimilasi. Difusi merupakan

suatu proses penyebaran unsur-unsur kebudayaan dari orang perorangan kepada orang perorangan yang lain. Misalnya terdapat penemuan baru dalam suatu masyarakat, maka penemuan itu dapat diteruskan dan disebarakan kepada masyarakat yang lain dengan cara difusi, sehingga mereka pun dapat menikmati manfaat dari penemuan baru itu. Oleh karena itu, difusi dapat menjadi pendorong bagi tumbuhnya suatu kebudayaan dan menambah kebudayaan-kebudayaan manusia yang telah ada. Masuknya unsur-unsur kebudayaan baru secara difusi dapat terjadi dengan simbiotik, damai, dan peperangan/kekerasan. Akulturasi merupakan proses penerimaan unsur-unsur kebudayaan baru dari luar secara lambat dengan tidak menghilangkan sifat khas kepribadian kebudayaan sendiri. Contoh, budaya selamatan merupakan bentuk akulturasi antara budaya lokal dalam budaya Jawa dengan budaya Islam. Asimilasi merupakan proses penerimaan unsur-unsur kebudayaan dari luar yang bercampur dengan unsur-unsur kebudayaan lokal menjadi unsur-unsur kebudayaan baru yang berbeda. Contoh, membaurnya etnis Tionghoa dengan masyarakat pribumi (Laning, 2009: 15-16).

Salah satu bentuk komunikasi yang didalamnya dapat terjadi perubahan sosial ialah komunikasi publik. Komunikasi publik merupakan komunikasi yang proses komunikasinya disampaikan oleh pembicara dalam situasi tatap muka di depan khalayak. Komunikasi publik disebut juga sebagai komunikasi pidato, kolektif, retorika, *public speaking*, dan komunikasi khalayak. Ciri-ciri komunikasi publik diantaranya ialah penyampaian pesan berlangsung kontinu, tidak spontanitas; dapat diidentifikasi siapa pembicara dan siapa pendengarnya; interaksi yang terbatas antara sumber dan penerima; serta waktu terbatas dan jumlah khalayak banyak. Kegiatan pendidikan seperti proses belajar mengajar yang dilakukan di sekolah merupakan salah satu penerapan daripada komunikasi publik, dikarenakan kegiatan penyampaian materi disampaikan oleh pembicara yang dalam hal ini ialah guru/pendidik secara tatap muka di depan peserta didik. Kegiatan seperti seminar, diskusi, dan kegiatan-kegiatan sejenisnya yang biasanya dilakukan dalam kegiatan pendidikan pun termasuk ke dalam komunikasi publik (Muryanti, 2020).

Sebelum wabah Covid-19 melanda negeri ini, kegiatan belajar mengajar masihlah masih dilaksanakan secara konvensional dengan bertatap muka secara langsung antara guru dan siswanya. Meskipun sudah terdapat beberapa instansi yang melaksanakan kegiatan belajar mengajarnya secara virtual dengan memaksimalkan pemanfaatan teknologi yang telah berkembang saat ini, namun kegiatan belajar mengajar secara virtual tersebut belumlah ramai diminati karena mayoritas orang merasa bahwa proses transfer ilmu

akan lebih efektif jika dilaksanakan secara bertatap muka, belum lagi kultur pendidikan yang sejak awal mulanya sudah dilaksanakan secara konvensional pastilah membuat preferensi pendidikan dalam masyarakat yang akan cenderung kepada pendidikan secara konvensional tersebut. Namun semua hal yang telah menjadi suatu kultur di tengah masyarakat ini sejak bertahun-tahun lamanya seakan sangat mudah tergantikan oleh kultur yang baru akibat daripada pandemi saat ini.

Dalam merespon fenomena pandemi Covid-19 ini pemerintah Indonesia menerapkan kebijakan PSBB untuk memperlambat penyebaran Covid-19. Namun kebijakan PSBB yang diterapkan di Indonesia berdampak pada berbagai segi kehidupan, baik itu bidang pendidikan, pekerjaan, maupun peribadatan. Di bidang pendidikan dalam menghadapi darurat bencana Covid-19 ini dikenal dengan pelaksanaan belajar dari rumah. Tujuan dari sistem pelaksanaan belajar dari rumah ini adalah memastikan pemenuhan hak anak untuk mendapatkan layanan pendidikan selama darurat Covid-19, melindungi warga satuan pendidikan dari dampak buruk Covid-19, mencegah penyebaran dan penularan Covid-19 di satuan pendidikan, serta memastikan pemenuhan dukungan psikososial bagi pendidik, peserta didik dan orang tua/wali. Dalam pelaksanaan belajar dari rumah ini memiliki dua metode yaitu pembelajaran jarak jauh dalam jaringan/*online* (Daring) dimana pembelajaran dilakukan dengan menggunakan *gadget* maupun laptop melalui beberapa portal dan aplikasi pembelajaran serta metode pembelajaran yang kedua ialah jarak jauh luar jaringan/*offline* (Luring) dimana proses pembelajaran menggunakan televisi, radio, modul belajar mandiri dan lembar kerja, bahan ajar cetak, alat peraga, dan media belajar dari benda di lingkungan sekitar.

Prinsip-prinsip pelaksanaan belajar dari rumah sesuai dengan SE Mendikbud No.4 Tahun 2020 diantaranya ialah:

1. Keselamatan dan kesehatan lahir batin siswa, guru, kepala sekolah, dan seluruh warga sekolah menjadi pertimbangan utama dalam pelaksanaan Belajar Dari Rumah.
2. Kegiatan Belajar Dari Rumah dilaksanakan untuk memberikan pengalaman belajar yang bermakna bagi siswa, tanpa terbebani tuntutan menuntaskan seluruh capaian kurikulum.
3. Belajar Dari Rumah dapat difokuskan pada pendidikan kecakapan hidup, antara lain mengenai pandemi Covid-19.
4. Materi pembelajaran bersifat inklusif sesuai dengan usia dan jenjang pendidikan, konteks budaya, karakter, dan jenis kekhususan peserta didik.
5. Aktivitas dan penugasan selama Belajar Dari Rumah dapat bervariasi

antar daerah, sekolah dan peserta didik sesuai dengan minat dan kondisi masing-masing, termasuk mempertimbangkan kesenjangan akses terhadap fasilitas Belajar Dari Rumah.

6. Hasil belajar peserta didik selama Belajar Dari Rumah diberi umpan balik yang bersifat kualitatif dan berguna dari guru tanpa diharuskan memberi skor/nilai kuantitatif.
7. Mengedepankan pola interaksi dan komunikasi yang positif antara guru dengan orang tua/wali (Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2020).

Dirjen Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK) Kemendikbud Iwan Syahril dalam webinar yang diselenggarakan oleh Universitas Yarsi dengan tema “Tantangan Pemakaian *Gadget* di Era Covid-19” menjelaskan bahwa terdapat beberapa perubahan yang dapat terjadi lebih cepat daripada yang diprediksi. Pertama, dengan adanya wabah ini para pendidik didorong untuk melakukan inovasi dalam proses belajar mengajarnya dan dibutuhkan sikap mental yang nyaman dari ketidaknyamanan. Peristiwa ini mengubah sikap para pendidik menjadi lebih berorientasi pada kebutuhan para siswanya. Kedua, peristiwa ini mempercepat penurunan kecemasan para pendidik dalam menggunakan teknologi, pasalnya pandemi ini memaksa para pendidik untuk memanfaatkan teknologi dalam kegiatan pembelajarannya (<https://www.jawapos.com/nasional/pendidikan/05/06/2020/pademi-Covid-19-memberikan-perubahan-besar-dalam-dunia-pendidikan/>, akses 27 Juli 2020).

Berbagai perubahan-perubahan kebijakan pun dilaksanakan Kementerian Pendidikan dan Budaya (Kemendikbud) dalam rangka menyesuaikan pembelajaran di masa pandemi Covid-19. Kebijakan-kebijakan tersebut diantaranya ialah mendorong pendidik untuk tidak fokus mengejar target kurikulum semata selama masa darurat ini melainkan membekali siswa akan kemampuan hidup yang sarat dengan nilai-nilai penguatan karakter, hal ini tercantum dalam Surat Edaran Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pencegahan dan Penanganan Covid-19 di lingkungan Kemendikbud serta Surat Edaran Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pencegahan Covid-19 pada Satuan Pendidikan. Kemendikbud juga menggagas Program Belajar dari Rumah (BDR) yang ditayangkan pada stasiun TVRI. Serangkaian kebijakan lain pun dikeluarkan oleh Kemendikbud seperti pembatalan Ujian Nasional (UN), penyesuaian ujian sekolah, pendekatan *online* untuk proses pendaftaran siswa, penyesuaian pemanfaatan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan BOP yang fleksibel untuk memenuhi kebutuhan sekolah selama pandemi, realokasi sumber daya melalui program sukarelawan mahasiswa kedokteran dan kesehatan,

pengaktifan fasilitas medis universitas di seluruh Indonesia sebagai Covid-19 *Test Center*, 18 laboratorium, dan 13 rumah sakit untuk perawatan pasien, serta mengalokasikan asrama pusat pelatihan kementerian untuk karantina dan realokasi anggaran untuk penanganan Covid-19 sebesar Rp 405 miliar (<https://www.kompas.com/edu/read/2020/05/15/143254571/Covid-19-ini-sederet-perubahan-kebijakan-pendidikan-di-indonesia?page=all>, akses 27 Juli 2020).

Perubahan sosial menuntut adanya penyesuaian antara sistem nilai dan sistem norma yang baru dengan sistem nilai dan sistem norma yang lama. Tidak setiap langkah penyesuaian berhasil secara sempurna. Ada tipe masyarakat yang sanggup secara cepat menerima perubahan dengan menerima sepenuhnya sistem nilai dan sistem norma yang baru. Sebaliknya, tidak sedikit masyarakat yang tetap bersiteguh memegang sistem nilai dan sistem norma yang telah lama dianut. Perbedaan-perbedaan tersebut dapat menimbulkan kesenjangan budaya atau sering disebut dengan istilah *cultural lag*. Kondisi seperti ini dapat diperhatikan pada tata kehidupan masyarakat kota yang serba cepat dalam menerima perubahan, sehingga memposisikan dirinya sebagai masyarakat yang modern. Sementara masyarakat pedesaan yang pada umumnya merupakan masyarakat pertanian masih cukup kuat dalam memegang adat istiadat dan tradisi-tradisi yang diwarisi secara turun temurun sehingga relatif lamban dalam menerima perubahan zaman (Widiyanto, 2009: 12).

Transformasi pendidikan yang terjadisaat ini pun bukanlah tanpa masalah yang menyertainya. Akses pendidikan yang saat ini seluruhnya melalui *online* belum sepenuhnya dapat dijangkau oleh masyarakat. Masyarakat yang tinggal di daerah dengan koneksi internet yang belum memadai dan juga masyarakat berpenghasilan menengah ke bawah mengalami kesulitan untuk dapat melaksanakan pembelajaran secara virtual ini. Hal tersebut layaknya teori fungsionalisme yang dikemukakan oleh Emile Durkheim dengan asumsinya bahwa perubahan dapat mengacaukan sistem sosial yang mapan. Teori fungsionalis sebagai teori perubahan sosial melihat proses perubahan sosial sebagai hal yang wajar, namun berdampak pada perubahan sistem sosial. Secara ekstrem, perubahan sosial dapat membuat sistem sosial mengalami disfungsi, akhirnya terjadilah kesenjangan budaya/*cultural lag* (<http://sosiologis.com/teori-perubahan-sosial>, akses 27 Juli 2020). Dengan adanya perubahan cara pembelajaran dari tatap muka kepada tatap layar, masyarakat yang belum memadai dalam mengakses internet terutama masyarakat berpenghasilan menengah ke bawah akan mengalami kesenjangan budaya. Belum seragamnya

proses pembelajaran baik itu terkait standar kualitas capaian pembelajaran yang diinginkan hingga saat ini pun menjadi problematika besar dalam dunia pendidikan. Belum lagi perubahan sistem pembelajaran secara *online* yang terjadi secara dadakan pun menimbulkan tekanan fisik dan mental bagi siswa, guru, bahkan orang tua sekalipun (<https://www.medcom.id/pendidikan/inspirasi-pendidikan/JKRGW15N-metamorfosis-dunia-pendidikan-di-masa-pandemi-Covid-19>, akses 27 Juli 2020).

Tatanan New Normal

Sejak munculnya Covid-19 pada akhir 2019 silam masyarakat seakan-akan tidak dapat hidup tenang karena selalu dihantui oleh bayang-bayang ancaman Covid-19, virus ini pun benar-benar berdampak pada berbagai segi kehidupan masyarakat. Sejumlah ahli memprediksi pandemi Covid-19 dapat berlangsung lama, namun hingga saat ini vaksin atau obat untuk virus tersebut belum ditemukan padahal kehidupan masyarakat harus tetap berjalan dan tidak selamanya masyarakat dapat hidup dalam masa karantina, sehingga muncullah istilah yang disebut sebagai *New Normal*. *New Normal* adalah cara hidup manusia yang berubah dari sesuatu yang sebelumnya tidak lumrah dilakukan kini menjadi sebuah kewajaran dan bahkan kewajiban, dimana dalam kondisi pandemi ini masyarakat pada akhirnya harus hidup berdampingan dengan ancaman Covid-19.

Berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor. 440-830 (2020) tentang “Pedoman Normal Baru Produktif dan Aman *Coronavirus Disease* 2019 Bagi Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah”, pemerintah Indonesia melakukan upaya untuk mengembalikan aktivitas kehidupan masyarakat dan penyelenggaraan pemerintahan pada kondisi sebelum terjadinya Covid-19 dengan mengeluarkan kebijakan yang disebut sebagai “Masyarakat Produktif dan Aman Covid-19” sebagai *New Normal* yang dilakukan Indonesia. PSBB yang diterapkan Indonesia sebagai masa karantina masyarakat memang dapat menekan laju infeksi Covid-19, namun disisi lain juga menyebabkan berbagai kehidupan ikut terdampak. Terdapat ketentuan di Indonesia untuk membuka PSBB tersebut, diantaranya:

1. Penularan Covid-19 di wilayahnya telah bisa dikendalikan.
2. Kapasitas sistem kesehatan yang ada, mulai dari rumah sakit sampai peralatan medis sudah mampu melakukan identifikasi, isolasi, pengujian, pelacakan kontak hingga melakukan karantina orang yang terinfeksi.
3. Mampu menekan resiko wabah virus Corona pada wilayah atau tempat

dengan kerentanan yang tinggi.

4. Penerapan protokol pencegahan Covid-19 di tempat kerja melalui penerapan jaga jarak fisik (*physical distancing*), fasilitas cuci tangan, dan etika pernapasan (dengan masker).
5. Mampu mengendalikan risiko kasus dari pembawa virus yang masuk ke suatu wilayah.
6. Memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk memberikan masukan, berpendapat, dan dilibatkan dalam proses masa transisi menuju Masyarakat Produktif dan Aman Covid-19.

Kebijakan yang disebut sebagai *New Normal* ini lagi-lagi membuat kehidupan masyarakat mengalami perubahan sosial. Misalnya saja perubahan yang terjadi dalam bidang pendidikan dimana sistem pembelajaran yang semula dilakukan secara daring kini secara bertahap mulai kembali menuju pembelajaran secara *offline*, namun dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan. Sejalan dengan sistem *new normal* ini, saat seluruh kegiatan sudah kembali dilaksanakan layaknya dalam keadaan normal akan timbulnya manusia-manusia baru, dimana dalam hal ini ialah manusia yang lebih kreatif dan inovatif dalam memanfaatkan teknologi yang berkembang saat ini, baik itu di kalangan orang tua, pendidik, peserta didik, maupun civitas akademik yang lainnya. Dikatakan demikian pasalnya selama proses karantina yang terjadi demi menekan jumlah penyebaran virus yang semakin meluas ini *stakeholder* pendidikan dipaksa untuk mampu beradaptasi dengan perkembangan teknologi yang ada. Bahkan mereka harus dapat mengembangkan kreatifitasnya dalam memaksimalkan teknologi untuk kegiatan pendidikan yang dimana sebelum adanya pandemi ini sama sekali tidak terlintas difikiran mereka, namun kreatifitas tersebut muncul karena sebuah keterpaksaan keadaan demi berjalannya kegiatan pendidikan sebagaimana mestinya. Seluruh segmen baik itu perorangan maupun kelompok seperti instansi sekolah terus-menerus meng-*upgrade* diri agar dapat beradaptasi dengan realitas yang ada sehingga kegiatan pendidikan tidak mengalami hambatan yang tidak diinginkan. Maka ketika kegiatan pendidikan lambat laun sudah menuju ke arah normal layaknya sedia kala, para *stakeholder* pendidikan ini pastinya akan menjadi sosok yang jauh lebih kreatif dalam pemanfaatan teknologi dan juga memiliki pemikiran yang lebih terbuka, serta lebih panjang dengan memperhatikan segala resiko dan kemungkinan yang dapat terjadi dibandingkan sebelum masa pandemi ini.

Penutup

Munculnya wabah dalam suatu wilayah nyatanya dapat menyebabkan terjadinya perubahan sosial dalam masyarakat. Dalam kasus *Coronavirus diseases 2019 (Covid-19)* ini kita dapat mengetahui adanya perubahan sosial yang terjadi secara cepat, berpengaruh besar, meskipun tidak dikehendaki. Misalnya saja bagaimana proses belajar mengajar, rapat, diskusi, seminar, konferensi, kajian dan hal lainnya yang dapat dilakukan secara tatap muka atau langsung kini menjadi tidak dapat dilakukan sebagaimana mestinya. Sehingga hal ini mendorong masyarakat untuk dapat mencari alternatif lain agar mereka tetap dalam kondisi yang aman dari ancaman terjangkitnya Covid-19, namun seluruh kegiatan yang biasanya dilakukan tetap dapat terlaksana. Oleh karena itu, alternatif yang paling memungkinkan digunakan demi berlangsungnya berbagai seluruh kegiatan tersebut adalah dengan memaksimalkan pemanfaatan teknologi. Pemaksimalan pemanfaatan teknologi yang dimaksud ialah mengadaptasi berbagai kegiatan yang dimiliki dengan kemampuan teknologi yang sudah tersedia saat ini. Seperti mengadaptasi proses belajar mengajar secara langsung menjadi virtual atau *online*, melaksanakan diskusi atau rapat melalui aplikasi *online* yang telah disediakan oleh berbagai *platform*. Dari sini kita dapat melihat bahwa kegiatan-kegiatan yang biasa dilakukan secara tatap muka dialihkan melalui media *online*. Meski kita sudah mengenal teknologi berbasis *online* ini sejak lama, namun sebelum kemunculan wabah yang kita sebut dengan nama Covid-19 ini tidak seluruh kegiatan kita lakukan dari rumah dan secara *online*, kini semua menjadi benar-benar kita lakukan secara *online* meskipun pada dasarnya kita dapat melakukan kegiatan-kegiatan tersebut secara langsung. Inilah perubahan sosial dalam komunikasi publik di bidang pendidikan yang diakibatkan oleh terjadinya wabah dalam suatu wilayah dimana dalam hal ini kita melihat kondisi wilayah Indonesia.

Perubahan sosial tersebut ternyata tidak hanya berhenti dengan mengalihkan kegiatan secara langsung menjadi *online* saja, namun terus-menerus menyesuaikan kemampuan dan kondisi yang ada agar semua dapat berjalan secara maksimal. Pengalihan kegiatan dari rumah saja ini memang dapat menekan laju penyebaran Covid-19, namun pelaksanaan kegiatan belajar dari rumah secara virtual ini juga terdapat berbagai hambatan. Masyarakat yang tinggal di daerah dengan koneksi internet yang belum memadai dan juga masyarakat berpenghasilan menengah ke bawah mengalami kesulitan untuk dapat melaksanakan pembelajaran secara virtual ini. Belum seragamnya proses pembelajaran, baik itu terkait standar kualitas capaian pembelajaran yang diinginkan hingga saat ini pun menjadi problematika besar dalam dunia

pendidikan. Belum lagi perubahan sistem pembelajaran secara *online* yang terjadi secara dadakan pun menimbulkan tekanan fisik dan mental bagi siswa, guru, bahkan orang tua sekalipun.

Dari hasil penelitian dan uraian di atas maka peneliti memberikan rekomendasi yang mungkin dapat dijadikan bahan pertimbangan lanjutan untuk ke depannya dengan mengadakan penelitian lebih lanjut dan mendalam mengenai solusi yang dapat dilakukan terkait hambatan yang dialami dalam bidang pendidikan di masa pandemi Covid-19 ini. Sehingga dapat ditemukan berbagai langkah yang dapat dilaksanakan untuk menghadapi berbagai macam problematika yang dihadapi saat ini dalam bidang pendidikan. Peneliti berharap dengan adanya tulisan ini dapat menjadi referensi dalam mengambil kebijakan pendidikan di masa pandemi ini.

Daftar Pustaka

Buku:

- Aman, dkk. (2009). *Sosiologi: Untuk SMA/MA Kelas XII Program Ilmu Sosial*. Jakarta: Pusat Perbukuan, Departemen Pendidikan Nasional.
- Butar-Butar, Arwin Juli Rakhmadi Butar-Butar. (2020). *Kepustakaan Medis-Pandemik di Dunia Islam: Deskripsi dan Anotasi Singkat Manuskrip-Manuskrip Wabah, Pandemi, dan Penyakit Menular*. Medan: OIF UMSU.
- Elisanti, dan Tintin Rostini. (2009). *Sosiologi: Untuk SMA dan MA Kelas XII IPS*. Jakarta: Pusat Perbukuan, Departemen Pendidikan Nasional.
- Laning, Vina Dwi. (2009). *Sosiologi: Untuk Kelas XII SMA/MA*. Jakarta: Pusat Perbukuan, Departemen Pendidikan Nasional.
- Muin, Idianto. (2009). *Sosiologi: SMA/MA Untuk Kelas XII*. Jakarta: Penerbit Erlangga.
- Ruswanto. (2009). *Sosiologi: Untuk SMA/MA Kelas XII Program Studi Ilmu Sosial*. Jakarta: Pusat Perbukuan Departemen Pendidikan Nasional.
- Suhardi, dan Sri Sunarti. (2009). *Sosiologi: 3 Untuk SMA/MA Kelas XII Program IPS*. Jakarta: Pusat Perbukuan, Departemen Pendidikan Nasional.
- Waluya, Bagja. (2009). *Sosiologi: Menyelami Fenomena Sosial di Masyarakat untuk Kelas XII Sekiolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah Program Ilmu Pengetahuan Sosial*. Jakarta: Pusat Perbukuan, Departemen Pendidikan Nasional.
- Widianto, Wida. (2009). *Sosiologi 3: Untuk SMA dan MA Kelas XII IPS*. Jakarta: Pusat Perbukuan, Departemen Pendidikan Nasional.
- Wrahatnala, Bondet. (2009). *Sosiologi Jilid 3 untuk SMA dan MA Kelas XII*. Jakarta: Pusat Perbukuan, Departemen Pendidikan Nasional.

Jurnal:

Afandi, Muhammad, dkk. (2013). *Model dan Metode Pembelajaran di Sekolah*. UNISSULA.

Artikel Surat Kabar:

BBC News Indonesia: Virus Corona: Mengapa Proses Penamaan Virus Menyita Waktu Begitu Lama?. (2020). Tersedia dari: <https://www.bbc.com/indonesia/dunia-51396818>.

Jawa Pos Grup Multimedia: Pandemi Covid-19 Memeberikan Perubahan Besar Dalam Dunia Pendidikan. (2020). Tersedia dari: <https://www.jawapos.com/nasional/pendidikan/>

Kasih, A. P. (2020). *Covid-19, Ini Sederet Perubahan Kebijakan Indonesia*. Diperoleh dari (<https://www.kompas.com/edu/read/>)

Sebayang, R. (2020). *WHO Nyatakan Wabah Covid-19 jadi Pandemi, Apa Maksudnya?* Diperoleh dari (<https://www.cnbcindonesia.com/news/>)

Diskusi:

Arifin, Ahmad Zainal. (2020, April). *Diskusi Online Dampak Covid-19 Terhadap Pekerja di Sektor Informal*.

Website:

Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19. [SALAH] WHO Sebut Penularan Corona Tak Lagi Hanya Lewat Droplet Tapi Juga Udara. (2020). Tersedia dari: <https://COVID19.go.id/p>

Sosiologis.com: Teori Perubahan Sosial. (2019). Tersedia dari: <http://sosiologis.com/teori-perubahan-sosial>

Sumantri, A. (2020). *Metamorfosis Dunia Pendidikan di Masa Pandemi Covid-19*. Diperoleh dari (<https://www.medcom.id/pendidikan/inspirasi-pendidikan/>)

World Health Organization: Coronavirus. (2020). Tersedia dari: https://www.who.int/health-topics/Coronavirus#tab=tab_3.

Dokumen Resmi:

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. (2020). *Pedoman Pelaksanaan Belajar Dari Rumah Selam Darurat Bencana Covid-19 Di Indonesia*, Surat Edaran Sekretaris Jenderal No.15 Tahun 2020. Jakarta.

Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia. (2020). *Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor. 440 – 830 Tahun 2020 tentang Pedoman Normal Baru Produktif dan Aman Corona Virus Disease 2019 Bagi Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan*

Pemerintah Daerah.

Pemerintah Republik Indonesia. (2020). *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).*

**Perlunya *Social Media Distancing*
dalam Menghadapi Covid-19**

Regina Cahyanti

*Prodi Sosiologi,
Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora,
UIN Sunan Kalijaga
Email: regina.cahyanti@gmail.com*

Media sosial merupakan suatu hal yang sangat penting dan dibutuhkan oleh masyarakat pada era modern ini. Bahkan media sosial sekarang ini sudah banyak digunakan oleh berbagai lapisan masyarakat, yakni dari anak-anak sampai orang tua dapat mengaksesnya dengan cepat dan mudah (Razali etl, 2019: 61-79). Menurut Nasrullah (2015) media sosial adalah medium di internet yang memungkinkan pengguna merepresentasikan dirinya maupun berinteraksi, bekerja sama, berbagi, berkomunikasi dengan pengguna lain membentuk ikatan sosial secara virtual. Dalam media sosial, tiga bentuk yang merujuk pada makna bersosial adalah pengenalan (*cognition*), komunikasi (*communicate*) dan kerjasama (*cooperation*), (Ahmad Setiadi, 2016: 1-7). Berbagai dampak positif dari penggunaan media sosial sangat banyak, antara lain yakni seperti menyampaikan pesan dari individu kepada individu bahkan dari individu kepada kelompok secara cepat dan mudah, dapat menghubungkan yang jauh menjadi lebih dekat dengan melakukan *video call* dan sebagainya, serta dapat menambah banyak teman dan berbagai relasi karena cakupannya yang sangat luas. Akan tetapi, selain dari dampak positif yang diberikan tentunya juga banyak dampak negatif dari penggunaan media sosial tersebut.

Salah satu dampak negatif dari penggunaan media sosial sendiri yakni seperti mudahnya penyebaran berita-berita bohong atau yang sering kita kenal dengan *hoax*. Kata *hoax* berasal dari Bahasa Inggris artinya tipuan, menipu, berita bohong, berita palsu atau kabar burung. Jadi dapat dikatakan bahwa *hoax* adalah kata yang berarti ketidakbenaran suatu informasi. *Hoax* bukan singkatan tetapi satu kata dalam Bahasa Inggris yang punya arti sendiri. Sedangkan definisi *hoax* menurut wikipedia adalah: “sebuah pemberitaan palsu adalah usaha untuk menipu atau mengakali pembaca/pendengarnya untuk mempercayai sesuatu, padahal sang pencipta berita palsu tersebut tahu bahwa berita tersebut palsu” (Sutantohadi, 2018: 1-5). Tentunya pada era ini masyarakat memiliki kebebasan dalam menyampaikan pendapat dan opininya dengan cepat dan mudah, baik secara lisan maupun tulisan dengan memanfaatkan media sosial. Namun, perlu diingat bahwa dalam menyampaikan pendapat, ide atau opini pun memiliki batasan-batasan dan etika yang baik.

Tersebarinya berita-berita bohong atau *hoax* tersebut sering kali kita jumpai dalam postingan-postingan *online* yang kemudian memancing munculnya ujaran-ujaran kebencian dari masyarakat/publik. Terdapat berbagai macam ujaran-ujaran kebencian dan provokasi. Pada umumnya, ujaran kebencian berisikan hal-hal yang berkaitan dengan aspek ras, warna kulit, etnis, gender,

cacat, orientasi seksual, kewarganegaraan atau agama. Ujaran kebencian merupakan ujaran atau ekspresi verbal dan non verbal yang digunakan untuk merendahkan, menindas atau mempromosikan kekerasan terhadap seseorang atas dasar keanggotaan mereka dalam kelompok sosial atau etnis. Kebencian melibatkan lebih dari sekedar menunjukkan bahwa anda tidak menyukai seseorang (Sutantohadi, 2018: 1-5). Ujaran kebencian tersebut biasanya sengaja di pancing oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan semata. Karena dengan mudahnya masyarakat/publik yang terprovokasi maka berita tersebut akan mudah tersebar dan viral, tanpa tau terlebih dahulu kebenaran dari berita ataupun kabar tersebut.

Pembatasan terhadap media sosial kemudian menjadi suatu hal yang penting dan diperlukan untuk menghindari hal-hal negatif seperti yang telah dijelaskan sebelumnya. Pembatasan dalam bermedia sosial tersebut, yakni seperti pembatasan akses ataupun menyaring berita-berita yang ada pada media sosial yang kita gunakan. Pembatasan-pembatasan tersebut, dimaksudkan supaya kita tidak terlalu jauh dalam menggali informasi yang belum tentu benar pemberitaannya, memilih dan memilah informasi yang penting dan menghindari penyebaran berita hoax serta provokasi secara massal. Pemerintah sendiri sudah pernah melakukan pembatasan-pembatasan dalam bermedia sosial ketika menghadapi situasi-situasi yang tidak kondusif untuk memutus adanya provokasi massal yang disebarkan secara online. Salah satu kebijakan pemerintah melakukan pembatasan dalam bermedia sosial tersebut pernah dilakukan pada saat terjadi kerusuhan di sejumlah titik di Jakarta, yakni pada “Selasa (21/5) dan Rabu (22/5), Pemerintah Indonesia mengambil kebijakan pemblokiran secara parsial dan temporer akses terhadap layanan sejumlah media sosial. Ada yang setuju dan ada juga yang tidak setuju dengan langkah pemerintah tersebut” (Djoko Subinarto, 2019). Dalam hal tersebut, pemerintah melakukan kebijakan melakukan pembatasan bermedia sosial dengan tujuan untuk menanggulangi supaya masalah yang ada supaya tidak menjadi lebih besar lagi, tindakan yang dilakukan pun sudah dipikirkan bersama-sama untuk menjaga kepentingan bersama.

Selain itu, pembatasan dalam bermedia sosial sangat dibutuhkan pada saat ini. Melihat banyaknya informasi dan juga kabar berita yang bermunculan di tengah pandemi Covid-19 ini menyebabkan kekhawatiran dan ketakutan di kalangan masyarakat. Bahkan banyak berita-berita yang tersebar di media sosial adalah berita yang tidak benar atau *hoax*. Dengan banyaknya berita *hoax* yang tersebar, ditakutkan dapat menimbulkan dampak yang tidak baik bagi

masyarakat. Selain itu, berita-berita bohong tersebut juga dapat mempengaruhi spekulasi masyarakat, sehingga mereka merasa khawatir keterlaluan (parno) dan ketakutan dalam menghadapi wabah tersebut. Maka dari itu pembatasan dalam bermedia sosial ini sangat diperlukan. Pembatasan tersebut bisa kita lakukan secara mandiri, yakni dengan lebih selektif dalam memilah-milah lagi berita-berita yang ada, memastikan kebenaran berita dengan melihat kembali sumber berita tersebut berasal, dan menyaring berita dengan tidak mudah menerima berita yang ada, dan mempercayakan informasi serta arahan dari kebijakan yang pemerintah berikan.

Indonesia merupakan negara ke empat terbesar sebagai pengguna media sosial. Pengguna media sosial di Indonesia tercatat menduduki peringkat keempat terbesar di dunia setelah India, Amerika Serikat dan Brazil. Portal diskon CupoNation dalam laporan risetnya menyebutkan, India merupakan pengguna media sosial terbesar di dunia dengan total pengguna mencapai 290 juta atau 19.01 persen dari total populasi, disusul Amerika Serikat sebanyak 190 juta pengguna atau 57.76 persen dari total populasi. Kemudian, Brazil di peringkat ketiga dengan total pengguna 120 juta atau 57.06 dari total populasi dan Indonesia dengan total pengguna 120 juta atau 44.94 dari total populasi. Pengguna *Facebook* dan *Instagram* di Indonesia terbesar ke-4 di dunia mengalahkan Meksiko, Filipina, Rusia, Turki dan Jepang. Mengutip dari Katadata, jumlah pengguna aktif sosial media di Indonesia mengalami peningkatan sebanyak 20% di tahun 2019 yakni mencapai 150 juta pengguna. Jumlah ini membawa Indonesia sebagai salah satu negara dengan pengguna *Facebook* terbanyak di dunia, yang mengalahkan Meksiko, Filipina, Vietnam, dan Thailand (Choirul, 2019).

Selain menjadi salah satu negara dengan dengan pengguna Facebook terbanyak di dunia, studi ini juga menunjukkan bahwa Indonesia merupakan negara ke-4 dengan pengguna Instagram terbesar mengalahkan Rusia, Turki, Jepang dan Inggris dengan jumlah total penggunanya dalah 56 juta atau 20.97 persen dari total populasi. Sudah dapat dipastikan, *Facebook* dan *Instagram* merupakan sosial media yang paling banyak diminati di Indonesia. Selain itu, adapun media sosial perpesanan yang sangat populer di Indonesia adalah aplikasi *Whatsapp*. Berdasarkan studi, *Whatsapp* merupakan aplikasi terpopuler di Indonesia diiringi *Line* dan *Facebook Messenger*. Di Indonesia, *Whatsapp* memiliki tingkat penetrasi 83%, yang kemudian disusul *Line* dengan tingkat penetrasi 59%, *Facebook Messenger* dengan tingkat penetrasi 47%, *BBM* 38% dan *We Chat* dengan tingkat penetrasi 28% (Choirul, 2019). Dengan banyaknya jumlah pengguna media sosial dan akses yang digunakan tersebut,

tidak heran jika kecepatan penyampaian informasi atau berita yang masih hangat dapat diterima oleh seluruh masyarakat di penjuru daerah dengan hitungan detik. Dengan banyaknya informasi yang sangat mudah didapat dan disebarakan tersebut maka tidak ayal pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab kemudian tergiur untuk menyebarkan berbagai macam berita bohong/*hoax* kepada masyarakat luas untuk mengambil keuntungan pribadi mereka.

Istilah yang semakna dengan *hoax* dalam jurnalistik adalah *libel*, yaitu berita bohong, tidak benar, sehingga menjurus pada kasus pencemaran nama baik. *Hoax* adalah suatu kata yang digunakan untuk menunjukkan pemberitaan palsu atau usaha untuk menipu atau mengakali pembaca untuk mempercayai sesuatu. Pemberitaan yang tidak berdasarkan kenyataan atau kebenaran (non-faktual) untuk maksud tertentu. Tujuan *hoax* adalah sekadar lelucon, iseng, hingga membentuk opini publik. Intinya *hoax* itu sesat dan menyesatkan, apalagi jika pengguna internet tidak kritis dan langsung membagikan berita yang dibaca kepada pengguna internet lainnya (Juditha, 2018: 33).

Mengutip dari Pratama (2017), kini informasi atau berita yang dianggap benar tidak lagi mudah ditemukan. survei Mastel (2017) mengungkapkan bahwa dari 1.146 responden, 44,3% diantaranya menerima berita *hoax* setiap hari dan 17,2% menerima lebih dari satu kali dalam sehari. Bahkan media arus utama yang diandalkan sebagai media yang dapat dipercaya terkadang ikut terkontaminasi penyebaran *hoax*. Media arus utama juga menjadi saluran penyebaran informasi/berita *hoax*, masing-masing sebesar 1,20% (radio), 5% (media cetak) dan 8,70% (televisi). Tidak saja oleh media arus utama, kini *hoax* sangat banyak beredar di masyarakat melalui media *online*. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Mastel (2017) menyebutkan bahwa saluran yang banyak digunakan dalam penyebaran *hoax* adalah situs web, sebesar 34,90%, aplikasi *chatting* (*Whatsapp*, *Line*, *Telegram*) sebesar 62,80%, dan melalui media sosial (*Facebook*, *Twitter*, *Instagram* dan *Path*) yang merupakan media terbanyak digunakan yaitu mencapai 92,40%. Sementara itu, data yang dipaparkan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika menyebut ada sebanyak 800 ribu situs di Indonesia yang terindikasi sebagai penyebar *hoax* dan ujaran kebencian (Juditha, 2018: 31-32). Apalagi disaat situasi pandemi seperti saat ini, dimana semua masyarakat, lembaga dan institusi yang menerapkan *physical distancing* tentu saja sangat bergantung dengan media sosial untuk selalu update informasi maupun interaksi antara satu-sama lain. Maka dari itu, masa pandemi ini merupakan situasi yang sangat rentan terhadap penyebaran berita bohong/*hoax* di tengah lingkungan masyarakat.

Penelitian ini dilakukan menggunakan metode pendekatan kualitatif,

yang bertujuan untuk mencari, mengumpulkan, serta mengolah data serta hasil penelitian. Menurut Prof. Parsudi Suparlan, antropolog dari Universitas Indonesia (*Suparlan, 1997:99*), pendekatan kualitatif seringkali juga dinamakan sebagai pendekatan humanistik, karena di dalam pendekatan ini cara pandang, cara hidup, selera ataupun ungkapan emosi dan keyakinan dari warga masyarakat yang diteliti sesuai dengan masalah yang diteliti, juga termasuk data yang perlu dikumpulkan. Sedangkan John W. Creswell (*Creswell, 1994:1*) mendefinisikan pendekatan kualitatif sebagai sebuah proses penyelidikan untuk memahami masalah sosial atau masalah manusia berdasarkan pada penciptaan gambar holistik yang dibentuk dengan kata-kata, melaporkan pandangan informan secara terperinci, dan disusun dalam sebuah latar ilmiah (*Hamid Patilima, 2013: 2-3*). Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan Mastel (2017) menunjukkan bahwa sebagian besar jenis hoax yang diterima selain isu Sosial Politik dan Sara, 41.20% merupakan isu yang terkait kesehatan. Berdasarkan data tersebut, subjek penelitian dalam penelitian ini adalah kasus-kasus yang dimuat dalam bentuk informasi atau berita, gambar dan pamflet bermuatan hoax yang berhubungan dengan pandemi Covid-19 yang pada saat ini sedang melanda hampir seluruh negara di belahan dunia dan sedang ramai diperbincangkan oleh masyarakat luas baik secara *offline* maupun *online*, yang juga banyak dimuat di berbagai media massa. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini terdiri dari dua bagian, yakni data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dari wawancara dan observasi. Sedangkan data sekunder diperoleh dari pengumpulan data melalui jurnal, artikel, berita, dan media mainstream yang dapat menunjang data primer. Serta mengumpulkan data-data pendukung lain yang didapatkan melalui pengamatan informasi dan berita yang ada di media sosial yang terkait dengan masalah yang sedang diteliti. Kemudian data-data yang telah terkumpul dianalisis dengan menggunakan teknik *coding* data yang sesuai dengan kategori yang telah ditentukan. Hasil pengumpulan data kemudian dianalisis secara deskriptif dan kemudian dibandingkan dengan penelitian-penelitian yang sebelumnya pernah dilakukan, teori-teori, konsep, serta informasi yang berasal dari berbagai sumber.

Media Sosial dan Pengguna Media Sosial

Menurut Boyd dalam Nasrullah (2015) media sosial sebagai kumpulan perangkat lunak yang memungkinkan individu maupun komunitas untuk berkumpul, berbagi, berkomunikasi dan dalam kasus tertentu saling

berkolaborasi atau bermain. Media sosial memiliki kekuatan pada user-generated content (UGC) dimana konten dihasilkan oleh pengguna, bukan oleh editor sebagaimana di instansi media massa. Mengutip dari Puntoadi (2011), pada intinya dengan sosial media dapat dilakukan berbagai aktivitas dua arah dalam berbagai bentuk pertukaran, kolaborasi dan saling berkenalan dalam bentuk tulisan, visual maupun audiovisual. Sosial media diawali dari tiga hal, yaitu *Sharing*, *Collaborating* dan *Connecting* (Setiadi, 2016:1-7). Saat ini media sosial merupakan media komunikasi yang efektif, transparansi dan efisien serta memiliki peran penting sebagai agen perubahan dan pembaharuan. Penggunaan media sosial sebagai jembatan untuk membantu proses peralihan masyarakat yang tradisional ke masyarakat yang modern, khususnya untuk mentransfer informasi pembangunan yang dilaksanakan pemerintah kepada masyarakat. Sebaliknya masyarakat dapat menyampaikan informasi langsung kepada pemerintah tentang berbagai hal terkait dengan pelayanan yang diterima. Menurut Taprial dan Kanwar (2012) dalam Rahadi (2017), media sosial adalah alat ataupun media yang saat ini telah banyak digunakan oleh sebagian besar masyarakat, salah satunya yakni masyarakat Indonesia. Media sosial digunakan sebagai media yang dapat menghubungkan individu dengan individu, individu dengan kelompok, maupun kelompok dengan kelompok. Dengan media sosial ini maka mereka dapat saling terhubung satu sama lain dengan saling berbagi informasi-informasi, berita dan gambar/foto.

Lembaga *We Are Social* dalam Nasrullah (2015) mempublikasikan hasil risetnya bahwa pengguna internet dan media sosial di Indonesia cukup tinggi. Ada sekitar 15 persen penetrasi internet atau 38 juta lebih pengguna internet. Dari jumlah total penduduk, ada sekitar 62 juta orang yang terdaftar serta memiliki akun di media sosial *Facebook*. Dari riset tersebut juga menunjukkan bahwa rata-rata pengguna internet di Indonesia menghabiskan waktu hampir 3 jam untuk terkoneksi dan berselancar di media sosial melalui perangkat telepon genggam (Setiadi, 2016: 1-7). Media sosial saat ini merupakan suatu media yang sangat penting ketika kita sedang menghadapi situasi seperti pada masa pandemi Covid-19 ini. Pemanfaatan media sosial pada masa-masa seperti ini benar-benar dibuktikan dengan menerapkan beberapa sistem pendidikan, hubungan masyarakat dan pekerjaan melewati dunia virtual/daring. Hal tersebut tentunya menyebabkan masyarakat semakin memiliki ketergantungan terhadap media sosial.

Media sosial menjadi sarana untuk berbagi informasi bagi penggunanya. Saat ini tercatat 2.800 miliar pengguna aktif media sosial. Dari jumlah tersebut, dibagi menjadi beberapa kategori pengguna sesuai dengan jenis media sosial

yang digunakan (Saputra, 2017: 160-68). Sesuai dengan kategorinya, media sosial dibagi menjadi lima kategori, yakni:

1. Jaringan sosial, misalnya seperti *Facebook, LinkedIn*
2. Micro blogging, seperti *Twitter, Tumblr*
3. Photo sharing, seperti *Instagram, Flickr*
4. Video sharing, seperti *YouTube, Vimeo*
5. Instant messaging, seperti *WhatsApp, Line*

Mengutip dari Rahadi (2017). Kaplan dan Haenlein (2010) membagi berbagai jenis media sosial ke dalam 6 (enam) jenis, yaitu : (1) *Collaborative Projects*, yaitu suatu media sosial yang dapat membuat konten dan dalam pembuatannya dapat diakses khalayak secara global. Kategori yang termasuk dalam *Collaborative Projects* dalam media sosial, yaitu WIKI atau Wikipedia; (2) *Blogs and Microblogs*, yaitu aplikasi yang dapat membantu penggunanya untuk menulis secara runut dan rinci mengenai berita, opini, pengalaman, ataupun kegiatan sehari-hari, baik dalam bentuk teks, gambar, video, ataupun gabungan dari ketiganya; (3) *Content Communities*, yaitu sebuah aplikasi yang bertujuan untuk saling berbagi dengan seseorang baik secara langsung maupun tidak langsung, dimana dalam aplikasi ini user atau penggunanya dapat berbagi video ataupun foto; (4) *Social Networking Sites* atau Situs Jejaring Sosial, yaitu merupakan situs yang dapat membantu seseorang atau pengguna internet membuat sebuah profil dan menghubungkannya dengan pengguna lain. Situs jejaring sosial memungkinkan penggunanya mengunggah hal-hal yang sifatnya pribadi seperti foto, video, koleksi tulisan, dan saling berhubungan secara pribadi dengan pengguna lainnya melalui pesan pribadi yang hanya bisa diakses dan diatur pemilik akun tersebut; (5) *Virtual Game Worlds*, yaitu permainan multiplayer dimana ratusan pemain secara simultan dapat di dukung. Media sosial ini sangat mendukung dalam hal menarik perhatian konsumen untuk tahu lebih banyak dengan desain grafis yang mencolok dan permainan warna yang menarik, sehingga terasa lebih informatif dan interaktif; (6) *Virtual Social Worlds*, yaitu aplikasi yang mensimulasi kehidupan nyata dalam internet. Aplikasi ini memungkinkan pengguna berinteraksi dalam platform tiga dimensi menggunakan avatar yang mirip dengan kehidupan nyata.

Fungsi media sosial dapat diketahui melalui sebuah kerangka kerja *honeycomb*. Menurut Kietzmann, etl (2011) menggambarkan hubungan kerangka kerja *honeycomb* sebagai penyajian sebuah kerangka kerja yang mendefinisikan media sosial dengan menggunakan tujuh kotak bangunan fungsi yaitu *identity, conversations, sharing, presence, relationships, reputation dan groups* (Rahadi, 2017). Tujuh kotak tersebut yaitu : (1) *Identity*

menggambarkan pengaturan identitas para pengguna dalam sebuah media sosial menyangkut nama, usia, jenis kelamin, profesi, lokasi serta foto; (2) *Conversations* menggambarkan pengaturan para pengguna berkomunikasi dengan pengguna lainnya dalam media sosial; (3) *Sharing* menggambarkan pertukaran, pembagian, serta penerimaan konten berupa teks, gambar, atau video yang dilakukan oleh para pengguna; (4) *Presence* menggambarkan apakah para pengguna dapat mengakses pengguna lainnya; (5) *Relationship* menggambarkan para pengguna terhubung atau terkait dengan pengguna lainnya; (6) *Reputation* menggambarkan para pengguna dapat mengidentifikasi orang lain serta dirinya sendiri; (7) *Groups* menggambarkan para pengguna dapat membentuk komunitas dan subkomunitas yang memiliki latar belakang, minat atau demografi.

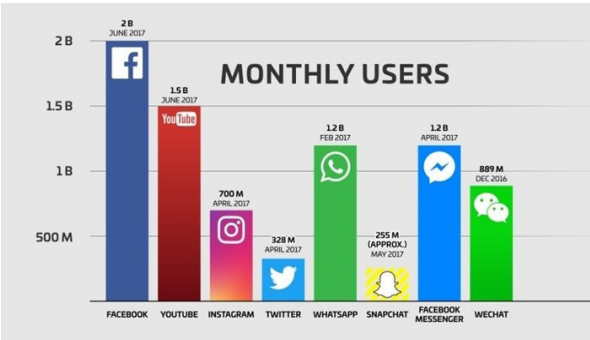
Media sosial yang sering dan banyak digunakan oleh masyarakat Indonesia atau lebih tepatnya yang sedang *trend* di kalangan masyarakat adalah media sosial seperti *Facebook*, *Twitter*, *Instagram* dan *TikTok*. Media-media sosial tersebut kini menjadi aktivitas yang seakan-akan tidak dapat dipisahkan dari gaya hidup sehari-hari. Provider 3 Indonesia mencatat 95 persen pelanggannya merupakan pengguna *smartphone* dengan gaya hidup digital yang tinggi dan secara aktif mengakses media sosial setiap harinya. Terlebih lagi, dari data tersebut tercatat bahwa pengguna provider 3 rata-rata menggunakan hingga 70 persen dari kuota yang mereka habiskan pada setiap harinya hanya untuk berselancar di aplikasi media sosial. Menyadari besarnya peranan media sosial tersebut, setelah di dalam media sosial apa saja yang paling banyak digunakan, maka dari hasil pengamatan tersebut muncul *Facebook* lah yang menjadi media sosial yang sering sekali diakses. Bahkan jumlah orang yang mengakses *Facebook* bisa dikatakan dua kali lipat dari pengguna/pengakses media sosial *Instagram* yang merupakan media sosial dalam urutan kedua terbesar yang diakses oleh masyarakat Indonesia. Selain itu, media sosial yang juga sering diakses pada akhir-akhir ini adalah *TikTok* yang merupakan media baru dan banyak diminati oleh masyarakat luas. Media sosial yang relatif baru tersebut berhasil mendapatkan jumlah pengguna yang besar dalam waktu singkat sehingga mampu membuntuti *Twitter* dengan selisih jumlah pengguna yang tipis (Meita Fajriana, 2020).

Di saat pandemi yang mengharuskan sebagian besar aktivitas dilakukan dari rumah karena adanya pembatasan sosial (*physical distancing*), menyebabkan tingginya konsumsi media sosial dalam masyarakat selama pandemi. Tercatat bahwa, berdasarkan penggunaan data, *Instagram* menjadi media sosial yang rata-rata konsumsi data per-harinya paling tinggi. Tingginya konsumsi data ini didorong oleh durasi penggunaan harian yang tinggi dan basis konten

Instagram yang berupa foto dan video. Di sisi lain, *Twitter* yang kontennya lebih banyak berbasis teks, memiliki rata-rata konsumsi data per hari yang paling irit dibandingkan *Facebook*, *TikTok* dan *Instagram*.

Menurut Desmond Cheung yang merupakan *Chief Technical Officer Hutchison 3 Indonesia* dalam *fimela.com*, media sosial telah merevolusi cara kita berkomunikasi. Melalui media sosial, keluarga, teman, hingga kerabat yang sudah lama tidak bertemu dan terpaut jarak yang jauh kini dapat tetap saling terhubung secara personal dengan cara yang mudah dan sederhana. Tentunya peranan media sosial pun menjadi semakin penting di masa pandemi dan ketika orang mulai melakukan adaptasi dengan *new normal*. Media sosial menjadi platform yang kita andalkan untuk mengetahui kabar teman-teman serta kerabat, juga untuk mendapatkan informasi mengenai kehidupan di sekitar kita (Meita Fajriana, 2020). Tentunya bagi sebagian masyarakat yang terdampak oleh pandemi tersebut, selain memanfaatkan media sosial sebagai alat berkomunikasi dan mencari informasi, yakni juga banyak yang menggunakannya sebagai sarana hiburan dengan mengeksplor berbagai situs yang menyenangkan dan menghibur. Hal tersebut tentu saja ditujukan untuk mengusir kejenuhan akibat dampak dari *Stay at Home*. Adapun data yang menunjukkan media sosial yang sering diakses oleh masyarakat Indonesia per-tahun 2016-2017.

Diagram 1. Beberapa Media Sosial yang paling sering Diakses:



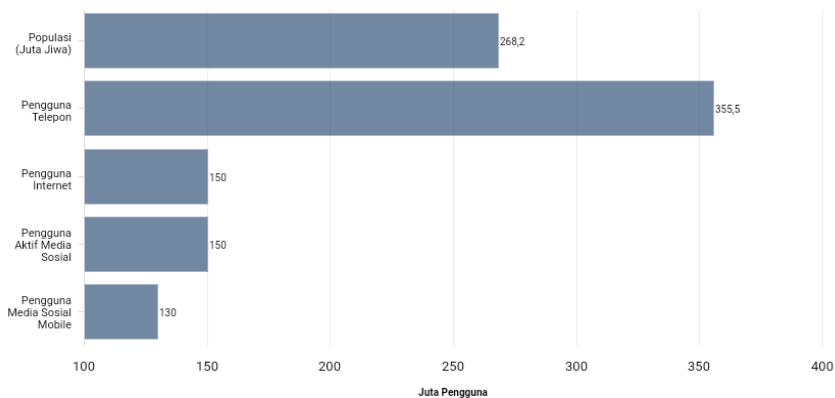
Sumber: <http://kaltim.tribunnews.com/2017/06/29/facebook-masih-jadi-medsos-terbesar- jumlah-pengguna-tembus-2-juta-termasuk-anda>

Dari data tersebut dapat disimpulkan bahwa *Facebook* menduduki peringkat pertama sebagai media sosial yang sering diakses oleh masyarakat Indonesia dengan jumlah pengakses sebesar 2 miliar per-bulannya. Kemudian pada peringkat kedua diduduki oleh *Youtube* yang memiliki jumlah pengakses sebesar 1.5 miliar pengguna per-bulan. Dan di urutan ketiga adalah media sosial *Whatsapp* dan *Facebook Mesenger* dengan jumlah 1.2 miliar pengakses.

Kemudian disusul dengan *Wechat* yang memiliki jumlah pengakses sekitar 889 juta pada Desember 2016. Kemudian selain itu, disusul oleh *Instagram* 700 juta, *Twitter* 328 juta, dan *Snapchat* sekitar 255 juta pengakses setiap bulannya.

Media sosial menjadi ruang ekspresi baru bagi masyarakat dunia dalam beberapa tahun terakhir ini. Data pengguna internet terbesar berada di wilayah DKI Jakarta yaitu sebanyak 3.538.000 jiwa sedangkan pengguna internet paling sedikit berada di wilayah Sorong dengan jumlah pengguna internet sebanyak 28.000 jiwa (Ditjen PPI Kemkoinfokom, 2013). Diposisi pertama hampir 95,75% pengguna memanfaatkan internet untuk surat elektronik, menggeser posisi akses layanan media sosial yang mencapai 61,23%. Pada peringkat selanjutnya pemanfaatan tertinggi internet adalah untuk mencari berita/informasi (78,49%), mencari barang/jasa (77,81%), informasi lembaga pemerintahan (65,07%), sosial media (61,23%) (BPJS, 2013). Beberapa contoh dapat disebutkan seperti kemenangan Barack Obama dalam kampanye politiknya yang melibatkan media-media sosial seperti *Twitter*, *Facebook*, *Youtube*, *blogspot* melalui internet telah menyedot perhatian masyarakat dan berhasil mengangkat citra positif Obama. Media sosial mampu menghadirkan suara-suara individu yang sebelumnya tidak pernah bisa didengar melalui pemberitaan media-media mainstream. Di Indonesia, kehadiran media sosial juga memberikan pengaruh terhadap perubahan politik, sosial, budaya dan ekonomi di Indonesia. Media sosial menggeser dan menembus batas dari pola relasi interaksi hirarkis menjadi egaliter, baik di ruang politik maupun budaya (Legionosuko, 2017: 111-36).

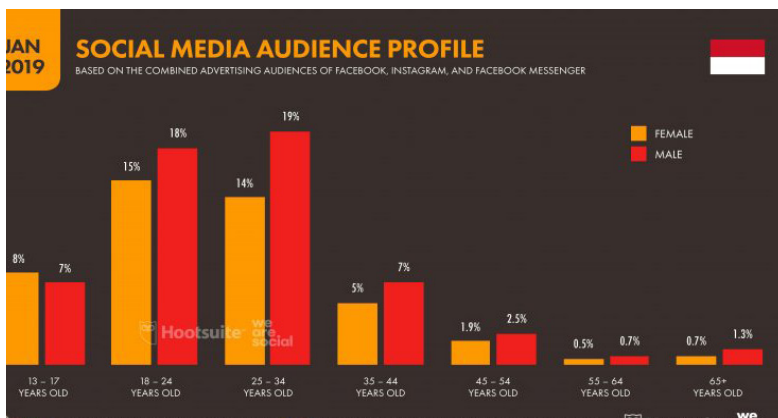
Berikut adalah, Tabel data pengguna telepon, internet, media sosial Indonesia menurut *Wearesosial* (2019)



Sumber: <https://databoks.katadata.co.id/>

Berdasarkan hasil riset *Wearesosial Hootsuite* yang dirilis pada bulan Januari 2019 tersebut menunjukkan bahwa pengguna media sosial di Indonesia mencapai 150 juta atau sebesar 56% dari total populasi. Jumlah tersebut naik 20% dari survei sebelumnya. Sementara pengguna media sosial *mobile* (*gadget*) mencapai 130 juta atau sekitar 48% dari populasi.

Adapun data pengguna media sosial yang diurutkan berdasarkan tingkat usia dari penggunanya ditunjukkan pada gambar/tabel berikut:

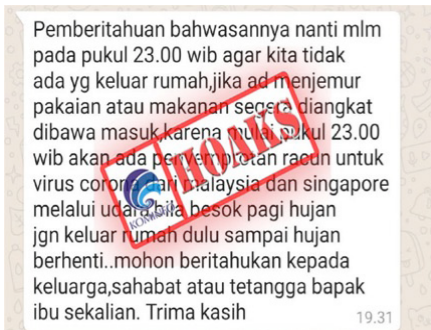


Sumber: <https://websindo.com/indonesia-digital-2019-media-sosial/>.

Dari data diatas, dapat dilihat bahwa grafik tersebut menunjukkan pengguna terbesar media sosial ditinjau dari sisi gender dan umur, sebagian besar di dominasi oleh pengguna dari rentang umur 18-34 tahun, baik pria maupun wanita. Jika dilihat dari data usia tersebut para pengguna media sosial yang terbanyak merupakan masyarakat dalam usia produktif. Pengguna media sosial sangatlah rentan dalam menyebar luaskan berita bohong/*hoax* di dalam media sosial yang sering mereka akses, baik sengaja ataupun tidak sengaja.

Jenis-jenis *hoax* yang sering diterima, muncul dan ramai diperbincangkan menurut survei Mastel tahun 2017, adalah kasus yang terkait dengan Sosial Politik, SARA, Kesehatan, Makanan & Minuman, Penipuan Keuangan, IPTEK, Berita duka, Candaan, Bencana alam, dan Lalu Lintas. Bentuk-bentuk ataupun contoh dari penyebaran berita yang tidak benar atau *hoax* dapat terjadi karena tidak telitinya kita dalam menyebarkan informasi tanpa mengecek kembali kebenarannya. Sering sekali kita mudah terkecoh dengan berita yang menggunakan judul berita dengan kata-kata yang ekstrim dan mengejutkan bagi setiap orang sehingga tanpa melihat terlebih dahulu kebenaran isinya, tanpa sadar kita membagikannya ke grup-grup media sosial

seperti *Whatsapp*, memposting di *timeline* dan lain sebagainya. *Hoax* sering sekali dibuat dan disebar dalam bentuk *broadcast* pesan berantai melalui media sosial dengan tambahan kata-kata yang ‘mengancam’ di akhir kalimat dalam pesan tersebut sehingga dapat menarik perhatian penerima untuk menyebarkannya. Hal tersebut tentu saja bukan merupakan hal baru, dan sudah sering sekali muncul di berbagai media sosial. Berikut adalah contoh dari *broadcasting* pesan berantai yang sempat beredar luas di media sosial selama masa pandemi Covid-19. Adapun bentuk-bentuk saluran *hoax* yang sering diterima oleh masyarakat termuat di dalam data pada bagan berikut:



Sumber: <https://kominfo.go.id/content/detail/252887/>



Sumber: <https://www.law-justice.co/amp/42755/>

Dari bagan diatas, dapat disimpulkan bahwa bentuk-bentuk *hoax* yang sering diterima dan tersebar di masyarakat tersebar dalam bentuk gambar dan tulisan. Hal tersebut tetntu saja dipengaruhi karena tulisan dan gambar/foto lebih mudah dan cepat untuk disebar ke masyarakat dibandingkan dengan video. Dapat dilihat juga diatas jumlah *hoax* dalam bentuk tulisan tercatat ada 62.10% banyaknya penyebaran *hoax* dalam bentuk tersebut dibandingkan dengan penyebaran dalam bentuk gambar yang terhitung sekitar 37.50% dan juga dalam bentuk video sebesar 0.40%. Dari jumlah tersebut dapat diketahui bahwa *hoax* sering sekali disebar dengan melalui bentuk-bentuk tulisan, baik artikel, blog, maupun surat kabar di media sosial. Kemudian, dapat dilihat pula penyebaran berita/informasi *hoax* tersebut banyak disebar melalui aplikasi chatting seperti WA, Line, dan Telegram. Selain itu *hoax* juga paling sering disebar melalui media sosial seperti *Facebook*, *Twitter*, *Instagram* dan *Path*.

Perlunya *Social Media Distancing*

Dengan banyaknya masyarakat yang mengakses media sosial ini, tentunya juga menarik perhatian pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab untuk

menyalah gunakan informasi-informasi yang ada dalam media sosial. penyalahgunaan tersebut sering kali dikenal dengan *hoax*. *Hoax* menurut Bungin (2017) meskipun memiliki ‘masa hidup’ dalam kognitif lebih pendek dari pada konstruksi sosial media massa, namun *hoax* memiliki daya rusak *sporadic* yang kuat dan luas di masyarakat. *Hoax* adalah salah satu persoalan serius dalam etika komunikasi karena dapat merusak citra lawan. Semua berita *hoax* tidak saja merugikan subjek *hoax* namun juga menyerang dan merusak tatanan etika di masyarakat, bahkan dapat menjadi mesin pembunuhan karakter seseorang (Juditha, 2018). Fenomena *hoax* di Indonesia ini dipandang menimbulkan beragam masalah. Kemunculannya semakin banyak pada saat Pemilihan Umum Presiden atau Pemilihan Kepala Daerah berlangsung. Ini dapat dilihat saat Pilkada DKI Jakarta 2017. Saat itu, *hoax* banyak beredar di masyarakat. Dewan Pers Indonesia menilai *hoax* telah memasuki tahap serius. Apalagi *hoax* memiliki rentang yang sangat lebar, mulai dari yang satir untuk menyindir sampai yang dipublikasikan melalui berbagai kanal informasi. Awalnya masyarakat mencari kebenaran atas informasi melalui media mainstream. Jemadu (2017) menyatakan bahwa saat ini *hoax* justru masuk ke dimensi lain di media sosial dan diadopsi begitu saja di media mainstream tanpa klarifikasi (Juditha, 2018). Sampai saat ini berita-berita *hoax* masih marak terjadi, bukan hanya menimbulkan masalah saja, akan tetapi juga dapat menimbulkan banyak kerugian yang ditanggung oleh pihak-pihak yang terkait dan juga masyarakat.

Mengingat bahaya yang ditimbulkan oleh *hoax* tersebut, sebaiknya kita dapat menghindarinya dengan menyaring kembali berita-berita yang kita terima, lebih teliti, dan juga selektif dalam menerima berita-berita dan informasi dari media sosial, maupun media-media lainnya. *hoax* tidak hanya tersebar di media sosial saja, bahkan *hoax* sudah ada sejak media sosial belum marak digunakan. Namun seiring dengan berkembangnya zaman, masyarakat menjadi modern dengan adanya perkembangan teknologi. Maka dari itu, berita-berita serta informasi menjadi sangat mudah dan cepat tersebar, demikian pula dengan *hoax*. akibat banyaknya pengguna media sosial media inilah yang kemudian menyebabkan *hoax* juga menjadi lebih mudah dan cepat untuk tersebar. Yang menakutkan dari *hoax* tersebut adalah karena terkadang masyarakat tidak sadar ikut serta menyebarkannya. Hal tersebut tentunya terjadi akibat kurang selektif dan telitinya masyarakat dalam memilah-milah berita ataupun informasi.

Selain itu, cara-cara untuk mengantisipasi tersebarnya *hoax* salah satunya adalah dengan melakukan *social media distancing*. *Social media distancing*

memiliki artian yang berarti menjaga jarak dan membatasi interaksi dengan informasi buruk di media sosial. Seperti yang telah dikatakan oleh Tedros Adhanom Ghebreyesus yang merupakan Direktur Jenderal Badan Kesehatan Dunia (WHO) ketika pada masa-masa pandemi ini, beliau menyampaikan “Kita tidak hanya memerangi sebuah epidemi, tetapi juga infodemi”. Infodemi yang dimaksud adalah informasi-informasi yang tersebar di media sosial. Berita ataupun info-info yang ada di dalam media sosial seolah telah mengaburkan akal sehat kita. Sekarang ini sangat sulit untuk dapat membedakan antara kabar berita serta informasi yang asli dengan kabar berita dan informasi-informasi yang telah dimodifikasi oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Mereka dapat mengubah dan memanipulasi informasi-informasi tersebut hingga seolah-olah informasi-informasi itu menjadi seperti informasi yang benar dan dapat dipercaya oleh masyarakat luas (Telkomsel, 2020). Untuk melakukan pembatasan terhadap media sosial ini bisa kita lakukan mulai dari diri sendiri. Yakni dengan membatasi diri kita ketika mengakses media massa, seperti menyaring berita yang beredar, tidak mudah percaya dan menyebarkan berita yang belum tentu kebenarannya kepada orang lain dan menghentikan kebiasaan dalam mengakses media massa secara berlebihan. Dengan cara-cara sederhana tersebut, diharapkan kita dapat mengantisipasi dan mencegah berbagai masalah yang disebabkan oleh berita hoax yang terjadi di media sosial.

Social media distancing ini mulai ramai diperbincangkan di tengah pandemi setelah Bima Arya yang merupakan Walikota Bogor yang sebelumnya didiagnosis positif terjangkit Covid-19 menyatakan dirinya merasa lebih baik setelah melakukan *Social Media Distancing* selama menjalani karantina mandiri. Mantan menteri BUMN Dahlan Iskan menyuarakan hal yang sama, “sudahlah, hentikan dulu bermedsos. Medsos telah memberi kita ‘pengetahuan’ yang tidak terbatas ini. Hingga sebenarnya kita tidak lagi perlu mendapat pengetahuan tambahan, khususnya terkait Corona. Bahkan, menurutnya (Dahlan Iskan) pengetahuan kita tentang Corona jauh melebihi para expert. Karena mereka yang expert hanya mengonsumsi berita yang bisa mereka logika, sedangkan kita mengonsumsi berita apapun yang ada di medsos (Adi Nugroho, 2020). Kemudian selain Walikota Bogor Bima Arya dan Mantan menteri BUMN Dahlan Iskan, Aktris Luna Maya pun juga menyatakan hal yang sama. Dilansir dari artikel Kompas.com, dituliskan bahwa Luna mengaku selama masa karantina atau *Social Distancing*, ia menyatakan bahwa mengurangi kegiatannya yang berhubungan dengan media sosial. Aktris tersebut mengungkapkan bahwa media sosial semakin ke

sini semakin berbahaya, ia menambahkan bahwa ketika kondisi dunia sedang tidak menentu karena wabah Virus Corona seperti saat ini, dia memerlukan *self healing* (Firda Janati, 2020).

Seperti yang dikatakan oleh Dokter Andri, Sp.Kj, FAPM (Dokter Psikiater) dalam wawancaranya di channel *Youtube Official iNews*, “selain *physical distancing* juga perlu diperhatikan bahwa banyak hal-hal yang dikaitkan dengan sosial media yang menjadi problem saat ini, karena terlalu banyaknya informasi yang berkaitan dengan informasi Covid-19. Hal tersebut dipengaruhi oleh kita yang ingin terus *update* dalam mendapatkan informasi terbaru setiap harinya, namun di lain pihak sebagian dari kita juga mengalami kecemasan seperti stress yang berkait atau berakibat kondisi-kondisi yang bisa menimbulkan gejala cemas, bahkan ada beberapanya juga bisa merasakan gejala yang hampir mirip dengan gejala Covid-19 ini, namun sebenarnya tidak. Hal tersebut tentu saja diakibatkan oleh gejala kecemasan yang berlebihan (bukan paranoid, lebih kepada kondisi kecemasan). Tapi gejala-gejala fisiknya itu bisa timbul juga seperti gejala psikosomatik yang bisa timbul akibat kecemasan yang disebabkan karena banyaknya gejala-gejala stress, jadi ini yang sering dikaitkan dengan masalah-masalah saat ini”. Dokter Andri juga menambahkan “Secara umum ketika awal mengalami reaksi stress itu tidak sampai berakibat pada sistem imunitas, akan tetapi jika prosesnya panjang, dan kita melihat ini kan sudah beberapa lama/beberapa minggu kita berada dalam kondisi yang seperti sekarang ini, dan mulai dari sekarang kelihatannya makin banyak yang bilang kalau pada bulan April pandemi Covid-19 ini akan mencapai puncaknya gitu. Ini yang menjadi kekhawatiran banyak orang dan sebagian dari mereka yang memiliki kekhawatiran itu akan menyebabkan stress terus yang berkepanjangan dan akhirnya akan menjadi gejala-gejala *exhausted* yang menyebabkan jadi mudah kelelahan fisiknya itu, dan akhirnya mengalami gejala-gejala stress *psikosomatik* yang ada di dalam fisik. Akan tetapi untuk pengaruhnya terhadap penurunan imunitas itu agak lama sebenarnya, karena perlu banyak proses di sistem saraf pusat itu. Jadi kalau begini terus-terusan dan kita tidak melakukan social media distancing, menjauhkan sumber stressnya tersebut maka bisa jadi kita mengalami itu, yakni imunitas yang menurun dan pada akhirnya kita bisa menjadi rentan terhadap Covid-19 ini” (Dokter Andri, Sp.Kj, FAPM,2020).

Kemudian pernyataan yang diajukan oleh psikolog Intan Erlita M.Psi, Psikolog, PBHC, CBHC, CHMP yang menyatakan, “kalau untuk *social media distancing* ini gitu ya, untuk sebagian orang yang merasa sosial media memberikan banyak informasi yang menyebabkan imunitas kita turun itu

bahayanya kan disini kan?, jadi kekuatannya ada di tangan kita gitu, karena kalau fisik bisa kita pertahankan untuk tetap di dalam rumah untuk tidak keluar rumah, tapi kalau media sosial itu kekuatannya dari mana?, dari jari jari kita gitu, jadi kita yang memilih. Bahkan kalo saya ngasih tipsnya adalah *whatsapp group* salah satunya itu yang paling bahaya juga, karena kita memiliki paling tidak 10 atau lebih kita mempunyai *whatsapp group*, kemudian dalam whatsapp grup itu kadang-kadang membroadcast hal yang hampir sama antar grup itu, itu tentu bahaya untuk diri kita. Jadi kalo saran saya, kita sendiri yang dapat memilah mana yang baik untuk dibaca, mana yang engga dan untuk sosial media yang lainnya kita memilah mana yang mau kita follow, dan mana yang mau kita *unfollow*, dan bahkan mana teman yang kita gaenak untuk meng-*unfollow*nya gitu kan untuk hubungan pertemanan tapi misalnya dia postingnya selalu berita-berita negatif kan menyayangkan untuk di *mute* karna hanya kitalah yang sekarang bisa untuk memandiri untuk *social media distancing* ini”(Intan Erlita M.Psi, Psikolog, PBHC, CBHC, CHMP,2020).

Pengakuan Walikota Bogor Bima Arya yang menyatakan kondisinya lebih baik setelah melakukan “*Social Media Distancing*” tersebut banyak tersebar di grup-grup Whatsapp pada Selasa (24/3/2020). Bima Arya menyebut pemberitaan masif terkait Virus Corona di media sosial bisa membuat seseorang drop, yang kemudian berujung penurunan status imunitas. “Virus ini menyerang hati dan jiwa sebelum pernapasan dan paru-paru. *Gua* merasa *baik* setelah ‘*social media distancing*’ hari kedua di RS. *Socmed* itu ICU Raksasa. Runtuh mental semua orang kalau digempur berita Covid-19. Drop imunitas”, kata Bima Arya seperti dalam pesan yang beredar. Pernyataan itu dibenarkan oleh Wakil Walikota Bogor Dedie A Rachim. Bima Arya mengumumkan sendiri bahwa dia terjangkit Covid-19. Saat itu Bima Arya menyebut kondisi fisiknya hanya mengalami batuk-batuk kecil. “Tidak ada gejala-gejala yang signifikan, hanya batuk-batuk kecil, tetapi saya memutuskan untuk mengikuti protokol dan prosedur menjalani isolasi diri dan percaya sepenuhnya dengan RSUD Kota Bogor untuk menangani ini” ungkap Bima Arya (Gibran Maulana Ibrahim, 2020).

Menghadapi Masa Pandemi Covid-19 dengan *Social Media Distancing*

Pandemi Covid-19 merupakan peristiwa yang sangat menggemparkan pada akhir-akhir ini. Bahkan peristiwa tersebut telah dimuat diberbagai media dan selalu menghiasi layar kaca pada setiap harinya. Peristiwa tersebut pertama kali muncul dan menyebar di Indonesia pada akhir Februari 2020. Penyebaran

pandemi ini bisa dikatakan sangat cepat sekali. Pada tanggal 27 Maret 2020 saja, kasus Covid-19 yang ada di Indonesia sudah mencapai angka 1.046 dengan persentase kematian yang cukup besar. Melihat hal tersebut, pemerintah telah memberikan berbagai upaya untuk mengatasi dan meminimalisir penyebaran pandemi ini. Upaya yang dilakukan oleh pemerintah diantaranya dengan menghimbau masyarakat untuk melakukan pembatasan sosial dan karantina mandiri di rumah masing-masing. Dengan adanya himbauan dari masyarakat, aktivitas-aktivitas sosial di masyarakat perlahan mulai berkurang. Bahkan kegiatan perkantoran, sekolah, perdagangan, dan kegiatan sosial yang sifatnya mengumpulkan banyak orang dialihkan dengan kegiatan yang dilakukan dari rumah atau yang sering dikenal dengan *Work From Home* (WFH).

Pandemi Covid-19 dinilai telah mengubah pola komunikasi yang ada di masyarakat. Efek dari pandemi ini juga mengubah semua kebiasaan masyarakat yang dilakukan sebelumnya. Pendapat tersebut disampaikan oleh Komisioner KPI Pusat Yulianre Darwis pada Jum'at (25/4/2020). Pandemi yang telah menyebar ke seluruh dunia ini menyebabkan banyak aktivitas terganggu mulai dari sekolah, bekerja, ekonomi dan bisnis. Hal ini juga menggeser kebiasaan banyak orang. Kini tidak ada lagi kumpul-kumpul, universitas memindahkan ruang kelas ke ruang-ruang virtual dan banyak perusahaan menerapkan kebijakan kerja dari rumah dalam beberapa pekan terakhir. Pandemi telah mengubah cara orang bekerja, bersosialisasi, termasuk dalam menggelar sebuah acara. Dalam situasi seperti ini, Andre yang juga pakar komunikasi, menilai kegiatan seminar melalui jaringan internet, konferensi video cenderung menghasilkan interaksi yang lebih tenang dan kreatif. Lebih lanjut, katanya, pandemic ini telah memperkenalkan cara hidup secara online (Komisi Penyiaran Indonesia, 2020). Namun, perlu diperhatikan bahwa dengan perubahan kebiasaan yang dialami oleh masyarakat kini tentunya juga menimbulkan beberapa hal yang perlu untuk diwaspadai, terlebih lagi untuk Indonesia sendiri menerapkan cara hidup online dirasa masih sangat kurang karena masih banyak masyarakat yang 'Gapteknik' dan bergantung pada aktivitas yang dilakukan secara manual. Pemanfaatan teknologi di masa pandemi ini tentunya lebih mudah dan menguntungkan bagi perusahaan/bidang-bidang yang alat komunikasi serta teknologinya sudah mendukung karena waktu yang digunakan bisa lebih efektif, namun bagi masyarakat biasa tentunya hal tersebut tidaklah sama.

Situasi tersebut dapat digolongkan pada Teori Karl Marx yakni teori konflik sosial. Teori ini bertujuan untuk menganalisis asal usulnya suatu kejadian terjadinya sebuah pelanggaran peraturan atau latar belakang seseorang yang

berperilaku menyimpang. Konflik disini menekankan sifat pluralistik dari masyarakat dan ketidak seimbangan distribusi kekuasaan yang terjadi di antara berbagai kelompok, karena kekuasaan yang dimiliki kelompok-kelompok elit maka kelompok-kelompok itu juga memiliki kekuasaan untuk menciptakan peraturan, khususnya hukum yang bisa melayani kepentingan-kepentingan mereka (Nurlayl, 2015: 38-58). Keterkaitan pandangan Marx tersebut dengan fenomena bahasan dalam arikel ini ditunjukkan dengan teori konflik sosial yang memandang antar elemen sosial memiliki kepentingan dan pandangan yang berbeda. Perbedaan kepentingan dan pandangan tersebut yang kemudian memicu terjadinya konflik sosial yang berujung saling mengalahkan, melenyapkan, memusnahkan diantara elemen lainnya. Masyarakat memiliki pandangan yang berbeda-beda, pun dalam menghadapi situasi seperti sekarang ini yakni masa pandemi Covid-19. Untuk kalangan elit, situasi yang demikian tidak terlalu mempengaruhi kehidupan mereka karena tanpa keluar rumah mereka masih bisa menyesuaikan pekerjaan mereka dengan teknologi yakni secara online karena mereka dapat memenuhi kebutuhan mereka tersebut. Sedangkan untuk kalangan masyarakat menengah ke bawah tentu merasa kelabakan karena banyak dari mereka yang kehilangan pekerjaan sehingga kebutuhan hidup pun sulit untuk dipenuhi apalagi memenuhi kebutuhan mereka untuk cara hidup secara *online*.

Situasi tersebut yang kemudian dapat dimanfaatkan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab untuk membuat banyak berita bohong atau *hoax*. Berita-berita bohong tersebut mereka tujukan tentunya untuk memecah belah antara masyarakat dan pemerintah. Dimana pemerintahan sedang merasa kualahan dalam menghadapi situasi yang rumit ini untuk tetap memberikan pelayanan publikk, namun sebaliknya masyarakat pun kemudian berspekulasi bahwa pemerintah dirasa tidak becus dalam mengatasi masalah yang dihadapi sekarang ini. Selain itu, pemberitaan terkait adanya pembukaan lahan bisnis dalam kasus Covid-19 baru-baru ini tentunya menimbulkan keresahan masyarakat.

Media massa memang sangatlah menyeramkan, karena hanya dengan ketukan jari di layar *smarthphone*, kita dapat mengakses berbagai hal. Semua komunikasi ini telah menyebabkan banyak informasi tentang pandemi, semua tersedia dengan satu sentuhan keyboard atau klik mouse. Namun, sementara banyak dari informasi ini faktual dan bermanfaat, beberapa diantaranya bisa salah atau bahkan berbahaya. Misalnya, pada *platform* media sosial populer *WeChat*, Covid-19 telah berulang kali disebut sebagai ‘virus pembunuh,’ mengabadikan rasa bahaya yang ditimbulkan oleh penyakit tersebut. Dan ada

tulisan dan Tweet yang menyamakan Covid-19 dengan yang umum bentuk influenza, meminimalkan konsekuensi serius dari virus ini dan mendorong orang untuk tidak mengikuti protokol jarak sosial. Apa yang kita lihat di media sosial dibentuk oleh *algoritme* yang biasanya menyorot konten yang akan paling menarik perhatian, belum tentu konten yang diverifikasi sebagai benar. Perhatian terhadap popularitas di atas keakuratan ini mungkin sebagian bertanggung jawab atas penyebaran informasi yang salah secara *online*. Tidak hanya media sosial dibentuk oleh reaksi dan minat kita yang sangat manusiawi, tetapi juga membentuk pola pikir individu kita pada gilirannya (Wiederhold, 2020: 275-76).

Pencarian informasi dalam menghadapi bahaya dapat menjadi perilaku adaptif. Hal ini memungkinkan kita untuk membuat keputusan berdasarkan informasi tentang menjaga diri kita aman, seperti mencari kemungkinan rute pelarian ketika kita dihadapkan dengan ancaman. Sejarah telah menunjukkan bahwa selama bencana seperti ini, pemirsa TV biasanya meledak, karena konsumen menggunakannya tidak hanya untuk mendapatkan informasi, tetapi juga untuk menghabiskan waktu. Hal ini tampaknya berlaku untuk keadaan darurat saat ini. Dalam beberapa minggu terakhir, perusahaan media telah mencatat peningkatan dalam penggunaan data game, total penggunaan TV dan penggunaan media sosial. Verizon menandai peningkatan tajam 20% dalam trafik web antara 8 dan 15 Maret 2020. Dimasukkan dalam peningkatan ini adalah orang-orang memeriksa media sosial lebih sering memperbarui informasi terkini. Menurut survei Global Web Index, sekitar seperempat pengguna AS dan *Facebook* serta *Twitter* di Inggris telah meningkatkan penggunaan platform media sosial ini selama beberapa minggu terakhir (Wiederhold, 2020: 275-76).

Pada masa pandemi Covid-19, tren kasus penyebaran informasi *hoax* mengalami peningkatan. Polda Metro Jaya menemukan sebanyak 480 kasus informasi menyesatkan di dunia maya. “Jika kita bandingkan dengan tahun lalu dan di bulan yang sama, ada tren peningkatan penyebaran informasi *hoax* ini. Yang kita data ada sebanyak 480 kasus”, jelas (*Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Yusri Yunus*). Kemudian, setelah dirinci secara detail, ada 443 laporan yang diterima Polda Metro Jaya. Dan 14 diantaranya telah diungkap Polda Metro dan Polres Metro jajaran dengan menetapkan 10 orang sebagai tersangka. Bahkan hingga Juni beberapa tersangka lainnya berhasil diamankan. Menteri Komunikasi dan Informasi (Menkominfo) Johnny G Plate menyatakan bahwa di awal bulan Mei sudah terdapat lebih dari 500 kasus terkait virus Corona. Kasus tersebut ditemukan di berbagai

platform digital. Kemudian beliau menyampaika pula, terdapat 554 isu *hoax* dan tersebar di 1.209 *platform*, *Facebook*, *Instagram*, *Twitter*, dan *YouTube*. Menkominfo menyatakan telah berhasil memblokir 893 *hoax* yang terdiri dari 681 *Facebook*, 4 *Instagram*, 204 di *Twitter*, dan 4 di *YouTube* (Fitriawan Ginting, 2020).

Dampak yang ditimbulkan dari adanya wabah pandemi Covid-19 ini sangatlah besar karena mempengaruhi kegiatan-kegiatan yang bersifat mengumpulkan banyak orang, sedangkan sebagian besar kegiatan selalu melibatkan banyak pihak untuk menjalankan kegiatan tersebut. Berbagai kegiatan yang terdampak tersebut antara lain adalah seperti kegiatan perkantoran, kegiatan belajar mengajar di sekolah, kegiatan perekonomian seperti pusat perbelanjaan dan pasar atau kegiatan pemerintahan. Maka dari itu, berbagai kegiatan kemudian secara serentak dihentikan. Seluruh masyarakat dihimbau untuk berada di dalam rumah untuk mengarantina diri mereka secara mandiri supaya penyebaran pandemi tersebut dapat dicegah.

Dengan melakukan segala aktivitas dan kegiatan yang dilakukan di rumah saja dalam waktu yang lama, maka lama kelamaan akan merasakan kejenuhan dan bosan. Masyarakat mungkin banyak yang telah berusaha untuk melakukan kegiatan dan aktivitas dan kegiatan yang produktif. Akan tetapi dengan mengingat keadaan saat ini yang tidak hendak selesai maka lama kelamaan mereka juga akan bosan dan mengalihkan kegiatan mereka dengan menghabiskan waktu di depan layar *Smartphone* mereka. Karena dengan mengunjungi dan mengakses media sosial merupakan hiburan yang menyenangkan. Melihat peristiwa tersebut, tidak jarang banyak oknum yang kemudian memanfaatkan situasi seperti sekarang ini. Para oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab tersebut menganggap situasi seperti ini sebagai bahan guyonan yang kemudian mereka menyebar berita bohong atau *hoax* yang kemudian menimbulkan kecemasan di masyarakat. Niat hati mengurung diri dengan *self quarantine* di rumah supaya tidak tertular virus yang berbahaya, namun ketika mengakses media sosial malah mendapatkan kabar berita yang tidak valid yang kemudian dapat membuat tubuh semakin sakit karena banyak pikiran yang membuat gelisah. Hal tersebut yang kemudian membuat *social media distancing* menjadi begitu penting (Dinar Wahyuni, 2020).

Social media distancing dapat diartikan sebagai pengurangan porsi dalam bermedia sosial. *Social media distancing* bukan berarti menjauhi media sosial seutuhnya. Kita tidak dapat menyangkal bahwa media sosial sudah merupakan suatu kebutuhan, namun sebaiknya kita dapat menggunakan media sosial

dalam porsi yang wajar, apalagi pada masa situasi Covid-19 saat ini. Dengan menerapkan *social media distancing*, peluang kita untuk tidak terjebak dan termakan berita-berita *hoax* yang menggemparkan dan belum diketahui sumber serta validitasnya akan semakin mengecil dan kepanikan yang ada di masyarakat akan berkurang. Bukan hanya dapat dilakukan dengan tidak melakukan aktivitas yang tidak diperlukan di luar rumah saja, mengurangi bermedia sosial di tengah banjir informasi simpang siur ini juga menjadi cara yang tepat untuk meminimalisir resiko tekanan mental serta menurunkan imunitas tubuh kita (Dinar Wahyuni, 2020).

Di era yang sedemikian canggih ini, menyebarkan informasi bukanlah yang sulit. Dalam hitungan menit atau jam saja, sebuah berita dapat disebar dengan waktu yang singkat hanya dengan menekan sebuah tombol *share*, *forward* dan *screenshot* dan sebagainya. Namun, kemudahan tersebut justru menjadi masalah besar, apalagi bagi negara yang menempati urutan ke-60 dalam hal minat baca di dunia ini. Penyebaran berita yang belum diketahui keabsahannya kian marak terjadi di dunia maya pada akhir-akhir ini (Dinar Wahyuni, 2020). Kegiatan *sharing* tanpa saring ini bukan hanya melanggar UU ITE, tetapi juga memberikan serangan panik pada pembaca, terlebih lagi bagi pengguna media sosial yang mudah terpancing. Untuk itulah, menjaga kesehatan kita selain dengan menerapkan *physical distancing*, kita juga perlu untuk menerapkan *social media distancing* sebagai upaya untuk mengurangi penggunaan media sosial yang menjadi ladang penyebaran media sosial yang menjadi berita tidak valid dan dapat menimbulkan kecemasan, kita dapat mengganti dengan kegiatan yang lebih produktif lainnya seperti mencoba memasak resep yang belum pernah dicoba, mengasah kekreatifan yang dimiliki, melakukan senam ataupun yoga (Dinar Wahyuni, 2020).

Jadi bagaimana kita bisa memerangi infodemik/*hoax*, namun tetap terinformasi dan terhubung sekaligus melindungi kesehatan mental kita pada saat yang sama? Ini merupakan tugas yang berat, tetapi bisa dilakukan. Untuk satu hal, perusahaan teknologi melangkah untuk membantu. Solusi mereka berkisar dari mempromosikan informasi yang diverifikasi ke menghapus informasi yang salah hingga mencoba menghindari memposting informasi yang salah di tempat pertama. *Facebook*, misalnya, mengatakan mereka sedang bekerja untuk memblokir iklan yang mencoba mengeksploitasi situasi, sambil memberi WHO “sebagai banyak iklan gratis yang mereka butuhkan”. *Google* juga mendukung WHO dengan memposting pemberitahuan khusus dengan pembaruan WHO ketika orang mencari informasi tentang virus tersebut. *Twitter* telah menambahkan label peringatan yang terhubung ke CDC ketika

pengguna mencari “*Coronavirus*”, serta *TikTok* dan *You Tube* mengeluarkan peringatan yang mendorong pengguna untuk mencari “sumber terpercaya” untuk informasi. Bahkan WHO sendiri telah menyusun halaman mitos korbvirus *Coronavirus* (Wiederhold, 2020: 275-76).

Kita juga dapat mengatasi masalah tersebut dengan tangan kita sendiri yang berkontribusi terhadap rasa kontrol atas situasi untuk meningkatkan kesehatan mental kita. *Consumer Reports* merekomendasikan penggunaan teknik SIFT ketika dihadapkan dengan informasi baru. Langkah pertama adalah Berhenti. Ambil napas sebelum mengambil atau menerima suatu informasi apa pun sebagai fakta. Selanjutnya, anda dapat menyelidiki asal sumbernya, siapa yang memberikan informasi ini? Setelah itu, anda kemudian akan menemukan cakupan yang lebih baik. Periksa ulang informasi dengan sumber terpercaya, kemudian yang terakhir, lacak klaim, kutipan dan media ke konteks asli. Dengan kata lain, klik kembali untuk menemukan sumber asli informasi tersebut. Anda dapat menemukan informasi lebih lanjut tentang SIFTing di <https://infodemic.blog/>. Dengan memastikan bahwa informasi yang kita konsumsi akurat, kita dapat mulai mengatasi perasaan tidak berdaya yang diciptakan oleh infodemik dan menjauh dari malapetaka. Selain mencari informasi, kita juga dapat menggunakan teknologi untuk meningkatkan pandangan mental kita secara langsung. Internet menyediakan sarana untuk terhubung dalam masa isolasi. Menurut *American Psychological Association*, mempertahankan jaringan sosial kita disaat pergolakan dapat memberikan rasa normal sekaligus memberikan kesempatan untuk berbagi perasaan dan menghilangkan stres. Jika Anda merasa cemas atau kesepian, hubungi keluarga, teman, atau bahkan penyedia layanan kesehatan. Gunakan teknologi untuk mengakses apa yang Anda sukai, untuk mempraktikkan hobi Anda, dan untuk membantu menjaga rasa tenang. Teknologi dapat membantu membentuk kita, tetapi jangan lupa bahwa kita juga membantu membentuknya. Kita bisa menggunakannya untuk menjadi kreatif. Kita bisa menggunakannya untuk menjadi baik (Wiederhold, 2020: 275-76).

Social media distancing memiliki berbagai kelebihan dan memberikan manfaat yang baik bagi diri kita apabila diterapkan. Terutama dengan menerapkan *social media distancing* tersebut, kita dapat mengontrol emosi dalam diri kita sehingga kondisi psikologi dalam diri bisa tetap stabil terutama ketika tengah menghadapi masalah seperti saat ini yang sedang benar-benar tidak terkendali. Melihat banyaknya berita dan informasi yang kebenarannya masih simpang-siur bertebaran dimana-mana, tentunya hal tersebut ditakutkan akan semakin menyebabkan kecemasan yang mendalam

bagi masyarakat ketika tengah menghadapi problema pandemi Covid-19 ini. Maka dari itu dengan melakukan *social media distancing* tersebut kita dapat melakukan *self healing* atau mengistirahatkan diri kita sejenak dari media sosial dan menjauhkan diri kita dari *hoax* dan berita-berita *toxic* yang dapat menyebabkan psikosomatik dalam diri kita. Selain itu, dengan *social media distancing* ini, kita jadi lebih bisa berinteraksi dengan lebih dekat bersama anggota keluarga kita. Karena dengan membatasi penggunaan *medsos*, kita juga bisa melepaskan *smartphone* kita sejenak untuk fokus terhadap apa yang ada di sekitar kita.

Selain dari kelebihan-kelebihan tersebut, tentunya *social media distancing* juga memiliki beberapa kekurangan. Salah satu kekurangannya, penerapan *social media distancing* yang berlebihan tentunya dapat membuat seseorang tidak mau mempercayai informasi apapun yang ada di media sosial, menutup diri dan berspekulasi bahwa segala berita dan informasi yang ada di media sosial merupakan *hoax*. Selain itu, jika kita melakukan *social media distancing* ini terlalu ketat, maka kemudian ketika kita sudah tidak menerapkannya lagi dan kembali mengakses berita dan informasi apapun yang beredar di media sosial, hal tersebut dapat menyebabkan kecanduan yang berlebihan ketika kembali dalam bermedia sosial di kemudian harinya. Maka dari itu, *social media distancing* ini sebaiknya diterapkan terus menerus dan bertahap walaupun masa pandemi ini sudah tidak ada. Tentunya *social media distancing* ini harus dilakukan dengan hati-hati dan disesuaikan (memilah) dengan apa yang kita butuhkan dengan mengurangi konten-konten tidak baik yang dirasa kurang bermanfaat bagi kita.

Penutup

Media sosial merupakan suatu hal yang sangat penting dan dibutuhkan oleh masyarakat pada era modern ini. Bahkan media sosial sekarang ini sudah banyak digunakan oleh berbagai lapisan masyarakat, yakni dari anak-anak sampai orang tua dapat mengaksesnya dengan cepat dan mudah. Salah satu dampak negatif dari penggunaan media sosial sendiri yakni seperti mudahnya penyebaran berita-berita bohong atau yang sering kita kenal dengan *hoax*. Kata *Hoax* berasal dari bahasa Inggris artinya tipuan, menipu, berita bohong, berita palsu atau kabar burung. Jadi dapat dikatakan bahwa *hoax* adalah kata yang berarti ketidak benaran suatu informasi.

Penyebaran *hoax* di Indonesia banyak sekali ditemukan terutama dalam bentuk gambar dan tulisan. Adapun saluran penyebaran *hoax* ini banyak ditemukan di aplikasi *chatting* dan media sosial. Data pengguna media

sosial di Indonesia menunjukkan bahwa, berdasarkan hasil riset *Wearesosial Hootsuite* yang dirilis pada bulan Januari 2019 tersebut menunjukkan bahwa pengguna media sosial di Indonesia mencapai 150 juta atau sebesar 56% dari total populasi. Jumlah tersebut naik 20% dari survei sebelumnya. Sementara pengguna *social media mobile (gadget)* mencapai 130 juta atau sekitar 48% dari populasi. Jika dilihat dari banyaknya pengguna sosial media tersebut, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa begitu rentannya masyarakat kita untuk menerima informasi ataupun berita *hoax* apabila tidak berhati-hati dalam memilah dan menerima berita. Kemudian, bagaimana cara kita untuk mengatasi masalah tersebut, akan tetapi masih bisa mendapat informasi yang update dan benar? Adapun cara-cara untuk mengantisipasi tersebarnya *hoax* tersebut, salah satunya adalah dengan melakukan *social media distancing*, atau pembatasan sosial. *Social media distancing* memiliki artian yang berarti menjaga jarak dan membatasi interaksi dengan informasi buruk di media sosial. *Social media distancing* dapat diartikan sebagai pengurangan porsi dalam bermedia sosial. *Social media distancing* bukan berarti menjauhi media sosial seutuhnya. Kita tidak dapat menyangkal bahwa media sosial sudah merupakan suatu kebutuhan, namun sebaiknya kita dapat menggunakan media sosial dalam porsi yang wajar, apalagi pada masa situasi Covid-19 saat ini.

Dengan menerapkan *social media distancing*, peluang kita untuk tidak terjebak dan termakan berita-berita *hoax* yang menggemparkan dan belum diketahui sumber serta validitasnya akan semakin mengecil dan kepanikan yang ada di masyarakat akan berkurang. Untuk melakukan pembatasan terhadap media sosial ini bisa kita lakukan mulai dari diri sendiri. Yakni dengan membatasi diri kita ketika mengakses media massa, seperti menyaring berita yang beredar, tidak mudah percaya dan menyebarkan berita yang belum tentu kebenarannya kepada orang lain dan menghentikan kebiasaan dalam mengakses media massa secara berlebihan. Dengan cara-cara sederhana tersebut, diharapkan kita dapat mengantisipasi dan mencegah berbagai masalah yang disebabkan oleh berita *hoax* yang terjadi di media sosial. Dari hasil penelitian ini juga mengungkapkan bahwa dengan melakukan *social media distancing* kita dapat mengantisipasi ancaman *hoax*. Selain itu, seperti yang telah dijelaskan oleh dr Andri, Sp.Kj, FAPM (Dokter Psikiater) dengan sedikit membatasi diri kita dalam bermedia sosial selama pandemi ini, maka kita dapat menjauh dari informasi-informasi *toxic* yang dapat menyebabkan gejala psikosomatik. Apabila masyarakat terus-terusan cemas dan mengalami psikosomatik nantinya akan menyebabkan mudahnya terjangkit Virus Corona karena tidak stabilnya imun yang ada di dalam tubuh kita. Maka

dari itu, selain bermanfaat untuk *self healing*, *social media distancing* juga dapat lebih mendekatkan diri kita agar bisa lebih akrab dengan keluarga dan kerabat dekat. Masa-masa pandemi ini memberikan kita banyak waktu jika dibandingkan dengan masa normal sebelumnya, jadi manfaatkan waktu tersebut untuk hal-hal yang lebih bermanfaat yang sebelumnya tidak bisa kita dapatkan seperti olahraga, *me time* dan berkreasi.

Beberapa rekomendasi untuk riset berikutnya, supaya mencantumkan periode waktu yang digunakan dalam penelitiannya. Sehingga hasil yang diperoleh dapat dibandingkan dan lebih akurat lagi. Selain itu, diharapkan peneliti menambahkan data-data yang lebih *up to date*. Kemudian juga menambahkan data terkait peningkatan jumlah hoax ditengah masa pandemi yang tidak disertakan di dalam penelitian ini, sehingga di kemudian hasilnya dapat diperbandingkan. Adapun rekomendasi untuk pemerintah adalah supaya pemerintah lebih memperhatikan kembali terhadap informasi serta berita yang sering muncul di media sosial. Selain itu, pemerintah juga perlu meningkatkan keamanan cyber di media sosial untuk mengantisipasi persebaran hoax di masyarakat, mengingat pengguna media sosial yang ada di Indonesia saat ini sangat banyak sekali dan kemungkinan juga akan semakin bertambah untuk ke depannya. Pemerintah juga diharapkan dapat memberikan dan menyebarkan informasi serta edukasi tentang bahaya hoax dan bagaimana cara menghindarinya kepada masyarakat Indonesia.

Harapan dengan adanya hasil penelitian ini, semoga dapat digunakan untuk bahan referensi pada penelitian selanjutnya. Selain itu, penelitian ini tentunya ditujukan untuk semua responden dan masyarakat supaya lebih memperhatikan kembali dan lebih hati-hati dalam memanfaatkan media sosial ke depannya. Di era sekarang ini tentu saja media sosial merupakan suatu yang sangat penting untuk dimiliki setiap orang. Maka dari itu, dengan adanya penelitian ini diharapkan masyarakat dapat lebih selektif dalam memilah informasi serta berita yang beredar di media sosial dan dapat menerapkan *Social Media Distancing* dengan bijak. Peneliti juga berharap, penelitian ini dapat bermanfaat bagi masyarakat dan riset mendatang sebagai bahan rujukan yang dibutuhkan.

Daftar Pustaka

Buku

Adi Nugroho. (2020, April 12). Tersedia dari: <https://radarkediri.jawapos.com>

Patilima, H. (2013). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: ALFABETA.

Jurnal

Juditha, Christiany, 'Interaksi Komunikasi Hoax Di Media Sosial Serta Antisipasinya Hoax Communication Interactivity in Social Media and Anticipation', 3.1 (2018), 31–44

Legionosuko, Tri, and Universitas Pertahanan, 'Dinamika Fake News Atau Hoax Sebagai Sumber Konflik Horisontal Pada Pilkada Propinsi Dki Tahun 2017 Dynamics Fake News or Hoax as a Source of Horizontal Conflict in the Provincial Poverty of Dki Jakarta 2017', 2017, 111–36

Rahadi, Dedi Rianto, 'Perilaku Pengguna Dan Informasi Hoax Di Media Sosial', *Jurnal Manajemen Dan Kewirausahaan*, 5.1 (2017), 58–70 <<https://doi.org/10.26905/jmdk.v5i1.1342>>

Razali, Nurul Afiza, Noor Hera, and Kamarul Azmi Jasmi, 'Media Sosial Dan Impak Tingkah Laku Menurut Islam', *Akademi Tamadun Islam, Fakulti Sains Sosial Dan Kemanusiaan. Malaysia*, 2019.2008 (2019), 61–79

Saputra, Pramana Yoga, 'Implementasi Teknik Crawling Untuk Pengumpulan Data Dari Media Sosial Twitter', *Dinamika Dotcom*, 8 (2017), 160–68

Setiadi, Ahmad, 'Pemanfaatan Media Sosial Untuk Efektifitas Komunikasi', *Jurnal Humaniora*, 16.2 (2016), 1–7 <<https://ejournal.bsi.ac.id/ejournal/index.php/cakrawala/article/download/1283/1055>>

Sutantohadi, Alief, 'Bahaya Berita Hoax Dan Ujaran Kebencian Pada Media Sosial Terhadap Toleransi Bermasyarakat', *DIKEMAS (Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat)*, 1.1 (2018), 1–5 <<https://doi>.

org/10.32486/jd.v1i1.153>

Wiederhold, Brenda K, 'Social Media Use during Social Distancing', *Cyberpsychology, Behavior, and Social Networking*, 2020, 275–76
<<https://doi.org/10.1089/cyber.2020.29181.bkw>>

Skripsi

US Nurlayl, 'Teori Konflik Sosial Dalam Perspektif Karl Marx', *Digilib UIN Surabaya*, 2015, 38–58 <<http://digilib.uinsby.ac.id/2560/5/Bab2.pdf>>

Surat Kabar

Choirul, A. (2019, Juni 19). Pengguna Sosial Media di Indonesia Terbesar Keempat di Dunia. *Tribunnews.com*. Tersedia dari: <https://www.tribunnews.com/techno/2019/06/19/pengguna-sosial-media-di-indonesia-terbesar-keempat-di-dunia>.

Fitriawan Ginting. (2020, Juni 15). Tren kasus hoax meningkat di masa pandemi Covid-19. [Web log post]: <https://www.pjmnews.com/2020/06/15/tren-kasus-hoax-meningkat-di-masa-pandemi-Covid-19-ini-datanya/>

Firda Janati. (2020, April 10). *Kompas.com*. [Web log post] <https://www.google.com/amp/s/amp.kompas.com/>

Gibran Maulana Ibrahim. (2020, Maret 24). <https://m.detik.com/news/berita/d-4951880/positif-Corona-bima-arya-merasa-baik-setelah-social-media-distancing>

Dinar Wahyuni. (2020, Maret 27). Pentingnya Social Distancing di Tengah Pandemi Covid-19 : LPMGS UNSRI. [Web log post]: <https://gelorasriwijaya.co/blog/>

Fitriawan Ginting. (2020, Juni 15). Tren kasus hoax meningkat di masa pandemi Covid-19. [Web log post]: <https://www.pjmnews.com/2020/06/15/tren-kasus-hoax-meningkat-di-masa-pandemi-Covid-19-ini-datanya/>

Komisi Penyiaran Indonesia, RG, (2020, April 27). [Web log post]: <http://www.kpi.go.id/index.php/id/umum/38-dalam-negeri/35695-pandemi-ubah-pola-komunikasi-masyarakat>

Meita Fajriana. (2020, Juli 02). 4 Media Sosial yang Paling Banyak Digunakan Masyarakat Indonesia. [Web log Post]: <https://m.fimela.com/lifestyle-relationship/read/4293104/4>

Subinarto Djoko (2019, Mei 23). *detikNews*. [Web log post] <https://www.m.detik.com>

YouTube

Official iNews: Social Media Distancing, Banyak Info Hoax Korona di Masyarakat (2020, Maret 27). Tersedia dari: <https://www.youtube.com/OfficialiNews>

Website

Telkomsel. (2020, Mei 15). Social Media Dsitancing di Masa Social Distancing. [Web log post] <https://www.telkomsel.com/about-us/blogs/>

Peran MCCC sebagai Lembaga Sosial di Era Pandemi Covid-19

Ramadhan Widiantoro

*Prodi Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan
Humaniora, UIN Sunan Kalijaga
Email: Ramadhanwidiyanto2@gmail.com*

Pendahuluan

Corona Virus merupakan sekumpulan virus dari subfamili *Orthocoronavirinae* dalam keluarga *Coronaviridae* dan ordo *Nidovirales* (Nur, 2020: 228). Kelompok virus ini yang dapat menyebabkan penyakit pada burung dan mamalia, termasuk manusia. Pada manusia, Corona virus menyebabkan infeksi saluran pernapasan yang umumnya ringan, seperti pilek, meskipun beberapa bentuk penyakit seperti; SARS, MERS dan Covid-19 sifatnya lebih mematikan. Sejak kemunculannya yang terindikasi berasal dari Wuhan, China pada akhir tahun 2019 ini datang dan meluas, pola hubungan atau aktivitas manusia menjadi berubah. Mulai dari kegiatan sehari-hari yang biasanya dilakukan secara tatap muka, kini menjadi serba *online (daring)*. Itu karena virus ini mudah cepat menular ke saluran pernafasan manusia. Jadi, beberapa orang takut untuk beraktivitas ke luar rumah. Mungkin beberapa orang mengeluhkan hal ini, akan tetapi tidak sedikit yang mau mematuhi.

Pemerintah Indonesia dalam mengupayakan pencegahan penularan virus Covid 19 adalah dengan melibatkan berbagai elemen masyarakat. Upaya dilakukan pemerintah tersebut salah satunya dengan melakukan sosialisasi kepada masyarakat terkait pentingnya jaga jarak (*social distance and pysical distance*) dan mengkampanyekan untuk tetap di rumah saja. Protokol yang muncul diupayakan untuk menjaga agar penularan Covid-19 ini tidak meluas. Tidak sedikit masyarakat yang berkontribusi walaupun mereka melakukannya secara mandiri (lokal). Disusul pula dengan upaya kebijakan di setiap daerah, pasti akan mempermudah negara dalam mengatur pola kebiasaan sehari-hari masyarakatnya. Saat ini pemerintah Indonesia terus melakukan upaya-upaya guna meminimalisir orang yang terinfeksi Covid-19. Salah satunya dengan melalui media massa dan cetak yang berupaya untuk mengedukasi masyarakat akan cepat tersampaikan. Awalnya pemerintah tidak

terlalu ingin memberikan informasi kepada publik terkait virus Corona yang masuk ke Indonesia. Hal tersebut dilakukan untuk menghindari kepanikan masyarakat dan juga menghindari isu-isu yang tidak jelas kebenarannya. Namun akhirnya, pemerintah memutuskan untuk memberikan sosialisasi kepada masyarakat melalui media massa secara terbuka. Hal lain yang perlu diketahui adalah merebaknya berita-berita yang tidak diketahui sumbernya. Alih-alih menumpaskan satu penyakit, justru menimbulkan penyakit baru yaitu salah satunya *hoax*. Hal ini justru membuat masyarakat kebingungan dan semakin menambah kepanikan ditengah-tengah pemerintah berupaya untuk menangani wabah tersebut.

Langkah pemerintah dengan melakukan pembentukan badan atau lembaga yang bertugas untuk mengkoordinir dari informasi yang diambil dari daerah lalu menginformasikan kepada media massa. Lembaga tersebut bernama Gugus Tugas Covid-19 dan tidak hanya itu, terdapat beberapa lembaga lain juga dibentuk guna membantu upaya penyebaran wabah Covid-19 tersebut. Ada lembaga dibawah naungan pemerintah yang jelas dari segi administratif itu di akomodasi oleh negara. Terdapat juga lembaga swasta, baik itu dari ormas, partai maupun perseorangan turut membantu dalam pencegahan penularan wabah. Lembaga-lembaga tersebut diantaranya :

1. Lembaga Dunia (Internasional)

Lembaga yang memiliki jaringan luas dan salah satunya menjadi media rujukan. Lembaga ini aktif menangani wabah secara global, dan memiliki beberapa donatur besar baik perseorangan maupun birokrasi menjadikan lembaga ini jembatan bagi setiap kegiatan kemanusiaan. Beberapa lembaga dunia yang aktif berperan menangani wabah Covid-19 diantaranya, *United Nations World Food Programme* (UN WFP), *United Nations Office For The Coordination Of Humanitarian Affairs* (UNOCHA), *World Health Organization* (WHO), *United Nations Children's Fund* (UNICEF), dan *United Nations Population Fund* (UNFPA).

2. Lembaga Pemerintah (Nasional)

Lembaga yang bertugas menangani permasalahan, khususnya aspek kebencanaan dalam lingkup nasional. Dalam menjalankan aksi dan kegiatannya, lembaga tersebut memiliki garis koordinasi pada birokrasi negara. Salah satunya dalam aspek administratif yang dimana pada kegiatannya di akomodasi atau mendapat suplai dana dari pemerintah. Lembaga tersebut hadir dan terpetakan dalam berbagai fokus suatu agenda atau kegiatan. Sebagai contoh, kebanyakan lembaga nasional yang

dibentuk memiliki garis koordinasi dengan kementerian. Dari data BNPB (<https://bnpb.go.id>), beberapa lembaga dibawah pemerintah sebagai mitra lembaga masyarakat diantaranya terdapat pada Kementerian Kesehatan (Kemenkes), Kementerian Pertahanan (Kemenhan), Kementerian Sosial (Kemensos), Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kemen PU-Pera), Kementerian Perhubungan (Kemenhub), Kementerian BUMN, Kementerian Pertanian (Kementan), Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Tentara Nasional Indonesia (TNI), Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI), Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Basarnas), Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (LAPAN). Semua lembaga tersebut memiliki titik fokus pada sektor yang berbeda, sesuai dengan arah lembaga tersebut. Sebagai turunannya dalam kegiatan di masyarakat, terdapat beberapa lembaga sebelum adanya Covid-19 yang bergerak pada bisang kemanusiaan diantaranya BNPB, Badan Nasional Penanggulangan Bencana. BPBD, Badan Penanggulangan Bencana Daerah. PVMBG, Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi, merupakan lembaga di lingkungan Badan Geologi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral yang fokus dalam melaksanakan tugas penanggulangan bencana di daerah baik Provinsi maupun Kabupaten/ Kota. PMI, Palang Merah Indonesia, merupakan suatu organisasi perhimpunan nasional di Indonesia yang bergerak dalam bidang sosial kemanusiaan. BNPP, Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan atau lebih dikenal dengan BASARNAS, merupakan lembaga pemerintah yang mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pencarian dan pertolongan (Search And Rescue atau SAR). Selanjutnya terbentuknya lembaga Gugus Tugas Covid-19 yang menjadi titik koordinasi antar lembaga pemerintah lainnya.

Sekilas tentang Gugus Tugas Covid-19 yang menjadi lembaga aktif menangani wabah Covid-19. Gugus tugas Covid-19 dibentuk pada 13 Maret 2020 berdasarkan Keputusan Presiden No. 7 Tahun 2020, tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan Coronavirus Disease 2019 (Covid-19). Gusus tugas ini memiliki garis koordinasi dan berada dibawah serta dalam pelaksanaannya bertanggung jawab langsung pada presiden. Gugus tugas ini masih berada dalam lingkup Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), dengan melibatkan kementerian, lembaga, dan unit pemerintahan seperti yang telah disebutkan

sebelumnya. Gugus tugas ini dibentuk tidak hanya di tingkat nasional, tetapi juga di tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota. Doni Monardo (juga kepala BNPB) ditunjuk sebagai kepala pelaksana gugus tugas, sementara terdapat Menteri yang menjadi kepala dewan pengarah yaitu Muhadjir Effendy (Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan).

3. Lembaga Swasta (nasional)

Lembaga ini dalam menjalankan kegiatan atau aksinya tidak memiliki struktur dalam pemerintahan. Biasanya lembaga tersebut berdiri atas suatu komunitas, organisasi, partai maupun perorangan. Sebagai contoh beberapa lembaga dibawah komunitas, organisasi atau ormas diantaranya, Palang Merah Indonesia (PMI), Yakkum *Emergency Unit* (YEU), Muhammadiyah *Disaster Management Center* (MDMC), Lembaga Penanggulangan Bencana dan Perubahan Iklim Nahdlatul Ulama (LPBPI NU), *Disaster Management Center* Dompet Dhuafa (DMC-DD), Aksi Cepat Tanggap (ACT), Senkom Mitra Polri, dan Jakarta *Rescue*. Selain lembaga, dari perseorangan sebagai contoh relawan dan para pemilik usaha turut membantu menangani Corona. Dalam kegiatannya masing-masing menyesuaikan kondisi internal dan eksternal baik orang tersebut atau lingkungannya. Sebagai bentuk, melakukan mendonaturkan sebagian tenaga atau dana (bagi pengusaha). Sebagai contoh para pemilik usaha, PT. Garuda Indonesia (Persero) Tbk., PT. Telekomunikasi Indonesia Tbk. (Telkom), PT. HM Sampoerna Tbk., Sinar Mas (Eka Tjipta Foundation), PT. Krakatau Steel, PT. Trakindo Utama, PT. Perusahaan Listrik Negara (PLN), PT. Amec Berca Indonesia, PT. Jaya Konstruksi Manggala Pratama Tbk., PT. Jasa Marga (Persero) Tbk., PT. Pelayaran Nasional Indonesia (Persero) (Pelni), PT. Reasuransi MAIPARK Indonesia, PT. Pelabuhan Indonesia II (Persero). Adapula partisipasi dari kalangan partai politik yang aktif membantu tangani Corona, tidak jarang upaya tersebut juga bagian dari sisi kepedulian sesama selain menjadi alat politik semata.

Semua lembaga tersebut memiliki fokus dan cara koordinasi yang berbeda, baik yang bersifat struktural (terorganisir) maupun independen. Adapun proses pemetaan lembaga-lembaga dalam menjalankan kegiatannya juga berperan sebagai garis koordinasi dari atas (pemerintah) dengan masyarakat. Semua lembaga yang bergerak tersebut memiliki tujuan arah gerak yang sama, yaitu sama-sama untuk membantu satu dengan lainnya demi kelangsungan hidup umat manusia dan alam.

Aspek filantropi secara garis besar mempengaruhi pola bentuk kegiatan pada lembaga kemanusiaan, khususnya di Indonesia. Salah satu garis besar dalam aksi nyata mengenai kemanusiaan juga ditorehkan oleh beberapa ormas yang ada, mengingat di negara Indonesia yang mayoritas memeluk agama Islam beberapa diantaranya terdapat dua ormas besar umat Islam yang ada seperti Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama memiliki riwayat atau torehan prestasi gemilang mengenai sisi filantropi. Sebagai wujud adanya badan Amil Zakat atau Lembaga Zakat Infaq dan Shadaqah sebagai lembaga pemerintahan seperti BAZNAZ, juga terdapat LAZIZ-MU dan LAZIZ-NU telah memberikan sumbangsih begitu besar bagi pelayanan masyarakat. Fokus penelitian ini tertuju pada peran ormas Muhammadiyah, dimana sejak berdirinya sebagai organisasi kemasyarakatan yang memiliki fokus utama pada aspek kemanusiaan. Muhammadiyah dalam pencegahan wabah Covid 19 memiliki kontribusi terhadap negara berupaya memerangi Hoaxs. Sebagai salah satu Ormas Islam yang menjadi garda terdepan dan yang paling utama responsif terkait wabah ini adalah dengan terbentuknya MCCC. Kamis (5/3) melalui Maklumat Pimpinan Pusat Muhammadiyah, No. 02/MLM/I.0/H/2020, Tentang Wabah *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*, Pimpinan Pusat Muhammadiyah membentuk *Muhammadiyah Covid-19 Command Center (MCCC)* yang nantinya bertugas mengoordinasikan pelaksanaan program dan aksi penanganan Covid-19. Melalui tindakan mempertimbangkan penyebaran Covid-19 yang sangat cepat, Pimpinan Pusat Muhammadiyah menyatakan wabah tersebut sebagai kejadian luar biasa yang harus segera dilakukan pencegahan secara sungguh-sungguh, masif, dan terkoordinasi dengan baik. Sebagai organisasi islam besar, Muhammadiyah memiliki misi filantropi yang berdasar pada Al-Quran dan Hadis. Di dalam teori aktivisme filantropi menurut (Helmut K. Anheier dan Diana Leat: 2006), terdapat filantropi kreatif dimana sejauh ini merupakan salah satu pendekatan berupaya mengembangkan berbagai perangkat dan praktik model pelayanan filantropi yang sudah ada (tradisional dan modernis), karena model tersebut yang sesuai dengan gerakan filantropi yang dilakukan oleh Muhammadiyah. Maka dengan adanya MCCC sebagai bagian dari satuan gugus tugas, Muhammadiyah mendorong agar pemerintah melibatkan semua pihak dengan melibatkan MCCC untuk bekerjasama dan bersinergi dengan disertai langkah sosialisasi dan kebijakan yang terbuka dan komprehensif. Selain itu, MCCC dalam pelaksanaan kegiatan kemanusiaan juga telah menyiapkan berbagai layanan seperti konsultasi psikologis, layanan konsultasi keagamaan dan konsultasi yang terkait dengan ekonomi.

Metode penelitian ini menggunakan deskriptif kualitatif, dimana lebih menekankan pada pengolahan data yang ada dengan jenis penelitian studi pustaka. Menurut (Sugiono: 2012); penelitian kualitatif adalah sebuah metode penelitian yang digunakan untuk meneliti objek penelitian, dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci. Jenis penelitian ini menggunakan analisis studi pustaka, dimana riset pustaka atau penelusuran pustaka lebih daripada sekedar melayani fungsi-fungsi yang disebutkan untuk memperoleh data penelitiannya. Menurut (Zed, 2008: 1-2) riset pustaka membatasi kegiatannya hanya pada bahan-bahan koleksi perpustakaan saja tanpa memerlukan riset lapangan. Lebih jelasnya, model penelitian ini menurut M. Nazir, studi kepustakaan adalah teknik pengumpulan data dengan mengadakan studi penelaahan terhadap buku-buku, literatur-literatur, catatan-catatan dan laporan-laporan yang ada hubungannya dengan masalah yang dipecahkan (Khatibah, 2011: 38). Sumber utama penelitian ini mengarah kepada artikel atau jurnal, rujukan buku utama dengan judul Membaca Korona dan sumber dari berita resmi. Selain itu, penelitian deskriptif yang digunakan dalam penelitian ini lebih mengarah kepada peneliti menggambarkan berbagai macam permasalahan yang terjadi yang diungkapkan, tanpa manipulasi dengan cara mendeskripsikan. Pada penelitian ini, peneliti mendeskripsikan peran lembaga sosial-kemasyarakatan yang bergerak pada aspek kemanusiaan, yaitu MCCC dalam merespon berbagai permasalahan yang terjadi selama wabah Covid-19 berlangsung.

Virus Corona (Covid-19)

Virus Corona merupakan keluarga besar virus yang menyebabkan penyakit pada manusia dan hewan. Pada manusia biasanya menyebabkan penyakit infeksi saluran pernapasan, mulai flu biasa hingga penyakit yang serius seperti *Middle East Respiratory Syndrome (MERS)* dan Sindrom Pernafasan Akut Berat / *Severe Acute Respiratory Syndrome (SARS)*. Coronavirus jenis baru yang ditemukan pada manusia sejak kejadian luar biasa muncul di Wuhan Cina, pada Desember 2019, kemudian diberi nama *Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2 (SARS-COV2)*, dan menyebabkan penyakit *Coronavirus Disease-2019 (Covid-19)*. Covid-19 disebabkan oleh SARS-COV2 yang termasuk dalam keluarga besar Coronavirus yang sama dengan penyebab SARS pada tahun 2003, hanya berbeda jenis virusnya. Gejalanya mirip dengan SARS, namun angka kematian SARS (9,6%) lebih tinggi dibanding Covid-19 (kurang dari 5%), walaupun jumlah kasus Covid-19 jauh lebih banyak dibanding SARS. Covid-19 juga memiliki penyebaran yang lebih luas

dan cepat ke beberapa negara dibanding SARS. Seperti penyakit pernapasan lainnya, Covid-19 dapat menyebabkan gejala ringan termasuk pilek, sakit tenggorokan, batuk, dan demam. Sekitar 80% kasus dapat pulih tanpa perlu perawatan khusus. Sekitar 1 dari setiap 6 orang mungkin akan menderita sakit yang parah, seperti disertai pneumonia atau kesulitan bernafas, yang biasanya muncul secara bertahap. Walaupun angka kematian penyakit ini masih rendah (sekitar 3%), namun bagi orang yang berusia lanjut, dan orang-orang dengan kondisi medis yang sudah ada sebelumnya (seperti diabetes, tekanan darah tinggi dan penyakit jantung), mereka biasanya lebih rentan untuk menjadi sakit parah. Melihat perkembangan hingga saat ini, lebih dari 50% kasus konfirmasi telah dinyatakan membaik, dan angka kesembuhan akan terus meningkat, hal tersebut membuat seseorang dapat terinfeksi dari penderita Covid-19 (Kemenkes,2020).

Penularan Virus

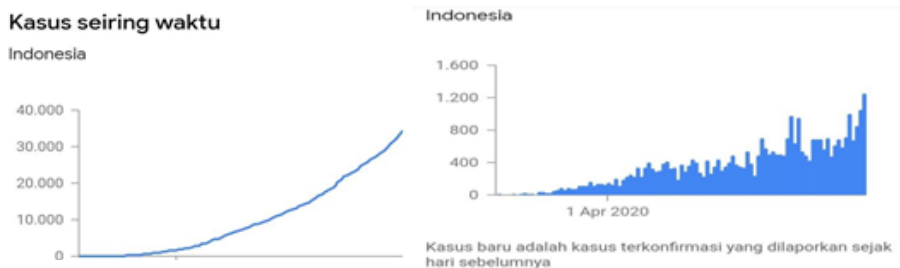
Penyakit ini dapat menyebar melalui tetesan kecil (droplet) dari hidung atau mulut pada saat batuk atau bersin. Droplet tersebut kemudian jatuh pada benda di sekitarnya. Kemudian jika ada orang lain menyentuh benda yang sudah terkontaminasi dengan droplet tersebut, lalu orang itu menyentuh mata, hidung atau mulut (segitiga wajah), maka orang itu dapat terinfeksi Covid-19. Atau bisa juga seseorang terinfeksi Covid-19 ketika tanpa sengaja menghirup droplet dari penderita. Inilah sebabnya mengapa kita penting untuk menjaga jarak hingga kurang lebih satu meter dari orang yang sakit. Sampai saat ini, para ahli masih terus melakukan penyelidikan untuk menentukan sumber virus, jenis paparan, dan cara penularannya. Tidak ada batasan usia orang-orang dapat terinfeksi oleh Coronavirus ini (Covid-19). Namun orang yang lebih tua, dan orang-orang dengan kondisi medis yang sudah ada sebelumnya (seperti asma, diabetes, penyakit jantung, atau tekanan darah tinggi) tampaknya lebih rentan untuk menderita sakit parah. Waktu yang diperlukan sejak tertular / terinfeksi hingga muncul gejala disebut masa inkubasi. Saat ini masa inkubasi Covid-19 diperkirakan antara 1-14 hari dan perkiraan ini dapat berubah sewaktu-waktu sesuai perkembangan kasus. Beberapa cara yang bisa dilakukan untuk mencegah tertularnya virus ini adalah dengan menjaga kesehatan dan kebugaran agar stamina tubuh tetap prima dan sistem imunitas atau kekebalan tubuh meningkat. Mencuci tangan secara teratur menggunakan air dan sabun atau handrub berbasis alkohol. Mencuci tangan sampai bersih selain dapat membunuh virus yang mungkin ada di tangan kita, tindakan ini juga merupakan salah satu tindakan yang mudah

dan murah. Sekitar 98% penyebaran penyakit bersumber dari tangan. Karena itu, menjaga kebersihan tangan adalah hal yang sangat penting. Namun, dapat dimengerti bahwa seseorang mungkin merasa stres dan cemas tentang situasi yang terdampak ini. Tetaplah tenang dan jangan panik. Carilah informasi yang benar dan akurat tentang perkembangan Covid-19 agar masyarakat mengetahui situasi wilayah yang terdampak dan dapat mengambil tindakan pencegahan yang wajar. Selalu jaga kesehatan dan perhatikan informasi dan saran dari pihak kesehatan yang berwenang. Serta yang terakhir, tetap pantau sumber informasi yang akurat dan resmi mengenai perkembangan penyakit ini.

Kasus Penyebaran Covid-19

Kasus virus Corona muncul dan menyerang manusia pertama kali di provinsi Wuhan, China pada akhir tahun 2019 lalu. Hingga saat ini telah meluas ke beberapa penjuru dunia termasuk Indonesia. Karena penularan virus Corona yang sangat cepat inilah Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) menetapkan virus Corona sebagai pandemi pada 11 Maret 2020. Dan berikut data terupdate sampai bulan April 2020.

Diagram 1: Penyebaran Virus Corona di Indonesia



Sumber: Wikipedia, 2020

Angka infeksi virus Corona di dunia terus bertambah setiap hari. Peningkatan masih terus terjadi di sejumlah negara, termasuk Indonesia. Melansir data Worldometers, hingga Kamis (11/6/2020), ada 7.441.112 kasus Covid-19, 417.985 kematian, dan 3.722.195 orang dinyatakan sembuh. Berikut ini 10 besar negara dengan kasus terbanyak (Kompas, 2020) :

1. Amerika Serikat: 2.064.853 kasus, 115.109 orang meninggal dunia, dan 801.065 sembuh.
2. Brazil: 772.416 kasus, 39.680 orang meninggal dunia, dan 380.300 orang sembuh

3. Rusia: 493.657 kasus, 6.358 orang meninggal dunia, dan 252.783 orang sembuh.
4. Inggris: 290.143 kasus, 41.128 orang meninggal dunia
5. Spanyol: 289.360 kasus, 27.136 orang meninggal dunia
6. India: 287.155 kasus, 8.107 orang meninggal dunia, dan 140.979 orang sembuh.
7. Italia: 235.763 kasus, 34.114 orang meninggal dunia, dan 169.939 orang sembuh.
8. Peru: 208.823 kasus, 5.903 orang meninggal dunia, dan 98.031 orang sembuh.
9. Jerman: 186.866 kasus, 8.844 orang meninggal dunia, dan 170.700 orang sembuh.
10. Iran: 177.938 kasus, 8.506 orang meninggal dunia, dan 140.590 orang sembuh.

Peningkatan jumlah kasus Corona terjadi dalam waktu singkat dan membutuhkan penanganan segera. Virus Corona dapat dengan mudah menyebar dan menginfeksi siapapun tanpa pandang usia. Virus ini dapat menular secara mudah melalui kontak dengan penderita. Sayangnya hingga kini belum ada obat spesifik untuk menangani kasus infeksi virus Corona atau Covid-19. Karena alasan inilah pemerintah di beberapa negara memutuskan untuk menerapkan *lockdown* atau isolasi total atau karantina. Karantina menurut UU Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan adalah pembatasan kegiatan dan/atau pemisahan seseorang yang terpapar penyakit menular sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan meskipun belum menunjukkan gejala apapun untuk mencegah kemungkinan penyebaran ke orang di sekitarnya (UU No. 6 tahun 2018). Beberapa negara yang telah menerapkan *lockdown* untuk mencegah penyebaran virus Corona adalah China, Spanyol, Italia, dan Malaysia. Pemerintah negara tersebut memutuskan *lockdown*, dengan menutup semua akses fasilitas publik dan transportasi. Warga dihimbau untuk tetap di dalam rumah dan mengisolasi diri, dengan harapan virus tidak menyebar lebih luas dan upaya penyembuhan dapat berjalan maksimal (Nailul Mona, 2020: 118).

Informasi Media Massa

Upaya pemerintah dalam menanggulangi penyebaran Covid-19 dengan mengedukasi masyarakat melalui media massa. Secara pengertian media merupakan sarana komunikasi bagi masyarakat, yang terletak di antara dua pihak sebagai perantara atau penghubung. Sedangkan McLuhan bersama

Quentin Fiore, menyatakan bahwa “media setiap zamannya menjadi esensi masyarakat” hal ini menunjukkan bahwasanya masyarakat dan media selalu berkaitan dan media menjadi bagian yang penting dalam kehidupan masyarakat, sadar atau tidak sadar bahwa media memiliki pengaruh yang berdampak positif maupun negatif dalam pola dan tingkah laku masyarakat (Husnul Khatimah, 2018: 121). Menurut Bungin (2006:72) media massa diartikan sebagai media komunikasi dan informasi yang melakukan penyebaran informasi secara massal dan dapat diakses oleh masyarakat banyak, ditinjau dari segi makna, media massa merupakan alat atau sarana untuk menyebarkan isi berita, opini, komentar, hiburan, dan lain sebagainya (Dedi K.H., 2018: 79). Media massa sangat berperan dalam perkembangan atau bahkan perubahan pola tingkah laku dari suatu masyarakat, oleh karena itu kedudukan media massa dalam masyarakat sangat penting. Dengan adanya media massa, masyarakat yang tadinya dapat dikatakan tidak beradab dapat menjadi masyarakat yang beradab. Hal itu disebabkan, oleh karena media massa mempunyai jaringan yang luas dan bersifat massal sehingga masyarakat yang membaca tidak hanya orang-perorang tapi sudah mencakup jumlah puluhan, ratusan, bahkan ribuan pembaca, sehingga pengaruh media massa akan sangat terlihat di permukaan masyarakat.

Komunikasi di Masyarakat

Komunikasi memegang peranan penting dalam kehidupan manusia. Dengan komunikasi sifat alami manusia sebagai makhluk sosial dapat terpenuhi. Dua orang dikatakan melakukan interaksi, apabila masing-masing melakukan tindakan aksi dan reaksi. Aksi dan reaksi yang dilakukan manusia ini disebut sebagai tindakan komunikasi. Hampir sebagian besar komunikasi yang dilakukan di alam sadar berlangsung dalam situasi komunikasi antar pribadi. Situasi ini dapat dijumpai dimanapun, baik secara perorangan, kelompok, maupun organisasi. Dengan komunikasi antarpribadi ini dapat membuat seseorang untuk tidak terasing atau terisolasi dari lingkungan sekitar. menurut Richard L. Weafer II, komunikasi merupakan setiap proses pertukaran informasi, gagasan, dan perasaan (Andi Eka, 2017: 3-4). Obyek Sosiologi Komunikasi secara formal adalah manusia, sedangkan secara materiil adalah Proses Sosial & komunikasi (interaksi sosial), yang mencakup telematika & realitasnya, efek media & norma sosial baru, perubahan sosial & komunikasi, masalah sosial & media massa, *cybercommunity* serta aspek hukum & bisnis media.

Jika melihat keterkaitan antara kasus yang terjadi dalam masyarakat,

terkait dengan pandangan sosiologi komunikasi. Maka bisa dilihat bahwa masih banyak persoalan demi persoalan yang terjadi di masyarakat terkait dengan komunikasi. Bagaimana antara satu wilayah dengan wilayah lain tidak saling komunikasi. Bahkan banyak masyarakat yang berpikir bahwa pemerintah telah acuh terhadap wabah Covid-19, pemerintah ingin membunuh masyarakat secara perlahan, entah itu karena mati kelaparan atau terpapar virus (Tsamrotul Ayu M, 2020). Artinya teknologi yang disajikan tidak memiliki satu frekuensi yang sama. Walaupun di setiap daerah tentu memiliki corak dan pandangan yang terkait dengan adanya wabah Covid-19, namun perlu adanya satu komunikasi yang valid guna membentuk suatu perilaku dalam masyarakat itu tidak menimbulkan keresahan.

Ancaman Konflik dalam Masyarakat

Pandangan Sosiologi mengenai kasus yang terjadi dalam masyarakat dapat dikaitkan dengan teori konflik. Konflik secara umum dapat di artikan di dalam sosiologi yang memandang masyarakat sebagai suatu sistem sosial yang terdiri dari bagian-bagian atau komponen-komponen yang mempunyai kepentingan yang berbeda-beda dimana komponen yang satu berusaha untuk menaklukan komponen yang lain guna memenuhi kepentingannya atau memperoleh kepentingan sebesar-besarnya (Bernard Raho,2007:71-72). Di mana menurut Max Weber, berpendapat bahwa konflik timbul dari stratifikasi sosial dalam masyarakat (Ahmadin, 2017: 226). Konflik yang terjadi karena masyarakat menilai adanya keuntungan sepihak (dalam artian kebijakan pemerintah) di beberapa wilayah. Sekretaris Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Dr. Abdul Mu'ti mengungkapkan bahwa: parameter kualitas pemimpin dan kepemimpinan adalah kemampuan menyelesaikan masalah (Essay Arif Jamali Muis : 2020). Beberapa faktor mungkin menjadi alasan suatu pemerintahan dalam setiap kebijakan yang dilakukan menimbulkan pro dan kontra. Baik dapat dilihat melalui sisi internal pemerintah yang belum siap hadapi pandemi dan sisi eksternal yang melihat masih banyak masyarakat yang tidak mematuhi anjuran pemerintah. Hal ini tentu membutuhkan penelitian lebih dalam terkait berbagai aspek permasalahan yang timbul dalam masyarakat. Terlepas dari itu semua, terdapat masalah yang timbul dari suatu kebijakan dalam masyarakat saat pandemi misalnya, distribusi penyuluhan yang sigap di perkotaan, namun kendor pada pedesaan terutama dalam menyampaikan sebuah informasi. Pembangunan antara desa dan kota yang tidak merata, di susul dengan gaya konsumtif masyarakat yang tinggi, serta mobilitas penduduk yang semakin banyak dari tahun ke tahun dengan

rata-rata mengais penghasilan di kota, hal ini juga menjadi salah satu faktor dimana dapat menyebabkan kesenjangan antar manusia.

Pada hakikatnya bahwa menurut Anderson, komunikasi adalah suatu proses dengan mana kita bisa memahami dan dipahami oleh orang lain. Komunikasi merupakan proses yang dinamis dan secara konstan berubah sesuai dengan situasi yang berlaku. Dengan adanya suatu komunikasi yang valid maka masyarakat akan bertindak sama dalam artian satu frekuensi. Dalam pandemi saat ini keperluan informasi sangatlah dibutuhkan. Maka perlu dibutuhkannya suatu komunikasi yang komprehensif yaitu komunikasi massa, dimana memiliki pengertian membentuk satu kesatuan yang membentuk jaringan frekuensi sama dalam masyarakat. Menurut McQuail (2002), komunikasi massa adalah komunikasi yang berlangsung pada tingkat masyarakat luas. Pada tingkat ini komunikasi dilakukan dengan menggunakan media massa. Ciri-ciri utama komunikasi massa adalah (1) Sumbernya adalah organisasi formal dan pengirimnya adalah profesional; (2) Pesannya beragam dan dapat diperkirakan; (3) Proses diproses dan distandarisasikan; (4) Pesan sebagai produk yang memiliki nilai jual dan makna simbolik; (5) Hubungan antara komunikan dan komunikator berlangsung satu arah dan (6) Bersifat impersonal, non moral dan kalkulatif.

Sedangkan menurut Gerbner (Winarso, 2005 : 20), komunikasi massa adalah produksi dan distribusi secara institusional dan teknologis dari sebagian besar aliran pesan yang dimiliki secara berkelanjutan dalam masyarakat masyarakat industrial. Sifat lain dari komunikasi massa yang membedakannya dari komunikasi interpersonal adalah bahwa pesan yang dikirimkan kepada penerima secara tidak langsung menggunakan beberapa bentuk alat mekanis. Dalam komunikasi massa sumber dan penerima tidak secara fisik berada di tempat yang sama; jadi tatap muka atau interaksi langsung tidak mungkin. Demikian juga pesan, dikirimkan melalui alat-alat mekanis seperti pemancar radio yang memungkinkan hal itu direproduksi dan didistribusikan kepada banyak penerima dalam waktu yang sama (Winarso, 2005 : 20-21).

Peran Informasi di Era Pandemi

Perkembangan teknologi saat ini juga sangat mempengaruhi peran media massa, kebebasan media massa dan dukungan dari teknologi tersebut dapat menghadirkan dua kondisi, satu sisi akses informasi yang semakin mudah untuk masyarakat akan meningkatkan kesadaran masyarakat untuk ikut serta dalam penyelenggaraan pemerintahan, yang pada akhirnya akan menciptakan kondisi yang demokratis, namun di sisi lainnya adalah kebebasan yang dimaksud

tidak diiringi dengan tanggung jawab, akan menimbulkan kebebasan yang tidak terarah. Perkembangan teknologi komunikasi yang amat pesat ini oleh Fidler (1997) disebut dengan “mediamorfosis”, yang menurutnya media terus berkembang sesuai dengan perubahan zaman (Dewi, 2017: 76). Selain itu adapula secara pengoperasiannya disebut media sosial. Media sosial merupakan sarana efektif dan efisien dalam menyampaikan suatu informasi kepada pihak lain. Fungsi media sosial dapat diketahui melalui sebuah kerangka kerja honeycomb. Menurut Kietzmann, etl (2011) menggambarkan hubungan kerangka kerja honeycomb sebagai penyajian sebuah kerangka kerja yang mendefinisikan media sosial dengan menggunakan tujuh kotak bangunan fungsi yaitu *identity, conversations, sharing, presence, relationships, reputation, dan groups* (Dedi, 2017: 61). Menurut studi Google Indonesia merupakan pembelanja terbesar dalam Teknologi Informasi (TI) di Asia Tenggara dengan penggunaan internet yang tinggi sehingga berkontribusi 2, 5% pada PDB nasional di tahun 2016. Selain itu, Indonesia memiliki penetrasi seluler 112% dengan total 266 juta pelanggan seluler dan merupakan pasar seluler terbesar ke 4 di dunia. Sedangkan untuk pengguna internet sendiri di seluruh dunia saat ini sudah mencapai 5 miliar lebih. Sedangkan di Indonesia, pengguna internet sudah mencapai 175,4 juta jiwa. Angka itu 64% dari populasi masyarakat Indonesia yang saat ini berjumlah kurang lebih 272,1 juta jiwa. Jumlah itu didominasi oleh pengguna media sosial yang menunjukkan angka sangat tinggi. Menurut survei *We Are Social* dan Hootsuite per Januari 2020; angka pengguna media sosial di Indonesia mencapai angka 160 juta jiwa (M. Aziz : 2020). Dan disini lah segala aktivitas dapat tergambarkan dan dapat menjadi konsumsi publik. Tak jarang saat ini segala informasi yang didapat malah terdapat berita yang tidak bertanggung jawab alias Hoax. Menteri Komunikasi dan Informasi (Menkominfo) Johnny G Plate memberikan data terbaru bahwa sudah terdapat lebih dari 500 kasus terkait virus Corona (Covid-19) yang tercatat hingga Sabtu (18/4/2020), kasus ini ditemukan diberbagai platform digital (Beritasatu, 2020). *Hoax* adalah usaha untuk menipu atau mengakali pembaca/pendengarnya untuk mempercayai sesuatu, padahal sang pencipta berita palsu tersebut tahu bahwa berita tersebut adalah palsu (Dedi, 2017: 61). *Hoax* bertujuan untuk membuat opini publik, menggiring opini publik, membentuk persepsi juga untuk *having fun* yang menguji kecerdasan dan kecermatan pengguna internet dan media sosial. Hal inilah yang menjadi kekhawatiran pada awalnya pemerintah Indonesia tidak menayangkan perkembangan Covid-19. Maraknya info *hoax* yang berkaitan dengan Covid-19 tersebut sekaligus juga memberikan kita pelajaran agar

masyarakat tidak mudah untuk percaya terhadap informasi yang belum pasti kebenarannya. Pemerintah pusat hingga daerah sudah semestinya untuk menyampaikan informasi terbuka dan apa adanya (Neni Nur H. : 2020).

Upaya Melawan Informasi Hoaks

Ada tiga pendekatan penting yang diperlukan untuk mengantisipasi penyebaran berita hoax di masyarakat saat pandemi saat ini yaitu melalui pendekatan kelembagaan, teknologi dan literasi. Pendekatan kelembagaan, dengan terus menggalakkan komunitas anti *hoax*. Sebagai contoh, terdapat beberapa upaya pemerintah dalam menangani kasus wabah dengan membentuk satuan gugus tugas Covid-19. Sementara dalam perkembangannya, lembaga tersebut juga telah menjalin kerjasama dengan beberapa lembaga sosial lainnya, baik dalam barisan pemerintah maupun swasta. Dari sisi pendekatan teknologi, dengan aplikasi *hoax checker* yang bisa digunakan oleh masyarakat untuk mengecek kebenaran berita yang berindikasi *hoax*. Pendekatan literasi, dengan gerakan anti berita hoax maupun sosialisasi kepada masyarakat mulai dari sekolah hingga masyarakat umum yang ditingkatkan dan digalakkan, bukan saja oleh pemerintah tetapi juga oleh seluruh lapisan masyarakat termasuk institusi-institusi non pemerintah lain (Christiany, 2018: 42-43). Salah satu dari institusi non pemerintah adalah masyarakat sipil. Terdapat sebagian kelompok masyarakat sipil yang menunjukkan solidaritasnya dengan menggalang dana. Salah satunya dilakukan melalui wadah urun dana (*crowdfunding*) seperti kitabisa.com. Tidak hanya organisasi masyarakat sipil, tetapi banyak juga individu figur publik seperti pekerja seni dan *'influencer'* media sosial melakukan hal yang sama. Upaya penggalangan dana terkait Covid-19 di wadah urun dana tersebut dapat mencapai lebih dari 25 miliar rupiah. Penggalangan dana itu dimaksudkan untuk beragam tujuan, misalnya membeli Alat Perlindungan Diri (APD) para tenaga medis, penyediaan tempat singgah untuk tenaga medis, hingga bantuan pangan untuk masyarakat yang terdampak krisis akibat wabah ini.

Terdapat pula (*civil society*) kelompok masyarakat sipil lain yang bergerak di ranah digital, seperti KawalCovid19, dimana lembaga tersebut dibentuk mendedikasikan diri untuk menyediakan informasi terpercaya seputar Covid-19 di Indonesia melalui situs dan media sosial. Kesimpangsiuran informasi dan banyaknya hoaks yang beredar menjadi dasar wadah ini diluncurkan oleh relawan KawalCovid19, terdiri dari orang yang berlatarbelakang medis, edukasi, sains, riset, dan teknologi informasi. Adapun saat ini kekuatan *Civil Society* berbasis Islam yang paling dominan

di Indonesia yakni NU dan Muhammadiyah, melalui lembaga filantropinya LAZISNU (Lembaga Amil Zakat Infaq dan Shodaqoh Nahdlatul Ulama) dari Nahdlatul Ulama dan LAZISMU (Lembaga Zakat Infaq dan Shodaqoh Muhammadiyah) dari Muhammadiyah sudah berjuang melakukan gerakan filantropi untuk kemanusiaan dari menggalang donasi, sampai distribusi makanan dan sembako untuk yang terdampak Covid (Mia Sarmiasih : 2020). Dalam ranah akademik, para pakar di kampus-kampus dan lembaga penelitian secara sendiri-sendiri maupun kolaboratif mengadakan kajian mengenai pandemi Covid-19. Institut Teknologi Bandung, Universitas Indonesia, Universitas Gadjah Mada, misalnya, melakukan kajian dari berbagai perspektif (medis, kesehatan masyarakat, sosiologi, dsb), hingga berhasil merakit alat (misal: ventilator) yang dinilai bermanfaat dalam upaya memulihkan pasien Covid-19 dan telah banyak diulas di berbagai media. Institusi akademik ini terus mencoba memperbarui kajiannya, seakan berlomba dengan jumlah kasus yang terus bertambah (*goodnewsfromindonesia*, 2020).

Peran individu dalam menghadapi pandemi Covid-19 ini juga sangat dibutuhkan. Dalam kondisi ancaman Covid-19 ini yang dibutuhkan paling utama adalah solidaritas/kemauan orang untuk bersatu dibawah komando seorang pemimpin untuk saling menguatkan satu sama lain (A.R. Anas : 2020). Tidak hanya mengandalkan peran pemimpin atau lembaga yang sudah ada, kesadaran untuk melindungi diri dari bahaya juga perlu ditingkatkan. Salah satu bentuknya dengan melakukan *social distance* dan *physical distance*. Selain itu, demi menjaga agar tetap produktif saat pandemi, diri dapat melakukan beberapa kegiatan yang dapat berguna bagi diri sendiri dan sesama. Misalnya dalam ranah sosial, dengan membuat *hand sanitizer* secara mandiri, membuat alat pelindung diri untuk tenaga medis untuk diberikan gratis, menyediakan tendon air berikut sabun cuci tangan untuk bisa digunakan masyarakat umum. Selain itu, juga bisa berinisiatif membuat masker kain untuk dibagikan secara gratis ke masyarakat setempat, menyediakan makanan gratis untuk ojek maupun kurir, hingga penggalangan dana untuk menyediakan peralatan alat pelindung diri bagi tenaga medis serta yang paling membutuhkan (Kompas, 2020). Individu dalam aktivitas untuk memenuhi kebutuhan hidup, juga bisa melakukan kegiatan membuat masker, *handsanitizer* secara mandiri. Peranan individu dalam menghadapi sebuah informasi juga patut diperhitungkan, misalnya dalam mengantisipasi berita hoaks yang menyebar ke masyarakat juga bisa melakukan kampanye anti hoaks melalui media massa kepada keluarga maupun masyarakat di sekitarnya. Adi Fauzan (2020) menuturkan, “*Saat ini kita bertarung dengan waktu, maka akal dan rasionalitas manusia menjadi*

penentu”. Karena Indonesia merupakan bangsa yang besar, mempunyai rasa solidaritas yang tinggi, maka sebagai bagian masyarakat Indonesia harus bisa saling membantu dari segi apa pun, patuhi pemerintah jika benar, kritik dan beri masukan ketika pemerintah berbelok ke arah yang salah (Mirnawati : 2020).

Peran MCCC (Muhammadiyah Covid-19 Command Center)

Bila sudah mengetahui makna media massa, fungsi dan , kini melihat bagaimana peran media ini sampai kepada masyarakat, atau dikonsumsi secara publik? Tentu memerlukan sebuah alat teknologi yang biayanya tentu tidak sedikit. Dalam masa pandemi saat ini keperluan sebuah informasi yang cepat sangat dibutuhkan. Terlebih peran media massa juga dibutuhkan untuk menyebarkan suatu berita. Jika tadi berbicara seputar hoaks, maka sekarang bagaimana bila informasi tersebut tidak sampai kepada masyarakat. Karena kita tahu bahwa Indonesia adalah negara yang memiliki wilayah cukup luas. Tentu tidak semua wilayah terjamah teknologi, karena belum semua wilayah merata akan kebutuhan media massa. Maka perlu adanya tindakan aksi secara nyata di lapangan bila terdapat wilayah yang tidak mengetahui suatu informasi.

Peran MCCC atau disebut Muhammadiyah Covid-19 *Command Center* saat ini telah menunjukkan kontribusi nyata bagi masyarakat. Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Prof. Dr. Haedar Nashir mengapresiasi kiprah Muhammadiyah Covid-19 *Command Center* (MCCC). Di mana, unit khusus Muhammadiyah ini terus bergerak dari pusat hingga hampir seluruh daerah di Indonesia dalam menghadapi wabah virus Corona jenis baru (Covid-19) secara masif dan tersistem. “Kiprahnya didukung kinerja, data, dan sistem teknologi informasi yang bagus dengan dukungan Pusat Syiar Digital Muhammadiyah (PSDM) yang menyangga,” kata Haedar, Kamis (17/4). Menurut dia, melalui MCCC langkah Muhammadiyah diapresiasi, hingga dr. Corona Rintawan yang semula menjadi Ketua MCCC ditarik ke BNPB Pusat mewakili Muhammadiyah (<https://Covid-1919.muhammadiyah.id/>). Hal ini dilakukan karena Muhammadiyah menganggap bahwa wabah Covid-19 merupakan suatu persoalan serius yang bisa menghancurkan kelangsungan hidup umat manusia.

Kiprah awal MCCC yang menunjukkan semangat untuk jihad kemanusiaan telah membuahkan hasil yang cukup memuaskan. Karena fokus utama kegiatan Muhammadiyah Covid-19 Command Center adalah

penyemprotan disinfektan dan edukasi masyarakat tentang pentingnya social distancing (<http://www.umm.ac.id>). Hingga 14 April 2020, total ada 65 Rumah Sakit Muhammadiyah dan Aisyiyah (RSMA) yang dijadikan tempat rujukan Corona di 9 provinsi. MCCC juga telah terbentuk di 23 provinsi di Indonesia dari Aceh hingga Papua Barat. Sebanyak 65 Rumah Sakit Muhammadiyah dan Aisyiyah (RSMA) sudah melayani pasien Covid-19. Rumah sakit tersebut tersebar di sembilan propinsi yakni Sumatera Barat, Sumatera Selatan, Lampung, Kalimantan Tengah, Nusa Tenggara Barat, DKI Jakarta, DIY, Jawa Tengah dan Jawa Timur. MCCC juga menyiapkan layanan konsultasi psikologis, layanan konsultasi keagamaan dan konsultasi yang terkait dengan ekonomi. Sebagai contoh, MCCC telah meluncurkan sebuah aplikasi untuk mengukur kondisi kesehatan fisik dan psikis masyarakat di tengah pandemi Covid-19. Nama aplikasi tersebut adalah Sikuid dan Sikevid. Aplikasi tersebut berfokus pada aspek kesehatan fisik dan psikis masyarakat. Dalam aspek pendidikan, MCCC juga telah memfasilitasi sekolah-sekolah Muhammadiyah untuk belajar *online*. Kegiatan MCCC dalam ranah bidang sosial dan ekonomi masyarakat juga berupaya untuk menggelorakan semangat *solidarity buying* yang mendorong warga untuk memprioritaskan pembelian berbagai hasil usaha berbasis rumahan atau usaha mikro dan menengah yang dikelola oleh sesama warga, teman dan saudara sekitar. Nantinya, kegiatan tersebut guna menanggulangi krisis pangan saat pandemi berlangsung.

Selain itu, Muhammadiyah melalui MCCC juga melakukan sosialisasi kepada masyarakat melalui media massa maupun secara langsung, untuk mengikuti intruksi salah satunya berupa menyerukan untuk kegiatan di rumah, baik ibadah maupun pekerjaan lainnya. Upaya ini sebagai wujud ta'awun terhadap negeri sebagai bentuk jihad kemanusiaan kepada masyarakat, khususnya umat. Semua yang dikerjakan oleh tim Muhammadiyah Covid 19 *Command Center* (MCCC) yang diketuai oleh dr. Corona Rintawan sebagai wujud dari aspek filantropi untuk membantu sesama. Anggota lembaga Muhammadiyah Covid-19 *Command Center* (MCCC) terdiri dari tim yang berasal dari beberapa perwakilan diantaranya:

1. Majelis Pembina Kesehatan Umum (MPKU)
2. Muhammadiyah Disaster Management Center (MDMC)
3. 'Aisyiyah
4. Lembaga Amil Zakat Infaq dan Shodaqoh Muhammadiyah (LAZISMU)
5. Majelis Pendidikan Tinggi dan Penelitian Pengembangan (DIKTI LITBANG)

6. Majelis Pendidikan Dasar dan Menengah (DIKDASMEN)
7. Majelis Tabligh
8. Ikatan Pelajar Muhammadiyah (IPM)
9. Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM)
10. Nasyiatul 'Aisyiyah (NA)
11. Hizbul Wathan (HW)
12. Tapak Suci Putera Muhammadiyah (TSPM)
13. Pemuda Muhammadiyah

Filantropi Islam Dalam MCCC

Filantropi, sebuah nama yang sering terdengar dalam aplikasinya sebagai upaya kecintaan atau peduli terhadap sesama, antara manusia satu dengan yang lainnya tanpa mementingkan sebuah golongan, ras, etnis dan warna kulit atau simbol tertentu pada diri manusia. Menurut Abidin (2012) gerakan filantropi saat ini masih identik dengan upaya penguatan modal sosial dan pemberdayaan masyarakat. Asas ini melekat pada komunitas atau lembaga yang memiliki gerakan pada kemanusiaan. Menurut (Herlambang : 2020), istilah filantropi berasal dari bahasa Yunani yakni *Philanthropia* yang diartikan sebagai cinta manusia. Secara pengertian, filantropi diartikan sebagai kepedulian seseorang atau sekelompok orang kepada orang lain berdasarkan kecintaan kepada manusia. Filantropi secara harfiah juga memiliki makna melayani, atau memberi pelayanan terhadap sesama. Menurut Midgley (1995) dalam (Tamim, 2011), filantropi merupakan salah satu pendekatan dari tiga pendekatan untuk mempromosikan kesejahteraan termasuk didalamnya upaya pengentasan kemiskinan yaitu pendekatan *social service (social administration)*, *social work* dan *philanthropy* (Qi Mangku B., 2016: 476). Oleh Allien Shaw ditegaskan juga bahwa filantropi bukanlah sekedar karitas, akan tetapi lebih pada pendampingan yang bersifat pemberdayaan ber dampak jangka panjang (Latief, 2010). Filantropi secara umum terbagi pada dua sifat, yaitu filantropi tradisional dan modern atau keadilan sosial. Filantropi Tradisional bersifat Karitas (*charity*) atau belas kasihan yang berbentuk pemberian untuk kepentingan pelayanan sosial. Sebagai contoh, pemberian para dermawan kepada kaum miskin untuk membantu kebutuhan pokok sehari-hari seperti makanan, pakaian, tempat tinggal, dan lainnya yang bersifat secara Individual. Sementara Filantropi Modern atau yang disebut Filantropi untuk Pembangunan Sosial dan Keadilan Sosial merupakan bentuk kedermawanan sosial mengupayakan melalui pembangunan sosial. Karena hal tersebut diyakini bahwa suatu kemiskinan lebih dalam masyarakat disebabkan

oleh ketidakadilan dalam peng-alokasian sumber daya dan akses kekuasaan kepada masyarakat.

Berpegang pada ketentuan dalam ayat suci Al-Quran, filantropi yang di manifestasi ke dalam unsur ke-islaman menjadikan nilai-nilai ayat menjadi nyata. Dalam Islam, basis filantrofisnya adalah *kewajibkan yang dari atas* untuk mewujudkan keadilan sosial di muka bumi (Hilman L., 2020: 16). Hal ini menunjukkan bahwa sejatinya suatu ayat dapat dan mampu mengubah suatu keadaan, baik diri maupun di sekitarnya. Berawal dari sebuah surat Al-Ma'un dan Al-Ashr, K.H. Ahmad Dahlan mampu membuat suatu gerakan kemanusiaan yang mengubah hidup manusia menuju sebuah kehidupan yang lebih baik sesuai dengan ajaran Al-Qur'an dan Sunnah. Acuan tersebut menjadikan dasar dan motivasi para anggota Persyarikatan Muhammadiyah dalam aspek persoalan kemanusiaan. Dengan demikian, kiprah Muhammadiyah Covid-19 Command Center (MCCC) sebagai bagian tubuh Muhammadiyah terus memainkan peran signifikan dalam penanganan wabah Covid-19 saat ini. Sebagai gerakan kemanusiaan yang merefleksikan filantropi islam, penanganan kasus yang menjadi fokus utama MCCC tidak hanya objektif kepada kaum muslim semata, akan tetapi lebih tepatnya pada aspek seluruh umat manusia. Selain dukungan internal, MCCC telah mampu berkolaborasi dengan lembaga-lembaga lain dalam perang melawan Covid-19. Ketua MCCC, Agus Samsudin mengatakan, internal Muhammadiyah, Lembaga Amal Zakat Infaq dan Shodaqoh Muhammadiyah (Lazismu) selama ini jadi penopang utama MCCC dari sisi pendanaan. Jaringannya bahkan sampai tingkat ranting. Lazismu mampu menghimpun kekuatan filantropi warga Muhammadiyah. Selain Lazismu, tidak ketinggalan pula peran serta amal usaha Muhammadiyah (AUM) juga memberi kontribusi signifikan dalam kerja-kerja penanganan Covid-19. Berdasarkan perkembangan sampai 26 Mei 2020, dalam bidang kesehatan yang menjadi domain utama penanganan wabah Covid-19, hingga tercatat sekitar 77 Rumah Sakit Muhammadiyah dan Aisiyiah (RSMA) yang merawat pasien Covid-19 (Tribunnews, 2020).

Kelebihan dan Kekurangan MCCC

Sebagai lembaga yang masih memiliki garis koordinasi dari MDMC tersebut, tentu memiliki beberapa kendala internal, atau lebih jelasnya terdapat aspek kelebihan dan kekurangan. Tentu dalam hal tersebut tidak di jelaskan secara umum, karena MCCC masih fokus pada penanganan kasus Covid-19 yang masif terjadi di beberapa wilayah. Dalam penelitian ini, peneliti menganalisis terkait beberapa kendala internal dan eksternal MCCC

selama kiprah melawan Covid-19. Atas dasar pencapaian dalam setiap proses kegiatan yang dilakukan MCCC, peneliti menyimpulkan beberapa analisis diantaranya,

Kelebihan Lembaga Sosial MCCC

1. Lembaga MCCC lebih mandiri dalam setiap kegiatannya baik dalam pendanaan, pengadaan alat, barang dan tempat seperti masker, *handsanitizer*, APBD , rumah sakit, ambulan dan lain-lain yang di distribusikan ke beberapa wilayah terdampak, selalu dilakukan secara mandiri.
2. Koordinasi yang sangat baik dari tingkat pusat sampai ke tingkat daerah, antara koordinasi dengan pemerintah, persyarikatan Muhammadiyah, lembaga lain dan MCCC tingkat pusat. Hal ini terlihat bagaimana masalah yang terjadi dari tingkat daerah yang berbeda-beda tersebut dapat diatasi secara bersama-sama yang terkoordinasi secara baik dari MCCC daerah tersebut dengan tingkat pusat.
3. MCCC mampu bergerak cepat terhadap segala permasalahan yang terjadi, karena pada dasarnya hal lembaga tersebut dibentuk untuk berfokus pada wabah Covid-19.
4. Memfasilitasi para relawan yang tergabung dalam MCCC untuk dibekali ilmu pengetahuan semacam *training* sebelum melakukan aksi di lapangan.
5. Kegiatan MCCC selalu memunculkan ide, baik suatu inovasi maupun kreatifitas ketika menghadapi permasalahan baru. Berdasar pada awal berdirinya lembaga ini yang berfokus pada penanganan Covid-19, namun karena terdapat permasalahan lain dalam aspek ekonomi, pendidikan, sosial dan budaya, hal tersebut mendorong untuk dapat menjadikan permasalahan tersebut menjadi salah satu bagian fokus kegiatan membantu penanganan Covid-19.
6. MCCC mampu bekerjasama sangat baik dengan beberapa lembaga lain, baik dalam hal menerima bantuan maupun membantu lembaga tersebut untuk sama-sama mengatasi segala permasalahan yang terjadi selama pandemi Covid-19 belum berakhir.
7. Tekad kuat MCCC yang berlandas pada tuntunan Alquran dan sunnahnya sesuai dengan arahan dan keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah membuat komitmen lembaga tersebut bekerja dengan penuh ke-ikhlasan dan dilakukan secara masif.

Kekurangan Lembaga Sosial MCCC

1. Kegiatan MCCC dilakukan hanya dalam ranah skala Nasional dan saat ini belum secara Internasional. Hal ini dikarenakan keterbatasan baik dari Angkatan Usaha Muhammadiyah yang tidak hanya berfokus pada aspek kesehatan, namun juga memiliki fokus pada aspek pendidikan dan keagamaan membuat cakupan tersebut harus memiliki titik fokus pada permasalahan yang sedang terjadi.
2. Dalam skala Nasional sendiri masih terdapat kelemahan diantaranya keberadaan MCCC atau cabangnya belum tersebar di 34 Provinsi di seluruh Indonesia. Walaupun mayoritas sebagian besar sudah berada di Indonesia, baik di pulau Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Jawa, Bali, Madura, Nusa Tenggara, dan Papua sudah ada, namun dalam lingkup wilayahnya luas seperti di Sumatera, Kalimantan, Papua belum seluruhnya ada. Sebagian besar masih pada perkotaan atau titik wilayah tertentu yang bisa diakses.
3. Dalam segi pendanaan, lembaga MCCC bergerak secara mandiri. Maka pendanaan juga dilakukan secara mandiri atau mendapat suplay dana dari Pimpinan Pusat Muhammadiyah dan tidak ditopang oleh uang kas Negara. Ketika mendapatkan kekurangan pendanaan baik dari dalam segi kebutuhan dan sebagainya, biasanya MCCC melakukan kegiatan menyebar proposal atau meminta bantuan kepada lembaga lain dari beberapa wilayah lain untuk bisa menutupi kekurangan dalam tersebut. Bisa juga mendapatkan dana dari upaya keikhlasan para kader Muhammadiyah atau anggota MCCC sendiri.

MCCC selalu bergerak cepat dan selalu inovatif serta kreatif untuk menanggulangi penyebaran wabah. Untuk saat ini, penanganan fokus MCCC tidak hanya pada aspek kesehatan masyarakat, namun juga aspek sosial, ekonomi, pendidikan, media informasi maupun agama turut menjadi tanggung jawab MCCC. Walaupun terdapat lembaga-lembaga dibawah naungan Muhammadiyah yang memiliki fokus tersebut. Karena MCCC memiliki anggota yang beberapa diantaranya tergabung dalam lembaga-lembaga internal Muhammadiyah. Sehingga permasalahan yang terjadi baik itu sosial, ekonomi, budaya, pendidikan, media informasi maupun agama dalam ranah pandemi Covid-19 masih menjadi tanggung jawab MCCC. Tanggung jawab tersebut tidak hanya dihibahkan kepada MCCC semata, namun juga dari seluruh elemen ormas baik tingkat pusat Muhammadiyah sampai dengan tingkat bawah juga membantu untuk sama-sama menjadikan fokus permasalahan Covid-19 tidak hanya sebatas permasalahan sepele,

tapi perlu upaya ikhtiar dan gerakan kesadaran bersama untuk melalui segala permasalahan yang terjadi. Menggunakan slogan “*Hidup-hidupilah Muhammadiyah, dan jangan mencari hidup di Muhammadiyah*” menjadi kunci utama kesuksesan bagi seluruh kader atau anggota dalam segala lembaga yang dibentuk dalam Muhammadiyah. Segala kekurangan yang terjadi dapat diatasi dengan bersama-sama untuk tetap memegang teguh tujuan dibentuknya MCCC.

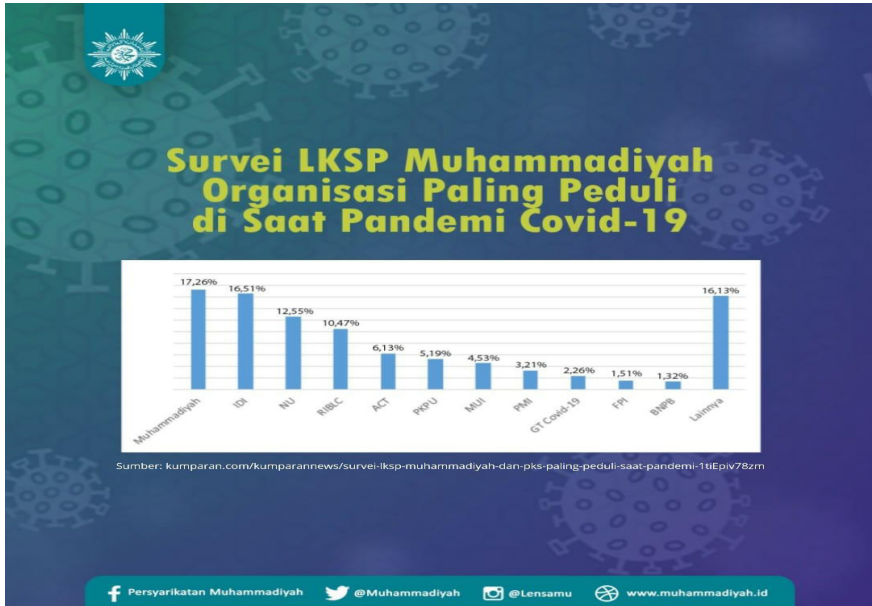
Prestasi MCCC Hadapi Covid-19

Melihat kontribusi MCCC yang cukup masif membuat tingkat kepercayaan lembaga ini terhadap kepuasan masyarakat cukup menoleh prestasi. Dalam survei yang dilakukan oleh, LKSP Lembaga Kajian Strategis dan Pembangunan (LKSP) menunjukkan bahwa organisasi yang peduli dengan kepentingan warga di masa pandemi Covid-19, maka sebagian besar warga menjawab: Muhammadiyah (17,26 %), Ikatan Dokter Indonesia (16,51 %), Nahdlatul Ulama (12,55 %) dan Relawan Indonesia Bersatu Lawan Corona (10,47%). Lembaga lain yang disebut responden adalah Aksi Cepat Tanggap (6,13 %), PKPU (5,19%), Majelis Ulama Indonesia (4,53 %), Palang Merah Indonesia (3,21 %), Gugus Tugas Covid-19 (2,26%), Front Pembela Islam (1,51%), Badan Nasional Penanggulangan Bencana (1,32%) dan lainnya (16,13%).

“Temuan itu menunjukkan bahwa kepentingan warga tidak hanya berkaitan dengan penanggulangan bencana dan bantuan sosial yang diberikan, melainkan juga advokasi terhadap kepentingan publik di masa krisis. Karena pandemi Covid-19 telah menimbulkan krisis di berbagai sektor kehidupan masyarakat, tidak hanya mengancam kesehatan,” ujar Hafidz Muftisany selaku juru bicara LKSP (lksp.or.id., 2020).

Selain itu LKSP juga melakukan survei terhadap Kebijakan Ekonomi Nasional, Kebijakan Tenaga Kerja, Kenaikan Iuran BPJS dan Tetapnya Harga BBM secara bergantian dengan skala presentase yang beragam. survei LKSP lain juga menyebutkan bahwa terdapat beberapa organisasi masyarakat dan partai politik yang dipandang peduli terhadap kepentingan warga disaat pandemi. Partai politik yang dipandang peduli terhadap kepentingan warga di masa pandemi adalah: PKS (39,91%), Gerindra (22,23%) , PDIP (11,33%), Partai Demokrat (9,38 %), PKB (4,30%), PAN (4,15%), Golkar (2,05%), Nasdem (1,71%), dan PPP (0,78 %), yang menjawab tidak tahu (4,15 %).

Diagram 2 : Survei Kepedulian Lembaga yang Peduli Kepentingan Warga



Sumber : Ibtimes.id, 2020

Survei tersebut dilakukan pada 20-27 Mei 2020 melibatkan 2.047 responden di 34 provinsi seluruh Indonesia yang tersebar secara proporsional. Metode penentuan sampling menggunakan Krejcie-Morgan dengan margin of error 2.183 persen dan tingkat kepercayaan 95 persen. Responden dipilih secara acak dan proporsional pada tiap provinsi. Responden mengisi daftar pertanyaan secara daring, setelah dipastikan terkontak secara individual. MCCC juga terus melakukan perbaruan data tiap perkembangan harian pada website *Covid-1919.muhammadiyah.id*. Muhammadiyah sejak awal adalah organisasi yang memiliki fokus utama pada pelayanan dan kedermawanan sosial. Oleh karena itu, pembentukan MCCC tersebut sangatlah penting dan menjadi keharusan demi kemaslahatan umat (Menara62, 2020). Bukan hanya di bidang kesehatan masyarakat saja, namun Covid-19 juga sangat mengancam perekonomian, pendidikan, keagamaan, kondisi mental psikologi umat, dan seluruh aspek kemasyarakatan. Hal ini didorong oleh ajaran pendirinya, KH. Ahmad Dahlan yang dikenal dengan teologi Al-Ma'un dan teologi Al-Ashr (Ibtimes, 2020).

Harapan dan Komitmen MCCC

Dari eksternal Muhammadiyah, Agus S. mengucapkan terima kasih atas kepercayaan berbagai lembaga mitra baik komunitas, perguruan tinggi, swasta, dan lembaga donor internasional. Bentuk kemitraan berupa pendanaan yang bersifat umum. Cakupan program, khususnya dalam mempromosikan perilaku pencegahan yang akan melindungi kesejahteraan warga selama pandemi. Perilaku sasaran meliputi di rumah, jaga jarak fisik, cuci tangan dengan sabun, dan tidak menyentuh wajah. Kemudian, etika batuk atau bersin, memakai masker, diet sehat, isolasi diri, dan perilaku yang berkaitan dengan kesejahteraan anak seperti imunisasi, ANC, dan tindakan perlindungan anak. Program tersebut dilaksanakan di seluruh Indonesia. MCCC turut melaksanakan kegiatan-kegiatan rekrutmen dan pelatihan relawan, menjalankan mobil penerangan keliling, membuat fasilitas cuci tangan. Lalu, memfasilitasi rapat komunitas secara daring untuk membuat rencana kerja. Selain itu, MCCC merancang pembuatan dan mendistribusikan materi-materi sosialisasi. Yang mana, disampaikan melalui mobil penerangan keliling, pertemuan-pertemuan komunitas, sampai kampanye-kampanye di media sosial. Kerja sama meliputi edukasi lewat komunikasi, informasi, dan edukasi (KIE) sebanyak 1.700 panduan pencegahan di 34 kabupaten di Indonesia, 340 relawan melakukan edukasi keliling menggunakan kendaraan edukasi (mobil keliling). Ada pula 65 buah baliho edukasi protokol pencegahan Covid-19 di 13 provinsi, bahkan akan terus bertambah di provinsi lainnya. Setidaknya, Muhammadiyah telah mengerahkan relawan sebanyak 60.000 di berbagai wilayah Kabupaten maupun Kota. Apalagi, saat ini relawan sudah tidak bisa asal, tidak lagi hanya bermodalkan otot dan semangat, melainkan harus ada modal otak. Artinya, relawan ke depan harus dibekali kemampuan pengetahuan untuk kebencanaan, agar pergerakannya efektif, sesuai kebutuhan masyarakat yang terkena dampak.

Selain itu, MCCC mengupayakan pembuatan panduan-panduan untuk pencegahan penyebaran Covid-19, serta soal mekanisme, prosedur dan kemampuan menghadapi wabah. Cakupan kerja sama selanjutnya diseminasi informasi dan edukasi masyarakat, pembentukan *call center*, Layanan Dukungan Psikososial (LDP), latihan daring penggunaan APD untuk tenaga kesehatan, dan pembuatan *situation room* untuk. Terkait kelangkaan APD, MCCC bekerja dengan melibatkan banyak pihak untuk melakukan pengadaan APD. Untuk saat ini upaya extra ordinary yang dilakukan oleh Muhammadiyah terkait bencana nasional Covid-19, Muhammadiyah akan

membuat secara mandiri APD, melalui pengembangan rumah industri untuk pengadaan APD yang penting memenuhi syarat. MCCC mengajak seluruh komponen bangsa untuk tetap waspada, secara rasional menggunakan ilmu pengetahuan yang sesuai untuk bersama-sama merespons Covid-19. Jadi, seluruh elemen bangsa memberi kontribusi dengan kemampuan sendiri (Republika, 2020). Anjuran MCCC kepada masyarakat luas untuk tetap mengikuti anjuran Muhammadiyah dan pemerintah untuk membiasakan diri hidup bersih dengan jaga jarak, memakai masker, dan cuci tangan.

Gambar 1: Edukasi kepada Masyarakat di Magelang, Jateng &



Relawan MCCC beri edukasi pada warga.



Relawan Muhamamdiyah Covid-19 Command Centre (MCCC) saat memberikan Face Shield ke pedagang buah di Kota Bengkulu, Sabtu, 11 April 2020, Foto:Dok

Sumber : Dokumen Pribadi, 2020

Selain membentuk tim Muhammadiyah Covid-19 *Command Center* (MCCC) yang diketuai oleh dr Corona Rintawan, Persyarikatan Muhammadiyah juga menyatakan siap bekerja habis-habisan untuk melawan wabah Corona (Covid-19) dengan memaksimalkan semua jaringan yang ada dari Amal Usaha Muhammadiyah (AUM) hingga organisasi otonomnya. Dalam Konferensi Pers di Gedung Pusat Dakwah Muhammadiyah, Selasa (10/3) Dr. Corona Rintawan berharap dibentuknya MCCC dapat membantu pemerintah mengatasi wabah dengan penanggulangan yang rapi dan terstruktur. Muhammadiyah juga menyediakan 20 Rumah Sakit terbaiknya di pulau Jawa, Kalimantan dan Sumatera yang telah meraih akreditasi Paripurna (Bintang Lima) sebagai rumah sakit rujukan pasien terduga Covid-19. Sekitar 20 rumah sakit tersebut dinyatakan sudah siap secara prosedur baik penanganan, dekontaminasi hingga skenario kontigensi. Muhammadiyah juga menyiapsiagakan sekitar 30.000 AUM yang dimiliki untuk melakukan penyuluhan dan sosialisasi mengenai Covid-19 beserta cara pencegahannya. MCCC memiliki dua program berupa Safari (Sadar Faktor Resiko) dan Gemas (Gerakan Memberi Masker). Safari (Sadar Faktor Resiko) Covid -19 adalah

program pemberdayaan masyarakat untuk paham dan sadar apakah dirinya merupakan kelompok resiko atau tidak. Jika mendorong masyarakat untuk paham dan sadar, maka jelas ini akan mempermudah tugas pemerintah dalam melakukan tracking kelompok risiko. Selain kesadaran tersebut, diharapkan juga mampu mendorong orang-orang proaktif melakukan karantina mandiri. Sementara GEMES (Gerakan Memberi Masker) Covid-19 merupakan gerakan yang mendorong masyarakat memberikan masker kepada orang-orang yang sakit flu. Dengan gerakan ini akan mengubah kecenderungan egoisme dalam masyarakat menjadi kecenderungan untuk berbagi dan bersedekah. Dan sasaran yang paling efektif dalam menggunakan masker adalah yang sakit, bukan yang sehat. Selain itu Muhammadiyah juga mengoptimalkan peran takmir masjid/musholla dalam pencegahan di masjid/musholla melalui jamaah. Beberapa edukasi untuk jamaah adalah dengan membiasakan membawa sajadah sendiri-sendiri, meyempurnakan cuci tangan sesuai dengan prosedur selain menyempurnakan wudhu, dan menyarankan jamaah yang sakit tidak berjamaah ke masjid dahulu (Muhammadiyah.id, 2020).

Penutup

Covid-19 menjadi tantangan baru bagi dunia. Pasalnya penyebaran virus tersebut cepat dan mudah menular. Angka kematian yang terus bertambah, membuat kebijakan baru terus digencarkan. Salah satunya Indonesia, telah berupaya melakukan sosialisasi kepada masyarakat melalui informasi digital atau media massa. Selain itu, beberapa lembaga swasta maupun individu turut dalam menangani kasus Covid-19. Sebagai contoh MCCC, lembaga swasta yang dibawah komando sebuah ormas islam tersebsar melakukan langkah masif guna meminimalisir penyebaran virus. Berbagai prestasi ditorehkan oleh MCCC kepada masyarakat. Berbagai pelayanan berupa edukasi kesehatan kepada masyarakat, mitigasi, pengobatan dan psikososial telah menunjukkan bukti dan bakti untuk kemajuan negeri khususnya dalam menangani aspek kesehatan masyarakat. Hal tersebut menjadi prioritas utama MCCC sebagai wujud refleksi dari sebuah filantropi.

Merebaknya *Hoaxs* juga menjadi tantangan pemerintah dan masyarakat. sebagai lembaga sosial-kemanusiaan, MCCC menunjukkan langkah cepat dengan melakukan sosialisasi kepada masyarakat secaralangsung. Hal tersebut juga tengah dilakukan oleh beberapa lembaga lain seperti Gugus Tugas Covid-19, NU Peduli, serta peran secara personal dalam masyarakat. Temuan dalam penelitian ini pada dasarnya melihat bahwa aspek pemberian suatu informasi sangatlah penting. Bagaimana media memiliki pengaruh

cukup kuat dalam masyarakat, seakan gaya komunikasi dalam masyarakat juga mengikuti perkembangan. Teknologi yang ada seharusnya mampu membuat masyarakat terkoneksi satu sama lain. Perlu adanya upaya dan inovasi dalam mengembangkan teknologi. Aspek lain juga mengungkapkan bahwa ekonomi dan pembangunan yang belum merata juga menjadi salah satu penyebab kurangnya asupan informasi yang sehat kepada masyarakat. Kegelisahan menjadikan pola prespektif masyarakat terkait Covid-19 beragam (dalam arti menyikapinya). Pada akhirnya, konflik akan bermunculan sebagai bentuk kekecewaan. Hal tersebut terjadi karena masyarakat menganggap bahwa penanganan seputar Covid-19, baik segi informasi maupun fasilitas masih memiliki kekurangan. salah satu peranan penting seperti pemberian informasi dan praktek teknologi yang menjadi kebutuhan sosial. Dalam komunikasi adalah suatu proses dengan mana kita bisa memahami dan dipahami oleh orang lain. Seharusnya ada upaya persuasif dan lebih dikosentrasikan paling utama dalam penanganan Covid-19. Koordinasi dan kerjasama harus lebih terfokus pada penanganan wabah.

Sebagai lembaga filantropi, MCCC memiliki cukup prestasi dalam perlawanannya melawan Covid-19. Dalam pandangan peneliti, menunjukkan adanya tingkat kepuasan dalam masyarakat terkait langkah masif MCCC. Sebagai bukti melumpuhkan *Hoaxs* yang beredar dalam masyarakat, MCCC melakukan sidak lapangan (memberikan edukasi) secara langsung. Selain itu, MCCC juga berkolaborasi dan menjalin koordinasi terhadap pemerintah dan masyarakat sipil lainnya. Kegiatan yang dilakukan sebagai bentuk ilmiah dalam menghadapi suatu kondisi yang membahayakan kehidupan umat manusia. Harapannya dengan penelitian ini, setidaknya menunjukkan bahwa langkah utama dalam menghadapi suatu masalah adalah dibutuhkan komunikasi antar pihak. Selain itu, perlu adanya kerjasama dalam kaitannya seputar informasi. Selanjutnya sebagai bukti nyata, perlu adanya aksi nyata di lapangan. Terkait adanya permasalahan yang timbul di beberapa wilayah tertentu, hal tersebut perlu adanya sebuah penelitian lebih lanjut.

Kemungkinan yang terjadi adalah terdapat ketidaksempurnaan dalam penelitian yang peneliti lakukan. Selain itu, juga memberikan sedikit rekomendasi untuk menjadikan penelitian ini menjadi suatu refleksi antar pihak guna mematangkan segala kegiatan yang ada saat pandemi berlangsung. Maka dari itu, peneliti memberikan suatu rekomendasi penelitian sebagai berikut : (1) Kepada pemerintah dalam seluruh tatanan birokrasi, baik pusat maupun daerah agar melakukan tindakan penelitian yang cepat dan tepat sebelum melakukan tindakan berupa kebijakan. Selain itu, upaya

agar tetap transparan dalam menjalankan pemerintahan yang demokratis (untuk rakyat, oleh rakyat). Pandemi Covid-19 dalam ranah ilmiah sangat menentukan keberlangsungan umat manusia. Perlu adanya kerjasama dan koordinasi dalam internal maupun eksternal negara, serta upaya tindakan konsentrasi (arah kebijakan) lebih memfokuskan pada aspek kesehatan dan keselamatan masyarakat; (2) Kepada seluruh elemen masyarakat (*civil society*) mengupayakan agar keselamatan menjadi salah satu aspek yang pokok (utama), mengingat Virus Covid-19 bukan persoalan yang biasa. Perlu adanya kepercayaan, sikap kritis dan memberi saran (secara persuasif) kepada pemerintah dalam menerima serta mengelola segala informasi yang ada; (3) Kepada akademisi atau para peneliti lain agar melakukan kajian penelitian secara mendalam seputar kasus Covid-19. Penelitian yang dilakukan pada penelitian ini belum memiliki titik kesempurnaan dalam menunjukkan secara objektif aspek permasalahan. Karenanya dibutuhkan data lapangan yang menjadi acuan kesempurnaan suatu penelitian.

Daftar Pustaka

Referensi Buku

- Ahmad Faizin Karimi dan David Efendi. 2020. *Membaca Corona : Essai-essai tentang manusia, wabah dan dunia.* (Gresik : Caremedia Communication).
- M. Nazir, “Metode Penelitian” (Jakarta: Ghalia Indonesia)
- Hilman Latief, *Melayani Umat : Filantropi Islam dan Ideologi Kesejahteraan Kaum Modernis.* 2020. (Yogyakarta : Penerbit Suara Muhammadiyah).

Jurnal

- Nur R. Y., Kebijakan Pemberlakuan Lockdown Sebagai Antisipasi Penyebaran Corona Virus Covid-19, *Jurnal Sosial & Budaya Syar-i, FSH UIN Syarif Hidayatullah.* Vol. 7, No. 3, 2020.
- Nailul Mona, Konsep Isolasi Dalam Jaringan Sosial Untuk Meminimalisasi Efek Contagious (Kasus Penyebaran Virus Corona Di Indonesia), *Jurnal Sosial Humaniora Terapan,* Vol. 2 No.2, 2020.
- Husnul Khatimah, Posisi Dan Peran Media Dalam Kehidupan Masyarakat, *UIN Sunan Gunung Djati,* Vol. 16, No. 1, 2018.
- Dedi Kusuma Habibie, Dwi Fungsi Media Massa, *Jurnal Ilmu Komunikasi,* Vol. 7, No. 2, Desember 2018
- Dewi Widowati, Efek Media Massa Terhadap Khalayak, *Jurnal Adzikra,* Vol. 03, No. 1, 2012
- Dedi Rianto Rahadi, Perilaku Pengguna Dan Informasi Hoax Di Media Sosial, *Universitas Presiden,* Vol. 5, No. 1, 2017
- Qi Mangku B., Pengembangan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Melalui Kegiatan Filantropi (Studi Kasus Lembaga Tazakka DIII Perbankan

- Syariah IAIN Salatiga), Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan, Vol. 10, No.2, 2016. 476
- Khatibah, Penelitian Kepustakaan, Jurnal Iqra' Vol. 05, No.01. 2011.
- Ahmadin, Konflik Sosial Antar Desa Dalam Perspektif Sejarah Di Bima, JIME, Vol. 3. No. 1. 2017.
- Andi Eka Putra, Membangun Komunikasi Sosial Antaretnik: Perspektif Sosiologi Komunikasi, Vol.XII, N0.1, 2017.
- Christiany Juditha, Interaksi Komunikasi Hoax di Media Sosial serta Antisipasinya Hoax Communication Interactivity in Social Media and Anticipation, Jurnal Pekommas, Vol. 3 No. 1, April 2018

Situs Berita

Sumber: infeksiemerging.kemkes

[https://www.kompas.com/tren/read/2020/06/11/082000765/update-virus-Corona-dunia-11-juni--7-4-juta-orang-terinfeksi-perkembangan.](https://www.kompas.com/tren/read/2020/06/11/082000765/update-virus-Corona-dunia-11-juni--7-4-juta-orang-terinfeksi-perkembangan)

<https://amp.beritasatu.com/digital/622361-kominfo-hoax-pandemi-Covid-1919-capai-500-kasus>

<https://Covid-1919.muhammadiyah.id/>

<https://jogja.tribunnews.com/2020/04/15/65-rumah-sakit-muhammadiyah-dan-aisyiyah-sudah-menangani-pasien-Covid-19>

<https://www.google.com/amp/s/m.republika.co.id/amp/qazfum399>

<http://m.muhammadiyah.or.id/id/news-18597-detail-dipimpin-dr-Corona-muhammadiyah-Covid-1919-command-center-berupaya-bantu-pemerintah-lakukan-penanggulangan.html>

<https://www.goodnewsfromindonesia.id/2020/03/25/di-rumahaja-kontribusi-kita-bersama-negara-lawan-Corona>

<https://bebas.kompas.id/baca/riset/2020/04/21/partisipasi-publik-menghadapi-Covid-19/>

<https://ibtimes.id/perang-melawan-hoax-lewat-medsos-dan-jurnalistik/>

<https://menara62.com/pimpinan-daerah-muhammadiyah-kota-pasuruan-membentuk-mccc/>

<http://www.umm.ac.id/id/muhammadiyah/18715.html>

Peningkatan Penggunaan Media Sosial pada Aktivitas Mahasiswa dan Pelajar di Yogyakarta

Nurma Rafiki

*Prodi Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan
Humaniora, UIN Sunan Kalijaga
Email: nurmarafiki.nr@gmail.com*

Pendahuluan

Adanya pandemi Covid-19 kini sudah menjadi masalah yang sangat serius yang mana tidak hanya menjadi masalah di ranah medis saja. Akan tetapi semakin meluasnya penyebaran dan penularan penyakit tersebut membuat negara-negara di berbagai dunia berpacu dengan waktu dan ketidaksiapan mereka untuk segera menemukan solusi yang tepat untuk menyelesaikan wabah Covid-19 ini. Beberapa kebijakan sudah dikeluarkan oleh pemerintah, seperti karantina wilayah (*lockdown*) dan *social distancing*. Adapun telah menyebabkan terjadinya banyak perubahan sosial di lapisan masyarakat. Salah satunya dalam kegiatan komunikasi yang mana pada masa pandemi ini pemerintah telah menerapkan adanya *social distancing* atau pembatasan sosial. Hal ini berhubungan dengan kegiatan interaksi dan komunikasi secara langsung yang mulai dibatasi. Oleh karena itu, perlu didukung dengan teknologi komunikasi sebagai media yang menjembatani kegiatan komunikasi antar sesama. Masyarakat sebisa mungkin dituntut untuk bisa dan terbiasa dengan perubahan yang perubahan yang ada. Menurut hasil survei dari *Hootsuite Indonesian Digital Report 2020* adapun data penggunaan media sosial pada tahun 2020 terdapat kenaikan seperti halnya pengguna *Youtube* di Indonesia sebanyak 88%, pengguna *WhatsApp* sebanyak 84%, pengguna *Facebook* sebanyak 82%, dan pengguna *Instagram* sebanyak 79%. Yang dapat dilihat mulai terjadi adanya perubahan sosial setelah adanya pandemi Covid-19 ini.

Selain itu Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate telah mengajak masyarakat untuk menggunakan ruang digital melalui perangkat digital maupun telepon pintar secara cerdas di tengah pandemi Covid-19. Hal ini berkaitan dengan langkah-langkah untuk menghadapi adanya perubahan sosial, khususnya pada media komunikasi. Pada masa pandemi

ini, Menteri Komunikasi dan Informatika mengingatkan masyarakat untuk tidak memproduksi dan mengedarkan *hoax*, karena tindakan tersebut akan memiliki konsekuensi hukum. Kementerian Kominfo mencatat setidaknya lebih dari 1.000 *hoax* terkait Covid-19 tersebar di *platform* digital. (kominfo.go.id,25/6/20). Selain itu, perubahan sosial yang terjadi akibat dari adanya pengurangan interaksi sosial melalui *social distancing* sebagai upaya pencegahan penyebaran Covid-19 yang lebih meluas lagi, masyarakat dihimbau untuk melakukan pembatasan penggunaan fasilitas umum dan menjaga jarak interaksi. Adanya media komunikasi ini bisa menjadi salah satu alternatif yang dapat digunakan. Meskipun bagi sebagian orang ini merupakan belum terbiasa dengan berbagai aktivitas yang dilakukan secara virtual. Oleh karena itu, masyarakat perlu melakukan adaptasi terkait adanya perubahan sosial yang ada. Dengan demikian, masyarakat dihimbau untuk tidak terlalu cemas dan panik dengan perubahan sosial yang terjadisaat ini. Hal ini terpaksa diterapkan, karena tuntutan kondisi pandemi Covid-19 ini.

Dengan adanya perubahan sosial dan peningkatan penggunaan media sosial, seperti *WhatsApp*, *Instagram*, *Google Classroom*, *Zoom*, *TikTok*, dan *Facebook*. Selain itu, menurut survei ditemukan adanya peningkatan penggunaan media sosial seperti *WhatsApp* dan *Instagram* mengalami lonjakan hingga 40% selama pandemi virus Corona. Sebab banyak orang menggunakan media sosial untuk berkomunikasi di tengah karantina wilayah atau *lockdown*. Yang banyak dijadikan alat alternatif untuk komunikasi apalagi menjelang Hari Raya Idul Fitri lalu yang banyak digunakan untuk berkomunikasi dan bersilaturahmi secara virtual. Menurut Survei Firma konsultan Kantar, menyatakan pengguna *WhatsApp* terus tumbuh dari hari ke hari. Pada hari-hari awal pandemi, penggunaan aplikasi tersebut secara global melonjak sampai 27% kemudian melonjak hingga 40%. Sedangkan penggunaan *WhatsApp* khusus di negara-negara yang sudah dalam fase krisis pandemi melonjak hingga 51%. Di pasar individu, penggunaan itu mungkin bahkan lebih tinggi lagi. Seperti contoh penggunaan *WhatsApp* di Spanyol meroket hingga 76%.

Adapun hal yang menarik dari penelitian ini yakni akan membahas tentang migrasi digital yang terjadi selama pandemi Covid-19 ini dengan melihat adanya peningkatan dalam penggunaan media sosial yang ada. Selain itu penelitian ini juga akan menganalisis bagaimana saja bentuk perubahan sosial yang telah terjadi setelah adanya Covid-19 hingga masuk pada era *new normal*. Serta mengetahui seberapa besar pengaruh yang dapat ditimbulkan dalam berbagai bidang, khususnya pada bidang pendidikan dan pembelajaran serta lain-lain.

Pengertian Virus Corona, Media Sosial, dan Perubahan Sosial Virus Covid-19

Adapun virus Covid-19 merupakan bagian dari virus yang menyebabkan penyakit pada manusia dan hewan. Adapun bagi manusia biasanya menyebabkan penyakit infeksi saluran pernapasan, mulai flu biasa hingga penyakit yang serius seperti MERS dan SARS yang merupakan virus jenis baru yang ditemukan pada manusia sejak kejadian yang muncul di Wuhan, Cina. Pada Desember 2019 lalu, kemudian diberi nama *Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2* (SARS-COV2), dan menyebabkan *penyakit Coronavirus Disease-2019* (Covid-19). (Roida & Yuni Fitriani, Jurnal JASAMAR, Vol. 4, 2020:34)

Pengertian Perubahan Sosial

Perubahan merupakan proses yang terus menerus terjadi dalam setiap masyarakat. Proses perubahan itu ada yang berjalan sedemikian rupa sehingga tidak terasa oleh masyarakat pendukungnya. Gerak perubahan yang sedemikian itu disebut evolusi. Sosiologi mempunyai gambaran adanya perubahan evolusi masyarakat dari masyarakat sederhana ke dalam masyarakat modern. Proses gerak perubahan tersebut ada dalam satu rentang tujuan ke dalam masyarakat modern. Berangkat dari pemikiran Teori Evolusi Comte tentang perubahan sosial. Titik tolak pemikiran Comte adalah pandangannya tentang masyarakat dengan memanfaatkan konsep-konsep biologi yang dapat diringkas (Martono & Nanang, 2011:8-9).

Sedangkan menurut Willian Ogburn, perubahan sosial adalah perubahan yang meliputi unsur-unsur kebudayaan, baik unsur material maupun non-material. Namun yang ditekankan adalah pengaruh unsur material terhadap non-material. Yang dimaksud unsur material kebudayaan adalah benda-benda yang diciptakan oleh manusia, misalnya teknologi. Yang dimaksud dengan unsur non-material adalah hasil kebudayaan yang bersifat lebih abstrak, seperti ide, ideologi, dan kepercayaan (Nur Indah & Okta, 2014:6-7).

Pengertian Komunikasi dan Media Digital

Komunikasi adalah aktivitas yang dilakukan seseorang (komunikator) terhadap orang lain (komunikan) dengan tujuan tersampainya sebuah pesan (*message*) dengan menggunakan alat bantu atau langsung (*channel*). Hal ini bersumber dari pola komunikasi yang biasa dilakukan oleh masing-masing manusia dalam berkomunikasi personal ataupun kelompok sosial. Pola komunikasi yang sering dilakukan oleh manusia adalah antarpersonal, sehingga menjadi komunikasi interaktif, satu sama lain memerlukan *feedback*

untuk melanjutkan tujuan dari komunikasi itu sendiri. (Bungin & Burhan, *Sosiologi Komunikasi*, 2014).

Media baru merupakan istilah yang dipakai untuk semua bentuk media komunikasi massa yang berbasiskan teknologi komunikasi dan dan teknologi informasi. Media baru yang memiliki ciri tersebut adalah Internet. Internet adalah jaringan kabel, telepon, dan satelit yang menghubungkan komputer (Vivian, 2008:263). Media baru merupakan sebuah sebutan untuk menjelaskan konvergensi antara teknologi komunikasi digital yang terkomputerisasi serta terhubung ke dalam jaringan. (Suahya, *Jurnal Komunikasi*, Vol.2, 2013:12)

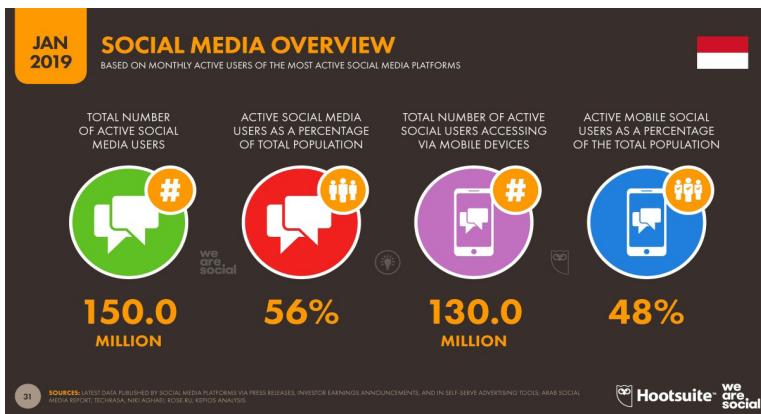
Jika dilihat dari teori komunikasi, *social distancing* merupakan bentuk konsep yang secara teoritik. Diketahui bahwa dalam *social distancing*, jarak menjadi salah satu komponen yang paling vital. Menurut Judee K. Burgoon, menyatakan bahwa perubahan tidak terduga yang terjadi dalam jarak perbincangan antara komunikator dapat menimbulkan perasaan yang tidak nyaman, bahkan rasa marah dan sering kali ambigu. Hal ini mengandung makna adanya pelanggaran harapan (*expectancy violation*). Makna dibalik pelanggaran harapan (*expectancy violation*) disini lebih mengarah kepada sebuah dugaan atau prediksi. Burgoon menyatakan bahwa manusia memiliki kebutuhan akan afiliasi dan ruang pribadi. Dalam artian bahwa manusia selalu ingin dekat secara fisik dengan manusia lainnya terutama orang yang memiliki kedekatan personal dengan kita. Meskipun dengan adanya *social distancing* mengakibatkan manusia tidak dapat berinteraksi dan berkomunikasi secara langsung, akan tetapi masih dapat melakukan komunikasi dengan menggunakan media digital atau media *online*.

Dengan adanya pandemi Covid-19 ini media komunikasi digital sangat diperlukan sebagai alat yang dapat menjembatani komunikasi antar sesama. Meskipun sebagian orang masih belum terbiasa dan menolak, akan tetapi masyarakat dituntut agar dapat membiasakan diri untuk beradaptasi dengan pengalihan berbagai aktivitas dari ruang fisik ke ruang virtual. Adapun dampak sosial yang dapat kita lihat saat ini dari adanya pandemi Covid-19 yaitu manusia satu dengan yang lainnya menjadi anti dan takut akan mati akibat Covid-19. Timbulnya prasangka buruk yang muncul apabila terdapat orang bersin atau batuk, takut berdekatan karena takut tertular, bahkan penolakan jenazah Covid-19 pada pemakaman umum di beberapa daerah, membuat rasa kemanusiaan menjadi berkurang akan kepedulian yang masih hidup dan yang sudah meninggal sekalipun. (CNN Indonesia, 10 April 2020)

Penggunaan Media Sosial Sebelum Adanya Pandemi Covid-19

Penggunaan media digital seperti *WhatsApp*, *Instagram*, *Facebook*, *TikTok*, dan lain-lain sebenarnya sudah banyak digunakan pada era 4.0 ini bahkan jauh sebelum adanya pandemi Covid-19. Penggunaan media digital terus berkembang seiring berjalannya waktu, bahkan diberbagai sektor kehidupan yang sangat mempengaruhi. Sebelum adanya wabah pandemi Covid-19, masyarakat banyak disibukkan dengan berbagai aktivitas melalui komunikasi sosial yang dapat dilakukan tanpa kontak fisik atau tatap muka. Artinya masyarakat tetap bisa melakukan interaksi sosial dengan menggunakan teknologi komunikasi, terutama media sosial. Perkembangan media digital yang semakin canggih juga sudah banyak digunakan dalam berbagai bidang, seperti dalam bidang pendidikan dan pemasaran. Selain itu, proses digitalisasi sebenarnya sudah banyak direalisasikan di berbagai lapisan kehidupan.

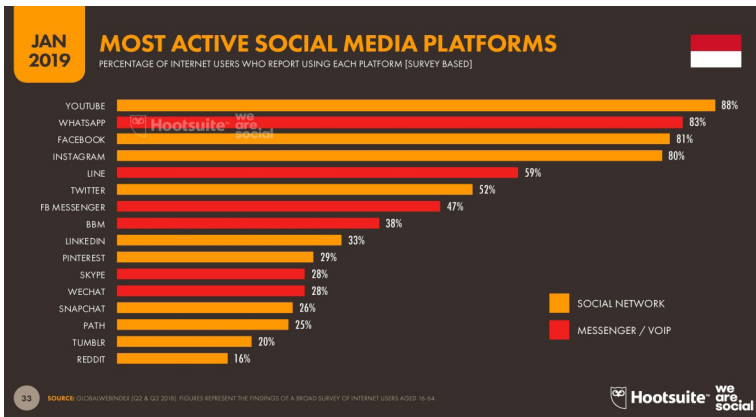
**Grafik 1. Data Perkembangan Penggunaan Media Sosial
di Indonesia Tahun 2019**



Sumber : <https://websindo.com/indonesia-digital-2019-media-sosial/>

Infografis diatas menggambarkan tentang perkembangan pengguna media sosial. Total pengguna mencapai 150 juta pengguna, ini berarti mayoritas penggunaan internet untuk bersosialisasi melalui media sosial. Jumlah pengguna media sosial ini mencapai 56% dari jumlah total penduduk Indonesia, dengan pengguna berbasis *mobilenya* mencapai 130 juta. Tidak heran jika semua *platform* media sosial akhirnya fokus untuk optimalisasi aplikasinya di *mobile*.

Grafik 2: Penggunaan Media Sosial di Indonesia Tahun 2019



Sumber : <https://websindo.com/indonesia-digital-2019-media-sosial/>

Menurut hasil survei dari *Hootsuite Indonesian Digital Report 2019* menyebutkan, *Youtube* menjadi yang paling teratas dalam persentasenya yaitu 88% dari jumlah pengguna internet Indonesia. diikuti oleh layanan dibawah naungan grup perusahaan besutan Mark Zuckerberg, yaitu *WhatsApp*, *Facebook*, dan *Instagram*. Adapun pengguna aplikasi *WhatsApp* tercatat sebanyak 83% jumlah pengguna internet Indonesia yang sebanyak 171 juta adalah 143 juta pengguna. Indonesia merupakan salah satu negara dengan jumlah pengguna *WhatsApp* paling banyak di dunia.

Penggunaan Media Sosial Sesudah Adanya Pandemi Covid-19

Adanya pandemi Covid-19 ini mengakibatkan perubahan sosial saat ini yang sejalan dengan perkembangan teknologi komunikasi melalui digitalisasi yang tanpa kita sadari sudah merealisasikannya. Berbagai media komunikasi dijadikan sarana untuk dapat menjembatani komunikasi yang ada. Dengan adanya media-media tersebut tentunya dapat memberikan edukatif, informatif, dan persuasif. Ada beberapa media sosial diantaranya *Youtube*, *Twitter*, *Facebook*, *Instagram*, *Line*, *WhatsApp*, dan lain-lain. Dalam kegiatan belajar mengajar sebenarnya media komunikasi digital bukanlah hal yang baru. Hanya saja penerapan penggunaan media komunikasi digital seperti *WhatsApp*, *Google Classroom*, dan *Zoom* masih terbatas ditingkat pendidikan tertentu saja tidak menyeluruh yang banyak digunakan pada tingkat Perguruan Tinggi saja.

Adapun ketika pada masa pandemi ini penggunaan media sosial menjadi meningkat mengingat adanya pengaruh dari kebijakan yang sudah diterapkan oleh pemerintah untuk menanggulangi permasalahan Covid-19 ini. Seperti kebijakan *lockdown* dan karantina yang dimana masyarakat mulai dibatasi melakukan interaksi secara fisik. Berbeda dengan kondisi sekarang dimana para pelajar terpaksa harus menjalani kegiatan belajar dari rumah dengan melalui media komunikasi digital seperti *WhatsApp*, *Google Classroom*, dan *Zoom* yang sekarang banyak digunakan sebagai sarana komunikasi dan pembelajaran. Selain itu, rapat dan pembelajaran banyak dilakukan di rumah dengan menggunakan berbagai media aplikasi seperti *Zoom*, *Google Meet*, dan lain-lain secara virtual. Selain itu, banyak pemasaran produk melalui berbagai aplikasi yang sudah disediakan salah satunya aplikasi *TikTok* yang baru-baru ini sangat diminati baik dari kalangan muda sampai kalangan tua. Menurut survei data sensor tower aplikasi *TikTok* mencatat kenaikan pengguna di Indonesia sekitar 20% selama pandemi Covid-19 ini. Yang banyak diunduh dan digunakan selain menjadi media hiburan juga bisa digunakan sebagai media pembelajaran dan pemasaran juga.

Selain itu menurut survei ditemukan adanya peningkatan penggunaan media sosial seperti *WhatsApp* dan *Instagram* mengalami lonjakan hingga 40% selama pandemi virus Corona. Sebab, banyak orang menggunakan media sosial untuk berkomunikasi di tengah karantina wilayah atau *lockdown*. Yang banyak dijadikan alat alternatif untuk komunikasi apalagi menjelang Hari Raya Idul Fitri lalu yang banyak digunakan untuk berkomunikasi dan bersilaturahmi secara virtual. Menurut Survei Firma konsultan Kantar menyatakan pengguna *WhatsApp* terus tumbuh dari hari ke hari. Pada hari-hari awal pandemi, penggunaan aplikasi tersebut secara global melonjak sampai 27%, kemudian melonjak hingga 40%. Sedangkan penggunaan *WhatsApp* khusus di negara-negara yang sudah dalam fase krisis pandemi melonjak hingga 51%. Di pasar individu, penggunaan itu mungkin bahkan lebih tinggi lagi.

Seperti contoh, penggunaan *WhatsApp* di Spanyol meroket hingga 76%. Lebih lanjut Kantar menyebut rentang usia 18 hingga 34 tahun paling banyak menggunakan media sosial itu. Begitu juga dengan media sosial milik *Facebook*, lainnya *Instagram*. Dalam demografi yang sama, penggunaan *Instagram* juga melonjak lebih dari 40%. Berdasarkan data *Facebook*, total pesan pada *platform*, baik *Messenger*, *Instagram*, maupun *WhatsApp* naik lebih dari 50% pada Maret dibandingkan bulan lalu. *Facebook* juga mengklaim panggilan grup yang mencakup tiga atau lebih peserta naik lebih dari 1.000%

sejak bulan lalu. Kantar melaksanakan survei terhadap lebih dari 25 ribu konsumen di 30 pasar pengguna *WhatsApp* dan *Instagram*. Survei dilakukan dari 14 hingga 24 Maret 2020.

Perubahan Penggunaan Media Digital Pada Masa Pandemi

Disadari atau tidak perubahan dalam masyarakat itu pasti terjadi, meskipun terkadang perubahan didalamnya tidak selamanya mencolok atau sangat berpengaruh terhadap kehidupan luas, jika dikaitkan dengan konsep Perubahan Sosial. Berbicara mengenai perubahan, kita membayangkan sesuatu yang terjadi setelah jangka waktu tertentu, kita berurusan dengan perbedaan keadaan yang diamati antara sebelum dan sesudah jangka waktu tertentu, untuk dapat mengetahuinya harus diketahui dengan cermat meskipun terus berubah. Rogers *et.al.* mengemukakan bahwa Perubahan Sosial adalah suatu proses yang melahirkan perubahan-perubahan di dalam struktur dan fungsi dari suatu sistem kemasyarakatan. Sedangkan Selo Soemardjan dan Soelaeman Soemardi mengemukakan bahwa Perubahan Sosial diartikan sebagai suatu variasi dari cara-cara hidup yang telah diterima, baik karena perubahan-perubahan kondisi geografis, kebudayaan material, komposisi penduduk, ideologi, maupun karena adanya difusi atau penemuan-penemuan baru dalam masyarakat tersebut. Soerjono Soekanto merumuskan bahwa Perubahan Sosial adalah segala perubahan-perubahan pada lembaga-lembaga kemasyarakatan di dalam suatu masyarakat, yang mempengaruhi sistem sosialnya, termasuk didalamnya nilai-nilai, sikap-sikap, dan pola perilaku diantara kelompok-kelompok dalam masyarakat (Elly Rosana, 2011: 34-35).

Bentuk - bentuk perubahan sosial dalam peningkatan penggunaan media sosial yang ada sebagai dampak adanya pandemi Covid-19 diantaranya :

1. Adanya Perubahan Penggunaan *Video Call*

Terdapat kenaikan sebanyak 31,4% masyarakat mengalami kenaikan penggunaan *video call* selama masa pandemi. Meski begitu, mayoritasnya mengaku menggunakan *free internet call*, seperti *WhatsApp Call*. Di masa pandemi sebelumnya juga sudah sering digunakan, tapi ada kenaikan signifikan sebelum. Lalu, ternyata 36,6% peningkatannya di luar Jabodetabek, jadi sudah mulai *swift video call* untuk komunikasi baik urusan profesional maupun tidak. Hal ini digunakan sebagai sarana alternatif untuk berkomunikasi antara satu dengan yang lain. Dengan adanya pandemi Covid-19 ini sebisa mungkin mengurangi kontak fisik secara langsung. Oleh karena itu media sosial *WhatsApp*,

Google Classroom, *Zoom*, dan lain-lain ini dapat digunakan juga sebagai media komunikasi, pembelajaran, dan pemasaran.

2. Kebiasaan *Streaming* Film

Dalam kondisi pandemi Covid-19 ini masyarakat dihimbau untuk sebisa mungkin berdiam diri di rumah dan mengurangi aktivitas yang dilakukan di luar. Hal ini mengakibatkan adanya kebiasaan yang terbentuk dalam masyarakat, seperti salah satunya dengan *streaming* film. Menurut *Online Video Conference* naik 33,5% saat pandemi, sama halnya *online video* atau *movie streaming* dari 76,6% menjadi 85,5%.

3. Perubahan Hal yang Dicari Saat Memakai Internet

Jika sebelum Covid-19 merebak urutan yang dicari masyarakat saat memakai suatu jaringan adalah kualitas jaringan, harga yang terjangkau dan *bundling* menarik, kini urutannya berubah. Setelah wabah Covid-19, ada pertimbangan yakni yaitu kualitas jaringan, harga yang murah, disusul kecepatan jaringan. Namun yang menarik, terjadi peningkatan sebesar 12,1% untuk pertimbangan kecepatan jaringan, 5,7% soal urusan harga, dan 1,6% untuk kualitas jaringan.

4. Penggunaan Kuota Internet

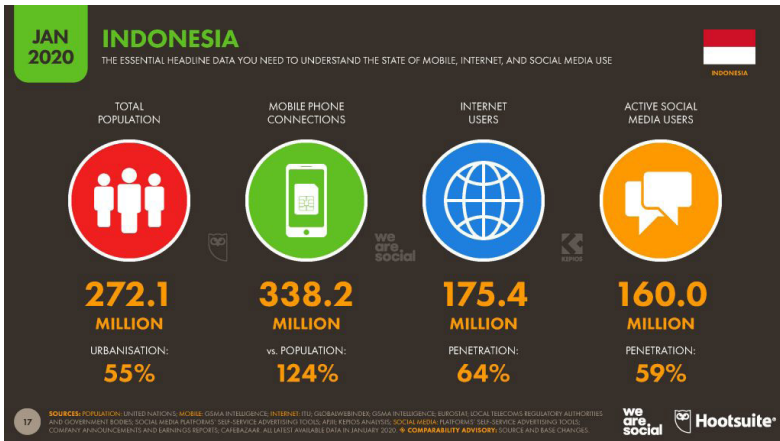
Adanya peningkatan penggunaan kuota internet yang semula 14,5% kuota di atas 150 ribu per bulan menjadi 19,4%, sebanyak 88,7%. Responden mengaku akan menggunakan kuota yang sebelumnya, namun ada 11% yang sepertinya akan membuat *behaviour* baru katanya. “Dapat disimpulkan bahwa peningkatan penggunaan internet tidak dapat dihindari. Stabilitas internet pun tidak dimungkiri menjadi krusial. Kendati begitu, pelanggan kemungkinan akan kembali ke kebiasaan terdahulu mereka sebelum pandemi Covid-19 ini. Selain itu peningkatan *service* sangat penting karena *work from home* kemungkinan akan diperpanjang untuk memaksimalkan usaha memutus mata rantai Covid-19, maka kami menganggap *network quality* akan banyak dipilih yang stabil,” tutupnya (detik.com, 20 April 2020).

5. Metode Belajar di Masa *New Normal*

Dengan kondisi pandemi Covid-19 ini berbagai kegiatan belajar dan mengajar tidak dapat dilakukan secara kondusif seperti biasanya. Oleh karena itu, kegiatan belajar mengajar mulai diberlakukan secara daring atau *online* selama masa pandemi Covid-19 ini. Adanya berbagai aplikasi digital sudah banyak ditawarkan yang dapat dijadikan alternatif solusi sebagai media pembelajaran daring, misalnya *Zoom*, *Google Meet*, *Google Classroom*, *WhatsApp* (WA), dan lain-lainnya. Sebagai sebuah

media komunikasi yang digunakan untuk media pembelajaran berbasis digital yang cukup banyak menawarkan sejumlah kemudahan dan kenyamanan dengan karakteristik masing-masing. Namun demikian, kemudahan dan kenyamanan itu hanya dapat dinikmati oleh mereka yang telah memiliki literasi digital dalam kategori minimal cukup. Sebaliknya, bagi mereka yang belum atau tidak memiliki literasi digital dalam kategori cukup, maka pembelajaran daring merupakan sesuatu yang membebani dan bahkan memberatkan. Pemerintah melalui keputusan bersama Kemendikbud, Kemenag, Kemenkes, dan Kemendagri pada tanggal 15 Juni 2020 telah merencanakan penerapan era *New Normal* dalam dunia pendidikan secara bertahap dengan tetap memperhatikan kondisi wilayah dan protokol kesehatan yang ketat. Namun demikian, bagi para orang tua atau wali di tingkat dasar dan menengah bebas memilih antara tetap belajar dari rumah atau masuk sekolah, jika memang masih khawatir akan keselamatan putra putrinya dari pandemi Covid-19. (radarjember.jawapos, 2020)

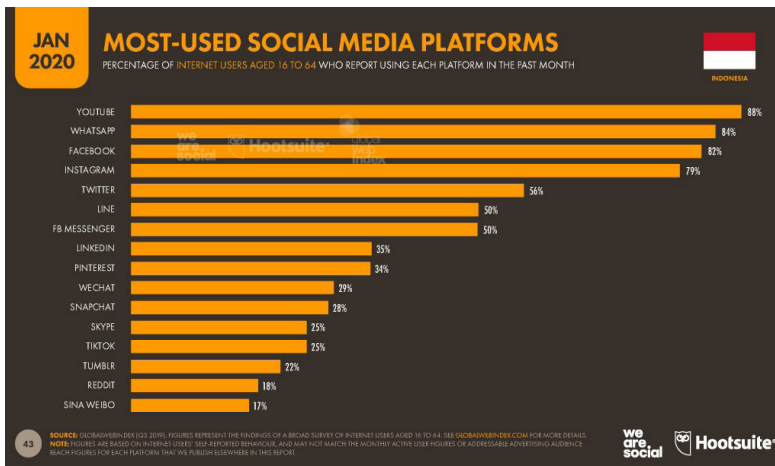
Grafik 3: Perkembangan Penggunaan Media Sosial Tahun 2020



Sumber : <https://andi.link/hootsuite-we-are-social-indonesian-digital-report-2020/>

- Total Populasi (jumlah penduduk): 272,1 juta
- Pengguna Mobile Unik: 338,2 juta
- Pengguna Internet: 175,4 juta
- Pengguna Media Sosial Aktif: 160 juta

Grafik 4: Penggunaan Media Sosial di Indonesia Tahun 2020



Sumber : <https://andi.link/hootsuite-we-are-social-indonesian-digital-report-2020/>

- Pengguna Youtube di Indonesia sebanyak 88% dari jumlah populasi.
- Pengguna WhatsApp di Indonesia sebanyak 84% dari jumlah populasi.
- Pengguna Facebook di Indonesia sebanyak 82% dari jumlah populasi.
- Pengguna Instagram di Indonesia sebanyak 79% dari jumlah populasi.

Hal diatas juga merupakan bagian adanya perubahan sosial yang terjadi di masyarakat. Di era pandemi Covid-19 ini, banyak sekali perubahan yang terjadi di sekitar kita, baik disadari maupun tidak disadari secara langsung. Pandemi Covid-19 telah banyak mengubah berbagai tatanan kehidupan sosial yang terjadi di masyarakat. Seperti halnya perubahan yang terjadi pada media komunikasi digital saat ini, yang sangat populer digunakan. Berkaitan dengan adanya kebijakan pemerintah tentang social distancing atau *physical distancing*. Social distancing yang telah menjadi istilah yang sangat populer hampir di seluruh kalangan masyarakat Indonesia. Kebijakan social distancing ini menjadi salah satu kebijakan yang diterapkan sebagai solusi untuk mengurangi penularan Covid-19 yang lebih luas lagi. Oleh karena itu, masyarakat dianjurkan untuk berkomunikasi dan melakukan berbagai aktivitas dari jarak jauh (Jeratallah & Yogi, 2020: 97-98).

Jika ditinjau konsep Teori Perubahan Sosial Karl Marx dalam bukunya yang berjudul “On Society and Social Change”, ia membagi struktur sosial masyarakat ke dalam dua struktur, yaitu struktur dasar (basic structure), berupa cara dan alat produksi (persoalan ekonomi), dan suprastruktur terdiri dari

realitas abstrak, yaitu kesadaran dan realitas terinstitusional, seperti agama, keluarga, politik, hukum, budaya, dan lain-lain. Menurut Marx, Perubahan Sosial didorong oleh adanya posisi dan situasi basic struktur (ekonomi), sehingga tatanan suprastruktur (agama, budaya, sosial, keluarga, politik, dan lain-lain) akan sangat ditentukan oleh basic struktur (ekonomi). Berdasarkan realitas sosial yang terjadi di masyarakat saat ini, faktor utama (basic struktur) pendorong perubahan sosial di masyarakat adalah disebabkan karena adanya virus Covid-19, yang telah mengubah bangunan suprastruktur (ekonomi, budaya, hukum, relasi sosial, kesehatan, dan kehidupan keagamaan) di masyarakat. Adapun konsep dasar Perubahan Sosial menyangkut tiga hal, yaitu:

1. Studi mengenai perbedaan.
2. Studi dilakukan pada waktu yang berbeda (perbandingan).
3. Pengamatan pada sistem sosial yang sama.

Artinya bahwa untuk melakukan studi perubahan sosial, kita harus melihat adanya perbedaan atau perubahan yang menjadi fokus studi, lalu studi perubahan harus dilihat dalam konteks waktu yang berbeda, objek yang menjadi fokus haruslah objek yang sama sebagai komparasi (Jeratallah&Yogi, 2020: 99).

Realitas perubahan sosial ini dapat dilihat secara langsung di masyarakat. Selain itu, perubahan sosial yang terjadi di masyarakat juga tidak lepas dari adanya kontak sosial yang terjadi. Di mana pada masa pandemi ini kontak sosial mulai dibatasi dengan diberlakukannya *social distancing* atau *physical distancing*. Menurut Soeryono Soekanto (2002: 65), kontak sosial berasal dari bahasa latin *con* atau *cum* (bersama-sama) dan *tango* (menyentuh), jadi, artinya secara harfiah adalah bersama-sama menyentuh. Secara fisik, kontak sosial baru terjadi apabila adanya hubungan fisik, sebagai gejala sosial hal itu bukan semata-mata hubungan badaniah, karena hubungan sosial terjadi tidak saja secara menyentuh seseorang, namun orang dapat berhubungan dengan orang lain tanpa harus menyentuhnya. Misalnya kontak sosial biasanya terjadi ketika seseorang berbicara dan bertatap muka dengan orang lain, akan tetapi kontak sosial juga dapat dilakukan dengan menggunakan sarana teknologi.

Menurut Stephen W. Littlejohn dalam bukunya *Theories of Human Communication* (Sendjaja, 2014), terdapat tiga pendekatan dalam berkomunikasi antarmanusia. Pertama, Pendekatan *scientific* (ilmiah-empiris). Pendekatan ini berlaku di kalangan ahli ilmu eksakta. Cara pandang yang menekankan unsur objektivitas dan pemisahan antara *known* (objek yang ingin diketahui dan diteliti) serta *knower* (subjek pelaku atau pengamat).

Kedua, ada Pendekatan *Humanistic* (Humaniora Interpretatif). Ini merupakan pendekatan dengan cara pandang yang mengasosiasikan dengan prinsip subjektivitas. Manusia mengamati sikap dan perilaku orang-orang di sekitarnya, membaur dan melibatkan diri secara aktif dalam kehidupan orang-orang di lingkungannya. Dan yang ketiga adalah Pendekatan *Social Sciences* (Ilmu Sosial). Ini merupakan gabungan dari pendekatan *scientific* dan *humanistic* dimana objek studinya adalah kehidupan manusia, termasuk didalamnya memahami tingkah laku manusia. Di sinilah terlihat dengan adanya kondisi pandemi Covid-19 jauh dari ideal hubungan manusia secara humanis. Dengan diberlakukannya *social distancing* bukan berarti kita tidak dapat bersosialisasi seperti pada umumnya. Kita tetap dapat bersosialisasi melalui berbagai media di era digitalisasi sebagai sarana alternatif untuk berinteraksi sosial. Peran media menjadi sangat penting khususnya dalam memberikan edukatif, informatif, dan persuasif. Yang mana apabila dalam perubahan sosial yang terjadi pada pandemi Covid-19 ini, media menjadi sarana yang sangat rawan dalam penyebaran *hoax* di masyarakat.

Berbagai kebijakan telah diterapkan oleh pemerintah sebagai langkah yang ditempuh untuk mengurangi melonjaknya tingkat persebaran Covid-19 ini, diantara seperti Karantina, *Lockdown*, dan PSBB hingga kebijakan *New Normal* yang mulai diberlakukan di beberapa daerah. Situasi ini merupakan dampak atas adanya Covid-19 ini menyebabkan ikatan sosial di dalam masyarakat menjadi renggang. Kebijakan *lockdown* menggunakan prinsip *distancing* nyatanya juga tidak hanya membuat masyarakat menjauh secara fisik, tetapi juga lingkup sosial. Secara tidak sadar masyarakat telah terjebak ke dalam jarak fisik maupun sosial yang sangat signifikan. Dikhawatirkan jarak sosial dan fisik yang terjadi ini akan menjadi sesuatu yang normal. Sehingga kondisi ini dikhawatirkan akan semakin menegaskan fungsi teknologi dalam menjadi perantara interaksi manusia. Interaksi manusia secara langsung selanjutnya akan tergantikan oleh interaksi tidak langsung. Hal ini didukung dengan hadirnya tantangan-tantangan peradaban yang baru, mulai dari ancaman pengawasan pemerintah via teknologi, meningkatnya kontrol pemerintah atas privasi publik, hingga fenomena hilangnya solidaritas global dalam menghadapi ancaman darurat (Harari 2020).

Jarak sosial yang melebar di masyarakat kemudian memunculkan isu tentang munculnya "*New Normal*" (Naughton 2020). Kondisi ini dianggap sebagai bentuk miniatur pola interaksi masyarakat di masa depan. Sebagai akibatnya, muncul kekhawatiran bahwa kondisi "*New Normal*" ini akan membawa kita pada kepada bentuk-bentuk konflik baru yang akan muncul.

Menurut Lewis Coser, ia berpendapat bahwa konflik dapat mendorong terjadinya perubahan sosial yang bersifat konstruktif. Ia menekankan bahwa: “*Conflict within and between groups in a society can prevent accommodations and habitual relations from progressively impoverishing creativity.*” (Coser, 1957).

Dalam ancaman stagnasi yang mencakup sistem sosial, konflik sosial juga mampu meningkatkan kewaspadaan, pengamatan, kemampuan refleksi, serta memicu penemuan-penemuan baru yang diinisiasi oleh manusia (Dewey 1930). Manusia merupakan makhluk hidup yang memiliki kemampuan beradaptasi untuk mempertahankan kehidupannya di tengah berbagai perubahan. Kemampuan adaptasi inilah yang akan diuji melalui serangkaian perubahan sosial dan ekspresi konflik yang melingkupinya. Konflik dapat membuka peluang bagi munculnya norma-norma dan institusi-institusi sosial yang baru, khususnya pada bidang-bidang yang terkait dengan ekonomi dan teknologi, khususnya pada media komunikasi digital (Coser, *Social Conflict and the Theory of Social Change*, 1957). Kedua bidang tersebut memang relatif lebih dinamis sekaligus adaptif dalam menyikapi perubahan sosial. Dengan adanya kebijakan *new normal* akan membawa perubahan sosial yang cukup besar bagi masyarakat. Hal ini sesuai dengan pendapat yang dikemukakan oleh Coser yang berpacu pada pemikiran Karl Marx ia menggaris bawahi bahwa perubahan yang terjadi harus dibedakan menjadi dua kelompok, yaitu perubahan di dalam sistem atau perubahan sistem itu sendiri (Coser, 1957).

Penutup

Merebaknya wabah Covid-19 di seluruh penjuru dunia memperlihatkan adanya perubahan sosial di struktur masyarakat, khususnya melalui media komunikasi digital. Perubahan sosial ini meliputi cara berkomunikasi dan berinteraksi, cara berpikir, dan berperilaku yang mengakibatkan munculnya potensi-potensi konflik sosial, khususnya di negara-negara yang tidak dapat merespons situasi ini dengan tepat. Dengan adanya anjuran kebijakan *social distancing* atau *physical distancing* telah memberikan banyak perubahan sosial di lapisan masyarakat. Di mana pembatasan sosial ini mengakibatkan terbatasnya interaksi secara langsung dan berbagai kegiatan yang dilakukan diruang fisik dialihkan ke ruang virtual. Oleh karena itu, hal ini menyebabkan adanya peningkatan secara signifikan dalam penggunaan media sosial seperti *WhatsApp*, *Instagram*, *Twitter*, *Facebook*, *Google Classroom*, dan *Zoom*. Yang saat ini banyak dijadikan alternatif dalam kegiatan berkomunikasi, belajar, dan bekerja. Dari hal tersebut sudah dapat dilihat bahwasanya adanya pandemi Covid-19 ini memberikan dampak yang besar dalam keberlangsungan hidup

manusia saat ini. Berkaitan dengan kebijakan era *new normal* yang sudah mulai diberlakukan ini dikhawatirkan memicu adanya perubahan sosial dalam skala besar. Akan tetapi kita tidak perlu terlalu takut akan situasi yang ada kita dituntun untuk dapat beradaptasi dengan Covid-19 ini. Salah satunya dengan menerapkan protokol kesehatan yang sudah dihimbaungkan dan ditetapkan oleh pemerintah supaya aktivitas yang ada dapat dilakukan seperti biasanya. Seperti kegiatan belajar yang dilakukan secara daring atau *online* sebagai salah satu upaya untuk tetap berlangsungnya kegiatan belajar dan mengajar dari rumah. Harapannya dengan adanya riset ini pembaca dapat memahami langkah apa saja yang tepat untuk diterapkan dalam kondisi Covid-19 ini. Serta agar dapat mengetahui perubahan sosial apa saja yang ditimbulkan dari adanya peningkatan penggunaan oleh media sosial yang ada. Dengan adanya media sosial ini juga diharapkan dapat digunakan secara maksimal untuk menunjang berbagai kegiatan yang dilakukan, baik sebelum maupun sesudah adanya pandemi Covid-19 ini dengan mengambil berbagai nilai-nilai positif yang ada didalamnya.

Daftar Pustaka

Buku :

- Bungin & Burhan, *Sosiologi Komunikasi. Teori, Paradigma, dan Diskursus Teknologi Komunikasi di Masyarakat*. Edisi 1. Kencana Prenada Media Group. Jakarta : 2014.
- Martono, Nanang. 2011. *Sosiologi Perubahan Sosial. Perspektif Klasik, Modern, Postmodern, dan Psikolonial*. Edisi 1. PT Raja Grafindo Persada: Jakarta.

Jurnal :

- Drs Media Sucahya, *Jurnal Komunikasi : Teknologi Komunikasi Dan Media* Vol. 2, No. 1, Jan April 2013
- Ellya Rosana: *Modernisasi Dan Perubahan Jurnal TAPIS* Vol.7 No.12 Januari-Juli 2011
- Jeratallah Aram Dani dan Yogi Mediantara, *Jurnal PERSEPSI: Communication Journal*, 2020, *Covid-19 Dan Perubahan Komunikasi Sosial* Vol 3 No. 1
- Nur Indah Ariyani dan Okta Hadi Nurcahyono, *Jurnal Analisa Sosiologi : Digitalisasi Pasar*
- Putu Agung Nara Indra Prima Satya, *Jurnal COVID- 19 dan Potensi Konflik Sosial*
- Rochani Nani Rahayu & Sensusiyati, *Jurnal Ekonomi, Sosial & Humaniora : Analisis Berita Hoax Covid - 19 Di Media Sosial Di Indonesia* Vol.01 No. 09 April 2020.
- Roida Pakpahan & Yuni Fitriani, *Jurnal JASAMAR : Analisa Pemanfaatan Teknologi Informasi Dalam Pembelajaran Jarak Jauh Di Tengah Pandemi Virus Corona Covid-19* Vol. 4 No.2 Mei 2020

Artikel dalam Internet :

- (CNN Indonesia, 10 April 2020, *Penolakan Jenazah (Perubahan Sosial)*)

(www.mofa.go.kr, Maret 2020)

(Kominfo, 23 Januari 2020)

Website :

<https://m.detik.com/inet/cyberlife/d-4986463/hasil-analisis-perubahan-penggunaan-internet-efek-dari-pandemi-Corona>

https://radarjember.jawapos.com/pascasarjana_iain/18/06/2020/migrasi-digital-di-era-new-normal/amp/

https://www.kominfo.go.id/content/detail/25687/mari-gunakan-ruang-digital-dengan-cerdas-di-tengah-pandemi-Covid-19/0/berita_satker

<https://andi.link/hootsuite-we-are-social-indonesian-digital-report-2020/>

<https://websindo.com/indonesia-digital-2019-media-sosial/>

Penanganan Covid-19 oleh Pemerintah dan Masyarakat

Laisa Matania Firizki

*Prodi Sosiologi,
Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora,
UIN Sunan Kalijaga
Email: laisamataniaf@gmail.com*

Pendahuluan

Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) sebagai badan otoritas kesehatan dunia pada tanggal 11 Februari 2020 telah menetapkan bahwa virus yang bertipe Sars-CoV2 atau Covid-19, merupakan Pandemi. Artinya bahwa virus ini sudah menjadi wabah yang menggejala secara global, bukan hanya menghinggapi satu negara atau benua saja. Setidaknya lebih dari 100 negara dari berbagai benua telah terjangkit virus ini, karena itulah organisasi kesehatan dunia menetakannya sebagai pandemi yang sebelumnya hanya berada pada status endemik.

SARS Coronavirus (SARS-CoV) atau biasa disebut dengan Covid-19, pertama kali muncul pada tahun 2003 di kota Wuhan, China. Covid-19 merupakan salah satu jenis dari keluarga besar virus yang menyebabkan penyakit pada manusia dan juga hewan. Virus ini menyerang pada saluran pernafasan manusia, sehingga menyebabkan infeksi pada sistem pernafasan. Dimulai dari penyakit flu biasa hingga penyakit yang sangat serius, seperti *Middle East Respiratory Syndrome* (MERS) dan Sindrom Pernafasan Akut Berat / *Severe Acute Respiratory Syndrome* (SARS) yang dapat menyebabkan kematian. Covid-19 ini disebabkan oleh SARS Cov2 yang mana virus ini sama – sama disebabkan oleh Coronaviruss yang sama terjadi pada tahun 2003 silam, namun jenis virus yang menyebabkannya berbeda. Gejalanya sangat mirip dengan SARS, walau Covid-19 mempunyai kasus lebih banyak dibandingkan dengan SARS, namun angka kematian yang diakibatkan oleh SARS jauh lebih tinggi daripada Covid-19. Selain itu Covid-19 juga memiliki angka penyebaran yang cukup luas dan terbilang sangat cepat ke berbagai negara dibandingkan dengan SARS.

Gejala umum yang muncul akibat Covid-19 ini berupa demam tinggi lebih dari 38 derajat *Celcius*, mengalami sesak nafas, dan batuk kering.

Jika selama 14 hari seseorang mengalami gejala sebagai berikut, dan tercatat pernah melakukan perjalanan ke negara-negara yang terjangkit, dan sempat melakukan kontak fisik dengan penderita berstatus positif, maka seseorang tersebut akan dilakukan uji laboratorium untuk memastikan diagnosis apakah seseorang tersebut juga ikut terjangkit Covid-19.

Bahaya dari virus ini hampir sama saja dengan penyakit pernapasan lainnya. Mulai dari gejala ringan dari batuk, sakit tenggorokan, pilek, dan demam. Terdapat sekitar 80% kasus membaik/pulih tanpa adanya perawatan khusus. 1 dari setiap 6 orang dimungkinkan menderita penyakit yang parah, seperti disertai pneumonia atau adanya kesulitan dalam bernafas, yang biasanya muncul secara bertahap. Meskipun virus ini mempunyai angka kematian yang tidak terlalu tinggi yaitu sekitar 3% saja, namun bagi sebagian orang yang memiliki penyakit bawaan atau adanya catatan medis sebelumnya seperti diabetes, tekanan darah tinggi dan penyakit jantung, dan juga untuk orang – orang yang sudah memiliki usia lanjut atau lansia biasanya sangat rentan untuk menjadi sakit yang parah, bahkan sampai menyebabkan kematian.

Penyakit yang disebabkan oleh virus Covid-19 menular melalui tetesan kecil (droplet) yang keluar dari hidung atau mulut pada saat batuk atau bersin. Seseorang dapat terinfeksi dengan mudah oleh virus ini jika adanya tetesan droplet di permukaan benda apa saja kemudian seseorang menyentuhnya, setelah itu mereka menyentuh area mata, hidung, dan mulut atau segitiga wajah tanpa mencuci tangan atau membersihkan tangannya. Atau adanya ketidaksengajaan yang ditimbulkan ketika seseorang menghirup droplet dari penderita positif Covid-19. Organisasi Dunia (WHO) menyatakan bagi seseorang yang tidak memiliki gejala Covid-19 sama sekali sangat kecil resiko untuk penularannya. Akan tetapi tidak sedikit orang yang teridentifikasi Covid-19 hanya mengalami gejala-gejala ringan, seperti batuk ringan, atau bahkan tidak adanya keluhan sakit yang mungkin terjadi pada awal penyakit.

Hampir sama dengan *Influenza* biasa, Covid-19 juga memiliki gangguan infeksi pada saluran pernafasan seperti batuk, demam, dan pilek. Dengan persamaan gejala tersebut, *influenza* biasa dengan Covid-19 memiliki perbedaan yaitu virus yang menyebabkan kedua penyakit tersebut. Pemeriksaan laboratorium sangatlah membantu untuk mendeteksi adanya gejala-gejala tersebut. Waktu yang diperlukan sejak tertular/terinfeksi hingga munculnya gejala disebut masa inkubasi. Untuk saat ini masa inkubasi Covid-19 diperkirakan antara 1 sampai 14 hari, dan bisa saja berubah sewaktu-waktu sesuai dengan perkembangan kasus.

Dilihat dengan teori milik Talcot Parson yaitu Struktural Fungsional,

yang mengasumsi dasar dari teori ini ialah perspektif di dalam Sosiologi yang memandang masyarakat sebagai satu sistem yang terdiri dari bagian-bagian yang saling berhubungan satu sama lain dan bagian yang satu tidak dapat berfungsi tanpa adanya hubungan dengan yang lainnya. Kemudian perubahan yang terjadi pada satu bagian akan menyebabkan ketidakseimbangan dan pada gilirannya akan menciptakan perubahan pada bagian lainnya. (Bernard Raho, 2007). Dari teori tersebut dapat dilihat bahwa adanya kebijakan pemerintah dengan masyarakat mempunyai keterkaitan atau saling berhubungan. Jika masyarakat mau dan mematuhi adanya kebijakan tersebut, maka terjalinlah sebuah keselarasan harmoni antara pemerintah dengan masyarakat. Namun, jika masyarakat tidak mau mematuhi dan menaati kebijakan pemerintah tersebut maka terjadi ketidakseimbangan. Ketidakseimbangan tersebut berupa semakin luasnya penyebaran Covid-19 ini.

Respon Masyarakat Mengenai Fenomena *Lockdown*

Fenomena *lockdown* atau lebih sering disebut karantina wilayah oleh sebagian orang kini tengah gencar – gencarnya dilakukan. Dengan maksud agar terputusnya mata rantai penyebaran Covid-19 ini. Dalam hal ini pemerintah melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan (UUKK) dan Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat *Coronavirus Disease* 2019 (Covid-19) melakukan *lockdown* di sejumlah wilayah Indonesia yang didapati mengalami wabah Corona cukup banyak. Namun hal ini justru melahirkan dilema besar pada persepsi masyarakat, didasari oleh inisiatif dan kekhawatiran masyarakat beramai-ramai melakukan *lockdown* lokal pada daerahnya masing-masing tanpa menunggu keputusan dari pemerintah pusat, bahwa mungkin akan ada *lockdown* berskala nasional seperti sejumlah negara lain yang lebih parah penyebarannya (Muhammad, 2020).

Namun, dengan kenyataan ini masih banyak masyarakat yang mengartikan bahwa istilah *lockdown* hanya berdiam diri di rumah tanpa melakukan kegiatan yang pastinya jauh lebih bermanfaat. Sehingga dengan fenomena tersebut mengakibatkan masalah baru yang tidak kalah gawatnya, yaitu wabah kelaparan. Yang pada akhirnya memunculkan berbagai macam penolakan dari sebagian masyarakat yang bekerja sebagai buruh atau mereka yang hanya bisa makan jika mereka bekerja di luar rumah.

Akan tetapi tidak sedikit pula masyarakat yang mendukung dengan adanya kebijakan ini. Dikarenakan kebijakan ini mengharuskan masyarakat untuk mengurangi kegiatan di luar rumah, pemerintah juga menciptakan kebijakan

WFH (*Work From Home*). Yang mana kebijakan ini sangat menguntungkan bagi mereka yang waktu bekerjanya dihabiskan di luar rumah (PNS, Perkantoran, dan lain-lain) sehingga semakin banyaknya waktu yang tercipta untuk keluarga.

Upaya Pencegahan Covid-19 oleh Pemerintah

Respon yang begitu cepat dan tanggap oleh WHO, dapat dipahami bahwa dunia sudah beberapa kali mengalami kejadian penyebaran virus yang menggejala secara global sebelumnya. WHO tidak mau lagi kecolongan dalam meluasnya korban dan bertambahnya korban jiwa akibat virus ini. Setidaknya ada enam kejadian serupa sebelum Covid-19 ini mendunia, antara lain; *Cacar, HIV, Ebola, Flu Babi, Black Death, Flu Spanyol, dan Justinian*. Semua kasus pandemi tersebut menelan korban ratusan ribu hingga jutaan jiwa manusia.

Sejak menetapkan sebagai kejadian pandemi, WHO semakin gencar untuk mengampanyekan cara – cara pencegahan dan penanganan dari tertularnya virus ini. Banyak negara yang setelahnya mengikuti instruksi dari WHO ini secara cepat dan tanggap, seperti negara – negara Eropa dan sebagian negara Asia. Termasuk didalamnya Arab Saudi yang mulai tanggal 27 Februari resmi menutup akses dari Luar Negeri untuk masuk ke negaranya, termasuk para jamaah umrah yang datang dari Indonesia.

Sepanjang bulan Februari sejak awal kemunculan virus ini setidaknya setelah dinaikkan statusnya menjadi pandemi pada 11 Februari silam, pemerintah Indonesia belum juga mengambil langkah apapun terkait penanganan penyebaran virus Corona ini. Namun seiring dengan berjalannya waktu, maka penyebaran virus Covid-19 semakin meluas sehingga mengharuskan pemerintah untuk bergerak cepat dalam penanganan penyebaran Virus Covid-19 ini. Adapun upaya pencegahan yang dilakukan oleh pemerintah adalah sebagai berikut:

1. Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB)

PSBB atau Pembatasan Sosial Berskala Besar merupakan kebijakan yang diterapkan pemerintah guna memutus mata rantai penyebaran Covid-19. Kebijakan ini berupa adanya pembatasan untuk segala macam kegiatan. Caranya yaitu dengan membatasi jumlah orang dan adanya pengaturan jarak antar orang satu dengan yang lainnya.

2. *Lockdown*

Menurut *Economic Times*, *lockdown* merupakan salah satu protokol darurat yang mencegah orang meninggalkan area tertentu. Kebijakan

ini dilakukan dengan menutup semua kegiatan yang tidak penting. Namun kendati demikian, pemerintah masih memberi kelonggaran bagi masyarakat, agar Pasar, Rumah Sakit, *Bank* untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Namun dengan tetap dengan adanya pembatasan yang tidak menimbulkan kerumunan dalam jumlah yang banyak.

3. Kebijakan KLB (Kejadian Luar Biasa)

Adalah kegiatan yang dilakukan untuk menangani penderita, mencegah perluasan kejadian dan timbulnya penderita atau kematian baru pada suatu kejadian luar biasa yang sedang terjadi.

Mengingat belum ditemukannya vaksin untuk penyembuhan penyakit yang disebabkan oleh Covid-19 ini ada beberapa pencegahan guna membantu mengurangi bertambahnya kasus Covid-19 serta menurunkan kurva pelonjakan kasus Covid-19 ini. Ada beberapa cara untuk mencegah tertularnya Covid-19. Selain itu juga, Pemerintah mengupayakan masyarakat turut andil dalam pencegahan penyebaran virus Covid-19 ini tidak semakin meluas. Yaitu dengan cara:

1. Selalu menjaga kesehatan dengan berolahraga guna meningkatkan sistem imunitas/ kekebalan tubuh.
2. Mencuci tangan dengan air dan sabun maupun *handrub* yang berbasis alkohol. Kegiatan mencuci tangan dengan air dan sabun memungkinkan membunuh virus yang ada di tangan setelah melakukan sentuhan benda-benda mati.
3. Saat batuk bersin, selalu mengusahakan untuk menutup mulut dengan tisu atau bahu bagian atas. Sangat tidak dianjurkan untuk menggunakan tangan.
4. Menghindari kontak langsung dengan orang lain, jika keadaan memaksa untuk bertemu usahakan untuk memberi jarak minimal 1 meter. Menghindari kerumunan dan juga membuat kerumunan dalam jumlah yang besar.
5. Menghindari untuk menyentuh mata, hidung, dan mulut atau area segitiga wajah, karna virus dengan sangat mudah masuk ke dalam tubuh jika tangan menyentuh area tersebut.
6. Selalu menggunakan masker penutup mulut dan hidung saat sakit ataupun sedang berada di luar rumah (jika terpaksa melakukan berpergian).
7. Tisu dan masker hanya bersifat sekali pakai, setelah menggunakannya usahakan langsung membuangnya ke tempat sampah kemudian

- langsung mencuci tangan atau gunakan *handsanitizer*.
8. Menghindari bepergian ke daerah – daerah yang sudah maupun banyak terdapat kasus positif Covid-19 ini.
 9. Tidak melakukan aktivitas di luar rumah jika sedang dalam keadaan tidak enak badan, terlebih jika mengalami gejala batuk, demam, dan sulit bernapas.

Peran Hukum dalam Menertibkan Masyarakat di Tengah Pandemi Covid-19

Dari segi perundang-undangan, Indonesia memiliki 2 (dua) undang-undang yang tegas dalam mengatur spesifikasi penanganan wabah yaitu UU Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (UU 4/1984) dan UU Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan (UU 6/2018).

Kedua instrumen dimaksud secara regulasi belum terlalu lengkap diatur oleh peraturan teknis dibawahnya, terutama UU 6/2018. Hal ini tentu wajib menjadi prioritas pemerintah. Ketentuan pada UU 4/1984 khusus di konsiderans menimbanginya memberikan landasan mengapa undang-undang ini terbit. Salah satunya antisipasi perkembangan iptek dan lalulintas internasional. Sedangkan pada pasal-pasalny merumuskan ketentuan strategis. Seperti mendefinisikan wabah penyakit menular sebagai “kejadian berjangkitnya suatu penyakit menular dalam masyarakat yang jumlah penderitanya meningkat secara nyata melebihi daripada keadaan yang lazim pada waktu dan daerah tertentu serta dapat menimbulkan malapetaka.” (Pasal 1 huruf a) (Mihradi, 2020).

Dalam Pasal 3 menjelaskan menteri bisa menetapkan apa saja jenis penyakitnya. Upaya untuk penanggulangannya pun beraneka bentuk, seperti pemeriksaan, pengobatan, perawatan dan isolasi penderita, termasuk tindakan kekarantinaan (*lockdown*). Selain itu, dapat melakukan penyuluhan kepada masyarakat (Pasal 5 ayat (1)). Menariknya, Pasal 6 ayat (1) UU 4/1984 memuat aspek demokrasi dengan pernyataan “upaya penanggulangan wabah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dilakukan dengan mengikutsertakan masyarakat secara aktif.” Selain itu, yang menarik lainnya pada Pasal 8 ayat (1) disebutkan, mereka yang mengalami kerugian harta benda akibat penanggulangan wabah dapat diberikan ganti rugi. Agar regulasi efektif, Pasal 14 mengatur pula siapa saja yang menghalangi penanganan wabah baik sengaja maupun alpa dipidana (bila dengan sengaja diancam pidana paling lama satu tahun dan/atau denda setinggi-tingginya satu juta dan apabila alpa, pidana selama lamanya enam bulan dan/atau denda setinggi-tingginya lima

ratus ribu). Apabila pilihan pemerintah melakukan Kekarantinaan Kesehatan maka diatur di UU 6/2018. Kekarantinaan kesehatan ini di pintu masuk dan wilayah terpadu merupakan kewenangan Pemerintah Pusat, namun dapat melibatkan Pemerintah Daerah (Pasal 5 ayat (1) dan (2)). Penyiapan sumber dayanya tanggungjawab Pemerintah Pusat dan Daerah (Pasal 6). Pada Pasal 9 ayat (1) setiap orang wajib mematuhi penyelenggaraan Kekarantinaan Kesehatan. Jika tidak mematuhi atau menghalang-halangi diancam pidana paling lama satu tahun dan atau denda paling banyak seratus juta rupiah (Pasal 93). Pada Pasal 15 diatur Kekarantinaan Kesehatan di pintu masuk dan wilayah serta tindakan Kekarantinaan Kesehatan dapat berupa isolasi, pembatasan sosial skala besar, pemberian vaksinasi, dan sebagainya.

Sedangkan di Pasal 49 dalam rangka mitigasi dibagi jenis karantina, ada karantina rumah, karantina wilayah, karantina rumah sakit atau Pembatasan Sosial Berskala Besar.

Pemerintah Indonesia telah menetapkan kedaruratan kesehatan masyarakat melalui keputusan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana. Selain itu pemerintah juga membentuk Satuan Gugus Tugas (Satgas) untuk menanggulangi wabah Covid-19 ini. Hal ini dimungkinkan oleh Pasal 10 UU 6/2018. Berkaca dari cepat pulihnya wabah di kota Wuhan di Negara China, karantina (*lockdown*) menjadi pilihan paling efektif untuk dilakukan daripada *rapid test* yang sama dilakukan di Korea Selatan. Adapun upaya yang sudah dilakukan oleh Pemerintah Indonesia sendiri adalah adanya Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Seperti diliburkannya pekerja dan pelajar, pembatasan kegiatan keagamaan, dan juga pembatasan kegiatan di tempat atau fasilitas umum. Hal ini diatur dalam Undang Undang No 6 tahun 2008, pasal 59 ayat (2) (Mihradi, 2020).

Jika dilihat secara substansi bahwa hukum itu ada semata-mata untuk mengatur dan melindungi kehidupan bermasyarakat. Oleh karena itulah hukum memiliki keberlakuannya. Pemaknaan hukum sebagai sesuatu yang mewajibkan akan memberikan dampak bagi praktik hukum dengan semakin meningkatnya kepatuhan hukum yang memang dilandasi oleh penerimaan atau internalisasi secara evaluatif oleh tiap-tiap individu sebagai anggota masyarakat. Hukum memanglah cerminan perlindungan kepentingan masyarakat, maka pada dasarnya hukum tersebut memiliki sifat mewajibkan bagi masyarakat yang bermakna kewajiban hukum dalam sudut pandang intern sehingga masyarakat secara batiniah memiliki kewajiban untuk mentaati hukum karena mereka menyadari sebenar-benarnya bahwa hukum itu ada untuk melindungi kepentingan masyarakat.

Penutup

Penyakit saluran pernafasan yang disebabkan oleh virus yakni Virus Covid-19 (SARS Coronavirus (SARS-CoV)), pertama kali dilaporkan pada tahun 2019 lalu virus ini dikonfirmasi oleh Negara China pada 8 Desember lalu. Virus ini pertama kali muncul di Negara China tepatnya di Kota Wuhan. Kantor Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) di China melaporkan adanya penyakit baru sejenis *pneumonia* yang tidak diketahui apa penyebabnya. Namun virus ini menyerang sistem pernafasan yang mengakibatkan penyakit akut bahkan sampai pada kematian.

Seiring bertambahnya hari, pasien yang terjangkit virus Covid-19 ini juga kian bertambah tidak terkecuali di Indonesia. Jumlah kasus positif tercatat sebanyak 2.491 kasus, dengan jumlah pasien meninggal sebanyak 209 dan 192 dinyatakan sembuh. Pemerintah memiliki peran penting atas terjadinya wabah ini. Yaitu dengan melakukan kebijakan-kebijakan demi mengurangi melonjaknya pertambahan pasien positif Covid-19.

Sebagian besar wilayah di Indonesia melakukan kebijakan-kebijakan mulai dari KLB (Kejadian Luar Biasa) hingga *lockdown* (karantina wilayah) di berbagai kota persebaran Dunia termasuk Indonesia guna mengurangi tingkat persebaran virus yang semakin meninggi. Virus ini mulai mendunia sejak awal kemunculannya di Negara China pada bulan Februari 2019 lalu. Berbagai macam kebijakan-kebijakan telah dilakukan guna mencegah dan atau mengurangi pelonjakan kenaikan pasien yang terjangkit Covid-19. Mulai pencegahan dari diri sendiri hingga adanya protokol kesehatan yang telah ditetapkan oleh perundang-undangandari Pemerintahan Pusat yang melibatkan Pemerintahan daerah.

Menurut hasil penelitian ini, kebijakan yang dilakukan pemerintah dirasa sudah cukup baik meskipun pemerintah dinilai kurang cepat tanggap dalam penanganan masalah Covid-19 ini. Selain itu juga, ketentuan sanksi pidana dalam Permenhub No. PM 25 Tahun 2020 mengacu pada UU No. Tahun 2018 yang dapat dikenakan terhadap siapapun yang tidak mematuhi atau menghalang-halangi penyelenggaraan Kekarantinaan Kesehatan. Jadi akan tetap ada sanksi bagi setiap pelanggar.

Daftar Pustaka

Buku:

Mohamad, Kartono. (2006). *Flu Burng*. (Adapted from www.influenzareport.com by Bernd Sebastian kamps, dkk.)

Raho, Bernard, SVD. *Teori Sosiologi Modern*. (Jakarta: Prestasi Pustaka 2007)

Artikel dan Surat Kabar:

Aknes Novi Febriana, (2017, 2 Desember), *Teori Struktural Fungsionalisme*, diperoleh dari: <http://blog.unnes.ac.id/aknesnovi/2017/12/02/teori-fungsionalisme-struktural/>

Bima Baskara, (2020, 18 April), *Rangkaian Peristiwa Pertama Covid-19*, diperoleh dari: <https://bebas.kompas.id/baca/riset/2020/04/18/rangkaian-peristiwa-pertama-Covid-19>

M Athar Ismail Muzakir, (2020, 08 April), *Benang Merah Lockdown dan Social Distancing*, diperoleh dari: <https://mediaindonesia.com/read/detail/302400-benang-merah-lockdown-dan-social-distancing>

Mihradi Raden Muhammad, (2020, 30 Maret), *Covid-19 dilorong hukum dan demokrasi*, diperoleh dari: <https://nasional.kompas.com/read/2020/03/30/11163581/Covid-19-di-lorong-hukum-dan-demokrasi>

Sarah Okaviani Alam, (2020, 07 Mei), *Jokowi Sebut Beruntung Pilih PSBB, ini bedanya dengan Lockdown*, diperoleh dari: <https://health.detik.com/berita-detikhealth/d-5005637/jokowi-sebut-beruntung-pilih-psbb-ini-bedanya-dengan-lockdown>

Vincentius Gityak, (2020, 22 Juni), *Upaya dan Kebijakan Pemerintah Indonesia Menangani Covid-19*, diperoleh dari: <https://kompaspedia.kompas.id/baca/paparan-topik/upaya-dan-kebijakan-pemerintah-indonesia-menangani-pandemi-Covid-19>

Tulisan Tanpa Pengarang:

(2020), *Update Corona di Indonesia* 29 Mei: 25. 216 Positif, 1.520 Meninggal,6.492. diperoleh dari: <https://www.google.com/amp/s/m.kumparan.com>

Website:

Permenkes: Pedoman Tentang Penyelenggaraan Sistem Kewaspadaan dini Kejadian uar Biasa (KLB). (2004). Tersedia dari: <https://www.persi.or.id/images/regulasi/permenkes/pmk9492004.pdf>

Pneumonia Centenary Commitment (PCC): Informasi Tentang Virus Corona. (2019). Tersedia dari: <http://stoppneumonia.id/informasi-tentang-virus-Corona-novel-Coronavirus/>